



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025



KANTOR BUPATI NATUNA



MASJID AGUNG NATUNA



BRAND NATUNA



PANTAI PIWANG RANAI



PLBN SERASAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
 17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045.
- (3) RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud:

- a. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- (4) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2025 dengan melalui proses sebagai berikut:
- a. pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan, forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan sampai pada tingkat musyawarah rencana pembangunan kabupaten yang menghasilkan rancangan RKPD Tahun 2025; dan
 - b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Naskah RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 Juni 2024



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 358

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	
1.1.	LATAR BELAKANG	I-1
1.2.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-5
1.3.	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-10
1.4.	MAKSUD DAN TUJUAN	I-10
1.5.	SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-11
BAB II.	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1.	KONDISI UMUM DAERAH	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-48
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-124
2.2.	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II-127
2.3.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-309
BAB III.	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
	3.1.1. Kondisi Perekonomian Global, Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna	III-2

3.1.2.	Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau	III-7
3.1.3.	Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kabupaten Natuna	III-11
3.1.4.	Kerangka Ekonomi dan Arah Kebijakan Kabupaten Natuna	III-17
3.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-20
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah	III-20
3.2.2.	Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-23

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026	IV-1
4.1.1.	Visi.....	IV-1
4.1.2.	Misi.....	IV-2
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-3
4.2.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-6
4.3.	Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	IV-10
4.4.	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-13
4.4.1.	Keterkaitan Misi RPJPD Dengan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-19
4.4.2.	Keterkaitan Misi RPJMD Dengan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-19

4.4.3.	Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025	IV-20
4.4.4.	Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2025, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-22
4.4.5.	Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2025 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-24
4.4.6.	Keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025	IV-29
4.4.7.	Prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah pada RKPD 2025.....	IV-32
4.4.8.	Program Daerah pada RKPD 2025 mendukung 7 Prioritas Nasional.....	IV-38
4.5	Pendekatan Holistik - Tematik, Integratif dan Spasial	IV-43
4.6	Sustainable Development Goals (SDG's)	IV-96
4.7	Inovasi Daerah	IV-98
4.8	Pembangunan Spesifik Daerah	IV-100

BAB V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1

BAB VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII.	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel. T-II.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan	II-3
Tabel. T-II.2	Letak Astronomis Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan	II-4
Tabel. T-II.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-26
Tabel. T-II.4	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023 (Jiwa/Km ²)	II-27
Tabel. T-II.5	Evaluasi Pencapaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023	II-27
Tabel. T-II.6	PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)	II-28
Tabel. T-II.7	PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)	II-29
Tabel. T-II.8	Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen)	II-30
Tabel. T-II.9	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas)	II-32
Tabel. T-II.10	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 –	II-33

2023

Tabel. T-II.11	Nilai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Year on Year (YoY) Tahun 2023	II-34
Tabel. T-II.12	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-38
Tabel. T-II.13	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-38
Tabel. T-II.14	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna, 2019 – 2023	II-39
Tabel. T-II.15	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Natuna, 2019 – 2023	II-40
Tabel. T-II.16	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-40
Tabel. T-II.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natun 2019-2023 (persen)	II-42
Tabel. T-II.18	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-42

Tabel. T-II.19	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-43
Tabel. T-II.20	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-44
Tabel. T-II.21	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-44
Tabel. T-II.22	Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-45
Tabel. T-II.23	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-45
Tabel. T-II.24	Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	II-49
Tabel. T-II.25	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2025	II-52
Tabel. T-II.26	Banyaknya Sekolah di Kabupaten Natuna, 2019- 2023 (dalam Unit)	II-53
Tabel. T-II.27	Rasio Guru-Murid di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-53

Tabel. T-II.28	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angla Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023	II-54
Tabel. T-II.29	Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	II-55
Tabel. T-II.30	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2023	II-55
Tabel. T-II.31	Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-58
Tabel. T-II.32	Jumlah Tenaga Dokter dan Paramedis Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna, 2019-2023	II-58
Tabel. T-II.33	Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	II-59
Tabel. T-II.34	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	II-60
Tabel. T-II.35	Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan dan Jenis Permukaan di Kabupaten Natuna, Tahun 2023 (Km)	II-63
Tabel. T-II.36	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan, Tahun 2023 (Km)	II-63
Tabel. T-II.37	Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023	II-64
Tabel. T-II.38	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023	II-64

Tabel. T-II.39	Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Natuna, 2019 - 2023	II-66
Tabel. T-II.40	Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Natuna, 2019 – 2023	II-66
Tabel. T-II.41	Capaian Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023	II-67
Tabel. T-II.42	Capaian Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023	II-68
Tabel. T-II.43	Capaian Indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023	II-70
Tabel. T-II.44	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tahun 2023	II-70
Tabel. T-II.45	Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2023	II-74
Tabel. T-II.46	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2023	II-75
Tabel. T-II.47	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023	II-78
Tabel. T-II.48	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023	II-81

Tabel. T-II.49	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II-82
Tabel. T-II.50	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023	II-84
Tabel. T-II.51	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2023	II-86
Tabel. T-II.52	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2023	II-87
Tabel. T-II.53	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023	II-88
Tabel. T-II.54	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	II-89
Tabel. T-II.55	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023	II-90
Tabel. T-II.56	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023	II-91
Tabel. T-II.57	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2023	II-95

Tabel. T-II.58	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	II-95
Tabel. T-II.59	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Tahun 2023	II-97
Tabel. T-II.60	Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Natuna 2020- 2023	II-100
Tabel. T-II.61	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2023	II-101
Tabel. T-II.62	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023	II-102
Tabel. T-II.63	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2023	II-103
Tabel. T-II.64	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2023	II-103
Tabel. T-II.65	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2023	II-104
Tabel. T-II.66	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2023	II-105
Tabel. T-II.67	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun	II-105

	2023	
Tabel. T-II.68	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	II-107
Tabel. T-II.69	Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2023	II-108
Tabel. T-II.70	Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2023 (lanjutan)	II-108
Tabel. T-II.71	Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2023 (lanjutan)	II-109
Tabel. T-II.72	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2023	II-110
Tabel. T-II.73	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2023	II-112
Tabel. T-II.74	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2023	II-114
Tabel. T-II.75	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2023	II-116
Tabel. T-II.76	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2023	II-117
Tabel. T-II.77	Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Sekretariat Daerah Tahun 2023	II-119

Tabel. T-II.78	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna Tahun 2020-2023	II-120
Tabel. T-II.79	Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2023	II-120
Tabel. T-II.80	Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2023	II-121
Tabel. T-II.81	Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-122
Tabel. T-II.82	Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2023	II-122
Tabel. T-II.83	Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pengelolaan Perbatasan Tahun 2023	II-123
Tabel. T-II.84	Evaluasi Pencapaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun 2023	II-123
Tabel. T-II.85	Evaluasi Pencapaian Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023	II-124
Tabel. T-II.86	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (Milyar Rupiah)	II-126
Tabel. T-II.87	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023 (%)	II-127
Tabel. T-II.88	PDRB per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-129
Tabel. T-II.89	Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023	II-131

Tabel. T-II.90	Angka Literasi/ Numerasi Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan 2023	II-132
Tabel. T-II.91	Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Natuna Tahun 2021-2023	II-137
Tabel. T-II.92	Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-138
Tabel. T-II.93	Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Natuna Tahun 2018-2022	II-138
Tabel. T-II.94	Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023	II-142
Tabel. T-II.95	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-143
Tabel. T-II.96	Evaluasi RKPD Triwulan IV Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-146
Tabel. T-II.97	Laporan Realisasi Keuangan per Sasaran 2023	II-324
Tabel. T-II.98	Keterkaitan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis	II-330
Tabel. T-III.1	Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau	III-11
Tabel. T-III.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas))	III-12
Tabel. T-III.3	Nilai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Year on Year (YoY) Tahun 2023	III-14
Tabel. T-III.4	Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau	III-16

Tabel. T-III.5	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	III-21
Tabel. T-III.6	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	III-22
Tabel. T-III.7	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	III-23
Tabel. T-III.8	Belanja Daerah tahun 2024 dan Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Natuna Tahun 2025	III-27
Tabel. T-III.9	Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Natuna Tahun 2025	III-28
Tabel. T-IV.1	Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2025, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-20
Tabel. T-IV.2	Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2025 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna pada tahun 2025	IV-23
Tabel. T-IV.3	Keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) tahun 2025	IV-23
Tabel. T-IV.4	Prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah pada RKPD 2025	IV-29
Tabel. T-IV.5	Program Daerah pada RKPD 2025 mendukung 7 Prioritas Nasional	IV-37
Tabel. T-IV.6	Permasalahan dan Tindaklanjut pada RKPD 2025	IV-44

Tabel. T-IV.7	Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-60
Tabel. T-IV.8	Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025	IV-64
Tabel. T-IV.9	Program Penurunan Stunting Tahun 2025	IV-71
Tabel. T-IV.10	Target Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025	IV-78
Tabel. T-IV.11	Target Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	IV-78
Tabel. T-IV.12	Target Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025	IV-79
Tabel. T-IV.13	Target Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2025	IV-80
Tabel. T-IV.14	Target Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	IV-81
Tabel. T-IV.15	Target Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025	IV-82
Tabel. T-IV.16	Target Indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025	IV-83
Tabel. T-IV.17	Target Indikator SPM Dinas Sosial Tahun 2025	IV-83
Tabel. T-IV.18	Pendekatan spasial dalam RKPD 2025	IV-87
Tabel. T-IV.19	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna	IV-91
Tabel. T-IV.20	Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan 2023	IV-92
Tabel. T-IV.21	Inovasi Daerah Tahun 2023 yang Diusulkan pada IGA 2024	IV-93

Tabel. T-IV.22	Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pengembangan Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-94
Tabel. T-IV.23	Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pengembangan Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-100
Tabel. T-IV.24	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Program Mengurangi Angka Stunting dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Natuna	IV-143
Tabel. T-IV.25	Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Natuna	IV-155
Tabel. T-IV.26	Program Unggulan Pencapaian Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	IV-180
Tabel. T-IV.27	Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Natuna	IV-188
Tabel. T-IV.28	Sustainable Development Programs (SDG's) dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Natuna	IV-210
Tabel. T-V.1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Natuna	V-2
Tabel. T-VI.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun 2025	VI-2
Tabel. T-VI.2	Indikator Utama Pemerintah (IUP) Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2045	

DAFTAR GAMBAR

Gambar. G-I.1	Pendekatan Top Down dan Bottom Up Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-4
Gambar. G-I.2	Pendekatan Teknokratik Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-4
Gambar. G-I.3	Pendekatan Partisipatif Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-5
Gambar. G-I.4	Pendekatan Politik (Integrasi Janji-Janji Kepala Daerah) Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-6
Gambar. G-I.5	Alur Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-7
Gambar. G-I.6	Tahapan Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-7
Gambar. G-I.7	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota	I-10
Gambar. G-I.8	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-16
Gambar. G-II.1	Peta Kabupaten Natuna	II-2
Gambar. G-II.2	Rencana Pola Ruang Kabupaten Natuna	II-22
Gambar. G-II.3	Kawasan strategis Kabupaten Natuna	II-23
Gambar. G-II.4	Laju Inflasi Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2023	II-37
Gambar. G-II.5	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-126
Gambar. G-II.6	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023	II-131

Gambar. G-II.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2021-2022	II-134
Gambar. G-II.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023	II-135
Gambar. G-II.9	Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna Tahun 2020-2023	II-136
Gambar. G-II.10	Indeks Infrastruktur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023	II-137
Gambar. G-III.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2017-2023	III-3
Gambar. G-III.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran (% , yoy) Tahun 2023	III-3
Gambar. G-III.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha (% , yoy) Tahun 2023	III-4
Gambar. G-III.4	Pertumbuhan Ekonomi Spasial Tahun 2023	III-4
Gambar. G-III.5	Kondisi Perekonomian di Kepulauan Riau Tahun 2023	III-6
Gambar. G-III.6	Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sisi Pengeluaran Tahun 2023	III-7
Gambar. G-III.7	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023	III-7
Gambar. G-III.8	Laju Inflasi Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2023	III-8
Gambar. G-III.9	Pertumbuhan Ekonomi Global 2022-2024	III-13
Gambar. G-III.10	Laju Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2022	III-15
Gambar. G-III.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024	III-17
Gambar. G-IV.1	Tema RKP Tahun 2025	IV-7

Gambar. G-IV.2	Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 berdasarkan Isu Strategis RPJMD Tahun 2021-2026, Prioritas RKP tahun 2025, SDG's, SPM, Isu Strategis Daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-13
Gambar. G-IV.3	Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 Tahap RPJMD Ke-4 dengan Tema Pembangunan Tahun 2025	IV-16
Gambar. G-IV.4	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-16
Gambar. G-IV.5	Keterkaitan Misi RPJPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2025	IV-17
Gambar. G-IV.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026	IV-18
Gambar. G-IV.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	IV-19
Gambar. G-IV.8	Pendekatan Top Down dan Bottom Up Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	IV-62
Gambar. G-IV.9	Pendekatan Teknokratik Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	IV-63
Gambar. G-IV.10	Pendekatan Partisipatif Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	IV-63
Gambar. G-IV.11	Pendekatan Politik (Integrasi Janji-Janji Kepala Daerah) Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	IV-70
Gambar. G-IV.12	Alur Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	IV-65

Gambar. G-IV.13	Tahapan Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025	IV-66
Gambar. G-IV.14	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	IV-69
Gambar. G-IV.15	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Ribuan Orang) Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	IV-70
Gambar. G-IV.16	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	IV-70
Gambar. G-IV.17	Prevalensi Stunting Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	IV-77
Gambar. G-IV.18	Geopark Natuna	IV-96
Gambar. G-IV.19	Peta Geopark Natuna	IV-96
Gambar. G-IV.20	Konsep Pentahelix Pengembangan Geopark (Rosana, 2016)	IV-97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, perumusan masalah, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan, rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahun



berkenaan. Dengan demikian, penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

Dokumen RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN dan RKP tahun 2025. Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai visi “Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”. Dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Natuna 2025 “Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Natuna yang unggul dan Sejahtera”.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu melalui pendekatan atas bawah dan bawah atas (top down dan bottom up), teknokratik, partisipatif dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna tahun 2024.

A. Pendekatan Top Down dan Pendekatan Bottom Up

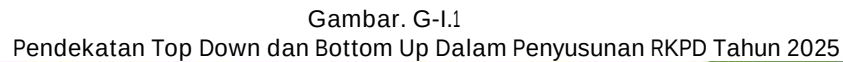
Pendekatan Top down adalah perencanaan yang langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat). Secara umum, pendekatan komunikasi top down memiliki arah komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dibawahnya mulai dari provinsi ke Kabupaten Kota. Pendekatan komunikasi top down ini diterapkan dalam proses pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung keberhasilan pembangunan.



Pendekatan Bottom up adalah perencanaan yang mendengarkan aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran dalam perencanaan oleh pemerintah daerah. Metode bottom up bertujuan agar program-program Pemerintah Kabupaten Natuna dapat menjawab kebutuhan masing-masing daerah baik kecamatan, kelurahan maupun desa dan dapat menjawab segala permasalahan pembangunan.

Pelaksanaan metode bottom up ini adalah dengan cara musyawarah perencanaan pembangunan, yang dimulai dari tahapan musrenbang desa ke tahapan musrenbang kecamatan dan sampai pada tahapan musrenbang kabupaten. Pelaksanaan musrenbang bertujuan ini agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi ke dalam proses perencanaan untuk tahun berikutnya. Agar tujuan ini dapat tercapai maka dalam proses musrenbang mulai dari tahapan musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten harus mengikutsertakan semua kelompok kepentingan atau masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan daerah agar dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan.

Adapun pendekatan top down dan bottom up dalam penyusunan RKPD Kabupaten Natuna tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Adapun integrasi Pendekatan Teknokratik dalam penyusunan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar. G-l.2
Pendekatan Teknokratik Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025





C. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan Partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam merencanakan proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat serta menciptakan rasa memiliki atas pembangunan di daerahnya.

Gambar. G-I.3
Pendekatan Partisipatif Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



D. Pendekatan Politis (Janji Janji Kepala Daerah)

Pendekatan Politik proses penyusunan rencana, pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program kepala daerah terpilih yang bersifat indikatif.

Politik dan janji adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan serta sebagai bagian yang melekat dalam sebuah rangkaian dari proses politik yang demokratis. Janji politik dapat dibaca dan dimaknai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak politik.



Janji politik Bupati Natuna sudah tertuang kedalam RPJMD Kabupaten Natuna yang mengakomodir Visi dan Misi Bupati Natuna dan dijabarkan secara langsung kedalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun integrasi janji-janji kepala daerah dalam penyusunan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



E. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui anggota dewan agar diperjuangkan yang mengacu dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.



Gambar. G-I.5
Alur Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



Adapun tahapan pengusulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar. G-I.6
Tahapan Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pada tahun 2025 arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Dukung Dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Penyusunan RKPD 2025 dilakukan melalui 6 (enam) tahapan:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD disusun dengan memperhatikan hasil Konsultasi Publik.



3. Penyusunan rancangan RKPD

Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2025. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Hasil Hasil Forum Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Natuna.

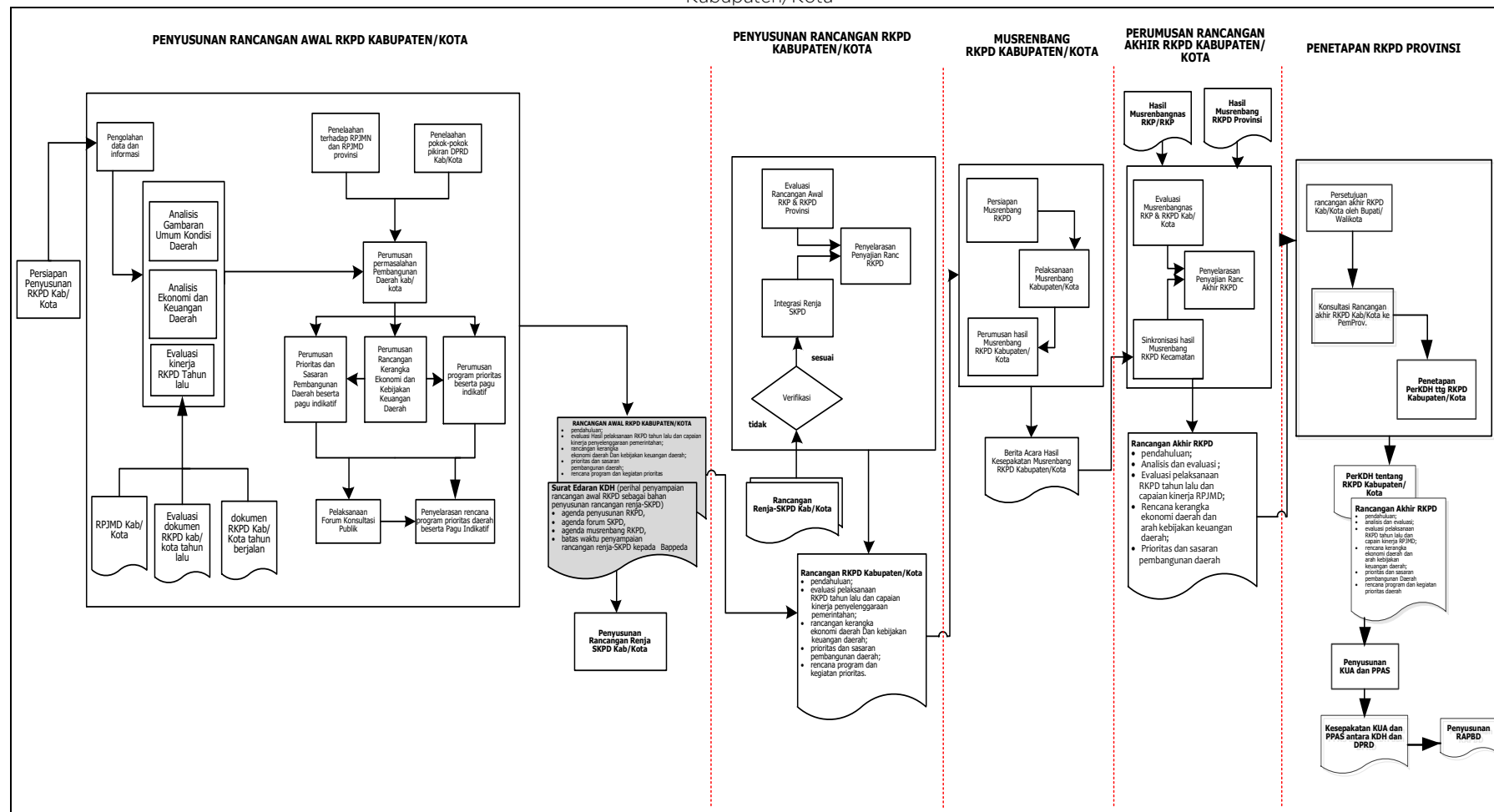
6. Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbub) dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Keenam tahapan tersebut dapat ditunjukkan pada gambar G-1.1 berikut :



Gambar. G-I.7 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota





Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Tahun 2025 tetap menunjukkan keterkaitan (linkage) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator RPJMD periode 2021-2026 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD, peraturan/perundangan yang sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264)
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);



23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
28. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 48);
29. Peraturan Peraturan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

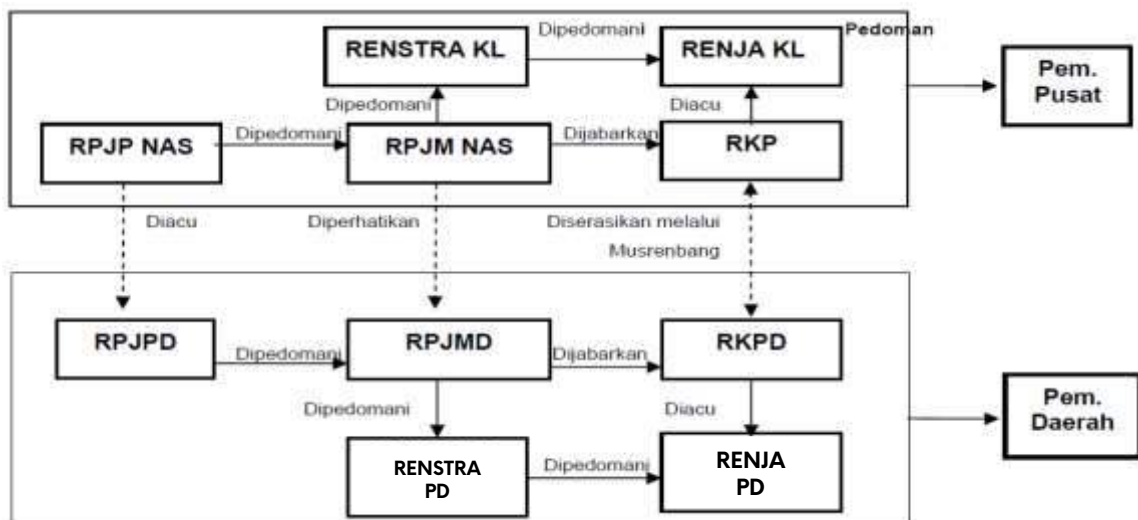


Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen tersebut ditunjukkan pada Gambar. G-1.2 berikut ini.

Gambar. G-1.8
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 berdasarkan penjabaran dari misi RPJMD Kabupaten Natuna dan mengacu pada program prioritas yang ada dalam RKP Nasional dan berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.
- b. Acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- c. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam kerangka acuan penyusunan RAPBD tahun 2025.
- d. Dokumen RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD 2025 disusun sesuai dengan Permendagri 86/2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi umum daerah, kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.



BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, dan arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.



BAB VII. PENUTUP

Berisi tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi RKPD tahun 2025 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Gambaran Umum kondisi daerah Kabupaten Natuna memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Natuna secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan tahun 2025 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Natuna baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Natuna.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Natuna akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.



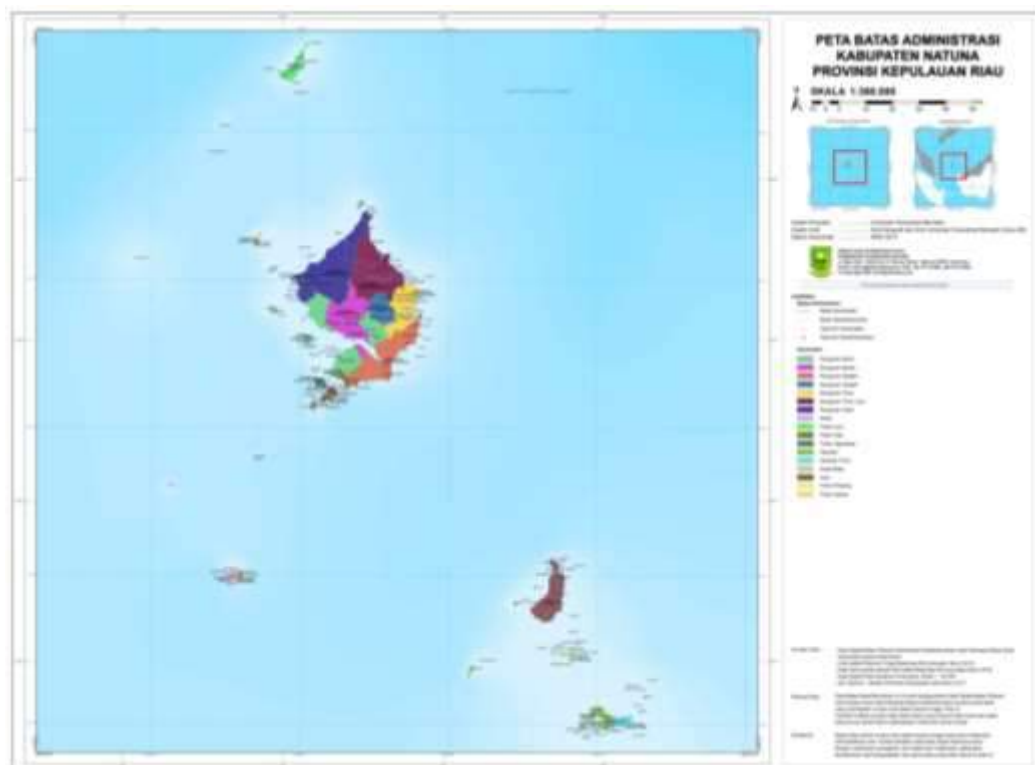
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Laut Natuna Utara;
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan;
- ❖ Sebelah Timur : Laut Natuna Utara; dan
- ❖ Sebelah Barat : Semenanjung Malaysia.

Gambar.G-II.1
Peta Kabupaten Natuna



Sumber: RTRW Kabupaten Natuna 2021-2041



Secara administratif, Kabupaten Natuna memiliki 17 Kecamatan serta 7 Kelurahan dan 70 Desa dengan luas wilayah mencapai 264.198,37 km², dimana sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yakni seluas 262.167,07 km² dan sisanya daratan yang merupakan kepulauan seluas 1.978,49 km². Secara rinci, wilayah dengan luas daratan terluas yaitu Kecamatan Bunguran Utara seluas 398,09 km² atau setara dengan 20,12 persen dari total luas wilayah Kabupaten Natuna, sedangkan luas daratan tersempit yaitu Kecamatan Suak Midai seluas 12,45 km², seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel. T-II.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Luas Lautan (km ²)	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pulau
1.	Midai	13,77	262.167,07	3	2
2.	Suak Midai	12,42		3	0
3.	Bunguran Barat	247,95		5	15
4.	Bunguran Utara	398,09		6	14
5.	Pulau Laut	37,58		3	8
6.	Pulau Tiga	41,68		6	14
7.	Bunguran Batubi	214,45		5	2
8.	Pulau Tiga Barat	17,38		4	4
9.	Pulau Seluan	7,08		2	2
10.	Bunguran Timur	148,77		7	8
11.	Bunguran Timur Laut	298,96		7	10
12.	Bunguran Tengah	85,83		3	0
13.	Bunguran Selatan	234,23		4	12
14.	Serasan	44,72		7	33
15.	Subi	139,12		6	11
16.	Serasan Timur	29,36		4	10
17.	Pulau Panjang	7,12		2	12
Kabupaten Natuna		1.978,49	262.167,07	77	157

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024



b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Natuna terletak pada posisi $1^{\circ}18'00''$ Lintang Utara sampai dengan $6^{\circ}50'15''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}48'30''$ Bujur Timur sampai dengan $110^{\circ}02'00''$ Bujur Timur. Jika dirinci letak astronomis menurut kecamatan di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-II.2
Letak Astronomis Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Letak Geografis	
		Lintang Utara	Bujur Timur
1.	Midai	$2^{\circ}58'16''-3^{\circ}01'18''$	$107^{\circ}44'50''-107^{\circ}48'54''$
2.	Suak Midai *)	$2^{\circ}58'16''-3^{\circ}01'18''$	$107^{\circ}44'50''-107^{\circ}48'54''$
3.	Bunguran Barat	$3^{\circ}40'23''-3^{\circ}59'40''$	$107^{\circ}54'03''-108^{\circ}18'08''$
4.	Bunguran Batubi *)	$3^{\circ}47'27''-3^{\circ}53'22''$	$108^{\circ}10'16''-108^{\circ}01'32''$
5.	Bunguran Utara	$3^{\circ}55'02''-4^{\circ}17'44''$	$107^{\circ}49'47''-108^{\circ}12'47''$
6.	Pulau Laut	$4^{\circ}30'30''-4^{\circ}48'02''$	$107^{\circ}43'06''-108^{\circ}01'46''$
7.	Pulau Tiga	$3^{\circ}33'15''-3^{\circ}42'35''$	$108^{\circ}01'51''-108^{\circ}09'42''$
8.	Pulau Tiga Barat *)	$3^{\circ}39'05''-3^{\circ}41'05''$	$108^{\circ}02'03''-108^{\circ}03'59''$
9.	Pulau Seluan **)		
10.	Bunguran Timur	$3^{\circ}46'50''-3^{\circ}59'56''$	$108^{\circ}12'20''-108^{\circ}24'14''$
11.	Bunguran Timur Laut	$3^{\circ}55'51''-4^{\circ}13'19''$	$108^{\circ}09'16''-108^{\circ}22'05''$
12.	Bunguran Tengah	$3^{\circ}51'19''-3^{\circ}58'59''$	$108^{\circ}14'02''-108^{\circ}20'19''$
13.	Bunguran Selatan	$3^{\circ}37'49''-3^{\circ}53'19''$	$108^{\circ}09'11''-108^{\circ}25'15''$
14.	Serasan	$2^{\circ}27'30''-2^{\circ}33'43''$	$108^{\circ}56'14''-109^{\circ}03'11''$
15.	Subi	$2^{\circ}38'55''-3^{\circ}03'21''$	$108^{\circ}33'19''-108^{\circ}56'23''$
16.	Serasan Timur	$2^{\circ}27'15''-2^{\circ}37'48''$	$109^{\circ}02'49''-109^{\circ}09'57''$
17.	Pulau Panjang **)		
Kabupaten Natuna		$1^{\circ}18'-6^{\circ}50'$	$104^{\circ}48'-110^{\circ}02'$

*) Pemekaran kecamatan Tahun 2015, **) Pemekaran kecamatan Tahun 2022



Di wilayah Kabupaten Natuna terdapat 157 pulau, dengan 27 pulau (17,20 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (130 pulau atau 82,80 persen) tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut tersebar di 17 Kecamatan, dengan Kecamatan Serasan yang memiliki jumlah pulau terbanyak yang belum berpenghuni yaitu 30 pulau (23,62% dari total pulau belum berpenghuni), sedangkan Kecamatan Suak Midai dan Bunguran Tengah sama sekali tidak memiliki pulau.

c. Topografi

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Natuna umumnya merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Namun, dataran rendah dan landai juga banyak ditemukan di pinggir pantai. Hal ini wajar terjadi karena wilayah ini merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena itu, ketinggian wilayah kecamatan di atas permukaan laut (DPL) berkisar antara 10 sampai dengan 980 meter.

Kecamatan dengan ketinggian wilayah yang cukup rendah adalah Pulau Panjang, hanya mencapai 10 mdpl di tempat tertinggi, dan diikuti oleh Subi dan Bunguran Tengah dengan masing-masing ketinggian wilayah 58 mdpl dan 80 mdpl. Sedangkan kecamatan dengan ketinggian wilayah yang tertinggi adalah Bunguran Timur Laut. Hal ini disebabkan oleh adanya gunung di kecamatan ini dengan tinggi 980 meter di atas permukaan laut (DPL).

d. Geologi

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Kabupaten Natuna merupakan perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai di wilayah Natuna adalah radial



hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis. Kabupaten Natuna merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi terutama Cekungan Natuna.

Tanah merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian, karena tanah merupakan wadah dari segala aktivitas baik itu aktivitas ekonomi, sosial maupun kegiatan lainnya. Jenis data tanah yang terdapat di wilayah studi diambil berdasarkan klasifikasi Pusat Penelitian Tanah (PPT) tahun 1983, sedangkan adanya perbedaan penamaan sebelum tahun 1983 karena tanahnya dibedakan dengan klasifikasi Pusat Penelitian Tanah (PPT) tahun 1983. Tanah-tanah yang terdapat di lokasi studi dapat dibedakan menjadi dua kelompok tanah, yaitu tanah mineral dan tanah organik.

Tanah di Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Timur umumnya terdiri dari jenis tanah latosol, alluvial, podsolik serta organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan induk batuan beku organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan organik. Jenis tanah alluvial dijumpai di sepanjang tanggul sungai utama, daerah meander serta daerah flood plain yang terdapat di belakang pantai marin. Jenis tanah latosol adalah jenis tanah mineral yang telah mengalami pelapukan lanjut, sangat tercuci sehingga batas-batas horison menjadi baur, kandungan mineral primer dan unsur hara rendah dengan warna tanah merah, coklat kemerahan, coklat, coklat kekuningan dijumpai dari muka laut hingga ketinggian 900 m diatas permukaan laut.

Jenis tanah podsolik dijumpai pada ketinggian antara 50 m hingga 350 m dpl, sedangkan jenis tanah organosol dijumpai pada daerah cekungan di belakang sungai utama yang merupakan daerah



rawa dan pada umumnya tingkat kematangan hemik sampai saprik. Tingkat kesuburan tanah pada daerah studi yang dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian Tanah (PPT) tahun 1983 tergolong rendah hingga sedang pada seluruh jenis tanah yang diteliti.

Tanah yang terdapat di Kecamatan Serasan dan Midai umumnya terdiri dari jenis tanah gleisol, latosol, alluvial, litosol dan organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan induk bahan organik (endapan pantai berupa pasir, kerikil dan sisa tumbuhan), batuan beku basa dan batuan vulkanik. Tanah alluvial sebagian besar menempati satuan visiografi daratan pasang surut dan pantai marin terbentuk dari bahan induk alluvium pantai/endapan marin. Pada satuan fisiografi ini tanah terbentuk dari bahan endapan muda (alluvium-kolluvium) dan proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi air/genangan sehingga sifat-sifat hidromorfik di dalam penampangannya. Jenis tanah gleisol dijumpai di Pulau Subi besar yang berkembang dari bahan alluvium-koluvium yang terdiri dari endapan halus dan kasar (campuran) serta lumpur marin menempati satuan fisiografi pasang-surut dan pelembahan dengan bentuk wilayah datar.

Perkembangan tanah sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu jenuh air (hidromorfik) yang dicirikan oleh adanya gleid yang merupakan hasil dari proses reduksi. Kondisi drainase terhambat sampai sangat terhambat, kedalaman tanah umumnya dalam dengan perkembangan struktur yang sangat lemah pada lapisan atas dan pejal pada lapisan bawah. Tekstur lapisan atas lempung berpasir dan lapisan bawah lempung liat berpasir dengan reaksi tanah masam. Tingkat kesuburan tanah pada daerah studi yang dinilai berdasarkan



kriteria yang ditetapkan oleh PPT tahun 1983 tergolong rendah hingga sedang.

e. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Natuna dapat dilihat dari 2 hal, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Natuna berupa sungai, diantaranya Sungai Ranai yang terdapat di Kecamatan Bunguran Timur dan sungai lainnya. Hulu Sungai Ranai dan sungai-sungai kecil lainnya di Kecamatan Bunguran Timur ini umumnya di Gunung Ranai, sungai-sungai kecil tersebut diantaranya Sungai Ngusang, Sungai Sarang Batunagis, Sungai Batukilang, Sungai Jemengan, Sungai Siman dan Sungai Senipak. Selain sungai, air permukaan terdapat juga di Kecamatan Bunguran Timur yaitu Air Terjun Gunung Ranai dan di Kecamatan Bunguran Tengah yaitu Air Terjun Air Lengit. Sumber air tanah yang terdapat di Kabupaten Natuna berkisar 1-3 m wilayah dataran, sedangkan pada wilayah yang topografinya berbukit-bukit kedalaman muka air tanah berkisar 1-7 m.

f. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Dalam rentang musim penghujan yang terjadi di Natuna, ada musim yang populer di masyarakat Natuna terutama untuk kalangan nelayan yaitu musim angin utara. Musim ini dinamakan angin utara karena angin datang secara kontinyu dari arah utara melewati wilayah Natuna. Jika musim ini sedang berlangsung, nelayan di Kabupaten Natuna tidak berani turun melaut akibat gelombang, angin dan badai laut sangat berbahaya.

Berdasarkan data Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Klimatologi, rata-rata suhu udara di Kabupaten Natuna berada pada



rentang $26,5^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $30,3^{\circ}\text{C}$ pada tahun 2023. Suhu udara mencapai titik tertinggi di bulan Juni dengan suhu rata-rata sebesar $35,2^{\circ}\text{C}$. Bulan Januari merupakan bulan dengan suhu udara terendah sepanjang tahun 2023 dengan suhu udara minimum mencapai $22,1^{\circ}\text{C}$.

Stasiun Klimatologi juga menunjukkan bahwa rata-rata tekanan udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 1.008,60 milibar (mb) hingga 1.010,50 mb pada tahun 2023. Pada bulan Mei, tekanan udara mencapai titik maksimum yaitu 1.019,80 mb, sedangkan tekanan udara mencapai titik minimum pada bulan November yaitu 1.001,10 mb. Rata-rata tekanan udara di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 1.009,54 mb.

Kelembapan udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 82,10 persen hingga 90,30 persen pada tahun 2023. Bulan Maret dan Juli merupakan bulan dengan kelembapan udara tertinggi sepanjang tahun 2023 mencapai 100,00 persen, sedangkan kelembapan udara terendah terjadi pada bulan Mei hanya sebesar 62,00 persen. Rata-rata kelembapan udara di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 87,55 persen.

Kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Natuna cukup bervariasi selama tahun 2023. Jika melihat pada rata-rata kecepatan angin harian, angin bergerak kencang pada bulan Januari hingga Maret, dan melambat di bulan April hingga November lalu bergerak kencang kembali pada bulan Desember. Kecepatan rata-rata harian angin mencapai 3,08 knot dengan maksimum 16 knot di titik tertinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh musim angin utara yang sedang berlangsung di Kabupaten Natuna.



Penyinaran matahari di tahun 2023 terjadi cukup intens dengan rata-rata selama 5,2 jam per hari. Bulan Mei merupakan bulan dengan penyinaran matahari paling intens yang mencapai 7,1 jam. Di sisi lain, pada bulan Januari, lama penyinaran matahari merupakan yang terendah hanya sebesar 3,2 jam per hari.

Pada tahun 2023, rata-rata hujan turun sebesar 18,25 hari dengan jumlah hari hujan selama 219 hari. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 musim hujan di Kabupaten Natuna lebih panjang daripada musim kemarau. Jumlah hari hujan pada bulan Januari, November, dan Desember merupakan yang terpanjang yaitu mencapai 23 hari hujan dalam satu bulan. Sementara itu, jumlah hari hujan terendah terjadi di bulan April yang hanya sebanyak 9 hari.

Musim kemarau berlangsung selama bulan April 2023 di Kabupaten Natuna yang ditandai dengan jumlah curah hujan rendah yaitu hanya sebesar 72,10 mm/bulan. Secara umum, curah hujan sepanjang tahun 2023 sebesar 285,28 mm/bulan dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi di tahun 2023 dengan total curah hujan sebesar 519,50 mm/bulan.

g. Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.



B. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Kabupaten Natuna adalah bentang alamnya berupa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan memiliki fungsi strategis sebagai wilayah perbatasan utara NKRI. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Natuna sebagai wilayah militer dengan pertahanan dan keamanan yang tinggi. Selain itu, bentang alam yang didominasi oleh wilayah lautan dibandingkan daratan berpotensi untuk dikembangkan baik di sektor ekonomi, transportasi, pariwisata, dan sebagainya. Tidak hanya kelautan, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi sektor unggulan di Kabupaten Natuna. Kedua sektor ini dapat dikembangkan supaya Kabupaten Natuna memiliki daya saing ekonomi. Dengan demikian, diharapkan konsep agromarine mampu mengoptimalkan potensi dan mengurangi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Natuna secara berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, Presiden Republik Indonesia menyampaikan adanya 6 pilar percepatan pembangunan Kabupaten Natuna yang meliputi perikanan, pariwisata, industri, pertambangan, lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan. Potensi alam sebagai basis pengembangan ekonomi dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor primer dalam rangka menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kabupaten Natuna saat ini menjadi salah satu daerah andalan penghasil minyak dan gas Indonesia. Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan migas di Laut Natuna Utara cukup besar. Cadangan minyak bumi terbukti di Laut Natuna Utara sebesar 92,63 juta standar barel atau milion stock tank barrel (MMSTB). Sementara itu, cadangan potensial minyak bumi di Laut Natuna Utara adalah 137,13 MMSTB. Cadangan potensial itu terdiri dari cadangan harapan sebesar 88,90 MMSTB dan cadangan mungkin 48,23 MMSTB. Di sisi lain, cadangan gas bumi terbukti di Laut Natuna Utara adalah 1.045,62 juta kaki kubik atau billions of standard cubic feet (BSCF). Sedangkan cadangan gas bumi



potensi di Laut Natuna Utara sebesar 1.605,24 BSCF yang terdiri dari 1.083,61 BSCF cadangan harapan dan 521,63 BSCF cadangan mungkin. Tidak mengherankan jika Dana Bagi Hasil Migas menjadi sumber utama pendapatan Kabupaten Natuna.

Kawasan strategis wilayah merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Kawasan strategis yang akan ditetapkan di Kabupaten Natuna adalah kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan penetapan kawasan strategis Nasional, kawasan strategis Provinsi dan Kawasan strategis Kabupaten, sehingga ketiganya dapat saling bersinergi dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Rencana pola ruang Kabupaten Natuna :

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pedoman yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan lindung adalah SK Menteri Pertanian Nomor 683/KPTS/UM/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Hutan Lindung. Terdapat tiga faktor yang dinilai sebagai penentu kemampuan lahan sebagai suatu kawasan lindung yaitu kelerengan lahan, jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi, dan intensitas hujan harian rata-rata.



1.1. Kawasan Badan Air

Badan air di Kabupaten Natuna meliputi kawasan sungai, embung, dan bendung. Sungai seluas kurang lebih 545 hektare di Kabupaten Natuna tersebar di Kecamatan Bunguran Batubi; Kecamatan Bunguran Timur; Kecamatan Bunguran Utara; Kecamatan Bunguran Selatan; Kecamatan Bunguran Barat; Kecamatan Bunguran Timur Laut; Kecamatan Serasan; Kecamatan Serasan Timur; dan Kecamatan Subi. Embung seluas kurang lebih 41 hektare, yang berada di Embung Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara; Embung Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat; Embung Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut; Embung Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga; Embung Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga; dan Embung Subi di Kecamatan Subi. Serta Bendungan Tapau seluas kurang lebih 187 hektare yang berada di Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.

1.2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya.

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Penetapan kawasan hutan lindung Kabupaten Natuna mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan kriteria kawasan hutan lindung dan acuan di atas, maka kawasan hutan lindung di Kabupaten Natuna ditetapkan seluas 12.041 Ha yang



berada di: 1) Kawasan hutan lindung Gunung Ranai seluas kurang lebih 2.511 hektare di Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Timur Laut; 2) Kawasan hutan lindung Gunung Bedung seluas kurang lebih 4.695 hektare di Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Utara 3) Kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam seluas kurang lebih 4.835 hektare di Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

b. Kawasan Lindung gambut

Penetapan kawasan gambut di Kabupaten Natuna melalui proses pendekatan interpretasi citra dan tutupan lahan. Kawasan gambut yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna 2021 – 2041 diidentifikasi sebagai kawasan rawa eksisting. Pelestarian kawasan rawa sebagai kawasan gambut di Kabupaten Natuna seluas kurang lebih 1.436 hektare yang tersebar di Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan timur, dan Kecamatan Subi.

1.3. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi dapat berupa kawasan suaka alam (yang merupakan kawasan suaka margasatwa laut dan melindungi habitat penyu), kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan pelestarian alam berupa taman wisata yang berada di Kawasan Lindung Geologi. Kawasan konservasi alam di Kabupaten Natuna mengikuti ketetapan habitat pesisir yang tercantum dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1



Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan ditetapkan seluas kurang lebih 63 hektare yang tersebar di:

- a. Kecamatan Pulau Laut;
- b. Kecamatan Bunguran Utara;
- c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- d. Kecamatan Bunguran Selatan;
- e. Kecamatan Bunguran Barat;
- f. Kecamatan Bunguran Batubi;
- g. Kecamatan Pulau Tiga;
- h. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- i. Kecamatan Serasan;
- j. Kecamatan Serasan Timur; dan
- k. Kecamatan Subi.

1.4. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Lindung geologi di Kabupaten Natuna adalah kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan bentang alamnya. Berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi keragaman geologi, Kabupaten Natuna tersusun setidaknya oleh 17 lokasi geodiversity, berdasarkan standar dan juknis asesmen warisan geologi. Kawasan lindung geologi di Kabupaten Natuna yaitu keunikan Bentang Alam seluas 167 hektare meliputi:

- a. kawasan Tanjung Datuk di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- b. kawasan Pantai dan Goa Kamak di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. kawasan Pulau Senua di Kecamatan Bunguran Timur;
- d. kawasan Pantai Batu Kasah di Kecamatan Bunguran Selatan;
- e. kawasan Pulau Akar di Kecamatan Bunguran Selatan;
- f. kawasan Gunung Air Hiu di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- g. kawasan Pulau Sahi di Kecamatan Bunguran Timur Laut;



- h. kawasan Bukit Kapur di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- i. kawasan Gunung Gundul di Kecamatan Bunguran Tengah;
- j. kawasan Tanjung Senubing di Kecamatan Bunguran Timur;
- k. kawasan Pantai Sisi di Kecamatan Serasan Timur;
- l. kawasan Pantai Harapan di Kecamatan Midai;
- m. kawasan Pulau Sekatung di Kecamatan Pulau Laut;
- n. kawasan Pantai Pasir Maros di Kecamatan Bunguran Barat;
- o. kawasan Batu Kaon di Kecamatan Bunguran Selatan;
- p. kawasan Batu Catur di Kecamatan Serasan;
- q. kawasan Goa Lubang Hidung di Kecamatan Serasan; dan
- r. kawasan Tanjung Datuk di Kecamatan Bunguran Utara.

1.5. Kawasan Ekosistem Mangrove

Penetapan kawasan ekosistem mangrove mengacu pada Peraturan Presiden No 73 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana kawasan ekosistem hutan bakau atau ekosistem mangrove di Kabupaten Natuna seluas kurang lebih 2.509 hektare yang tersebar di:

- a) Kecamatan Pulau Laut;
- b) Kecamatan Bunguran Utara;
- c) Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- d) Kecamatan Bunguran Timur;
- e) Kecamatan Bunguran Batubi;
- f) Kecamatan Bunguran Barat;
- g) Kecamatan Bunguran Selatan;
- h) Kecamatan Pulau Tiga;
- i) Kecamatan Pulau Tiga Barat;



- j) Kecamatan Subi;
- k) Kecamatan Serasan; dan
- l) Kecamatan Serasan Timur

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

2.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Tujuan penetapan kawasan hutan produksi adalah memanfaatkan hasil hutan secara terbatas, yang kegiatan eksploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih dan tanam kembali. Penetapan kawasan hutan produksi di Kabupaten Natuna mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, Kabupaten Natuna termasuk ke dalam agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat melalui identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Adapun sumber kawasan hutan yang akan dilepaskan tersebut memiliki luas kurang lebih 2.600 hektar dan tersebar di Kecamatan Bunguran Utara; Kecamatan Bunguran Timur Laut; Kecamatan Bunguran Tengah; Kecamatan Bunguran Batubi; Kecamatan Bunguran Barat; Kecamatan Subi; Kecamatan Serasan; dan Kecamatan Serasan Timur.

2.2. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian terdiri dari kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.



2.3. Kawasan Perikanan

Penentuan kawasan perikanan ini didasari oleh Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037. Kawasan perikanan di Kabupaten Natuna dibagi menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap direncanakan seluas kurang lebih 171 hektare yang tersebar di: Kecamatan Pulau Laut; Kecamatan Bunguran Utara; Kecamatan Bunguran Timur; Kecamatan Bunguran Selatan; Kecamatan Pulau Tiga; Kecamatan Pulau Tiga Barat; Kecamatan Suak Midai; Kecamatan Subi; dan Kecamatan Serasan. Dan rencana Kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih 236 hektare yang tersebar di: Kecamatan Bunguran Timur; Kecamatan Bunguran Barat; Kecamatan Bunguran Tengah; dan Kecamatan Bunguran Utara.

2.4. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan dan Energi terdiri dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, dan kawasan pertambangan bahan galian.

2.5. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Natuna diintegrasikan dengan draft rencana pengembangan industri Provinsi Kepulauan Riau dan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Natuna. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Natuna terdiri atas kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah yang seluruhnya seluas kurang lebih 2.350 hektare meliputi Kecamatan



Bunguran Utara; Kecamatan Bunguran Timur Laut; Kecamatan Bunguran Selatan; Kecamatan Bunguran Batubi; Kecamatan Pulau Tiga; Kecamatan Midai; Kecamatan Subi; dan Kecamatan Serasan.

2.6. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Natuna meliputi pengembangan kawasan pariwisata alam, pengembangan kawasan pariwisata budaya dan pengembangan kawasan pariwisata buatan. Berikut ini 24 taman pulau kecil di Kabupaten Natuna dijadikan kawasan pariwisata:

1. Pulau Jantai di Kecamatan Bunguran Selatan seluas 2,736 Ha
2. Pulau Kemudi di Kecamatan Bunguran Selatan seluas 8,119 Ha
3. Pulau Senua di Kecamatan Bunguran Timur seluas 2,275 Ha
4. Pulau Bunga di Kecamatan Bunguran Utara seluas 6,013 Ha
5. Pulau Buton di Kecamatan Bunguran Utara seluas 30,879 Ha
6. Pulau Sebaik di Kecamatan Bunguran Utara seluas 22,513 Ha
7. Pulau Semerangau di Kecamatan Bunguran Utara seluas 4,968 Ha
8. Pulau Antu di Kecamatan Pulau Tiga seluas 8,569 Ha
9. Pulau Batu Gedung di Kecamatan Pulau Tiga seluas 98,120 Ha
10. Pulau Buluh di Kecamatan Pulau Tiga seluas 3,869 Ha
11. Pulau Selentang di Kecamatan Pulau Tiga seluas 49,119 Ha
12. Pulau Batu Berian Kecil di Kecamatan Serasan seluas 14,86 Ha
13. Pulau Limau di Kecamatan Serasan seluas 1,331 Ha
14. Pulau Mutus dan Pulau Besar di Kecamatan Serasan seluas 51,547 Ha
15. Pulau Serabung di Kecamatan Serasan seluas 1,406 Ha
16. Pulau Seraya di Kecamatan Serasan seluas 437,765 Ha
17. Pulau Tundok Kecil di Kecamatan Serasan seluas 1,616 Ha
18. Pulau Jelu di Kecamatan Serasan Timur seluas 5,695 Ha



19. Pulau Meredam di Kecamatan Serasan Timur seluas 275,543 Ha

20. Pulau Burung di Kecamatan Subi seluas 2,871 Ha

21. Pulau Kukup Laut di Kecamatan Subi seluas 2,838 Ha

22. Pulau Segui di Kecamatan Subi seluas 17,949 Ha

23. Pulau Tembulai di Kecamatan Subi seluas 6,374 Ha

24. Pulau Tudan di Kecamatan Subi seluas 12,030 Ha

Wisata alam yang berpotensi berupa air terjun, pantai pasir putih, gua-gua sarang Burung Walet dan batu karang serta batu granit yang indah.

2.7. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 14.177 hektare yang berada di: a) Kecamatan Bunguran Utara; b) Kecamatan Bunguran Timur; c) Kecamatan Bunguran Tengah; d) Kecamatan Bunguran Selatan; e) Kecamatan Bunguran Barat; f) Kecamatan Pulau Tiga; g) Kecamatan Midai; h) Kecamatan Suak Midai; dan i) Kecamatan Serasan. Sedangkan, rencana Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 8.377 hektare yang berada di: a. Kecamatan Pulau Laut; b. Kecamatan Bunguran Utara; c. Kecamatan Bunguran Timur Laut; d. Kecamatan Bunguran Tengah; e. Kecamatan Bunguran Selatan; f. Kecamatan Bunguran Batubi; g. Kecamatan Bunguran Barat; h. Kecamatan Pulau Tiga; i. Kecamatan Pulau Tiga Barat; j. Kecamatan Subi; k. Kecamatan Serasan; l. Kecamatan Serasan Timur; m. Kecamatan Midai; dan n. Kecamatan Suak Midai.

2.8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan militer/pertahanan negara adalah kawasan-kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, baik



secara langsung maupun tidak langsung. Pola pengembangan kawasan Pertahanan Keamanan di Kabupaten Natuna, selain diarahkan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan Nasional akan tetapi juga sebagai bagian penting dalam sistem Hankam di Kabupaten Natuna, mengingat bahwa di wilayah ini akan direncanakan kegiatan penambangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi yang sangat besar dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Pola pengembangan kawasan Hankam di Kabupaten Natuna adalah kawasan terpadu yang mengaitkan antara pertahanan Udara, Laut dan Darat.

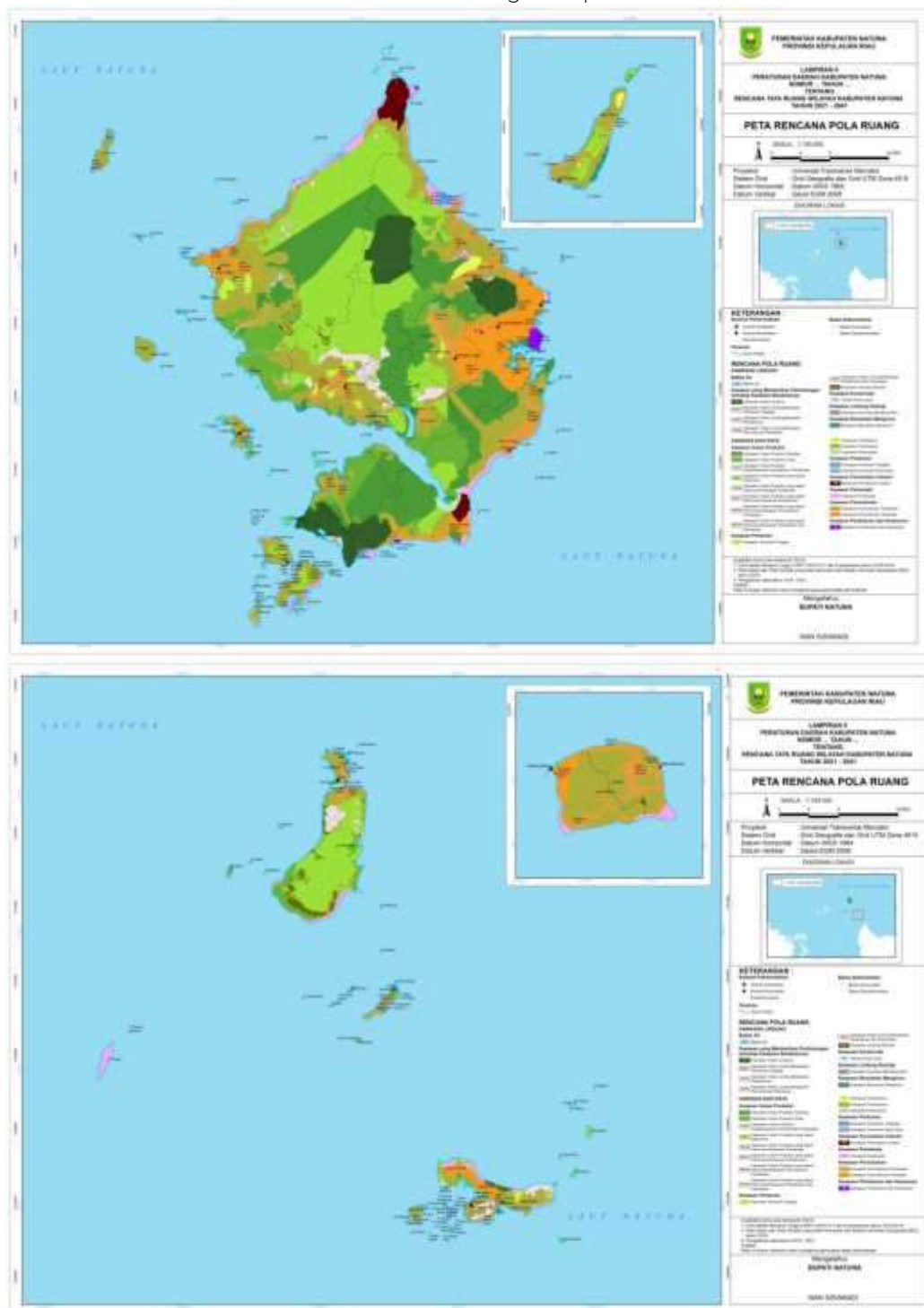
2.9. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Ketentuan Khusus di kabupaten Natuna terdiri dari Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan Pantai, dan Kawasan Sempadan Sungai.

Rencana pola ruang dan kawasan strategi Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar. G-II.2 dan G-II.3 berikut ini:

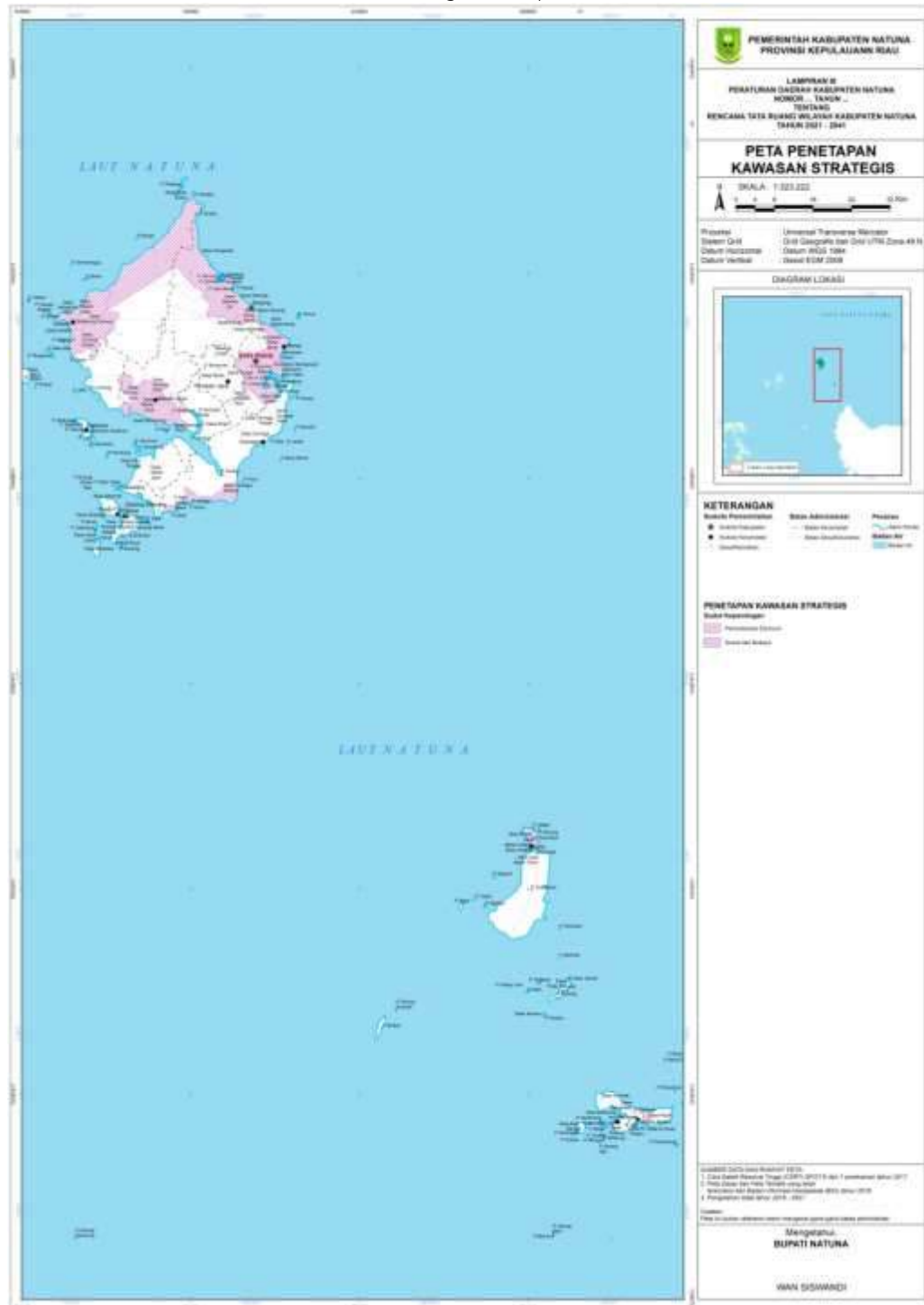


Gambar. G-II.2
Rencana Pola Ruang Kabupaten Natuna



Sumber: RTRW Kabupaten Natuna, 2021-2041

Gambar. G-II.3
Kawasan Strategis Kabupaten Natuna



Sumber: RTRW Kabupaten Natuna, 2021-2041



C. Kawasan Rawan Bencana

Secara umum, berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

Kawasan pulau Natuna merupakan daerah yang berkawasan ekstrim. Hal ini dikarenakan letak geografis wilayahnya berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Salah satu titik rawan bencana di daerah kepulauan Kabupaten Natuna adalah daerah yang berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai, meliputi: Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Subi.

Selain itu, daerah yang berpotensi mengalami angin puting beliung adalah Kecamatan Bunguran Utara. Sedangkan, kawasan yang berpotensi terjadi longsor berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut.

D. Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56



ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun.

Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,08 ribu jiwa atau setara dengan 4,38 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Natuna didominasi kelompok umur muda yaitu umur 0-4 tahun sebanyak 7,66 ribu jiwa, umur 5-9 tahun sebanyak 7,75 ribu jiwa, 10-14 sebanyak 7,59 ribu jiwa, umur 15-19 sebanyak 7,68 ribu jiwa, dan umur 20-24 tahun sebanyak 7,50 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terendah berada dalam kelompok umur 75 tahun ke atas hanya sebesar 1,27 ribu jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk lakilaki di Kabupaten Natuna lebih banyak daripada penduduk perempuan yaitu sebesar 43,48 ribu jiwa (51,42 persen).

Rasio Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah 48,52. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 48 sampai 49 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Usia non produktif terdiri atas usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia yang dianggap tidak produktif lagi (65+ tahun).

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel. T-II.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Midai	3.530	3.604	3.657	3.718	3.650
2.	Suak Midai	1.726	1.739	1.753	1.739	1.730
3.	Bunguran Barat	7.644	7.854	8.009	7.854	8.070
4.	Bunguran Batubi	3.841	3.882	3.906	3.937	3.830
5.	Bunguran Utara	4.518	4.525	4.628	4.525	4.690
6.	Pulau Laut	2.263	2.319	2.348	2.383	2.330
7.	Pulau Tiga	3.554	3.727	3.837	3.959	3.940
8.	Pulau Tiga Barat	2.037	2.109	2.145	2.185	2.150
9.	Pulau Seluan	-	-	-	-	...
10.	Bunguran Timur	25.540	27.806	28.518	29.306	29.080
11.	Bunguran Timur Laut	5.233	5.372	5.522	5.687	5.650
12.	Bunguran Tengah	3.600	3.677	3.794	3.922	3.920
13.	Bunguran Selatan	3.173	3.349	3.461	3.584	3.580
14.	Serasan	5.101	5.266	5.379	5.505	5.440
15.	Subi	2.885	3.064	3.135	3.214	3.180
16.	Serasan Timur	3.126	3.202	3.272	3.349	3.310
17.	Pulau Panjang	-	-	-	-	...
Jumlah		77.771	81.495	83.364	85.446	84.560

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Dari 17 kecamatan, kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dari tahun 2019 sampai 2023. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2023 mencapai 29.080 jiwa, dengan persentase sebesar 34,39 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu 42,74 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 265,07 jiwa/km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 11,58 jiwa/km².



Tabel. T-II.4
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023 (jiwa/km²)

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Midai	269,72	261,16	265,61	270,01	265,07
2.	Suak Midai	146,23	139,68	141,18	142,51	139,29
3.	Bunguran Barat	32,34	31,62	32,30	33,01	32,55
4.	Bunguran Batubi	18,86	18,07	18,21	18,36	17,86
5.	Bunguran Utara	11,73	11,15	11,42	11,71	11,58
6.	Pulau Laut	63,42	61,61	62,49	63,41	62,00
7.	Pulau Tiga	90,09	89,70	92,50	95,44	94,53
8.	Pulau Tiga Barat	123,22	121,14	123,44	125,72	123,71
9.	Pulau Seluan	-	-	-	-	...
10.	Bunguran Timur	181,39	195,62	191,70	196,99	195,47
11.	Bunguran Timur Laut	18,42	17,94	18,47	19,02	18,90
12.	Bunguran Tengah	44,16	42,78	44,21	45,69	45,67
13.	Bunguran Selatan	14,26	14,28	14,78	15,30	15,28
14.	Serasan	133,20	117,05	120,29	123,10	121,65
15.	Subi	20,19	20,94	21,44	21,98	21,75
16.	Serasan Timur	123,88	120,33	111,44	114,07	112,74
17.	Pulau Panjang	-	-	-	-	...
Kabupaten Natuna		41,43	40,56	42,14	43,19	42,74

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Natuna, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Evaluasi pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yang sudah ditetapkan di RPJMD meliputi :

Tabel.T-II.5
Evaluasi Pencapaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2023

No.	Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	Angka Kemiskinan	Persen	5,32	4,04	5,25	70,05	Belum Tercapai
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	73,47	75,2	78,23	104,03	Tercapai
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Migas	Persen	0,11	3,22	0,96	29,81	Belum Tercapai



No.	Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tanpa Migas	Persen	2,80	3,76	3,81	101,33	Tercapai
5.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	Juta Rp	75,45	82,2	85,14	103,58	Tercapai
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,15	2,99	4,05	64,55	Belum Tercapai

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan).

Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2023 mencapai 23,52 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,74 triliun rupiah atau sekitar 3%-nya dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 24,26 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 14,66 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 14,80 triliun rupiah pada tahun 2023.

Tabel.T-II.6
PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.512,63	2.455,46	2.571,67	2.789,30	3.013,40
B	Pertambangan dan Penggalan	15.500,97	12.287,84	14.613,86	17.578,94	16.352,30
C	Industri Pengolahan	161,71	166,70	171,80	178,45	184,39
D	Pengadaan Listrik	17,11	17,27	17,37	18,02	19,16



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023*
	dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,12	1,17	1,28	1,34	1,40
F	Konstruksi	1.749,05	1.664,05	1.624,56	1.685,34	1.824,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	746,27	716,83	747,51	813,64	890,22
H	Transportasi dan Pergudangan	163,10	126,28	128,16	155,40	171,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,43	101,04	105,92	111,92	117,97
J	Informasi dan Komunikasi	137,67	147,41	157,75	165,13	168,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30,11	30,75	30,20	31,92	33,16
L	Real Estate	137,44	139,15	147,07	155,65	166,99
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	409,84	428,20	421,26	441,37	432,02
P	Jasa Pendidikan	41,62	43,12	45,65	47,79	49,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,33	66,25	71,38	75,40	77,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	14,04	14,35	14,68	15,76	16,91
Produk Domestik Regional Bruto		21.795,50	18.405,91	20.870,16	24.265,43	23.519,88
Produk Domestik Regional Bruto (Tanpa Migas)		6.322,11	6.145,67	6.285,25	6.716,39	7.199,72

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 14,66 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 14,80 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Natuna mengalami pertumbuhan sekitar 0,95 persen.

Tabel.T-II.7
PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.725,28	1.684,27	1.711,79	1.768,01	1.838,44



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
B	Pertambangan dan Penggalian	11.019,31	10.488,44	10.486,60	10.385,84	10.362,92
C	Industri Pengolahan	112,78	114,67	115,96	117,37	117,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,33	11,50	11,55	11,91	12,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,94	0,98	1,06	1,10	1,13
F	Konstruksi	1.174,68	1.115,27	1.064,91	1.070,33	1.128,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	470,85	448,49	456,70	478,21	496,47
H	Transportasi dan Pergudangan	100,73	78,48	79,36	88,67	93,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72,80	69,12	72,09	74,80	77,55
J	Informasi dan Komunikasi	120,62	130,68	140,38	146,32	146,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,31	20,98	21,08	21,43	22,04
L	Real Estate	102,19	105,77	110,52	114,41	118,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	286,48	293,62	289,00	296,07	298,23
P	Jasa Pendidikan	24,91	24,82	25,92	26,73	26,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,30	45,86	48,62	50,37	50,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,83	9,79	9,82	10,17	10,67
Produk Domestik Regional Bruto		15.299,36	14.642,75	14.645,40	14.661,78	14.801,85
Produk Domestik Regional Bruto (Tanpa Migas)		4.298,69	4.172,56	4.177,77	4.294,85	4.458,67

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024

Tabel. T-II.8
Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,53	13,34	12,32	11,49	12,81
B	Pertambangan dan Penggalian	71,12	66,76	70,02	72,44	69,53
C	Industri Pengolahan	0,74	0,91	0,82	0,74	0,78



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,02	9,04	7,78	6,95	7,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,42	3,89	3,58	3,35	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan	0,75	0,69	0,61	0,64	0,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	0,55	0,51	0,46	0,50
J	Informasi dan Komunikasi	0,63	0,80	0,76	0,68	0,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	0,17	0,14	0,13	0,14
L	Real Estate	0,63	0,76	0,70	0,64	0,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88	2,33	2,02	1,82	1,84
P	Jasa Pendidikan	0,19	0,23	0,22	0,20	0,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,30	0,36	0,34	0,31	0,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,06	0,08	0,07	0,06	0,07
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Natuna didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Sedangkan menurut pengeluaran, distribusi paling besar terdapat pada jenis pengeluaran Ekspor Neto barang dan jasa. Pengeluaran terbesar kedua adalah pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 2023, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan kontraksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

1. PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
2. Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

Tabel.T-II.9
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,24	(2,38)	1,63	3,28	3,98
B	Pertambangan dan Penggalan	0,36	(2,10)	3,95	(0,96)	(0,22)
C	Industri Pengolahan	1,05	1,68	1,14	1,20	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(0,16)	1,49	0,39	3,17	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(3,57)	3,75	8,43	3,32	3,43
F	Konstruksi	7,87	(5,06)	(4,02)	0,51	5,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	(4,75)	1,83	4,71	3,82
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	(22,09)	1,12	11,74	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	(5,05)	4,31	3,75	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	6,51	8,34	7,42	4,23	0,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	3,31	0,48	1,67	2,82
L	Real Estate	6,32	3,50	4,50	3,52	3,22
M,N	Jasa Perusahaan	3,33	(8,13)	1,19	8,23	1,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,27	2,49	(1,58)	2,45	0,73
P	Jasa Pendidikan	4,52	(0,36)	4,46	3,11	0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	(0,95)	6,01	3,61	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,84	(0,40)	0,31	3,60	4,91
Produk Domestik Regional Bruto		5,95	(2,93)	0,12	2,80	3,81

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024



Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel.T-II.10
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	4,89	-3,59	2,37	4,38	5,50
2	Kabupaten Bintan	4,51	-4,20	0,23	4,44	6,14
3	Kabupaten Natuna	1,75	-2,93	0,12	2,80	3,81
4	Kabupaten Lingga	5,18	-0,68	1,95	3,74	4,30
5	Kab. Kep. Anambas	4,99	-3,30	2,75	3,62	4,12
6	Kota Batam	5,92	2,55	4,75	6,84	7,04
7	Kota Tanjungpinang	3,27	-3,45	0,59	4,12	4,92
8	Kepulauan Riau	4,84	-3,80	3,43	6,40	5,20
9	Nasional	5,02	-5,32	3,69	5,31	5,05

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

Kinerja ekonomi Kabupaten Natuna sepanjang 2023 telah menunjukkan peningkatan seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Indonesia. Dengan ini diharapkan perkembangan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan kesejahteraan itu terjadi melalui selisih pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang terjadi.

2. Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks



harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,14, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel.T-II.11
Nilai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Year on Year (YoY) Tahun 2023

Bulan	IHK	Inflasi YoY
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(4)</i>
Januari	102,03	4,45
Februari	102,23	4,69
Maret	102,24	4,28
April	102,48	3,63
Mei	102,22	2,30
Juni	102,49	1,78
Juli	102,82	1,47
Agustus	102,81	2,04
September	103,33	1,53
Oktober	103,40	1,95
November	103,99	2,84
Desember	104,14	2,14

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2024



Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,96 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,35 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,52 persen. Sedangkan untuk 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,23 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada bulan Desember 2023 antara lain: beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bayam, kangkung, bawang merah, angkutan laut, emas perhiasan, sawi hijau, akademi/perguruan tinggi, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, ikan selar/ikan tude, udang basah, cabai rawit, ikan mata besar, sabun cair/ cuci piring, ikan bulat, bahan bakar rumah tangga, dan sabun mandi cair.

Inflasi m-on-m sebesar 0,37 persen disebabkan naiknya indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,70 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,55 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,99 persen.



Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok transpor justru mengalami, masing-masing sebesar 0,79 persen dan 1,45 persen. Sementara indeks harga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada tahun 2023, antara lain: kangkung, bayam, ikan selar/ikan tude, tarif rumah sakit, tarif dokter umum, ketimun, bawang merah, tomat, beras, dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, cabai merah, bensin, daging ayam ras, cabai rawit, baju muslim wanita, sepatu wanita, buku tulis bergaris, pengharum cucian/pelembut, dan sabun mandi cair.

Jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kepulauan Riau, pada Februari 2023, IHK Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,47% (mtm), lebih tinggi dari bulan lalu yang mengalami deflasi sebesar 0,24% (mtm). Sementara itu, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,76% (yoy), menurun dari tahun sebelumnya 5,83 % (yoy). Namun demikian, Di tahun 2023 inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 2,76 persen lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan inflasi tahunan Nasional yang sebesar 2,61 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Gabungan Kota di Pulau Sumatera yang tercatat sebesar 3,80% (yoy). Inflasi bulanan terutama disebabkan oleh kenaikan harga kangkung, bayam, cabai merah dan harga kontrak rumah.

Inflasi gabungan dua kota di Kepulauan Riau tahun 2023 berkisar - 0,29 persen sampai dengan 0,76 persen, pergerakan Angka inflasi tersebut menunjukkan inflasi masih cukup terkendali, inflasi tertinggi pada bulan November 2023 lebih merupakan dampak dari kenaikan cabe merah, angkutan udara dan bayam, sedangkan inflasi terendah sebesar 0,29 persen yang disebabkan oleh penurunan harga kangkung, bayam dan cabe merah.



Gambar G-II.4
Laju Inflasi Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2023



3. Penduduk Miskin

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan.

Garis kemiskinan di setiap daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga berlaku untuk garis kemiskinan di Kabupaten Natuna, yang terus meningkat sampai dengan tahun 2023. Garis kemiskinan Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah sebesar Rp480.103. Artinya, apabila rumah tangga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka akan digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Di samping itu, pada tahun 2023, penduduk miskin Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 4.300 orang, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai persentase terhadap jumlah penduduk, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di



Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 5,32 persen menjadi 5,25 persen.

Tabel.T-II.12
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	15,36	15,99	16,28	16,44	14,33
2	Kabupaten Bintan	10,14	10,21	10,54	10,67	9,86
3	Kabupaten Natuna	3,43	3,47	3,98	4,32	4,30
4	Kabupaten Lingga	11,56	12,45	12,58	12,70	10,18
5	Kab. Kep. Anambas	2,72	2,80	3,08	3,29	3,08
6	Kota Batam	66,21	67,06	77,17	82,59	83,09
7	Kota Tanjungpinang	19,04	19,98	20,85	21,67	17,67
8	Kepulauan Riau (ribu)	127,76	142,61	137,75	148,89	142,50
9	Nasional (juta)	24,79	27,55	26,50	26,36	25,90

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Indeks Gini Kabupaten Natuna pada tahun 2022 sebesar 0,34.

Tabel.T-II.13
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Indeks Gini				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Kabupaten Karimun	0,303	0,315	0,307	0,288	0,288*
2	Kabupaten Bintan	0,300	0,305	0,272	0,288	0,288*
3	Kabupaten Natuna	0,299	0,337	0,300	0,291	0,291*
4	Kabupaten Lingga	0,282	0,281	0,289	0,277	0,277*
5	Kab. Kep. Anambas	0,281	0,296	0,304	0,313	0,313*
6	Kota Batam	0,331	0,323	0,334	0,336	0,336*
7	Kota Tanjungpinang	0,314	0,345	0,347	0,347	0,347*



8	Kepulauan Riau	0,337	0,334	0,339	0,325	0,340*
9	Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,381*

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

5. Pengeluaran per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan jelas dari besarnya pendapatan yang diterima. Namun mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh maka pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendekatan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga. Secara empiris, indikator pengeluaran perkapita dapat digunakan sebagai Indikator kesejahteraan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Tabel.T-II.14
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna, 2019 – 2023

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan (Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Padi-padian	70.313	71.764	71.218	62.203	77.942
2. Umbi-umbian	6.319	6.399	9.570	8.449	9.290
3. Ikan/Udang/Cumi/Kerang	68.028	75.927	81.614	85.364	97.243
4. Daging	11.764	16.670	18.074	24.368	34.169
5. Telur dan Susu	35.561	41.586	48.073	47.584	55.349
6. Sayur-sayuran	46.465	53.261	59.620	59.102	71.165
7. Kacang-kacangan	7.723	8.957	9.545	7.079	11.117
8. Buah-buahan	27.164	25.644	23.227	33.305	26.170
9. Minyak dan Lemak	16.956	17.628	19.738	24.894	21.624
10. Bahan Minuman	24.277	24.614	27.232	23.568	28.176
11. Bumbu-bumbuan	16.963	18.158	22.712	18.689	22.241
12. Konsumsi Lainnya	16.137	14.599	22.816	18.801	22.824
13. Makanan dan minuman jadi	168.002	178.410	150.908	178.276	207.466
14. Tembakau dan Sirih (Rokok)	84.423	98.284	94.749	79.873	93.645
Jumlah	600.094	651.900	659.097	671.555	778.422

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024



Tabel.T-II.15
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setiap Bulan Menurut Kelompok Non Makanan
di Kabupaten Natuna, 2019 – 2023

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan (Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga				354.184	417.492
2. Aneka komoditas dan jasa				155.262	166.527
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala				36.256	46.447
4. Komoditas tahan lama				24.528	55.134
5. Pajak, pungutan dan asuransi				56.427	62.893
6. Keperluan pesta dan upacara				7.119	38.573
Jumlah				633.775	787.066

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024

Tabel.T-II.16
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain,
Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	14.466	11.885	11.879	12.304	12.756
2	Kabupaten Bintan	12.136	14.482	14.393	14.739	14.882
3	Kabupaten Natuna	14.730	14.705	14.711	14.834	15.409
4	Kabupaten Lingga	14.821	11.998	11.938	12.134	12.485
5	Kab. Kep. Anambas	12.091	11.875	11.950	12.137	12.495
6	Kota Batam	12.065	18.095	18.034	18.506	18.990
7	Kota Tanjungpinang	18.146	15.498	15.439	15.864	16.213
8	Kepulauan Riau	15.838	14.209	14.122	14.469	14.998
9	Nasional	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Secara umum, pengeluaran penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2023 dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Rata-rata pengeluaran untuk makanan penduduk Kabupaten Natuna sebesar Rp 778.442, sementara pengeluaran untuk bukan makanan mencapai Rp. 787.066.

Prosi terbesar pengeluaran untuk makanan adalah dari kelompok makanan dan minuman jadi. Kemudian porsi terbesar selanjutnya adalah dari



kelompok makanan laut, rokok, dan padi-padian. Sedangkan porsi terkecil pengeluaran untuk makanan adalah dari kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan. Kemudian, jika dilihat dari pengeluaran untuk non makanan, porsi terbesar adalah dari kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, sedangkan porsi terkecil adalah dari kelompok keperluan pesta dan upacara.

Secara total, pengeluaran kelompok 40 persen terbawah penduduk Natuna sebesar Rp 867.019, sementara pengeluaran kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas mencapai Rp 1.459.714 dan Rp 3.183.821.

6. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Natuna sebesar 44,72 ribu orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17,02 ribu orang. Angkatan kerja terdiri atas bekerja sebanyak 42,91 ribu orang dan pengangguran terbuka sebanyak 1,8 ribu orang.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 72,43 persen atau meningkat sebesar 4,54 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan yaitu sebesar 82,69 persen.

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, TPT Kabupaten Natuna sebesar 4,05 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan tahun 2022. TPT laki-laki pada tahun 2023 sebesar 2,67 persen yang merupakan TPT laki-laki terendah dalam lima tahun terakhir.



Penduduk dengan pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai merupakan yang terbanyak di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 20,10 ribu orang. Sementara itu, penduduk dengan pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah yang terendah yaitu sebesar 0,99 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja tertinggi adalah sektor Jasa sebanyak 26,37 ribu orang, sedangkan sektor Industri Pengolahan merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja terendah yaitu sebesar 7,3 ribu orang.

Tabel.T-II.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natun 2019-2023 (persen)

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,65	69,39	72,31	67,89	72,43
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,82	4,10	5,15	4,15	4,05

Tabel.T-II.18
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	5,46	8,36	7,20	6,87	6,02
2	Kabupaten Bintan	8,01	8,86	8,62	6,91	5,43
3	Kabupaten Natuna	3,33	4,10	5,15	4,15	4,05
4	Kabupaten Lingga	4,01	4,41	4,23	3,09	3,52
5	Kab. Kep. Anambas	2,91	3,44	1,27	2,15	2,55
6	Kota Batam	7,72	11,79	11,64	9,56	8,14
7	Kota Tanjungpinang	5,64	9,30	6,31	5,27	4,76
8	Kepulauan Riau	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80
9	Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32*

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Natuna diukur dengan sejumlah indikator yang terkait pada urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial.



Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 15.409.000 rupiah, meningkat dari nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna pada tahun 2022 sebesar 14.834.000 rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (knowledge), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- c. Dimensi standar hidup layak (a decent standard of living), yang diukur dengan paritas daya beli.

Tabel.T-II.19
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna
Tahun 2019-2023

Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita (Juta)	IPM
2019	64,81	13,89	8,72	14,772	72,60



Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Rill Per Kapita (Juta)	IPM
2020	65,06	13,90	8,73	14,762	72,75
2021	65,31	13,91	8,92	14,711	73,09
2022	65,76	13,92	8,96	14,834	73,47
2023	66,22	13,93	9,08	15,409	78,23

Sumber : BPS Kepri, 2024

Tabel.T-II.20
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Indeks Pembangunan Manusia				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	71,10	72,85	73,11	73,96	74,70
2	Kabupaten Bintan	73,98	76,04	76,48	76,80	77,50
3	Kabupaten Natuna	72,63	77,03	77,33	77,59	78,23
4	Kabupaten Lingga	64,98	70,38	70,82	71,48	72,23
5	Kab. Kep. Anambas	68,48	71,50	71,86	72,15	72,80
6	Kota Batam	81,09	81,81	81,82	82,25	82,64
7	Kota Tanjungpinang	78,73	79,96	79,98	80,58	81,14
8	Kepulauan Riau	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08
9	Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

Tabel.T-II.21
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	7,92	8,17	8,18	8,48	8,69
2	Kabupaten Bintan	8,36	8,44	8,67	8,70	8,92
3	Kabupaten Natuna	8,72	8,73	8,92	8,96	9,06
4	Kabupaten Lingga	6,51	6,67	6,88	7,12	7,35
5	Kab. Kep. Anambas	6,91	7,17	7,34	7,38	7,40
6	Kota Batam	11,13	11,14	11,15	11,17	11,19
7	Kota Tanjungpinang	9,99	10,25	10,26	10,49	10,65
8	Kepulauan Riau	10,13	10,22	10,18	10,37	10,41
9	Nasional	8,75	8,90	8,97	8,69	8,77

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024



Tabel.T-II.22
Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	70,71	70,91	71,11	71,53	72,01
2	Kabupaten Bintan	70,30	70,38	70,46	70,76	71,09
3	Kabupaten Natuna	64,81	65,06	65,31	65,76	66,22
4	Kabupaten Lingga	61,75	62,06	62,39	62,92	63,50
5	Kab. Kep. Anambas	67,06	67,21	67,36	67,73	68,10
6	Kota Batam	73,29	73,33	73,36	73,62	73,94
7	Kota Tanjungpinang	72,02	72,10	72,18	72,49	72,85
8	Kepulauan Riau	69,80	69,96	70,12	70,50	70,91
9	Nasional	71,34	71,47	71,57	71,85	72,13

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

Tabel.T-II.23
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	12,30	12,42	12,57	12,59	12,61
2	Kabupaten Bintan	12,95	13,10	13,26	13,27	13,44
3	Kabupaten Natuna	13,89	13,90	13,91	13,92	13,93
4	Kabupaten Lingga	12,44	12,45	12,59	12,61	12,63
5	Kab. Kep. Anambas	12,75	12,81	12,88	12,89	13,05
6	Kota Batam	13,15	13,16	13,17	13,32	13,34
7	Kota Tanjungpinang	14,09	14,12	14,13	14,14	14,15
8	Kepulauan Riau	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05
9	Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai UHH penduduk Kabupaten



Natuna pada tahun 2023 adalah 66,22 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 dapat bertahan hidup rata-rata sampai dengan umur 66,22 tahun atau kurang lebih sekitar 66 tahun 2 bulan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 13,93 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,93 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna telah memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 9,06 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 15.409.000 rupiah.

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 78,23. Angka ini meningkat 4,76 poin dari tahun 2022 dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 73,47. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.



2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam prakteknya selama ini, ternyata nilai-nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan yang mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi daerah, serta dalam kerangka memperkuat kohesi dan ketahanan sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terabaikannya budaya daerah yang memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan (custom), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Natuna menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana tempat peribadatan di Kabupaten Natuna. Hal ini dimaksud untuk memberi kenyamanan dan memfasilitasi kegiatan peribadatan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antarumat beragama. Hingga Tahun 2023 tercatat terdapat 140 mesjid, 173 musholla, 14 gereja, 3 pura, 2 vihara, dan 2 cetiya/klenteng.

Pembangunan di bidang sosial dan budaya ditandai dengan terwujudnya karakter kota yang ramah lingkungan, bermartabat, memiliki kesetiakawanan sosial dan toleransi yang tinggi antar umat beragama serta



menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Kepedulian masyarakat didasari rasa saling percaya antar umat beragama dan pembangunan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, serta berkelanjutan sehingga benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Terciptanya kerukunan hidup umat beragama yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan keharmonisan dalam kehidupan kemasyarakatan menjadi prakondisi yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran akselerasi peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik. Pembangunan kehidupan beragama merupakan salah satu agenda yang secara implementatif diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan yang disertai pula dengan upaya-upaya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dipeluknya. Usaha menjaga kerukunan antar umat beragama telah difasilitasi pemerintah melalui berbagai wadah aspirasi masyarakat dalam bentuk organisasi sosial keagamaan, yayasan, dan paguyuban lintas agama; pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama; kegiatan-kegiatan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kekurangan atau yang sedang dilanda bencana; serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selain itu transformasi nilai-nilai agama juga diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, disamping juga dilaksanakan proses pembelajaran keagamaan secara informal melalui keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Walaupun demikian, dalam realitasnya harus diakui bahwa seringkali nilai-nilai ajaran agama tersebut terasa “menjauh” dan secara esensial masih belum membumi bagi sebagian kalangan tertentu dalam praktik kehidupan sehari-harinya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.



a. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan wajib pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Natuna masih perlu ditingkatkan.

Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada bidang pendidikan, sudah mencantumkan muatan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Minimal Pendidikan. Capaian indikator SPM bidang pendidikan pada Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.T-II.24
Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
KATEGORI INDEKS CAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA				96,92%
01.00	Pendidikan Dasar Usia Dini					75,75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	80,00%
	A.Jumlah yang Harus Dilayani:		3,175	3,175	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	1. Angka Partisipasi Sekolah	%	55,45	55,45	0	100%
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	23,08	23,08	0	100%
	3.Pertumbuhan pendidik PAUD di S1 / DIV	%	62,5	62,5	0	100%
	4.Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	30,5	30,5	0	100%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	73	73	0	100%
	6. Indeks distribusi guru	%	0,35	0,35	0	100%
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	20,16	20,16	0	100%
	8. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0%
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	0,04	0,04	0	100%
	JUMLAH		265	265	0	100%
02.00	Pendidikan Dasar					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:		9,376	9,376	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	SD					
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	105,2	105,2	0	100,00%
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	99,33	99,33	0	100,00%
	3. Angka Partisipasi Murni	%	99,08	99,08	0	100,00%
	4. Kemampuan Literasi	Nilai	49,66	49,66	0	100,00%
	5. Kemampuan Numerasi	Nilai	37,66	37,66	0	100,00%
	6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	8,67	8,67	0	100,00%
	7. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	19,64	19,64	0	100,00%
	8. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	79,46	79,46	0	100,00%
	9. Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	%	83,43	83,43	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	728	728	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0,8	0,8	0	100,00%
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	90,7	90,7	0	100,00%
	13. Proporsi PTK Penggerak	%	0	0	0	0,00%
	14. Pengalaman Pelatihan Guru	%	728	728	0	100,00%
	SMP					
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	95,69	95,69	0	100,00%
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	99,43	99,43	0	100,00%
	3. Angka Partisipasi Murni	%	91,83	91,83	0	100,00%
	4. Kemampuan Literasi	Nilai	63,25	63,25	0	100,00%
	5. Kemampuan Numerasi	Nilai	53,54	53,54	0	100,00%
	6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	8,21	8,21	0	100,00%
	7. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	6,53	6,53	0	100,00%
	8. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	80,64	80,64	0	100,00%
	9. Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	%	80,4	80,4	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	346	346	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0,72	0,72	0	100,00%
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	65,56	65,56	0	100,00%
	13. Proporsi PTK Penggerak	%	0	0	0	0,00%
	14. Pengalaman Pelatihan Guru	%	346	346	0	100,00%
	JUMLAH		3,468	3,468	0	100,00%
03.00	Pendidikan Kesenjangan					90,77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	80,00%
	A.Jumlah yang Harus Dilayani:		110	110	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10,77%
	B.Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	97	97	0	100,00%
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	7,22	7,22	0	100,00%
	3. Angka Partisipasi Murni	%	7,22	7,22	0	100,00%
	4. Kemampuan Literasi	Nilai	18	18	0	100,00%
	5. Kemampuan Numerasi	Nilai	1	1	0	100,00%
	6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	5	5	0	100,00%
	7.Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	0	0	0	0,00%
	8.Indeks Iklim Keamanan	Nilai	1	1	0	100,00%
	9.Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	%	0	0	0	0,00%
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0,00%
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	%	0	0	0	0,00%
	13. Proporsi PTK Penggerak	%	0	0	0	0,00%
	14. Pengalaman Pelatihan Guru	%	0	0	0	0,00%
	JUMLAH		136	136	0	100,00

Jika dilihat dari capaian SPM diatas, maka capaian kinerja SPM bidang Pendidikan masih belum sepenuhnya tercapai sesuai target.

Evaluasi pencapaian aspek pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator yang sudah ditetapkan di RPJMD meliputi :



Tabel.T-II.25
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.	Angka Kelulusan SD /Mi	Persen	100	100	99,79	99,79	Tercapai
2.	Angka Kelulusan SMP / MTs	Persen	100	100	99,00	99,00	Tercapai
3.	Angka Melek Huruf	Persen	99,14	99,84	n.a	n.a	Tidak Dihitung
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	100,61	83,48	75,94	90,97	Tercapai
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	70,36	59,09	55,45	93,83	Tercapai
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / Sederajat	Persen	105,52	105,52	105,2	99,70	Tercapai
7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs / Sederajat	Persen	100,06	96,23	95,69	99,44	Tercapai
8.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	81,67	97,37	71,24	73,16	Belum Tercapai
9.	Persentase Guru yang bersertifikat Pendidik (TK,SD, SMP)	Persen	31,44	27,21	45,00	142,68	Tercapai
10.	Persentase SD / MI Berakreditasi Minimal B	Persen	72,28	78,54	71,76	91,37	Tercapai
11.	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	25	60,00	62,90	105,00	Tercapai
12.	Persentase SMP / MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	62,96	55,63	34,15	61,38	Belum Tercapai
13.	Persentase Warganegara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	70,36	100	55,45	55,45	Belum Tercapai
14.	Persentase Warganegara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD / MI, SMP / MTs)	Persen	102,79	100	99,37	99,37	Tercapai
15.	Persentase Warganegara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	88,18	100	91,36	99,40	Tercapai
16.	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Slswa berdasarkan Hasil Assesmen Nasional	Nilai	n.a	2	62,90	3143,50	Tercapai
17.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	99,37	95,5	83,38	91,91	Tercapai
18.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini	Persen	55,45	62	59,01	98,15	Tercapai
19.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,37	96,5	99,87	103,10	Tercapai
20.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menvelesaikan	Persen	7,22	96,5	91,36	99,40	Tercapai



No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan						

Pencapaian aspek pelayanan umum urusan pendidikan masih belum seluruhnya dapat tercapai disebabkan oleh berbagai permasalahan diantaranya untuk indikator Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B, permasalahan yang dihadapi adalah Hasil penilaian dari Badan Akreditasi Nasional terhadap SMP/ MTs di Kabupaten Natuna, belum memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan untuk mendapatkan akreditasi B, sehingga sebagian besar SMP/ MTs masih terakreditasi C.

Tabel.T-II.26
Banyaknya Sekolah di Kabupaten Natuna, 2019-2023 (Dalam Unit)

Tahun	TK/RA	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
2023	75	86	41	24
2022	82	85	41	26
2021	76	85	40	26
2020	77	85	40	27
2019	79	82	38	28

Sumber : Natuna Dalam Angka 2024

Tabel.T.II-27
Rasio Guru-Murid di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

Tahun	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
2023	1 : 7	1 : 10	1 : 8	1 : 8
2022	1 : 7	1 : 10	1 : 8	1 : 7
2021	1 : 7	1 : 9	1 : 7	1 : 7
2020	1 : 7	1 : 9	1 : 7	1 : 7
2019	1 : 5	1 : 10	1 : 7	1 : 8

Sumber: Natuna Dalam Angka 2024

Kabupaten Natuna memiliki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga jenjang Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta. Pada Tahun 2023 terdapat Taman Kanak-kanak berjumlah 75 sekolah, 2.070



murid dan 300 guru dengan rasio guru terhadap murid adalah 1 : 7, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 86 buah, dengan 9.220 murid dan 963 guru, dengan rasio guru terhadap murid 1 : 10. Pada tahun 2023 terdapat 41 SMP/MTs dengan 4.296 murid dan 559 guru, dengan rasio guru terhadap murid 1 : 8, dan 24 SMA/MA/SMK dengan 4.140 murid dan 543 guru, dengan rasio guru terhadap murid 1 : 8.

Setiap jenjang pendidikan telah pula menyediakan prasarana yang cukup berkualitas dengan kuantitas yang memadai guna memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas keilmuan peserta didik. Prasarana tersebut mencakup peralatan laboratorium, alat peraga, sarana prasarana olah raga dan kesenian, termasuk pula peralatan audio visual yang dapat menciptakan suasana belajar lebih menyenangkan dengan harapan bahwa kaidah ilmu yang dipelajari akan lebih mudah dipahami. Hal inilah yang mendorong nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Natuna kedepan untuk dapat melebihi 100 persen.

Tabel.T.II-28
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
SD/Mi	99,08	99,87	105,52	105,11
SMP/MTs	91,83	83,38	95,69	98,37
SMA/SMK/MA	72,08	61,49	89,13	75,80

Sumber: Natuna Dalam Angka 2024

Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana sarana pendidikan, sarana merata diseluruh kesehatan juga telah tersebar diseluruh wilayah Natuna. Pada tahun 2023 terdapat 2 rumah sakit, 15 puskesmas, dan 41 puskesmas pembantu. Selain itu, data sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2023 terdapat 7 balai kesehatan, 127



posyandu, dan 14 polindes. Di beberapa tempat, meskipun hanya Puskesmas Pembantu, sarana kesehatan tersebut telah mampu membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yaitu :

Tabel.T-II.29
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	95,94	76,75	100	100	20	96,75	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	91,49	73,19	100	100	20	93,13	
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	100	97,34	77,87	100	100	20	97,87	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	76,47	61,18	100	61,26	12,25	73,43	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	100	75,92	60,74	100	60,53	12,11	72,85	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Produktif	100	75,61	60,48	100	56,88	11,38	71,86	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	73,11	58,48	100	74,23	14,85	73,33	
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100	44,19	35,35	100	64,45	12,89	48,24	
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100	91,36	73,09	100	83,33	16,67	89,76	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	80	100	85,71	17,14	97,14	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	57,08	45,67	100	92,31	18,46	64,13	
12.	Pelayanan Kesehatan orang resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	100	80	100	89,33	17,87	97,87	

Jika dilihat dari capaian SPM diatas, maka capaian kinerja SPM bidang Kesehatan masih belum sepenuhnya tercapai sesuai target, namun demikian ada yang sudah mendekati target yang ditetapkan dan ada juga indikator yang telah mencapai target nasional.

Tabel.T-II.30
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Angka	17,46	11,02	13,19	119,69	Tercapai
2.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	91.91	293,90	175,9	140,15	Tercapai
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Persen	76.97	100	73,43	73,43	Belum Tercapai
4.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	51.04	100	72,84	72,84	Belum Tercapai
5.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	72,84	72,84	Belum Tercapai
6.	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0.40	0,75	0,64	85,33	Belum Tercapai
7.	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	73,43	73,43	Belum Tercapai
8.	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	53	100	97,87	97,87	Tercapai
9.	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	85.66	100	97,87	97,87	Tercapai
10.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	84.68	100	93,13	93,13	Tercapai
11.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	80,00	100	93,13	93,13	Tercapai
12.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	80.00	100	96,75	96,75	Tercapai
13.	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	84.41	100	96,75	96,75	Tercapai
14.	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100	99,48	99,48	Tercapai
15.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Jiwa Sesuai Standar	Persen	88.75	100	97,14	97,14	Tercapai
16.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	Persen	84.31	100	97,87	97,87	Tercapai
17.	Persentase orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	Persen	46.42	100	64,13	64,13	Belum Tercapai
18.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	59.89	100	71,86	71,86	Belum Tercapai
19.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	89,76	89,76	Belum Tercapai
20.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	84.13	100	89,76	89,76	Belum Tercapai
21.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	31,97	100	48,24	48,24	Belum Tercapai
22.	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	97,14	97,14	Tercapai
23.	Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	64,13	64,13	Belum Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	sesuai standar						
24.	Persentase Prevalensi Stunting	Persen	11.93	10,50	12,66	120,57	Tercapai
25.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	Tercapai
26.	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	65,00	100	97,87	97,87	Tercapai
27.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	62.72	100	73,33	73,33	Belum Tercapai
28.	Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	73,33	73,33	Belum Tercapai
29.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0.14	0,138	0,14	101,45	Tercapai

Pencapaian aspek pelayanan umum urusan kesehatan masih belum seluruhnya dapat tercapai disebabkan oleh berbagai permasalahan berikut :

- Pelayanan usia produktif dan usia lanjut tidak terintegrasi sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan
- Belum adanya pojok hipertensi di setiap kecamatan sehingga masih rendahnya kepatuhan berobat pada penderita hipertensi
- Kurangnya edukasi oleh petugas kesehatan kepada keluarga penderita dan kontak erat penderita tuberculosis
- Logistik sarana pendukung berupa mikroskop pemeriksaan sampel penderita tuberkulosis masih kurang
- Ketersediaan obat untuk tuberkulosis pada anak masih kurang
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat dalam upaya screening tuberculosis
- Kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya pemberian terapi pencegahan tuberkulosis kepada kelompok berisiko (balita)
- Ketersediaan bahan habis pakai (BHP) masih terbatas
- Waktu pelayanan di pos pembinaan terpadu (Posbindu) masih terbatas.



Tabel.T-II.31
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Balai Kesehatan
2023	2	15	41	n.a	7
2022	2	14	41	n.a	7
2021	3	13	34	n.a	6
2020	2	14	43	n.a	4
2019	2	14	42	n.a	4

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Tabel.T-II.32
Jumlah Tenaga Dokter dan Paramedis Menurut Kecamatan
di Kabupaten Natuna, 2019-2023

Tahun	Dokter			Paramedis		
	Spesialis/Umum	Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
2023	58	9	371	249	54	38
2022	69	9	368	260	59	44
2021	44	n.a	221	191	44	31
2020	38	n.a	208	167	37	24
2019	45	n.a	249	153	36	22

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Selain itu, tenaga kesehatan yang berkualitas juga sangat memegang peranan penting karena dengan bantuan mereka banyak kemungkinan penyakit dapat disembuhkan. Jumlah dokter spesialis dan dokter umum tercatat 58 orang, dokter gigi 9 orang, jumlah perawat sebanyak 371 orang, dan bidan sebanyak 249 orang, dan 92 orang tenaga kesehatan lainnya terdiri dari 54 orang tenaga farmasi dan 38 orang ahli gizi.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminkan hasil dalam pengembangan kapasitas dan kualitas



layanan infrastruktur ke-PU-an seperti: jalan/jembatan, irigasi, dan infrastruktur keciptakaryaan.

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.T-II.33
Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Tahun 2025						
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
KATEGORI INDEKS CAPAIAN SPM						70,97%
01.00	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					75,75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	68,16%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	83,450	71,100	12,350	85%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					7,59%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	37,93%
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	26,311	18,404	7,907	69,95%
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	0	0	0	0%
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah tangga	5,621	2,464	3,157	43,84%
	4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kuantitas (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah tangga	0	0	0	0%
	JUMLAH		31,932	20,868	11,064	113,79%
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik					66,20%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	58,78%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indeks Capaian / Output			Total Capaian
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	83,450	61,320	22,130	73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					7,42%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	37,08%
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah tangga	25,808	20,440	5,368	79,20%
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat/ SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah tangga	25,808	20,440	5,368	79,20%
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah tangga	25,808	3,884	21,924	15,05%
	4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah tangga	852	51	801	5,99%
	5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah tangga	852	51	801	5,99%
	JUMLAH		79,128	44,866	34,262	185,43%

Tabel.T-II.34
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman	Persen	14,22	75	75	100	Tercapai
2.	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	Persen	0	89,58	10,12	11	Belum Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan / Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
4.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
5.	Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Jaringan	0	1	0	0	Belum Tercapai
6.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1	1	1	100	Tercapai
7.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lai	Kerjasama	0	1	0	0	Belum Tercapai
8.	Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah	Jiwa	44	1150	40762	3544,52	Tercapai
9.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Rumah Tangga	16710	16283	22671	139	Tercapai
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jiwa	66840	65132	71100	109	Tercapai
11.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Jiwa	2500	1000	61320	61,32	Belum Tercapai
12.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jiwa	16	16	0	0	Belum Tercapai
13.	Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persen	40,10	47,22	0,53	1,12	Belum Tercapai
14.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	Persen	14,22	59,55	0,2	0,3	Belum Tercapai
15.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	Persen	58,50	81,44	85,24	100	Tercapai
16.	Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja	Persen	51	66	0,58	0,8	Belum Tercapai
17.	Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persen	52	91	0,53	0,5	Belum Tercapai
18.	Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Persen	26,81	86	14,57	16,94	Belum Tercapai
19.	Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	ada	Ada	Ada	100	Tercapai
20.	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	87479	255,2	10,607	1060,7	Tercapai
21.	Panjang Jembatan yang Dibangun	Unit	6	1	0	0	Belum Tercapai
22.	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
23.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Tidak ada	Ada	Ada	100	Tercapai
24.	Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang	Persen	70	89	2,63	2,95	Belum Tercapai
25.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	65	69,02	73	105	Tercapai
26.	Persentase Kemantapan Jalan	Persen	70	56,16	53,66	0,5	Belum Tercapai
27.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	Persen	60	75	0	0	Belum Tercapai
28.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	Persen	70	75	0	0	Belum Tercapai
29.	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Persen	64,7	85,9	85,2	99	Belum Tercapai
30.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	65	68,2	72,10	105,72	Tercapai
31.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	55	68	79,27	116,5	Tercapai
32.	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Jiwa	16.720	13.385	18.404	137,5	Tercapai
33.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Rumah Tangga	75	212	51	0,24	Belum Tercapai
34.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	75	100	68	68	Belum Tercapai
35.	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi	Rasio	1:1	1:7	1:1,5	466,67	Tercapai
36.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	1:1	1:24	1:38	63,16	Belum Tercapai
37.	Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang Disetujui	Ada/Tidak	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	0	Belum Tercapai
38.	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	Tidak	Tidak	0	Belum Tercapai
39.	Tersusun dan Ditetapkannya JAKSTRAda Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Tidak	0	Belum Tercapai
40.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	853	55,16	53,66	97,28	Tercapai

Beberapa indikator bidang Pekerjaan Umum yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya untuk indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota belum bisa memenuhi target disebabkan oleh pendataan



kepatuhan IMB hanya dilakukan pada gedung pemerintahan, sedangkan data kepatuhan IMB untuk bangunan lainnya belum terdata. Untuk indikator Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, permasalahan yang dihadapi karena masa berlaku sertifikat jasa trampil konstruksi di Kabupaten Natuna telah habis masa berlakunya.

Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna memiliki panjang jalan total sebesar 722,140 km, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kewenangan. Dari total panjang jalan tersebut, sebanyak 464,08 km adalah jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Natuna.

Secara keseluruhan, panjang jalan di Kabupaten Natuna yang berada dalam kondisi baik sebanyak 359,13 km, kondisi sedang sebanyak 111,79 km, kondisi rusak sebanyak 127,91 km, dan kondisi rusak berat sebanyak 123,31 km.

Tabel. T-II.35
Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan Dan
Jenis Permukaan di Kabupaten Natuna, Tahun 2023 (Km)

Jenis Permukaan	Negara	Propinsi	Kabupaten	Jumlah
1. Asphalt	114,73	100,13	128,42	343,28
2. Beton	0,00	21,61	129,15	150,76
3. Kerikil	0,00	8,19	48,60	56,79
4. Tanah	0,00	13,40	157,91	171,32
2023	114,73	143,33	464,08	722,14

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka, 2024

Tabel. T-II.36
Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan, Tahun 2023 (Km)

JenisPermukaan Surface Type	Negara State	Propinsi Province	Kabupaten Regency	Jumlah Total
1. Baik Good	74,19	97,98	186,96	359,13
2. Sengah Moderate	38,94	10,77	62,08	111,69
3. Rusak Ringan Damaged	1,60	24,39	101,92	127,91
5. Rusak Berat Severely Damaged	0,00	10,19	113,12	123,31
2023	114,73	143,33	464,08	722,04

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka, 2024



Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). Selanjutnya dalam Pasal 3 ditegaskan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Tabel.T-II.37
Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Target	Indeks Capaian / Output			Capaian
			Jumlah yang dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
Kategori Indek Capaian SPM			Tuntas Madya			100%
Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar			Jumlah yang terlayani			100%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	Rehabilitasi rumah korban bencana	2 Unit	14 Unit	14 Unit	0	100%
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota					
	Dampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	2 Unit	5 Unit	5 Unit	0	100%
	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah dan atau Bangunan	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	100%

Capaian indikator SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator standar pelayanan minimal yang ditargetkan pada tahun 2023 sudah tercapai dengan capaian 100 persen.

Tabel.T-II.38
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1.	Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	87	100	98	98	Tercapai
2.	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kawasan	41	5	1	20	Belum Tercapai
3.	Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Kawasan	1	5	1	20	Belum Tercapai
4.	Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas	Unit	1	50	98	100	Tercapai
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Unit	41	4	100	100	Tercapai
6.	kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	1	100	Tercapai
7.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	1	36	13,52	37,56	Belum Tercapai
8.	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persen	80	14,8	89	100	Tercapai
9.	Rasio Rumah dan KK	Rasio	1:15	1:4	1:9	100	Tercapai

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah layak huni; peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; serta penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh.

Permasalahan pembangunan daerah pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :



- a. Untuk indikator Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU, Kawasan Perumahan terbangun oleh pemerintah pusat belum di lakukan serah terima (status pinjam pakai), sehingga daerah tidak ada kewenangan untuk memfasilitasi /pemeliharaan PSU Perumahan
- b. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani belum tercapai disebabkan oleh Kurang maksimalnya sinkronisasi program kegiatan yang berkontribusi pengurangan di kawasan kumuh di bawah 10 ha

Tabel. T-II.39
Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Natuna, 2019 – 2023

Tahun	RumahTangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak
2019	72,34
2020	82,72
2021	81,26
2022	87,23
2023	86,17

Sumber: Dinas PUPR Kab Natuna, 2024

Tabel. T-II.40
Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Natuna, 2019 – 2023

Tahun	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
2019	63,41
2020	70,71
2021	70,71
2022	76,45
2023	79,27

Sumber: Dinas PUPR Kab Natuna, 2024

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keadaan masyarakat yang tentram, damai, kondusif merupakan harapan dari pemerintah dan



masyarakat, sehingga segala kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan tentram, tertib, dan teratur.

Tabel.T-II.41
Capaian Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
Kategori Indek Capaian SPM Trantibum		Tuntas Utama				94,25%
01.00	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					94,25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		250	250	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14,25%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	71,27%
	1. Standar sarana prasarana satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	362	308	54	85,08%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP Penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	8	8	0	100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	4	4	0	100%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	0	0%
	5. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	0%
	6. Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	0%



Capaian indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Tahun 2023 untuk bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mencapai 100 persen.

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.T-II.42
Capaian Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
Kategori IndeK Capaian SPM Kebencanaan			Tuntas Utama			91,44%
01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					98,18%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		1,863	1,863	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18,18%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	90,91%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara di kawasan rawan bencana	Orang	132	132	0	100%
	3. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	132	150	-18	100%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	10	5	5	50%
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					90,65%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		1,863	1,863	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10,65%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Belum Tersedia	53,25%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	10	10	0	100%
	2. Peningkatan kapasitas personil / Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	77	5	72	6,49%
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					85,50%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		1,863	1,863	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5,50%
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Belum Tersedia	27,50%
	1. Aktivasi system komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	Orang	2	54	-52	100%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	89	-88	100%
	4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	0%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	0	0	0	0%

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel.T-II.43
Capaian Indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
Kategori Indek Capaian SPM Damkar			Tuntas Utama			95,08%
01	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					95,08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang harus dilayani		81	81	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15,08%
	B. Jumlah Mutu Barang /Jasa /SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Belum Tersedia	25,85%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	5	5	0	100%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman Pemukima, .. dst)	Dokumen	5	5	0	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas penyelamatan, jaket, ...dll)	Unit	10	10	0	100%
	4.Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	119	2	117	1,68%
	5.Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	0%
	6.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	0%

Tabel.T-II.44
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen	100	1	1	100	Tercapai
2.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	7	16	228,57	Tercapai
3.	Jumlah Daerah Bencana Alam/ Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Persen	9	20	1	5	Belum Tercapai
4.	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Kasus	106	110	165	150	Tercapai
5.	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	0	8	71	887,5	Tercapai
6.	Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari	Kali	3	3	3	100	Tercapai
7.	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	91	92	92	100	Tercapai
8.	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda	6	8	3	37,5	Belum Tercapai
9.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	18	16	88,8	Belum Tercapai
10.	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Perda	7	8	3	37,5	Belum Tercapai
11.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS	Orang	0	5	2	40	Belum Tercapai
12.	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	267	340	0	0	Belum Tercapai
13.	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	Jenis	0	33	5	15,15	Belum Tercapai
14.	Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP	Unit	4	5	5	100	Tercapai
15.	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Orang	50	454	484	106	Tercapai
16.	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran	Persen	10	85	37,2	44,35	Belum Tercapai
17.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	91	92	92	100	Tercapai
18.	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	90	1,25	2	160	Tercapai
19.	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Persen	53	70	1,88	2,69	Belum Tercapai
20.	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis	Persen	20	100	100	100	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Ancaman Bencana						
21.	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	Persen	100	67	100	149	Tercapai
22.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	Persen	124	100	100	100	Tercapai
23.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB	Persen	10	100	100	100	Tercapai
24.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	85	100	100	100	Tercapai
25.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	Persen	70	75	75	100	Tercapai
26.	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	Persen	163	100	100	100	Tercapai
27.	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	n.a	100	100	100	Tercapai
28.	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	n.a	100	100	100	Tercapai
29.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Persen	91	92	33,33	36,23	Belum Tercapai
30.	Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	10	0,03	143	95	Tercapai
31.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	0	100	0	100	Tercapai
32.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	20	100	100	100	Tercapai
33.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang	20	54000	26775	49,58	Belum Tercapai
34.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	13	100	64,29	64,29	Belum Tercapai
35.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	13	100	89	89	Belum Tercapai
36.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	85	100	100	100	Tercapai
37.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen	124	100	98	98	Tercapai
38.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan	Persen	100	100	100	100	Tercapai
39.	Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Kelurahan/Desa	Unit	3	2	0	0	Belum Tercapai
40.	Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan	Orang	0	54	0	0	Belum Tercapai
41.	Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan	Unit	240	2	1	50	Belum Tercapai
42.	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	Jenis	3	2	0	0	Belum Tercapai
43.	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan	SOP	4	5	13,58	271,6	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Gangguan Trantibum						
44.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit/ Kejadian	13	13	13,58	104,46	Tercapai

Sepanjang tahun 2023 terdapat 76 kejadian tindak pidana di Kabupaten Natuna. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 64 tindak pidana. Dari 76 tindak pidana yang terjadi pada tahun 2023, hanya sebanyak 60 tindak pidana yang berhasil diselesaikan atau sebesar 79 persen, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan penyelesaian tahun sebelumnya yang mencapai 71 persen.

Selain itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Natuna dari 12.137 menjadi 4.837 pelanggaran. Penurunan angka pelanggaran lalu lintas yang signifikan ini terjadi karena adanya perbedaan konsep pelanggaran yang dipakai pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2022, konsep pelanggaran adalah yang terkena tilang dan terkena teguran, sedangkan pada tahun 2023 yang termasuk pelanggaran adalah yang terkena teguran.

Selama tahun 2023, terdapat 54 kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Natuna. Dari total kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak terdapat korban meninggal dunia, sedangkan korban dengan luka berat sebanyak 40 orang dan luka ringan sebanyak 26 orang.

Beberapa indikator kinerja daerah terkait pemadam kebakaran masih belum tercapai disebabkan oleh permasalahan masih kurangnya kualitas sumber daya aparat pemadam kebakaran, belum dibentuknya relawan pemadam kebakaran, dan belum tersedianya pos damkar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana damkar di kecamatan dan kelurahan/desa.



Sosial

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan di setiap daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga berlaku untuk garis kemiskinan di Kabupaten Natuna, yang terus meningkat sampai dengan tahun 2023. Garis kemiskinan Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah sebesar Rp480.103. Artinya, apabila rumah tangga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka akan digolongkan sebagai rumah tangga miskin .

Di samping itu, pada tahun 2023, penduduk miskin Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 4.300 orang, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai persentase terhadap jumlah penduduk, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 5,32 persen menjadi 5,25 persen.

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel.T-II.45
Capaian Indikator SPM Bidang Sosial
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
3	Jumlah lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
4	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Setiap Tahun
5	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Setiap Tahun

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 adalah 100%.



Tabel.T-II.46
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1.	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	Keluarga	137	90	0	0	Belum Tercapai
2.	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Jiwa	90	1852	7640	412.53	Tercapai
3.	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Unit	1	0	0	0	Belum Tercapai
4.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan	Orang	3116	20	2018	10090	Tercapai
5.	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	Paket	274	20	1849	9245	Tercapai
6.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	Layanan	1	1	1	100	Tercapai
7.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan /atau Relawan Sosial yang Tersedia	Orang	47	35	52	148.57	Tercapai
8.	Jumlah Pekerja Sosial Professional dan /atau TKS dan /atau Relawan Sosial yang Disediakan	Orang	47	14	52	371,43	Tercapai
9.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	0	5	1	20	Belum Tercapai
10.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau	Orang	3476	84	3128	3723	Tercapai
11.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	Orang	1	2	1	50	Belum Tercapai
12.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	Orang	0	5	5	100	Tercapai
13.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	36	30	75	250	Tercapai
14.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2083	90	1940	2155	Tercapai
15.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter	Orang	0	50	0	0	Belum Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
16.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	1	5	1	20	Belum Tercapai
17.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi	Paket	1215	100	124	124	Tercapai
18.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti	Paket	0	10	124	124	Tercapai
19.	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	Panti/ Rumah Singgah	0	1	0	0	Belum Tercapai
20.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah	Orang	0	2	0	0	Belum Tercapai
21.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk	Tim	0	1	0	0	Belum Tercapai
22.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	Tercapai
23.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	Tercapai
24.	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	40	50	50	100	Tercapai
25.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Persen	77,21	51,04	75.44	147.80	Tercapai
26.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Persen	100	100	100	100	Tercapai
27.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	89,25	60,09	87.80	146.11	Tercapai
28.	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	0	100	100	100	Tercapai
29.	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	Tercapai
30.	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	Tercapai
31.	Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	Tercapai

Beberapa indikator kinerja bidang sosial yang belum tercapai diantaranya adalah Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki



sesuai Standar, Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah, dan Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk. Indikator-indikator tersebut belum bisa memenuhi target karena belum dibangunnya rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, disamping sudah dilaksanakan berbagai program pemberantasan kemiskinan oleh SKPD terkait, juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai lembaga yang mengelola pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna secara terarah, terencana, terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan dengan menggunakan database yang sama dalam menentukan sasaran penerima manfaat. Namun demikian, secara umum, dalam implementasi di lapangan masih ditemui beberapa kendala antara lain:

1. Masih lemahnya koordinasi dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
2. Masih lemahnya koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, lemahnya sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, lemahnya sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani) dalam penyelenggaraan keseluruhan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
3. Masih belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Natuna sebesar 44,72 ribu orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah



tangga, dan lainnya) sebesar 17,02 ribu orang. Angkatan kerja terdiri atas bekerja sebanyak 42,91 ribu orang dan pengangguran terbuka sebanyak 1,8 ribu orang.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 72,43 persen atau meningkat sebesar 4,54 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan yaitu sebesar 82,69 persen.

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, TPT Kabupaten Natuna sebesar 4,05 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan tahun 2022. TPT laki-laki pada tahun 2023 sebesar 2,67 persen yang merupakan TPT laki-laki terendah dalam lima tahun terakhir.

Penduduk dengan pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai merupakan yang terbanyak di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 20,10 ribu orang. Sementara itu, penduduk dengan pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah yang terendah yaitu sebesar 0,99 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja tertinggi adalah sektor Jasa sebanyak 26,37 ribu orang, sedangkan sektor Industri Pengolahan merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap pekerja terendah yaitu sebesar 7,3 ribu orang.

Sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna.

Tabel.T-II.47
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023

No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Persen	95,10	0,8	54,79	6.848	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Kompetensi						
2.	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	0	0	Belum Tercapai
3.	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang	0	10	0	0	Belum Tercapai
4.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	BKK	0	6	0	0	Belum Tercapai
5.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Orang	0	10	0	0	Belum Tercapai
6.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	Orang	0	10	0	0	Belum Tercapai
7.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata	Orang	0	10	0	0	Belum Tercapai
8.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Lembaga	0	1	0	0	Belum Tercapai
9.	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	3	5	6	120	Tercapai
10.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	1	1	0	0	Belum Tercapai
11.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	Orang	561	649	610	93,99	Tercapai
12.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	0	10	0	0	Belum Tercapai
13.	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Layanan	427	379	609	160,69	Tercapai
14.	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Perjanjian	0	3	1	33,33	Belum Tercapai
15.	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	Kasus	0	0	0	100	Tercapai
16.	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Kasus	0	0	0	100	Tercapai
17.	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	80,87	80,39	74,10	92,17	Tercapai
18.	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100	100	Tercapai
19.	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	Persen	0	1	0	0	Belum Tercapai
20.	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Persen	0	100	100	100	Tercapai
21.	Persentase LPK yang Terakreditasi	Persen	0	100	0	0	Belum Tercapai
22.	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	Persen	100	33,33	100	300,03	Tercapai
23.	Persentase Penyerapan Lulusan	Persen	15,05	36,49	19,28	52,84	Belum Tercapai
24.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator	Persen	0	0	0	100	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Hubungan Industrial						
25.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	5	4	26,92	673	Tercapai
26.	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	Persen	0	3	57,14	1904.67	Tercapai
27.	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Persen	0	4	3.85	96.25	Tercapai
28.	Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	34	40	92	230	Tercapai
29.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,26	0,01	1,02	10,200	Tercapai
30.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi	Persen	28	30	0,15	0,5	Belum Tercapai
31.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	46,88	94	67,35	71,64	Belum Tercapai
32.	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	Persen	3,31	0,01	1,81	18,100	Belum Tercapai
33.	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	94,85	94	95,95	102,07	Tercapai

Permasalahan/kendala pencapaian indikator urusan bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI yang memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan sehingga belum dapat dilaksanakan pelatihan calon tenaga kerja CPMI dan CTKI
2. Belum terbentuknya BKK disekolah kejuruan
3. Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI sehingga belum ada pendaftar yang dapat dilatih
4. Kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan lembaga penempatan tenaga kerja karena minimnya pasar kerja di kabupaten natuna
5. Kebutuhan tenaga kerja yang ada di SISNAKER tidak sesuai dengan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi di kabupaten natuna
6. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah kabupaten natuna



Tindak lanjut dari permasalahan diatas :

1. Mencari pasar tenaga kerja CTKI dan CPMI serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait di suatu wilayah lain atau dengan biro/lembaga yang menangani CTKI /CPMI
2. Pembentukan BKK di sekolah kejuruan
3. Mencari peluang pasar kerja dan memberikan dorongan kepada pihak swasta untuk membentuk lembaga penempatan tenaga kerja
4. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung

Tabel.T-II.48
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	9.229
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	7.311
3. Jasa (Services)	26.372
Jumlah	42.912

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya untuk terus melakukan pembangunan kualitas hidup manusia melalui kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok-kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut; baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan dewasa ini seringkali mengabaikan isu tentang



kesetaraan dan keadilan gender. Kondisi ini diperburuk oleh persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

1. Perkembangan Capaian Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna

Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam berbagai program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam program tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 IPG menunjukkan angka 92,07, sedangkan pada tahun 2022 IPG Kabupaten Natuna sebesar 91,86.

Tabel.T-II.49
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Lain, Regional (Kepulauan Riau), dan Nasional Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Karimun	90,91	91,25	91,00	91,12	91,33
2	Kabupaten Bintan	93,10	93,12	93,53	93,78	93,93



No	Uraian	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Kabupaten Natuna	91,72	91,67	91,95	91,86	92,07
4	Kabupaten Lingga	89,26	89,25	89,73	90,48	90,75
5	Kab. Kep. Anambas	90,16	90,27	90,30	91,14	91,25
6	Kota Batam	94,42	94,43	94,51	94,75	94,95
7	Kota Tanjungpinang	97,77	96,79	97,14	97,14	96,96
8	Kepulauan Riau	93,10	93,31	93,49	93,50	93,96
9	Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber data : BPS Kepri, 2024 dan BPS RI, 2024

2. Perkembangan Capaian Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Natuna
Selain IPG, UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lain yang berkaitan dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (riil) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar 50,13.

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan juga disertai dengan perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi hal ini juga diupayakan bukan kepada perempuan saja namun juga kepada anak yang jumlahnya 1/3 dari jumlah penduduk sehingga dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan terwujud perlindungan khusus bagi anak dilakukan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak dan secara menyeluruh hal



tersebut diatas menjadi tanggungjawab seluruh OPD, lembaga masyarakat media, dunia usaha dan perguruan tinggi agar meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak bisa terwujud di Kabupaten Natuna.

Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi perempuan dan anak, rapat-rapat koordinasi lintas sekretural melalui Pokja PUG maupun gugus tugas KLA juga dapat dilakukan melalui penguatan program kegiatan resperensif perempuan dan anak pada setiap OPD serta penguatan lembaga pengaduan.

Tabel.T-II.50
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih	Kader	10	72	8	11,1	Belum Tercapai
2.	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi	Kebijakan	1	1	10	1.000	Tercapai
3.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan	Lembaga	42	1	2	200	Tercapai
4.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota)	Lembaga	6	1	2	200	Tercapai
5.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal	Lembaga	6	1	2	200	Tercapai
6.	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan	Lembaga	1	1	2	200	Tercapai
7.	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG	Lembaga	10	30	21	70	Belum Tercapai
8.	Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Media	6	7	6	85,72	Belum Tercapai
9.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan	Ormas / LSM	1	15	7	46,6	Belum Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan						
10.	Jumlah Program PUG Ada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	Program	31	40	41	102,5	Tercapai
11.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	100	100	Tercapai
12.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	Tercapai
13.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	24,95	2,30	8,65	376,0	Tercapai
14.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen	0	0	0	0	Belum Tercapai
15.	Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	6,06	9,11	2	21,9	Belum Tercapai
16.	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	Persen	100	100	100	100	Tercapai
17.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100	100	100	100	Tercapai
18.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,0	100	100	100	Tercapai
19.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	Nilai	0	0	0	0	Belum Tercapai
20.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	Nilai	0,024	0,18	0,00	0,00	Belum Tercapai
21.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Nilai	0,046	34,60	0,00	0,00	Belum Tercapai

Capaian indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 masih belum sepenuhnya memenuhi target. Salah satunya adalah indikator Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih belum tercapai karena permasalahan masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia perempuan di desa/kelurahan dan SDM perempuan yang



ada di desa/kelurahan masih enggan untuk ikut aktif dalam pembangunan di segala bidang di masyarakat.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel.T-II.51
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pangan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2022			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)	Persen	36,95	33,97	87,68	258,11	Tercapai
2.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kkal/kap/hr	2031	2100	1.868	88,97	Belum Tercapai
3.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Sample	66	60	65	106,33	Tercapai
4.	Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	9,4	16	6,4	40	Belum Tercapai
5.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	CV Rasio	CV≤10%	CV≤10%	CV≤5,3%	153	Tercapai
6.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	LPM	0	1	0	0	Belum Tercapai
7.	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	1	1	100	Tercapai
8.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Regulasi	1	1	1	100	Tercapai
9.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Jiwa	550	835	500	59,88	Tidak Tercapai

Capaian indikator Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan belum tercapai dikarenakan penyaluran cadangan pangan tergantung pada terjadinya kondisi bencana. Sama halnya untuk indikator Tertanganinya Kerawanan Pangan yang belum tercapai karena penyaluran cadangan pangan pemerintah tergantung dari kejadian bencana yang ada. Sedangkan untuk indikator Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan belum tercapai karena Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan direncanakan akan dibangun menggunakan dana DAK, namun pada tahun 2023 tidak ada alokasi anggaran DAK bidang pertanian di Kabupaten Natuna.



Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel.T-II.52
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanahan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2022			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1.	Dokumen Izin Membuka Tanah	Ada/Tidak	Ada/70	Ada	Tidak	0	Belum Tercapai
2.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada/4	Ada	Ada/3	100	Tercapai
3.	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten	Persen	25	9,96	0	0	Belum Tercapai
4.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	100	86	100	125	Tercapai
5.	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	75	100	133,33	Tercapai
6.	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Ada/Tidak	Tidak Ada	Ada	Tidak	0	Belum Tercapai
7.	SK Izin Lokasi yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali Kota	Ada/Tidak	Ada/13	Ada	Tidak	0	Belum Tercapai
8.	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Ada	Ada/13	Ada	Ada/12	100	Tercapai
9.	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Ada/Tidak	Ada/145 ha	Ada	Tidak	0	Belum Tercapai

Pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih adanya tanah masyarakat dan pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource baseeconomy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (lifesupport system). Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik). Sedangkan untuk ketersediaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas wilayah 224.684,59 km², dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 222.683,29 km².



Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Natuna terdiri dari air hujan, air permukaan dan air tanah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagian besar dipasok dari sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Natuna.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Natuna belum dilaksanakan secara efektif baik di hulu maupun di hilir, utamanya dalam proses pengangkutan. Masyarakat sebagai produsen sampah belum berpartisipasi optimal dalam pengelolaan persampahan, masih terbatas pada usaha konvensional seperti melakukan pembakaran dan penimbunan. Sementara untuk pengelolaan sampah dalam skala besar, dilakukan oleh masing-masing kecamatan yang bekerjasama dengan lembaga masyarakat, permasalahannya adalah keterbatasan sarana dan tenaga kerja sehingga belum mampu menjangkau seluruh pemukiman masyarakat.

Tabel.T-II.53
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2022			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	10	10	9	90	Tercapai
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	79,30	71,31	74,29	104,18	Tercapai
3.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	10	109	8	7,34	Belum Tercapai
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Pengaduan	5	5	5	100	Tercapai
5.	Peningkatan Baku Mutu Air	Persen	64	100	60	60	Belum Tercapai
6.	Peningkatan Baku Mutu Udara	Persen	87,49	100	89,37	89,37	Tercapai
7.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Persen	32,29	50	35,49	70,98	Belum Tercapai
8.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	42	35,50	32,09	90,39	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2022			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
9.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Meter Kubik	5626	45,77	41,87	91,48	Tercapai
10.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	2	1	1	100	Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pelayanan umum urusan lingkungan hidup diatas, indikator Peningkatan Baku Mutu Air yang belum maksimal dengan capaian kinerja sebesar 60% dari target 100%, disebabkan Karena faktor cuaca/iklim. Pada tahun 2023 tingkat curah hujan yang tinggi, dan waktu pengiriman pengujian sampel air juga mengalami keterlambatan disebabkan karena perubahan jadwal penerbangan. Tindak lanjut dalam Peningkatan Baku Mutu Air ini, Dinas Lingkungan Hidup akan menambah volume dalam pengambilan dan pengujian sampel air yang semula 2 kali dalam 1 tahun, menjadi 4 kali dalam 1 tahun. Untuk indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel.T-II.54
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	OPD	18	25	23	92	Belum tercapai
2.	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	100	Tercapai
3.	Penerbitan Akta Kematian	Persen	100	90	100	111	Tercapai
4.	Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100	85	100	117	Tercapai
5.	Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100	85	100	117	Tercapai
6.	Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	85	85	100	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
7.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,79	82	96,38	117	Tercapai
8.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	72,43	89	87,73	98,57	Belum tercapai

Dari evaluasi pencapaian aspek pelayanan umum urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditemukan beberapa indikator yang belum mencapai target. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya untuk indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, permasalahan yang dihadapi adalah beberapa Perangkat Daerah belum memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil. Solusi dan tindak lanjut dari permasalahan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk indikator Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran, permasalahannya adalah kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan keliling di kecamatan dikarenakan akses Internet yang kurang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Tindak lanjut dengan cara optimalisasi pelayanan keliling di kecamatan untuk meningkatkan persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (Satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan Akta Kelahiran.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel.T-II.55
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1.	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Desa	2	4	5	125%	Tercapai
2.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Persen	18,52	22,22	22,22	100%	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	2	3	150%	Tercapai
4.	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	Desa	21	25	26	104%	Tercapai
5.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	Lembaga	92	105	109	103,8%	Tercapai
6.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat	Lembaga	8	12	17	141,6%	Tercapai
7.	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	Desa	30	40	54	135%	Tercapai
8.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	70,45	42,85	97,44%	227,40%	Tercapai

Keberhasilan kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari pemerintah desa dan kelembagaan yang ada di desa dalam mendukung program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

Beberapa permasalahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih terdapat kelemahan aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengisian Kusiner IDM sehingga perlu dilakukan bimbingan tenaga pendamping desa (PLD, PD kecamatan dan TAPM di Kabupaten

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel.T-II.56
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Angka	23,30	19,40	35	180,4	Tercapai
2.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Angka	20,37	23,92	2089	8,73	Belum Tercapai
3.	Jumlah Stakeholders/ Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Angka	3	1	3	300	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
4.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	Angka	23,5	21	4,461	21,24	Belum Tercapai
5.	Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Angka	1	1	1	100	Tercapai
6.	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern	Persen	85	100	75	75	Belum Tercapai
7.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	Persen	100	100	100	100	Tercapai
8.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	18,89	13,98	0	0	Belum Tercapai
9.	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah	Persen	72,48	86,95	0	0	Belum Tercapai
10.	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persen	74,01	99,32	100	n.a	Belum Tercapai
11.	Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persen	85	100	70	70	Belum Tercapai
12.	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	Persen	86,02	47,36	52,09	109,9	Tercapai
13.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	Persen	72,48	78,83	74,32	94,27	Tercapai
14.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	72,48	60,17	22,06	1,66	Belum Tercapai
15.	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	1	1	0	0	Belum Tercapai
16.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,76	2,41	2,43	99,17	Tercapai
17.	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Rasio	18,46	100	0	0	Belum Tercapai

Total Fertility Rate kabupaten Natuna tahun ke tahun mengalami penurunan yang baik, pada tahun 2023 TFR Kabupaten Natuna sebesar 2,43. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi capaian TFR diantaranya KB aktif (jumlah akseptor KB) atau mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) atau Jumlah Akseptor KB yang menggunakan Kontrasepsi modern atau MKJP atau jumlah pengguna Kontrasepsi Metode Jangka Panjang dan Unmet need atau jumlah PUS yang tidak mendapatkan pelayanan KB, ASFR 15-19 (Age Spesific Fertility Rate 15-19).

Sedangkan untuk indikator Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan belum mencapai target karena Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang dilaksanakan pada tahun



2022 diundangkan melalui Peraturan Bupati.

Beberapa permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

1. Kurangnya SDM/Petugas medis dan tenaga lini lapangan di wilayah kepulauan. Jauhnya akses fasilitas kesehatan yang melayani KB Terbatasnya Alkon di fasilitas kesehatan Kurangnya tenaga bidan yang terlatih dalam pemasangan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
2. Kurangnya kolaborasi petugas lini lapangan (PLKB,PKB dan kader PPKBD) dengan petugas medis bidan desa untuk berkoodinasi terkait ibu pascasalin yang menggunakan alkon di wilayah setempat sehingga terjaring data KBPP-nya.
3. Kurangnya edukasi dan konseling oleh Petugas bidan desa dan Petugas lini lapangan kepada ibu pasca salin di saat kunjungan nifas sekaligus membawa alkon yang di maksud, kecuali alkon MKJP di arahkan ke faskes terdekat.
4. Perlunya peningkatan peran dari Forum Generasi Berencana untuk pembinaan PIK-R.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Geografis Kabupaten Natuna terdiri dari 99,11 persen berupa lautan. Keadaan tersebut menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota kabupaten. Sarana perhubungan di sektor angkutan laut terlihat semakin baik dengan bertambahnya frekuensi pelayaran untuk menghubungkan Pulau-pulau Natuna yang dilayani oleh Kapal penumpang "KM Bukit Raya" (milik PELNI), KM. Sabuk Nusantara, KM. Bahtera Bahari (Roro) dan Kapal Tol Laut yang secara teratur melayani rute tersebut dan juga Kapal Tol Laut untuk kapal barang.

Sarana angkutan udara di Kabupaten Natuna tidak kalah pentingnya dengan angkutan lainnya. Sampai saat akhir tahun 2023 di daerah ini terdapat bandara yang disinggahi oleh penerbangan komersial, yaitu Bandara Raden Sadjad di Ranai



Kecamatan Bunguran Timur.

Dengan semakin meningkatnya permintaan akan jasa pos dan telekomunikasi setiap tahunnya, perlu diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang serta pelayanan yang semakin baik. Di Kabupaten Natuna, terdapat lalu lintas surat, paket pos dan pengiriman uang dengan menggunakan jasa pos dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Berbagai jalur pelayaran laut telah berkembang dengan baik di Kabupaten Natuna, yang menghubungkan Kota Ranai dengan daerah lainnya. Hal ini tercermin dari semakin meningkatkan arus penumpang dan barang yang memanfaatkan jasa transportasi laut. Pada saat ini terdapat 2 (dua) model sistem perhubungan laut yaitu:

- ***Sistem Transportasi Internal***

Sistem ini merupakan sistem transportasi yang menghubungkan antar pulau yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna. Moda transportasi yang digunakan adalah jenis speed boat yang berupa perahu bermesin dengan kapasitas 20 orang penumpang yang disebut pompong. Selain itu juga dilayani dengan kapal-kapal perintis, dan juga ferry di beberapa pulau. Kebutuhan akan transportasi antar pulau yang cepat, aman, dan murah semakin meningkat untuk arus barang dan penumpang.

- ***Sistem Transportasi Eksternal***

Sistem transportasi eksternal adalah sistem transportasi yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Natuna dengan pulau-pulau di Kabupaten tetangga lainnya. Moda transportasi yang digunakan adalah jenis kapal perintis, kapal ro-ro dan kapal pelni dengan rute yang telah terjadwal. Selain sarana transportasi laut, Kabupaten Natuna juga mengandalkan sarana perhubungan udara yang menghubungkan Kabupaten Natuna dengan Kabupaten/Kota daerah lainnya. Di Kabupaten Natuna terdapat Bandara



yang disinggahi oleh penerbangan komersial yaitu Bandara Raden Sadjad Ranai di Kecamatan Bunguran Timur. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya frekuensi penerbangan Bandara Ranai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel.T-II.57
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	80	63	83	131,75	Tercapai
2.	Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Persen	1	25	38.23	152,92	Tercapai
3.	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota	Persen	4	60	14.56	24,27	Belum Tercapai
4.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	33,75	60	90	150	Tercapai
5.	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	Persen	0	0	0	100	Tercapai

Indikator bidang perhubungan pada tahun 2023 yang belum tercapai yaitu Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota disebabkan kondisi jalan masih jarang terjadi kemacetan atau belum sering terjadi kepadatan lalu lintas. Sedangkan untuk indikator Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala akan ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel.T-II.58
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1.	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	17,40	25	25	100	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Persen	80	60	60	100	Tercapai
3.	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	50	82,65	82,65	100	Tercapai
4.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	22	13	13	100	Tercapai
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90	72,22	72,22	100	Tercapai
6.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	1	65,21	65,21	100	Tercapai
7.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	Persen	86,67	55	100	181	Tercapai
8.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo	Persen	90	72,22	72,22	100	Tercapai
9.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Persen	90	93	93	100	Tercapai
10.	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90	72,22	72,22	100	Tercapai
11.	Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	1	6	6	100	Tercapai
12.	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
13.	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Basis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
14.	Indeks SPBE	Indeks	2,5	3,00	3,19	106,33	Tercapai

Evaluasi indikator urusan komunikasi dan informatika pada aspek pelayanan umum di tahun 2023 telah tercapai dengan baik.

Indeks SPBE Kabupaten Natuna tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tercapai pada angka 3,19 (Baik), sedangkan pada tahun 2022 Indeks SPBE tercapai pada angka 2,5 (Cukup).



Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan lembaga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi daerah.

Ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk didalamnya Koperasi dan UKM. Jika kinerja Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan Koperasi dan UKM melakukan mitra usaha dan menggiatkan jaringan usaha Koperasi dan UKM.

Tabel.T-II.59
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Persen	1,20	1	-	-	Belum Tercapai
2.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	29	16,25	11,70	72,00	Belum Tercapai
3.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirasausaha	Persen	6,67	5,74	10,61	184,84	Tercapai
4.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	7	10,64	76.00	707,63	Tercapai
5.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	77	0	0	Belum Tercapai
6.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	43,75	25,18	11,70	46,46	Belum Tercapai
7.	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah	Persen	1,34	0,85	5,73	674,11	Tercapai



No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Kabupaten/Kota						
8.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Persen	120	1	2,87	287	Tercapai
9.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Persen	4,85	2,67	1,14	42,69	Belum Tercapai
10.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	Persen	1	13,26	2,59	19,53	Belum Tercapai
11.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	Persen	2,20	5,64	3,22	57,09	Belum Tercapai
12.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	Persen	100	84,00	69,46	82,69	Belum Tercapai
13.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1,18	3,13	1,25	39,93	Belum Tercapai
14.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan	Persen	20,12	23,13	21,25	91,87	Tercapai
15.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	20,12	23,13	21,25	91,87	Tercapai
16.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	10,65	17,50	32,75	187,14	Tercapai
17.	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	75,71	13,13	25,73	195,96	Tercapai
18.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	13,69	16,25	12,87	79,20	Belum Tercapai
19.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	49,54	41,52	38,91	93,71	Tercapai
20.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	32,86	53,06	25,71	48,45	Belum Tercapai
21.	Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1	5,00	2,00	40,00	Belum Tercapai
22.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	15,09	2,51	3,1	123,50	Tercapai
23.	Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	7,23	7,25	2,92	40,27	Belum Tercapai



Permasalahan dan kendala pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Minimnya modal usaha UMKM menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan jumlah pemasukan.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai pengembangan usaha sehingga dapat mengakibatkan tidak adanya inovasi produk
3. Rendahnya pemahaman dan kompetensi para pengurus koperasi terutama di bidang akuntansi
4. Minimnya pengawasan pengurus atau pengecekan terhadap kondisi dan aktivitas koperasi

Berikut ini merupakan tindak lanjut dari permasalahan diatas:

1. Rutin melaksanakan rapat tahunan agar terjalin komunikasi dan koordinasi antar sesama anggota
2. Peningkatan pengawasan dan pemahaman pengurus koperasi
3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha secara reguler
4. Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya meningkatkan usaha ekonomi berbasis kerakyatan antara lain dengan mengarahkan dan meningkatkan peranan serta kemampuan usaha koperasi.

Jumlah koperasi di Kabupaten Natuna selama 2019 sampai 2021 cenderung stabil. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2022, yang mana pada tahun sebelumnya hanya berjumlah 63 koperasi kemudian meningkat menjadi 70 koperasi di tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup drastis pada jumlah koperasi aktif di Kabupaten Natuna. Sebanyak 33 koperasi dinyatakan tidak aktif dan hanya menyisakan 37 koperasi yang aktif ditahun 2023. Seiring dengan penurunan jumlah koperasi aktif, jumlah anggota



koperasi yang ada di Kabupaten Natuna juga mengalami penurunan yakni dari 4.631 anggota di tahun 2022 menjadi 4.268 anggota pada tahun 2023.

Tabel.T-II.60
Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Natuna 2020-2023

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi				Jumlah Anggota			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Midai	4	4	4	1	139	139	139	33
2.	Suak Midai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bunguran Barat	3	3	3	1	126	121	121	25
4.	Bunguran Utara	1	1	1	1	39	39	39	39
5.	Pulau Laut	2	2	2	1	146	146	146	56
6.	Pulau Tiga	5	5	5	3	121	121	121	75
7.	Bunguran Batubi	1	1	1	0	51	51	51	0
8.	Pulau Tiga Barat	3	3	3	1	128	128	128	78
9.	Pulau Seluan	-	-	-	0	-	-	-	0
10.	Bunguran Timur	24	24	31	20	2.377	2.353	2.779	3.239
11.	Bunguran Timur Laut	5	5	5	1	147	150	150	56
12.	Bunguran Tengah	1	1	1	1	36	31	31	32
13.	Bunguran Selatan	4	4	4	1	129	129	129	34
14.	Serasan	4	5	5	4	457	515	515	547
15.	Subi	2	3	3	1	167	192	192	25
16.	Serasan Timur	2	2	2	1	90	90	90	29
17.	Pulau Panjang	-	-	-	0	-	-	-	0
Natuna		61	63	70	37	4.113	4.205	4.631	4.268

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, perkembangan Badan Usaha Koperasi di wilayah Kabupaten Natuna telah berjalan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Natuna. Kondisi seperti ini disamping membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus mampu menjadi penyokong perekonomian rakyat dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Sektor industri bukan merupakan sektor dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Natuna, namun sektor tersebut paling sensitif dalam merespon pertumbuhan investasi. Potensi sektor industri di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh sektor industri kecil. Sehingga belum mampu secara optimal



menyerap investasi di kabupaten Natuna. Beberapa kendala dan permasalahan di bidang investasi daerah adalah berkaitan dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat seperti berikut; (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna yang belum bisa menjadi magnet kalangan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna; (2) Masih dijumpainya tumpang tindih koordinasi antar instansi terkait penanganan kegiatan investasi; (3) Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah.

Tabel.T-II.61
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Penanaman Modal Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1.	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Promosi	1	1	2	200	Tercapai
2.	Kenaikan Penuruan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	13,93	12,23	38,11	311,61	Tercapai
3.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Koordinasi	131	220	270	122,73	Tercapai
4.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	0	1	0	0	Belum Tercapai
5.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan	4	4	4	100	Tercapai
6.	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	2	4	200	Tercapai
7.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	Perusahaan	58	50	316	632	Tercapai
8.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin	2334	870	2616	300,69	Tercapai
9.	PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda	1	1	0	0	Belum Tercapai
10.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	13,93	12,10	41,7	344,63	Tercapai
11.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	SOP	1	1	0	0	Belum Tercapai
12.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Peizinan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	100	Tercapai

Indikator kinerja bidang Penanaman Modal yang belum tercapai pada tahun 2023 diantaranya adalah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif



Penanaman Modal yang disebabkan oleh belum adanya persamaan perspespi antar stakeholder terkait, belum adanya sosialisasi, dan belum bersinerginya regulasi antar sector secara optimal. Tindak lanjut dari permasalahan ini adalah akan dilaksanakan koordinasi antar stakeholder terkait. Sedangkan untuk indikator PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum bisa tercapai disebabkan oleh banyaknya penambahan regulasi di bidang penanaman modal sehingga perlu dilakukan reviu terhadap Perda tersebut.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel.T-II.62
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA						
1.	Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah	Event	70	3	3	100	Tercapai
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	50	3	18	600	Tercapai
3.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	70	50	13,72	25,89	Belum Tercapai

Pencapaian kinerja pada urusan pemuda dan olahraga pada tahun 2023 khususnya pada indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri masih rendah karena Penduduk usia 16 - 30 tahun (pemuda) di Kabupaten Natuna orientasinya bekerja di sektor formal seperti pegawai pemerintah dan kantor swasta, dan Program Wirausaha muda pemula belum tersosialisasi dengan baik.

Dalam menghadapi persaingan usaha dewasa ini, pemuda mengalami hambatan komunikasi dengan mitra usaha, perkembangan usaha belum menunjukkan kinerja yang baik, faktor penghambat kondisi ekonomi masyarakat yang belum membaik menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kekurangan modal usaha, keterampilan berusaha pengusaha muda yang rendah, tingkat persaingan yang



ketat, kualitas produk layanan, pemasaran dan tempat usaha. Untuk itu diperlukan program penumbuhan, pengembangan dan pembinaan wirausaha muda ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam dan budaya dilaksanakan melalui kegiatan penguatan kelembagaan. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan peningkatan aksesibilitas sumber permodalan dan pasar.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel.T-II.63
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Statistik Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1.	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
2.	Tersedianya Buku Profil Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, Indikator kinerja bidang statistik pada tahun 2023 secara keseluruhan tercapai dengan hasil kinerja sangat baik dengan capaian kinerja 100 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian indikator bidang statistik adalah terbatasnya SDM bidang persandian.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel.T-II.64
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Persandian Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1.	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	PD	1	1	1	100,0	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, Indikator kinerja bidang persandian pada tahun 2023 secara keseluruhan tercapai dengan hasil kinerja sangat baik dengan capaian kinerja 100 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian indikator bidang persandian adalah terbatasnya SDM bidang persandian.



Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel.T-II.65
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kebudayaan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1.	Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	0	3	0	0	Belum Tercapai
2.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)	OPK	6	1	20	2000	Tercapai
3.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)	Persen	20	5	8	160	Tercapai
4.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	OPK	25	12	16	133	Tercapai
5.	Jumlah SDM, Lembaga dan Ppranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)	Orang	0	20	20	100	Tercapai
6.	Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Tim	1	1	0	0	Belum Tercapai
7.	Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman	SDM	2	3	4	133	Tercapai
8.	Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi Museum	Item	10	10	10	100	Tercapai
9.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota	Jenis	0	1	1	100	Tercapai
10.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan kegiatan	Pertunjuka n	4	2	16	800	Tercapai
11.	Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota	SDM	0	2	-	-	Belum Tercapai
12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman	Jenis	1	1	1	1	Belum Tercapai
13.	Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Event	0	1	6	6	Belum Tercapai
14.	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemingkatan dan Penghapusan)	Item	50	10	10	100	Tercapai
15.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Item	10	10	10	100	Tercapai

Capaian indikator kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2023 belum optimal disebabkan karena dalam pelestarian Cagar Budaya belum terbentuk Tim



Ahli Cagar Budaya (TACB) yang dikarenakan belum terpenuhinya kompetensi tenaga ahli di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna dengan jumlah minimal 5 orang yang harus memiliki kompetensi Ahli Cagar Budaya.

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel.T-II.66
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Perpustakaan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	71,89	76	82,45	108,48	Tercapai
2.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0	76	0	0	Belum Tercapai

Belum tercapainya target kinerja pada pelayanan perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dikarenakan belum melakukan survey melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari, jumlah buku yang ditamatkan per tahun, frekuensi akses internet per minggu, dan lama akses internet per hari. Hal ini tidak dapat dilakukan, dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Belum ada penetapan zonasi survei oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Belum ada penyusunan roadmap Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
3. Dinas Perpustakaan tidak memiliki tenaga/ sumber daya manusia yang profesional dan terampil untuk mencapai hal tersebut
4. Belum maksimalnya memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan survei TGM bagi wilayah Kepulauan Natuna yang terdiri dari laut dan pulau-pulau.

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel.T-II.67
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	



No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1.	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	123	60	47,91	68,44	Belum Tercapai
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	1	2,17	50	588	Tercapai
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	1	16,25	75	461	Tercapai

Kinerja pada bidang kearsipan dievaluasi melalui indikator Indeks Penyelenggaraan Kearsipan, Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Indikator yang belum tercapai disebabkan karena kurangnya SDM kearsipan yang mampu menjalankan tugas kearsipan secara baik, kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengolahan arsip.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan kondisi geografi kabupaten Natuna yang sebagian besar merupakan wilayah perairan, maka potensi perikanan dan kelautan relatif besar dan hal tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakatnya yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan yang berada di pulau-pulau. Potensi kelautan Natuna terdiri atas potensi yang dapat pulih (renewable resource) antara sumber daya ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan potensi tidak dapat pulih (unrenewable resource) seperti mineral, minyak dan lain-lain.



Tabel.T-II.68
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi	Ekor	135.000	45.000	60.000	133,33	Tercapai
2.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Kelompok	7	5	23	460,00	Tercapai
3.	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/ Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha/ Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan)	Orang	160	140	229	163,57	Tercapai
4.	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	RTP	24	10	38	380,00	Tercapai
5.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber Data: One Data KKP)	Ton	139.138,65	139.270,96	139.468,64	100,14	Tercapai
6.	Produksi Sektor Perikanan	Ton	139.138,65	139.270,96	139.468,64	100,14	Tercapai

Sub sektor perikanan adalah subsektor paling dominan dan menonjol diantara sub sektor pertanian dalam arti luas. Produksi perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti dan diharapkan untuk masa yang akan datang masih dapat ditingkatkan. Dengan berlakunya hukum laut internasional Zona Economy Exclusive (ZEE) diharapkan akan mendorong lebih banyak pengusaha perikanan yang ada. Jumlah produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2023 mencapai 135.171 ton dengan nilai 2.334.100.331.000 rupiah. Kecamatan dengan produksi perikanan tangkap di laut yang terbesar adalah kecamatan Bunguran Barat, dengan produksi sebesar 17.947 ton atau sebanyak 13,28 persen dari total produksi di Kabupaten Natuna.

Pada tahun 2023, jumlah alat perikanan tangkap dan jumlah produksinya di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel.T-II.69
Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2023

Kecamatan	Pancing Ulur		Pancing Tonda		Bagan		Jaring Pantai	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
1. Midai	154	1.424,59	142	1.422,02	0	0	27	57,31
2. Suak Midai	132	1.219,69	59	594,28	0	0	34	73,35
3. Bunguran Barat	440	3.872,00	249	2.493,84	120	4.641,36	0	0
4. Bunguran Utara	552	4.250,40	100	1.000,00	11	779,99	296	586,08
5. Pulau Laut	150	1.980,00	130	1.300,00	2	147	13	27,51
6. Pulau Tiga	142	1.307,50	112	1.124,88	21	1.623,65	36	77,94
7. Bunguran Batubi	129	1.191,96	110	1.100,00	0	0	50	108
8. Pulau Tiga Barat	285	3.758,94	284	2.047,71	4	360	0	0
9. Pulau Seluan	301	2.781,24	50	500	0	0	148	319,68
10. Bunguran Timur	456	5.918,88	430	3.868,10	0	0	70	151,29
11. Bunguran Timur Laut	261	2.465,27	273	2.727,30	27	2.069,36	140	302,57
12. Bunguran Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bunguran Selatan	190	1.756,35	229	2.292,21	0	0	35	75,64
14. Serasan	388	3.582,78	112	1.652,00	5	389,99	20	43,55
15. Subi	297	2.747,77	202	1.414,00	3	234	120	259,2
16. Serasan Timur	386	3.401,18	85	933,86	6	467,99	19	41,26
17. Pulau Panjang	276	2.550,24	101	1.010,00	0	0	60	129,6
2023	4.539	44.208,79	2.668	25.480,20	199	10.713,33	1.068	2.252,97

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Tabel.T-II.70
Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi Di Kabupaten Natuna, 2023 (lanjutan)

Kecamatan	Sero		Rawai		Bubu Ikan		Bubu Kepiting	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
1. Midai	0	0	34	92,06	1.411	2.328,53	0	0
2. Suak Midai	0	0	0	0	233	462,26	380	410,31
3. Bunguran Barat	0	0	33	476,68	2.530	3.339,60	2.973	2.408,13
4. Bunguran Utara	0	0	0	0	883	1.165,56	893	964,64
5. Pulau Laut	0	0	80	1.159,20	180	297	15	16,05
6. Pulau Tiga	0	0	36	522,81	21	35,02	0	0
7. Bunguran Batubi	0	0	50	724,5	80	176	120	129,60
8. Pulau Tiga Barat	5	20,6	28	399,8	207	273,15	0	0
9. Pulau Seluan	0	0	0	0	441	970,2	200	216,00
10. Bunguran Timur	0	0	0	0	2.760	4.554,00	1.387	1498,03
11. Bunguran Timur Laut	23	90,64	25	369,05	152	250,39	2.728	2946,12
12. Bunguran Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0



Kecamatan	Sero		Rawai		Bubu Ikan		Bubu Kepiting	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
13. Bunguran Selatan	21	149,82	72	1.493,76	2.312	2.542,95	621	670,47
14. Serasan	0	0	25	369,05	1.420	3.904,00	33	35,53
15. Subi	0	0	354	4.071,00	1.247	1.371,70	400	432,00
16. Serasan Timur	0	0	44	630,45	1.406	3.093,15	40	43,55
17. Pulau Panjang	0	0	177	2.564,73	623	1.370,60	0	0
2023	49	261,06	958	13.273,09	15.906	26.134,11	9.790	9.770,43

Sumber: Natuna Dalam Angka 2024

Tabel.T-II.71
Jumlah Alat Perikanan Tangkap dan Produksi di Kabupaten Natuna, 2023 (lanjutan)

Kecamatan	Kelong		Tangkul		Alat Lainnya	
	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi	Jumlah	Produksi
1. Midai	0	0	0	0	25	140,37
2. Suak Midai	0	0	0	0	22	122,82
3. Bunguran Barat	60	326,64	0	0	214	389,07
4. Bunguran Utara	24	26,36	57	55,01	36	87,26
5. Pulau Laut	0	0	0	0	0	0
6. Pulau Tiga	7	40,11	0	0	25	140,37
7. Bunguran Batubi	0	0	0	0	34	187,16
8. Pulau Tiga Barat	4	22,92	0	0	0	0
9. Pulau Seluan	0	0	0	0	0	0
10. Bunguran Timur	10	51,57	0	0	146	265,1
11. Bunguran Timur Laut	10	51,57	28	26,49	129	234,59
12. Bunguran Tengah	0	0	0	0	0	0
13. Bunguran Selatan	0	0	178	149,76	89	194,54
14. Serasan	17	91,69	0	0	0	0
15. Subi	32	171,92	0	0	16	87,73
16. Serasan Timur	18	97,42	0	0	21	116,98
17. Pulau Panjang	0	0	0	0	0	0
2023	182	880,21	263	31,26	757	1.965,99

Sumber: Natuna Dalam Angka 2024

Potensi perikanan yang sangat besar mewajibkan Kabupaten Natuna memiliki pelabuhan minimal berstandar nasional sehingga kapal-lapal pencari ikan dapat berlabuh di pelabuhan tersebut dan secara tidak langsung akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini Kabupaten Natuna hanya memiliki Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI). Diharapkan Kabupaten Natuna segera memiliki pelabuhan sebagai chek point kapal-kapal penangkap ikan di wilayah Laut Natuna.



Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel.T-II.72
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1.	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Destinasi	2	2	3	150	Tercapai
2.	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi	Event	0	1	0	0	Belum Tercapai
3.	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	Event	1	1	3	300	Tercapai
4.	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	DTW	2	2	3	150	Tercapai
5.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	28.037	26.000	31291	120,35	Tercapai
6.	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat	Pokdarwis	2	2	3	150	Tercapai
7.	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	Event	1	2	3	150	Tercapai
8.	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota	TDUP	2	2	5	250	Tercapai
9.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	57	170	227	133,5	Tercapai
10.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Rupiah	3,6	2,4	3,5	145,8	Tercapai
11.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	0,46	2	117,97	5898,5	Tercapai
12.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Persen	35	12	31.064	258.8	Tercapai
13.	Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan	Persen	26	4	112	560	Tercapai
14.	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataaan	Persen	200	70	100	142,86	Tercapai
15.	Rata-rata Lama Tinggal Wisata	Hari	3	3	3	100	Tercapai
16.	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	12	12	10	83,3	Belum Tercapai

Kabupaten Natuna merupakan kota yang kaya akan khazanah kesenian tradisional melayu, seperti mendu, joget dangkung, zapin, makyong, dan lain-lain. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata budaya. Jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna pada tahun 2022 masih sama dengan tahun



sebelumnya yaitu sebanyak 179 buah, yang terdiri dari 79 wisata bahari, 5 air terjun, 25 wisata gunung/bukit, 52 situs bersejarah dan 18 buah obyek wisata lainnya. Pada aspek sarana rekreasi dan olah raga kota, kondisi saat ini yang mendesak untuk segera ditangani adalah persebaran sarana rekreasi publik, yaitu taman-taman kota yang bersifat taman rekreasi publik yang masih minim. Saat ini taman rekreasi publik yang terdapat di Kabupaten Natuna adalah Pantai Piwang, Mesjid Agung Islamic Center Ranai, Pantai Tanjung Ranai, Taman Rekreasi Ceruk, Air Terjun Batu Hiu Ceruk, Air Terjun Munong di Ceruk, Air Terjun Gunung Ranai, Pantai Batu Kasah Cemaga, Pulau Senoa, Pantai Sisi Serasan, Pantai Pasir Marus Sedanau dan lain-lain.

Jumlah kunjungan ke objek wisata pada tahun 2023 mencapai 70.101 kunjungan, dengan objek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah wisata bahari/pantai dengan 60.750 kunjungan.

Jumlah wisatawan mancanegara di kabupaten Natuna pada 2023 mengalami peningkatan drastis yaitu mencapai 227 orang, dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2022 sebanyak 57 orang.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih rendah disebabkan karena masih kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, belum adanya aturan mengenai retribusi parkir di objek-objek wisata, dan belum adanya aturan mengenai admission fee di objek-objek wisata yang disertai dengan fasilitas-fasilitas penunjang berstandar nasional pada objek-objek tersebut.

Kepariwisataan merupakan salah satu andalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat tidak tergantung dengan kegiatan dari pemerintahan atau dana APBD. untuk itu diharapkan kepedulian dari Pemerintah kabupaten Natuna untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek wisata sangat urgent untuk dilaksanakan. Selain itu infrastruktur menuju akses tempat wisata dapat dibangun sehingga para wisatawan dapat mengakses dengan mudah.



Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor atau urusan pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Natuna yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Terjadinya krisis ekonomi semakin menempatkan usaha pertanian sebagai bidang pembangunan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian sangat berperan dalam menyediakan bahan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta menyerap tenaga kerja bagi yang kehilangan pekerjaan.

Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan salah satu program utama pemerintah kabupaten Natuna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Pembangunan ekonomi sektor pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan bertujuan meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Perkebunan merupakan subsektor pertanian yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat regional maupun nasional. Komoditas tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Natuna adalah kelapa dengan jumlah produksi sebesar 2.555 ton pada tahun 2023. Nilai produksi ini merupakan nilai produksi dari kelapa utuh, sedangkan nilai produksi pada tahun 2022 diperoleh dari nilai produksi kopra/kelapa dalam dengan nilai produksi sebesar 61,70 ton. Selain itu, komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Natuna adalah cengkeh dan karet dengan nilai produksi masing masing komoditas di tahun 2023 sebesar 1.027 ton dan 1.012 ton.

Tabel.T-II.73
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian Tahun 2023

Bidang Pertanian Tahun 2020							
No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						



No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	Persen	55	60	60	100	Tercapai
2.	Persentase lahan pertanian yang dikendalikan / ditanggulangi	Ha	6,0	7,5	20	266,6	Tercapai
3.	Persentase penurunan angka penyakit ternak	Persen	-0,17	2,3	0,49	121,30	Tercapai
4.	Persentase Prasarana yang Digunakan	Persen	72	72	102,5	142,36	Tercapai
5.	Prasarana Pertanian yang Digunakan	Unit	46	40	41	102,5	Tercapai
6.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	6.526	142516	7.904	5,56	Belum Tercapai
7.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Persen	2,66	5,63	5,56	98,84	Tercapai
8.	Sarana Pertanian yang Diberikan	Unit	5	5	5	100	Tercapai

Pada bidang Pertanian, indikator kinerja daerah produksi sektor pertanian belum memenuhi target disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut :

- j. Sebagian besar tanaman perkebunan yang ada, telah memasuki masa tua (tidak produktif)
- k. Tingginya harga sarana produksi pertanian yang tidak diiringi dengan nilai harga jual produksi.
- l. Terjadinya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) khususnya tanaman perkebunan di beberapa Kecamatan seperti gangguan OPT di kecamatan Midai
- m. Menurunnya kualitas genetik ternak khususnya ternak sapi sebagai unggulan sektor peternakan sehingga produktifitasnya rendah
- n. Sarana irigasi tidak memadai dan disebagian besar lokasi persawahan yang dibuka tidak ada sarana irigasinya

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan sarana perekonomian yang sangat mempengaruhi kehidupan kota dan tingkat ekonomi masyarakatnya. Posisi strategis kota menjadi tujuan masyarakat wilayah sekitar untuk mendistribusikan hasil bumi dan potensi lainnya serta menjadi tujuan untuk memperoleh kebutuhan baik primer,



sekunder, maupun tersiernya. Peluang demikian ditangkap dengan penyediaan sarana prasarana perdagangan baik tradisional maupun modern. Pasar Tradisional sebagai sarana perdagangan yaitu Pasar Ranai. Sedangkan sarana perdagangan modern saat ini sudah berdiri beberapa supermarket dan mini market yang tersebar dan cenderung meningkat pada beberapa lokasi yang mudah dijangkau oleh penduduk. Perdagangan besar dari tahun sebelumnya menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Begitu juga dengan jenis perdagangan lainnya yaitu perdagangan eceran, rumah makan dan restoran, serta kedai kopi.

Tabel.T-II.74
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1.	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Persen	45	85	93,11	109,54	Tercapai
2.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Persen	22	1,05	8,38	798,09	Tercapai
3.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persen	250	1,57	2,6	165,60	Tercapai
4.	Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	Persen	3,57	8,70	9,43	108,39	Tercapai
5.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	-	0	0	0	Belum Tercapai
6.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	75	85	93,11	109,54	Tercapai
7.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	20	2,08	4,92	236,53	Tercapai
8.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	55	2,34	3,19	136,32	Tercapai
9.	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	7,69	0	0	Belum Tercapai
10.	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	Persen	100	83	100	100	Tercapai
11.	Persentase Penerbitan TDG	Persen	91,30	83	100	100	Tercapai
12.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	75	16,67	40,91	245,41	Tercapai
13.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Persen	36,36	15	60,00	400,00	Tercapai



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
	Perdagangan di Wilayah Kerjanya						
14.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan	Persen	100	79,10	0	0	Belum Tercapai
15.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan	Persen	13,19	13,39	0	0	Belum Tercapai
16.	Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital	Persen	2	3	2	66,66	Belum Tercapai

Salah satu indikator kinerja daerah bidang perdagangan yang belum tercapai targetnya adalah Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- o. Kualitas dari produk masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas kemasan, daya tahan produk, harga produk dan sertifikasi produk sehingga dapat bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain
- p. Pemahaman UMKM terhadap penggunaan teknologi yang masih rendah, sehingga produk yang dihasilkan masih bersifat local
- q. Belum bisa memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar akibat keterbatasan SDA maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pergerakan ekonomi masyarakat salah satunya bisa dilihat dari bergerakinya sektor industri. Unit kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian pada Kabupaten Natuna menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum berbadan hukum. Sektor industri di Kabupaten Natuna sejauh ini masih belum menunjukkan perkembangan yang pesat, industry yang berjalan masih sebatas industri rumahtangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).



Tabel.T-II.75
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1.	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Persen	1,31	44,70	25,92	57,98	Belum Tercapai
2.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	0	83	100	100	Tercapai
3.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	100	83	100	100	Tercapai
4.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	78	100	100	Tercapai
5.	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	Persen	0	83	100	100	Tercapai
6.	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan	Persen	100	83	100	100	Tercapai
7.	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	78	100	100	Tercapai
8.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Persen	1	53	15,86	29,92	Belum Tercapai
9.	Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan	Persen	60,78	36,08	55,94	155,04	Tercapai
10.	Persentase terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA	Persen	30	53	50	94,33	Tercapai
11.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota	Persen	26,98	30,50	58,82	192,85	Tercapai
12.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Laporan	4	2	2	100	Tercapai

Beberapa indikator kinerja bidang Perindustrian yang belum tercapai diantaranya adalah Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap



Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota, dan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP.

Belum tercapainya target Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota, disebabkan antara lain :

- Belum meratanya pendataan data perusahaan industri kecil terutama industri rumah tangga
- Masih rendahnya jumlah IKM yang bisa mengisi data perusahaan ke dalam aplikasi SIINAS
- Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur dalam melakukan pendampingan pengisian SIINAS.

Dan belum tercapainya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP, dikarenakan realisasi pembangunan sentra industri kecil masih minim darai 42 potensi sentra IKM yang dapat direalisasikan baru 2 jenis Sentra IKM

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Tabel.T-II.76
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Transmigrasi Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
1.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	1	1	100	Tercapai
2.	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Satuan Pemukiman	2	2	3	150	Tercapai
3.	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Satuan Pemukiman	6	2	6	300	Tercapai



Permasalahan/kendala pencapaian indikator bidang Transmigrasi :

1. Belum terselesaikannya pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang
2. Belum terselesaikannya sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 karena berada dalam kawasan hutan HPK seluas 1.461 Hektar yang masih dalam proses pelepasan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan 114 APL Permukiman Transmigrasi yang ada di Kabupaten Natuna sudah menjadi Desa dan tidak lagi status Transmigrasi yang masih pembinaan Pemerintah Pusat
3. Belum terselesaikannya sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi natuna
4. Belum terukur dan tertatanya batas HPL murni transmigrasi yang belum dimanfaatkan untuk pemukiman transmigrasi secara keseluruhan

Tindak lanjut dari permasalahan :

1. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang
2. Penyelesaian sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 dan 114 APL
3. Penyelesaian sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi natuna
4. Melakukan monitoring dan pemeliharaan tanda batas HPL transmigrasi
5. Pendampingan penyelesaian permasalahan transmigrasi yang dilakukan oleh instansi dan kementerian terkait.



d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Tabel.T-II.77
Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,41	3,47	3.71	106.9	Tercapai
2.	Indeks Pengadaan Barang /Jasa	Persen	39,20	53	62.63	118.2	Tercapai
3.	Nilai LAKIP	Nilai	80,27	76,15	73.98	97.2	Belum Tercapai
4.	Nilai LPPD	Nilai	3,3178	3,3300	3.17	95.2	Belum Tercapai
5.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	3,6	3,6	69	1916.7	Tercapai
6.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	12	13	13.6	105	Tercapai
7.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	35,89	15	23	153.3	Tercapai

Secara umum, indikator capaian Sekretariat Daerah telah tercapai namun ada beberapa indikator yang belum mencapai 100 persen yaitu Nilai LAKIP dan Nilai LPPD. SAKIP dinilai dari 4 komponen; perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja. Target belum tercapai disebabkan permasalahan dan kendala sebagaimana yang menjadi rekomendasi dari MENPANRB yaitu :

- Dokumen perencanaan yang belum berorientasi hasil atau dampak langsung kepada masyarakat dan indikator kinerja yang belum memenuhi
- Kualitas penetapan kinerja belum sempurna khususnya dalam memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif setiap tahun dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik
- Belum memanfaatkan secara optimal tool E-Kejap dalam memantau capaian kinerja serta tingkat kepatuhan pengisiannya masih rendah sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time
- Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan



dalam penentuan strategi dan target kinerja kedepan

- e. Kualitas laporan kinerja yang belum sempurna baik itu pada laporan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah
- f. Belum memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas

Sedangkan untuk indikator Nilai LPPD yang belum mencapai 100 persen disebabkan karena ada kendala ketika memperoleh data dari Perangkat Daerah pengampu indikator LPPD. Selain itu tingkat pemahaman Perangkat Daerah dalam interpretasi data dan konsistensi data LPPD masih rendah sehingga sering terjadi kesalahan pemenuhan data. Perangkat Daerah juga belum menjadikan data indikator LPPD ini sebagai data kinerja yang harus dipenuhi setiap tahun.

Tabel. T-II.78
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna Tahun 2020-2023

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
2020	58,12
2021	60,31
2022	60,10
2023	72,55

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tercapai pada angka 72,55 (BB), sedangkan pada tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi tercapai pada angka 60,10 (B).

- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Tabel.T-II.79
Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Perencanaan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.01.	PERENCANAAN						
1.	Indek Kualitas Perencanaan	Nilai	7,4	7,5	7,6	101,33	Tercapai
2.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persen	49,55	53,42	51,88	97,12	Tercapai



Hasil evaluasi pencapaian Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini didukung oleh tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, serta peran aktif seluruh bidang di BP3D serta kerjasama yang baik dari Perangkat Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Keuangan

Tabel.T-II.80
Evaluasi Pencapaian Pendukung Urusan Pemerintahan
Keuangan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.02.	KEUANGAN						
1.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	98,21	23	61,77	268	Tercapai
2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	5	53	68,59	129	Tercapai
3.	Indeks Pengelolaan Aset	Persen	90	60	94,59	157	Tercapai
4.	Indeks Pengelolaan Keuangan	Persen	100	79,225	70,48	88	Belum Tercapai
5.	Manajemen Aset	Persen	80	83	100	120	Tercapai
6.	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
7.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	0,41	71	14,71	20	Belum Tercapai
8.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	26,78	29	16,56	57	Belum Tercapai
9.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	57,84	70	58,57	83	Belum Tercapai
10.	Rasio PAD	Persen	67,02	15	7,68	51	Belum Tercapai
11.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Rasio	0,19	0,01	1,52	152	Tercapai

Hasil evaluasi pencapaian Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan secara umum menunjukkan kinerja baik terlihat dari capaian indikator kinerja pada tahun 2023, namun ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target diantaranya indikator Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja



dalam APBD Tahun Sebelumnya disebabkan oleh belum optimalnya PAD karena masih kecilnya potensi PAD di luar Pajak MBLB dan belum optimalnya penerimaan dari sumber-sumber PAD seperti Pajak Parkir, Sarang Burung Walet dan Pajak Restoran.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Natuna dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK Kabupaten Natuna:

Tabel. T-II.81
Opini BPK terhadap LKD
Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

Tahun	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber : BPKPD Kab. Natuna, 2024

Kepegawaian

Tabel.T-II.82
Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Kepegawaian Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.03.	KEPEGAWAIAN						
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	53,21	54	65	120,34	Tercapai
2.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	45,02	80	89	111	Tercapai
3.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	20,59	19	22,91	120	Tercapai
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah /Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	64,56	72	69,29	96,24	Belum Tercapai

Untuk capaian kinerja kepegawaian yang belum memenuhi target yaitu Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan



Tenaga kesehatan) disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan tinggi di Kabupaten Natuna selain Universitas Terbuka dan STAI Natuna, belum optimalnya rencana peningkatan jenjang pendidikan PNS, dan belum ada alternatif pembiayaan peningkatan pendidikan bagi PNS.

Pengelolaan Perbatasan

Tabel.T-II.83
Evaluasi Pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Pengelolaan Perbatasan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN						
1.	Persentase Rekomendasi yang Diakomodir	Persen	25	15	40,85	272,33	Tercapai

Capaian indikator aspek pelayanan umum pengelolaan perbatasan telah tercapai dengan baik, namun ada beberapa permasalahan pembangunan daerah di pengelolaan perbatasan yaitu belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, dan belum optimalnya kegiatan-kegiatan yang menunjang perekonomian di kawasan perbatasan.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

Tabel.T-II.84
Evaluasi Pencapaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH						
1.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	100%	Tercapai
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100%	Tercapai

Dari Tabel sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa untuk tahun anggaran 2023 target kinerja yang ditetapkan tercapai 100%. Pada indikator Maturitas SPIP, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penerapan manajemen risiko



di lingkungan pemerintah kab. Natuna. Penerapan manajemen risiko masih belum dilakukan evaluasi di lingkungan perangkat daerah secara berkala. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas SDM dalam penerapan SPIP di perangkat daerah, dan belum optimalnya penerapan regulasi terkait SPIP.

Sedangkan untuk indikator Peningkatan Kapabilitas APIP, permasalahannya adalah belum optimalnya pencapaian kapabilitas APIP menuju level 4.

g. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel.T-II.85
Evaluasi Pencapaian Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	16	29	29	100	Tercapai
2.	Jumlah peserta sosialisai wasbang	Jumlah	50	371	0	0	Belum Tercapai
3.	Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring	Jumlah	50	50	50	100	Tercapai
4.	Pembinaan Partai Politik	Parpol	9	9	9	100	Tercapai
5.	Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial	Dinas/Instansi	15	15	15	100	Tercapai

Untuk indikator Jumlah peserta sosialisai wasbang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun namun terkendala oleh waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperluka penguatan daya saing yang mampu mengakseerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045. Guna

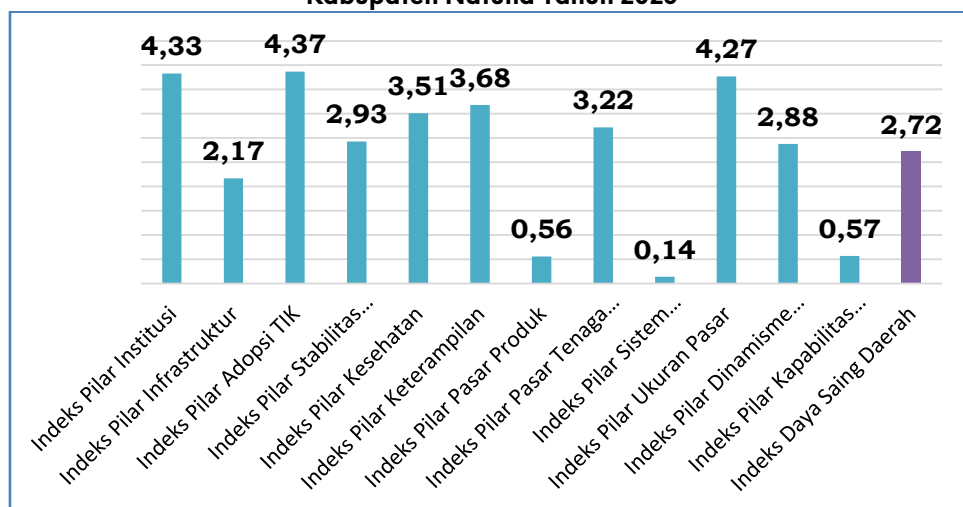


memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklim investasi, keamanan dan ketertiban, serta kualitas tenaga kerja.

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Secara umum, IDSD Kabupaten Natuna mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir dimana tahun 2020 sebesar 1,84 dan meningkat menjadi sebesar 2,72 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 ini, pilar tertinggi pada pencapaian IDSD Kabupaten Natuna adalah indeks pilar adopsi TIK yang mencapai 4,37 dan diikuti oleh indeks pilar institusi sebesar 4,33. Adapun pilar terendah adalah indeks pilar sistem keuangan sebesar 0,14.

Gambar. G-II.5
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Natuna Tahun 2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024



2.1.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

1. Nilai PDRB

Tabel.T-II.86
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (Milyar Rupiah)

No	Indikator	2010	2015	2020	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	654,01	1.760,80	2.455,46	3.013,40
2	Pertambangan dan Penggalian	4,74	13.225,04	12.287,84	16.352,30
3	Industri Pengolahan	23,34	128,47	166,70	184,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	14,13	17,27	19,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,97	1,17	1,40
6	Konstruksi	62,03	1.230,96	1.664,05	1.824,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	481,88	716,83	890,22
8	Transportasi dan Pergudangan	-	114,11	126,28	171,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	76,18	101,04	117,97
10	Informasi dan Komunikasi	-	89,83	147,41	168,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	21,21	30,75	33,16
12	Real Estate	-	98,20	139,15	166,99
13	Jasa Perusahaan	-	0,03	0,04	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	292,31	428,20	432,02
15	Jasa Pendidikan	-	29,37	43,12	49,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	49,98	66,25	77,93
17	Jasa lainnya	72,49	11,14	14,35	16,91
Produk Domestik Regional Bruto (dengan Migas)		1.077,39	4.421,47	18.405,91	23.519,88
Produk Domestik Regional Bruto (tanpa Migas)		N/A	N/A	6.145.656	7.199.719

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2023



Nilai PDRB ADHB (dengan Migas) Kabupaten Natuna memiliki pola peningkatan dari pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Peningkatan tersebut secara berturut-turut sebesar 1.077,39 milyar rupiah pada tahun 2010; Rp 4.421,47 milyar rupiah pada tahun 2015; 18.405,91 milyar rupiah pada tahun 2020; dan terakhir 23.519,88 milyar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan pada PDRB ADHB (tanpa Migas) cukup jauh dibandingkan dengan migas dimana pencapaian tahun 2023 sebesar 7.199,72 milyar rupiah. Dari pencapaian PDRB tersebut, kontribusi PDRB yang mendominasi berasal dari kategori Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Natuna.

Terlihat bahwa potensi ekonomi pada tahun awal perencanaan pembangunan didominasi oleh kategori lapangan usaha yaitu bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Diharapkan ke depan, kategori pembangunan unggulan daerah mampu bersaing dan lebih pemeratakan kesejahteraan melalui pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tentu saja perlu adanya transformasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan perekonomian yang tumbuh, stabil dan inklusif, khususnya dalam transformasi perekonomian berbasis sumber daya tak terbarukan.

Tabel.T-II.87
Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023 (%)

No	Indikator	2010	2015	2020	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,95	9,8	13,34	12,81
2	Pertambangan dan Penggalian	76,77	75,36	66,76	69,53
3	Industri Pengolahan	0,71	0,72	0,91	0,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	6,1	6,88	9,04	7,76



No	Indikator	2010	2015	2020	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,24	2,69	3,89	3,78
8	Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,62	0,69	0,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,43	0,55	0,50
10	Informasi dan Komunikasi	0,52	0,5	0,8	0,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,12	0,17	0,14
12	Real Estate	0,53	0,55	0,76	0,71
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,71	1,71	2,33	1,84
15	Jasa Pendidikan	0,14	0,16	0,23	0,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,28	0,36	0,33
17	Jasa lainnya	0,06	0,06	0,08	0,07
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2005-2023

2. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.



Tabel.T-II.88
PDRB per Kapita Kabupaten Natuna
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	- PDRB Dengan Migas (juta rupiah)	21.795.501	18.405.913	20.870.156	24.265.430	23.519.882
2	- PDRB Tanpa Migas (juta rupiah)	6.322.110	6.145.656	6.285.249	6.716.388	7.199.719
	Jumlah Penduduk	77.771	81.321	82.279	83.430	84.556
3	- PDRB Perkapita Dengan Migas	280,25	226,34	253,65	290,85	278,16
4	- PDRB Perkapita Tanpa Migas	81,29	75,57	76,39	80,50	85,15

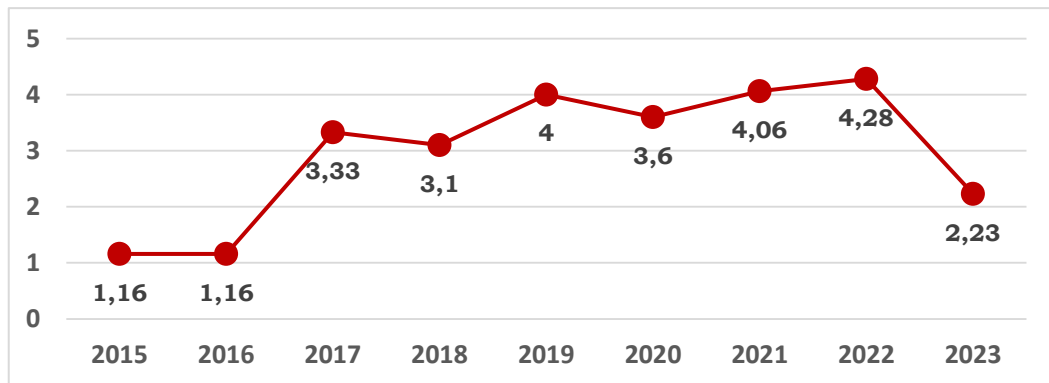
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024, diolah

Pergerakan PDRB per kapita di Kabupaten Natuna dapat dilihat melalui tabel di atas, dimana diketahui bahwa PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2023. Dikarenakan dominasi dari komoditas minyak dan gas di Kabupaten Natuna, maka PDRB per kapita non migas dengan migas terpantau cukup jauh dan dari segi analisis kesejahteraan masyarakat, maka lebih relevan jika melihat pada PDRB non migas. Adapun pencapaian PDRB per Kapita non migas di Natuna pada tahun 2023 mencapai 85,15 juta rupiah per kapita dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,50 juta rupiah per kapita. Adapun PDRB per Kapita non migas tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022.

Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 tidak stabilnya ekonomi yang diakibatkan banyak wirausaha yang belum siap dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Hal ini terlihat dari rasio kewirausahaan. Berdasarkan data rasio kewirausahaan terlihat terjadi perkembangan yang fluktuatif, namun terlihat ditahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai 2,23 yang mana ditahun 2022 mencapai 4,28.



Gambar. G-II.6
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Natuna tahun 2024

2.1.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi komponen dari masyarakat yang berperan penting dalam mencapai pembangunan daerah. berperan sebagai kelompok sasaran juga sebbagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompetensi unggul.

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Natuna. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang



telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Terlihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terlihat rata-rata lama sekolah Kabupaten Natuna mencapai 9,08 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas baru mengenyam pendidikan rata-rata selama 9,03 tahun atau lulus sekolah menengah pertama. Adapun harapan lama sekolah yang mencapai 13,93 tahun juga mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Natuna yang baru lahir di tahun 2023 memiliki kesempatan mengenyam pendidikan hingga 13,93 tahun atau setara dengan perguruan tinggi semester empat.

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Natuna meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2023 mencapai 69,00. Capaian ini tergolong belum optimal sehingga perlu adanya akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Natuna yang lebih merata dan berkualitas.

Tabel.T-II.89
Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan
di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023

No	Indikator	2010	2015	2020	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,06	8,45	8,73	9,08
2	Harapan Lama Sekolah	12,33	13,85	13,90	13,93
3	Indeks Pendidikan	57,78	66,64	67,71	69,00



No	Indikator	2010	2015	2020	2023
4	Umur Harapan Hidup	61,97	63,64	65,06	74,15
5	Indeks Kesehatan	64,57	67,14	69,32	83,30

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2023, diolah

Selain itu bidang kesehatan juga menjadi komponen pembentuk IPM adalah indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Indikator ini merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang dapat mencerminkan gambaran umur yang mungkin akan dicapai oleh seorang bayi baru lahir. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun capaian angka harapan hidup di Kabupaten Natuna mencapai 74,15 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74-75 tahun. Pada analisis berikutnya, indikator ini digunakan untuk merumuskan indeks kesehatan dimana pada tahun 2023, indeks kesehatan di Kabupaten Natuna juga mengalami peningkatan hingga mencapai 83,30.

Terkait dengan pendidikan di Kabupaten Natuna juga dapat dilihat dari angka literasi dan numerasi SD dan SMP yang diperoleh dari nilai raport ditahun 2022 dan 2023 seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan pada angka literasi dan numerasi baik pada tingkat SD maupun SMP ditahun 2022 dan 2023 yang mana angka literasi SD meningkat 9 poin ditahun 2023 hingga mencapai 59,14. Kemudian angka numerasi SD juga meningkat sebanyak 7 poin dari 37,66 menjadi 43,53. Selanjutnya angka literasi SMP mengalami peningkatan dari 58,36 menjadi 66,57 dan angka numerasi menurun dari 53,54 menjadi 44,13.

Tabel.T-II.90
Angka Literasi/ Numerasi Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan 2023

No	Rincian Angka Literasi/ Numerasi	2022	2023
1	Angka Literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	50,74	59,14
2	Angka Numerasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	37,66	43,53



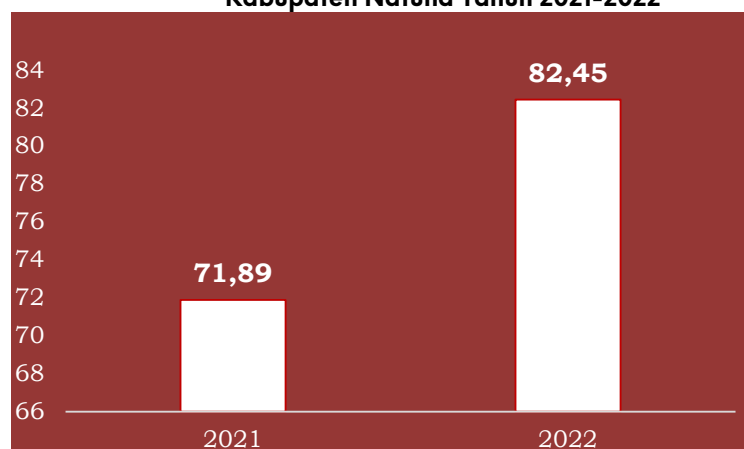
No	Rincian Angka Literasi/ Numerasi	2022	2023
3	Angka Literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	58,36	66,57
4	Angka Numerasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	53,54	44,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, 2022-2023, diolah

Pembangunan literasi masyarakat adalah proses yang berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi yang terkait dengan berbagai konteks kehidupan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan tingkat literasi di antara individu dan komunitas secara luas, dengan tujuan memberikan akses yang lebih baik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan peluang.

Dalam meningkatkan literasi masyarakat, pemerintah turut hadir dalam rangka memberikan dukungan baik dari sarana prasarana maupun dalam hal sosialisasi/bimbingan sehingga masyarakat tersadar akan artinya budaya literasi yang baik. Pencapaian pembangunan literasi di Kabupaten Natuna juga meningkat dimana pada tahun 2022 mencapai 82,45 setelah tahun 2021 hanya mencapai 71,89. Harapannya ke depan, kondisi ini terus ditingkatkan hingga merata di seluruh wilayah Natuna, mengingat masih banyak masyarakat yang terluar belum merasakan pendidikan yang lebih baik.

Gambar. G-II.7
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2022

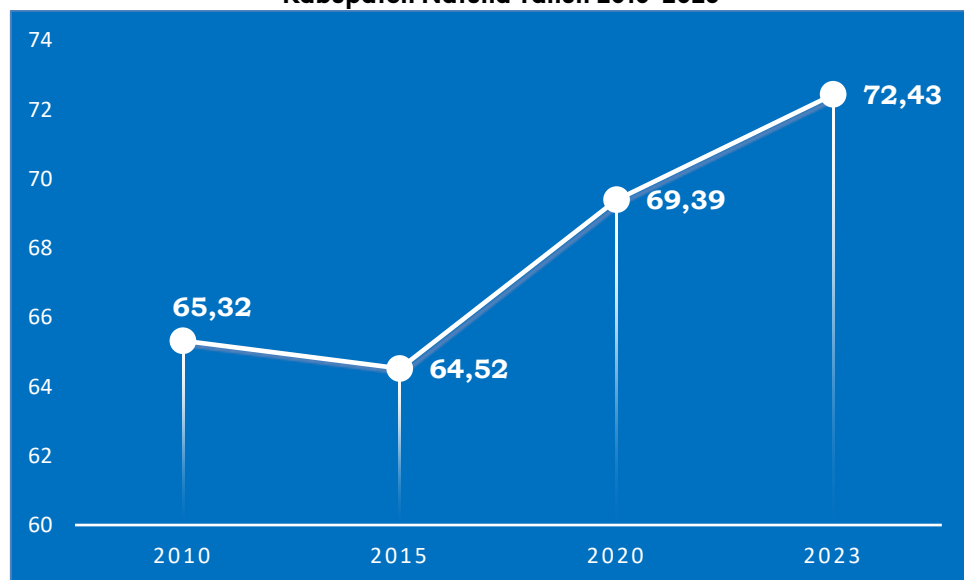


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Natuna, 2023



Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Natuna memiliki trend yang cukup baik mulai tahun 2010 dan di tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu mencapai 72,43 pada tahun 2023. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami peningkatan pada beberapa periode pembangunan terakhir menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyerapan angkatan kerja agar tidak menjadi pengangguran.

Gambar. G-II.8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023

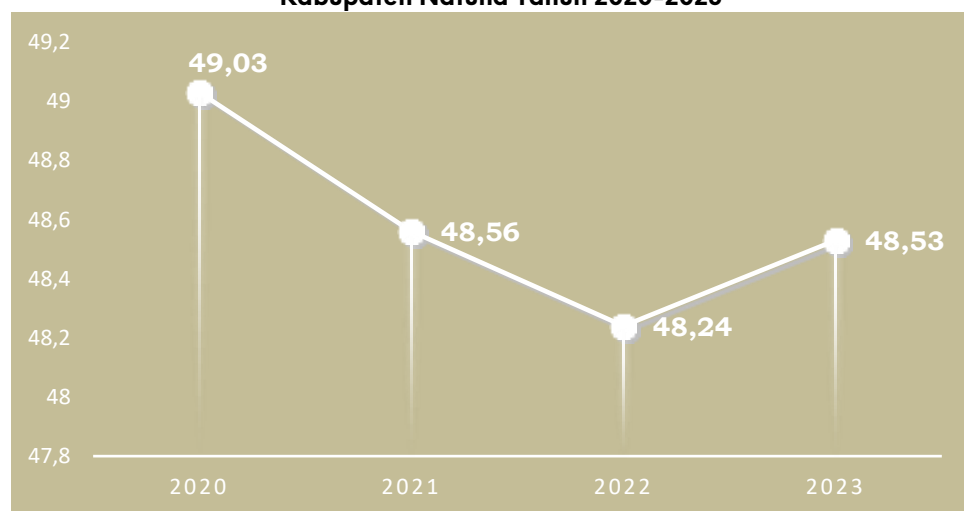


Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2024



Angka ketergantungan memperlihatkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh mereka yang bekerja untuk mendukung mereka yang tidak bekerja. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh setiap pekerja. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.

Gambar. G-II.9
Angka Ketergantungan
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2020-2024

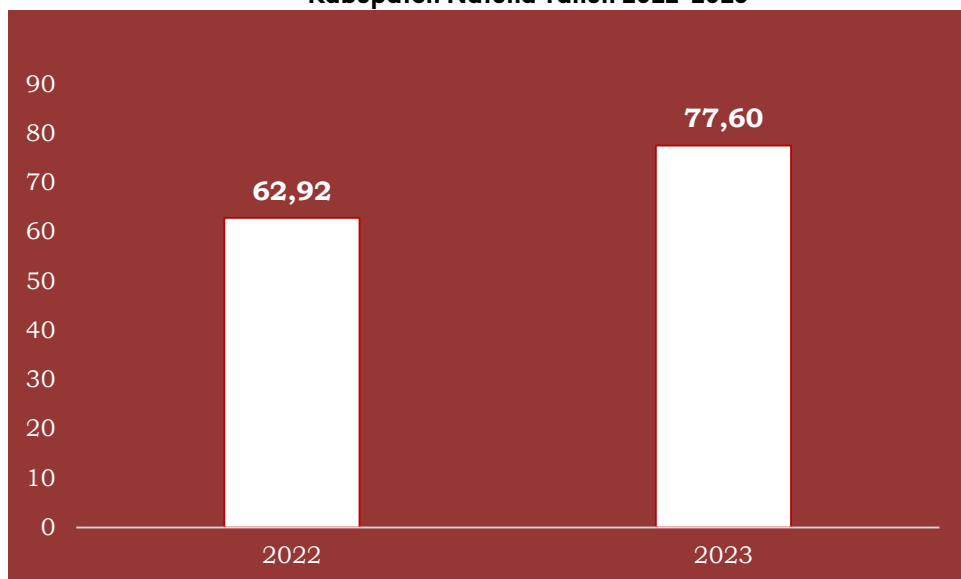
Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi perhatian dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan sosial, karena dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis angka ketergantungan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan strategi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun pencapaian angka ketergantungan Kabupaten Natuna berada di bawah 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi dimana merupakan peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat dimanfaatkan dengan optimal.



2.1.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Adapun pencapaian indeks infrastruktur Kabupaten Natuna pada tahun 2022 belum optimal dengan capaian sebesar 62,92 dan mengalami peningkatan ditahun 2023 mennjadi 77,6. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Natuna menyajikan data tentang infrastuktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

Gambar. G-II.10
Indeks Infrastruktur
Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, 2023

1. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Natuna selama tahun 2021-2023 terus ditingkatkan kualitasnya baik sarana prasarana maupun kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini didukung oleh



upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pelayanan pendidikan di Kabupaten Natuna mengalami kenaikan meskipun dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Namun masih perlunya berbagai inovasi dalam pemerataan dan akses terhadap layanan pendidikan menjadi perhatian stakeholder dalam merumuskan kebijakan yang pro terhadap peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan.

Tabel.T-II.91
Kondisi Infrastruktur Pendidikan
di Kabupaten Natuna Tahun 2021-2023

Indikator	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah	85	85	86	39	40	41	26	26	24
Jumlah Guru	962	944	963	583	575	559	528	545	543
Jumlah Murid	9.516	9.375	9.220	4.480	4.399	4.296	4.011	3.980	4.140

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2022-2024

2. Infrastruktur Kesehatan

Berbeda dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan cenderung bersifat fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 terhadap indikator jumlah rumah sakit bersalin, jumlah klinik, jumlah puskesmas pembantu. Selain itu, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan pada jumlah perawat. Pada tahun 2023 angka infrastruktur bidang kesehatan mulai naik kembali meskipun tipis. Tahun 2023 Jumlah rumah sakit di Kabupaten Natuna berjumlah 2 unit, jumlah puskesmas 15 unit, jumlah tenaga kesehatan berjumlah 779 orang, jumlah dokter yang ada 58 orang, jumlah bidan 249 orang, dan jumlah perawat yang ada di Kabupaten Natuna yaitu sebanyak 371 orang.



Tabel.T-II.92
Kondisi Infrastruktur Kesehatan
Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
	Jumlah Puskesmas	14	13	14	14	15
2	Jumlah Tenaga Kesehatan	505	474	531	809	779
	Jumlah Dokter	45	38	44	69	58
	Jumlah Bidan	153	167	191	260	249
	Jumlah Perawat	249	208	221	368	371

Sumber: Barenlitbangda Kabupaten Natuna, 2023

3. Sarana Prasarana Dasar

Sarana prasarana pembangunan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau negara. Sarana prasarana ini menjadi penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan sarana prasarana yang baik merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu sarana prasarana yang penting untuk kehidupan masyarakat adalah perumahan dan permukiman dimana luasan kawasan kumuh perkotaan meningkat hingga mencapai 548,39 ha dengan persentase kawasan kumuh mencapai 20,76 persen.

Tabel.T-II.93
Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Natuna Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan	183,58	183,58	183,58	170,72	548,39
2	Persentase kawasan kumuh	6,95%	6,95%	6,95%	6,46%	20,76%
3	Persentase kawasan kumuh yang tertata	-	-	7,53%	9,56%	5,53%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2023



Sarana dan prasarana lain yang perlu dalam pembangunan adalah terkait konektivitas dan perhubungan antar wilayah. Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna memiliki panjang jalan total sebesar 722,140 km, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kewenangan. Dari total panjang jalan tersebut, sebanyak 464,08 km adalah jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Natuna.

Secara keseluruhan, panjang jalan di Kabupaten Natuna yang berada dalam kondisi baik sebanyak 359,13 km, kondisi sedang sebanyak 111,79 km, kondisi rusak sebanyak 127,91 km, dan kondisi rusak berat sebanyak 123,31 km. Secara umum, hampir seluruh kondisi jalan negara yang ada di Kabupaten Natuna sudah berstatus baik. Sementara untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa/kelurahan masih terdapat bagian jalan yang berstatus rusak/rusak berat yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit.

Kabupaten Natuna yang merupakan kabupaten kepulauan yang sangat mengandalkan transportasi laut untuk menjangkau antar kecamatan dan kabupaten, serta transportasi udara untuk menjangkau kabupaten/kota lainnya, terutama Kota Batam. Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 2.248 unit kunjungan kapal pelayaran dalam negeri yang berlayar di wilayah Kabupaten Natuna dengan jumlah penumpang yang datang mencapai 54.318 orang dan jumlah penumpang yang berangkat mencapai 43.608 orang. Sementara itu, untuk transportasi udara, terdapat 419 penerbangan dengan total penumpang yang datang sebanyak 25.320 orang dan yang berangkat sebanyak 25.436 orang.

Dari sisi sarana prasarana telekomunikasi dan informasi, data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 145 menara BTS di seluruh wilayah Natuna dimana 11 diantaranya tidak aktif atau rusak. Operator di Malinau didominasi oleh Telkomsel dengan jumlah menara sebanyak 56 pada tahun 2023. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah perluasan jaringan



komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

2.1.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Secara umum perkembangan investasi di Kabupaten Natuna cukup baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang bernilai investasi dan memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun kemudahan- kemudahan bagi masyarakat. Masuknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ritel, real estate dan telekomunikasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja. Dalam hal ini perlu diupaya percepatan yang lebih terarah, terukur dan berkesinambungan melalui kebijakan daerah yang mendukung masuknya para investor.

Beberapa langkah strategis yang masih diperlukan antara lain meningkatkan kegiatan kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta melalui peningkatan Kerjasama dalam kegiatan pameran dan promosi investasi baik secara nasional dan internasional serta memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan usaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan mudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh instansi terkait. Disisi lain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka optimalisasi dan integrasi pembangunan di berbagai sektor yang mendukung kegiatan usaha investasi di daerah Kabupaten Natuna.

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan perizinan/non izin dan investasi oleh para pengusaha dan investor dapat melakukan pendaftaran secara elektronik (online) melalui portal resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan BKPM sesuai peraturan Pemerintah Nomor 5



Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko, selanjutnya permohonan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) sesuai dengan surat Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS-RBA mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi.

NSWI (National Single Window for Investment) merupakan sistem yang melakukan pendalaman pada layanan koneksi di setiap Perangkat Daerah (PD) yang ada di suatu daerah untuk kepentingan investasi. NSWI ini menjadi salah satu bagian dari INSW (Indonesia Nasional Single Window) yang terfokus pada layanan kepabeanaan. Secara umum, INSW diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 mengenai system Nasional Indonesia yang bertugas untuk menyampaikan tahapan pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk izin kepabeanaan dan pengeluaran barang, merupakan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.

Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) tahun 2022 di Kabupaten Natuna sebesar 13,93 persen. Dalam upaya peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang ramah dengan persyaratan yang mudah serta kondisi keamanan yang relatif lebih baik dan kondusif dibandingkan daerah lain, hal ini dapat menarik investor menanamkan modal usahanya sehingga peredaran/perputaran uang yang ada di daerah Kabupaten Natuna ini tidak langsung dibawa keluar daerah (diinvestasikan keluar) namun dapat diinvestasikan kembali menjadi tempat usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Natuna.



Salah satu upaya meningkatkan investasi dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Natuna adalah dengan menjaga kondusivitas iklim investasi daerah. Kondusivitas iklim investasi dibentuk dengan adanya kenyamanan investor dalam menanamkan modal, sehingga perlu adanya wilayah yang aman dan damai. Sepanjang tahun 2022, terdapat 64 kejadian tindak pidana di Kabupaten Natuna dengan crime rate mencapai 82 per 100.000 penduduk. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dimana terjadi 70 tindak pidana dengan crime rate mencapai 84 per 100.000 penduduk. Dari 64 tindak pidana yang terjadi pada tahun 2022, hanya sebanyak 46 tindak pidana yang berhasil diselesaikan atau sebesar 71 persen, dimana angka ini mengalami penurunan tipias dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 72 persen.

Penelitian dan Pengembangan

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel.T-II.94
Evaluasi Pencapaian Aspek Daya Saing Daerah
Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	Tahun 2023			Status
				Target	Realisasi	Capaian	
A.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,63	2,8255	2,72	96,27	Tercapai
2.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	39,16	55,0	37,10	67,45	Belum Tercapai



Indikator Indeks Inovasi Daerah belum bisa memenuhi target disebabkan oleh masih rendahnya dukungan OPD dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah menyebabkan rendahnya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna.

Data capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Natuna sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. T-II.95
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kabupaten Natuna Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	2023	
			2021	2022	Target	Realisasi
A	ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	59,06	70,36	59,09	55,45
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Persen	105,21	105,52	105,52	78,02
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	Persen	95,97	100,06	96,23	94,36
4.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)	Persen	24,80	31,44	27,21	45,00
5.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	77,56	72,28	78,54	71,76
6.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	53,72	62,96	55,63	34,15
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.	Angka Kematian Bayi	Angka	12,49	17,46	11,02	7,04
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Jaringan	1	0	1	0
2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1	1	1	0
3.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	62,6	65	68,2	79,3
4.	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Jiwa	12677	16720	13385	11360
5.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Rumah Tangga	127	75	212	212
6.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	4000	75	6000	84



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	2023	
			2021	2022	Target	Realisasi
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.	Jumlah Daerah Bencana Alam/ Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana)	Persen	6	9	20	1
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Persen	100	100	100	100
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen	0	0	0	0,5
2.	Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	9,6	6,06	9,11	5,71
3.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	Nilai	0		0	0,5
4.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	Nilai	0,20		0,18	0,05
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	35	42	35,90	7,08
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	3
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Angka	23,59	20,37	23,92	23
2.	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern	Persen	100	85	100	100
3.	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Rasio	100		100	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Persen	1	1,20	1	0,78
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					



No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	2023	
			2021	2022	Target	Realisasi
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	20.275	28.037	26.000	31.064
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	7	57	170	227
5.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01.	PERENCANAAN					
1.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persen	49,55	49,55	53,42	51,88
5.02	KEUANGAN					
1.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Rasio	0,01	0,19	0,01	0,76

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. T-II.96
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4A																								16	
1.01.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																											
1.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	67.90	570,000,000	65.25	355,040,205	67.90	396,000,000	67.90	1,171,797,280	65.25	3,080,000	0	134,858,445	53.75	120,623,460	75	96,478,300	75	355,040,205	110.46	30.30	140.25	355,040,205	206.55	62.29	
1.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	570,000,000	65	355,040,205	65	396,000,000	65	1,171,797,280	0	3,080,000	0	134,858,445	75	120,623,460	84.51	96,478,300	85	355,040,205	130.02	30.30	149.51	355,040,205	230.02	62.29	
1.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	170,000,000	0	346,153,205	2	52,000,000	2	1,153,709,280	1	1,848,000	1	133,010,445	1	120,623,460	2	90,671,300	2	346,153,205	100.00	30.00	2	346,153,205	100.00	203.62	LKJIP, SPIP, RTP, PROSES BISNIS
1.01.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	200,000,000	0	8,887,000	2	144,000,000	2	18,088,000	1	1,232,000	1	1,848,000	1	0	2	5,807,000	2	8,887,000	100.00	49.13	2	8,887,000	100.00	4.44	1 Laporan di TW IV
1.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	168,173,196,360	67	140,577,817,523	85	168,051,096,360	85	177,304,685,478	100	26,474,686,549	100	40,780,027,603	100	29,231,425,136	85	44,091,678,235	85	140,577,817,523	100.00	79.29	152	140,577,817,523	178.82	83.59	
1.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	141,360,971,897	1	129,742,033,529	1	138,510,971,897	1	162,798,179,685	1	24,310,005,100	1	38,387,707,296	1	27,158,898,964	1	39,885,422,169	1	129,742,033,529	100.00	79.70	2	129,742,033,529	200.00	91.78	
1.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1081	139,810,971,897	1157	127,787,426,015	1081	138,010,971,897	1081	159,724,753,715	1157	23,215,400,486	1138	38,127,227,951	1138	27,158,898,964	1138	39,285,898,614	1,138	127,787,426,015	105.27	80.00	2295	127,787,426,015	212.30	91.40	Gaji dan tunjangan ASN
1.01.01.2.02.02.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1,000,000,000	0	1,954,607,514	1	250,000,000	1	3,073,425,970	0	1,094,604,614	1	260,479,345	0	0	1	599,523,555	1	1,954,607,514	100.00	63.60	1	1,954,607,514	100.00	195.46	PSDKU belum terlaksana
1.01.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	500,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	50,000,000	0	33,168,020	95	50,000,000	95	140,461,600	0	0	0	0	0	0	99	33,168,020	99	33,168,020	99.00	23.61	99	33,168,020	104.21	66.34	Realisasi TW IV
1.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	50,000,000	0	33,168,020	26	50,000,000	26	140,461,600	0	0	0	0	0	0	5	33,168,020	5	33,168,020	19.23	23.61	5	33,168,020	19.23	66.34	Realisasi TW IV
1.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	15,000,000		0	95	200,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	816,845,463	66.67	395,082,378	75	731,245,463	75	813,653,280	25	3,696,000	50	109,684,455	75	43,726,200	75	237,975,723	75	395,082,378	100.00	48.56	141.67	395,082,378	188.89	48.37	
1.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	91,245,463		0	1	91,245,463	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	200,000,000	5	172,362,800	5	200,000,000	5	203,424,900	5	1,232,000	5	31,222,810	5	18,217,700	15	121,690,290	15	172,362,800	300.00	84.73	20	172,362,800	400.00	86.18	
1.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	60,600,000	2	65,890,600	2	35,000,000	2	85,392,000	2	0	2	7,215,000	2	12,162,500	6	46,513,100	6	65,890,600	300.00	77.16	8	65,890,600	400.00	108.73	
1.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	100,000,000	0	0	3	100,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	120,000,000	4	138,676,978	4	150,000,000	4	154,814,110	4	1,232,000	4	69,098,645	4	12,146,000	12	56,200,333	12	138,676,978	300.00	89.58	16	138,676,978	400.00	115.56	
1.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	15,000,000	4	12,300,000	10	50,000,000	10	25,000,000	4	0	4	300,000	15	1,200,000	15	10,800,000	15	12,300,000	150.00	49.20	19	12,300,000	190.00	82.00	ada 15 media online yg menjadi publikasi pendidikan
1.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	200,000,000		0	10	25,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30,000,000	0	5,852,000	1	80,000,000	1	345,022,270	0	1,232,000	0	1,848,000	0	0	1	2,772,000	1	5,852,000	100.00	1.70	1	5,852,000	100.00	19.51	Realisasi TW IV
1.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	850,000,000	124	550,837,684	80	720,000,000	80	1,007,127,500	25	20,297,339	50	167,852,773	75	143,923,000	75	218,764,572	75	550,837,684	100.00	54.89	199	550,837,684	248.75	64.80	
1.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	850,000,000	310	550,837,684	200	720,000,000	200	1,007,127,500	373	20,297,339	273	167,852,773	1206	143,923,000	1206	218,764,572	1,206	550,837,684	603.00	54.69	1516	550,837,684	758.00	64.80	jumlah SPT dan SPPD yang sudah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
																												didaftarkan	
1.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	3,128,000,000	25	1,484,223,333	75	3,976,500,000	75	2,670,219,500	25	3,080,000	25	144,620,000	82.35	267,012,164	82	1,069,511,169	82	1,484,223,333	109.33	55.58	107	1,484,223,333	142.67	47.45	
1.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	77	100,000,000	25	0	77	660,000,000	77	301,129,190	25	0	25	0	82.35	0	82	0	82	0	109.33	0.00	107	0	138.96	0.00	
1.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	850,000,000		0	1	650,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	68,000,000	0	80,476,350	1	68,000,000	1	130,700,000	0	0	0	0	0	0	3	80,476,350	3	80,476,350	300.00	61.57	3	80,476,350	300.00	118.35	sedang proses pengadaan
1.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	100,000,000	0	0	3	660,000,000	3	301,129,190	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	166.67	0.00	5	0	166.67	0.00	Anggaran di APBD Perubahan
1.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200,000,000	0	479,062,000	10	968,500,000	10	1,281,844,000	0	1,232,000	1	1,848,000	2	0	0	475,982,000	10	479,062,000	100.00	37.38	10	479,062,000	100.00	239.53	sedang proses pengadaan
1.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	590,000,000	0	253,159,200	2	200,000,000	2	362,146,640	0	1,232,000	1	1,848,000	0	21,117,200	2	228,962,000	2	253,159,200	100.00	69.91	2	253,159,200	100.00	42.91	Belum terealisasi
1.01.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	590,000,000		0	1	700,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	830,000,000	1	671,525,783	1	1,390,000,000	1	895,728,860	1	616,000	1	140,924,000	8	245,894,964	8	284,090,819	8	671,525,783	800.00	74.97	9	671,525,783	900.00	80.91	sewa asrama dan pembangunan tempat air, sedang proses pengadaan
1.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	21,202,379,000	0	7,399,820,586	80	22,202,379,000	80	7,693,124,232	25	2,136,376,110	50	1,954,661,879	75	1,568,035,368	0	1,740,747,229	13	7,399,820,586	17.33	96.19	13	7,399,820,586	16.25	34.90	
1.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	100,000,000	0	113,599,691	3	100,000,000	3	194,000,000	3	0	3	95,370,691	3	0	0	18,229,000	12	113,599,691	400.00	58.56	12	113,599,691	400.00	113.60	harusnya 12 bulan layanan jasa surat menyurat
1.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	135,179,000	1	144,550,693	2	135,179,000	2	271,683,860	3	0	3	30,782,800	3	35,665,000	0	78,102,893	12	144,550,693	600.00	53.21	13	144,550,693	650.00	106.93	harusnya 12 bulan layanan jasa surat menyurat
1.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1080	20,967,200,000	1813	7,141,670,202	1080	21,967,200,000	1080	7,227,440,372	1813	2,136,376,110	1305	1,828,508,388	1304	1,532,370,368	1304	1,644,415,336	1,304	7,141,670,202	120.74	98.81	3117	7,141,670,202	288.61	34.06	honorarium gtt ptt pemda, terdaapt juga yg sudah lulus PPKK
1.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	650,000,000	33.33	972,651,993	75	1,000,000,000	75	1,880,790,491	13.33	1,232,000	13.33	15,501,200	13.33	49,829,440	13	906,089,353	13	972,651,993	17.33	51.72	46.33	972,651,993	61.77	149.64	
1.01.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	150,000,000	2	120,628,985	2	150,000,000	2	475,087,021	2	1,232,000	2	5,733,200	2	26,080,990	11	87,582,795	11	120,628,985	550.00	25.39	13	120,628,985	650.00	80.42	pajak kendraan dinas lainnya sedang proses
1.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50,000,000		0	7	50,000,000	7	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	100,000,000		0	10	50,000,000	10	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200,000,000	0	688,615,728	1	600,000,000	1	1,206,848,470	0	0	0	0	0	0	1	688,615,728	1	688,615,728	100.00	57.06	1	688,615,728	100.00	344.31	sedang proses pelaksanaan pekerjaan
1.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	150,000,000	0	163,407,280	10	150,000,000	10	198,855,000	0	0	0	9,768,000	1	23,748,450	1	129,890,830	1	163,407,280	10.00	82.17	1	163,407,280	10.00	108.94	sebagai paket pekerjaan sedang berjalan
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	0.009615	22,960,429,000	0.00957	6,845,346,363	0.009615	45,297,401,720	0.009615	7,304,932,891	0.00957	274,455,089	0.00957	896,021,160	0.00957	1,429,009,051	0	4,245,861,063	0	6,845,346,363	99.53	93.71	0.01914	6,845,346,363	199.06	29.81	
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	Rasio	43.75	22,960,429,000	42	6,845,346,363	43.75	45,297,401,720	43.75	7,304,932,891	42	274,455,089	42	896,021,160	42	1,429,009,051	42	4,245,861,063	42	6,845,346,363	96.00	93.71	84	6,845,346,363	192.00	29.81	
1.01.02.2.01.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	5,950,000,000	0	0	1	3,950,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.03.		Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0.25	50,000,000	0	40,039,900	0.25	1,416,087,957	0.25	42,278,100	0	32,978,100	1	2,679,600	1	0	0	4,382,200	2	40,039,900	800.00	94.71	2	40,039,900	800.00	80.08	ada 1 Paket pekerjaan Pembangunan Ruang Guru SDN 003 Setumuk tidak dilaksanakan karena pengurangan anggaran
1.01.02.2.01.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	50,000,000	0	4,927,000	1	430,000,000	1	9,923,000	0	0	0	1,972,600	1	0	1	2,954,400	1	4,927,000	100.00	49.65	1	4,927,000	100.00	9.85	Pembangunan UKS SDN 2 Selading tidak dilaksanakan
1.01.02.2.01.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	153,444,000	0	314,412,112	1	153,444,000	1	320,739,536	0	0	0	83,443,728	0	132,378,710	1	98,589,674	1	314,412,112	100.00	98.03	1	314,412,112	100.00	204.90	(1) Pembangunan Perpustakaan SDN 003 Subi Besar, (2) Pembangunan Perpustakaan SDN 002 Selading tidak dilaksanakan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
1.01.02.2.01.06.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	6,763,881,000	0	5,171,488,817	1	7,855,784,027	1	5,234,489,305	0	241,476,989	0	513,271,720	0	836,994,092	1	3,579,746,016	1	5,171,488,817	100.00	98.80	1	5,171,488,817	100.00	76.46	Ada 20 Paket
1.01.02.2.01.07.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	50,000,000	0	1,090,106,172	1	779,600,000	1	1,097,050,150	0	0	0	294,053,512	1	459,636,249	1	336,416,411	1	1,090,106,172	100.00	99.37	1	1,090,106,172	100.00	2,180.21	Ada 4 Rumah Dinas yang dibangun
1.01.02.2.01.09.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	0	222,746,362	1	1,090,230,320	1	235,153,200	0	0	0	300,000	1	0	1	222,446,362	1	222,746,362	100.00	94.72	1	222,746,362	100.00	10.34	Ada 1 Paket Rehab Ruang Guru SDN 001 Sedanau Timur
1.01.02.2.01.11.		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	0	1,626,000	1	800,000,000	1	365,299,600	0	0	0	300,000	0	0	2	1,326,000	2	1,626,000	200.00	0.45	2	1,626,000	200.00	0.08	Ada 3 Paket Rehab Perpustakaan, (1) SDN 003 Kelarik, (2) SDN 10 Batu gajah, (3) SDN 009 Mekar Jaya tidak dilaksanakan.
1.01.02.2.01.13.		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	2,153,444,000	0	0	1	2,023,444,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.47.		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	250,000,000	0	0	1	1,900,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.48.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	1,079,772,000	0	0	2	449,123,816	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.51.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,000,000	0	0	1	24,449,687,600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	0.0091	38,741,467,566	0	11,763,809,804	0.0091	34,745,173,700	0.0091	12,271,589,890	0	478,601,294	0	2,361,816,797	0	3,845,282,941	1.81	5,078,108,772	2	11,763,809,804	93.38	95.86	1.81	11,763,809,804	19,890.11	30.36	Realisasi TW.IV
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Rasio	71.34	38,741,467,566		11,763,809,804	71.34	34,745,173,700	71.34	12,271,589,890		478,601,294		2,361,816,797		3,845,282,941		5,078,108,772	0	11,763,809,804	0.00	95.86	0	11,763,809,804	0.00	30.36	
1.01.02.2.02.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3,500,000,000	0	1,336,000,000	1	3,300,000,000	1	1,616,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,336,000,000	0	1,336,000,000	0.00	82.64	0	1,336,000,000	0.00	38.17	Tidak dikerjakan karena ada pengurangan anggaran
1.01.02.2.02.03.		Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	230,000,000	0	0	2	1,755,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	340,000,000	0	2,026,349,416	1	1,690,000,000	1	2,067,601,305	0	0	0	540,634,231	0	849,980,211	6	635,734,974	6	2,026,349,416	600.00	98.00	6	2,026,349,416	600.00	595.99	Ada 6 UKS yang dibangun:
1.01.02.2.02.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	130,000,000	0	0	1	130,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.06.		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	2,150,000,000	0	3,034,971,505	4	4,593,492,700	4	3,087,437,458	0	82,195,908	0	768,736,501	0	1,281,550,458	4	902,488,638	4	3,034,971,505	100.00	98.30	4	3,034,971,505	100.00	141.16	Ada 4 Laboratorium yang dibangun
1.01.02.2.02.09.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	1,500,000,000	0	2,118,772,516	2	6,530,000,000	2	2,165,981,545	0	0	0	560,898,381	0	891,633,082	6	666,241,053	6	2,118,772,516	300.00	97.82	6	2,118,772,516	300.00	141.25	Ada 6 Rumah Dinas yang dibangun.
1.01.02.2.02.12.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	8	30,161,467,566	0	2,687,673,609	8	9,059,800,000	8	2,758,113,984	0	247,522,788	0	490,947,684	0	822,119,190	10	1,127,083,947	10	2,687,673,609	125.00	97.45	10	2,687,673,609	125.00	8.91	Ada 10 Paket.
1.01.02.2.02.14.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	600,000,000	0	149,182,598	6	7,216,881,000	6	151,682,598	0	148,882,598	0	300,000	0	0	0	0	0	149,182,598	0.00	98.35	0	149,182,598	0.00	24.86	
1.01.02.2.02.17.		Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	130,000,000	0	410,860,160	1	470,000,000	1	424,133,000	0	0	0	300,000	0	0	2	410,560,160	2	410,860,160	200.00	96.87	2	410,860,160	200.00	316.05	Ada 2 Paket (1) Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 1 Bunguran Utara, (2) Rehabilitasi SMP 2 Bunguran Timur
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	90.72	5,385,000,000	0	6,885,229,836	90.72	5,068,000,000	90.72	8,514,115,000	0	364,975,600	0	2,473,039,133	0	572,587,328	83.38	3,474,627,775	83	6,885,229,836	91.91	80.87	83.38	6,885,229,836	91.91	127.86	Realisasi TW.IV
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	Nilai	70	1,145,000,000	0	6,830,749,836	70	2,295,000,000	70	7,633,915,000	0	364,975,600	0	2,473,039,133	0	572,587,328	99	3,420,147,775	99	6,830,749,836	141.43	89.48	99	6,830,749,836	141.43	596.57	Realisasi TW.IV
1.01.02.2.02.38.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	22	200,000,000	0	0	22	300,000,000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.39.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	27	200,000,000	0	2,167,332,096	27	250,000,000	27	2,264,850,000	91	362,975,600	91	696,187,888	91	568,435,328	273	539,733,280	273	2,167,332,096	1,011.11	95.69	273	2,167,332,096	1,011.11	1,083.67	GTT KONTRAK SMP = 26 ORG, GTT/PTT 65 ORG
1.01.02.2.02.41.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	27	175,000,000	0	0	27	525,000,000	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.42.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	27	320,000,000	0	4,663,417,740	27	970,000,000	27	5,369,065,000	27	2,000,000	27	1,776,851,245	27	4,152,000	81	2,880,414,495	81	4,663,417,740	300.00	86.86	81	4,663,417,740	300.00	1,457.32	sudah dilaksanakan
1.01.02.2.02.51.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	27	250,000,000	0	0	27	250,000,000	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi	Persen	71.34	4,240,000,000		54,480,000	71.34	2,773,000,000	71.34	880,200,000		0		0		0		54,480,000	0	54,480,000	0.00	6.19	0	54,480,000	0.00	1.28	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
		Menengah Pertama	bangunan baik																										
1.01.02.2.02.25.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	500,000,000	0	54,480,000	2	120,000,000	2	180,200,000	0	0	0	0	0	0	2	54,480,000	2	54,480,000	100.00	30.23	2	54,480,000	100.00	10.90	Ada 2 Paket: (1) MTS Bakti Natuna, (2) MTS Ranai
1.01.02.2.02.27.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	290,000,000	0	0	3	675,000,000	3	700,000,000	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	133.33	0.00	4	0	133.33	0.00	Ada 4 Paket, (1) PC Komputer untuk SMPN 2 Bunguran Timur, (2) Alat Kesenian SMPN 3 Bunguran Timur, (3) Alat Kesenian SMPN 1 Bunguran Timur Laut, (4) Alat Kesenian SMPN Satap Pengadah.
1.01.02.2.02.32.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3250	2,250,000,000		0	3250	1,450,000,000	3250	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.58.		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	4432	200,000,000		0	4432	328,000,000	4432	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.62.		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	1,000,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5–6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	60.12	5,636,961,000	0	4,128,720,001	60.12	14,281,090,000	60.12	6,696,889,800	84	110,059,850	84	1,339,445,837	84	472,108,111	59.01	2,207,106,203	59	4,128,720,001	98.15	61.65	59.01	4,128,720,001	98.15	73.24	
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	15	5,131,961,000	0	2,001,178,634	15	13,431,090,000	15	3,442,437,660	0	110,059,850	0	271,823,437	17	468,513,111	51	1,150,782,236	51	2,001,178,634	340.00	58.13	51	2,001,178,634	340.00	38.99	
1.01.02.2.03.02.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	5	340,000,000	0	1,037,176,479	5	2,482,960,000	5	1,191,151,850	0	110,059,850	0	157,763,564	0	298,177,311	6	471,175,754	6	1,037,176,479	120.00	87.07	6	1,037,176,479	120.00	305.05	ada 6 kegiatan yang dilaksanakan :1. Pembangunan Paving Blok TK Ash Shoffa Singgang Bulan Kec. Bunguran selatan – 2. Pembangunan UKS TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut, 3. Pemasangan Paving Block TKN Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah, 4. Pembangunan Ruang UKS TK Negeri Bunguran Utara , 5. Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT, 6. Perencanaan Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK NEGERI BUNGURAN UTARA
1.01.02.2.03.03.		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2,281,961,000	0	373,483,151	2	1,021,750,000	2	1,097,060,000	0	0	0	0	0	0	3	373,483,151	3	373,483,151	75.00	34.04	3	373,483,151	150.00	16.37	ada 6 kegiatan yang dilaksanakan: 1. Rehab Aula TK Negeri 001 Bunguran Timur 2. Rehab TK Negeri Serasan Timur, 3. Rehab Atap TK Negeri 1 Bunguran Utara, 4. Pemasangan Plafon TK Negeri Bunguran Batubi, 5. Rehab Gedung TK Setia Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasa 6. Rehab Plafon TK Ash Shoffa Singgang Bulan
1.01.02.2.03.04.		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	130,000,000		0	2	120,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.03.09.		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	1	50,000,000	0	102,342,000	1	150,000,000	1	124,112,000	0	0	1	0	0	102,342,000	1	0	1	102,342,000	100.00	82.46	1	102,342,000	100.00	204.68	Pengadaan laptop untuk Sekolah PAUD
1.01.02.2.03.11.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3500	1,560,000,000	0	488,177,004	3500	3,000,000,000	3500	1,030,113,810	0	0	3035	114,059,873	0	67,993,800	3035	306,123,331	3,035	488,177,004	86.71	47.39	3035	488,177,004	86.71	31.29	Pencairan per semester
1.01.02.2.03.13.		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	3500	150,000,000	0	0	3500	2,500,000,000	3500	0	2983	0	2983	0	2983	0	0	0	8,949	0	255.69	0.00	8949	0	255.69	0.00	
1.01.02.2.03.28.		Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	350,000,000		0	4	3,786,380,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.01.02.2.03.41.		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	100,000,000	0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.03.42.		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	2	170,000,000	0	2	170,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	Rasio	1.20	505,000,000	0	1.20	850,000,000	1.20	3,254,452,140	1.1	0	1.1	1,067,622,400	1.1	3,595,000	1.09	1,056,323,967	1	2,127,541,367	86.25	65.37	1.09	2,127,541,367	90.83	421.30		
1.01.02.2.03.16.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	17	15,000,000	0	17	150,000,000	17	307,747,240	1	0	1	0	0	1,125,000	20	6,660,000	118	7,785,000	692.06	2.53	117.65	7,785,000	692.06	51.90	2 orang kegiatannya di bidang GTK	
1.01.02.2.03.17.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	116	100,000,000	0	116	300,000,000	116	686,264,900	123	0	123	47,332,200	123	2,470,000	121	26,556,367	121	76,358,567	104.31	11.13	121	76,358,567	104.31	76.36	123 satuan pendidikan PAUD , 22 TK Negeri , 1 SKB Natuna, 46 TK Swasta, 53 Kelompok Bermain	
1.01.02.2.03.18.		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	116	140,000,000	0	116	150,000,000	116	2,260,440,000	123	0	123	1,020,290,200	123	0	121	1,023,107,600	121	2,043,397,800	104.31	90.40	121	2,043,397,800	104.31	1,459.57	2 PAUD yang tidak memenuhi persyaratan penerima BOP	
1.01.02.2.03.19.		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	116	50,000,000	0	116	50,000,000	116	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.03.25.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	18	200,000,000	0	18	200,000,000	18	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	96.87	4,725,000,000	0	96.87	4,035,380,000	96.87	19,114,733,180	0	1,010,312,864	0	6,991,043,209	0	2,073,211,368	99.87	7,623,089,655	100	17,697,657,096	103.10	92.59	99.87	17,697,657,096	103.10	374.55	Realisasi TW.IV	
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Kelulusan SD/MI	Nilai	100	1,475,000,000	0	100	1,475,000,000	100	16,794,950,000	0	1,010,312,864	0	6,805,687,409	0	1,291,446,368	99.79	7,031,705,844	100	16,139,152,485	99.79	96.10	99.79	16,139,152,485	99.79	1,094.18	Realisasi TW.IV	
1.01.02.2.01.25.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	16	95,000,000	0	16	95,000,000	16	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.01.26.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	83	300,000,000	0	83	300,000,000	83	5,327,800,000	0	1,010,312,864	0	1,806,561,104	83	1,289,370,368	1213	1,068,650,000	1213	5,174,894,336	1,461.45	97.13	1213	5,174,894,336	1,461.45	1,724.96		
1.01.02.2.01.28.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	84	200,000,000	0	84	200,000,000	84	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.01.29.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	84	630,000,000	0	84	630,000,000	84	11,467,150,000	83	0	83	4,999,126,305	83	2,076,000	84	5,963,055,844	84	10,964,258,149	100.00	95.61	84	10,964,258,149	100.00	1,740.36		
1.01.02.2.01.38.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	84	150,000,000	0	84	150,000,000	84	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.01.50.		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	86	100,000,000	0	86	100,000,000	86	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	43.75	3,250,000,000	42	43.75	2,560,380,000	43.75	2,319,783,180	42	0	42	185,355,800	42	781,765,000	42	591,383,811	42	1,558,504,611	96.00	67.18	84	1,558,504,611	192.00	47.95		
1.01.02.2.01.14.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	2	550,000,000	0	2	700,000,000	2	590,000,000	0	0	0	0	0	0	2	164,250,000	2	164,250,000	100.00	27.84	2	164,250,000	100.00	29.86		
1.01.02.2.01.16.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	200,000,000	0	1	360,380,000	1	905,978,180	0	0	0	350,000	0	617,745,000	1	26,573,811	1	644,668,811	100.00	71.16	1	644,668,811	100.00	322.33		
1.01.02.2.01.21.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	8800	2,500,000,000	0	8800	1,500,000,000	8800	823,805,000	0	0	0	185,005,800	0	164,020,000	8634	400,560,000	8,634	749,585,800	98.11	90.99	8634	749,585,800	98.11	29.98		
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	91.91	2,806,250,000	0	91.91	3,681,250,000	91.91	798,830,890	0	24,634,016	0	134,693,724	0	55,833,816	91.36	180,318,912	91	395,480,468	99.40	49.51	91.36	395,480,468	99.40	14.09		
1.01.02.2.04.		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	45	2,806,250,000	0	45	3,681,250,000	45	798,830,890	0	24,634,016	0	134,693,724	0	55,833,816	1	180,318,912	1	395,480,468	2.22	49.51	1	395,480,468	2.22	14.09		
1.01.02.2.04.01.		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	650,000,000	0	1	800,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.04.14.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	11	100,000,000	0	11	100,000,000	11	226,850,000	11	24,634,016	11	64,801,024	11	51,534,016	33	50,550,512	33	191,519,568	300.00	84.43	33	191,519,568	300.00	191.52	guru SKB Natuan	
1.01.02.2.04.15.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	11	150,000,000	0	11	450,000,000	11	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.04.16.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1	100,000,000	0	1	200,000,000	1	79,042,710	0	0	0	8,317,700	0	4,299,800	1	18,743,400	1	31,360,900	100.00	39.68	1	31,360,900	100.00	31.36	SKB Natuna	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.01.02.2.04.17.		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1	100,000,000	0	172,600,000	1	300,000,000	1	492,938,180	0	0	0	61,575,000	0	0	1	111,025,000	1	172,600,000	100.00	35.01	1	172,600,000	100.00	172.60	SKB Natuna
1.01.02.2.04.40.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	100,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.42.		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1	375,000,000		0	1	400,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.48.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	321,000,000		0	1	321,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.50.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	910,250,000		0	2	910,250,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	60.00	0		0	60.00	72,000,000	60.00	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.03.2.01.		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Rata-rata nilai SNP kompetensi lulusan pendidikan dasar	Nilai	6.21	0		0	6.21	72,000,000	6.21	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.03.2.01.02.		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	0		0	0	72,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.04.		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Persen	31.54	3,650,000,000	45	848,378,732	31.54	3,650,000,000	31.54	1,682,500,000	40	11,680,000	45	5,741,607	45	335,542,914	45	495,414,211	45	848,378,732	142.68	50.42	90	848,378,732	285.35	23.24	
1.01.04.2.01.		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memiliki kualifikasi SI/D4	Persen	100	3,650,000,000	90	848,378,732	100	3,650,000,000	100	1,682,500,000	90	11,680,000	90	5,741,607	90	335,542,914	90	495,414,211	90	848,378,732	90.00	50.42	180	848,378,732	180.00	23.24	
1.01.04.2.01.01.		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	3	400,000,000	0	546,048,285	3	800,000,000	3	1,046,828,530	3	1,232,000	3	0	3	191,488,500	3	353,327,785	3	546,048,285	100.00	52.16	3	546,048,285	100.00	136.51	Tiga Dokumen 1. Dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan. 2. Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkompetensi Sertifikat Pendidik. 3. Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan dalam Peningkatan Karir
1.01.04.2.01.02.		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	3	3,250,000,000	0	302,330,447	3	2,850,000,000	3	635,671,470	3	10,448,000	3	5,741,607	3	144,054,414	3	142,086,426	3	302,330,447	100.00	47.56	3	302,330,447	100.00	9.30	Tiga Laporan 1. Laporan Hasil Rekapitan Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan. 2. Laporan Hasil Rekapitan Data Analisa Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan. 3. Laporan Hasil Rekapitan Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.22.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																											
2.22.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	14.44	850,000,000	0	572,156,520	14.44	1,015,000,000	14.44	986,997,089	0	68,677,500	14.44	7,308,000	14.44	42,592,020	14.44	453,579,000	14	572,156,520	90.00	57.97	14.44	572,156,520	14.44	67.31	
2.22.02.2.01.		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang di kelola	Objek kebudayaan	65	300,000,000	0	159,405,520	65	150,000,000	65	310,456,828	0	68,221,500	65	608,000	65	6,285,020	66	84,291,000	66	159,405,520	99.00	51.35	66	159,405,520	66.00	53.14	hadisun disusun: 1. HAKI 8 2. Pemeliharaan Sapras: 3 3. Pengadaan Perlengkapan Adat P.Laut 1 Paket 4. Pengadaan Baju Lam Kecamatan se Kabupaten 17

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
																													Kecamatan. 5. Pengadaan Baju LAM Kabupaten 1 Paket NA WBTB Destriyadi 1. Tapak Tok Nyong 2. Pengobatan Tradisional Tetas 3. Permainan Tradisional Gasing Natuna 4. Makan Bedulong 5. Kuah Tige 6. Kolek 7. Longlek 8. Sastra Lisan Tepung Tawar 9. Maen Taek 10. Tradisi Malok STAI : 1. Tradisi Bekarang 2. Tipeng Cangkos Ubi 3. Jung Kate 4. Keghabu 5. Nyuloh 6. Penjok 7. Satai 8. Silat Kemenyan 9. Kesenian Hadrah 10. Zike Maulod GELAR BUDAYA 1. Binjai 2. Kelarik 3. Museum 4. Bandarsyah 5. Mekar Jaya 6. Desa Pulau Tiga 7. 17 Agustus 8. Sepempang 9. Limau Manis 10. Desa Batu Gajah 11. Desa Sungai Ulu 12. Desa Sabang Mawang – Balai 13. Cemaga 14. Desa Kelanga 15. Senam Zapin 16. HUT Kab.Natuna
2.22.02.2.01.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	150,000,000	2	159,405,520	2	100,000,000	2	310,456,828	2	68,221,500	2	608,000	2	6,285,020	2	84,291,000	2	159,405,520	99.00	51.35	2	159,405,520	2.00	106.27	hadisun disun: NA WBTB & HAKI KOMUNAL 2023
2.22.02.2.01.02.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	2	150,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.02.2.02.		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Masyarakat yang dilestarikan	Jenis	2	150,000,000	1	245,561,000	2	100,000,000	2	497,450,000	0	456,000	0	6,700,000	2	36,307,000	2	202,098,000	2	245,561,000	99.00	49.36	2	245,561,000	2.00	163.71	hadisun disun: 1. Kesenian Tradisional 2. Kesenian Kreasi
2.22.02.2.02.		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Masyarakat yang dilestarikan	Kelompok	2	100,000,000	1	0	2	50,000,000	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	99.00	0.00	2	0	2.00	0.00	hadisun disun: 1. Kesenian Tradisional 2. Kesenian Kreasi
2.22.02.2.02.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	150,000,000	2	245,561,000	1	100,000,000	1	497,450,000	0	456,000	0	6,700,000	5	36,307,000	5	202,098,000	5	245,561,000	99.00	49.36	5	245,561,000	5.00	163.71	hadisun disun: 1. Kesenian 2. Permainan Rakyat 3. Tradisi Usan Ritus 4. Pengetahuan Tradisional 5. Ritus
2.22.02.2.02.03.		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	2	100,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.02.2.03.		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina	Lembaga	4	200,000,000	0	167,190,000	4	655,000,000	4	179,090,261	0	0	0	0	0	0	18	167,190,000	18	167,190,000	99.00	93.36	18	167,190,000	18.00	83.60	1 LAM Kabupaten Natuna, 17 LAM KECAMATAN
2.22.02.2.03.		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina	Objek	4	100,000,000	0	0	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	99.00	0.00	18	0	18.00	0.00	1 LAM Kabupaten Natuna, 17 LAM KECAMATAN
2.22.02.2.03.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	100,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.02.2.03.02.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	15	100,000,000		0	15	75,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.02.2.03.03.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang D isediakan / D ifasilitasi	Unit	1	100,000,000	0	167,190,000	1	580,000,000	1	179,090,261	0	0	0	0	0	0	1	167,190,000	1	167,190,000	99.00	93.36	1	167,190,000	1.00	167.19	Penyediaan baju adat melayu
2.22.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	31.13	150,000,000		0	31.13	150,000,000	31.13	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.03.2.01.		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Daerah yang dibina	Kesenian	2	150,000,000		0	2	150,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.03.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	150,000,000		0	1	150,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.22.04.		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Sejarah yang Dilestarikan	Persen	20	100,000,000		0	20	100,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.04.2.01.		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dilestarikan	Objek Sejarah	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.04.2.01.03.		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.05.		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan	Persen	98.82	100,000,000		0	98.82	100,000,000	98.82	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.05.2.02.		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya daerah yang dikelola	Cagar Budaya	502	100,000,000		0	502	100,000,000	502	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.05.2.02.01.		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.06.		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Peningkatan Koleksi Museum	Persen	20	100,000,000		0	20	100,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.06.2.01.		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	Item	1	100,000,000	1	0	1	100,000,000	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	1.00	0.00	
2.22.06.2.01.01.		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.06.		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	Persen	20	460,000,000	20	124,415,887	20	500,000,000	20	561,278,180	0	1,056,000	20	6,361,663	20	27,588,508	20	89,409,715	20	124,415,886	99.00	22.17	20	124,415,887	20.00	27.05	
2.22.06.2.01.		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	Museum/Taman Budaya	1	460,000,000	1	124,415,887	1	500,000,000	1	561,278,180	0	1,056,000	1	6,361,663	1	27,588,508	1	89,409,715	1	124,415,886	100.00	22.17	1	124,415,887	1.00	27.05	
2.22.06.2.01.02.		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	4	150,000,000		0	4	150,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.06.2.01.04.		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	310,000,000	1	124,415,887	1	350,000,000	1	561,278,180	0	1,056,000	1	6,361,663	1	27,588,508	1	89,409,715	1	124,415,886	100.00	22.17	1	124,415,887	1.00	40.13	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4A																									
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.64	140,000,000	89.84	221,519,388	88.64	234,000,000	88.64	438,485,550	73.3	5,238,900	73.3	31,331,708	73.3	15,749,300	73.3	30,327,780	73	82,647,688	82.69	18.85	163.14	221,519,388	184.05	158.23	
1.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	140,000,000	41.68	221,519,388	70	234,000,000	70	438,485,550	49	5,238,900	60	31,331,708	60	15,749,300	60	30,327,780	60	82,647,688	85.71	18.85	101.68	221,519,388	145.26	158.23	
1.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70,000,000	0	34,201,980	2	84,000,000	2	109,524,380	0	0	1	13,172,200	1	0	2	21,029,780	2	34,201,980	100.00	31.23	2	34,201,980	100.00	48.86	
1.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70,000,000	100	187,317,408	2	150,000,000	2	328,961,170	1	5,238,900	1	18,159,508	2	15,749,300	2	9,298,000	2	48,445,708	100.00	14.73	102	187,317,408	5,100.00	267.60	
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	91,216,600,001	75	129,012,744,890	80	113,980,880,001	80	75,071,592,304	100	14,489,836,567	100	18,660,665,177	100	14,015,557,898	100	23,650,881,920	100	70,816,941,562	125.00	94.33	175	129,012,744,890	218.75	141.44	
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	65,350,600,000	100	126,266,606,087	1	88,386,180,000	1	71,062,623,964	1	14,055,394,118	1	18,221,644,516	1	12,611,436,814	1	23,182,327,311	1	68,070,802,759	100.00	95.79	101	126,266,606,087	10,100.00	193.21	
1.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	494	65,350,600,000	122.76	126,266,606,087	494	88,386,180,000	494	71,062,623,964	494	14,055,394,118	494	18,221,644,516	801	12,611,436,814	801	23,182,327,311	2,590	68,070,802,759	524.29	95.79	2712.76	126,266,606,087	549.14	193.21	
1.02.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	75	75,000,000	0	47,470,400	75	75,000,000	75	125,000,000	0	0	37.98	47,470,400	37.98	0	37.98	0	38	47,470,400	50.64	37.98	37.98	47,470,400	50.64	63.29	
1.02.01.2.03.04.		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	75,000,000	0	47,470,400	1	75,000,000	1	125,000,000	1	0	1	47,470,400	1	0	1	0	1	47,470,400	100.00	37.98	1	47,470,400	100.00	63.29	
1.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	450,000,000	0	11,968,750	95	450,000,000	95	89,398,750	100	0	100	4,439,250	100	1,479,750	100	6,049,750	85	11,968,750	89.47	13.39	85	11,968,750	89.47	2.66	
1.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	150,000,000	0	0	400	150,000,000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	75,000,000	0	11,968,750	1	75,000,000	1	79,398,750	0	0	0	4,439,250	0	1,479,750	1	6,049,750	1	11,968,750	100.00	15.07	1	11,968,750	100.00	15.96	
1.02.01.2.05.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	28	75,000,000	0	0	28	75,000,000	28	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	150,000,000	0	0	3	150,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,117,000,000	4	514,655,807	70	1,040,200,000	70	972,742,110	25	54,851,750	50	149,999,370	75	175,875,173	32.24	133,929,514	75	514,655,807	107.14	52.91	79	514,655,807	112.86	46.07	
1.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	87,000,000	0	88,869,250	25	87,000,000	25	242,004,250	0	40,591,750	0	8,798,250	2	14,528,250	9	24,951,000	11	88,869,250	44.00	36.72	11	88,869,250	44.00	102.15	
1.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	310,000,000	0	14,991,000	28	48,200,000	28	15,000,000	0	1,845,000	3	5,266,000	5	3,482,000	7	4,398,000	15	14,991,000	53.57	99.94	15	14,991,000	53.57	4.84	
1.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	120,000,000	0	14,859,000	2	120,000,000	2	43,940,000	0	1,200,000	1	360,000	3	1,350,000	12	11,949,000	16	14,859,000	800.00	33.82	16	14,859,000	800.00	12.38	
1.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	90,000,000	0	43,677,200	9	270,000,000	9	45,000,000	0	3,192,000	2	4,565,200	4	28,550,000	8	7,370,000	14	43,677,200	155.56	97.06	14	43,677,200	155.56	48.53	
1.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	kegiatan tidak dilaksanakan
1.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	18	40,000,000	30	87,162,900	18	40,000,000	18	87,420,000	0	6,223,000	2	15,747,100	4	12,853,100	9	52,339,700	15	87,162,900	83.33	99.71	45	87,162,900	250.00	217.91	
1.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	118	420,000,000	0	265,096,457	118	420,000,000	118	534,377,860	0	1,800,000	23	115,262,820	40	115,111,823	69	32,921,814	132	265,096,457	111.86	49.61	132	265,096,457	111.86	63.12	
1.02.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30,000,000	0	0	4	35,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	950,000,000	0	1,067,829,972	65	755,500,000	65	1,270,602,000	0	5,669,000	1.05	11,275,500	96.42	1,035,851,472	98.29	15,034,000	96	1,067,829,972	148.34	84.04	96.42	1,067,829,972	148.34	112.40	
1.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	300,000,000	0	0	1	300,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	114	300,000,000	0	0	114	80,000,000	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
1.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54	300,000,000	0	1,067,829,972	54	331,000,000	54	1,270,602,000	0	5,669,000	0	11,275,500	122	1,035,851,472	1	15,034,000	123	1,067,829,972	227.78	84.04	123	1,067,829,972	227.78	355.94	
1.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	0	5	44,500,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	22,954,000,001	0	971,844,574	75	22,954,000,001	75	1,208,067,480	25	369,728,699	50	209,426,641	75	179,175,189	80.92	213,514,045	75	971,844,574	100.00	80.58	75	971,844,574	100.00	4.23	
1.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15,000,000	0	7,500,000	1	15,000,000	1	7,500,000	0	1,800,000	2	3,600,000	0	0	3	2,100,000	5	7,500,000	500.00	100.00	5	7,500,000	500.00	50.00	
1.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	144,000,001	100	4,040,000	4	144,000,001	4	21,278,000	0	724,500	3	662,000	2	336,000	4	2,317,500	9	4,040,000	225.00	18.99	109	4,040,000	2,725.00	2.81	
1.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	22,795,000,000	0	960,304,574	1	22,795,000,000	1	1,177,289,480	0	367,204,199	0	205,164,641	0	178,839,189	6	209,096,545	6	960,304,574	600.00	81.57	6	960,304,574	600.00	4.21	
1.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	320,000,000	0	132,369,300	63	320,000,000	63	345,158,000	0	4,193,000	4.8	16,409,500	44.44	11,739,500	28.98	100,027,300	44	132,369,300	70.54	38.35	44.44	132,369,300	70.54	41.37	
1.02.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	300,000,000	0	125,369,300	14	300,000,000	14	325,158,000	0	4,193,000	0	16,409,500	4	11,739,500	22	93,027,300	26	125,369,300	185.71	38.56	26	125,369,300	185.71	41.79	
1.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000	0	7,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	0	0	0	0	0	0	1	7,000,000	1	7,000,000	50.00	35.00	1	7,000,000	50.00	35.00	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	Persen	26.5	258,000,000	81.72	56,618,200	26.5	258,000,000	26.5	121,767,000	0	0	0	7,855,600	0	26,196,600	0	22,566,000	0	56,618,200	0.00	46.50	81.72	56,618,200	308.38	21.95	tidak ada kasus DBD
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	Persen	100	258,000,000	100	56,618,200	100	258,000,000	100	121,767,000	0	0	0	7,855,600	0	26,196,600	0	22,566,000	0	56,618,200	0.00	46.50	100	56,618,200	100.00	21.95	tidak ada kasus DBD
1.02.02.2.02.25.		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	258,000,000	100	56,618,200	1	258,000,000	1	121,767,000	1	0	0	7,855,600	0	26,196,600	1	22,566,000	2	56,618,200	200.00	46.50	102	56,618,200	10,200.00	21.95	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKJIP	Persen	88.64	320,000,000	101.45	0	88.64	320,000,000	88.64	0	0	0	0	0	73.3	0	73.3	0	73	0	82.69	0.00	174.75	0	197.15	0.00	
1.02.02.2.03.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	Dokumen	1	320,000,000	100	0	1	320,000,000	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100.00	0.00	101	0	10,100.00	0.00	
1.02.02.2.03.02.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	320,000,000	100	0	1	320,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	0	10,000.00	0.00	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	Persen	4.6	1,565,000,000	201.35	105,268,464	4.6	1,565,000,000	4.6	370,022,920	0	0	0	0	5	9,490,464	8.53	95,778,000	14	105,268,464	294.13	28.45	214.88	105,268,464	4,671.30	6.73	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	Persen	100	1,565,000,000	100	105,268,464	100	1,565,000,000	100	370,022,920	0	0	0	0	0	9,490,464	100	95,778,000	100	105,268,464	100.00	28.45	200	105,268,464	200.00	6.73	
1.02.02.2.02.15.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1,565,000,000	100	105,268,464	1	1,565,000,000	1	370,022,920	1	0	0	0	0	9,490,464	1	95,778,000	2	105,268,464	200.00	28.45	102	105,268,464	10,200.00	6.73	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan ODF	Persen	80	325,000,000	45.85	67,362,457	80	325,000,000	80	300,000,000	0	0	0	7,097,810	29.87	24,534,647	29.87	35,730,000	30	67,362,457	37.34	22.45	75.72	67,362,457	94.65	20.73	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	Persen	80	325,000,000	8.09	67,362,457	80	325,000,000	80	300,000,000	23.38	0	23.38	7,097,810	29.87	24,534,647	29.87	35,730,000	107	67,362,457	133.13	22.45	114.59	67,362,457	143.24	20.73	
1.02.02.2.02.29.		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	325,000,000	100	67,362,457	1	325,000,000	1	300,000,000	0	0	0	7,097,810	0	24,534,647	1	35,730,000	1	67,362,457	100.00	22.45	101	67,362,457	10,100.00	20.73	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	Persen	99.4	527,000,000	80.06	4,112,000	99.4	647,000,000	99.4	140,916,000	0	0	0	0	12.61	3,662,000	12.61	450,000	25	4,112,000	25.37	2.92	105.28	4,112,000	105.92	0.78	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	527,000,000	46.42	4,112,000	100	647,000,000	100	140,916,000	100	0	100	0	100	3,662,000	92.701	450,000	100	4,112,000	100.00	2.92	146.42	4,112,000	146.42	0.78	
1.02.02.2.02.11.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	525	527,000,000	92.6	4,112,000	525	647,000,000	525	140,916,000	312	0	393	0	560	3,662,000	762	450,000	2,027	4,112,000	386.10	2.92	2119.6	4,112,000	403.73	0.78	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Persen	73.3	693,000,000	120.12	56,437,554	73.3	693,000,000	73.3	248,176,000	60	0	60	17,655,600	53.3	22,947,754	13.3	15,834,200	187	56,437,554	254.57	22.74	306.72	56,437,554	418.44	8.14	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	87.8	693,000,000	104	56,437,554	87.8	693,000,000	87.8	248,176,000	20.94	0	36.29	17,655,600	58	22,947,754	78.24	15,834,200	58	56,437,554	66.06	22.74	162	56,437,554	184.51	8.14	
1.02.02.2.02.20.		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	693,000,000	100	56,437,554	1	693,000,000	1	248,176,000	1	0	0	17,655,600	0	22,947,754	1	15,834,200	2	56,437,554	200.00	22.74	102	56,437,554	10,200.00	8.14	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16		
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	Persen	93.33	29,199,327,000	86.15	2,206,937,847	93.33	24,038,805,000	93.33	3,282,899,829	85.7	3,502,500	85.7	45,441,250	85.7	504,215,750	92.9	1,653,778,347	350	2,206,937,847	375.01	67.23	436.15	2,206,937,847	467.32	7.56			
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	45	4,308,000,000	316	1,481,469,364	45	2,480,000,000	45	2,167,575,719	0	0	0	0	105.22	199,449,800	105.22	1,282,019,564	100	1,481,469,364	222.22	68.35	416	1,481,469,364	924.44	34.39			
1.02.02.2.01.14.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	7200	3,933,000,000	102.45	1,479,865,364	7200	2,105,000,000	7200	2,119,575,719	7141	0	7141	0	7576	199,449,800	7576	1,280,415,564	29,434	1,479,865,364	408.81	69.82	29536.45	1,479,865,364	410.23	37.63			
1.02.02.2.01.20.		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	18	375,000,000	0	1,604,000	18	375,000,000	18	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,604,000	0	1,604,000	0.00	3.34	0	1,604,000	0.00	0.43	Kegiatan tidak dilaksanakan		
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	71	17,105,000,000	122.77	0	71	19,049,805,000	71	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	70.42	0.00	172.77	0	243.34	0.00				
1.02.02.2.01.02.		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	5,760,000,000	133.33	0	1	11,337,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	133.33	0	13,333.00	0.00				
1.02.02.2.01.03.		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	3,500,000,000		0	3	2,615,025,000	3	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.01.04.		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	4,250,000,000	150	0	1	3,350,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	150	0	15,000.00	0.00				
1.02.02.2.01.07.		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	1,500,000,000	0	0	5	500,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.01.09.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	1,695,000,000		0	1	1,247,780,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.01.11.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	2	400,000,000		0	2	0	2	0	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Puskesmas	86.6	1,723,000,000	0	272,052,683	86.6	1,723,000,000	86.6	544,688,910	85.7	0	85.7	7,500,000	85.7	34,230,500	92.9	230,322,183	350	272,052,683	404.16	49.95	350	272,052,683	404.16	15.79			
1.02.02.2.02.35.		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	13	1,723,000,000	0	272,052,683	13	1,723,000,000	13	544,688,910	12	0	12	7,500,000	12	34,230,500	13	230,322,183	49	272,052,683	376.92	49.95	49	272,052,683	376.92	15.79			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan biaya operasional	Persen	100	5,277,327,000	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	5,277,327,000	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	Persen	100	450,000,000	0	100	450,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.02.38.		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	450,000,000	0	1	450,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persen	80	336,000,000	0	453,415,800	80	336,000,000	80	570,635,200	100	3,502,500	100	37,941,250	100	270,535,450	100	141,436,600	400	453,415,800	500.00	79.46	400	453,415,800	500.00	134.95			
1.02.02.2.04.04.		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	336,000,000	0	453,415,800	1	336,000,000	1	570,635,200	0	3,502,500	0	37,941,250	0	270,535,450	1	141,436,600	1	453,415,800	100.00	79.46	1	453,415,800	100.00	134.95			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	12,773,611,882	45.85	6,293,807,800	100	15,328,334,000	100	13,296,758,000	100.34	3,049,314,400	100.92	2,127,029,800	102.36	1,094,480,400	102.41	22,983,200	55	6,293,807,800	54.98	47.33	100.83	6,293,807,800	100.83	49.27			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	46850	12,773,611,882	8.09	6,293,807,800	46850	15,328,334,000	46850	13,296,758,000	83542	3,049,314,400	84004	2,127,029,800	85205	1,094,480,400	85242	22,983,200	85,202	6,293,807,800	181.86	47.33	85210.09	6,293,807,800	181.88	49.27			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	12,773,611,882	0	6,293,807,800	1	15,328,334,000	1	13,296,758,000	1	3,049,314,400	0	2,127,029,800	0	1,094,480,400	1	22,983,200	1	6,293,807,800	100.00	47.33	1	6,293,807,800	100.00	49.27			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	Persen	45	393,000,000	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat generik	Persen	100	393,000,000	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.02.34.		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	393,000,000	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase KK yang sudah diverifikasi	Persen	92.89	200,000,000	0	92.89	200,000,000	92.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang diverifikasi	Indeks	16713	200,000,000	0	16713	200,000,000	16713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.22.		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	16713	200,000,000	0	16713	200,000,000	16713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	Persen	40.25	315,000,000	146.66	16,960,628	40.25	315,000,000	40.25	182,400,000	17.71	0	38.85	2,999,628	49.7	2,024,000	69.12	11,937,000	50	16,960,628	123.48	9.30	196.36	16,960,628	487.85	5.38	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	315,000,000	89.2	16,960,628	100	315,000,000	100	182,400,000	0	0	1.64	2,999,628	74.55	2,024,000	97.34	11,937,000	75	16,960,628	74.55	9.30	163.75	16,960,628	163.75	5.38	
1.02.02.2.02.03.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1300	315,000,000	89.2	16,960,628	1300	315,000,000	1300	182,400,000	296	0	557	2,999,628	870	2,024,000	1134	11,937,000	2,857	16,960,628	219.77	9.30	2946.2	16,960,628	226.63	5.38	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	Persen	100	745,200,000	0	100	345,200,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Terkonfirmasi Covid 19	Persen	5.1	745,200,000	0	5.1	345,200,000	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.37.		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	745,200,000	0	1	345,200,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	1,021,000,000	80.85	417,375,328	100	901,000,000	100	731,925,630	0	43,465,750	52.65	105,895,114	69.04	74,098,964	89.94	193,915,500	69	417,375,328	69.04	57.02	149.89	417,375,328	149.89	40.88	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	545,000,000	80.85	69,417,692	100	525,000,000	100	105,600,000	0	0	0	55,599,692	69.04	4,410,000	89.94	9,408,000	69	69,417,692	69.04	65.74	149.89	69,417,692	149.89	12.74	
1.02.02.2.02.02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1614	545,000,000	80.85	69,417,692	1614	525,000,000	1614	105,600,000	302	0	566	55,599,692	845	4,410,000	1100	9,408,000	2,813	69,417,692	174.29	65.74	2893.85	69,417,692	179.30	12.74	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	476,000,000	80.51	347,957,636	100	376,000,000	100	626,325,630	0	43,465,750	8.08	50,295,422	70.09	69,688,964	87.21	184,507,500	70	347,957,636	70.09	55.56	150.6	347,957,636	150.60	73.10	
1.02.02.2.02.01.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1611	476,000,000	80.51	347,957,636	1611	376,000,000	1611	626,325,630	270	43,465,750	553	50,295,422	858	69,688,964	1118	184,507,500	2,799	347,957,636	173.74	55.56	2879.51	347,957,636	178.74	73.10	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	Persen	100	1,504,630,100	100	185,457,100	100	1,304,630,100	100	410,740,000	0	0	0	33,248,200	100	6,649,700	100	145,559,200	100	185,457,100	100.00	45.15	200	185,457,100	200.00	12.33	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	498,000,000	53.12	74,987,200	100	498,000,000	100	75,000,000	0	0	33.32	24,987,200	68.8	0	98.78	50,000,000	69	74,987,200	68.80	99.98	121.92	74,987,200	121.92	15.06	
1.02.02.2.02.05.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14218	498,000,000	36.49	74,987,200	14218	498,000,000	14218	75,000,000	1630	0	2470	24,987,200	5402	0	14044	50,000,000	23,546	74,987,200	165.61	99.98	23582.49	74,987,200	165.86	15.06	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	Persen	5.63	235,630,100	69.93	14,575,700	5.63	235,630,100	5.63	35,420,000	0	0	12.72	4,506,000	12.72	6,649,700	12.72	3,420,000	38	14,575,700	677.80	41.15	108.09	14,575,700	1,919.89	6.19	
1.02.02.2.02.16.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	235,630,100	100	14,575,700	1	235,630,100	1	35,420,000	0	0	0	4,506,000	0	6,649,700	1	3,420,000	1	14,575,700	100.00	41.15	101	14,575,700	10,100.00	6.19	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	470,000,000	59.89	45,894,200	100	270,000,000	100	250,320,000	36	0	46	3,755,000	58	0	74.28	42,139,200	58	45,894,200	58.00	18.33	117.89	45,894,200	117.89	9.76	
1.02.02.2.02.06.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	58920	470,000,000	56.69	45,894,200	58920	270,000,000	58920	250,320,000	19748	0	24991	3,755,000	31800	0	40735	42,139,200	117,274	45,894,200	199.04	18.33	117330.69	45,894,200	199.14	9.76	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	301,000,000	58.53	50,000,000	100	301,000,000	100	50,000,000	36.78	0	45.87	0	56.05	0	73.11	50,000,000	56	50,000,000	56.05	100.00	114.58	50,000,000	114.58	16.61	
1.02.02.2.02.07.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5888	301,000,000	58.53	50,000,000	5888	301,000,000	5888	50,000,000	2761	0	3443	0	4207	0	5026	50,000,000	15,437	50,000,000	262.18	100.00	15495.53	50,000,000	263.17	16.61	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Persen	42.9	1,274,000,000	0	156,373,114	42.9	1,144,000,000	42.9	378,457,000	0	0	14.71	5,829,800	65.41	82,981,000	71.4	67,562,314	65	156,373,114	152.47	41.32	65.41	156,373,114	152.47	12.27	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	Persen	100	445,000,000	88.75	65,931,000	100	315,000,000	100	164,211,000	0	0	100	0	92	62,931,000	97.1	3,000,000	92	65,931,000	92.00	40.15	180.75	65,931,000	180.75	14.82	
1.02.02.2.02.10.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	136	445,000,000	81.1	65,931,000	136	315,000,000	136	164,211,000	134	0	134	0	138	62,931,000	134	3,000,000	540	65,931,000	397.06	40.15	621.1	65,931,000	456.69	14.82	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	Persen	100	395,000,000	84.13	5,549,000	100	395,000,000	100	14,571,000	64	0	74	0	88	1,403,000	91	4,146,000	88	5,549,000	88.00	38.08	172.13	5,549,000	172.13	1.40	
1.02.02.2.02.09.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1238	395,000,000	72.67	5,549,000	1238	395,000,000	1238	14,571,000	767	0	880	0	1047	1,403,000	1083	4,146,000	3,777	5,549,000	305.09	38.08	3849.67	5,549,000	310.96	1.40	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	Persen	100	434,000,000	31.97	84,893,114	100	434,000,000	100	199,675,000	20	0	24	5,829,800	33	18,647,000	43	60,416,314	33	84,893,114	33.00	42.52	64.97	84,893,114	64.97	19.56	
1.02.02.2.02.08.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18286	434,000,000	76.45	84,893,114	18286	434,000,000	18286	199,675,000	4332	0	5204	5,829,800	7114	18,647,000	9169	60,416,314	25,819	84,893,114	141.20	42.52	25895.45	84,893,114	141.61	19.56	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	Persen	100	425,224,500	100	316,474,490	100	485,224,500	100	592,901,180	0	0	0	0	47.85	1,692,000	86.6	314,782,490	48	316,474,490	47.85	53.38	147.85	316,474,490	147.85	74.43	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	425,224,500	84.22	316,474,490	100	485,224,500	100	592,901,180	0	0	0	0	47.85	1,692,000	76.47	314,782,490	48	316,474,490	47.85	53.38	132.07	316,474,490	132.07	74.43	
1.02.02.2.02.04.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4635	425,224,500	84.22	316,474,490	4635	485,224,500	4635	592,901,180	1175	0	2383	0	3191	1,692,000	5100	314,782,490	11,849	316,474,490	255.64	53.38	11933.22	316,474,490	257.46	74.43	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	64.28	250,000,000	0	385,000	64.28	250,000,000	64.28	30,000,000	100	0	100	385,000	100	0	100	0	400	385,000	622.28	1.28	400	385,000	622.28	0.15	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas	9	250,000,000	0	385,000	9	250,000,000	9	30,000,000	14	0	14	385,000	14	0	14	0	56	385,000	622.22	1.28	56	385,000	622.22	0.15	
1.02.02.2.02.19.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	250,000,000	0	385,000	1	250,000,000	1	30,000,000	1	0	1	385,000	1	0	1	0	4	385,000	400.00	1.28	4	385,000	400.00	0.15	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Persen	88.35	567,000,000	105.5	1,001,904,527	88.35	567,000,000	88.35	1,252,139,000	14	16,200,000	14	144,993,620	90.23	94,332,000	90.23	746,378,907	90	1,001,904,527	102.13	80.02	195.73	1,001,904,527	221.54	176.70	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Rumah Tangga	22262	567,000,000	86.56	1,001,904,527	22262	567,000,000	22262	1,252,139,000	23287	16,200,000	23287	144,993,620	23287	94,332,000	23287	746,378,907	23,287	1,001,904,527	104.60	80.02	23373.56	1,001,904,527	104.99	176.70	
1.02.02.2.02.17.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	567,000,000	100	1,001,904,527	1	567,000,000	1	1,252,139,000	0	16,200,000	0	144,993,620	0	94,332,000	1	746,378,907	1	1,001,904,527	100.00	80.02	101	1,001,904,527	10,100.00	176.70	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	Persen	0.3	430,000,000	100	0	0.3	430,000,000	0.3	229,931,000	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0	1	0	266.67	0.00	100.8	0	33,600.00	0.00	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	430,000,000	84.31	0	100	430,000,000	100	229,931,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100.00	0.00	184.31	0	184.31	0.00	
1.02.02.2.02.12.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1802	430,000,000	95.45	0	1802	430,000,000	1802	229,931,000	353	0	301	0	1588	0	1725	0	3,967	0	220.14	0.00	4062.45	0	225.44	0.00	
1.02.03.		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	Persen	93.3	680,000,000	2.07	701,792,776	93.3	680,000,000	93.3	1,011,141,134	42.85	36,201,391	42.85	101,176,456	57.14	97,309,190	50	467,105,739	57	701,792,776	61.24	69.41	59.21	701,792,776	63.46	103.20	
1.02.03.2.01.		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	Faskes	100	60,000,000	0	32,408,734	100	60,000,000	100	84,717,934	14.28	3,466,185	20.4	15,921,166	32.65	0	67.34	13,021,383	6	32,408,734	6.00	38.25	6	32,408,734	6.00	54.01	
1.02.03.2.01.02.		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	49	60,000,000	41.18	32,408,734	49	60,000,000	49	84,717,934	7	3,466,185	10	15,921,166	16	0	33	13,021,383	66	32,408,734	134.69	38.25	107.18	32,408,734	218.73	54.01	
1.02.03.2.02.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/kota	Persentase SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	250,000,000	0	50,758,638	100	250,000,000	100	143,704,000	77.8	3,776,926	88.8	21,836,140	88.8	12,893,240	88.8	12,252,332	89	50,758,638	88.80	35.32	88.8	50,758,638	88.80	20.30	
1.02.03.2.02.02.		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	783	250,000,000	127.51	50,758,638	783	250,000,000	783	143,704,000	7	3,776,926	11	21,836,140	4	12,893,240	12	12,252,332	34	50,758,638	4.34	35.32	161.51	50,758,638	20.63	20.30	
1.02.03.2.03.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus	Persen	60	370,000,000	618,625,404	60	370,000,000	60	782,719,200	28,958,280	63,419,150	84,415,950	441,832,024	0	618,625,404	0.00	79.04	0	618,625,404	0.00	79.04	0	618,625,404	0.00	167.20		
1.02.03.2.03.01.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	18	370,000,000	247	618,625,404	18	370,000,000	18	782,719,200	1	28,958,280	10	63,419,150	15	84,415,950	72	441,832,024	98	618,625,404	544.44	79.04	345	618,625,404	1,916.67	167.20	
1.02.04.		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	Persen	58.55	847,000,000	105.17	121,534,476	58.55	847,000,000	58.55	283,665,572	0	6,302,034	0	21,227,061	4.9	55,274,815	4.9	38,730,566	80	121,534,476	136.64	42.84	185.17	121,534,476	316.26	14.35	
1.02.04.2.04.		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi	Persen	58.55	350,000,000	0	76,729,040	58.55	350,000,000	58.55	152,042,300	0	0	0	4,159,810	19.6	39,745,715	19.6	32,823,515	53	76,729,040	89.96	50.47	52.67	76,729,040	89.96	21.92	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
		Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																											
1.02.04.2.04.01.		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	350,000,000	0	76,729,040	1	350,000,000	1	152,042,300	0	0	0	4,159,810	1	39,745,715	1	32,823,515	2	76,729,040	200.00	50.47	2	76,729,040	200.00	21.92	
1.02.04.2.06.		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat	IRTP	400	497,000,000	105.71	44,805,436	400	497,000,000	400	131,623,272	140	6,302,034	140	17,067,251	140	15,529,100	140	5,907,051	560	44,805,436	140.00	34.04	665.71	44,805,436	166.43	9.02	
1.02.04.2.06.01.		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	74	497,000,000	105.71	44,805,436	74	497,000,000	74	131,623,272	8	6,302,034	37	17,067,251	46	15,529,100	73	5,907,051	164	44,805,436	221.62	34.04	269.71	44,805,436	364.47	9.02	
1.02.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	30	715,000,000	100.18	435,773,770	30	700,050,000	30	865,890,820	0	39,534,006	0	157,556,664	4.95	41,748,500	29.47	196,934,600	5	435,773,770	17.97	50.33	105.57	435,773,770	351.90	60.95	
1.02.05.2.01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	Persen	60	210,000,000		0	60	200,000,000	60	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.05.2.01.01.		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	210,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.05.2.02.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kecamatan	7	255,000,000	100	249,667,350	7	250,050,000	7	458,744,000	0	33,972,750	14	8,023,500	14	20,958,500	14	186,712,600	3	249,667,350	42.86	54.42	103	249,667,350	1,471.43	97.91	
1.02.05.2.02.01.		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	255,000,000	100	249,667,350	1	250,050,000	1	458,744,000	1	33,972,750	1	8,023,500	1	20,958,500	1	186,712,600	4	249,667,350	400.00	54.42	104	249,667,350	10,400.00	97.91	
1.02.05.2.03.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Aktif	UKBM	70	250,000,000	106.67	186,106,420	70	250,000,000	70	407,146,820	0	5,561,256	0	149,533,164	120	20,790,000	120	10,222,000	121	186,106,420	172.86	45.71	227.67	186,106,420	325.24	74.44	
1.02.05.2.03.01.		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	250,000,000	100	186,106,420	1	250,000,000	1	407,146,820	0	5,561,256	0	149,533,164	1	20,790,000	1	10,222,000	2	186,106,420	200.00	45.71	102	186,106,420	10,200.00	74.44	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pengguna	Nilai	80.2	8,500,000,000	0	24,704,644,990	80.2	0	80.2	27,000,000,000	83.2	3,985,410,443	82.93	6,971,084,418	83.61	6,787,293,990	84.32	6,960,856,139	84	24,704,644,990	104.25	91.50	83.61	24,704,644,990	104.25	290.64	
1.02.01.2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase capaian SPM	Persen	100	8,500,000,000	0	24,704,644,990	100	0	100	27,000,000,000	0	3,985,410,443	90	6,971,084,418	90	6,787,293,990	95	6,960,856,139	275	24,704,644,990	275.00	91.50	275	24,704,644,990	275.00	290.64	
1.02.01.2.10.01.		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	8,500,000,000	1	24,704,644,990	1	0	1	27,000,000,000	1	3,985,410,443	1	6,971,084,418	1	6,787,293,990	1	6,960,856,139	4	24,704,644,990	400.00	91.50	5	24,704,644,990	500.00	290.64	
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	88.64	130,000,000	0	39,769,250	88.64	90,000,000	88.64	264,235,110	73.3	0	73.3	4,169,250	73.3	35,600,000	0	0	73	39,769,250	82.69	15.05	73.3	39,769,250	82.69	30.59	
1.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RBA defenitif	Jumlah	2	130,000,000	0	39,769,250	2	90,000,000	2	264,235,110	1	0	0	4,169,250	1	35,600,000	0	0	1	39,769,250	50.00	15.05	1	39,769,250	50.00	30.59	
1.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	130,000,000	1	39,769,250	2	90,000,000	2	264,235,110	2	0	0	4,169,250	0	35,600,000	0	0	2	39,769,250	100.00	15.05	3	39,769,250	150.00	30.59	
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	18,963,125,200	0	5,413,203,452	80	19,564,550,000	80	6,769,999,282	85	1,256,585,290	85	1,445,079,298	85	1,203,723,255	90	1,507,815,609	85	5,413,203,452	106.25	79.96	85	5,413,203,452	106.25	28.55	
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	1	350,000,000		0	1	350,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	124,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	130	350,000,000		0	130	350,000,000	130	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	124,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	17	770,000,000	0	6,840,695	17	510,000,000	17	116,192,270	35	0	35	5,472,556	38	1,368,139	80	0	38	6,840,695	223.53	5.89	38	6,840,695	223.53	0.89	
1.02.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	74	720,000,000	0	6,840,695	74	460,000,000	74	116,192,270	1	0	2	5,472,556	0	1,368,139	2	0	5	6,840,695	6.76	5.89	5	6,840,695	6.76	0.95	Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak maksimalnya dilkat yang harus dipenuhi oleh pihak RS yang sesuai dengan standar akreditasi
1.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	50,000,000	0		4	50,000,000	4	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	250,000,000	0		95	200,000,000	95	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	430	250,000,000	0		430	200,000,000	430	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	3,925,000,000	0	1,250,739,509	70	4,057,500,000	70	1,495,254,070	75	98,699,204	80	357,542,076	80	376,309,808	80	418,188,421	315	1,250,739,509	450.00	83.65	315	1,250,739,509	450.00	31.87	
1.02.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	800,000,000	0		1	1,000,000,000	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	350,000,000	0		25	210,000,000	25	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	52	850,000,000	0	154,375,000	52	1,350,000,000	52	185,000,000	31	20,010,000	31	0	31	79,220,000	31	55,145,000	124	154,375,000	238.46	83.45	124	154,375,000	238.46	18.16	
1.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	155	950,000,000	0	480,183,000	155	697,500,000	155	561,460,090	13	28,147,000	13	218,179,500	13	85,680,000	13	148,176,500	52	480,183,000	33.55	85.52	52	480,183,000	33.55	50.55	
1.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	250	410,000,000	0	332,626,850	250	305,000,000	250	333,000,000	250	24,798,000	250	91,323,800	250	138,496,300	250	78,008,750	1,000	332,626,850	400.00	99.89	1000	332,626,850	400.00	81.13	
1.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15,000,000	0	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	7	0	7	6,250,000	7	1,250,000	7	7,500,000	28	15,000,000	1,400.00	100.00	28	15,000,000	1,400.00	100.00	
1.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	550,000,000	0	268,554,659	60	480,000,000	60	400,793,980	18	25,744,204	147	41,788,776	74	71,663,508	41	129,358,171	280	268,554,659	466.67	67.01	280	268,554,659	466.67	48.83	
1.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	1,030,000,000	0	395,500,000	65	2,057,050,000	65	887,368,000	70	0	70	0	75	320,000,000	75	75,500,000	74	395,500,000	113.85	44.57	74	395,500,000	113.85	38.40	
1.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	630,000,000	0		7	1,090,000,000	7	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0		5	156,050,000	5	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50,000,000	0	395,500,000	2	582,000,000	2	887,368,000	0	0	1	0	0	320,000,000	8	75,500,000	9	395,500,000	450.00	44.57	9	395,500,000	450.00	791.00	
1.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	50,000,000	0		3	29,000,000	3	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000	0		1	200,000,000	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	11,110,125,200	0	1,464,923,348	75	11,020,000,000	75	1,491,805,942	75	1,057,752,086	75	148,883,466	75	120,690,708	75	137,597,088	300	1,464,923,348	400.00	98.20	300	1,464,923,348	400.00	13.19	
1.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	20,000,000	0	19,800,000	2000	20,000,000	2000	20,000,000	550	4,800,000	450	5,100,000	0	0	1000	9,900,000	2,000	19,800,000	100.00	99.00	2000	19,800,000	100.00	99.00	
1.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1,115,000,000	0	181,034,440	4	1,000,000,000	4	191,884,440	4	104,176,440	1	28,692,250	1	18,466,500	1	29,699,250	7	181,034,440	175.00	94.35	7	181,034,440	175.00	16.24	
1.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	389	9,975,125,200	0	1,264,088,908	389	10,000,000,000	389	1,279,921,502	18	948,775,646	18	115,091,216	18	102,224,208	18	97,997,838	72	1,264,088,908	18.51	98.76	72	1,264,088,908	18.51	12.67	
1.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	900,000,000	0	1,814,853,900	63	800,000,000	63	2,009,629,000	75	72,354,000	75	845,487,000	75	214,834,000	75	682,178,900	75	1,814,853,900	119.05	90.31	75	1,814,853,900	119.05	201.65	
1.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	504,000,000	0	480,346,000	75	520,000,000	75	769,750,000	75	27,780,000	75	87,694,200	75	170,520,600	75	194,351,200	75	480,346,000	100.00	62.40	75	480,346,000	100.00	95.31	
1.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	250,000,000	0	480,346,000	13	320,000,000	13	769,750,000	16	27,780,000	16	87,694,200	16	170,520,600	16	194,351,200	64	480,346,000	492.31	62.40	64	480,346,000	492.31	192.14	
1.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	254,000,000	0		1	200,000,000	1	0	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16		
1.02.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	600,000,000	0	1,814,853,900	25	650,000,000	25	2,009,829,000	25	72,354,000	25	845,487,000	25	214,834,000	25	682,178,900	100	1,814,853,900	400.00	90.31	100	1,814,853,900	400.00	302.48			
1.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26	300,000,000	0		26	150,000,000	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0.14	8,347,170,000	0	21,223,951,232	0.14	11,434,340,000	0.14	21,260,047,731	1.39	2,054,491,671	1.39	52,493,264	1.39	8,533,186,972	1.39	10,583,779,325	0	21,223,951,232	285.71	99.83	0.4	21,223,951,232	285.71	254.27			
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	55	7,624,170,000	0	21,209,828,560	55	10,861,340,000	55	21,227,755,041	62	2,054,491,671	62.59	49,264,000	62.59	8,533,186,972	62.59	10,572,885,917	250	21,209,828,560	454.13	99.92	249.77	21,209,828,560	454.13	278.19			
1.02.02.2.01.01.		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	806,500,000	0		1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.01.08.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	200,000,000	0	2,248,872,290	1	2,600,000,000	1	2,249,050,570	0	0	0	0	0	707,122,972	1	1,541,749,318	1	2,248,872,290	100.00	99.99	1	2,248,872,290	100.00	1,124.44			
1.02.02.2.01.14.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	4,672,670,000	0	18,960,956,270	2	5,741,500,000	2	18,978,704,471	0	2,054,491,671	3	49,264,000	4	7,826,064,000	39	9,031,136,599	1	18,960,956,270	50.00	99.91	1	18,960,956,270	50.00	405.78			
1.02.02.2.01.20.		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	135	700,000,000	0		135	1,159,920,000	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.01.20.		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	25	1,245,000,000	0		25	1,159,920,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.03.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	Dokumen	1	200,000,000	0		1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.03.02.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	200,000,000	0		1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persen	80	523,000,000	0	14,122,672	80	373,000,000	80	32,292,690	90	0	90	3,229,264	90	0	100	10,893,408	90	14,122,672	112.50	43.73	90	14,122,672	112.50	2.70			
1.02.02.2.04.02.		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	1	173,000,000	0		1	173,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.02.2.04.03.		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	1	350,000,000	0	14,122,672	1	200,000,000	1	32,292,690	1	0	1	3,229,264	1	0	1	10,893,408	4	14,122,672	400.00	43.73	4	14,122,672	400.00	4.04			
1.02.03.		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat	Persen	78	570,000,000	0		78	265,000,000	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.03.2.03.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang mengikuti diklat/kursus	Persen	45	570,000,000	0		45	265,000,000	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.02.03.2.03.01.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	10	570,000,000	0		10	265,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																													
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Nilai/Predikat	70.5	3,291,408,400	80.23	3,852,224,852	70.5	3,291,408,400	70.5	4,573,301,056	80	286,844,896	85	999,310,128	85	711,291,051	85.38	1,854,778,777	85	3,852,224,852	120.57	84.23	165.23	3,852,224,852	234.37	117.04			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	1,640,930,400	75.1	1,823,960,824	0.8	1,640,930,400	0.8	1,983,641,488	35.42	51,159,600	34.25	466,965,094	39.43	428,504,563	114.14	877,331,567	39	1,823,960,824	4,928.75	91.95	114.53	1,823,960,824	14,316.25	111.15			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1,640,930,400	0	1,823,960,824	1	1,640,930,400	1	1,983,641,488	0	51,159,600	0	466,965,094	0	428,504,563	1	877,331,567	1	1,823,960,824	100.00	91.95	1	1,823,960,824	100.00	111.15	Realisasi TW IV		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	1,650,478,000	71.7	2,028,264,028	70.0	1,650,478,000	70.0	2,589,659,568	80.31	235,685,296	80.31	532,345,034	80.31	282,786,488	80.31	977,447,210	80	2,028,264,028	114.73	78.32	152.01	2,028,264,028	217.16	122.89			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,650,478,000	0	2,028,264,028	1	1,650,478,000	1	2,589,659,568	0	235,685,296	0	532,345,034	0	282,786,488	1	977,447,210	1	2,028,264,028	100.00	78.32	1	2,028,264,028	100.00	122.89	Realisasi TW IV		
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																													

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,212,134,450	84.14	1,866,778,144	70.5	1,212,134,450	70.5	2,222,945,141	0	245,291,976	96.59	507,724,325	96.59	312,094,943	86.59	801,666,900	97	1,866,778,144	137.01	83.98	180.73	1,866,778,144	256.35	154.01	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	322,650,450	0	351,247,867	0.8	322,650,450	0.8	438,490,322	80.78	17,014,928	68.9	79,303,271	80.99	111,441,419	100.35	143,488,249	81	351,247,867	10,123.75	80.10	80.99	351,247,867	10,123.75	108.86	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	322,650,450	0	351,247,867	1	322,650,450	1	438,490,322	1	17,014,928	1	79,303,271	1	111,441,419	1	143,488,249	4	351,247,867	400.00	80.10	4	351,247,867	400.00	108.86	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	889,484,000	0	1,515,530,277	70.0	889,484,000	70.0	1,784,454,819	83.21	228,277,048	83.21	428,421,054	83.21	200,653,524	83.21	658,178,651	83	1,515,530,277	118.87	84.93	83.21	1,515,530,277	118.87	170.38	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	889,484,000	0	1,515,530,277	1	889,484,000	1	1,784,454,819	1	228,277,048	1	428,421,054	1	200,653,524	1	658,178,651	4	1,515,530,277	400.00	84.93	4	1,515,530,277	400.00	170.38	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,073,378,000	94.13	1,446,877,364	70.5	1,073,378,000	70.5	1,723,385,263	31.31	142,408,072	31.31	482,852,123	31.31	235,829,207	83.86	585,787,962	31	1,446,877,364	44.41	83.96	125.44	1,446,877,364	177.93	134.80	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	317,832,000	57.37	335,563,759	0.8	317,832,000	0.8	365,921,609	40	0	40	89,166,363	40	91,295,114	121.64	155,102,282	40	335,563,759	5,000.00	91.70	97.37	335,563,759	12,171.25	105.58	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	317,832,000	0	335,563,759	1	317,832,000	1	365,921,609	0	0	0	89,166,363	0	91,295,114	1	155,102,282	1	335,563,759	100.00	91.70	1	335,563,759	100.00	105.58	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	755,546,000	81.95	1,111,313,605	70.0	755,546,000	70.0	1,357,463,654	0	142,408,072	0	393,685,760	0	144,534,093	72.99	430,685,680	73	1,111,313,605	104.27	81.87	154.94	1,111,313,605	221.34	147.09	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	755,546,000	0	1,111,313,605	1	755,546,000	1	1,357,463,654	0	142,408,072	0	393,685,760	0	144,534,093	1	430,685,680	1	1,111,313,605	100.00	81.87	1	1,111,313,605	100.00	147.09	Realisasi TW IV
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,073,872,000	83.76	1,378,293,667	70.5	1,113,872,000	70.5	1,595,578,283	83.16	145,034,701	80.39	331,867,783	0	220,359,379	80.88	681,031,804	244	1,378,293,667	346.71	86.38	328.19	1,378,293,667	465.52	128.35	Realisasi TW.IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas ~!	Persen	0.8	250,404,000	86.25	253,024,616	0.8	250,404,000	0.8	295,413,828	187	10,770,153	117	42,529,711	169	47,425,753	154.01	152,298,999	169	253,024,616	21,125.00	85.65	255.25	253,024,616	31,906.25	101.05	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	250,404,000	0	253,024,616	1	250,404,000	1	295,413,828	1	10,770,153	1	42,529,711	1	47,425,753	1	152,298,999	4	253,024,616	400.00	85.65	4	253,024,616	400.00	101.05	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	823,468,000	125.44	1,125,269,051	70.0	863,468,000	70.0	1,300,164,455	86.25	134,264,548	86.25	289,338,072	86.25	172,933,626	86.25	528,732,805	345	1,125,269,051	492.86	86.55	470.44	1,125,269,051	672.06	136.65	Realisasi TW.IV
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	823,468,000	0	1,125,269,051	1	863,468,000	1	1,300,164,455	1	134,264,548	1	289,338,072	1	172,933,626	1	528,732,805	4	1,125,269,051	400.00	86.55	4	1,125,269,051	400.00	136.65	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Nilai/Predikat	70.5	1,184,728,000	85	1,441,274,464	70.5	1,184,728,000	70.5	2,013,223,663	80.99	145,506,902	82.39	409,514,982	79.07	247,885,144	84.51	638,367,436	327	1,441,274,464	463.77	71.59	411.96	1,441,274,464	584.34	121.65	Realisasi TW.IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	493,590,000	108.96	443,124,007	0.8	493,590,000	0.8	501,675,000	100.68	9,382,886	101.29	128,275,314	87.73	97,209,120	106.87	208,256,687	59	443,124,007	7,393.75	88.33	168.11	443,124,007	21,013.75	89.78	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	493,590,000	0	443,124,007	1	493,590,000	1	501,675,000	1	9,382,886	1	128,275,314	1	97,209,120	1	208,256,687	4	443,124,007	400.00	88.33	4	443,124,007	400.00	89.78	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	691,138,000	87.98	998,150,457	70.0	691,138,000	70.0	1,511,548,663	0	136,124,016	0	281,239,668	0	150,676,024	91.92	430,110,749	92	998,150,457	131.31	66.03	179.9	998,150,457	257.00	144.42	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	691,138,000	0	998,150,457	1	691,138,000	1	1,511,548,663	1	136,124,016	1	281,239,668	1	150,676,024	1	430,110,749	4	998,150,457	400.00	66.03	4	998,150,457	400.00	144.42	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,853,297,000	78.59	2,188,974,516	70.5	1,853,297,000	70.5	2,874,197,879	81.25	216,802,086	81.25	638,589,078	81.25	465,483,634	86	868,099,718	81	2,188,974,516	115.25	76.16	159.84	2,188,974,516	226.72	118.11	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
1.02.02.2.02.		MASYARAKAT			0.8	775,970,000	0	616,740,793	0.8	775,970,000	0.8	794,678,298	110	35,733,030	72.62	213,723,118	130.23	169,033,050	121.01	198,251,595	130	616,740,793	16,278.75	77.61	130.23	616,740,793	16,278.75	79.48	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	775,970,000	0	616,740,793	1	775,970,000	1	794,678,298	1	35,733,030	1	213,723,118	1	169,033,050	1	198,251,595	4	616,740,793	400.00	77.61	4	616,740,793	400.00	79.48	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	1,077,327,000	0	1,572,233,723	70.0	1,077,327,000	70.0	2,079,519,581	85.2	181,069,056	85.2	424,865,960	85.2	296,450,584	85.2	669,848,123	85	1,572,233,723	121.71	75.61	85.2	1,572,233,723	121.71	145.94	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,077,327,000	0	1,572,233,723	1	1,077,327,000	1	2,079,519,581	1	181,069,056	1	424,865,960	1	296,450,584	1	669,848,123	4	1,572,233,723	400.00	75.61	4	1,572,233,723	400.00	145.94	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,864,582,000	87.26	1,163,641,910	70.5	1,864,582,000	70.5	1,637,576,757	87.26	62,454,016	87.26	355,881,551	87.26	159,849,202	88.2	585,457,141	87	1,163,641,910	123.77	71.06	174.52	1,163,641,910	247.55	62.41	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	665,760,000	168	398,741,608	0.8	665,760,000	0.8	536,865,260	46.2	0	37.2	158,320,527	54.6	75,728,690	39.5	164,692,391	55	398,741,608	6,825.00	74.27	222.6	398,741,608	27,825.00	59.89	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	665,760,000	0	398,741,608	1	665,760,000	1	536,865,260	0	0	0	158,320,527	0	75,728,690	1	164,692,391	1	398,741,608	100.00	74.27	1	398,741,608	100.00	59.89	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	1,198,822,000	68.21	764,900,302	70.0	1,198,822,000	70.0	1,100,711,497	68.21	62,454,016	68.21	197,561,024	68.21	84,120,512	85.05	420,764,750	85	764,900,302	121.50	69.49	153.26	764,900,302	218.94	63.80	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,198,822,000	0	764,900,302	1	1,198,822,000	1	1,100,711,497	0	62,454,016	0	197,561,024	0	84,120,512	1	420,764,750	1	764,900,302	100.00	69.49	1	764,900,302	100.00	63.80	Realisasi TW IV
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,062,096,000	87	1,558,573,851	70.5	1,062,096,000	70.5	1,821,056,267	86.88	214,371,684	82.55	411,300,316	82.55	251,768,292	82.73	681,133,559	83	1,558,573,851	117.09	85.59	169.55	1,558,573,851	240.50	146.75	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	284,920,000	83.55	254,229,111	0.8	284,920,000	0.8	305,810,000	78.83	19,440,660	69.5	51,694,780	99.16	64,767,780	183.08	118,325,891	99	254,229,111	12,395.00	83.13	182.71	254,229,111	22,838.75	89.23	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	284,920,000	0	254,229,111	1	284,920,000	1	305,810,000	1	19,440,660	1	51,694,780	1	64,767,780	1	118,325,891	4	254,229,111	400.00	83.13	4	254,229,111	400.00	89.23	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	777,176,000	86.02	1,304,344,740	70.0	777,176,000	70.0	1,515,246,267	85.89	194,931,024	85.89	359,605,536	85.89	187,000,512	85.89	562,807,668	344	1,304,344,740	490.80	86.08	429.58	1,304,344,740	613.69	167.83	Realisasi TW.IV
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	777,176,000	0	1,304,344,740	1	777,176,000	1	1,515,246,267	1	194,931,024	1	359,605,536	1	187,000,512	1	562,807,668	4	1,304,344,740	400.00	86.08	4	1,304,344,740	400.00	167.83	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,455,405,000	97.58	1,877,596,943	70.5	1,555,405,000	70.5	2,334,668,316	17.84	215,281,816	16.7	554,243,165	21.74	374,621,389	81.55	733,450,573	22	1,877,596,943	30.84	80.42	119.32	1,877,596,943	169.25	129.01	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	541,464,000	85.3	618,165,691	0.8	541,464,000	0.8	675,424,549	19.61	36,597,000	25.55	227,638,541	22.36	157,054,365	61.06	196,875,785	22	618,165,691	2,795.00	91.52	107.66	618,165,691	13,457.50	114.17	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	541,464,000	0	618,165,691	1	541,464,000	1	675,424,549	1	36,597,000	1	227,638,541	1	157,054,365	1	196,875,785	4	618,165,691	400.00	91.52	4	618,165,691	400.00	114.17	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	913,941,000	83.88	1,259,431,252	70.0	1,013,941,000	70.0	1,659,243,767	83.88	178,684,816	83.88	326,604,624	83.88	217,567,024	83.88	536,574,788	21	1,259,431,252	30.17	75.90	105	1,259,431,252	150.00	137.80	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	913,941,000	0	1,259,431,252	1	1,013,941,000	1	1,659,243,767	1	178,684,816	1	326,604,624	1	217,567,024	1	536,574,788	4	1,259,431,252	400.00	75.90	4	1,259,431,252	400.00	137.80	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,243,273,450	84.29	2,288,138,878	70.5	1,243,273,450	70.5	2,524,770,934	85.13	302,754,692	85.13	618,497,093	85.13	448,678,500	88.5	918,208,593	85	2,288,138,878	120.75	90.63	169.42	2,288,138,878	240.31	184.04	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	322,650,450	92.86	585,882,760	0.8	322,650,450	0.8	708,288,400	54.3	96,326,620	46.36	115,545,985	56.9	155,388,440	89.59	218,621,715	57	585,882,760	7,112.50	82.72	149.76	585,882,760	18,720.00	181.58			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	322,650,450	0	585,882,760	1	322,650,450	1	708,288,400	1	96,326,620	1	115,545,985	1	155,388,440	1	218,621,715	4	585,882,760	400.00	82.72	4	585,882,760	400.00	181.58			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	920,623,000	93.24	1,702,256,118	70.0	920,623,000	70.0	1,816,482,534	35.41	206,428,072	35.41	502,951,108	66.2	293,290,060	66.2	699,586,878	203	1,702,256,118	290.31	93.71	296.46	1,702,256,118	423.51	184.90	Realisasi TW.IV		
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	920,623,000	0	1,702,256,118	1	920,623,000	1	1,816,482,534	1	206,428,072	1	502,951,108	1	293,290,060	1	699,586,878	4	1,702,256,118	400.00	93.71	4	1,702,256,118	400.00	184.90			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																													
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,071,797,000	98.56	1,806,361,306	70.5	1,071,797,000	70.5	2,087,094,143	41.66	188,116,824	83.31	436,500,376	0	399,421,047	83.9	782,323,059	209	1,806,361,306	296.27	86.55	307.43	1,806,361,306	436.07	168.54	Realisasi TW.IV		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	373,460,000	100.96	367,253,715	0.8	373,460,000	0.8	408,685,000	128.07	30,245,760	93.15	87,710,780	83.21	76,421,375	106.13	172,875,800	83	367,253,715	10,401.25	89.86	184.17	367,253,715	23,021.25	98.34			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	373,460,000	0	367,253,715	1	373,460,000	1	408,685,000	0	30,245,760	0	87,710,780	0	76,421,375	1	172,875,800	1	367,253,715	100.00	89.86	1	367,253,715	100.00	98.34			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	698,337,000	0	1,439,107,591	70.0	698,337,000	70.0	1,678,409,143	20.15	157,871,064	23	348,789,596	24.15	322,999,672	0	609,447,259	24	1,439,107,591	34.50	85.74	24.15	1,439,107,591	34.50	206.08			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	698,337,000	0	1,439,107,591	1	698,337,000	1	1,678,409,143	0	157,871,064	0	348,789,596	0	322,999,672	1	609,447,259	1	1,439,107,591	100.00	85.74	1	1,439,107,591	100.00	206.08			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																													
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,181,120,000	87	1,481,699,983	70.5	1,181,120,000	70.5	1,922,750,200	0	159,995,040	81.22	344,248,640	81.22	307,239,344	87.7	670,216,959	81	1,481,699,983	115.21	77.06	168.22	1,481,699,983	238.61	125.45			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	362,630,000	83.45	264,341,563	0.8	362,630,000	0.8	310,876,000	0	0	80.72	67,606,080	80.72	43,756,320	126.73	152,979,163	81	264,341,563	10,090.00	85.03	164.17	264,341,563	20,521.25	72.90			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	362,630,000	0	264,341,563	1	362,630,000	1	310,876,000	1	0	1	67,606,080	1	43,756,320	1	152,979,163	4	264,341,563	400.00	85.03	4	264,341,563	400.00	72.90			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	818,490,000	75.65	1,217,358,420	70.0	818,490,000	70.0	1,611,874,200	84.28	159,995,040	75.25	276,642,560	75.25	263,483,024	75.25	517,237,796	310	1,217,358,420	442.90	75.52	385.68	1,217,358,420	550.97	148.73	Realisasi TW.IV		
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	818,490,000	0	1,217,358,420	1	818,490,000	1	1,611,874,200	1	159,995,040	1	276,642,560	1	263,483,024	1	517,237,796	4	1,217,358,420	400.00	75.52	4	1,217,358,420	400.00	148.73			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																													
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,134,230,500	88.54	1,312,421,448	70.5	1,134,230,500	70.5	1,641,782,313	0	160,269,475	66.67	292,987,045	87.33	209,997,631	90	649,167,297	87	1,312,421,448	123.87	79.94	175.87	1,312,421,448	249.46	115.71			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	216,967,500	62.03	256,893,764	0.8	216,967,500	0.8	299,263,386	61.42	13,981,443	25.48	48,249,997	54.23	65,985,131	62.77	128,677,193	54	256,893,764	6,778.75	85.84	116.26	256,893,764	14,532.50	118.40			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	216,967,500	0	256,893,764	1	216,967,500	1	299,263,386	1	13,981,443	1	48,249,997	1	65,985,131	1	128,677,193	4	256,893,764	400.00	85.84	4	256,893,764	400.00	118.40			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	917,263,000	69.76	1,055,527,684	70.0	917,263,000	70.0	1,342,518,927	82	146,288,032	82	244,737,048	82	144,012,500	82	520,490,104	328	1,055,527,684	468.57	78.62	397.76	1,055,527,684	568.23	115.07	Realisasi TW.IV		
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	917,263,000	0	1,055,527,684	1	917,263,000	1	1,342,518,927	1	146,288,032	1	244,737,048	0	144,012,500	1	520,490,104	3	1,055,527,684	300.00	78.62	3	1,055,527,684	300.00	115.07			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																													
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	445,880,000	96.4	1,034,737,811	70.5	445,880,000	70.5	1,384,836,927	70.59	129,760,040	70.59	270,972,782	70.59	175,583,007	81.05	458,421,982	71	1,034,737,811	100.13	74.72	166.99	1,034,737,811	236.87	232.07			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	245,880,000	109.58	108,133,664	0.8	245,880,000	0.8	128,826,582	0.4	0	0.4	14,571,722	0.4	20,211,471	0.4	73,350,471	0	108,133,664	50.00	83.94	109.98	108,133,664	13,747.50	43.98			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Kabupaten/kota																											
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	245,880,000	0	108,133,664	1	245,880,000	1	128,826,582	0	0	0	14,571,722	0	20,211,471	1	73,350,471	1	108,133,664	100.00	83.94	1	108,133,664	100.00	43.98	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	200,000,000	71.91	926,604,147	70.0	200,000,000	70.0	1,256,010,345	1	129,760,040	1	256,401,060	1	155,371,536	64.29	385,071,511	1	926,604,147	1.43	73.77	72.91	926,604,147	104.16	463.30	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	200,000,000	0	926,604,147	1	200,000,000	1	1,256,010,345	1	129,760,040	1	256,401,060	1	155,371,536	1	385,071,511	4	926,604,147	400.00	73.77	4	926,604,147	400.00	463.30	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	Persen	45	600,000,000	0	45	600,000,000	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi	Persen	87	600,000,000	0	87	600,000,000	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	600,000,000	0	1	600,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.03.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG																											
1.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	77.20	300,000,000	0	72,668,948	77.20	690,000,000	77.20	75,366,800	77.2	1,099,548	77.2	1,649,322	70.45	29,170,650	70.45	10,796,296	70	42,715,816	91.26	56.68	70.45	72,668,948	91.26	24.22	
1.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	300,000,000	100	72,668,948	100	690,000,000	100	75,366,800	32.43	1,099,548	37.83	1,649,322	59.45	29,170,650	100	10,796,296	100	42,715,816	100.00	56.68	200	72,668,948	200.00	24.22	
1.03.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	120,000,000	2	72,668,948	2	560,000,000	2	75,366,800	0	1,099,548	0	1,649,322	1	29,170,650	2	10,796,296	3	42,715,816	150.00	56.68	5	72,668,948	250.00	60.56	
1.03.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	180,000,000	0	0	2	130,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,086,206,117	80	17,230,582,094	85	9,706,000,000	85	9,344,542,835	100	1,977,147,477	100	2,533,425,098	100	1,589,781,738	100	2,677,443,244	100	8,777,797,557	117.65	93.94	180	17,230,582,094	211.76	213.09	
1.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,720,206,117	1	14,557,845,912	1	6,750,000,000	1	7,922,546,277	1	1,705,554,908	1	2,213,743,093	1	1,305,398,116	1	2,252,119,206	1	7,476,815,323	100.00	94.37	2	14,557,845,912	200.00	391.32	
1.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	3,720,206,117	60	14,557,845,912	70	6,750,000,000	70	7,922,546,277	60	1,705,554,908	60	2,213,743,093	61	1,305,398,116	64	2,252,119,206	245	7,476,815,323	350.00	94.37	305	14,557,845,912	435.71	391.32	
1.03.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	225,000,000	0	5,472,000	90	265,000,000	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	5,472,000	0.00	2.43	
1.03.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	120,000,000	0	0	1	160,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	45,000,000	0	0	3	45,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60,000,000	0	5,472,000	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	5,472,000	0.00	9.12	
1.03.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	1,255,000,000	73	547,836,862	55	645,000,000	55	239,897,790	25	54,981,854	50	46,198,477	75	34,015,934	100	44,840,218	100	180,036,483	181.82	75.05	173	547,836,862	314.55	43.65	
1.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	400,000,000	16	114,723,110	2	60,000,000	2	40,480,000	3	7,890,610	2	2,834,000	2	9,637,400	4	19,024,500	11	39,386,510	550.00	97.30	27	114,723,110	1,350.00	28.68	
1.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	120,000,000	1	17,873,200	10	50,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	17,873,200	10.00	14.89	
1.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	19,994,000	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	19,994,000	100.00	33.32	
1.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	75,000,000	5	29,915,550	1	75,000,000	1	17,500,000	2	2,804,450	1	5,647,000	1	2,150,000	3	4,945,200	7	15,546,650	700.00	88.84	12	29,915,550	1,200.00	39.89	
1.03.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	20,000,000	13	3,150,000	48	20,000,000	48	2,500,000	0	0	5	1,000,000	2	400,000	3	450,000	10	1,850,000	20.83	74.00	23	3,150,000	47.92	15.75	
1.03.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	3	21,511,000	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	21,511,000	300.00	43.02	
1.03.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	500,000,000	45	339,928,002	38	300,000,000	38	179,417,790	15	44,286,794	11	36,717,477	3	21,828,534	7	20,420,518	36	123,253,323	94.74	68.70	81	339,928,002	213.16	67.99	
1.03.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	30,000,000	12	742,000	60	30,000,000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	742,000	20.00	2.47	
1.03.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	35	1,150,000,000	0	79,700,000	35	830,000,000	35	80,000,000	0	0	0	0	0	0	60	79,700,000	50	79,700,000	142.86	99.63	50	79,700,000	142.86	6.93	belum dilaksanakan
1.03.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	550,000,000	0	0	1	400,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	79,700,000	5	45,000,000	5	80,000,000	0	0	0	0	0	0	3	79,700,000	3	79,700,000	60.00	99.63	3	79,700,000	60.00	159.40	belum dilaksanakan
1.03.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	145,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau	Unit	1	200,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan																										
1.03.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	74	1,231,000,000	70	1,892,024,543	74	731,000,000	74	995,649,688	25	194,880,918	50	254,372,918	75	227,241,878	100	282,113,140	100	958,608,854	135.14	96.28	170	1,892,024,543	229.73	153.70	
1.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	46	39,721,750	12	6,000,000	12	37,014,000	3	8,942,250	3	9,806,250	3	8,006,250	1	10,147,000	10	36,901,750	83.33	99.70	56	39,721,750	466.67	662.03	
1.03.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	125,000,000	12	24,227,500	2	125,000,000	2	16,972,000	3	4,514,500	3	1,359,500	3	1,656,000	2	2,931,000	11	10,461,000	550.00	61.64	23	24,227,500	1,150.00	19.38	
1.03.01.2.08.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	200,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	900,000,000	28	1,828,075,293	30	500,000,000	30	941,663,688	3	181,424,168	3	243,207,168	3	217,579,628	3	269,035,140	12	911,246,104	40.00	96.77	40	1,828,075,293	133.33	203.12	
1.03.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	69	505,000,000	65	147,702,777	69	485,000,000	69	106,449,080	0	21,729,797	65	19,110,610	100	23,125,810	100	18,670,680	100	82,636,897	144.93	77.63	165	147,702,777	239.13	29.25	
1.03.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	200,000,000	4	147,702,777	13	200,000,000	13	106,449,080	8	21,729,797	8	19,110,610	8	23,125,810	13	18,670,680	37	82,636,897	284.62	77.63	41	147,702,777	315.38	73.85	
1.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200,000,000	0	0	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	55,000,000	0	0	1	55,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	Liter/Detik	185.41	3,366,000,000	179.76	126,077,107	185.41	6,074,175,304	185.41	173,798,990	185.41	7,299,378	185.41	9,841,942	185.41	7,425,942	185.41	20,936,220	185	45,503,482	100.00	26.18	365.17	126,077,107	196.95	3.75	
1.03.02.2.01.		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Tampungan Air Baku	Persen	96.945	3,266,000,000	64.16	0	96.945	5,724,175,304	96.945	0	91.304	0	91.304	0	91.304	0	91.304	0	91	0	94.18	0.00	155.464	0	160.36	0.00	
1.03.02.2.01.115.		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1	500,000,000	0	1	650,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.117.		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0.05	450,000,000	0	0.05	174,175,304	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.120.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	3	350,000,000	0	3	2,450,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.121.		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1.00	1,716,000,000	0	1.00	1,300,000,000	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.128.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	250,000,000	0	1	1,150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.02.		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	47.83	100,000,000	47.83	126,077,107	47.83	350,000,000	47.83	173,798,990	47.83	7,299,378	47.83	9,841,942	47.83	7,425,942	47.83	20,936,220	48	45,503,482	100.00	26.18	95.66	126,077,107	200.00	126.08	
1.03.02.2.02.21.		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0.5	100,000,000	0	126,077,107	0.5	350,000,000	0.5	173,798,990	0	7,299,378	0	9,841,942	0	7,425,942	0	20,936,220	0	45,503,482	0.00	26.18	0	126,077,107	0.00	126.08	Rincian Kegiatan berupa survei evaksi di daerah irigasi payak dan batubi, ada aplikasi dari pusat dan merupakan syarat pengajuan usulan melalui APBN, pekerjaan rutin
1.03.03.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Persen	1.5	3,174,499,000	79.43	0	1.5	12,755,248,875	1.5	0	79.43	0	79.43	0	79.43	0	80.19	0	79	0	5,295.33	0.00	158.86	0	10,590.67	0.00	
1.03.03.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	Rumah Tangga	160	3,174,499,000	16.183	0	160	12,755,248,875	160	0	100	0	100	0	100	0	760	0	100	0	62.50	0.00	116.183	0	72.61	0.00	Target Kinerja di TW. 4

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
1.03.03.2.01.22.		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Dibangun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	160	350,000,000	0	160	1,948,449,475	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.24.		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	1	30,000,000	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.25.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	194,499,000	0	2	300,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.26.		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	3	150,000,000	0	3	5,103,399,700	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.26.		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	3	250,000,000	0	3	5,103,399,700	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.28.		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	5	2,200,000,000	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Persen	35.90	785,000,000	35	0	35.90	800,000,000	35.90	0	35.5	0	35.5	0	35.5	0	35.5	0	36	0	98.89	0.00	70.5	0	196.38	0.00	
1.03.04.2.01.		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Penangan Sampah	Kecamatan	5	785,000,000	4	0	5	800,000,000	5	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	100.00	0.00	9	0	180.00	0.00	
1.03.04.2.01.10.		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	590	685,000,000	0	590	700,000,000	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.04.2.01.17.		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	2	100,000,000	0	2	100,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.05.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	Persen	79.17	2,400,000,000	78.81	0	79.17	5,070,000,000	79.17	0	78.99	0	78.99	0	78.99	0	79.17	0	79	0	99.77	0.00	157.8	0	199.32	0.00	
1.03.05.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat	Rumah Tangga	200	200,000,000	0	0	200	270,000,000	200	0	200	0	200	0	213	0	213	0	200	0	100.00	0.00	200	0	100.00	0.00	
1.03.05.2.01.36.		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MA3/Hari	20	200,000,000	0	20	270,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.05.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Rumah Tangga	200	2,200,000,000	800	0	200	4,800,000,000	200	0	200	0	200	0	200	0	213	0	200	0	100.00	0.00	1000	0	500.00	0.00	
1.03.05.2.01.37.		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	1	300,000,000	0	1	300,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.05.2.01.39.		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	200	1,700,000,000	0	200	4,350,000,000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.05.2.01.41.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	200,000,000	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	48.87	3,528,400,776	45.88	12,051,418,638	48.87	34,130,208,129	48.87	10,790,824,290	45.88	4,242,918,040	45.88	40,606,550	48	405,868,300	50.77	5,769,542,750	48	10,458,935,640	98.22	96.92	93.88	12,051,418,638	192.10	341.55	
1.03.06.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik	KM	62.86	3,528,400,776	62.86	12,051,418,638	62.86	34,130,208,129	62.86	10,790,824,290	59.19	4,242,918,040	60.5	40,606,550	61	405,868,300	68.86	5,769,542,750	61	10,458,935,640	97.04	96.92	123.86	12,051,418,638	197.04	341.55	
1.03.06.2.01.12.		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	268	268,000,000	3924.8	12,051,418,638	268	16,634,271,983	268	10,790,824,290	0	4,242,918,040	0	40,606,550	2159.2	405,868,300	3103	5,769,542,750	5,262	10,458,935,640	1,963.51	96.92	9187	12,051,418,638	3,427.99	4,496.80	
1.03.06.2.01.23.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	1,000,731,000	0	2	200,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.06.2.01.28.		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	500	300,000,000	0	500	998,996,254	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.06.2.01.29.		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	500	500,000,000	0	500	15,946,939,892	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.06.2.01.31.		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	5000	1,459,669,776	0	5000	350,000,000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.07.		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	Persen	100	1,000,000,000	0	0	100	1,000,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.07.2.01.		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang dibangun	Kawasan	5	1,000,000,000	0	0	5	1,000,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
1.03.07.2.01.26.		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	MA3/Hari	5	1,000,000,000	0	5	1,000,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.08.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	Persen	87.10	13,100,000,000	86.03	0	87.10	18,206,487,652	87.10	0	84.68	0	84.68	0	85.5	0	87.1	0	86	0	98.16	0.00	171.53	0	196.93	0.00	
1.03.08.2.01.		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting	Izin	4	13,100,000,000	0	0	4	18,206,487,652	4	0	0	0	4	0	2	0	5	0	13	0	325.00	0.00	13	0	325.00	0.00	
1.03.08.2.01.21.		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	12,500,000,000	0	5	17,606,487,652	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.08.2.01.22.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	1	300,000,000	0	1	300,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.08.2.01.23.		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	4	300,000,000	0	4	300,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.09.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Persen	87.66	1,599,171,286	0	0	87.66	39,161,138,221	87.66	0	85.5	0	85.5	0	85.5	0	85.32	0	86	0	97.54	0.00	85.5	0	97.54	0.00	
1.03.09.2.01.		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun	Persen	71.20	1,599,171,286	0	0	71.20	39,161,138,221	71.20	0	71.14	0	71.14	0	71.14	0	71.2	0	71	0	99.92	0.00	71.14	0	99.92	0.00	
1.03.09.2.01.08.		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	4	1,599,171,286	0	4	39,161,138,221	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Persen	44.05	75,166,019,835	43.41	0	44.05	153,748,278,795	44.05	0	0	0	0	0	43.62	0	45.68	0	44	0	99.02	0.00	87.03	0	197.57	0.00	
1.03.10.2.01.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Ha	204.44	6,400,000,000	0	0	204.44	53,720,275,721	204.44	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.32.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	10.000	5,000,000,000	0	10.000	52,120,275,721	10.000	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.43.		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1	1,200,000,000	0	1	400,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.46.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0.2	200,000,000	0	0.2	1,200,000,000	0.2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	KM	204.44	68,766,019,835	201.44	0	204.44	100,028,003,074	204.44	0	201.44	0	201.44	0	202.44	0	211.97	0	202	0	99.02	0.00	403.88	0	197.55	0.00	
1.03.10.2.01.29.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1	1,000,000,000	0	1	1,000,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.31.		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	20	4,000,000,000	0	20	11,032,793,326	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.32.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2.00	20,000,000,000	0	2.00	52,120,275,721	2.00	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.33.		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	2.50	33,516,019,835	0	2.50	20,406,517,224	2.50	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.34.		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0.50	1,000,000,000	0	0.50	5,526,955,850	0.50	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.38.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	100	250,000,000	0	100	1,247,456,980	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.44.		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	2	6,000,000,000	0	2	7,494,003,973	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.10.2.01.46.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	6	3,000,000,000	0	6	1,200,000,000	6	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	Persen	85.00	500,000,000	0	0	85.00	645,000,000	85.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.01.		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat Terampil	Orang	360	260,000,000	0	0	360	260,000,000	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.01.10.		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	300	150,000,000	0	300	150,000,000	300	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.01.12.		Penyediaan Instruktur/ Asesor/ Penyelenggar a Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Instruktur/ Asesor / Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Orang	2	50,000,000	0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
													I		II		III		IV											
													1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k		Rp
		Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan																											
1.03.11.2.01.16.		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	60	60,000,000		0	60	60,000,000	60	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.02.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Daerah	Set	1	210,000,000	0	0	1	355,000,000	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.02.12.		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	2	50,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.02.13.		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	10,000,000		0	1	145,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.02.13.		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	135,000,000		0	1	145,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.02.14.		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	15,000,000		0	3	15,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.04.		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis	Kali	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.04.06.		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	30	30,000,000		0	30	30,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Persen	2.00	1,800,000,000	0	728,354,866	2.00	1,800,000,000	2.00	0	2		0	2		0	2		0	2		0	2		0	2	Penetapan RDTR PKSN Ranai dan RDTR KPN serasan	
1.03.12.2.01.		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang ditetapkan	Dokumen	2	280,128,210	0	0	2	280,128,210	2	0	2		0	2		0	2		0	2		0	2		0	2	Target Kinerja di TW. 4	
1.03.12.2.01.03.		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	97,435,897	0	0	1	97,435,897	1	0	0		0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.01.06.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	109,615,390		0	2	109,615,390	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.01.12.		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	1	73,076,923		0	1	73,076,923	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia	Dokumen	2	831,410,256	2	728,354,866	2	831,410,256	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	728,354,866	100.00	87.60		
1.03.12.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	831,410,256	2	728,354,866	1	831,410,256	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	728,354,866	200.00	87.60		
1.03.12.2.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang disusun	Dokumen	2	60,897,435	2	0	2	60,897,435	2	0	0		0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	2	0	100.00	0.00		
1.03.12.2.02.03.		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	1	60,897,435		0	1	60,897,435	1	0	0		0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Dokumen	20	133,974,358	22	0	20	133,974,358	20	0	2		0	6		0	3		0	11		0	11		0	165.00	0.00	
1.03.12.2.03.03.		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	20	133,974,358		0	20	133,974,358	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	Izin	20	298,717,948	1	0	20	298,717,948	20	0	2		0	6		0	3		0	1		0	11		0	60.00	0.00	
1.03.12.2.03.06.		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	298,717,948		0	1	298,717,948	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.04.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Dokumen	5	194,871,793	3	0	5	194,871,793	5	0	0		0	0		0	7		0	7		0	7		0	200.00	0.00	
1.03.12.2.04.03.		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	1	24,358,974	0	0	1	24,358,974	1	0	0		0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.04.04.		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1.00	12,179,487	0	0	1.00	12,179,487	1.00	0	0		0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.03.12.2.04.07.		Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	5	121,794,871	0	5	121,794,871	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.12.2.04.15.		Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara	1	36,538,461	0	1	36,538,461	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.04.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																											
1.04.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	75.60	90,600,000	75.6	109,520,879	75.60	181,200,000	75.60	46,940,258	70.55	3,820,094	70.55	7,396,471	70.55	7,704,314	70.55	0	71	18,920,879	93.32	40.31	146.15	109,520,879	193.32	120.88	
1.04.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	90,600,000	77	109,520,879	77	181,200,000	77	46,940,258	64.7	3,820,094	88.23	7,396,471	94.11	7,704,314	98	0	94	18,920,879	122.22	40.31	171.11	109,520,879	222.22	120.88	
1.04.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	90,600,000	3	109,520,879	3	181,200,000	3	46,940,258	3	3,820,094	0	7,396,471	0	7,704,314	0	0	3	18,920,879	100.00	40.31	6	109,520,879	200.00	120.88	
1.04.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,960,836,900	85	7,645,103,146	85	6,973,586,900	85	6,306,907,968	100	1,295,365,883	100	1,505,820,971	100	1,044,062,953	100	1,511,015,752	100	5,356,265,559	117.65	84.93	185	7,645,103,146	217.65	109.83	
1.04.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,837,586,900	1	2,939,069,052	1	3,837,586,900	1	3,153,631,386	1	713,690,860	1	861,958,241	1	532,864,505	1	826,717,859	1	2,935,231,465	100.00	93.07	2	2,939,069,052	200.00	76.59	
1.04.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	3,837,586,900	23	2,939,069,052	23	3,837,586,900	23	3,153,631,386	22	713,690,860	22	861,958,241	22	532,864,505	26	826,717,859	22	2,935,231,465	95.65	93.07	45	2,939,069,052	195.65	76.59	
1.04.01.2.05.		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawalan perangkat daerah	Persen	95	333,250,000	0	0	95	300,000,000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	100,000,000	0	0	5	100,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	133,250,000	0	0	10	100,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	810,000,000	75	1,116,060,088	75	595,000,000	75	511,050,760	25	187,822,992	50	109,693,500	75	33,998,796	75	39,544,800	75	371,060,088	100.00	72.61	150	1,116,060,088	200.00	137.79	
1.04.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	250,000,000	5	264,992,000	5	100,000,000	5	15,000,000	3	6,120,000	4	8,872,000	0	0	0	0	7	14,992,000	140.00	99.95	12	264,992,000	240.00	106.00	
1.04.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	1	53,000,000	1	40,000,000	1	27,500,000	2	5,900,000	4	5,900,000	0	1,200,000	0	0	6	13,000,000	600.00	47.27	7	53,000,000	700.00	132.50	
1.04.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	15,000,000	1	22,000,000	1	15,000,000	1	7,000,000	5	3,000,000	5	3,000,000	1	1,000,000	0	11	7,000,000	1,100.00	100.00	12	22,000,000	1,200.00	146.67		
1.04.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	45,000,000	0	0	1	45,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66	440,000,000	66	776,068,088	66	375,000,000	66	461,550,760	67	172,802,992	28	91,921,500	7	31,798,796	20	39,544,800	122	336,068,088	184.85	72.81	188	776,068,088	284.85	176.38	
1.04.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	70	395,000,000	70	295,730,000	70	696,000,000	70	676,417,715	0	0	10	25,650,000	20	0	100	170,080,000	80	195,730,000	114.29	28.94	150	295,730,000	214.29	74.87	
1.04.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	45,000,000	0	0	1	45,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50,000,000	0	0	3	105,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	5	295,730,000	5	446,000,000	5	676,417,715	0	0	7	25,650,000	8	0	87	170,080,000	102	195,730,000	2,040.00	28.94	107	295,730,000	2,140.00	295.73	
1.04.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	20,000,000	0	0	70	30,000,000	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	85	1,420,000,000	85	3,190,733,371	85	1,420,000,000	85	1,878,421,251	25	369,889,764	50	488,756,719	75	474,964,578	100	437,122,310	75	1,770,733,371	88.24	94.27	160	3,190,733,371	188.24	224.70	
1.04.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	5	25,000,000	5	36,800,000	5	25,000,000	5	11,840,000	2	4,800,000	3	5,800,000	1	1,200,000	1	0	7	11,800,000	140.00	99.66	12	36,800,000	240.00	147.20	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan							
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100									
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp					
1	2	3	4	4A																								16								
			Menyurat																																	
1.04.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	600,000,000	2	1,457,886,847	2	600,000,000	2	944,931,755	9	150,962,000	9	243,246,955	10	258,884,314	10	204,793,578	38	857,886,847	1,900.00	90.79	40	1,457,886,847	2,000.00	242.98								
1.04.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	795,000,000	25	1,696,046,524	25	795,000,000	25	921,649,496	36	214,127,764	36	239,709,764	36	214,880,264	36	232,328,732	144	901,046,524	576.00	97.76	169	1,696,046,524	676.00	213.34								
1.04.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	135,000,000	80	103,510,635	80	85,000,000	80	87,386,856	100	23,962,267	100	19,762,511	100	2,235,074	100	37,550,783	100	83,510,635	125.00	95.56	180	103,510,635	225.00	76.67								
1.04.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	20,000,000	8	103,510,635	8	20,000,000	8	87,386,856	8	23,962,267	8	19,762,511	8	2,235,074	8	37,550,783	32	83,510,635	400.00	95.56	40	103,510,635	500.00	517.55								
1.04.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1		0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00							
1.04.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	15,000,000		0	10	15,000,000	10		0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00							
1.04.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Persen	80	10,000,000		0	80	10,000,000	80		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000		0	5	10,000,000	5		0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00							
1.04.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	Persen	2	30,000,000		0	2	50,000,000	2		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.2.07.		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah sertifikat	Lembar	2	30,000,000		0	2	50,000,000	2		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.2.07.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan	2	30,000,000		0	2	50,000,000	2		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	83	980,000,000	83		0	83	1,030,000,000	83		0	0		0	90.5		0	90.5		0	0	109.04	0.00	173.5		0	209.04	0.00					
1.04.02.2.01.		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah laporan	Dokumen	1	150,000,000		0	1	150,000,000	1		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.2.01.08.		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	150,000,000		0	1	150,000,000	1		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.2.03.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	Unit	6	770,000,000	6		0	6	550,000,000	6		0	0		0	0		0	0		0	0.00	0.00	6		0	100.00	0.00	Tidak direalisasikan					
1.04.02.2.03.04.		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	2	390,000,000	0		0	2	250,000,000	2		0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.2.03.12.		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2	380,000,000		0	2	300,000,000	2		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.2.03.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Unit	6	60,000,000		0	6	330,000,000	6		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.02.2.03.01.		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	2	60,000,000		0	2	330,000,000	2		0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00							
1.04.03.		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persen	19.76	1,850,000,000	19.76		0	19.76	23,448,210,353	19.76		0	0		0	0	6.79		0	7	0	34.36	0.00	26.55		0	134.36	0.00						
1.04.03.2.02.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	luas areal kawasan kumuh	Dokumen	1	100,000,000	1		0	1	290,000,000	1		0	0		0	11		0	11		0	6	0	11		0	1,200.00	0.00	12	0	1,200.00	0.00		
1.04.03.2.02.14.		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	100,000,000		0	1	290,000,000	1		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.03.2.03.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	30	1,750,000,000	30		0	30	23,158,210,353	30		0	0		0	17		0	37.25		0	30.54		0	37		0	124.17	0.00	67.25	0	224.17	0.00	
1.04.03.2.03.02.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	30	750,000,000		0	30	800,000,000	30		0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00							
1.04.03.2.03.13.		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	1	1,000,000,000		0	1	22,358,210,353	1		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.04.		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase areal kawasan kumuh	Persen	40	100,000,000		0	40	100,000,000	40		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						
1.04.04.2.01.		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh	Unit	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5		0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00						

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
1.04.04.2.01.04.		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.04.		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0.153846	1,374,842,630		0	0.153846	1,400,000,000	0.153846	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.04.2.01.		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	40	1,374,842,630		0	40	1,400,000,000	40	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.04.2.01.01.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	30	1,374,842,630		0	30	1,400,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.05.		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	Persen	30	100,000,000		0	30	325,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.05.2.01.		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	Ha	1	100,000,000		0	1	325,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.05.2.01.01.		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	100,000,000		0	1	325,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.05.		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Persen	56	10,753,132,000	56	28,132,658,537	56	50,179,892,992	56	32,242,357,333	0	702,847,098	60	1,307,113,188	60	11,666,506,366	70	14,445,438,753	60	28,121,905,405	107.14	87.22	116	28,132,658,537	207.14	261.62	
1.04.05.2.01.		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	Unit	230	10,753,132,000	230	28,132,658,537	230	50,179,892,992	230	32,242,357,333	0	702,847,098	0	1,307,113,188	89	11,666,506,366	97	14,445,438,753	89	28,121,905,405	38.70	87.22	319	28,132,658,537	138.70	261.62	
1.04.05.2.01.02.		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	5	10,753,132,000	5	28,132,658,537	5	50,179,892,992	5	32,242,357,333	0	702,847,098	4	1,307,113,188	4	11,666,506,366	4	14,445,438,753	12	28,121,905,405	240.00	87.22	17	28,132,658,537	340.00	261.62	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.10.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																											
2.10.04.		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	20	150,000,000		0	20	50,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.04.2.01.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	Persen	20	150,000,000		0	20	50,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.04.2.01.01.		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150,000,000		0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.04.		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Persen	85	100,000,000		0	85	50,000,000	85	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.04.2.01.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	Kasus	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.04.2.01.02.		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	4	100,000,000		0	4	50,000,000	4	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.05.		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	30	150,000,000		0	30	150,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.05.2.01.		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	luas tanah yang dibebaskan	Ha	2	150,000,000		0	2	150,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.05.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150,000,000		0	1	150,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.05.		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persen	70	100,000,000		0	70	100,000,000	70	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.05.2.01.		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian tanah yang diselesaikan	Persen	50	100,000,000		0	50	100,000,000	50	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.05.2.01.01.		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.10.06.		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	20	100,000,000		0	20	50,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.06.2.01.		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	M2	100	100,000,000		0	100	50,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.06.2.01.01.		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.08.		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Persen	9.96	200,000,000		0	9.96	50,000,000	9.96	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.08.2.02.		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	jumlah laporan	Dokumen	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.08.2.02.02.		Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.09.		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	Persen	20	100,000,000		0	20	200,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.09.2.01.		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	1	100,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.09.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.10.		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	Persen	30	726,868,000	30	1,052,931,620	30	2,300,000,000	30	459,595,600	70	47,003,200	50	130,105,920	12	91,865,000	0.48	57,089,500	12	326,063,620	40.00	70.95	42	1,052,931,620	140.00	144.86	
2.10.10.2.01.		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan bersertifikat	Dokumen	1	726,868,000	1	1,052,931,620	1	2,300,000,000	1	459,595,600	0	47,003,200	1	130,105,920	1	91,865,000	1	57,089,500	1	326,063,620	100.00	70.95	2	1,052,931,620	200.00	144.86	
2.10.10.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000	1	146,267,820	1	500,000,000	1	161,500,000	0	9,456,000	0	17,911,820	2	11,460,000	1	7,440,000	3	46,267,820	300.00	28.65	4	146,267,820	400.00	146.27	Kegiatan Koordinasi Pemetaan Penggunaan Tanah dalam satu wilayah Kelurahan/Desa
2.10.10.2.01.02.		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	1	626,868,000	1	906,663,800	1	1,800,000,000	1	298,095,600	0	37,547,200	0	112,194,100	0	80,405,000	1	49,649,500	1	279,795,800	100.00	93.86	2	906,663,800	200.00	144.63	kinerja TW IV

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.05.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	76.50	143,000,000	66.05	17,326,696	76.50	143,000,000	76.50	74,214,525	66.05	1,348,242	66.05	3,747,363	66.05	5,493,110	66.05	6,737,981	66	17,326,696	86.34	23.35	132.1	17,326,696	172.68	12.12	nilai tersebut didapat dari evaluasi AKIP inspektorat
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	143,000,000	70	17,326,696	70	143,000,000	70	74,214,525	52.38	1,348,242	61.9	3,747,363	95.23	5,493,110	66.05	6,737,981	95	17,326,696	136.04	23.35	165.23	17,326,696	236.04	12.12	nilai tersebut didapat dari evaluasi AKIP inspektorat
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Realisasi Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	138,000,000	2	17,326,696	2	138,000,000	2	74,214,525	2	1,348,242	2	3,747,363	2	5,493,110	2	6,737,981	8	17,326,696	400.00	23.35	10	17,326,696	500.00	12.56	tercapai
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	16,351,785,031	76.5	15,623,753,072	85	16,351,785,031	85	16,400,617,064	100	3,616,558,258	100	4,541,115,374	100	3,055,780,700	100	4,410,298,740	100	15,623,753,072	117.65	95.26	176.5	15,623,753,072	207.65	95.55	tercapai
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	7,182,300,031	1	9,910,693,812	1	7,182,300,031	1	10,524,387,804	1	2,347,239,220	1	2,994,003,176	1	1,752,329,237	1	2,817,122,179	1	9,910,693,812	100.00	94.17	2	9,910,693,812	200.00	137.99	tepat waktu
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	91	7,182,300,031	91	9,910,693,812	91	7,182,300,031	91	10,524,387,804	88	2,347,239,220	88	2,994,003,176	87	1,752,329,237	86	2,817,122,179	87	9,910,693,812	95.60	94.17	178	9,910,693,812	195.60	137.99	sesuai dengan jumlah PNS
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Orang	10	5,000,000	0	10	5,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	10	172,000,000	0	10	172,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	172,000,000	0	2	172,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	5,000,000	0	10	5,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	85	20,000,000	0	85	20,000,000	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20,000,000	0	20	20,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	382,500,000	75	314,420,119	75	382,500,000	75	415,077,350	25	49,202,840	50	53,944,006	75	55,236,034	75	156,037,239	75	314,420,119	100.00	75.75	150	314,420,119	200.00	82.20	kegiatan tercapai
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	92,500,000	0	38,751,410	2	92,500,000	2	40,000,000	0	0	1	10,536,410	0	0	1	28,215,000	2	38,751,410	100.00	96.88	2	38,751,410	100.00	41.89	sesuai realisasi
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39,000,000	0	16,622,000	1	39,000,000	1	17,000,000	0	0	0	0	1	6,651,500	4	9,970,500	5	16,622,000	500.00	97.78	5	16,622,000	500.00	42.62	sesuai realisasi
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	104,000,000	0	51,992,200	1	104,000,000	1	54,762,500	0	0	0	0	1	14,098,050	41800	37,894,150	41,801	51,992,200	4,180,100.00	94.94	41801	51,992,200	4,180,100.00	49.99	sesuai realisasi
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	15,000,000	0	4,895,000	1	15,000,000	1	5,000,000	0	0	0	0	1	4,235,000	1	660,000	2	4,895,000	200.00	97.90	2	4,895,000	200.00	32.63	sesuai realisasi
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	7,000,000	9	0	1	7,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	9	0	900.00	0.00	
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	100,000,000	56	202,159,509	28	100,000,000	28	298,314,850	49	49,202,840	9	43,407,596	17	30,251,484	140	79,297,589	215	202,159,509	767.86	67.77	271	202,159,509	967.86	202.16	sesuai laporan perjalanan dinas
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	2,481,000,000	75	247,642,710	75	2,461,000,000	75	248,250,000	70	2,144,271	70	151,487,911	70	384,000	75	93,626,528	75	247,642,710	100.00	99.76	150	247,642,710	200.00	9.98	tercapai

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	2,270,000,000	0	149,250,000	1	2,270,000,000	1	149,250,000	0	0	3	149,250,000	0	0	0	0	3	149,250,000	300.00	100.00	3	149,250,000	300.00	6.57	sesuai dengan jumlah pengadaan
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	57,722,710	5	20,000,000	5	58,100,000	0	2,144,271	0	2,237,911	15	384,000	0	52,956,528	15	57,722,710	300.00	99.35	15	57,722,710	300.00	288.61	sesuai dengan pengadaan
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	161,000,000	0	40,670,000	5	141,000,000	5	40,900,000	0	0	0	0	3	0	3	40,670,000	6	40,670,000	120.00	99.44	6	40,670,000	120.00	25.26	target tercapai sesuai pengadaan
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	5,748,985,000	70	4,852,244,491	70	5,748,985,000	70	4,907,609,910	25	1,188,535,937	50	1,262,555,791	75	1,171,110,679	80	1,230,042,084	75	4,852,244,491	107.14	98.87	145	4,852,244,491	207.14	84.40	realisasi tercapai sesuai target
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3,000,000	3	9,996,000	3	3,000,000	3	10,000,000	3	1,872,000	3	1,800,000	3	2,700,000	302	3,624,000	311	9,996,000	10,366.67	99.96	314	9,996,000	10,466.67	333.20	belanja materi sesuai dengan kebutuhan opd
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	88,000,000	2	31,428,274	2	88,000,000	2	62,755,910	3	7,268,220	3	7,227,423	3	7,823,319	2	9,109,312	11	31,428,274	550.00	50.08	13	31,428,274	650.00	35.71	sesuai dengan target
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	5,657,985,000	2	4,810,820,217	2	5,657,985,000	2	4,834,854,000	3	1,179,395,717	3	1,253,528,368	3	1,160,587,360	3	1,217,308,772	12	4,810,820,217	600.00	99.50	14	4,810,820,217	700.00	85.03	sesuai dengan jumlah Tenaga PTT, Harlap dan Kontrak
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	360,000,000	75	298,751,940	75	380,000,000	75	305,292,000	37.5	29,435,990	69.56	79,124,490	100	76,720,750	75	113,470,710	75	298,751,940	100.00	97.86	150	298,751,940	200.00	82.99	sesuai dengan jumlah sarana dan prasarana
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	200,000,000	0	233,761,940	10	220,000,000	10	240,292,000	5	29,435,990	10	53,434,490	11	48,020,750	10	102,870,710	11	233,761,940	110.00	97.28	11	233,761,940	110.00	116.88	target melebihi realisasi sesuai dengan sarana prasarana yang ada
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	75,000,000	0	50,000,000	2	75,000,000	2	50,000,000	2	0	2	13,500,000	7	25,900,000	6	10,600,000	11	50,000,000	550.00	100.00	11	50,000,000	550.00	66.67	realisasi melebihi target sesuai dengan sarana
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35,000,000	0	0	1	35,000,000	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	200.00	0.00	2	0	200.00	0.00		
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	50,000,000	0	14,990,000	7	50,000,000	7	15,000,000	2	0	3	12,190,000	2	2,800,000	2	0	9	14,990,000	128.57	99.93	9	14,990,000	128.57	29.98	target tercapai
1.05.02.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	562,000,000	0	19,846,014	80	562,000,000	80	550,054,943	20	0	40	5,615,707	60	9,584,807	80	4,645,500	80	19,846,014	100.00	3.61	80	19,846,014	100.00	3.53	kegiatan tercapai sesuai dengan realisasi
1.05.02.2.01.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	428,000,000	80	19,846,014	80	428,000,000	80	550,054,943	70	0	75	5,615,707	75	9,584,807	80	4,645,500	75	19,846,014	93.75	3.61	155	19,846,014	193.75	4.64	subkegiatan tercapai
1.05.02.2.01.04.		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	22,000,000	0	2,253,500	1	22,000,000	1	457,590,040	0	0	0	0	0	1,626,500	1	627,000	1	2,253,500	100.00	0.49	1	2,253,500	100.00	10.24	target tercapai
1.05.02.2.01.05.		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	15	100,000,000	0	17,592,514	15	100,000,000	15	92,464,903	2	0	0	5,615,707	2	7,958,307	0	4,018,500	4	17,592,514	26.67	19.03	4	17,592,514	26.67	17.59	target tidak tercapai dikarenakan pelaksanaan uji kom dan diksar pol pp diadakan ditingkat pusat dibuka untuk seluruh indonesia jadi kuota yg diajukan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
																												tidak terpenuhi	
1.05.02.2.01.08.		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	60,000,000	0	0	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.05.02.2.01.15.		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	9	180,000,000		0	9	180,000,000	9	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.05.02.2.01.18.		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	3	66,000,000		0	3	66,000,000	3	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.05.02.2.02.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Persen	80	82,000,000	50	0	80	82,000,000	80	0	70	0	70	0	75	0	80	0	75	0	93.75	0.00	125	0	156.25	0.00	target tercapai
1.05.02.2.02.10.		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.05.02.2.02.11.		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	2	52,000,000		0	2	52,000,000	2	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.05.02.2.03.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan PPNS	Persen	50	52,000,000	0	0	50	52,000,000	50	0	0	0	0	0	25	0	12.5	0	25	0	50.00	0.00	25	0	50.00	0.00	target belum tercapai dikarenakan jumlah ppns yang ada masih sangat kurang, dan anggaran peruntukan ppns masi kurang
1.05.02.2.03.06.		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	2	52,000,000		0	2	52,000,000	2	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.05.02.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Persen	85	20,000,000	80	0	85	20,000,000	85	0	70	0	75	0		0		0	145	0	170.59	0.00	225	0	264.71	0.00	
1.05.02.2.01.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	20,000,000	80	0	80	20,000,000	80	0	70	0	75	0	75	0	80	0	75	0	93.75	0.00	155	0	193.75	0.00	subkegiatan tercapai
1.05.02.2.01.16.		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	8	20,000,000		0	8	20,000,000	8	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																														
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		Rp
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												16
1.05.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																												
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.30	51,000,000	78	80,211,293	78.30	51,000,000	78.30	34,073,254	0	1,599,404	0	16,285,635	0	1,905,188	71.95	8,046,188	72	27,836,415	91.89	81.70	149.95	80,211,293	191.51	157.28		
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	51,000,000	78	80,211,293	77	51,000,000	77	34,073,254	40	1,599,404	65	16,285,635	71.95	1,905,188	0	8,046,188	70	27,836,415	90.91	81.70	148	80,211,293	192.21	157.28		
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	51,000,000	3	80,211,293	2	51,000,000	2	34,073,254	2	1,599,404	0	16,285,635	0	1,905,188	0	8,046,188	2	27,836,415	100.00	81.70	5	80,211,293	250.00	157.28		
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,169,317,709	154	13,823,973,912	85	6,269,317,709	85	6,708,699,241	100	1,228,497,937	100	1,577,167,387	100	1,181,996,472	100	1,681,663,681	100	5,669,325,477	117.65	84.51	254	13,823,973,912	298.82	224.08		
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,432,180,000	76	5,844,749,461	1	3,432,180,000	1	3,604,044,445	1	668,840,598	1	841,282,396	1	554,993,155	1	847,395,822	1	2,912,511,971	100.00	80.81	77	5,844,749,461	7,700.00	170.29		
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3,432,180,000	19	5,844,749,461	25	3,432,180,000	25	3,604,044,445	19	668,840,598	19	841,282,396	20	554,993,155	20	847,395,822	20	2,912,511,971	80.00	80.81	39	5,844,749,461	156.00	170.29		
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	96	295,000,000	1	29,515,568	96	295,000,000	96	63,784,570	100	2,645,319	100	1,294,383	100	1,294,383	0	8,205,983	100	13,440,068	104.17	21.07	101	29,515,568	105.21	10.01		
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	150,000,000	0	10,075,500	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	10,075,500	0.00	6.72		
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	100,000,000	0	0	20	100,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	1	19,440,068	3	45,000,000	3	63,784,570	1	2,645,319	0	1,294,383	1	1,294,383	1	8,205,983	3	13,440,068	100.00	21.07	4	19,440,068	133.33	43.20		
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	80	395,000,000	46	853,197,657	80	395,000,000	80	528,778,730	25	45,066,815	50	88,365,370	75	91,011,104	0	130,944,666	75	355,387,955	93.75	67.21	121	853,197,657	151.25	216.00		
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	90,000,000	1	105,709,750	1	90,000,000	1	52,785,000	0	4,335,500	0	11,557,750	0	9,021,750	1	11,086,750	1	36,001,750	100.00	68.20	2	105,709,750	200.00	117.46		
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	0	34,848,000	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	34,848,000	0.00	69.70		
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22,000,000	1	50,840,350	1	22,000,000	1	15,078,000	0	0	0	0	1	3,759,000	0	6,109,250	1	9,868,250	100.00	65.45	2	50,840,350	200.00	231.09		
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	9,000,000	1	59,400,000	1	9,000,000	1	30,000,000	0	0	0	7,800,000	0	3,800,000	1	17,800,000	1	29,400,000	1.00	98.00	1	59,400,000	1.00	660.00		
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	24,000,000	1	45,560,125	6	24,000,000	6	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	45,560,125	16.67	189.83	Anggaran baru tersedia pada akhir tahun	
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	200,000,000	42	556,839,432	38	200,000,000	38	412,415,730	8	40,731,315	14	69,007,620	24	74,430,354	65	95,948,666	113	280,117,955	297.37	67.92	155	556,839,432	407.89	278.42		
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	965,000,000	0	108,361,558	65	1,040,000,000	65	125,357,000	0	1,437,556	0	1,996,334	0	1,916,334	100	103,011,334	100	108,361,558	153.85	86.44	100	108,361,558	153.85	11.23		
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	677,743,600	0	0	1	677,743,600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	187,256,400	0	108,361,558	1	162,256,400	1	125,357,000	0	1,437,556	0	1,996,334	0	1,916,334	1	103,011,334	1	108,361,558	100.00	86.44	1	108,361,558	100.00	57.87		
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	929,137,709	33	6,623,534,880	70	929,137,709	70	2,220,420,356	25	460,963,013	50	618,545,531	75	511,564,717	0	553,610,576	75	2,144,683,837	107.14	96.59	108	6,623,534,880	154.29	712.87		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	5,000,000	6	37,862,750	5	5,000,000	5	41,935,000	1	5,861,500	1	6,439,750	1	6,285,750	3	8,794,750	5	27,381,750	100.00	65.30	11	37,862,750	220.00	757.26	
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	50,000,000	3	173,300,786	2	50,000,000	2	96,000,000	0	17,866,153	1	18,010,421	0	19,549,159	1	19,194,050	2	74,619,783	100.00	77.73	5	173,300,786	250.00	346.60	
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	874,137,709	24	6,412,371,344	12	874,137,709	12	2,082,485,356	3	437,235,360	3	594,095,360	3	485,729,808	3	525,621,776	12	2,042,682,304	100.00	98.09	36	6,412,371,344	300.00	733.57	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	40	153,000,000	0	364,614,788	40	178,000,000	40	166,314,140	60	49,544,636	70	25,683,373	70	21,216,779	0	38,495,300	70	134,940,088	175.00	81.14	70	364,614,788	175.00	238.31	
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	53,000,000	6	292,466,788	7	53,000,000	7	131,314,140	8	49,544,636	6	22,353,373	6	14,883,779	6	20,655,300	8	107,437,088	114.29	81.82	14	292,466,788	200.00	551.82	
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	25,000,000	0	14,503,000	2	25,000,000	2	22,000,000	0	0	1	3,330,000	1	6,333,000	1	4,840,000	3	14,503,000	150.00	65.92	3	14,503,000	150.00	58.01	
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25,000,000	1	21,000,000	1	50,000,000	1	13,000,000	0	0	0	0	0	0	1	13,000,000	1	13,000,000	100.00	100.00	2	21,000,000	200.00	84.00	
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	36,645,000	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	36,645,000	100.00	73.29		
1.05.04.		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Persen	100	650,000,000	0	132,142,303	100	725,000,000	100	180,890,810	100	4,766,739	100	30,319,907	100	34,116,980	0	36,712,817	100	105,916,443	100.00	58.55	100	132,142,303	100.00	20.33	
1.05.04.2.01.		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	450,000,000	0	60,845,720	100	450,000,000	100	92,900,000	0	3,300,225	100	14,711,088	100	21,426,113	0	21,408,294	100	60,845,720	100.00	65.50	100	60,845,720	100.00	13.52	
1.05.04.2.01.01.		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	100,000,000	0	17,596,864	1	100,000,000	1	42,900,000	0	3,300,225	0	2,961,088	0	6,486,113	1	4,849,438	1	17,596,864	100.00	41.02	1	17,596,864	100.00	17.60	
1.05.04.2.01.02.		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Laporan	15	150,000,000	0	43,248,856	15	150,000,000	15	50,000,000	17	0	16	11,750,000	14	14,940,000	47	16,558,856	94	43,248,856	626.67	86.50	94	43,248,856	626.67	28.83	
1.05.04.2.01.03.		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	150,000,000	0	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.04.2.01.04.		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/kota	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.04.2.02.		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	Persen	50	150,000,000	0	29,523,130	50	150,000,000	50	37,990,810	83	633,180	83	5,942,985	83	5,950,200	0	7,317,455	1	19,843,820	1.66	52.23	0.83	29,523,130	1.66	19.68	
1.05.04.2.02.01.		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	100,000,000	0	29,523,130	1	100,000,000	1	37,990,810	0	633,180	0	5,942,985	0	5,950,200	1	7,317,455	1	19,843,820	100.00	52.23	1	29,523,130	100.00	29.52	
1.05.04.2.02.02.		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.04.2.03.		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen	100	50,000,000	0	41,773,453	100	50,000,000	100	50,000,000	100	833,334	100	9,665,834	100	6,740,667	0	7,987,068	100	25,226,903	100.00	50.45	100	41,773,453	100.00	83.55	
1.05.04.2.03.01.		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	1	50,000,000	0	41,773,453	1	50,000,000	1	50,000,000	0	833,334	0	9,665,834	0	6,740,667	1	7,987,068	1	25,226,903	100.00	50.45	1	41,773,453	100.00	83.55	
1.05.04.2.05.		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Laporan	0	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.04.2.05.04.		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											16
1.05.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	66.70	50,000,000	0	17,055,300	66.70	50,000,000	66.70	17,160,250	0	0	0	0	59.9	4,365,800	0	9,119,500	60	13,485,300	89.81	78.58	59.9	17,055,300	89.81	34.11	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	0	17,055,300	62.50	50,000,000	62.50	17,160,250	43.91	0	47.82	0	69.56	4,365,800	0	9,119,500	70	13,485,300	111.30	78.58	69.56	17,055,300	111.30	34.11	
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	30,000,000	1	17,055,300	3	30,000,000	3	17,160,250	3	0	3	0	3	4,365,800	3	9,119,500	3	13,485,300	100.00	78.58	4	17,055,300	133.33	56.85	
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,452,541,443	80	9,947,800,066	85	7,689,629,540	85	6,406,514,767	100	1,116,457,491	100	1,473,627,196	100	914,265,119	100	2,281,891,130	100	5,786,240,936	117.65	90.32	180	9,947,800,066	211.76	223.42	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,221,541,443	1	7,179,840,118	1	3,062,129,540	1	4,041,497,517	1	867,963,600	1	1,125,036,668	1	549,760,099	1	1,220,079,751	1	3,762,840,118	100.00	93.11	2	7,179,840,118	200.00	323.19	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2,221,541,443	24	7,179,840,118	20	3,062,129,540	20	4,041,497,517	20	867,963,600	20	1,125,036,668	20	549,760,099	20	1,220,079,751	20	3,762,840,118	100.00	93.11	44	7,179,840,118	220.00	323.19	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	125,000,000	0	246,524,791	95	155,000,000	95	99,600,000	100	0	100	0	100	0	100	88,500,000	100	88,500,000	105.26	88.86	100	246,524,791	105.26	197.22	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	20,000,000	75	246,524,791	0	50,000,000	0	99,600,000	0	0	0	0	0	0	75	88,500,000	75	88,500,000	0.00	88.86	150	246,524,791	0.00	1,232.62	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	60,000,000	0	0	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	0	3	45,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	471,000,000	60	652,204,867	75	457,000,000	75	474,947,250	25	31,046,000	50	58,195,400	75	122,021,800	100	132,238,800	75	343,502,000	100.00	72.32	135	652,204,867	180.00	138.47	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	150,000,000	1	178,988,000	5	120,000,000	5	62,147,250	0	14,908,000	0	0	0	6,502,000	0	0	0	21,410,000	0.00	34.45	1	178,988,000	20.00	119.33	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12,000,000	0	25,013,000	10	12,000,000	10	25,200,000	2	1,999,000	2	1,995,000	3	1,973,000	3	19,046,000	3	25,013,000	30.00	99.26	3	25,013,000	30.00	208.44	
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	20,000,000	1	39,896,000	10	20,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	39,896,000	10.00	199.48		
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80000	24,000,000	0	54,856,400	80000	40,000,000	80000	33,000,000	1000	0	2500	0	2500	15,119,500	2500	17,736,900	2,500	32,856,400	3.13	99.56	2500	54,856,400	3.13	228.57	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5,000,000	0	0	5	5,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	40,000,000	0	16,618,000	10	40,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	16,618,000	0.00	41.55		
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	200,000,000	0	336,833,467	40	200,000,000	40	354,600,000	3	14,139,000	3	56,200,400	9	98,427,300	9	95,455,900	9	264,222,600	22.50	74.51	9	336,833,467	22.50	168.42	
1.05.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	20,000,000	0	0	40	20,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	1,000,000,000	0	550,545,296	75	3,530,500,000	75	598,400,000	0	0	0	0	10	0	10	550,545,296	10	550,545,296	13.33	92.00	10	550,545,296	13.33	55.05	
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	150,000,000	0	335,743,196	2	2,392,000,000	2	338,040,000	0	0	0	0	1	0	1	335,743,196	2	335,743,196	100.00	99.32	2	335,743,196	100.00	223.83	
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	600,000,000	0	22,300,000	65	82,500,000	65	63,860,000	0	0	0	0	6	0	6	22,300,000	12	22,300,000	18.46	34.92	12	22,300,000	18.46	3.72	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	100,000,000	0	192,502,100	60	872,000,000	60	196,500,000	0	0	0	0	6	0	6	192,502,100	12	192,502,100	20.00	97.97	12	192,502,100	20.00	192.50	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	60	100,000,000	0		60	134,000,000	60	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0		1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	395,000,000	70	1,250,922,884	100	345,000,000	100	1,057,445,000	25	216,047,891	50	267,120,128	75	242,483,220	75	282,078,683	75	1,007,729,922	75.00	95.30	145	1,250,922,884	145.00	316.69	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,000,000	0	14,000,000	500	5,000,000	500	40,025,000	50	4,000,000	150	0	100	4,000,000	100	0	100	8,000,000	20.00	19.99	100	14,000,000	20.00	280.00	
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	30,000,000	0	19,248,255	2	30,000,000	2	15,500,000	0	708,163	0	680,400	1	790,500	1	4,390,326	1	6,569,389	50.00	42.38	1	19,248,255	50.00	64.16	
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	360,000,000	15	1,217,674,629	15	310,000,000	15	1,001,920,000	15	211,339,728	15	266,439,728	15	237,692,720	15	277,688,357	15	993,160,533	100.00	99.13	30	1,217,674,629	200.00	338.24	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	240,000,000	40	67,762,110	75	140,000,000	75	134,625,000	10	1,400,000	100	23,275,000	100	0	100	8,448,600	100	33,123,600	133.33	24.60	140	67,762,110	186.67	28.23	
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40,000,000	0	45,837,110	2	40,000,000	2	113,625,000	0	1,400,000	1	17,080,000	0	0	0	8,448,600	1	26,928,600	50.00	23.70	1	45,837,110	50.00	114.59	
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000	1	15,000,000	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	15,000,000	100.00	15.00	
1.05.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000	1	6,925,000	1	50,000,000	1	21,000,000	0	0	0	6,195,000	0	0	0	0	0	6,195,000	0.00	29.50	1	6,925,000	100.00	6.93	
1.05.03.		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	3.90	936,000,000	0	49,752,500	3.90	1,594,000,000	3.90	89,206,000	0	0	2.6	2,604,000	2.6	17,722,700	2.6	0	3	20,326,700	66.67	22.79	2.6	49,752,500	66.67	5.32	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.03.2.01.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	30	50,000,000	10	0	30	50,000,000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	0	33.33	0.00	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.03.2.01.04.		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	20	50,000,000	0		20	50,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.01.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/ kota	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	600,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.03.2.01.03.		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	20,000,000	0		1	600,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	70	390,000,000	0	1,005,000	70	400,000,000	70	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	142.86	0.00	100	1,005,000	142.86	0.26	
1.05.03.2.02.06.		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	20,000,000	0	705,000	1	20,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	705,000	0.00	3.53	
1.05.03.2.02.08.		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	40	100,000,000	155	300,000	40	50,000,000	40	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	155	300,000	387.50	0.30	
1.05.03.2.02.09.		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	2,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.10.		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	20	2,000,000	0	0	20	2,000,000	20	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.11.		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.12.		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	2,000,000	0	0	10	2,000,000	10	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.13.		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.14.		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.15.		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun	Unit	1	52,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		kabupaten/kota	Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya																										
1.05.03.2.02.16.		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	150	150,000,000		0	150	150,000,000	150	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.17.		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	1	20,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.03.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	408,000,000	100	29,762,700	100	474,000,000	100	51,506,000	100	0	100	2,604,000	100	15,222,700	100	0	100	17,826,700	100.00	34.61	200	29,762,700	200.00	7.33	
1.05.03.2.03.01.		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	90	100,000,000	0	0	90	60,000,000	90	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.03.02.		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	140,000,000	1	25,574,700	2	282,000,000	2	51,506,000	2	0	1	2,604,000	0	15,222,700	0	0	1	17,826,700	50.00	34.61	2	25,574,700	100.00	18.27	
1.05.03.2.03.03.		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	10	70,000,000	3.5	4,188,000	10	70,000,000	10	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	3.5	4,188,000	35.00	5.98	
1.05.03.2.03.09.		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	10	84,000,000		0	10	50,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.03.10.		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.03.11.		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	2,000,000		0	1	2,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	50,000,000	100	18,984,800	1	50,000,000	1	37,700,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0.00	6.63	100	18,984,800	10,000.00	37.97	Realisasi Kinerja di akhir tahun? TW IV
1.05.03.2.04.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	Sistem Data	1	20,000,000	100	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	0	10,000.00	0.00	Realisasi Kinerja di akhir tahun? TW IV
1.05.03.2.04.01.		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	10,000,000	1	16,484,800	1	10,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	16,484,800	100.00	164.85	
1.05.03.2.04.02.		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.03.		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.04.		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.05.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	10,000,000	0	2,500,000	1	10,000,000	1	37,700,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0.00	6.63	0	2,500,000	0.00	25.00	Realisasi kinerja di akhir Tahun/ TW IV
1.05.03.2.04.10.		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																											
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.00	58,210,000	80.61	33,571,855	79.00	58,210,000	79.00	36,041,831	73.15	1,565,842	73.15	4,135,463	73.15	2,126,821	73.15	1,061,621	73	8,889,547	92.59	24.66	153.76	33,571,855	194.63	57.67	
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	58,210,000	100	33,571,855	100	58,210,000	100	36,041,831	100	1,565,842	100	4,135,463	100	2,126,821	100	1,061,621	100	8,889,547	100.00	24.66	200	33,571,855	200.00	57.67	
1.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58,210,000	2	33,571,855	2	58,210,000	2	36,041,831	2	1,565,842	2	4,135,463	2	2,126,821	2	1,061,621	2	8,889,547	100.00	24.66	4	33,571,855	200.00	57.67	
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,382,451,400	80	7,426,117,570	85	4,383,451,400	85	4,145,831,552	100	760,822,724	100	1,082,686,013	100	664,216,570	100	1,179,426,547	100	3,687,151,854	117.65	88.94	180	7,426,117,570	211.76	169.45	
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,039,820,000	1	5,511,894,500	1	3,039,820,000	1	3,032,639,875	1	664,266,869	1	846,432,373	1	461,125,884	1	871,302,441	1	2,843,127,567	100.00	93.75	2	5,511,894,500	200.00	181.32	
1.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	3,039,820,000	19	5,511,894,500	19	3,039,820,000	19	3,032,639,875	20	664,266,869	20	846,432,373	20	461,125,884	21	871,302,441	21	2,843,127,567	110.53	93.75	40	5,511,894,500	210.53	181.32	
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	11	30,000,000	0	10,000,000	11	30,000,000	11	25,100,000	0	0	10	0	10	10,000,000	9.5	0	10	10,000,000	86.36	39.84	9.5	10,000,000	86.36	33.33	
1.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	0	10,000,000	2	30,000,000	2	25,100,000	0	0	2	0	2	10,000,000	2	0	2	10,000,000	100.00	39.84	2	10,000,000	100.00	33.33	
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	16,200,000	0	24,144,840	95	16,200,000	95	24,144,840	95	979,140	95	1,468,710	95	19,249,140	100	2,447,850	100	24,144,840	105.26	100.00	100	24,144,840	105.26	149.04	
1.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	16,200,000	0	24,144,840	27	16,200,000	27	24,144,840	0	979,140	29	1,468,710	29	19,249,140	29	2,447,850	29	24,144,840	107.41	100.00	29	24,144,840	107.41	149.04	
1.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	477,231,400	75	723,370,282	75	477,231,400	75	410,784,640	25	30,606,900	50	91,064,672	75	97,634,428	75	92,778,444	75	312,084,444	100.00	75.97	150	723,370,282	200.00	151.58	
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	48,000,000	8	274,872,831	1	48,000,000	1	83,660,500	1	15,187,500	1	28,606,500	1	18,067,000	1	19,920,000	1	81,781,000	100.00	97.75	9	274,872,831	900.00	572.65	
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	1	37,072,500	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	37,072,500	100.00	148.29		
1.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12,000,000	1	21,517,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	1,875,000	1	2,385,000	1	4,865,000	1	2,812,000	1	11,937,000	100.00	99.48	2	21,517,000	200.00	179.31	
1.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	32,966,400	3	43,353,200	3	32,966,400	3	28,175,000	3	3,119,400	3	10,172,300	3	6,804,500	3	6,815,000	3	26,911,200	100.00	95.51	6	43,353,200	200.00	131.51	
1.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12,000,000	1	21,950,000	1	12,000,000	1	12,000,000	0	0	1	6,000,000	0	0	1	5,900,000	1	11,900,000	100.00	99.17	2	21,950,000	200.00	182.92	
1.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	1	36,231,000	1	10,000,000	1	2,000,000	0	0	1	1,985,000	0	0	0	0	1	1,985,000	100.00	99.25	2	36,231,000	200.00	362.31	
1.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	307,265,000	60	283,563,751	28	307,265,000	28	267,949,140	12	10,425,000	8	41,915,872	16	65,807,928	39	54,611,444	75	172,760,244	267.86	64.48	135	283,563,751	482.14	92.29	
1.06.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	30,000,000	0	4,810,000	6	30,000,000	6	5,000,000	0	0	0	0	6	2,090,000	6	2,720,000	6	4,810,000	100.00	96.20	6	4,810,000	100.00	16.03	
1.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	450,000,000	49.66	601,943,650	55	450,000,000	55	279,065,285	49.66	3,569,500	49.66	5,354,250	49.66	53,714,500	60.18	125,119,400	60	187,757,650	109.42	67.28	109.84	601,943,650	199.71	133.77	
1.06.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	75,000,000	1	459,811,750	1	75,000,000	1	46,064,750	1	3,569,500	1	5,354,250	1	33,132,500	1	3,569,500	1	45,625,750	100.00	99.05	2	459,811,750	200.00	613.08	
1.06.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	175,000,000	0	25,195,950	10	150,000,000	10	36,000,000	0	0	0	0	0	696,000	7	24,499,950	7	25,195,950	70.00	69.99	7	25,195,950	70.00	14.40	
1.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150,000,000	0	108,315,950	10	175,000,000	10	187,000,535	0	0	0	0	2	11,266,000	16	97,049,950	18	108,315,950	180.00	57.92	18	108,315,950	180.00	72.21	
1.06.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	8,620,000	5	50,000,000	5	10,000,000	0	0	0	0	10	8,620,000	0	0	10	8,620,000	200.00	86.20	10	8,620,000	200.00	17.24	
1.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	66	240,000,000	80	468,820,006	66	241,000,000	66	263,682,360	100	55,726,248	100	66,237,760	100	59,337,536	100	71,509,648	100	252,811,192	151.52	95.88	180	468,820,006	272.73	195.34	
1.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8,000,000	1	52,346,730	1	8,000,000	1	31,245,600	1	5,057,600	1	8,586,400	1	6,237,600	1	10,844,000	1	30,725,600	100.00	98.34	2	52,346,730	200.00	654.33	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
1.06.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1,000,000	0	139,000	1	2,000,000	1	500,000	1	32,000	1	39,000	1	39,000	1	29,000	1	139,000	100.00	27.80	1	139,000	100.00	13.90	
1.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231,000,000	12	416,334,276	12	231,000,000	12	231,936,760	3	50,636,648	3	57,612,360	3	53,060,936	3	60,636,648	12	221,946,592	100.00	95.69	24	416,334,276	200.00	180.23	
1.06.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	129,200,000	75	85,944,292	75	129,200,000	75	110,414,552	75	5,674,067	75	72,128,248	75	-36,844,918	75	16,268,764	75	57,226,161	100.00	51.83	150	85,944,292	200.00	66.52	
1.06.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	23,200,000	2	71,994,292	2	23,200,000	2	51,414,552	2	5,274,067	2	18,244,448	2	10,788,882	3	14,918,764	3	49,226,161	150.00	95.74	5	71,994,292	250.00	310.32	
1.06.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	6,000,000	3	13,950,000	5	6,000,000	5	9,000,000	3	400,000	3	4,400,000	3	1,850,000	5	1,350,000	5	8,000,000	100.00	88.89	8	13,950,000	160.00	232.50	
1.06.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000	5	50,000,000	0	0	5	49,483,800	5	-49,483,800	5	0	5	0	100.00	0.00	5	0	100.00	0.00	
1.06.02.		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	246,200,000	40	248,059,516	50	230,000,000	50	100,076,500	40	2,259,852	50	58,614,840	50	3,434,852	50	5,649,630	50	69,959,174	100.00	69.91	90	248,059,516	180.00	100.76	keterbatasan kompetensi SDM yang tersedia untuk pembinaan dan pengembangan PSKS
1.06.02.2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	PSKS	6	246,200,000	5	248,059,516	6	230,000,000	6	100,076,500	5	2,259,852	6	58,614,840	6	3,434,852	6	5,649,630	6	69,959,174	100.00	69.91	11	248,059,516	183.33	100.76	Peningkatan kompetensi SDM
1.06.02.2.03.01.		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	50,000,000	30	87,940,671	40	50,000,000	40	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	30	87,940,671	75.00	175.88			
1.06.02.2.03.02.		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	96,200,000	30	156,264,345	16	80,000,000	16	98,435,000	0	2,259,852	17	56,979,340	17	3,434,852	17	5,649,630	17	68,323,674	106.25	69.41	47	156,264,345	293.75	162.44	
1.06.02.2.03.04.		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2	50,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.06.02.2.03.05.		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	50,000,000	0	3,854,500	1	50,000,000	1	1,641,500	0	0	0	1,635,500	0	0	0	0	0	1,635,500	0.00	99.63	0	3,854,500	0.00	7.71	koordinasi dengan pihak terkait belum berjalan
1.06.04.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	Persen	100	521,967,900	100	913,196,271	100	395,000,000	100	550,263,191	100	11,598,050	100	101,696,058	100	173,002,470	0	74,221,357	100	360,517,935	100.00	65.52	200	913,196,271	200.00	174.95	
1.06.04.2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	521,967,900	100	913,196,271	100	395,000,000	100	550,263,191	100	11,598,050	100	101,696,058	100	173,002,470	0	74,221,357	100	360,517,935	100.00	65.52	200	913,196,271	200.00	174.95	
1.06.04.2.01.01.		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	50,000,000		0	10	50,000,000	10	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.06.04.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	30,000,000		0	10	30,000,000	10	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.06.04.2.01.03.		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	100,000,000	21	363,288,002	30	50,000,000	30	230,800,931	0	11,598,050	0	28,467,266	76	97,550,600	76	61,774,150	76	199,390,066	253.33	86.39	97	363,288,002	323.33	363.29	
1.06.04.2.01.05.		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50,000,000		0	50	50,000,000	50	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.06.04.2.01.06.		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	81,000,000	137	388,780,400	90	80,000,000	90	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	137	388,780,400	152.22	479.98			
1.06.04.2.01.11.		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	85,000,000	0	20,399,014	5	85,000,000	5	60,712,360	0	0	1	0	1	10,637,107	1	9,761,907	1	20,399,014	20.00	33.60	1	20,399,014	20.00	24.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.06.04.2.01.12.		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	125,967,900	0	140,728,855	5	50,000,000	5	258,749,900	0	0	5	73,228,792	5	64,814,763	5	2,685,300	5	140,728,855	100.00	54.39	5	140,728,855	100.00	111.72	
1.06.04.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	100	125,967,900	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	200	0	200.00	0.00	300	0	300.00	0.00		
1.06.04.2.02.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi	Persen	100	125,967,900		0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.04.2.02.01.		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	50,000,000		0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.04.2.02.08.		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	75,967,900		0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.05.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	60.09	275,000,000	89.25	4,280,171,578	60.09	275,000,000	60.09	326,533,777	86.57	51,061,338	89.57	46,123,332	89.45	48,312,888	87.8	69,803,220	88	215,300,778	146.11	65.94	177.05	4,280,171,578	294.64	1,556.43	
1.06.05.2.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Persen	64.93	275,000,000	54.55	4,280,171,578	64.93	275,000,000	64.93	326,533,777	54.55	51,061,338	54.55	46,123,332	100	48,312,888	100	69,803,220	100	215,300,778	154.01	65.94	154.55	4,280,171,578	238.03	1,556.43	
1.06.05.2.02.01.		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	31479	90,000,000		0	31479	90,000,000	31479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.05.2.02.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	2675	50,000,000		0	2675	50,000,000	2675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.05.2.02.03.		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2675	85,000,000	9641	2,240,141,178	2675	85,000,000	2675	277,533,777	4194	51,061,338	4310	46,123,332	4166	43,517,888	4093	67,003,220	4,190	207,705,778	156.64	74.84	13831	2,240,141,178	517.05	2,635.46	hasil penyaluran bansos tidak sama jumlahnya krn alasan data penerima yang sudah meninggal maupun sudah pindah tempat tinggal
1.06.05.2.02.04.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50,000,000	0	2,040,030,400	50	50,000,000	50	48,000,000	0	0	0	0	4,795,000	20	2,800,000	20	7,595,000	40.00	15.50	20	2,040,030,400	40.00	4,080.06		
1.06.06.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	300,000,000	100	255,598,164	100	300,000,000	100	262,206,274	100	14,130,437	100	57,219,088	100	20,709,452	100	100,194,226	100	192,253,203	100.00	73.32	200	255,598,164	200.00	85.20	
1.06.06.2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	200,000,000	100	119,508,513	100	200,000,000	100	97,601,064	100	11,137,615	100	25,075,221	100	4,146,630	100	15,804,086	100	56,163,552	100.00	57.54	200	119,508,513	200.00	59.75	
1.06.06.2.01.01.		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000	3116	119,508,513	0	50,000,000	0	97,601,064	1875	11,137,615	1	25,075,221	0	4,146,630	2018	15,804,086	2,018	56,163,552	0.00	57.54	5134	119,508,513	0.00	239.02	
1.06.06.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000		0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.06.2.01.04.		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000		0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.06.2.01.05.		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000		0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.06.2.02.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Desa	1	100,000,000	1	136,089,651	1	100,000,000	1	164,605,210	1	2,992,822	1	32,143,867	1	16,562,822	1	84,390,140	1	136,089,651	100.00	82.68	2	136,089,651	200.00	136.09	
1.06.06.2.02.01.		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.06.2.02.02.		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	17	50,000,000	0	136,089,651	17	50,000,000	17	164,605,210	0	2,992,822	0	32,143,867	0	16,562,822	17	84,390,140	17	136,089,651	100.00	82.68	17	136,089,651	100.00	272.18	
1.06.07.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	Ada	100	25,000,000	100	0	100	40,000,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.06.07.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persen	100	20,000,000	100	25,252,808	100	40,000,000	100	19,000,000	100	2,454,342	100	474,999	100	1,829,666	100	2,973,665	100	7,732,672	100.00	40.70	200	25,252,808	200.00	126.26	16
1.06.07.2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Makam Pahlawan	100	25,000,000	100	0	100	40,000,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00	
1.06.07.2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Persen	100	20,000,000	100	25,252,808	100	40,000,000	100	19,000,000	100	2,454,342	100	474,999	100	1,829,666	100	2,973,665	100	7,732,672	100.00	40.70	200	25,252,808	200.00	126.26	
1.06.07.2.01.01.		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.07.2.01.02.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	11	20,000,000	11	25,252,808	11	40,000,000	11	19,000,000	11	2,454,342	11	474,999	11	1,829,666	11	2,973,665	11	7,732,672	100.00	40.70	22	25,252,808	200.00	126.26	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.07.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																											
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	81.89	80,000,000	81.65	30,698,739	81.89	80,000,000	81.89	34,105,810	0	903,606	0	1,307,645	71.05	2,652,545	71.05	4,608,460	71	9,472,256	86.76	27.77	152.7	30,698,739	186.47	38.37	Tercapai
2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	80,000,000	100	30,698,739	100	80,000,000	100	34,105,810	0	903,606	0	1,307,645	86.77	2,652,545	86.77	4,608,460	87	9,472,256	86.77	27.77	186.77	30,698,739	186.77	38.37	Tercapai
2.07.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	40,000,000		0	2	40,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.07.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	40,000,000	2	30,698,739	2	40,000,000	2	34,105,810	2	903,606	2	1,307,645	2	2,652,545	2	4,608,460	2	9,472,256	100.00	27.77	4	30,698,739	200.00	76.75	Tercapai
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,311,530,000	80	9,942,276,369	85	5,337,530,000	85	5,855,607,250	85	1,090,444,405	85	1,475,904,396	85	971,660,379	85	1,530,143,829	85	5,068,153,009	100.00	86.55	165	9,942,276,369	194.12	187.18	Tercapai
2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,600,030,000	1	8,119,890,064	1	4,600,030,000	1	4,326,845,969	1	936,105,924	1	1,242,093,601	1	718,399,041	1	1,181,114,542	1	4,077,713,108	100.00	94.24	2	8,119,890,064	200.00	176.52	Tercapai
2.07.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	4,600,030,000	31	8,119,890,064	33	4,600,030,000	33	4,326,845,969	31	936,105,924	31	1,242,093,601	31	718,399,041	31	1,181,114,542	31	4,077,713,108	100.00	94.24	62	8,119,890,064	187.88	176.52	Tercapai
2.07.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	15,000,000	0	31,309,638	95	30,000,000	95	39,474,380	95	825,304	95	9,672,956	95	19,160,770	95	1,650,608	95	31,309,638	100.00	79.32	95	31,309,638	100.00	208.73	Tercapai
2.07.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	15,000,000	0	31,309,638	2	30,000,000	2	39,474,380	0	825,304	1	9,672,956	2	19,160,770	0	1,650,608	3	31,309,638	150.00	79.32	3	31,309,638	150.00	208.73	Tercapai
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	198,000,000	55	427,513,866	57	207,000,000	57	617,112,545	55	36,747,580	55	39,941,607	55	22,751,657	57	126,516,614	57	225,957,458	100.00	36.62	112	427,513,866	196.49	215.92	Tercapai
2.07.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,000,000	1	55,818,000	1	3,000,000	1	35,400,000	1	6,906,000	1	7,214,250	1	7,214,250	1	9,619,000	1	30,953,500	100.00	87.44	2	55,818,000	200.00	1,860.60	Tercapai
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50,000,000	0	35,208,350	2	50,000,000	2	64,824,925	0	0	2	6,862,450	0	0	2	28,345,900	2	35,208,350	100.00	54.31	2	35,208,350	100.00	70.42	Tercapai
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5,000,000	2	50,909,000	2	5,000,000	2	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	50,909,000	100.00	1,018.18	Tidak dilaksanakan
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6,000,000	1	6,840,500	1	12,000,000	1	24,600,000	0	0	0	0	1	2,371,500	1	2,075,000	1	4,446,500	100.00	18.08	2	6,840,500	200.00	114.01	Tercapai
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	44,999,980	2	24,838,100	2	44,999,980	2	68,699,640	0	0	1	2,670,400	0	0	1	6,983,200	1	9,653,600	100.00	14.05	3	24,838,100	150.00	55.20	Tercapai
2.07.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	7,000,000	5	10,926,000	5	7,000,000	5	7,000,000	0	0	0	0	3	3,825,000	3	2,025,000	6	5,850,000	120.00	83.57	11	10,926,000	220.00	156.09	Tercapai
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	72,000,020	10	242,973,916	20	75,000,020	20	406,587,980	3	29,841,580	9	23,194,507	3	9,340,907	3	77,468,514	12	139,845,508	100.00	34.39	22	242,973,916	110.00	337.46	Tercapai
2.07.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	10,000,000		0	12	10,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.07.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	86,000,000	0	190,138,162	55	88,000,000	55	200,903,730	55	3,306,292	55	51,811,848	56.27	90,109,438	56.27	44,910,584	56	190,138,162	102.30	94.64	56.27	190,138,162	102.31	221.09	Tercapai
2.07.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	46,000,000		0	1	46,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.07.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	0	39,737,752	2	10,000,000	2	42,403,730	0	3,306,292	0	4,959,438	0	4,959,438	2	26,512,584	2	39,737,752	100.00	93.71	2	39,737,752	100.00	397.38	Tercapai
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,000,000	0	150,400,410	4	32,000,000	4	158,500,000	0	0	2	46,852,410	1	85,150,000	2	18,398,000	5	150,400,410	100.00	94.89	5	150,400,410	125.00	501.33	Tercapai
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	256,000,000	0	869,839,828	100	256,000,000	100	509,656,536	80	108,665,275	85	120,072,232	90	113,349,473	100	127,625,613	100	469,712,593	100.00	92.16	100	869,839,828	100.00	339.78	Tercapai
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	0	37,511,167	12	5,000,000	12	40,000,000	3	6,550,167	3	8,269,500	3	8,689,500	3	14,002,000	12	37,511,167	100.00	93.78	12	37,511,167	100.00	750.22	Tercapai

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.07.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	51,000,000	2	119,752,589	2	51,000,000	2	95,000,000	2	15,057,940	2	14,245,564	2	14,602,805	2	17,538,581	2	61,444,890	100.00	64.68	4	119,752,589	200.00	234.81	Tercapai
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	200,000,000	12	712,576,072	12	200,000,000	12	374,656,536	3	87,057,168	3	97,557,168	3	90,057,168	3	96,085,032	12	370,756,536	100.00	98.96	24	712,576,072	200.00	356.29	Tercapai
2.07.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	59.30	156,500,000	59.13	303,584,811	59.30	156,500,000	59.30	161,614,090	59.25	4,794,030	59.8	12,312,152	59.8	7,890,000	59.8	48,325,868	60	73,322,050	100.00	45.37	118.93	303,584,811	200.56	193.98	Tercapai
2.07.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	20,000,000	11	108,968,186	11	20,000,000	11	100,664,090	1	4,794,030	11	9,562,152	11	4,390,000	11	35,950,868	11	54,697,050	100.00	54.34	22	108,968,186	200.00	544.84	Tercapai
2.07.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	33,000,000	0	18,625,000	10	33,000,000	10	55,950,000	0	0	2	2,750,000	5	3,500,000	3	12,375,000	10	18,625,000	100.00	33.29	10	18,625,000	100.00	56.44	Tercapai
2.07.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	23,500,000	1	166,996,625	2	23,500,000	2	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	166,996,625	50.00	710.62	Tidak terlaksana
2.07.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30,000,000	1	8,995,000	2	30,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	1	8,995,000	50.00	29.98		
2.07.02.		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	70	100,000,000	0	0	70	100,000,000	70	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.02.2.01.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.02.2.01.01.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	3	100,000,000		0	3	100,000,000	3	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0.12	622,356,020	0.26	325,023,447	0.12	476,356,020	0.12	500,000,000	0	2,552,500	0	16,383,500	0.11	19,530,678	1.02	274,886,769	1	313,353,447	850.00	62.67	1.28	325,023,447	1,066.67	52.22	Tercapai
2.07.03.2.01.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	75	472,356,020	80.87	325,023,447	75	326,356,020	75	500,000,000	0	2,552,500	0	16,383,500	0	19,530,678	74.1	274,886,769	74	313,353,447	98.80	62.67	154.97	325,023,447	206.63	68.81	Tercapai
2.07.03.2.01.01.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16	342,556,020	0	325,023,447	16	196,556,020	16	500,000,000	0	2,552,500	0	16,383,500	0	19,530,678	16	274,886,769	16	313,353,447	100.00	62.67	16	325,023,447	100.00	94.88	Tercapai
2.07.03.2.01.02.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.2.01.03.		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	79,800,000		0	2	79,800,000	2	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.2.02.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang Terakreditasi	Persen	50	50,000,000		0	50	50,000,000	50	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.2.02.01.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.2.03.		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Persen	50	50,000,000		0	50	50,000,000	50	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.2.03.01.		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.2.04.		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen	10	50,000,000		0	10	50,000,000	10	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.2.04.01.		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	50,000,000		0	5	50,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	Persen	94	100,000,000		50,379,320	94	100,000,000	94	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	50,379,320	0.00	50.38		
2.07.04.2.03.		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	10	100,000,000	0	50,379,320	10	100,000,000	10	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	50,379,320	0.00	50.38		
2.07.04.2.03.01.		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	50,000,000	1	50,379,320	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	1	50,379,320	100.00	100.76		
2.07.04.2.03.02.		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	92	290,000,000	6.56	183,627,665	92	290,000,000	92	200,000,000	0	1,940,750	0	5,822,250	0	13,828,450	67.35	149,870,957	67	171,462,407	70.89	85.73	73.91	183,627,665	80.34	63.32	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
																	I		II		III		IV										
																	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		
2.07.04.2.01.		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	6	260,000,000	3	183,627,665	6	260,000,000	6	200,000,000	0	1,940,750	0	5,822,250	1	13,828,450	5	149,870,957	6	171,462,407	100.00	85.73	9	183,627,665	150.00	70.63	Tercapai				
2.07.04.2.01.01.		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	2	50,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.04.2.01.02.		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	10	30,000,000		0	10	30,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.04.2.01.03.		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	20	130,000,000		0	20	130,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.04.2.01.05.		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	50,000,000	10	183,627,665	20	50,000,000	20	200,000,000	0	1,940,750	0	5,822,250	0	13,828,450	32	149,870,957	32	171,462,407	160.00	85.73	42	183,627,665	210.00	367.26	Tercapai				
2.07.04.2.02.		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Lembaga	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.04.2.02.01.		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	2	10,000,000		0	2	10,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.04.2.02.02.		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	2	10,000,000		0	2	10,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.04.2.04.		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	Persen	10	10,000,000		0	10	10,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.04.2.04.03.		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	5	10,000,000		0	5	10,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.05.		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	3	350,000,000	5	177,348,944	3	420,000,000	3	171,453,000	0	12,004,313	15.79	6,241,539	17.5	5,041,539	26.92	52,984,139	27	76,271,530	897.44	44.49	31.92	177,348,944	1,064.00	50.67	Tercapai				
2.07.05.2.01.		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Persen	4	100,000,000		0	4	100,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.05.2.01.01.		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	Perusahaan	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.05.2.02.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	55	250,000,000	0	177,348,944	55	320,000,000	55	171,453,000	0	12,004,313	0	6,241,539	0	5,041,539	0	52,984,139	0	76,271,530	100.00	44.49	0	177,348,944	0.00	70.94	Tidak ada kasus, semakin kecil kasus semakin kinerja makin baik				
2.07.05.2.02.01.		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	120,000,000	0	140,768,244	1	90,000,000	1	130,131,000	0	1,680,513	0	6,241,539	0	5,041,539	0	45,348,339	0	58,311,930	0.00	44.81	0	140,768,244	0.00	117.31	Tidak ada perkara, semakin kecil perkara kinerja makin baik				
2.07.05.2.02.03.		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	3	50,000,000		0	3	150,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.05.2.02.05.		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3200	80,000,000	4116	36,580,700	3200	80,000,000	3200	41,322,000	655	10,323,800	721	0	2059	0	472	7,635,800	3,907	17,959,600	122.09	43.46	8023	36,580,700	250.72	45.73	Tercapai				
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																															
3.32.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																															
3.32.02.		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Persen	100	210,000,000	100	156,774,232	100	210,000,000	100	80,018,000	0	0	100	3,200,720	100	10,430,340	100	20,160,740	100	33,791,800	100.00	42.23	200	156,774,232	200.00	74.65	Tercapai				
3.32.02.2.01.		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	210,000,000	1	156,774,232	1	210,000,000	1	80,018,000	0	0	1	3,200,720	1	10,430,340	1	20,160,740	1	33,791,800	100.00	42.23	2	156,774,232	200.00	74.65	Tercapai				
3.32.02.2.01.04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	210,000,000	1	156,774,232	1	210,000,000	1	80,018,000	0	0	0	3,200,720	0	10,430,340	1	20,160,740	1	33,791,800	100.00	42.23	2	156,774,232	200.00	74.65	Tercapai				
3.32.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100	120,000,000	100	76,653,763	100	120,000,000	100	138,529,000	0	0	100	7,506,844	100	8,823,000	100	38,360,055	100	54,689,899	100.00	39.48	200	76,653,763	200.00	63.88	Tercapai				

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
																I		II		III		IV										
																1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
3.32.04.2.01.		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	SKP	2	120,000,000	2	76,653,763	2	120,000,000	2	138,529,000	0	0	0	7,506,844	2	8,823,000	2	38,360,055	2	54,689,899	100.00	39.48	4	76,653,763	200.00	63.88	Tercapai			
3.32.04.2.01.01.		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	35	70,000,000	0	38,716,899	35	70,000,000	35	76,562,110	0	0	0	6,156,844	0	0	50	32,560,055	50	38,716,899	142.86	50.57	50	38,716,899	142.86	55.31	Tercapai			
3.32.04.2.01.02.		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	6	50,000,000	6	37,936,864	6	50,000,000	6	61,966,890	0	0	0	1,350,000	5	8,823,000	1	5,800,000	6	15,973,000	100.00	25.78	12	37,936,864	200.00	75.87	Tercapai			
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
2.07.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																														
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	56,000,000	80	283,748,466	85	57,000,000	85	195,871,709	85	13,526,702	85	35,033,509	85	21,441,502	85	79,747,735	85	149,749,448	100.00	76.45	165	283,748,466	194.12	506.69	Tercapai			
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	22,000,000	55	144,343,137	57	23,000,000	57	127,513,042	55	2,926,702	55	17,533,509	55	9,141,502	55	57,717,743	55	87,319,456	96.49	68.48	110	144,343,137	192.98	656.11	Tercapai			
2.07.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,000,000	1	41,198,916	1	3,000,000	1	17,419,732	1	2,926,702	1	7,102,002	1	3,167,502	1	4,223,336	1	17,419,542	100.00	100.00	2	41,198,916	200.00	1,373.30	Tercapai			
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	1,438,000	1	5,000,000	1	5,500,000	0	0	0	0	0	0	1	1,438,000	1	1,438,000	100.00	26.15	1	1,438,000	100.00	28.76	Tercapai			
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4,000,000	1	840,000	1	5,000,000	1	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	840,000	100.00	21.00	Tidak dilaksanakan				
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,000,000	0	2,979,300	1	2,000,000	1	3,000,000	0	0	0	0	0	0	1	2,979,300	1	2,979,300	100.00	99.31	1	2,979,300	100.00	148.97	Tercapai			
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3,000,000	1	8,050,000	2	3,000,000	2	6,750,000	0	0	0	0	0	0	1	1,500,000	1	1,500,000	50.00	22.22	2	8,050,000	100.00	268.33	Tercapai			
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5,000,000	8	89,836,921	5	5,000,000	5	92,343,310	1	0	3	10,431,507	3	5,974,000	3	47,577,107	10	63,982,614	200.00	69.29	18	89,836,921	360.00	1,796.74	Tercapai			
2.07.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	10,000,000	0	0	55	10,000,000	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	10,000,000	0	0	4	10,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	24,000,000	100	139,405,329	100	24,000,000	100	68,358,667	80	10,600,000	85	17,500,000	90	12,300,000	100	22,029,992	100	62,429,992	100.00	91.33	200	139,405,329	200.00	580.86	Tercapai			
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	12	21,005,329	12	5,000,000	12	9,458,667	3	0	3	2,000,000	3	0	3	5,629,992	12	7,629,992	100.00	80.67	24	21,005,329	200.00	420.11	Tercapai			
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	19,000,000	12	118,400,000	12	19,000,000	12	58,900,000	3	10,600,000	3	15,500,000	3	12,300,000	3	16,400,000	12	54,800,000	100.00	93.04	24	118,400,000	200.00	623.16	Tercapai			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.08.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77.64	80,000,000	79.66	27,958,958	77.64	80,000,000	77.64	37,712,428	79.66	1,500,000	79.66	0	72.3	21,959,958	72.3	0	72	23,459,958	93.12	62.21	151.96	27,958,958	195.72	34.95	
2.08.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	80,000,000	100	27,958,958	70	80,000,000	70	37,712,428	59.37	1,500,000	68.75	0	71.87	21,959,958	71.87	0	72	23,459,958	102.67	62.21	171.87	27,958,958	245.53	34.95	
2.08.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	80,000,000	2	27,958,958	3	80,000,000	3	37,712,428	1	1,500,000	0	0	3	21,959,958	0	0	3	23,459,958	100.00	62.21	5	27,958,958	166.67	34.95	
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,711,554,000	90	8,832,083,629	85	4,764,554,000	85	5,079,337,578	100	1,064,526,156	100	1,420,797,128	100	858,584,691	100	1,342,874,359	100	4,686,782,334	117.65	92.27	190	8,832,083,629	223.53	187.46	
2.08.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,532,630,000	1	6,885,564,551	1	3,532,630,000	1	3,742,859,941	1	820,341,135	1	1,056,672,699	1	687,047,179	1	994,265,158	1	3,558,326,171	100.00	95.07	2	6,885,564,551	200.00	194.91	
2.08.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	3,532,630,000	22	6,885,564,551	45	3,532,630,000	45	3,742,859,941	23	820,341,135	23	1,056,672,699	23	687,047,179	23	994,265,158	23	3,558,326,171	51.11	95.07	45	6,885,564,551	100.00	194.91	
2.08.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	50,000,000	0	31,040,628	95	50,000,000	95	48,540,000	88.46	0	88.46	0	88.46	0	79.31	31,040,628	79	31,040,628	83.48	63.95	79.31	31,040,628	83.48	62.08	
2.08.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000	0	31,040,628	3	50,000,000	3	48,540,000	0	0	0	0	0	0	3	31,040,628	3	31,040,628	100.00	63.95	3	31,040,628	100.00	62.08	Target kinerja di TW IV
2.08.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	258,000,000	100	732,803,600	75	258,000,000	75	533,785,637	25	120,445,227	50	117,355,082	75	76,444,246	100	92,258,341	100	406,502,896	133.33	76.15	200	732,803,600	266.67	284.03	
2.08.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	72,000,000	1	24,322,600	12	72,000,000	12	18,958,287	1	6,000,000	1	7,147,600	1	0	1	4,175,000	1	17,322,600	8.33	91.37	2	24,322,600	16.67	33.78	
2.08.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	4,995,000	12	12,000,000	12	2,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	4,995,000	100.00	41.63	
2.08.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	12	6,450,000	12	20,000,000	12	8,000,000	0	0	0	0	0	0	45	450,000	45	450,000	375.00	5.63	57	6,450,000	475.00	32.25	Target Kinerja di TW IV
2.08.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	12,000,000	0	0	36	12,000,000	36	2,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	12	33,316,000	12	36,000,000	12	10,500,000	2	1,925,000	3	3,500,000	3	2,625,000	4	1,750,000	12	9,800,000	100.00	93.33	24	33,316,000	200.00	92.54	
2.08.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	106,000,000	94	663,720,000	60	106,000,000	60	491,327,350	92	112,520,227	66	106,707,482	54	73,819,246	70	85,883,341	282	378,930,296	470.00	77.12	376	663,720,000	626.67	626.15	
2.08.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	60	502,600,000	60	161,110,000	60	546,600,000	60	192,000,000	3.72	0	3.72	128,860,000	3.72	0	3.72	32,250,000	4	161,110,000	6.20	83.91	63.72	161,110,000	106.20	32.06	
2.08.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	63,000,000	0	10,800,000	1	85,000,000	1	11,000,000	0	0	0	0	0	0	1	10,800,000	1	10,800,000	100.00	98.18	1	10,800,000	100.00	17.14	
2.08.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	179,600,000	0	150,310,000	5	204,600,000	5	181,000,000	0	0	8	128,860,000	0	0	4	21,450,000	12	150,310,000	240.00	83.04	12	150,310,000	240.00	83.69	
2.08.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12,000,000	0	0	2	9,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	248,000,000	0	0	1	248,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	303,324,000	100	787,888,750	75	312,324,000	75	390,082,000	25	93,157,694	50	100,815,647	75	61,772,866	100	126,654,732	100	382,400,939	133.33	98.03	200	787,888,750	266.67	259.75	
2.08.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,200,000	150	6,500,000	12	9,000,000	12	6,000,000	3	1,000,000	3	0	3	0	3	3,000,000	12	4,000,000	100.00	66.67	162	6,500,000	1,350.00	203.13	
2.08.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	3,000,000	12	741,500	1	3,000,000	1	1,000,000	3	74,500	3	76,500	1	24,000	5	157,000	12	332,000	1,200.00	33.20	24	741,500	2,400.00	24.72	
2.08.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	297,124,000	32	780,647,250	12	300,324,000	12	383,082,000	3	92,083,194	3	100,739,147	3	61,748,866	3	123,497,732	12	378,068,939	100.00	98.69	44	780,647,250	366.67	262.73	
2.08.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan	Persen	75	65,000,000	80	233,676,100	75	65,000,000	75	172,070,000	28.26	30,582,100	45.65	17,093,700	71.73	33,320,400	71.73	66,405,500	72	147,401,700	95.64	85.66	151.73	233,676,100	202.31	359.50	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
			perkantoran																										
2.08.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	50,000,000	28	171,586,100	35	50,000,000	35	102,000,000	8	25,232,100	5	13,673,700	6	21,920,400	7	24,485,500	26	85,311,700	74.29	83.64	54	171,586,100	154.29	343.17	
2.08.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	15,000,000	0	62,090,000	30	15,000,000	30	70,070,000	5	5,350,000	3	3,420,000	6	11,400,000	9	41,920,000	23	62,090,000	76.67	98.61	23	62,090,000	76.67	413.93	
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	25	200,000,000	100	171,425,566	25	200,000,000	25	178,353,495	63.63	0	63.63	2,996,000	63.63	105,890,052	63.63	20,932,014	64	129,818,066	254.52	72.79	163.63	171,425,566	654.52	85.71	
2.08.02.2.01.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	Lembaga	3	200,000,000	3	171,425,566	3	200,000,000	3	178,353,495	3	0	3	2,996,000	3	105,890,052	3	20,932,014	3	129,818,066	100.00	72.79	6	171,425,566	200.00	85.71	
2.08.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	8	171,425,566	1	100,000,000	1	178,353,495	0	0	0	2,996,000	0	105,890,052	1	20,932,014	1	129,818,066	100.00	72.79	9	171,425,566	900.00	171.43	Target di TW IV
2.08.02.2.01.06.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	15	100,000,000		0	15	100,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	80	200,000,000	0	347,223,643	80	200,000,000	80	232,582,240	0	2,000,000	0	14,675,000	96.77	71,704,620	96.77	111,605,114	97	199,984,734	120.96	85.98	96.77	347,223,643	120.96	173.61	
2.08.02.2.02.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	0	100,000,000	0	347,223,643	0	100,000,000	0	232,582,240	0	2,000,000	5	14,675,000	5	71,704,620	5	111,605,114	5	199,984,734	0.00	85.98	5	347,223,643	0.00	347.22	
2.08.02.2.02.01.		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	7	347,223,643	1	100,000,000	1	232,582,240	2	2,000,000	8	14,675,000	5	71,704,620	5	111,605,114	20	199,984,734	2,000.00	85.98	27	347,223,643	2,700.00	347.22	
2.08.02.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen	20	100,000,000	100	0	20	100,000,000	20	0	75	0		0		0		0	75	0	375.00	0.00	175	0	875.00	0.00	
2.08.02.2.03.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	0	184,696,908	100	0	0	267,696,908	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00	
2.08.02.2.02.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,ekonomi ,sosial,dan ekonomi	Pertemuan	2	184,696,908	0	0	2	267,696,908	2	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.02.2.02.02.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	9	184,696,908	0	0	9	267,696,908	9	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.03.		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	581,000,000	100	831,834,576	100	691,000,000	100	637,924,000	100	92,500,000	100	88,211,750	100	92,753,725	100	127,868,800	100	401,334,275	100.00	62.91	200	831,834,576	200.00	143.17	
2.08.03.2.01.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	Kegiatan	2	100,000,000	69.45	1,825,000	2	210,000,000	2	65,300,000	0	0	1	0	6	0	3	1,825,000	10	1,825,000	500.00	2.79	79.45	1,825,000	3,972.50	1.83	
2.08.03.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	1	1,825,000	1	210,000,000	1	65,300,000	0	0	0	0	0	0	1	1,825,000	1	1,825,000	100.00	2.79	2	1,825,000	200.00	1.83	
2.08.03.2.02.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	Persen	100	101,000,000	100	753,800,776	100	101,000,000	100	441,969,000	100	92,500,000	100	88,211,750	100	88,462,525	100	112,196,300	100	381,370,575	100.00	86.29	200	753,800,776	200.00	746.34	
2.08.03.2.02.01.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	8	101,000,000	70	753,800,776	8	101,000,000	8	441,969,000	10	92,500,000	13	88,211,750	25	88,462,525	22	112,196,300	70	381,370,575	875.00	86.29	140	753,800,776	1,750.00	746.34	
2.08.03.2.02.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesrsentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	Persen	100	90,000,000	100	76,208,800	100	90,000,000	100	130,655,000	100	0	100	0	100	4,291,200	100	13,847,500	100	18,138,700	100.00	13.88	200	76,208,800	200.00	84.68	
2.08.03.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	90,000,000	6	76,208,800	6	90,000,000	6	130,655,000	6	0	6	0	6	4,291,200	6	13,847,500	6	18,138,700	100.00	13.88	12	76,208,800	200.00	84.68	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
																	I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
2.08.03.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Konfhrensif	Persen	100	200,000,000	100	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	0	100.00	0.00					
2.08.03.2.03.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.03.2.03.04.		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.03.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga layanan	Persen	100	90,000,000	0	0	100	90,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2	90,000,000	0	0	2	90,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.04.		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Persen	100	200,000,000	100	197,669,300	100	200,000,000	100	176,525,000	100	8,000,000	100	21,957,000	100	40,824,800	100	45,460,000	100	116,241,800	100.00	65.85	200	197,669,300	200.00	98.83					
2.08.04.2.01.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	Keluarga	100	100,000,000	0	197,669,300	100	100,000,000	100	176,525,000	40	8,000,000	50	21,957,000	150	40,824,800	200	45,460,000	440	116,241,800	440.00	65.85	440	197,669,300	440.00	197.67					
2.08.04.2.01.03.		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	100,000,000	5	197,669,300	12	100,000,000	12	176,525,000	3	8,000,000	3	21,957,000	3	40,824,800	3	45,460,000	12	116,241,800	100.00	65.85	17	197,669,300	141.67	197.67					
2.08.04.2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan keluarga	Persen	0.2	100,000,000	0	0	0.2	100,000,000	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.04.2.02.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.05.		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	Persen	10.87	200,000,000	0	0	10.87	440,000,000	10.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.05.2.01.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak	Persen	75	200,000,000	0	0	75	440,000,000	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.05.2.01.01.		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	340,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.05.2.01.02.		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.06.		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	70	190,000,000	100	295,582,507	70	190,000,000	70	317,967,740	60	2,800,000	60	18,250,000	60	106,963,207	60	69,582,300	60	197,595,507	85.71	62.14	160	295,582,507	228.57	155.57					
2.08.06.2.01.		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	jumlah lembaga PHA	Lembaga	2	90,000,000	0	0	2	90,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.06.2.01.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	1	90,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.08.06.2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	Persen	100	100,000,000	100	295,582,507	100	100,000,000	100	317,967,740	100	2,800,000	100	18,250,000	100	106,963,207	100	69,582,300	100	197,595,507	100.00	62.14	200	295,582,507	200.00	295.58					
2.08.06.2.02.01.		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	100,000,000	4	295,582,507	72	100,000,000	72	317,967,740	30	2,800,000	60	18,250,000	65	106,963,207	72	69,582,300	72	197,595,507	100.00	62.14	76	295,582,507	105.56	295.58					
2.08.07.		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100	400,000,000	100	0	100	400,000,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00						
2.08.07.2.01.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para	Persen	100	100,000,000	0	0	100	100,000,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00						

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
		Daerah Kabupaten/Kota	pihak lingkup daerah																										
2.08.07.2.01.04.		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	215	100,000,000	0	215	100,000,000	215	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.07.2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Terlatih Penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	70	100,000,000	100	0	70	100,000,000	70	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	142.86	0.00	200	0	285.71	0.00	
2.08.07.2.02.05.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	11	100,000,000	0	11	100,000,000	11	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.07.2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan	Persen	70	100,000,000	100	0	70	100,000,000	70	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	142.86	0.00	200	0	285.71	0.00	
2.08.07.2.02.06.		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	25	100,000,000	0	25	100,000,000	25	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.07.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan	2	100,000,000	2	0	2	100,000,000	2	0	0	0	0	0	2		0	2	0	2	100.00	0.00	4	0	200.00	0.00	
2.08.07.2.03.06.		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	60	100,000,000	0	60	100,000,000	60	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
2.14.02.		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2.49	130,000,000	2.6	0	2.49	160,000,000	2.49	0	2.76	0	2.76	0	2.43	0	2.43	0	2	0	97.59	0.00	5.03	0	202.01	0.00	Data dari Susenas
2.14.02.2.01.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah institusi pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Sekolah	1	10,000,000	0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.07.		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	10,000,000	0	2	10,000,000	2	0		0		0		0		0	0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.02.2.01.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai Acuan Perencanaan	OPD	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.02.		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Yang telah dilakukan Penguatan pendidikan Kependudukan Jalur Formal	Sekolah	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.02.		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pemampatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan	Persen	20	10,000,000	0	20	10,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.02.15.		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	2	10,000,000	0	2	10,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengelolaan data dan informasi program bangsa kencana	Laporan	2	90,000,000	0	2	90,000,000	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	100.00	0.00	2	0	100.00	0.00		
2.14.02.2.02.18.		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Laporan	2	90,000,000	0	2	90,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	Persen	77.78	321,000,000	19.03	0	77.78	371,000,000	77.78	0	10.3	0	71.42	0	70.77	0	74.32	0	74	95.55	0.00	93.35	0	120.02	0.00	Sumber Data dari SIGA-YankB – Dallap	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
2.14.03.2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	pembinaan IMP oleh PKB /PLKB di Desa /Kelurahan	Orang	25	154,000,000	12	0	25	154,000,000	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100.00	0.00	37	0	148.00	0.00	
2.14.03.2.02.05.		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	77	154,000,000		0	77	154,000,000	77	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	PLKB / PKB yang di dayagunakan perangkat daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam program bangka kencana	Orang	25	60,000,000		0	25	60,000,000	25	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.02.06.		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	15	60,000,000		0	15	60,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.04.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Unmeet need	Persen	11.85	107,000,000		0	11.85	157,000,000	11.85	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.04.01.		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	107,000,000		0	2	157,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	UnMeet need	Persen	11.85	615,000,000	19.03	4,523,838,860	11.85	644,696,908	11.85	3,329,207,590	10.11	0	8.6	329,178,000	9	880,116,116	0	1,731,541,944	28	2,940,836,060	233.84	88.33	46.74	4,523,838,860	394.43	735.58	Defenisi Operasional Unmeetneed yaitu ingin berKB tidak terpenuhi, kemudian jika unmeetneed 0 artinya semua yang ingin berKB terpenuhi
2.14.03.2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya angka KB aktif /MCPR	Peserta	10339	10,000,000		0	10339	10,000,000	10339	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.01.11.		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	15	10,000,000		0	15	10,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun	Angka	25	50,000,000	222	0	25	50,000,000	25	0	23.3	0	23.3	0	50.3	0	50.3	0	50	0	201.20	0.00	272.3	0	1,089.20	0.00	Data dari Susenas
2.14.03.2.01.10.		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	13	50,000,000		0	13	50,000,000	13	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.03.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Persen	76.75	485,000,000		0	76.75	514,696,908	76.75	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.03.06.		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	13	435,000,000		0	13	50,000,000	13	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.03.16.		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	40	50,000,000		0	40	464,696,908	40	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.14.03.2.03.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah KB MKJP	Orang	2	70,000,000	0	4,523,838,860	2	70,000,000	2	3,329,207,590	22	0	55	329,178,000	91	880,116,116	2089	1,731,541,944	2,089	2,940,836,060	104,450.00	88.33	2089	4,523,838,860	104,450.00	6,462.63	
2.14.03.2.03.10.		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	2	70,000,000	2	4,523,838,860	2	70,000,000	2	3,329,207,590	4	0	4	329,178,000	4	880,116,116	4	1,731,541,944	4	2,940,836,060	200.00	88.33	6	4,523,838,860	300.00	6,462.63	
2.14.04.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	Persen	57.80	293,000,000	57.43	110,047,250	57.80	293,000,000	57.80	171,368,020	57.5	30,843,000	57.5	49,979,800	57.5	22,729,450	57.5	6,495,000	58	110,047,250	99.48	64.22	114.93	110,047,250	198.84	37.56	Data dari Susenas
2.14.04.2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan	Persen	75	177,000,000	174	38,824,450	75	177,000,000	75	65,959,640	80	0	85	9,600,000	90	22,729,450	90	6,495,000	90	38,824,450	120.00	58.86	264	38,824,450	352.00	21.93	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
																	I		II		III		IV										
									1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
		Kesejahteraan Keluarga	PPKS)																														
2.14.04.2.01.08.		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	15	102,000,000	0	38,824,450	15	75,000,000	15	65,959,640	0	0	15	9,600,000	15	22,729,450	15	6,495,000	15	38,824,450	100.00	58.86	15	38,824,450	100.00	38.06					
2.14.04.2.01.24.		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	650	75,000,000	0	650	102,000,000	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.14.04.2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Terlaksananya Sosialisasi	Kegiatan	1	10,000,000	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.14.04.2.01.22.		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosidisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	30	10,000,000	0	30	10,000,000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
2.14.04.2.02.		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPKKS) Aktif	Persen	75	106,000,000	174	71,222,800	75	106,000,000	75	105,408,380	85	30,843,000	85	40,379,800	85	0	85	0	85	71,222,800	113.33	67.57	259	71,222,800	345.33	67.19					
2.14.04.2.02.03.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	5	106,000,000	0	71,222,800	5	106,000,000	5	105,408,380	3	30,843,000	5	40,379,800	3	0	5	0	16	71,222,800	320.00	67.57	16	71,222,800	320.00	67.19					

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.09.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																											
2.09.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.50	64,388,600	73.7	6,642,135	79.50	64,388,600	79.50	31,748,869	73.3	2,790,835	0	0	0	0	0	3,851,300	73	6,642,135	92.20	20.92	147	6,642,135	184.91	10.32	
2.09.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74	64,388,600	74	6,642,135	74	64,388,600	74	31,748,869	24	2,790,835	36	0	0	0	14	3,851,300	74	6,642,135	100.00	20.92	148	6,642,135	200.00	10.32	
2.09.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	64,388,600	2	6,642,135	2	64,388,600	2	31,748,869	2	2,790,835	0	0	0	0	0	3,851,300	2	6,642,135	100.00	20.92	4	6,642,135	200.00	10.32	
2.09.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	13,415,471,834	85	10,195,819,525	85	12,711,004,756	85	11,586,197,731	100	2,295,907,151	100	2,947,558,773	100	2,039,107,825	100	2,913,245,776	100	10,195,819,525	100.00	88.00	185	10,195,819,525	217.65	76.00	
2.09.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	10,434,210,712	1	8,736,903,186	1	10,434,210,712	1	9,812,599,243	1	2,048,304,738	1	2,623,667,631	1	1,650,369,622	1	2,414,561,195	1	8,736,903,186	100.00	89.04	2	8,736,903,186	200.00	83.73	
2.09.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	10,434,210,712	66	8,736,903,186	83	10,434,210,712	83	9,812,599,243	66	2,048,304,738	66	2,623,667,631	70	1,650,369,622	72	2,414,561,195	72	8,736,903,186	100.00	89.04	138	8,736,903,186	166.27	83.73	
2.09.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	96,000,000	0	95	96,000,000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	36,000,000	0	1	36,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	60,000,000	0	3	60,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,606,549,800	70	491,247,571	70	980,000,000	70	694,916,434	8.7	60,466,501	14.36	99,812,100	20.11	139,813,169	43.71	191,155,801	87	491,247,571	124.11	70.69	156.88	491,247,571	224.11	30.58	
2.09.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	212,149,800	1	51,050,000	1	170,000,000	1	89,049,999	0	0	1	29,000,000	0	9,900,000	0	12,150,000	1	51,050,000	100.00	57.33	2	51,050,000	200.00	24.06	
2.09.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	1	30,673,200	1	50,000,000	1	34,000,000	0	5,255,000	0	0	0	9,515,700	1	15,902,500	1	30,673,200	100.00	90.22	2	30,673,200	200.00	61.35	
2.09.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	124,400,000	1	21,199,000	1	130,000,000	1	25,900,000	0	1,584,000	0	10,020,000	0	7,410,000	1	2,185,000	1	21,199,000	100.00	81.85	2	21,199,000	200.00	17.04	
2.09.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	100,000,000	1	44,286,300	1	140,000,000	1	75,000,000	0	4,585,000	0	2,940,000	0	17,291,000	1	19,470,300	1	44,286,300	100.00	59.05	2	44,286,300	200.00	44.29	
2.09.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	20,000,000	1	0	12	20,000,000	12	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	8.33	0.00		
2.09.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	500,000,000	1	90,717,500	1	70,000,000	1	94,158,745	0	8,486,000	0	6,372,000	0	24,180,300	1	51,679,200	1	90,717,500	100.00	96.35	2	90,717,500	200.00	18.14	
2.09.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	600,000,000	1	253,321,571	12	400,000,000	12	366,807,690	3	40,556,501	3	51,480,100	3	71,516,169	3	89,768,801	12	253,321,571	100.00	69.06	13	253,321,571	108.33	42.22	
2.09.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	950,628,600	0	747,663,898	80	844,628,600	80	802,849,054	20	170,664,542	20	204,510,042	22	182,144,434	20	190,344,880	80	747,663,898	100.00	93.13	80	747,663,898	100.00	78.65	
2.09.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	36,000,000	0	15,000,000	1	36,000,000	1	15,000,000	0	2,400,000	0	3,600,000	0	4,800,000	1	4,200,000	1	15,000,000	100.00	100.00	1	15,000,000	100.00	41.67	
2.09.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	26,000,000	0	19,391,500	2	20,000,000	2	28,803,470	0	5,390,000	0	4,911,000	0	4,879,500	2	4,211,000	2	19,391,500	100.00	67.32	2	19,391,500	100.00	74.58	
2.09.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	888,628,600	0	713,272,398	1	788,628,600	1	759,045,584	0	162,874,542	0	195,999,042	0	172,464,934	1	181,933,880	1	713,272,398	100.00	93.97	1	713,272,398	100.00	80.27	
2.09.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	328,082,722	0	220,004,870	80	356,165,444	80	275,833,000	5.97	16,471,370	7.09	19,569,000	24.21	66,780,600	42.48	117,183,900	80	220,004,870	99.68	79.76	79.75	220,004,870	99.69	67.06	
2.09.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	200,000,000	0	182,688,500	7	100,000,000	7	210,200,000	0	11,715,000	2	11,645,000	3	57,662,600	2	101,665,900	7	182,688,500	100.00	86.91	7	182,688,500	100.00	91.34	
2.09.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	108,082,722	0	37,316,370	1	216,165,444	1	65,633,000	0	4,756,370	0	7,924,000	0	9,118,000	1	15,518,000	1	37,316,370	100.00	56.86	1	37,316,370	100.00	34.53	
2.09.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
													8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.09.02.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	Persen	5	50,000,000	0	0	5	310,849,800	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.02.2.01.		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	80.00	50,000,000	0	0	80.00	310,849,800	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.02.2.01.04.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	12	50,000,000	0	0	12	310,849,800	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2400	180,000,000	0	0	2400	185,000,000	2400	0	0	0	0	0	0	0	2419	0	2,419	0	100.79	0.00	2419	0	100.79	0.00	Pengolahan data berdasarkan data susenas tahun sebelumnya
2.09.03.2.01.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	CV Rasio	10	170,000,000	1.57	0	10	165,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	100.00	0.00	11.57	0	115.70	0.00	Realisasi Kinerja di akhir tahun/TW IV
2.09.03.2.01.02.		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	90,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.2.01.06.		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	2	10,000,000	0	0	2	10,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.2.01.10.		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	1	15,000,000	0	0	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.2.01.12.		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	55,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.2.03.		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Regulasi	Regulasi	1	10,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.2.03.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	4	10,000,000	0	0	4	20,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hr	2100	140,000,000	0	339,726,550	2100	231,700,000	2100	412,813,000	0	1,739,750	0	7,646,000	0	164,946,800	1868.4	165,394,000	1,868	339,726,550	88.97	82.30	1868.4	339,726,550	88.97	242.66	Pengolahan data berdasarkan data susenas tahun sebelumnya
2.09.03.2.04.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	57	140,000,000	0	339,726,550	57	231,700,000	57	412,813,000	0	1,739,750	0	7,646,000	0	164,946,800	57.9	165,394,000	58	339,726,550	101.58	82.30	57.9	339,726,550	101.58	242.66	Pengolahan data berdasarkan data susenas tahun sebelumnya
2.09.03.2.04.01.		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	25,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.03.2.04.02.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	6	90,000,000	5	339,726,550	6	156,700,000	6	412,813,000	0	1,739,750	0	7,646,000	0	164,946,800	1	165,394,000	1	339,726,550	16.67	82.30	6	339,726,550	100.00	377.47	Realisasi Kinerja di akhir tahun / TW IV
2.09.03.2.04.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	25,000,000	0	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.04.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	4.08	395,000,000	0	2,330,073	4.08	440,000,000	4.08	76,768,000	0	1,124,873	0	0	4.6	0	0	1,205,200	5	2,330,073	112.75	3.04	4.6	2,330,073	112.75	0.59	Berdasarakan Bapanas bahwa indikator tersebut ini tidak di pakai lagi
2.09.04.2.01.		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta	1	10,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.04.2.01.01.		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	10,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.04.2.02.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen	10	385,000,000	0	2,330,073	10	350,000,000	10	76,768,000	0	1,124,873	0	0	59.88	0	0	1,205,200	60	2,330,073	598.80	3.04	59.88	2,330,073	598.80	0.61	Realisasi Kinerja diakhir tahun / TW IV
2.09.04.2.02.02.		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20	250,000,000	0	2,330,073	20	300,000,000	20	76,768,000	0	1,124,873	0	0	0	0	1	1,205,200	1	2,330,073	5.00	3.04	1	2,330,073	5.00	0.93	Realisasi kinerja diakhir tahun/Tw IV
2.09.04.2.02.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi	Laporan	12	135,000,000	0	0	12	50,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Kabupaten/kota	kabupaten/kota	4A																									
2.09.05.		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90	330,000,000	90	0	90	470,000,000	90	0	0	0	94.12	0	94.12	0	0	0	94	0	104.58	0.00	184.12	0	204.58	0.00	
2.09.05.2.01.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	Sample	60	330,000,000	60	0	60	470,000,000	60	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	56.67	0.00	94	0	156.67	0.00	
2.09.05.2.01.04.		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60,000,000		0	1	130,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.05.2.01.04.		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	70,000,000		0	1	130,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.05.2.01.06.		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	60,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.05.2.01.07.		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	70,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.09.05.2.01.09.		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokuman	1	70,000,000		0	1	140,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.09.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																											
3.09.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatn yang sesuai SOP	Persen	85	545,000,000		0	85	680,000,000	85	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000		0	95	30,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000		0	3	30,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	Unit	5	60,000,000		0	5	60,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000		0	5	60,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	390,000,000		0	65	540,000,000	65	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	300,000,000		0	1	450,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	90,000,000		0	2	90,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara	Persen	65	50,000,000		0	65	50,000,000	65	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.09.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000		0	5	50,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																											
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persen	1.25	100,000,000		0	1.25	120,000,000	1.25	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.02.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas tanaman pangan/hortikultura yang dimanfaatkan	Persen	1.53	100,000,000		0	1.53	120,000,000	1.53	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.02.03.		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG H ewan / T anaman	Dokumen	10	100,000,000		0	10	120,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Persen	1.5	215,000,000	1.57	0	1.5	2,680,856,142	1.5	0	0		0	0		0	0		0	0	0.00	0.00	1.57	0	104.67	0.00	
3.27.02.2.02.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lahan kebun induk yang dimanfaatkan	Persen	41.43	75,000,000		0	41.43	75,000,000	41.43	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.02.04.		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	75,000,000		0	1	75,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.02.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	Persen	1.53	140,000,000	1.5	0	1.53	2,605,856,142	1.53	0	0		0	0		0	0		0	0	0.00	0.00	1.5	0	98.04	0.00	
3.27.02.2.02.02.		Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5	140,000,000		0	5	2,605,856,142	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi ternak	Persen	0.75	500,000,000		0	0.75	430,856,142	0.75	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.06.		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya	Persentase kenaikan populasi ternak	Persen	1.48	400,000,000		0	1.48	300,856,142	1.48	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16				
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain																															
3.27.02.2.06.03.		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	30	400,000,000	0	30	300,856,142	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.02.2.06.		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase lahan hijauan pakan ternak yang dikelola	Persen	3.3	100,000,000	0	3.3	130,000,000	3.3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.02.2.06.02.		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	10	100,000,000	0	10	130,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Persen	63.8	250,000,000	0	63.8	300,000,000	63.8	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.02.2.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	Unit	5	250,000,000	0	5	300,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.02.2.01.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	100,000,000	0	1	80,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.02.2.01.02.		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	150,000,000	0	1	220,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41	820,000,000	0	167,804,920	41	2,725,214,182	41	167,804,920	41	167,804,920	41	0	41	0	41	0	41	167,804,920	100.00	100.00	41	167,804,920	100.00	20.46	41 Unit sarana dan prasarana yang masih layak dan digunakan				
3.27.03.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	Paket	1	100,000,000	0	1	750,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	100,000,000	0	1	750,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	Ha	2562.4	420,000,000	0	0	2562.4	530,000,000	2562.4	0	403.39	0	403.39	0	403.39	0	403.39	0	403	0	15.74	0.00	403.39	0	15.74	0.00	Luas lahan yang akan ditetapkan sebagai LP2B				
3.27.03.2.01.15.		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	320,000,000	0	1	450,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.2.01.16.		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100,000,000	0	1	80,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan perkebunan	Ha	8664.5	100,000,000	0	8664.5	100,000,000	8664.5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.2.01.17.		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	1	100,000,000	0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.2.02.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan	Unit	1	100,000,000	0	1	300,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	0	20.00	0.00						
3.27.03.2.02.08.		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100,000,000	0	1	300,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.03.2.02.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	KM	4	100,000,000	0	167,804,920	4	1,045,214,182	4	167,804,920	100	167,804,920	100	0	100	0	0	0	100	167,804,920	2,500.00	100.00	100	167,804,920	2,500.00	167.80					
3.27.03.2.02.03.		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100,000,000	0	167,804,920	1	1,045,214,182	1	167,804,920	400	167,804,920	0	0	0	0	0	0	400	167,804,920	40,000.00	100.00	400	167,804,920	40,000.00	167.80	Sudah selesai di TW I				
3.27.04.		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0.48	350,000,000	0	0	0.48	350,000,000	0.48	0	0.146	0	0.15	0	0.128	0	0	0	0	26.67	0.00	0.128	0	26.67	0.00	Realisasi kinerja di akhir tahun/TW IV					
3.27.04.2.01.		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	Persen	15	350,000,000	0	0	15	350,000,000	15	0	1.55	0	11.05	0	11.05	0	0	0	11	0	73.67	0.00	11.05	0	73.67	0.00					
3.27.04.2.01.05.		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	350,000,000	0	1	350,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.27.05.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Persen	6.5	220,000,000	0	79,203,262	6.5	200,000,000	6.5	164,077,500	0	0	2.85	33,480,000	2.5	25,618,400	0	20,104,862	3	79,203,262	38.46	48.27	2.5	79,203,262	38.46	36.00					
3.27.05.2.01.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	40	220,000,000	0	79,203,262	40	200,000,000	40	164,077,500	0	0	25	33,480,000	10	25,618,400	0	20,104,862	35	79,203,262	87.50	48.27	35	79,203,262	87.50	36.00					
3.27.05.2.01.01.		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	40	220,000,000	0	79,203,262	40	200,000,000	40	164,077,500	0	0	25	33,480,000	8	25,618,400	0	20,104,862	33	79,203,262	82.50	48.27	33	79,203,262	82.50	36.00					
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2.0	292,266,000	0	80,150,966	2.0	347,266,000	2.0	432,996,340	0.4	435,266	0.4	1,568,000	3.8	2,879,500	25	75,268,200	0	80,150,966	20.00	18.51	0.4	80,150,966	20.00	27.42					

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Persen	20	125,000,000	0	4,722,466	20	100,000,000	20	146,702,000	0	435,266	0	0	0	0	100	4,287,200	100	4,722,466	500.00	3.22	100	4,722,466	500.00	3.78	
3.27.07.2.01.01.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	125,000,000	0	4,722,466	1	100,000,000	1	146,702,000	0	435,266	0	0	0	0	1	4,287,200	1	4,722,466	100.00	3.22	1	4,722,466	100.00	3.78	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	Persen	29.25	20,000,000	0	36,827,100	29.25	120,000,000	29.25	177,139,340	0	0	0	0	0	0	100	36,827,100	100	36,827,100	341.88	20.79	100	36,827,100	341.88	184.14	
3.27.07.2.01.02.		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	20,000,000	0	36,827,100	1	120,000,000	1	177,139,340	0	0	0	0	0	0	1	36,827,100	1	36,827,100	100.00	20.79	1	36,827,100	100.00	184.14	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	Persen	1.3	147,266,000	0	38,601,400	1.3	127,266,000	1.3	109,155,000	0.2	0	0.4	1,568,000	0.4	2,879,500	0.8	34,153,900	100	38,601,400	7,692.31	35.36	100	38,601,400	7,692.31	26.21	
3.27.07.2.01.05.		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	147,266,000	0	38,601,400	5	127,266,000	5	109,155,000	1	0	1	1,568,000	1	2,879,500	2	34,153,900	5	38,601,400	100.00	35.36	5	38,601,400	100.00	26.21	
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana BPP Yang Diadakan/Dibangun	Persen	6.66	113,000,000		0	6.66	113,000,000	6.66	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana BPP	Persen	20	113,000,000		0	20	113,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.2.01.03.		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1	113,000,000		0	1	113,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.11.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																											
2.11.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	62.50	50,000,000	80.13	59,603,255	62.50	50,000,000	62.50	44,763,800	68.3	247,592	68.3	13,229,444	68.3	12,310,664	68.3	6,672,885	68	32,460,585	109.28	72.52	148.43	59,603,255	237.49	119.21	
2.11.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	80.13	59,603,255	62.50	50,000,000	62.50	44,763,800	56.51	247,592	65.21	13,229,444	73.91	12,310,664	80.13	6,672,885	80	32,460,585	128.21	72.52	160.26	59,603,255	256.42	119.21	
2.11.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	59,603,255	3	50,000,000	3	44,763,800	3	247,592	3	13,229,444	3	12,310,664	3	6,672,885	3	32,460,585	100.00	72.52	6	59,603,255	200.00	119.21	Kinerja TW.4
2.11.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,482,902,891	80.13	8,553,591,562	85	4,500,402,891	85	5,048,918,066	100	967,279,991	100	1,234,295,767	100	951,411,511	100	1,388,232,470	100	4,541,219,739	117.65	89.94	180.13	8,553,591,562	211.92	190.80	
2.11.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,125,902,891	1	6,421,121,903	1	3,125,902,891	1	3,593,233,456	1	745,895,225	1	939,129,739	1	529,133,508	1	931,030,892	1	3,145,189,364	100.00	87.53	2	6,421,121,903	200.00	205.42	
2.11.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	3,125,902,891	24	6,421,121,903	24	3,125,902,891	24	3,593,233,456	24	745,895,225	24	939,129,739	24	529,133,508	24	931,030,892	24	3,145,189,364	100.00	87.53	48	6,421,121,903	200.00	205.42	Kinerja TW.4
2.11.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	120,000,000	0	6,025,840	90	120,000,000	90	12,780,000	0	0	18	4,202,584	18	1,215,504	0	607,752	36	6,025,840	40.00	47.15	36	6,025,840	40.00	5.02	
2.11.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	60,000,000	0	0	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	60,000,000	0	6,025,840	5	60,000,000	5	12,780,000	0	0	1	4,202,584	1	1,215,504	0	607,752	2	6,025,840	40.00	47.15	2	6,025,840	40.00	10.04	Kegiatan tidak selesai dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024
2.11.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	362,000,000	57	348,665,442	55	292,000,000	55	276,101,030	6.45	37,298,871	14.18	31,007,932	27.27	62,163,901	29.12	114,315,844	77	244,786,548	140.04	88.66	134.02	348,665,442	243.67	96.32	
2.11.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	170,000,000	0	37,755,800	4	80,000,000	4	38,000,000	0	0	1	18,028,000	2	7,550,300	4	12,177,500	7	37,755,800	175.00	99.36	7	37,755,800	175.00	22.21	Kinerja TW.4
2.11.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	15,000,000	3	33,543,841	10	15,000,000	10	26,652,000	2	1,348,504	1	2,074,532	3	3,765,064	2	19,355,741	8	26,543,841	80.00	99.59	11	33,543,841	110.00	223.63	Kinerja TW.4
2.11.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	6	13,840,000	12	12,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	13,840,000	50.00	115.33		
2.11.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	30,000,000	6	33,952,500	24	30,000,000	24	25,000,000	0	0	1	6,000,000	3	10,167,500	3	8,825,000	7	24,992,500	29.17	99.97	13	33,952,500	54.17	113.18	Kinerja TW.4
2.11.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	35,000,000	9	37,998,000	10	35,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	9	37,998,000	90.00	108.57		
2.11.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	100,000,000	12	191,575,301	11	120,000,000	11	186,449,030	3	35,950,367	2	4,905,400	5	40,681,037	9	73,957,603	19	155,494,407	172.73	83.40	31	191,575,301	281.82	191.58	Kinerja TW.4
2.11.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	63	120,000,000	0	26,923,715	63	145,000,000	63	28,636,320	0	0	16.44	3,920,500	22.73	4,637,666	22.02	18,365,549	61	26,923,715	97.13	94.02	61.19	26,923,715	97.13	22.44	
2.11.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	100,000,000	0	26,923,715	2	100,000,000	2	28,636,320	0	0	2	3,920,500	3	4,637,666	2	18,365,549	7	26,923,715	350.00	94.02	7	26,923,715	350.00	26.92	Kegiatan tidak dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024
2.11.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	45,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.11.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	100,000,000	74.99	112,960,000	63	162,500,000	63	113,400,000	0	0	0	0	74.99	112,960,000	0	0	75	112,960,000	119.03	99.61	149.98	112,960,000	238.06	112.96	
2.11.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	112,960,000	5	162,500,000	5	113,400,000	0	0	0	0	5	112,960,000	0	0	5	112,960,000	100.00	99.61	5	112,960,000	100.00	112.96	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
2.11.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	530,000,000	75	1,461,515,491	80	530,000,000	80	897,702,912	6.45	178,772,478	14.18	232,312,478	27.27	214,310,728	29.12	254,235,047	77	879,630,731	96.28	97.99	152.02	1,461,515,491	190.03	275.76	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.11.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12,000,000	1	40,965,000	1	12,000,000	1	38,664,000	2	4,012,750	1	5,452,750	3	10,651,000	6	16,852,500	12	36,969,000	1,200.00	95.62	13	40,965,000	1,300.00	341.38	Kinerja TW.4
2.11.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	498,000,000	12	1,420,550,491	12	498,000,000	12	859,038,912	24	174,759,728	24	226,859,728	24	203,659,728	24	237,382,547	24	842,661,731	200.00	98.09	36	1,420,550,491	300.00	285.25	Kinerja TW.4
2.11.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	125,000,000	75	176,379,171	75	125,000,000	75	127,064,348	6.82	5,313,417	23.44	23,722,534	27.73	26,990,204	22.02	69,677,386	80	125,703,541	106.68	98.93	155.01	176,379,171	206.68	141.10	
2.11.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	65,000,000	6	129,077,471	6	65,000,000	6	97,064,348	1	5,313,417	2	18,542,534	4	20,290,204	2	52,155,686	9	96,301,841	150.00	99.21	15	129,077,471	250.00	198.58	Kinerja TW.4
2.11.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	37,895,000	5	20,000,000	5	20,000,000	0	0	2	5,180,000	3	6,700,000	3	8,115,000	8	19,995,000	160.00	99.98	13	37,895,000	260.00	189.48	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
2.11.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	40,000,000	0	9,406,700	6	40,000,000	6	10,000,000	0	0	0	0	0	0	1	9,406,700	1	9,406,700	16.67	94.07	1	9,406,700	16.67	23.52	-
2.11.02.		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ranperda RPPLH	Dokumen	1	200,000,000	1	0	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	2	0	200.00	0.00	
2.11.02.2.01.		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200,000,000	1	0	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	2	0	200.00	0.00	
2.11.02.2.01.06.		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokuman	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.03.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Ha	3.1	320,000,000	7.8	130,207,043	3.1	320,000,000	3.1	117,614,760	0	532,427	3.1	5,020,361	3.1	17,378,254	3.1	38,646,679	3	61,577,721	100.00	52.36	10.9	130,207,043	351.61	40.69	
2.11.03.2.01.		Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	Sarpras	2	120,000,000	1	0	2	120,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	50.00	0.00	
2.11.03.2.01.15.		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	120,000,000		0	1	120,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.03.2.02.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	1	200,000,000	1	130,207,043	1	200,000,000	1	117,614,760	0	532,427	0	5,020,361	0	17,378,254	1	38,646,679	1	61,577,721	100.00	52.36	2	130,207,043	200.00	65.10	
2.11.03.2.02.01.		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	200,000,000	1	130,207,043	1	200,000,000	1	117,614,760	0	532,427	0	5,020,361	0	17,378,254	1	38,646,679	1	61,577,721	100.00	52.36	2	130,207,043	200.00	65.10	Kinerja TW. 4
2.11.03.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Persen	21.44	300,000,000	1	33,514,000	21.44	300,000,000	21.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33,514,000	4.66	11.17	
2.11.03.2.03.		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan	Lokasi	4	300,000,000	1	33,514,000	4	300,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33,514,000	25.00	11.17	
2.11.03.2.03.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	2	300,000,000	1	33,514,000	2	300,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33,514,000	50.00	11.17	
2.11.04.		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Persen	50	4,775,902,891	50	3,128,125,118	50	5,700,000,000	50	1,796,944,620	16	282,099,352	16	438,079,707	16	384,574,920	16	524,078,688	16	1,628,832,667	32.00	90.64	66	3,128,125,118	132.00	65.50	
2.11.04.2.01.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan	Persen	80	4,775,902,891	80	3,128,125,118	80	5,700,000,000	80	1,796,944,620	78.32	282,099,352	78.32	438,079,707	78.32	384,574,920	78.32	524,078,688	80	1,628,832,667	100.00	90.64	160	3,128,125,118	200.00	65.50	
2.11.04.2.01.01.		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	100,000,000	1	220,665,527	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	220,665,527	100.00	220.67	
2.11.04.2.01.04.		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	3.4	4,675,902,891	7	2,907,459,591	3.4	5,600,000,000	3.4	1,796,944,620	3.4	282,099,352	3.4	438,079,707	3.4	384,574,920	3.4	524,078,688	3	1,628,832,667	100.00	90.64	10.4	2,907,459,591	305.88	62.18	Kinerja TW.4
2.11.05.		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	Persen	15	100,000,000	0	0	15	100,000,000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.05.2.02.		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	Meter Kubik	20	100,000,000	0	0	20	100,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.11.05.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLUNDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Persen	73.92	300,000,000	45	37,970,351	73.92	300,000,000	73.92	62,998,600	0	6,146,000	45	15,430,091	0	13,939,746	0	2,454,514	45	37,970,351	60.88	60.27	90	37,970,351	121.75	12.66	
2.11.06.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	5	100,000,000	4	0	5	100,000,000	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	40.00	0.00	6	0	120.00	0.00	
2.11.06.2.01.07.		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	3	100,000,000		0	3	100,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.06.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	5	200,000,000	0	37,970,351	5	200,000,000	5	62,998,600	0	6,146,000	0	15,430,091	2	13,939,746	0	2,454,514	2	37,970,351	40.00	60.27	2	37,970,351	40.00	18.99	
2.11.06.2.01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	5	200,000,000	0	37,970,351	5	200,000,000	5	62,998,600	0	6,146,000	0	15,430,091	2	13,939,746	0	2,454,514	2	37,970,351	40.00	60.27	2	37,970,351	40.00	18.99	Kinerja TW.4
2.11.08.		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Persen	15	225,000,000	0	0	15	225,000,000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.08.2.01.		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Konservasi	Kawasan	3	0	0	0	3	125,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.08.2.01.02.		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4	0	0	0	4	125,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.08.2.01.		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	Kelompok	1	225,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.08.2.01.03.		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/kegiatan yang terlibat	Orang	50	225,000,000	0	0	50	100,000,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.09.		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Nominasi	1	300,000,000	1	23,687,966	1	300,000,000	1	4,775,400	0	382,954	0	397,892	0	2,387,352	0	1,600,798	0	4,768,996	0.00	99.87	1	23,687,966	100.00	7.90	
2.11.09.2.01.		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Persen	75	300,000,000	90	23,687,966	75	300,000,000	75	4,775,400	0	382,954	0	397,892	17.25	2,387,352	17.25	1,600,798	35	4,768,996	46.00	99.87	124.5	23,687,966	166.00	7.90	
2.11.09.2.01.01.		Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	300,000,000	1	23,687,966	4	300,000,000	4	4,775,400	0	382,954	0	397,892	1	2,387,352	1	1,600,798	2	4,768,996	50.00	99.87	3	23,687,966	75.00	7.90	Kegiatan tidak dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024
2.11.10.		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	Persen	71.89	50,000,000	0	0	71.89	50,000,000	71.89	0	28.4	0	0	0	15.8	0	0	0	44	0	61.48	0.00	44.2	0	61.48	0.00	
2.11.10.2.01.		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	20.00	0.00	1	0	20.00	0.00	
2.11.10.2.01.04.		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	5	50,000,000		0	5	50,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.11.		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	35.90	6,287,000,000	40	0	35.90	9,850,000,000	35.90	420,000,000	10.8	0	10.23	0	10.29	0	11	0	32	0	89.39	0.00	72.09	0	200.81	0.00	
2.11.11.2.01.		Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	Meter Kubik	42	6,287,000,000	41.98	0	42	9,850,000,000	42	420,000,000	40.12	0	40.03	0	41.07	0	41.87	0	42	0	99.69	0.00	83.85	0	199.64	0.00	
2.11.11.2.01.04.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
													8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100									
1	2	3	4	4A	5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
2.11.11.2.01.07.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	3	827,000,000	0	0	3	4,625,000,000	3	210,000,000	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100.00	0.00	3	0	100.00	0.00	Kinerja tw. 4	
2.11.11.2.01.07.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	5630	4,860,000,000	0	0	5630	4,625,000,000	5630	210,000,000	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0.05	0.00	3	0	0.05	0.00	Kinerja tw. 4	
2.11.11.2.01.08.		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	500,000,000		0	1	500,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.12.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																											
2.12.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	76.40	180,000,000	79.3	8,941,872	76.40	180,000,000	76.40	75,396,659	79	1,256,612	79	1,884,918	68.95	1,884,918	68.95	3,915,424	69	8,941,872	90.25	11.86	148.25	8,941,872	194.04	4.97	Masih adanya data pendukung dan cara penyajian dalam membuat laporan LKJIP yang kurang ,sehingga nilai yang di dapat tidak terealisasi .Solusinya akan lebih di teliti lagi dan memenuhi dokumen pendukung yang di minta
2.12.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95	180,000,000	95	8,941,872	95	180,000,000	95	75,396,659	79	1,256,612	95	1,884,918	95	1,884,918	95	3,915,424	95	8,941,872	100.00	11.86	190	8,941,872	200.00	4.97	Tidak adanya kepastian dalam pengajuan anggaran . Solusinya menunggu anggaran dari BPKPAD atau ketersediaan dana di Kas daerah
2.12.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	95,000,000	2	8,941,872	2	95,000,000	2	75,396,659	2	1,256,612	2	1,884,918	2	1,884,918	2	3,915,424	2	8,941,872	100.00	11.86	4	8,941,872	200.00	9.41	Keterlambatan dalam menyampaikan laporan, dikarenakan data pendukung belum lengkap,solusinya selalu berkoordinasi dengan bid
2.12.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	85,000,000	0	0	4	85,000,000	4	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.12.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,683,242,427	85	7,604,110,575	85	5,644,962,427	85	4,576,963,134	100	859,016,540	100	1,070,996,103	100	760,833,801	100	1,071,817,185	100	3,762,663,629	117.65	82.21	185	7,604,110,575	217.65	133.80	
2.12.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,225,940,427	1	6,194,000,047	1	4,225,940,427	1	3,150,068,294	1	673,929,246	1	839,800,333	1	536,675,359	1	790,675,659	1	2,841,080,597	100.00	90.19	2	6,194,000,047	200.00	146.57	Masih adanya keterlambatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan. Solusinya tergantung adanya anggaran dana di kas daerah
2.12.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	4,225,940,427	24	6,194,000,047	24	4,225,940,427	24	3,150,068,294	24	673,929,246	24	839,800,333	19	536,675,359	19	790,675,659	19	2,841,080,597	79.17	90.19	43	6,194,000,047	179.17	146.57	Memberikan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.
2.12.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	108,000,000	100	7,128,060	100	96,280,000	100	85,536,760	100	1,425,612	100	2,138,418	100	2,138,418	100	1,425,612	100	7,128,060	100.00	8.33	200	7,128,060	200.00	6.60	pelayanan kepegawai telah maksimal di berikan , lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan
2.12.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	33,000,000	0	0	1	33,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.12.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	75,000,000	0	7,128,060	5	63,280,000	5	85,536,760	0	1,425,612	0	2,138,418	0	2,138,418	0	1,425,612	0	7,128,060	0.00	8.33	0	7,128,060	0.00	9.50	Masih direncanakan,terkait anggaran yang saat ini masih di prioritaskan untuk pelayanan ke kecamatan2.
2.12.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	637,182,000	75	282,506,445	55	587,182,000	55	468,725,320	25	32,833,600	50	39,580,100	75	42,956,400	75	67,725,145	75	183,095,245	136.36	39.06	150	282,506,445	272.73	44.34	Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pekerjaan, solusinya melakukan perawatan terhadap sarana

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
																												dan prasarana yang telah ada	
2.12.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9,600,000	1	10,450,000	1	9,600,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	10,450,000	100.00	108.85		
2.12.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,682,000	12	52,823,800	12	9,682,000	12	57,633,190	3	8,518,100	6	10,053,900	9	8,907,700	12	13,987,100	12	41,466,800	100.00	71.95	24	52,823,800	200.00	545.59	
2.12.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	44,500,000	12	11,749,500	12	44,500,000	12	23,050,000	3	2,240,000	6	1,760,000	9	472,000	12	977,500	30	5,449,500	250.00	23.64	42	11,749,500	350.00	26.40	
2.12.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	48,000,000	12	34,904,350	12	48,000,000	12	40,000,000	3	2,474,500	6	6,820,650	9	3,751,600	12	5,634,400	30	18,681,150	250.00	46.70	42	34,904,350	350.00	72.72	
2.12.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12,000,000	12	18,500,000	12	12,000,000	12	15,000,000	3	1,600,000	6	2,400,000	9	3,100,000	12	3,900,000	30	11,000,000	250.00	73.33	42	18,500,000	350.00	154.17	
2.12.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	47,900,000	12	70,791,350	12	47,900,000	12	40,000,000	3	6,781,000	6	12,900,550	9	9,089,100	12	9,200,700	30	37,971,350	250.00	94.93	42	70,791,350	350.00	147.79	
2.12.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	380,500,000	6	83,287,445	30	330,500,000	30	293,042,130	4	11,220,000	2	5,645,000	14	17,636,000	6	34,025,445	26	68,526,445	86.67	23.38	32	83,287,445	106.67	21.89	
2.12.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	85,000,000	0	0	12	85,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.12.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	60,000,000	75	0	55	60,000,000	55	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	136.36	0.00	150	0	272.73	0.00	
2.12.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	11,720,000	75	6,766,672	75	35,160,000	75	65,500,000	75	1,691,668	75	2,537,502	75	2,537,502	75	0	75	6,766,672	100.00	10.33	150	6,766,672	200.00	57.74	
2.12.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	11,720,000	0	6,766,672	2	35,160,000	2	65,500,000	2	1,691,668	2	2,537,502	0	2,537,502	0	0	4	6,766,672	200.00	10.33	4	6,766,672	200.00	57.74	
2.12.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	60,000,000	0	0	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.12.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	480,400,000	100	987,376,397	100	480,400,000	100	703,810,000	25	137,241,580	50	175,579,749	75	159,451,121	75	186,676,401	75	658,948,851	75.00	93.63	175	987,376,397	175.00	205.53	
2.12.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	12	45,961,750	12	10,000,000	12	60,000,000	3	8,774,250	6	9,374,250	9	9,254,250	12	11,899,000	30	39,301,750	250.00	65.50	42	45,961,750	350.00	459.62	
2.12.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	120,000,000	12	127,025,708	12	120,000,000	12	81,810,000	3	14,966,939	6	17,305,108	9	17,201,061	12	18,681,591	30	68,154,699	250.00	83.31	42	127,025,708	350.00	105.85	
2.12.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350,400,000	12	814,388,939	12	350,400,000	12	562,000,000	3	113,500,391	6	148,900,391	9	132,995,810	12	156,095,810	30	551,492,402	250.00	98.13	42	814,388,939	350.00	232.42	
2.12.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	160,000,000	65	126,332,954	65	160,000,000	65	103,322,760	65	11,894,834	65	11,360,001	65	17,075,001	65	25,314,368	65	65,644,204	100.00	63.53	130	126,332,954	200.00	78.96	
2.12.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	60,000,000	7	79,032,954	7	60,000,000	7	87,322,760	2	11,894,834	2	9,260,001	1	15,175,001	1	20,124,368	6	56,454,204	85.71	64.65	13	79,032,954	185.71	131.72	
2.12.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	20,000,000	10	15,190,000	10	20,000,000	10	16,000,000	0	0	2	2,100,000	2	1,900,000	2	5,190,000	6	9,190,000	60.00	57.44	16	15,190,000	160.00	75.95	
2.12.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	32,110,000	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	32,110,000	100.00	64.22		
2.12.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	1	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	0.00		
2.12.02.		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	86	370,000,000	97	0	86	370,000,000	86	0	97	0	97	0	0	0	0	0	194	0	225.58	0.00	291	0	338.37	0.00	
2.12.02.2.01.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Persen	95	370,000,000	97	0	95	370,000,000	95	0	97	0	97	0	0	0	0	0	194	0	204.21	0.00	291	0	306.32	0.00	
2.12.02.2.01.07.		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	5	370,000,000	5	0	5	370,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	0	100.00	0.00		
2.12.03.		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	85	125,000,000	85	0	85	125,000,000	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	85	0	100.00	0.00		
2.12.03.2.01.		Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persen	100	125,000,000	100	0	100	125,000,000	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	200	0	200.00	0.00	300	0	300.00	0.00	
2.12.03.2.01.01.		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	6	125,000,000	6	0	6	125,000,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	0	100.00	0.00		
2.12.04.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	Persen	75	558,920,000	75	1,159,592,856	75	525,920,000	75	877,000,001	75	37,546,870	75	101,931,045	75	87,586,478	75	187,400,235	75	414,464,628	100.00	47.26	150	1,159,592,856	200.00	207.47	Permasalahan yang terjadi dikarenakan jaringan internet di

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
																												kecamatan jauh kurang mendukung dalam proses penerbitan dokumen sehingga menghambat proses penerbitan dokumen. solusinya diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait	
2.12.04.2.01.		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	OPD	25	50,000,000	25	0	25	50,000,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	25	0	100.00	0.00		
2.12.04.2.01.02.		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	20	50,000,000	18	0	20	50,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	18	0	90.00	0.00		
2.12.04.2.02.		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	OPD	25	508,920,000	25	1,159,592,856	25	475,920,000	25	877,000,001	25	37,546,870	25	101,931,045	25	87,586,478	25	187,400,235	25	414,464,628	100.00	47.26	50	1,159,592,856	200.00	227.85	Peralatan SIAK yang sudah tua serta jaringan aplikasi yang sering terganggu sehingga terlambat dalam memberikan layanan permintaan data .Solusinya peremajaan atau pengantian peralatan SIAK secara bertahap,serta selalu berkoordinasi ke pusat
2.12.04.2.02.01.		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	11	508,920,000	11	1,159,592,856	11	475,920,000	11	877,000,001	11	37,546,870	11	101,931,045	11	87,586,478	11	187,400,235	11	414,464,628	100.00	47.26	22	1,159,592,856	200.00	227.85	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.Solusinya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampai ketingkat desa dan kelurahan serta di perkuat melalui penyampaian informasi pelayanan publik ,atau di media sosial
2.12.05.		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	Persen	100	50,000,000		0	100	50,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.12.05.2.01.		Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Data Profil Kependudukan	Persen	100	50,000,000		0	100	50,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.12.05.2.01.01.		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	50,000,000		0	10	50,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.13.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																											
2.13.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.50	63,000,000	85.68	39,725,075	78.50	63,000,000	78.50	21,450,000	0	0	0	16,262,000	75.35	4,878,200	75.35	0	75	21,140,200	102.00	98.56	81.3	39,725,075	95.64	63.06	
2.13.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96.80	63,000,000	100	39,725,075	96.80	63,000,000	96.80	21,450,000	72.41	0	79.29	16,262,000	89.65	4,878,200	100	0	90	21,140,200	100.00	98.56	100	39,725,075	100.00	63.06	
2.13.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	43,000,000	2	39,725,075	2	43,000,000	2	21,450,000	3	0	3	16,262,000	3	4,878,200	3	0	3	21,140,200	100.00	98.56	3	39,725,075	100.00	92.38	
2.13.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,470,495,000	80	11,941,721,378	85	5,350,495,000	85	6,714,667,240	100	1,430,128,608	100	1,707,038,584	100	1,127,461,508	100	1,833,096,844	100	6,097,725,544	102.00	90.81	81.3	11,941,721,378	95.64	218.29	
2.13.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,406,780,000	1	8,006,758,403	1	4,286,780,000	1	4,405,818,150	1	984,699,197	1	1,237,505,322	1	935,746,883	1	931,712,717	1	4,089,664,119	100.00	92.82	1	8,006,758,403	100.00	181.69	
2.13.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	4,406,780,000	25	8,006,758,403	25	4,286,780,000	25	4,405,818,150	27	984,699,197	27	1,237,505,322	27	935,746,883	27	931,712,717	27	4,089,664,119	100.00	92.82	27	8,006,758,403	108.00	181.69	
2.13.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	92	45,000,000	99.55	39,638,252	92	45,000,000	92	26,600,000	99.47	0	99.45	26,277,000	99.55	0	99.55	0	99	26,277,000	100.00	98.79	99	39,638,252	100.00	88.09	
2.13.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	15,000,000	1	39,638,252	1	15,000,000	1	26,600,000	0	0	2	26,277,000	0	0	0	0	2	26,277,000	100.00	98.79	3	39,638,252	60.00	264.26	
2.13.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	60	326,600,000	78	533,203,552	60	326,600,000	60	501,949,090	25	34,245,120	50	97,631,252	75	53,547,005	75	48,435,127	75	233,858,504	130.00	46.59	78	533,203,552	86.66	163.26	
2.13.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	25,000,000	2	40,241,200	2	25,000,000	2	16,000,000	3	1,920,000	3	2,169,200	3	0	3	11,902,000	12	15,991,200	50.00	99.95	6	40,241,200	60.00	160.96	
2.13.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7,400,000	1	15,354,750	1	7,400,000	1	8,000,000	3	0	3	1,996,625	3	2,610,625	3	3,349,500	12	7,956,750	50.00	99.46	6	15,354,750	60.00	207.50	
2.13.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,400,000	0	0	1	5,400,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25,800,000	2	33,651,450	2	25,800,000	2	16,000,000	3	0	3	3,988,000	3	5,994,000	3	5,972,000	12	15,954,000	50.00	99.71	6	33,651,450	60.00	130.43	
2.13.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	20,000,000	4	33,650,000	4	20,000,000	4	12,000,000	2	0	3	8,500,000	3	3,400,000	3	0	12	11,900,000	50.00	99.17	5	33,650,000	50.00	168.25	
2.13.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	3,000,000	0	0	1	3,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,000,000	12	410,306,152	12	200,000,000	12	449,949,090	3	32,325,120	3	80,977,427	3	41,542,380	3	27,211,627	12	182,056,554	50.00	40.46	6	410,306,152	50.00	205.15	
2.13.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30,000,000	0	0	4	30,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	25	320,000,000	0	15,800,000	25	320,000,000	25	26,000,000	70.12	0	70.12	0	70.12	15,800,000	70.12	0	70	15,800,000	280.48	60.77	70.12	15,800,000	280.48	4.94	
2.13.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	230,000,000		0	1	230,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	40,000,000		0	6	40,000,000	6	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	40,000,000	0	15,800,000	8	40,000,000	8	26,000,000	0	0	0	0	1	15,800,000	1	0	2	15,800,000	25.00	60.77	2	15,800,000	25.00	39.50	
2.13.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	4	10,000,000		0	4	10,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
													1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.13.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	55	308,415,000	86	3,243,076,230	55	308,415,000	55	1,708,300,000	25	407,340,491	50	326,855,010	75	109,407,680	75	842,539,665	75	1,686,142,846	242.80	98.70	86	3,243,076,230	170.00	1,051.53	
2.13.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4,000,000	4	6,596,000	4	4,000,000	4	4,000,000	3	0	3	1,800,000	3	300,000	3	1,900,000	12	4,000,000	50.00	100.00	6	6,596,000	60.00	164.90	
2.13.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2,000,000	3	4,608,000	3	2,000,000	3	3,000,000	3	0	3	0	3	0	3	3,000,000	12	3,000,000	400.00	100.00	3	4,608,000	20.00	230.40	
2.13.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	302,415,000	12	3,231,872,230	12	302,415,000	12	1,701,300,000	3	407,340,491	3	325,055,010	3	109,107,680	3	837,639,665	12	1,679,142,846	50.00	98.70	18	3,231,872,230	30.00	1,068.69	
2.13.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	63,700,000	63	103,244,941	65	63,700,000	65	46,000,000	63	3,843,800	63	18,770,000	63	12,959,940	70	10,409,335	70	45,983,075	96.92	99.96	63	103,244,941	78.75	162.08	
2.13.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	30,700,000	4	79,175,430	4	30,700,000	4	36,000,000	4	3,843,800	4	9,680,000	4	12,959,940	4	9,499,335	4	35,983,075	100.00	99.95	4	79,175,430	100.00	257.90	
2.13.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	20,000,000	6	24,069,511	6	20,000,000	6	10,000,000	6	0	6	9,090,000	6	0	6	910,000	6	10,000,000	100.00	100.00	6	24,069,511	100.00	120.35	
2.13.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.13.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3,000,000		0	1	3,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.13.02.		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	75	240,000,000	0	63,665,087	75	240,000,000	75	211,267,500	80	3,336,000	80	11,164,620	80	10,977,000	80	38,187,467	80	63,665,087	93.33	30.13	70	63,665,087	77.77	26.53	
2.13.02.2.01.		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa	70	240,000,000	0	63,665,087	70	240,000,000	70	211,267,500	70	3,336,000	70	11,164,620	70	10,977,000	70	38,187,467	55	63,665,087	50.00	30.13	70	63,665,087	100.00	26.53	
2.13.02.2.01.01.		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	1	100,000,000	0	63,665,087	1	100,000,000	1	211,267,500	0	3,336,000	0	11,164,620	0	10,977,000	2	38,187,467	2	63,665,087	200.00	30.13	2	63,665,087	200.00	63.67	desa Sepem pang sdh selesai pada tahap kajian dengan hasil rekomendasi belum layak, desa Sedana u Utara sedang dalam proses evaluasi tingkat propinsi dan masih dalam masa moratorium
2.13.02.2.01.04.		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.13.02.2.01.06.		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	70	90,000,000		0	70	90,000,000	70	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.13.03.		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	Persen	35.71	620,000,000	30	123,438,103	35.71	620,000,000	35.71	103,012,500	14.29	3,000,000	25.71	16,209,000	32.86	22,228,399	37.14	2,970,100	37	44,407,499	84.01	43.11	30	123,438,103	52.50	19.91	masih kurangnya kapasitas kepengurusan di BUMDES
2.13.03.2.01.		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	Desa	25	620,000,000	21	123,438,103	25	620,000,000	25	103,012,500	10	3,000,000	8	16,209,000	5	22,228,399	3	2,970,100	26	44,407,499	72.00	43.11	21	123,438,103	52.50	19.91	tindak lanjut : peningkatan kapasitas kepengurusan BUMDES
2.13.03.2.01.01.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	25	250,000,000	21	88,024,103	25	250,000,000	25	68,812,500	10	1,500,000	8	5,369,500	5	17,630,399	3	2,970,100	26	27,469,999	104.00	39.92	47	88,024,103	188.00	35.21	
2.13.03.2.01.02.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	70,000,000		0	2	70,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.13.03.2.01.03.		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	300,000,000	0	35,414,000	1	300,000,000	1	34,200,000	0	1,500,000	0	10,839,500	0	4,598,000	1	0	1	16,937,500	100.00	49.52	1	35,414,000	100.00	11.80	
2.13.04.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	Bumdes	36	250,000,000	39	23,697,274	36	250,000,000	36	21,780,000	39	0	39	1,500,000	39	0	39	4,970,000	39	6,470,000	100.00	29.71	39	23,697,274	72.00	9.48	
2.13.04.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang di Bina	Bumdes	54	250,000,000	30	23,697,274	54	250,000,000	54	21,780,000	12	0	31	1,500,000	7	0	4	4,970,000	54	6,470,000	80.00	29.71	54	23,697,274	100.00	9.48	
2.13.04.2.01.08.		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	54	250,000,000	30	23,697,274	54	250,000,000	54	21,780,000	12	0	31	1,500,000	7	0	4	4,970,000	54	6,470,000	80.00	29.71	54	23,697,274	100.00	9.48	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.13.04.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	Persen	45	1,630,385,223	40	617,745,884	45	1,630,385,223	45	249,437,200	40	37,500,000	40	52,677,700	40	48,667,107	80	25,217,000	80	164,061,807	88.88	65.77	40	617,745,884	66.66	37.89	
2.13.04.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	70	1,630,385,223	70	617,745,884	70	1,630,385,223	70	249,437,200	70	37,500,000	70	52,677,700	70	48,667,107	70	25,217,000	70	164,061,807	100.00	65.77	70	617,745,884	100.00	37.89	
2.13.04.2.01.01.		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	70	150,000,000		0	70	150,000,000	70	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.02.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	90,385,223	0	11,086,500	1	90,385,223	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	11,086,500	0.00	12.27	
2.13.04.2.01.03.		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	70	150,000,000	70	80,613,713	70	150,000,000	70	17,078,400	0	0	0	0	0	0	70	17,026,500	70	17,026,500	100.00	99.70	70	80,613,713	100.00	53.74	
2.13.04.2.01.04.		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	70	290,000,000	70	278,912,280	70	290,000,000	70	110,683,220	70	30,000,000	70	18,741,700	70	38,227,107	70	1,290,500	70	88,259,307	100.00	79.74	70	278,912,280	100.00	96.18	
2.13.04.2.01.05.		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	70	150,000,000	35	46,525,200	70	150,000,000	70	28,000,000	0	0	37	23,256,000	0	0	0	0	37	23,256,000	52.86	83.06	72	46,525,200	102.86	31.02	
2.13.04.2.01.09.		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	5	200,000,000	37	141,623,241	5	200,000,000	5	17,000,000	37	7,500,000	0	9,480,000	0	0	0	0	37	16,980,000	100.00	99.88	37	141,623,241	71.15	70.81	
2.13.04.2.01.11.		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	70	200,000,000	77	10,273,500	70	200,000,000	70	19,020,000	35	0	20	0	22	4,170,000	0	1,613,000	77	5,783,000	78.57	30.40	77	10,273,500	110.00	5.14	
2.13.04.2.01.13.		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	70	150,000,000		0	70	150,000,000	70	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.14.		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	70	170,000,000	30	9,079,000	70	170,000,000	70	21,525,580	0	0	20	1,200,000	40	0	10	5,287,000	70	6,487,000	100.00	30.14	15	9,079,000	4.28	5.34	
2.13.04.2.01.15.		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.18.		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	77	30,000,000	77	39,632,450	77	30,000,000	77	36,130,000	40	0	37	0	0	6,270,000	0	0	77	6,270,000	100.00	17.35	77	39,632,450	100.00	132.11	
2.13.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	Kelompok	25	250,000,000	12	6,079,070	25	250,000,000	25	0	12	0	12	0	0	0	0	12	0	100.00	0.00	12	6,079,070	100.00	2.43		
2.13.05.2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	40	250,000,000	90	6,079,070	40	250,000,000	40	0	90	0	90	0	0	0	0	90	0	85.71	0.00	90	6,079,070	64.28	2.43		
2.13.05.2.01.05.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	10	250,000,000	6	6,079,070	10	250,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	6,079,070	60.00	2.43		
2.13.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	12	873,000,000	12	1,835,928,377	12	993,000,000	12	1,691,858,880	12	90,310,000	12	258,007,727	12	517,607,800	12	445,589,450	12	1,311,514,977	100.00	77.52	12	1,835,928,377	80.00	210.30	
2.13.05.2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	105	873,000,000	90	1,835,928,377	105	993,000,000	105	1,691,858,880	90	90,310,000	90	258,007,727	90	517,607,800	109	445,589,450	109	1,311,514,977	64.00	77.52	90	1,835,928,377	64.00	210.30	
2.13.05.2.01.02.		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	100,000,000	1	522,927,600	1	100,000,000	1	622,998,580	1	0	1	31,134,200	1	324,880,400	1	152,216,200	1	508,230,800	100.00	81.58	2	522,927,600	40.00	522.93	
2.13.05.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	130,000,000		6,050,000	5	130,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	6,050,000	0.00	4.65		
2.13.05.2.01.06.		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	250,000,000	6	329,155,270	10	250,000,000	10	332,272,300	11	56,952,000	0	130,223,320	0	46,767,000	0	10,446,400	11	244,388,720	110.00	73.55	17	329,155,270	34.00	131.66	masih terbatasnya sosialisasi dan antusias

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		Rp
																												masyarakat dalam pengembangan inovasi dan pemanfaatan SDA di masyarakat	
213.05.2.01.07.		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	2	100,000,000	2	185,706,850	2	100,000,000	2	234,040,000	0	33,358,000	1	11,080,000	1	4,985,000	1	118,783,150	2	168,206,150	68.57	71.87	70	185,706,850	100.00	185.71	tindak lanjut : peningkatan sosialisasi inovasi dan Lembaga posyantek
213.05.2.01.09.		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	92	293,000,000	92	792,088,657	92	413,000,000	92	502,548,000	40	0	36	85,570,207	10	140,975,400	8	164,143,700	94	390,689,307	85.87	77.74	92	792,088,657	100.00	270.34	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.15.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
2.15.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.9	210,000,000	0	10,242,650	78.9	210,000,000	78.9	14,260,250	62.55	0	62.55	0	62.55	0	62.55	3,900,000	63	3,900,000	79.28	27.35	62.55	10,242,650	79.28	4.88	
2.15.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	210,000,000	77.49	10,242,650	100	210,000,000	100	14,260,250	55	0	70	0	75	0	75	3,900,000	75	3,900,000	75.00	27.35	152.49	10,242,650	152.49	4.88	
2.15.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	110,000,000	2	10,242,650	2	110,000,000	2	14,260,250	3	0	0	0	0	0	2	3,900,000	5	3,900,000	250.00	27.35	7	10,242,650	350.00	9.31	
2.15.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,757,270,234	80	13,090,646,027	85	6,857,270,234	85	8,660,599,691	100	1,567,549,749	100	2,170,426,837	100	1,677,006,324	100	1,589,163,380	100	7,004,146,290	117.65	80.87	180	13,090,646,027	211.76	193.73	
2.15.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,068,550,000	1	8,073,485,817	1	3,068,550,000	1	4,216,610,968	1	926,078,018	1	1,139,333,985	1	631,641,376	1	1,238,149,512	1	3,935,202,891	100.00	93.33	2	8,073,485,817	200.00	263.10	
2.15.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3,068,550,000	31	8,073,485,817	30	3,068,550,000	30	4,216,610,968	30	926,078,018	30	1,139,333,985	30	631,641,376	30	1,238,149,512	120	3,935,202,891	400.00	93.33	151	8,073,485,817	503.33	263.10	
2.15.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	316,720,234	0	0	95	314,720,234	95	256,000,000	25	0	50	0	75	0	75	0	75	0	78.95	0.00	75	0	78.95	0.00	
2.15.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	120,000,000		0	1	118,000,000	1	256,000,000		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	150,000,000		0	2	150,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46,720,234		0	5	46,720,234	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	862,000,000	55	938,030,861	57	862,000,000	57	407,642,000	25	68,121,187	50	57,264,184	75	127,198,122	75	65,785,518	75	318,369,011	131.58	78.10	130	938,030,861	228.07	108.82	
2.15.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	80,000,000	1	158,176,183	1	80,000,000	1	38,756,680	3	4,248,000	3	7,220,000	3	8,420,000	3	18,290,000	12	38,178,000	1,200.00	98.51	13	158,176,183	1,300.00	197.72	
2.15.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15,000,000		0	1	15,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	22,000,000	10	55,192,000	10	22,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	10	55,192,000	100.00	250.87	
2.15.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	90,000,000	2	75,444,546	10	90,000,000	10	30,234,800	3	5,939,600	3	4,090,296	3	9,810,750	3	10,302,400	12	30,143,046	120.00	99.70	14	75,444,546	140.00	83.83	
2.15.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	10,000,000	10	24,300,000	5	10,000,000	5	13,000,000	3	0	3	1,300,000	3	4,200,000	3	5,700,000	12	11,200,000	240.00	86.15	22	24,300,000	440.00	243.00	
2.15.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	575,000,000	118	624,918,132	51	575,000,000	51	325,650,520	40	57,933,587	17	44,653,888	23	104,767,372	29	31,493,118	109	238,847,965	213.73	73.34	227	624,918,132	445.10	108.68	
2.15.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	30,000,000		0	12	30,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	50	930,000,000	80	397,681,420	50	1,332,000,000	50	293,000,000	0	0	50	121,460,000	70	116,624,820	70	0	190	238,084,820	380.00	81.26	270	397,681,420	540.00	42.76	
2.15.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	550,000,000		0	1	450,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	95,479,820	5	40,000,000	5	97,000,000	0	0	0	0	5	95,479,820	0	0	5	95,479,820	100.00	98.43	5	95,479,820	100.00	318.27	
2.15.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150,000,000	0	29,895,000	5	642,000,000	5	74,000,000	0	0	1	14,975,000	1	14,920,000	1	0	3	29,895,000	60.00	40.40	3	29,895,000	60.00	19.93	
2.15.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I		II						III		IV														
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
2.15.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150,000,000	1	272,306,600	1	150,000,000	1	122,000,000	0	0	1	106,485,000	0	6,225,000	0	0	1	112,710,000	100.00	92.39	2	272,306,600	200.00	181.54	
2.15.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	760,000,000	70	3,108,019,129	70	760,000,000	70	3,272,710,000	25	564,430,544	50	826,003,768	75	751,409,556	75	191,900,000	225	2,333,743,868	321.43	71.31	295	3,108,019,129	421.43	408.95	
2.15.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	10,000,000	10	4,875,000	10	10,000,000	10	2,500,000	3	741,000	3	494,000	3	988,000	0	0	9	2,223,000	90.00	88.92	19	4,875,000	190.00	48.75	
2.15.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	100,000,000	10	71,376,293	10	100,000,000	10	37,000,000	3	11,822,276	3	3,684,432	3	13,483,220	0	0	9	28,989,928	90.00	78.35	19	71,376,293	190.00	71.38	
2.15.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	650,000,000	12	3,031,767,836	12	650,000,000	12	3,233,210,000	3	551,867,268	3	821,825,336	3	736,938,336	0	191,900,000	9	2,302,530,940	75.00	71.22	21	3,031,767,836	175.00	466.43	
2.15.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	820,000,000	75	573,428,800	75	520,000,000	75	214,636,723	75	8,920,000	75	26,364,900	75	50,132,450	75	93,328,350	300	178,745,700	400.00	83.28	375	573,428,800	500.00	69.93	
2.15.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	800,000,000	18	573,428,800	18	500,000,000	18	214,636,723	10	8,920,000	10	26,364,900	10	50,132,450	10	93,328,350	40	178,745,700	222.22	83.28	58	573,428,800	322.22	71.68	
2.15.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000		0	5	20,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Persen	68	4,650,000,000	50	9,215,234,486	68	10,305,000,000	68	8,428,036,900	56.72	259,935,715	56.72	1,711,519,561	56.72	1,481,142,221	56.72	3,639,347,126	57	7,091,944,623	83.41	84.14	106.72	9,215,234,486	156.94	198.18	Akan direncanakan penambahan trayek baru, Kajian Umum Rencana Trayek di tahun 2025
2.15.02.2.02.		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	Persen	60	3,550,000,000	68	9,212,927,486	60	9,855,000,000	60	8,428,036,900	0	259,935,715	60	1,711,519,561	66	1,481,142,221	67	3,639,347,126	193	7,091,944,623	321.67	84.14	261	9,212,927,486	435.00	259.52	
2.15.02.2.02.02.		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	175	1,750,000,000	68	6,166,725,113	175	9,655,000,000	175	6,739,826,900	0	15,673,200	234	1,535,665,503	400	1,042,227,664	337	3,066,404,827	971	5,659,971,194	554.86	83.98	1039	6,166,725,113	593.71	352.38	
2.15.02.2.02.04.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	60	1,800,000,000	25	3,046,202,373	60	200,000,000	60	1,689,210,000	2	244,262,515	17	175,854,058	75	438,914,557	79	572,942,299	173	1,431,973,429	288.33	84.77	198	3,046,202,373	330.00	169.23	
2.15.02.2.04.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Pakir yang beroperasi	Lokasi	1	200,000,000	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.2.04.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200,000,000	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.2.06.		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	1	150,000,000	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.2.06.14.		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.2.06.15.		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.2.09.		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah angkutan umum perdesaan	Lokasi	1	750,000,000	1	2,307,000	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	2,307,000	100.00	0.31	
2.15.02.2.09.02.		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	750,000,000	12	2,307,000	12	200,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	2,307,000	100.00	0.31	
2.15.03.		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Rasio	0.4	6,943,000,000	0.3	9,761,749,933	0.4	9,640,000,000	0.4	8,069,148,669	0.35	1,360,311,294	0.35	300,282,242	0.35	1,618,515,088	0.41	3,686,256,009	1	6,965,364,633	365.00	86.32	1.76	9,761,749,933	440.00	140.60	
2.15.03.2.01.		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan penerbitan izin usaha angkutan laut	Jumlah	1	200,000,000	1	852,855,800	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	852,855,800	100.00	426.43	
2.15.03.2.01.		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Terlaksananya pengawasan penerbitan izin usaha angkutan laut	Jumlah	1	200,000,000	1	852,855,800	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	852,855,800	100.00	426.43	
2.15.03.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Laporan	1	100,000,000	1	426,427,900	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	426,427,900	100.00	426.43	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
			Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																										
2.15.03.2.01.02.		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	1	100,000,000	1	426,427,900	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	426,427,900	100.00	426.43	
2.15.03.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000	1	426,427,900	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	426,427,900	100.00	426.43	
2.15.03.2.01.02.		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	1	100,000,000	1	426,427,900	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	426,427,900	100.00	426.43	
2.15.03.2.02.		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan penerbitan izin angkutan PELRA	Dokumen	1	493,000,000		0	1	250,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.03.2.02.01.		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	493,000,000		0	1	250,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.03.2.12.		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi	Persen	91	5,850,000,000	50	7,537,965,446	91	6,200,000,000	91	6,904,498,669	50	1,359,319,294	50	293,424,842	50	1,613,101,088	50	3,181,446,522	200	6,447,291,746	219.78	93.38	250	7,537,965,446	274.73	128.85	Lanjutan pembangunan pelabuhan di tahun 2024
2.15.03.2.12.02.		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	5,000,000,000	1	5,513,792,997	1	5,300,000,000	1	5,514,119,294	0	1,358,623,294	0	300,000	0	1,161,587,093	2	2,802,204,910	2	5,322,715,297	200.00	96.53	3	5,513,792,997	300.00	110.28	Kinerja di TW. IV
2.15.03.2.12.03.		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	100,000,000	1	1,149,452,449	2	50,000,000	2	1,355,379,375	0	696,000	0	293,124,842	0	451,513,995	2	379,241,612	2	1,124,576,449	100.00	82.97	3	1,149,452,449	150.00	1,149.45	Kinerja di TW.IV
2.15.03.2.12.04.		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	750,000,000	9	874,720,000	12	850,000,000	12	35,000,000	12	0	12	0	12	0	12	0	48	0	400.00	0.00	57	874,720,000	475.00	116.63	
2.15.03.2.15.		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan	Izin	1	200,000,000	0	518,072,887	1	2,950,000,000	1	1,164,650,000	0	992,000	0	6,857,400	0	5,414,000	0	504,809,487	0	518,072,887	0.00	44.48	0	518,072,887	0.00	259.04	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Belum Bisa dilaksanakan terkendaala Undang- Undang
2.15.03.2.15.03.		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	1	200,000,000	0	518,072,887	1	2,950,000,000	1	1,164,650,000	0	992,000	0	6,857,400	0	5,414,000	5	504,809,487	5	518,072,887	500.00	44.48	5	518,072,887	500.00	259.04	Kinerja di TW. IV

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi dan Informatika																														
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
					7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100									
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
1	2	3	4	4A	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
2.16.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
2.16.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	81.30	120,000,000	81.01	32,783,434	81.30	120,000,000	81.30	11,157,418	0	6,168,006	0	1,570,977	74.55	1,570,977	74.55	1,570,977	75	10,880,937	91.70	97.52	155.56	32,783,434	191.34	27.32		
2.16.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	120,000,000	81.01	32,783,434	62.50	120,000,000	62.50	11,157,418	36.06	6,168,006	36.06	1,570,977	36.06	1,570,977	36.06	1,570,977	36	10,880,937	57.70	97.52	117.07	32,783,434	187.31	27.32		
2.16.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70,000,000	2	32,783,434	2	70,000,000	2	11,157,418	2	6,168,006	0	1,570,977	0	1,570,977	0	1,570,977	2	10,880,937	100.00	97.52	4	32,783,434	200.00	46.83		
2.16.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,931,464,140	80	8,252,573,432	85	3,986,464,140	85	4,498,512,669	100	899,410,586	100	1,161,048,225	100	817,990,371	100	1,169,355,410	100	4,047,804,592	117.65	89.98	180	8,252,573,432	211.76	209.91		
2.16.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,221,964,140	1	5,743,834,473	1	2,221,964,140	1	3,103,446,255	1	697,752,532	1	864,920,692	1	528,875,995	1	759,999,623	1	2,851,548,842	100.00	91.88	2	5,743,834,473	200.00	258.50		
2.16.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	2,221,964,140	23	5,743,834,473	26	2,221,964,140	26	3,103,446,255	23	697,752,532	22	864,920,692	22	528,875,995	22	759,999,623	22	2,851,548,842	84.62	91.88	45	5,743,834,473	173.08	258.50		
2.16.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	96	120,000,000	0	1,675,676	96	140,000,000	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1,675,676	0.00	1.40		
2.16.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100,000,000	0	1,675,676	10	120,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1,675,676	0.00	1.68		
2.16.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	96	30,000,000	0	0	96	30,000,000	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	50	30,000,000	0	0	50	30,000,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	77	616,000,000	70	776,431,566	77	501,000,000	77	405,002,894	25	40,524,500	50	54,124,850	75	70,618,403	100	116,306,878	100	281,574,631	129.87	69.52	170	776,431,566	220.78	126.04		
2.16.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10,000,000	1	67,476,500	5	10,000,000	5	43,112,000	0	9,704,500	0	9,757,500	1	12,712,500	0	3,252,500	1	35,427,000	20.00	82.17	2	67,476,500	40.00	674.77		
2.16.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	200,000,000	0	246,040,400	2	100,000,000	2	50,000,000	12	11,052,000	12	12,558,550	12	2,808,300	12	22,586,550	12	49,005,400	600.00	98.01	12	246,040,400	600.00	123.02		
2.16.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	76,000,000	0	0	3	16,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	680	30,000,000	2	4,224,000	680	10,000,000	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	4,224,000	0.29	14.08		
2.16.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	58000	50,000,000	2	46,105,000	58000	50,000,000	58000	30,000,000	3700	3,000,000	4251	7,160,000	14619	4,445,000	26835	15,260,000	49,405	29,865,000	85.18	99.55	49407	46,105,000	85.18	92.21		
2.16.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	25,000,000	0	800,000	15	50,000,000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	800,000	0.00	3.20		
2.16.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	30	45,000,000	2	31,592,000	30	5,000,000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	31,592,000	6.67	70.20		
2.16.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	150,000,000	42	380,193,666	60	200,000,000	60	281,890,894	22	16,768,000	38	24,648,800	63	50,652,603	28	75,207,828	151	167,277,231	251.67	59.34	193	380,193,666	321.67	253.46		
2.16.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	0	40	60,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	30	215,000,000	0	84,305,438	30	335,000,000	30	114,779,000	0	1,433,716	5	18,550,574	9	7,150,574	18	57,170,574	22	84,305,438	73.33	73.45	22	84,305,438	73.33	39.21		
2.16.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	400.00	0.00	4	0	400.00	0.00		
2.16.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	100,000,000	0	16,400,000	50	130,000,000	50	16,400,000	0	0	3	16,400,000	3	0	3	0	3	16,400,000	6.00	100.00	3	16,400,000	6.00	16.40		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																							16		
2.16.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	67,905,438	5	110,000,000	5	98,379,000	0	1,433,716	0	2,150,574	2	7,150,574	7	57,170,574	9	67,905,438	180.00	69.02	9	67,905,438	180.00	226.35	
2.16.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	5,000,000	0	0	3	5,000,000	3	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	536,000,000	95	1,500,299,844	82	556,000,000	82	790,314,520	11.34	151,710,906	21.22	206,967,106	30.89	189,277,106	40.62	216,944,052	100	764,899,170	121.89	96.78	194.95	1,500,299,844	237.74	279.91	
2.16.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	20,000,000	5	79,075,250	2000	20,000,000	2000	43,196,000	200	9,534,250	400	9,798,250	600	12,798,250	800	10,798,250	2,000	42,929,000	100.00	99.38	2005	79,075,250	100.25	395.38	
2.16.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	16,000,000	19	72,736,419	2	36,000,000	2	38,950,000	2	3,420,000	6	11,775,000	6	8,085,000	6	13,855,000	20	37,135,000	1,000.00	95.34	39	72,736,419	1,950.00	454.60	
2.16.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	26	500,000,000	81	1,348,488,175	26	500,000,000	26	708,168,520	28	138,756,656	28	185,393,856	26	168,393,856	25	192,290,802	25	684,835,170	96.15	96.71	106	1,348,488,175	407.69	269.70	
2.16.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	67	192,500,000	48.58	146,026,435	67	202,500,000	67	84,970,000	26.47	7,988,932	26.47	16,485,003	29.41	22,068,293	26.47	18,934,283	91	65,476,511	136.09	77.06	139.76	146,026,435	208.60	75.86	
2.16.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	40,000,000	13	116,356,435	1	40,000,000	1	69,970,000	2	7,988,932	2	12,485,003	2	15,288,293	2	15,494,283	2	51,256,511	200.00	73.25	15	116,356,435	1,500.00	290.89	
2.16.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	5,000,000	0	14,220,000	2	15,000,000	2	15,000,000	7	0	7	4,000,000	8	6,780,000	7	3,440,000	29	14,220,000	1,450.00	94.80	29	14,220,000	1,450.00	284.40	
2.16.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120,000,000	1	4,550,000	1	120,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	4,550,000	100.00	3.79	
2.16.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	27,500,000	6	10,900,000	7	27,500,000	7	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	6	10,900,000	85.71	39.64	
2.16.02.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	74.77	1,020,000,000	49.25	11,113,785,118	74.77	1,424,000,000	74.77	6,417,115,000	16.26	554,664,750	13.26	1,688,837,350	20.45	871,810,650	21.45	2,925,354,650	72	6,040,667,400	96.48	94.13	121.39	11,113,785,118	162.35	1,089.59	
2.16.02.2.01.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Orang	42744	1,020,000,000	40709	11,113,785,118	42744	1,424,000,000	42744	6,417,115,000	9605	554,664,750	7830	1,688,837,350	12081	871,810,650	12672	2,925,354,650	42,188	6,040,667,400	98.70	94.13	82897	11,113,785,118	193.94	1,089.59	
2.16.02.2.01.01.		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.02.2.01.02.		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	60	130,000,000	42	171,722,600	60	130,000,000	60	76,082,000	4	12,814,750	4	12,959,750	4	23,813,750	4	19,965,350	16	69,553,600	26.67	91.42	58	171,722,600	96.67	132.09	
2.16.02.2.01.03.		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.02.2.01.04.		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	400	110,000,000	620	10,888,153,028	400	744,000,000	400	6,066,026,000	102	541,850,000	108	1,667,277,800	104	847,096,900	90	2,878,239,950	404	5,934,464,650	101.00	97.83	1024	10,888,153,028	256.00	9,898.32	
2.16.02.2.01.05.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	45	150,000,000	12	931,340	45	100,000,000	45	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	12	931,340	26.67	0.62	
2.16.02.2.01.06.		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	9	110,000,000	0	28,978,150	9	50,000,000	9	248,758,000	0	0	1	8,599,800	3	900,000	5	3,149,350	9	12,649,150	100.00	5.08	9	28,978,150	100.00	26.34	
2.16.02.2.01.07.		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	3	100,000,000	0	0	3	100,000,000	3	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.02.2.01.08.		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	5	110,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.02.2.01.09.		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.02.2.01.10.		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	25	110,000,000	0	0	25	50,000,000	25	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.02.2.01.13.		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	50,000,000	0	24,000,000	3	50,000,000	3	26,249,000	0	0	0	0	0	0	2	24,000,000	2	24,000,000	66.67	91.43	2	24,000,000	66.67	48.00	Realisasi kinerja di TW IV
2.16.03.		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	21	2,869,000,000	67	5,606,543,087	21	2,454,000,000	21	1,907,532,641	80.74	35,548,954	80.74	146,402,824	87.74	865,228,905	87.74	804,511,053	88	1,851,691,736	417.81	97.07	154.74	5,606,543,087	736.86	195.42	
2.16.03.2.01.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web	Persen	55	210,000,000	45	376,645,316	55	210,000,000	55	181,223,000	100	21,886,250	100	92,574,100	100	30,272,894	100	28,328,400	100	173,061,644	181.82	95.50	145	376,645,316	263.64	179.35	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.16.03.2.01.01.		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	2	100,000,000	1	198,892,960	2	100,000,000	2	106,749,000	1	20,486,250	1	60,599,200	0	12,275,500	0	11,275,500	2	104,636,450	100.00	98.02	3	198,892,960	150.00	198.89	
2.16.03.2.01.02.		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	165	110,000,000	298	177,752,356	165	110,000,000	165	74,474,000	11	1,400,000	22	31,974,900	41	17,997,394	45	17,052,900	119	68,425,194	72.12	91.88	417	177,752,356	252.73	161.59	
2.16.03.2.01.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KOMINFO	Persen	72.22	1,465,000,000	44.5	4,641,395,493	72.22	1,100,000,000	72.22	1,624,048,124	100	0	100	33,137,000	100	783,303,621	100	774,508,013	100	1,590,948,634	138.47	97.96	144.5	4,641,395,493	200.08	316.82	
2.16.03.2.01.03.		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	9	1,465,000,000	38	4,641,395,493	9	1,100,000,000	9	1,624,048,124	9	0	9	33,137,000	9	783,303,621	9	774,508,013	9	1,590,948,634	100.00	97.96	47	4,641,395,493	522.22	316.82	
2.16.03.2.02.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Persen	63	1,194,000,000	104	588,502,278	63	1,144,000,000	63	102,261,517	100	13,662,704	100	20,691,724	100	51,652,390	100	1,674,640	100	87,681,458	158.73	85.74	204	588,502,278	323.81	49.29	
2.16.03.2.02.02.		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	120,000,000	1	365,987,480	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	365,987,480	100.00	304.99	
2.16.03.2.02.03.		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	105,000,000	1	20,100,100	1	105,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20,100,100	100.00	19.14	
2.16.03.2.02.04.		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	4	150,000,000	0	0	4	100,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	5	100,000,000	0	0	5	100,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.06.		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	1	60,000,000	0	0	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.07.		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	120,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.08.		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	115,000,000	0	0	2	115,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.09.		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.10.		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	6	24,000,000	0	0	6	24,000,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.11.		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.12.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	100,000,000	1	202,414,698	1	100,000,000	1	102,261,517	0	13,662,704	0	20,691,724	1	51,652,390	0	1,674,640	1	87,681,458	100.00	85.74	2	202,414,698	200.00	202.41	
2.20.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																											
2.20.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persen	81	390,000,000	11.03	85,215,648	81	350,000,000	81	57,649,585	11.37	1,951,691	33.73	12,505,414	33.73	9,186,114	78.43	19,202,450	78	42,845,669	96.83	74.32	89.46	85,215,648	110.44	21.85	
2.20.02.2.01.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	Data	255	390,000,000	11.03	85,215,648	255	350,000,000	255	57,649,585	29	1,951,691	86	12,505,414	86	9,186,114	200	19,202,450	200	42,845,669	78.43	74.32	211.03	85,215,648	82.76	21.85	
2.20.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	60,000,000	11.03	85,215,648	2	40,000,000	2	57,649,585	0	1,951,691	0	12,505,414	0	9,186,114	4	19,202,450	4	42,845,669	200.00	74.32	15.03	85,215,648	751.50	142.03	Realisasi kinerja di TW IV
2.20.02.2.01.02.		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	30	50,000,000	0	0	30	40,000,000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.20.02.2.01.03.		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	80,000,000	0	0	1	70,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.20.02.2.01.04.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	20	100,000,000	0	0	20	100,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.20.02.2.01.05.		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.21.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																											
2.21.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	25	400,000,000	19.41	53,424,771	25	500,000,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	19.41	53,424,771	77.64	13.36	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		INFORMASI																											
2.21.02.2.01.		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	OPD	18	400,000,000	19.41	53,424,771	18	500,000,000	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	19.41	53,424,771	107.83	13.36			
2.21.02.2.01.01.		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	100,000,000	19.41	53,424,771	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	19.41	53,424,771	1,941.00	53.42			
2.21.02.2.01.02.		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.21.02.2.01.03.		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	18	100,000,000	0	0	18	100,000,000	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.21.02.2.01.04.		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.18.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																											
2.18.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.00	20,000,000	0	78.00	25,000,000	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	20,000,000	0	70	25,000,000	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20,000,000	0	3	25,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,803,988,000	0	11,535,995,130	85	7,087,228,081	85	6,886,715,601	100	1,305,543,954	100	1,576,634,232	100	1,293,930,883	100	1,851,077,914	100	6,027,186,983	117.65	87.52	100	11,535,995,130	117.65	169.55	
2.18.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,348,780,000	1	9,060,597,759	1	5,348,780,000	1	4,737,617,068	1	1,045,340,523	1	1,350,949,907	1	832,242,055	1	1,245,331,020	1	4,473,863,505	100.00	94.43	2	9,060,597,759	200.00	169.40	
2.18.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	5,348,780,000	34	9,060,597,759	34	5,348,780,000	34	4,737,617,068	33	1,045,340,523	33	1,350,949,907	33	832,242,055	35	1,245,331,020	35	4,473,863,505	102.94	94.43	69	9,060,597,759	202.94	169.40	
2.18.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi Daerah	Persen	92	45,000,000	100	0	92	16,248,081	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	0	108.70	0.00		
2.18.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	3	16,248,081	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	92	48,000,000	0	92	48,000,000	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	48,000,000	0	1	48,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	69	374,008,000	65	592,894,121	69	442,000,000	69	377,995,481	25	79,733,840	50	26,089,400	75	52,757,450	75	97,337,707	75	255,918,397	108.70	67.70	140	592,894,121	202.90	158.52	
2.18.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	1	59,925,000	1	10,000,000	1	45,178,000	1	4,478,000	1	11,142,000	1	15,304,000	1	14,051,000	1	44,975,000	100.00	99.55	2	59,925,000	200.00	1,198.50	
2.18.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18,000,000	1	90,569,314	1	60,000,000	1	47,697,822	1	28,871,000	0	0	1	9,757,300	1	8,227,500	1	46,855,800	100.00	98.23	2	90,569,314	200.00	503.16	
2.18.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12,000,000	1	8,445,000	1	12,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	8,445,000	100.00	70.38		
2.18.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,008,000	12	7,972,000	12	25,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	7,972,000	100.00	66.39		
2.18.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	45,000,000	2	43,482,350	2	90,000,000	2	37,596,909	2	12,729,400	0	0	2	4,462,150	2	11,469,800	2	28,661,350	100.00	76.23	4	43,482,350	200.00	96.63	
2.18.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	12,000,000	5	5,000,000	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	5,000,000	100.00	41.67		
2.18.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	40,000,000	1	6,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	40,000,000	100.00	66.67		
2.18.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	180,000,000	38	337,500,457	25	222,000,000	25	247,522,750	17	33,655,440	4	14,947,400	8	23,234,000	13	63,589,407	42	135,426,247	168.00	54.71	80	337,500,457	320.00	187.50	
2.18.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	40	5,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	190,000,000	0	347,256,000	65	403,000,000	65	473,248,000	64.5	4,478,000	64.5	9,328,000	65.3	34,450,000	65.3	299,000,000	65	347,256,000	100.46	73.38	65.3	347,256,000	100.46	182.77	
2.18.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	125,268,000	5	171,000,000	5	143,748,000	0	4,478,000	0	4,478,000	1	25,000,000	5	91,312,000	6	125,268,000	120.00	87.14	6	125,268,000	120.00	417.56	
2.18.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	221,988,000	5	182,000,000	5	296,500,000	0	0	0	4,850,000	1	9,450,000	6	207,688,000	7	221,988,000	140.00	74.87	7	221,988,000	140.00	221.99	
2.18.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Unit	5	20,000,000	0	0	5	35,000,000	5	33,000,000	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	20.00	0.00	1	0	20.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
1	2	3	4	4A																									16	
			Disediakan																											
2.18.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	668,200,000	80	1,158,428,601	80	669,200,000	80	689,135,052	25	141,383,271	50	164,990,725	75	162,675,791	75	175,351,237	75	644,401,024	93.75	93.51	155	1,158,428,601	193.75	173.37		
2.18.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	0	35,837,000	12	6,000,000	12	36,837,000	3	7,139,500	3	7,709,250	3	9,709,250	3	11,279,000	12	35,837,000	100.00	97.29	12	35,837,000	100.00	716.74		
2.18.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	70,000,000	3	97,813,553	3	70,000,000	3	68,000,000	3	13,025,053	3	8,333,103	3	15,018,169	3	14,312,827	3	50,689,152	100.00	74.54	6	97,813,553	200.00	139.73		
2.18.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	593,200,000	1	1,024,778,048	1	593,200,000	1	584,298,052	1	121,218,718	1	148,948,372	1	137,948,372	1	149,759,410	1	557,874,872	100.00	95.48	2	1,024,778,048	200.00	172.75		
2.18.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	69	130,000,000	0	376,818,649	69	160,000,000	69	608,720,000	46.15	34,608,320	80.77	25,276,200	100	211,805,587	100	34,057,950	100	305,748,057	144.93	50.23	100	376,818,649	144.93	289.86		
2.18.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	80,000,000	3	120,186,947	5	80,000,000	5	94,024,000	5	28,138,320	5	10,804,700	5	11,566,600	5	20,784,800	5	71,294,420	100.00	75.83	8	120,186,947	160.00	150.23		
2.18.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	4,940,000	5	10,000,000	5	24,000,000	2	1,470,000	3	1,000,000	0	0	2	2,470,000	7	4,940,000	140.00	20.58	7	4,940,000	140.00	49.40		
2.18.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	0	214,993,637	1	50,000,000	1	248,696,000	0	0	1	11,821,500	1	195,218,987	1	7,953,150	1	214,993,637	100.00	86.45	1	214,993,637	100.00	1,074.97		
2.18.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	20,000,000	12	36,698,065	15	20,000,000	15	242,000,000	5	5,000,000	5	1,650,000	5	5,020,000	5	2,850,000	20	14,520,000	133.33	6.00	32	36,698,065	213.33	183.49		
2.18.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persen	12.10	385,000,000	0	0	12.10	390,000,000	12.10	0	4.98	0	7.42	0	8.71	0	38.11	0	38	0	314.96	0.00	38.11	0	314.96	0.00		
2.18.02.2.01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.02.2.01.04.		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.02.2.02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi daerah kecamatan yang sudah dipetakan	Persen	40	285,000,000	0	0	40	300,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	42.86	0	43	0	107.15	0.00	42.86	0	107.15	0.00	Realisasi di TW.IV	
2.18.02.2.02.04.		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	285,000,000	0	0	1	300,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.03.		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Persen	15.22	594,240,081	22.92	89,583,213	15.22	444,240,000	15.22	127,973,630	61.02	3,405,530	83.05	6,105,395	83.05	20,160,302	89.83	22,652,302	90	52,323,529	590.21	40.89	112.75	89,583,213	740.80	15.08		
2.18.03.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang masuk	Investor	53	594,240,081	59	89,583,213	53	444,240,000	53	127,973,630	36	3,405,530	13	6,105,395	0	20,160,302	4	22,652,302	53	52,323,529	100.00	40.89	112	89,583,213	211.32	15.08		
2.18.03.2.01.02.		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	444,240,081	1	89,583,213	2	224,240,000	2	127,973,630	0	3,405,530	0	6,105,395	1	20,160,302	1	22,652,302	2	52,323,529	100.00	40.89	3	89,583,213	150.00	20.17		
2.18.03.2.01.03.		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	150,000,000	0	0	1	220,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.04.		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47	475,000,000	0	0	3.47	490,000,000	3.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.04.2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	Hari	1.8	475,000,000	1.81	0	1.8	490,000,000	1.8	0	1.19	0	1.17	0	1.42	0	1.58	0	2	0	87.78	0.00	3.39	0	188.33	0.00		
2.18.04.2.01.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.04.2.01.06.		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	500	250,000,000	0	0	500	250,000,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.04.2.01.07.		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	125	125,000,000	0	0	125	150,000,000	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.18.05.		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Persen	100	300,000,000	100	0	100	270,000,000	100	0	0	0	356.45	0	474.19	0	551.61	0	552	0	551.61	0.00	651.61	0	651.61	0.00		
2.18.05.2.01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan	12	300,000,000	12	0	12	270,000,000	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100.00	0.00	24	0	200.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
					5		6						7				8		9											10
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		16
		Daerah Kabupaten/Kota																												
2.18.05.2.01.04.		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	53	100,000,000		0	53	90,000,000	53	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.05.2.01.05.		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	53	100,000,000		0	53	90,000,000	53	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.05.2.01.06.		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	53	100,000,000		0	53	90,000,000	53	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	Sistem	100	100,000,000	100	0	100	90,000,000	100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00		
2.18.06.2.01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	12	100,000,000	12	0	12	90,000,000	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100.00	0.00	24	0	200.00	0.00		
2.18.06.2.01.02.		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12	100,000,000		0	12	90,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemuda dan Olahraga																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	Rp	6	Rp	7	k	Rp Renja	k	Rp DPA	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=8+9+10+11	Rp	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.19.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																											
2.19.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	64.50	130,000,000	57.47	42,345,187	64.50	130,000,000	64.50	33,582,200	63.7	2,130,800	63.7	0	63.7	15,381,499	63.7	6,361,000	111	23,873,299	110.84	71.09	98.76	42,345,187	98.75	32.57	CAPAIAN= REALISASI : TARGET
2.19.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	130,000,000	89.1	42,345,187	70	130,000,000	70	33,582,200	63.7	2,130,800	76	0	63.7	15,381,499	63.7	6,361,000	64	23,873,299	63.70	71.09	63.7	42,345,187	63.70	32.57	
2.19.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	80,000,000	0	0	4	80,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	0	42,345,187	3	50,000,000	3	33,582,200	3	2,130,800	0	0	0	15,381,499	0	6,361,000	3	23,873,299	3.00	71.09	3	42,345,187	3.00	84.69	
2.19.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,549,812,000	85	10,379,841,743	85	5,843,124,426	85	5,936,541,073	75	1,388,233,403	75	1,562,544,613	75	1,076,044,255	75	1,456,082,696	75	5,482,904,967	88.24	92.36	160	10,379,841,743	188.24	187.03	
2.19.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,373,390,000	1	7,664,060,132	1	4,373,390,000	1	4,190,591,241	1	914,376,714	1	1,200,485,260	1	681,932,213	1	1,147,498,762	1	3,944,292,949	100.00	94.12	2	7,664,060,132	200.00	175.24	
2.19.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4,373,390,000	32	7,664,060,132	32	4,373,390,000	32	4,190,591,241	30	914,376,714	30	1,200,485,260	30	681,932,213	30	1,147,498,762	30	3,944,292,949	93.75	94.12	62	7,664,060,132	193.75	175.24	
2.19.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi Daerah	Persen	95	45,000,000	0	5,280,161	95	45,000,000	95	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2.11	0.00	2	5,280,161	2.11	11.73	
2.19.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	5,280,161	3	45,000,000	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	66.67	0.00	2	5,280,161	66.67	11.73	
2.19.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	63	482,660,000	100	1,026,307,433	63	432,972,426	63	585,071,500	25	295,487,250	50	38,615,521	75	65,124,333	100	58,333,225	75	457,560,329	119.05	78.21	175	1,026,307,433	277.78	212.64	
2.19.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	100,000,000	10	479,123,400	6	45,000,000	6	265,724,500	3	250,724,500	0	0	0	0	1	13,000,000	4	263,724,500	66.67	99.25	14	479,123,400	233.33	479.12	
2.19.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	35,000,000	65	68,913,112	10	30,000,000	10	23,827,000	1	3,920,550	1	0	1	7,939,319	1	7,452,875	4	19,312,744	40.00	81.05	69	68,913,112	690.00	196.89	
2.19.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	527	13,000,000	6	11,484,000	527	13,000,000	527	7,545,000	1	2,816,000	1	372,000	0	0	1	1,696,000	3	4,884,000	0.57	64.73	9	11,484,000	1.71	88.34	
2.19.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25000	25,000,000	12	62,951,750	25000	25,000,000	25000	17,500,000	1	1,645,000	3	9,520,000	2	1,740,000	1	4,594,950	7	17,499,950	0.03	100.00	19	62,951,750	0.08	251.81	
2.19.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	10,250,000	12	17,390,000	36	10,250,000	36	7,500,000	0	0	35	7,490,000	0	0	0	0	35	7,490,000	97.22	99.87	47	17,390,000	130.56	169.66	
2.19.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	46	39,886,000	12	30,000,000	12	21,950,000	2	8,056,000	2	0	3	8,123,000	3	5,726,000	10	21,905,000	83.33	99.79	56	39,886,000	466.67	113.96	
2.19.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	234,410,000	40	335,818,171	44	249,722,426	44	236,020,000	9	28,325,200	15	21,233,521	6	47,322,014	8	25,863,400	38	122,744,135	86.36	52.01	78	335,818,171	177.27	143.26	
2.19.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	13	10,741,000	40	30,000,000	40	5,005,000	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5.00	0.00	15	10,741,000	37.50	35.80	
2.19.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Unit	2	140,000,000	413	192,918,308	2	498,000,000	2	198,347,500	50	0	50	89,000,000	50	103,918,308	50	0	50	192,918,308	2,500.00	97.26	463	192,918,308	23,150.00	137.80	
2.19.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	5,000,000	0	0	2	335,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35,000,000	0	192,918,308	5	78,000,000	5	198,347,500	0	0	5	89,000,000	10	103,918,308	1	0	16	192,918,308	320.00	97.26	16	192,918,308	320.00	551.20	
2.19.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100,000,000	0	0	1	85,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	426,262,000	101	1,244,378,837	80	411,262,000	80	814,481,832	25	159,059,439	50	211,468,832	75	197,224,649	100	228,711,109	75	796,464,029	93.75	97.79	176	1,244,378,837	220.00	291.93	
2.19.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	525	5,250,000	12	23,139,500	525	5,250,000	525	19,961,000	0	0	2	7,600,000	2	7,539,500	0	1,000,000	4	16,139,500	0.76	80.86	16	23,139,500	3.05	440.75	
2.19.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	100,000,000	4	58,903,664	2	85,000,000	2	43,205,832	3	6,736,140	3	7,760,640	3	8,076,957	3	10,481,999	12	33,055,736	600.00	76.51	16	58,903,664	800.00	58.90	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																										16	
2.19.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	321,012,000	34	1,162,335,673	16	321,012,000	16	751,315,000	34	152,323,299	34	196,108,192	34	181,608,192	34	217,229,110	136	747,268,793	850.00	99.46	170	1,162,335,673	1,062.50	362.08			
2.19.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	82,500,000	100	246,896,872	75	82,500,000	75	148,049,000	12.5	19,310,000	12.5	22,975,000	12.5	27,844,752	12.5	21,539,600	13	91,669,352	16.67	61.92	112.5	246,896,872	150.00	299.27			
2.19.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	37,250,000	12	110,162,572	2	37,250,000	2	68,049,000	1	12,300,000	1	16,175,000	1	20,719,752	1	17,404,600	4	66,599,352	200.00	97.87	16	110,162,572	800.00	295.74			
2.19.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0	2	0		0		0		0	2	0	40.00	0.00	2	0	40.00	0.00			
2.19.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	15,250,000	19	136,734,300	4	15,250,000	4	80,000,000	0	7,010,000	0	6,800,000	0	7,125,000	0	4,135,000	0	25,070,000	0.00	31.34	19	136,734,300	475.00	896.62			
2.19.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	70	300,000,000	61	70,491,718,928	70	550,000,000	70	1,091,778,140	47	40,000,000	47	235,351,528	47	174,885,000	47	101,261,000	47	551,497,528	67.14	50.51	108	70,491,718,928	154.29	23,497.24			
2.19.02.2.01.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan	1	10,000,000	1	0	1	10,000,000	1	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	10,000.00	0.00	101	0	10,100.00	0.00			
2.19.02.2.01.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	1	100,000,000	1	431,526,514	1	215,000,000	1	727,000,840	0	0	100	211,958,514	100	19,668,000	100	99,900,000	100	331,526,514	10,000.00	45.60	101	431,526,514	10,100.00	431.53			
2.19.02.2.01.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	70	90,000,000	1	77,571,400	70	225,000,000	70	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	142.86	0.00	101	77,571,400	144.29	86.19			
2.19.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	10	50,000,000	300	131,826,514	10	150,000,000	10	227,000,840	0	0	0	12,158,514	0	19,668,000	25	0	25	31,826,514	250.00	14.02	325	131,826,514	3,250.00	263.65			
2.19.02.2.01.04.		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	10	90,000,000	20	77,571,400	10	225,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	20	77,571,400	200.00	86.19			
2.19.02.2.01.05.		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.19.02.2.01.06.		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	50,000,000	0	299,700,000	1	65,000,000	1	500,000,000	0	0	1	199,800,000	0	0	1	99,900,000	2	299,700,000	200.00	59.94	2	299,700,000	200.00	599.40			
2.19.02.2.02.		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Persen	80	100,000,000	60	69,982,621,014	80	100,000,000	80	364,777,300	0	40,000,000	100	23,393,014	100	155,217,000	100	1,361,000	100	219,971,014	125.00	60.30	160	69,982,621,014	200.00	69,982.62			
2.19.02.2.02.02.		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	11	100,000,000	11	69,982,621,014	11	100,000,000	11	364,777,300	3	40,000,000	3	23,393,014	3	155,217,000	3	1,361,000	12	219,971,014	109.09	60.30	23	69,982,621,014	209.09	69,982.62			
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50	150,000,000	0	0	50	120,000,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.19.03.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	Atlet	70	150,000,000	0	0	70	120,000,000	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.19.03.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	15	150,000,000	0	0	15	120,000,000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	88	1,210,590,000	68	864,012,752,717	88	1,605,000,000	88	1,583,002,700	0	13,482,374	4	149,598,295	4	29,253,498	4	277,961,550	4	470,295,717	4.55	29.71	72	864,012,752,717	81.82	71,371.21			
2.19.03.2.02.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	Event	2	230,000,000	2	105,342,498	2	480,000,000	2	796,890,700	2	0	0	7,184,192	7	3,690,406	2	94,467,900	9	105,342,498	450.00	13.22	11	105,342,498	550.00	45.80			
2.19.03.2.02.01.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/kota	Dokumen	1	130,000,000	0	105,342,498	1	380,000,000	1	796,890,700	0	0	0	7,184,192	7	3,690,406	2	94,467,900	9	105,342,498	900.00	13.22	9	105,342,498	900.00	81.03			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.19.03.2.02.02.		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	78	100,000,000	78	38,256,333,493	78	100,000,000	78	88,965,000	78	0	78	15,500,289	79	1,802,454	79	4,999,750	79	22,302,493	101.28	25.07	157	38,256,333,493	201.28	38,256.33	Masih belum ada kategori penentuan pelatih di satuan pendidikan.
2.19.03.2.03.02.		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	4	100,000,000	0	38,256,333,493	4	100,000,000	4	88,965,000	0	0	0	15,500,289	1	1,802,454	0	4,999,750	1	22,302,493	25.00	25.07	1	38,256,333,493	25.00	38,256.33	Pengiriman wasit bersertifikat berjumlah 1 orang, sementara di DPA target 10 orang. Masih tersisa 9 orang yang belum dikirim, tapi anggaran tidak mencukupi untuk dikirim semua.
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4	360,590,000	0	332,234,031,000	4	350,000,000	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25.00	0.00	1	332,234,031,000	25.00	92,136.23	
2.19.03.2.03.01.		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	7	150,000,000	95	332,234,031,000	7	100,000,000	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	95	332,234,031,000	1,357.14	221,489.35		
2.19.03.2.03.04.		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	50.00	0.00	4	0	50.00	0.00	
2.19.03.2.03.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	2	110,590,000	0	0	2	150,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.04.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persen	75	220,000,000	0	313,825,517,186	75	290,000,000	75	232,707,000	84	6,741,187	84	106,683,907	84	7,758,192	100	86,421,900	84	207,605,186	112.00	89.21	84	313,825,517,186	112.00	142,647.96	
2.19.03.2.04.02.		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	1	150,000,000	33	313,825,517,186	1	220,000,000	1	232,707,000	1	6,741,187	1	106,683,907	1	7,758,192	1	86,421,900	1	207,605,186	100.00	89.21	34	313,825,517,186	3,400.00	209,217.01	Pengembangan KONI
2.19.03.2.04.04.		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	14	70,000,000	0	0	14	70,000,000	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.05.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	75	300,000,000	1	179,591,528,540	75	385,000,000	75	464,440,000	60	6,741,187	100	20,229,907	100	16,002,446	100	92,072,000	100	135,045,540	133.33	29.08	101	179,591,528,540	134.67	59,863.84	
2.19.03.2.05.01.		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	1	100,000,000	1	179,591,528,540	1	200,000,000	1	464,440,000	0	6,741,187	0	20,229,907	0	16,002,446	1	92,072,000	1	135,045,540	100.00	29.08	2	179,591,528,540	200.00	179,591.53	
2.19.03.2.05.04.		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	50	100,000,000	0	0	50	100,000,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.05.05.		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	85,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	37.44	100,000,000	0	1,888,570,757,416	37.44	7,227,505,182	37.44	5,179,493,630	20.4	922,983,630	20.4	143,434,600	20.4	607,849,725	20.4	2,250,345,861	20	3,924,613,816	54.49	75.77	20.4	1,888,570,757,416	54.49	1,888,570.76	
2.19.03.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kondisi baik	Unit	158	100,000,000	20	1,888,570,757,416	158	7,227,505,182	158	5,179,493,630	163	922,983,630	163	143,434,600	164	607,849,725	164	2,250,345,861	164	3,924,613,816	103.80	75.77	184	1,888,570,757,416	116.46	1,888,570.76	
2.19.03.2.01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	4	100,000,000	20	1,888,570,757,416	4	7,227,505,182	4	5,179,493,630	5	922,983,630	0	143,434,600	1	607,849,725	14	2,250,345,861	20	3,924,613,816	500.00	75.77	40	1,888,570,757,416	1,000.00	1,888,570.76	
2.19.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	80	245,000,000	0	619,352,740,000	80	260,000,000	80	482,436,000	63.64	17,600,000	63.64	0	63.64	600,000	63.64	0	64	18,200,000	79.55	3.77	63.64	619,352,740,000	79.55	252,797.04	
2.19.04.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	70	245,000,000	0	619,352,740,000	70	260,000,000	70	482,436,000	83.33	17,600,000	83.33	0	83.33	600,000	83.33	0	80	18,200,000	114.33	3.77	80.03	619,352,740,000	114.33	252,797.04	
2.19.04.2.01.02.		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	50,000,000	16	132,134,435,000	1	50,000,000	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	300.00	0.00	19	132,134,435,000	1,900.00	264,268.87	
2.19.04.2.01.03.		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	10	0	200.00	0.00	10	0	200.00	0.00	
2.19.04.2.01.05.		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	45,000,000	0	0	1	45,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.04.2.01.07.		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	50,000,000	2	84,699,550,000	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	84,699,550,000	200.00	169,399.10		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.19.04.2.01.08.		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	10	50,000,000	50	402,518,755,000	10	65,000,000	10	482,436,000	15	17,600,000	15	0	0	600,000	0	0	30	18,200,000	300.00	3.77	80	402,518,755,000	800.00	805,037.51	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100																	
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.23.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																											
2.23.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	83.50	58,663,200	56.5	12,270,596	83.50	58,663,200	83.50	40,486,422	56.5	1,439,301	56.5	650,597	67.66	2,521,800	0	5,569,000	68	10,180,698	81.03	25.15	124.16	12,270,596	148.69	20.92	
2.23.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	58,663,200	80	12,270,596	85	58,663,200	85	40,486,422	80	1,439,301	80	650,597	80	2,521,800	80	5,569,000	80	10,180,698	94.12	25.15	160	12,270,596	188.24	20.92	
2.23.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58,663,200	2	12,270,596	2	58,663,200	2	40,486,422	1	1,439,301	0	650,597	0	2,521,800	1	5,569,000	2	10,180,698	100.00	25.15	4	12,270,596	200.00	20.92	
2.23.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,085,619,121	80	6,115,286,230	85	6,030,619,121	85	5,062,826,609	80	935,656,653	80	1,203,524,032	80	874,569,868	0	1,024,072,159	80	4,037,822,712	94.12	79.75	160	6,115,286,230	188.24	100.49	
2.23.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,227,870,121	2	4,707,220,030	1	3,227,870,121	1	3,377,287,747	1	734,988,924	1	938,958,198	1	598,600,314	0	864,723,289	2	3,137,270,725	200.00	92.89	4	4,707,220,030	400.00	145.83	
2.23.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3,227,870,121	27	4,707,220,030	30	3,227,870,121	30	3,377,287,747	24	734,988,924	24	938,958,198	27	598,600,314	28	864,723,289	28	3,137,270,725	93.33	92.89	55	4,707,220,030	183.33	145.83	
2.23.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	93,000,000	88	6,812,148	95	93,000,000	95	11,838,984	88	973,164	88	1,459,746	92.63	1,459,746	0	486,582	93	4,379,238	97.51	36.99	180.63	6,812,148	190.14	7.32	
2.23.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	28,000,000		0	65	28,000,000	65	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	42,000,000	0	6,812,148	24	42,000,000	24	11,838,984	0	973,164	0	1,459,746	0	1,459,746	0	486,582	0	4,379,238	0.00	36.99	0	6,812,148	0.00	16.22	
2.23.01.2.05.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	23,000,000		0	150	23,000,000	150	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	493,712,000	75	169,270,554	75	493,712,000	75	286,285,286	25	19,454,560	50	28,633,514	75	37,674,000	0	35,420,406	75	121,182,480	100.00	42.33	150	169,270,554	200.00	34.29	
2.23.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17,000,000	6	36,859,620	1	17,000,000	1	42,894,000	1	6,560,560	1	6,598,500	1	6,142,500	0	4,399,000	1	23,700,560	100.00	55.25	7	36,859,620	700.00	216.82	
2.23.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	44,000,000	10	20,000,000	5	44,000,000	5	28,580,000	2	0	3	0	5	20,000,000	0	0	10	20,000,000	200.00	69.98	20	20,000,000	400.00	45.45	
2.23.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1363	75,000,000	1300	6,272,500	1363	75,000,000	1363	8,368,000	175	2,076,000	225	0	900	822,500	0	1,298,000	1,300	4,196,500	95.38	50.15	2600	6,272,500	190.76	8.36	
2.23.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	54,712,000	15	11,505,000	2	54,712,000	2	11,910,000	3	1,995,000	6	2,800,000	6	1,915,000	0	0	15	6,710,000	750.00	56.34	30	11,505,000	1,500.00	21.03	
2.23.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	70,000,000		0	15	70,000,000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	40.00	0.00	13	0	86.67	0.00	
2.23.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	44,000,000	20	31,930,000	12	44,000,000	12	39,330,946	5	4,098,000	7	4,460,000	8	4,854,000	0	9,960,000	20	23,372,000	166.67	59.42	40	31,930,000	333.33	72.57	
2.23.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	33	100,000,000	50	49,503,434	33	100,000,000	33	147,977,340	5	0	20	12,900,014	25	3,940,000	0	19,763,406	50	36,603,420	151.52	24.74	100	49,503,434	303.03	49.50	
2.23.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	57,000,000	40	13,200,000	40	57,000,000	40	7,225,000	15	4,725,000	25	1,875,000	0	0	0	0	40	6,600,000	100.00	91.35	80	13,200,000	200.00	23.16	
2.23.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	300	32,000,000		0	300	32,000,000	300	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	Persen	75	115,090,000	75	21,675,000	75	110,090,000	75	281,800,000	0	0	0	0	75	21,675,000	0	0	75	21,675,000	100.00	7.69	150	21,675,000	200.00	18.83	
2.23.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	115,090,000	19	21,675,000	6	110,090,000	6	281,800,000	0	0	0	0	19	21,675,000	0	0	19	21,675,000	316.67	7.69	38	21,675,000	633.33	18.83	
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Persen	75	59,100,000	75	0	75	14,100,000	75	4,800,000	0	0	0	0	75	0	0	0	75	0	100.00	0.00	150	0	200.00	0.00	
2.23.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	59,100,000	6	0	3	14,100,000	3	4,800,000	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	200.00	0.00	12	0	400.00	0.00	
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	545,000,000	60	0	80	545,000,000	80	63,663,000	20	0	20	0	20	0	0	0	60	0	75.00	0.00	120	0	150.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.23.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	445,000,000	0	0	1	445,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	90,000,000	9	0	4	90,000,000	4	63,663,000	3	0	3	0	3	0	0	0	9	0	225.00	0.00	18	0	450.00	0.00	
2.23.01.2.07.11.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.23.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,359,300,000	56	1,068,641,789	80	1,359,300,000	80	836,214,540	10	161,702,866	16	218,440,811	30	194,629,745	0	120,444,040	56	695,217,462	70.00	83.14	112	1,068,641,789	140.00	78.62	
2.23.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	85,000,000	8	57,727,250	4	85,000,000	4	43,615,000	2	10,503,750	2	10,568,750	2	8,358,750	0	7,223,500	6	36,654,750	150.00	84.04	14	57,727,250	350.00	67.91	
2.23.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	85,000,000	4	71,300,971	2	85,000,000	2	75,300,000	2	13,692,972	2	14,884,533	0	16,348,355	0	4,516,956	4	49,442,816	200.00	65.66	8	71,300,971	400.00	83.88	
2.23.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,189,300,000	4	939,613,568	1	1,189,300,000	1	717,299,540	1	137,506,144	1	192,987,528	2	169,922,640	0	108,703,584	4	609,119,896	400.00	84.92	8	939,613,568	800.00	79.01	
2.23.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	Unit	7	55,000,000		0	7	55,000,000	7	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.23.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	55,000,000		0	7	55,000,000	7	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.23.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	137,547,000	60	141,666,709	75	132,547,000	75	200,937,052	50	18,537,139	85	16,031,763	100	20,531,063	0	2,997,842	100	58,097,807	133.33	28.91	160	141,666,709	213.33	103.00	
2.23.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30,560,000	4	59,887,409	2	30,560,000	2	95,137,052	2	11,602,139	2	9,731,763	0	15,221,763	0	2,997,842	4	39,553,507	200.00	41.58	8	59,887,409	400.00	195.97	
2.23.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115	56,449,000	15	31,779,300	115	56,449,000	115	55,800,000	8	6,935,000	7	6,300,000	0	5,309,300	0	0	15	18,544,300	13.04	33.23	30	31,779,300	26.09	56.30	
2.23.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	50,538,000	1	50,000,000	8	45,538,000	8	50,000,000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	12.50	0.00	2	50,000,000	25.00	98.94	
2.23.02.		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Nilai	76	294,000,000	82.87	199,292,499	76	608,860,000	76	631,445,428	0	19,361,666	71.89	38,096,849	0	70,273,803	82.45	13,501,666	84	141,233,984	110.43	22.37	166.8	199,292,499	219.47	67.79	
2.23.02.2.01.		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	22.000	196,000,000	3.835	93,854,200	22.000	510,860,000	22.000	493,233,440	3.835	11,160,500	6605	29,066,850	10.157	5,052,500	14.185	7,747,000	65	53,026,850	295.45	10.75	68.835	93,854,200	312.89	47.88	
2.23.02.2.01.01.		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	5	45,000,000		0	5	30,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.23.02.2.01.02.		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	55	34,000,000	151	89,959,700	55	363,860,000	55	480,433,440	151	11,160,500	9	28,466,850	42	5,052,500	0	5,052,500	367	49,732,350	667.76	10.35	518.27	89,959,700	942.31	264.59	
2.23.02.2.01.04.		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	1	40,000,000	5	3,894,500	1	40,000,000	1	12,800,000	1	0	2	600,000	2	0	5	2,694,500	500	3,294,500	50,000.00	25.74	505	3,894,500	50,500.00	9.74	
2.23.02.2.01.06.		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	8	32,000,000		0	8	32,000,000	8	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.23.02.2.01.09.		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500	45,000,000	0	0	1500	45,000,000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	80.00	0.00	1,106	0	73.73	0.00	
2.23.02.2.02.		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	Kegiatan	11	98,000,000	15	105,438,299	11	98,000,000	11	138,211,988	15	8,201,166	15	9,029,999	15	65,221,303	12	5,754,666	15	88,207,134	136.36	63.82	30	105,438,299	272.73	107.59	
2.23.02.2.02.01.		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	1	25,000,000		0	1	25,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.23.02.2.02.03.		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	2	27,000,000		0	2	27,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.23.02.2.02.04.		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	8	46,000,000	7	105,438,299	8	46,000,000	8	138,211,988	1	8,201,166	3	9,029,999	3	65,221,303	0	5,754,666	88	88,207,134	1,093.75	63.82	94.5	105,438,299	1,181.25	229.21	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
2.24.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																											
2.24.02.		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Persen	70	439,750,000	25	175,370,620	70	590,750,000	70	194,156,754	0	18,626,444	0	18,630,416	0	34,952,000	33.33	65,904,900	60	138,113,760	85.71	71.14	85	175,370,620	121.43	39.88	
2.24.02.2.01.		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis	OPD	46	230,750,000	35	175,370,620	46	325,750,000	46	194,156,754	0	18,626,444	0	18,630,416	16	34,952,000	16	65,904,900	60	138,113,760	130.43	71.14	95	175,370,620	206.52	76.00	
2.24.02.2.01.01.		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	46	85,750,000	35	76,676,870	46	85,750,000	46	90,396,754	0	8,276,444	0	8,824,416	0	2,052,000	3	40,423,150	50	59,576,010	108.70	65.91	85	76,676,870	184.78	89.42	
2.24.02.2.01.02.		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	138	95,000,000		0	138	190,000,000	138	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.01.03.		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	31	50,000,000	11	98,693,750	31	50,000,000	31	103,760,000	0	10,350,000	11	9,806,000	0	32,900,000	5	25,481,750	35	78,537,750	114.45	75.69	46.48	98,693,750	149.94	197.39	
2.24.02.2.02.		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip statis	OPD	23	63,000,000		0	23	63,000,000	23	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.02.		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip statis	OPD	28	56,000,000		0	28	112,000,000	28	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.02.01.		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	125	56,000,000		0	125	112,000,000	125	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.02.02.		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	123	63,000,000		0	123	63,000,000	123	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.03.		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	OPD	46	90,000,000		0	46	90,000,000	46	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.03.01.		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	45,000,000		0	10	45,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.03.02.		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	250	45,000,000		0	250	45,000,000	250	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	Persen	30	182,000,000		0	30	214,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.01.		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah OPD yang melakukan Pemusnahan Arsip	OPD	15	92,000,000		0	15	92,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.01.01.		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	15	47,000,000		0	15	47,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.01.02.		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	15	45,000,000		0	15	45,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.02.		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	OPD	46	60,000,000		0	46	60,000,000	46	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.02.01.		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	46	25,000,000		0	46	25,000,000	46	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.02.02.		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	46	35,000,000		0	46	35,000,000	46	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.05.		Pencarian Arsip Statis Kabupaten / Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang ditemukan	Berkas	10	30,000,000		0	10	62,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.05.03.		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	1	30,000,000		0	1	62,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.25.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN																											
3.25.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77	100,000,000	80.71	45,640,853	77	100,000,000	77	52,100,000	0	1,302,835	0	8,121,501	77.75	1,156,335	0	15,349,221	78	25,929,892	100.97	49.77	158.46	45,640,853	205.79	45.64	
3.25.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Persen	77	100,000,000	80.71	45,640,853	77	100,000,000	77	52,100,000	0	1,302,835	0	8,121,501	77.75	1,156,335	0	15,349,221	78	25,929,892	100.97	49.77	158.46	45,640,853	205.79	45.64	
3.25.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	100,000,000	2	45,640,853	2	100,000,000	2	52,100,000	0	1,302,835	2	8,121,501	0	1,156,335	0	15,349,221	2	25,929,892	100.00	49.77	4	45,640,853	200.00	45.64	--
3.25.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,042,289,617	80.71	13,981,693,886	85	8,292,289,617	85	7,995,097,954	100	1,524,652,847	100	2,023,622,872	100	1,530,118,935	100	2,047,940,919	100	7,126,335,573	117.65	89.13	180.71	13,981,693,886	212.60	173.85	
3.25.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,401,924,317	1	10,134,602,669	1	5,401,924,317	1	5,498,263,804	1	1,203,416,752	1	1,544,253,047	1	881,334,075	1	1,520,187,858	1	5,149,191,732	100.00	93.65	2	10,134,602,669	200.00	187.61	
3.25.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48	5,401,924,317	41	10,134,602,669	48	5,401,924,317	48	5,498,263,804	41	1,203,416,752	41	1,544,253,047	42	881,334,075	42	1,520,187,858	42	5,149,191,732	87.50	93.65	83	10,134,602,669	172.92	187.61	--
3.25.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	86	220,000,000	0	0	86	220,000,000	86	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	110,000,000	0	0	8	110,000,000	8	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	110,000,000	0	0	8	110,000,000	8	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	100,000,000	0	0	95	100,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	80	708,093,100	94.17	1,252,382,996	80	708,093,100	80	761,286,850	25	86,784,151	50	173,708,222	75	78,326,548	100	137,099,712	100	475,918,633	125.00	62.52	194.17	1,252,382,996	242.71	176.87	
3.25.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	119,000,000	2	314,277,031	2	119,000,000	2	104,790,100	0	16,781,050	0	24,721,850	2	25,500,392	2	38,075,600	2	105,078,892	100.00	100.28	4	314,277,031	200.00	264.10	--
3.25.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	63,893,100	2	92,274,790	2	63,893,100	2	50,000,000	2	5,287,240	2	11,824,874	2	17,305,210	2	14,505,116	2	48,922,440	100.00	97.84	4	92,274,790	200.00	144.42	--
3.25.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	25,200,000	7	36,900,000	10	25,200,000	10	25,200,000	4	1,450,000	13	6,950,000	13	4,200,000	13	10,500,000	13	23,100,000	130.00	91.67	64	36,900,000	640.00	146.43	--
3.25.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	480,000,000	152	808,931,175	80	480,000,000	80	581,296,750	30	63,265,861	34	130,211,498	20	31,320,946	50	74,018,996	134	298,817,301	167.50	51.41	286	808,931,175	357.50	168.53	--
3.25.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	30	20,000,000		0	30	20,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	622,000,000	0	312,304,352	78	720,000,000	78	520,200,000	65.11	3,613,422	65.11	1,852,743	90.78	289,736,243	92.38	17,101,944	91	312,304,352	116.38	60.04	90.78	312,304,352	116.38	50.21	
3.25.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	212,000,000	0	55,910,000	15	218,000,000	15	57,400,000	0	0	0	0	13	55,910,000	0	0	8	55,910,000	53.33	97.40	8	55,910,000	53.33	26.37	--
3.25.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	360,000,000	0	193,084,352	20	402,500,000	20	388,800,000	0	3,613,422	0	1,852,743	15	170,516,243	12	17,101,944	27	193,084,352	135.00	49.66	27	193,084,352	135.00	53.63	--
3.25.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	0	63,310,000	1	47,000,000	1	74,000,000	0	0	0	0	1	63,310,000	0	0	1	63,310,000	100.00	85.55	1	63,310,000	100.00	253.24	--
3.25.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	25,000,000		0	1	52,500,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	77	737,272,200	96.49	1,770,189,565	77	737,272,200	77	949,254,233	25	212,791,683	50	248,805,301	75	223,883,610	100	246,281,643	100	931,762,237	129.87	98.16	196.49	1,770,189,565	255.18	240.10	
3.25.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	26,400,000	12	67,853,000	12	26,400,000	12	57,404,000	3	12,054,250	3	14,802,250	3	14,768,250	3	13,187,250	12	54,812,000	100.00	95.48	6	67,853,000	50.00	257.02	--
3.25.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15,000,000	12	62,972,500	12	15,000,000	12	8,888,750	3	0	3	147,000	3	0	3	1,253,500	12	1,400,500	100.00	15.76	6	62,972,500	50.00	419.82	--
3.25.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	38	695,872,200	34	1,639,364,065	38	695,872,200	38	882,961,483	40	200,737,433	40	233,856,051	40	209,115,360	40	231,840,893	40	875,549,737	105.26	99.16	74	1,639,364,065	194.74	235.58	--
3.25.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan	Persen	77	253,000,000	97.44	512,214,304	77	405,000,000	77	266,093,067	30.38	18,046,839	53.16	55,003,559	84.81	56,838,459	92.41	127,269,762	92	257,158,619	120.01	96.64	189.85	512,214,304	246.56	202.46	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
			perkantoran																										
3.25.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	190,000,000	37	429,760,304	48	190,000,000	48	222,093,067	17	17,646,839	17	43,403,559	34	48,498,459	34	106,005,762	34	215,554,619	70.83	97.06	71	429,760,304	147.92	226.19	--
3.25.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	15,000,000	0	21,665,000	98	15,000,000	98	24,000,000	7	400,000	25	11,600,000	33	8,340,000	38	1,325,000	38	21,665,000	38.78	90.27	38	21,665,000	38.78	144.43	--
3.25.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	48,000,000	2	60,789,000	2	200,000,000	2	20,000,000	0	0	0	0	0	0	1	19,939,000	1	19,939,000	50.00	99.70	3	60,789,000	150.00	126.64	--
3.25.03.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0.51	875,000,000	1.69	1,673,312,057	0.51	1,200,000,000	0.51	1,020,260,750	-83.28	62,868,680	-54.28	24,432,857	-25.6	20,358,750	0.51	176,851,216	1	284,511,503	100.00	27.89	2.2	1,673,312,057	431.37	191.24	--
3.25.03.2.01.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	135170.96	300,000,000	134874.54	1,388,800,554	135170.96	800,000,000	135170.96	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	134874.54	1,388,800,554	99.78	462.93	
3.25.03.2.01.03.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	3	300,000,000	3	1,388,800,554	3	800,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	3	1,388,800,554	100.00	462.93	
3.25.03.2.02.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	18.67	425,000,000	11.57	143,643,760	18.67	250,000,000	18.67	721,406,750	0	14,134,260	17.28	8,798,250	25.11	8,270,250	28.86	112,441,000	29	143,643,760	154.58	19.91	40.43	143,643,760	216.55	33.80	
3.25.03.2.02.02.		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	20	425,000,000	20	143,643,760	20	250,000,000	20	721,406,750	0	14,134,260	0	8,798,250	2	8,270,250	18	112,441,000	20	143,643,760	100.00	19.91	40	143,643,760	200.00	33.80	--
3.25.03.2.03.		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	0	150,000,000	0	140,867,743	0	150,000,000	0	298,854,000	0	48,734,420	0	15,634,607	0	12,088,500	1	64,410,216	1	140,867,743	0.00	47.14	1	140,867,743	0.00	93.91	
3.25.03.2.03.01.		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	Dokumen	1	150,000,000	0	140,867,743	1	150,000,000	1	298,854,000	0	48,734,420	0	15,634,607	1	12,088,500	0	64,410,216	1	140,867,743	100.00	47.14	1	140,867,743	100.00	93.91	--
3.25.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.33	908,790,711	5.41	3,519,461,835	1.33	2,517,581,422	1.33	1,658,106,180	-83.98	13,273,500	-50.12	40,351,925	-12.63	30,787,225	4.66	1,436,909,077	5	1,521,321,727	350.38	91.75	10.07	3,519,461,835	757.14	387.27	
3.25.04.2.02.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	14	150,000,000	25	30,175,946	14	50,000,000	14	17,980,000	3	4,055,750	10	6,083,625	19	6,083,625	21	0	21	16,223,000	150.00	90.23	46	30,175,946	328.57	20.12	
3.25.04.2.02.04.		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8	150,000,000	25	30,175,946	8	50,000,000	8	17,980,000	3	4,055,750	7	6,083,625	8	6,083,625	3	0	21	16,223,000	262.50	90.23	46	30,175,946	575.00	20.12	--
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	165,000,000	0	1,157,390,147	25000	758,790,711	25000	331,990,000	0	0	0	7,760,000	0	899,050	40000	298,337,766	40,000	306,996,816	160.00	92.47	40000	1,157,390,147	160.00	701.45	
3.25.04.2.04.02.		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	165,000,000	2	1,157,390,147	1	758,790,711	1	331,990,000	0	0	0	7,760,000	0	899,050	3	298,337,766	3	306,996,816	100.00	92.47	5	1,157,390,147	500.00	701.45	--
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4160.68	593,790,711	4264.11	2,331,895,742	4160.68	1,708,790,711	4160.68	1,308,136,180	657.67	9,217,750	1390.25	26,508,300	1539.75	23,804,550	709.55	1,138,571,311	4,297	1,198,101,911	103.28	91.59	8561.33	2,331,895,742	205.77	392.71	
3.25.04.2.04.01.		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200,000,000	0		1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.02.		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	193,790,711	2	1,157,390,147	3	758,790,711	3	331,990,000	0	0	0	7,760,000	0	899,050	3	298,337,766	3	306,996,816	100.00	92.47	5	1,157,390,147	166.67	597.24	--
3.25.04.2.04.03.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota	Unit	2	200,000,000	11	1,174,505,595	2	750,000,000	2	976,146,180	0	9,217,750	0	18,748,300	0	22,905,500	2	840,233,545	2	891,105,095	100.00	91.29	13	1,174,505,595	650.00	587.25	--
3.25.06.		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	2.00	700,000,000	28.15	249,299,943	2.00	700,000,000	2.00	9,039,700	-92.1	3,569,500	-70.26	3,569,500	-22.48	0	3.74	484,000	4	7,623,000	187.00	84.33	31.89	249,299,943	1,594.50	35.61	--
3.25.06.2.01.		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	Unit	2	100,000,000	0		2	100,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.01.01.		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	100,000,000	0		1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.02.		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	3.44	200,000,000	14.12	28,148,770	3.44	200,000,000	3.44	9,039,700	20	3,569,500	40	3,569,500	57.14	0	15.79	484,000	16	7,623,000	459.01	84.33	29.91	28,148,770	869.48	14.07	
3.25.06.2.02.01.		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	10	200,000,000	38	28,148,770	10	200,000,000	10	9,039,700	6	3,569,500	8	3,569,500	30	0	0	484,000	44	7,623,000	440.00	84.33	82	28,148,770	820.00	14.07	0
3.25.06.2.03.		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	6	400,000,000	2	221,151,173	6	400,000,000	6	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	2	221,151,173	33.33	55.29	
3.25.06.2.03.01.		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Ton	5593.53	100,000,000	0		5593.53	100,000,000	5593.53	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																										
3.25.06.2.03.02.		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	300,000,000	8	221,151,173	2	300,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	8	221,151,173	400.00	73.72	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.25.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN																											
3.25.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.33	195,000,000	63.56	291,303,121	1.33	195,000,000	1.33	180,000,000	-83.98	10,017,088	-50.12	21,953,000	-12.63	26,033,740	4.66	46,851,578	5	104,855,406	350.38	58.25	68.22	291,303,121	5,129.32	149.39	
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	195,000,000	30000	291,303,121	25000	195,000,000	25000	180,000,000	0	10,017,088	0	21,953,000	40000	26,033,740	0	46,851,578	40,000	104,855,406	160.00	58.25	70000	291,303,121	280.00	149.39	
3.25.04.2.04.03.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	195,000,000	2	291,303,121	2	195,000,000	2	180,000,000	0	10,017,088	3	21,953,000	0	26,033,740	0	46,851,578	3	104,855,406	150.00	58.25	5	291,303,121	250.00	149.39	--

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pariwisata																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.26.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																											
3.26.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	79.70	40,000,000	79.85	40,854,387	79.70	24,003,090	79.70	35,101,470	79.85	0	73	0	73	34,916,070	73	0	73	34,916,070	91.59	99.47	152.85	40,854,387	191.78	102.14	Permasalahan : Belum tersusunnya dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang berkualitas sesuai dengan standar. Sosusinya : menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang sesuai dengan standar
3.26.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	81	40,000,000	80	40,854,387	81	24,003,090	81	35,101,470	45.45	0	68.18	0	0	34,916,070	0	0	81	34,916,070	100.00	99.47	161	40,854,387	198.77	102.14	
3.26.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	40,000,000	3	40,854,387	3	24,003,090	3	35,101,470	1	0	2	0	0	34,916,070	0	0	3	34,916,070	100.00	99.47	6	40,854,387	200.00	102.14	-
3.26.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP	Persen	85	6,621,983,316	80	10,336,531,681	85	6,946,746,680	85	6,313,361,703	100	1,129,131,318	100	1,452,346,436	100	1,020,555,456	100	1,826,152,667	100	5,428,185,877	117.65	85.98	180	10,336,531,681	211.76	156.09	
3.26.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,593,360,000	1	8,023,812,053	1	3,173,338,680	1	4,430,872,930	1	952,801,182	1	1,207,757,011	1	592,241,547	1	1,314,857,296	1	4,067,657,036	100.00	91.80	2	8,023,812,053	200.00	174.68	
3.26.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	4,593,360,000	28	8,023,812,053	30	3,173,338,680	30	4,430,872,930	28	952,801,182	28	1,207,757,011	28	592,241,547	28	1,314,857,296	28	4,067,657,036	93.33	91.80	56	8,023,812,053	186.67	174.68	-
3.26.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	130,000,000	0	0	95	251,000,000	95	38,400,000	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	105.26	0.00	100	0	105.26	0.00	
3.26.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30,000,000	0	0	1	51,000,000	1	38,400,000	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	6,000.00	0.00	60	0	6,000.00	0.00	-
3.26.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100,000,000		0	10	200,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	798,623,316	98	907,447,055	75	1,736,808,000	75	798,923,160	25	50,605,891	50	97,879,307	75	210,573,479	0	217,463,354	75	576,522,031	100.00	72.16	173	907,447,055	230.67	113.63	
3.26.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150,000,000	1	21,073,000	1	100,000,000	1	38,000,000	0	0	1	1,028,000	1	20,045,000	0	0	1	21,073,000	100.00	55.46	2	21,073,000	200.00	14.05	-
3.26.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50,000,000	1	32,293,500	2	145,000,000	2	35,000,000	0	8,925,000	1	10,319,000	1	7,315,000	1	5,734,500	3	32,293,500	150.00	92.27	4	32,293,500	200.00	64.59	-
3.26.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	1	128,263,000	1	376,258,000	1	87,795,670	3	9,000,000	3	15,000,000	3	13,500,000	3	18,000,000	12	55,500,000	1,200.00	63.21	13	128,263,000	1,300.00	320.66	-
3.26.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	144,623,316	1	9,800,000	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	9,800,000	100.00	6.78		
3.26.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	97,000,000	2	28,483,200	2	70,000,000	2	40,708,000	1	11,810,000	1	5,027,200	1	4,151,200	1	7,494,800	4	28,483,200	200.00	69.97	6	28,483,200	300.00	29.36	-
3.26.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	27,000,000	21	18,700,000	2	50,000,000	2	16,000,000	0	0	21	2,700,000	27	5,800,000	25	5,000,000	27	13,500,000	1,350.00	84.38	48	18,700,000	2,400.00	69.26	-
3.26.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	260,000,000	71	654,149,355	60	850,550,000	60	554,719,490	26	20,870,891	43	63,805,107	61	154,762,279	93	171,549,054	167	410,987,331	278.33	74.09	238	654,149,355	396.67	251.60	-
3.26.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	14,685,000	40	45,000,000	40	26,700,000	0	0	0	0	4	5,000,000	1	9,685,000	5	14,685,000	12.50	55.00	5	14,685,000	12.50	48.95	Permasalahan : Terlalu tingginya target. Soslusi : Perlunya

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
																												perubahan pada target	
3.26.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	150,000,000	100	177,160,000	75	408,000,000	75	265,980,000	0	0	0	0	85	70,480,000	100	106,680,000	100	177,160,000	133.33	66.61	200	177,160,000	266.67	118.11	
3.26.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	72,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50,000,000	0	177,160,000	2	336,000,000	2	265,980,000	0	0	0	0	5	70,480,000	8	106,680,000	13	177,160,000	650.00	66.61	13	177,160,000	650.00	354.32	-
3.26.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	130,000,000	100	42,678,511	80	60,000,000	80	62,905,476	41	5,392,070	41	6,586,570	41	5,302,479	41	7,754,469	100	25,035,588	125.00	39.80	200	42,678,511	250.00	32.83	
3.26.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	15,000,000	50	11,080,000	10	10,000,000	10	12,905,476	3	1,000,000	3	2,000,000	3	1,300,000	3	3,000,000	12	7,300,000	120.00	56.57	62	11,080,000	620.00	73.87	-
3.26.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	115,000,000	2	31,598,511	2	50,000,000	2	50,000,000	2	4,392,070	2	4,586,570	2	4,002,479	2	4,754,469	2	17,735,588	100.00	35.47	4	31,598,511	200.00	27.48	-
3.26.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	650,000,000	100	976,768,620	80	1,017,600,000	80	506,780,137	30	98,638,175	30	116,138,548	30	106,138,551	30	113,138,548	100	434,053,822	125.00	85.65	200	976,768,620	250.00	150.27	
3.26.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	650,000,000	12	976,768,620	12	1,017,600,000	12	506,780,137	3	98,638,175	3	116,138,548	3	106,138,551	3	113,138,548	12	434,053,822	100.00	85.65	24	976,768,620	200.00	150.27	-
3.26.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	170,000,000	100	208,665,442	75	300,000,000	75	209,500,000	0	21,694,000	100	23,985,000	0	35,819,400	50	66,259,000	100	147,757,400	133.33	70.53	200	208,665,442	266.67	122.74	
3.26.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50,000,000	8	150,250,442	7	150,000,000	7	130,500,000	0	20,694,000	8	16,190,000	0	27,537,400	0	24,921,000	8	89,342,400	114.29	68.46	16	150,250,442	228.57	300.50	-
3.26.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	50,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	70,000,000	2	58,415,000	2	110,000,000	2	79,000,000	0	1,000,000	0	7,795,000	0	8,282,000	1	41,338,000	1	58,415,000	50.00	73.94	3	58,415,000	150.00	83.45	-
3.26.02.		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	5.18	2,380,000,000	2	352,426,196	5.18	2,960,380,000	5.18	366,977,000	0.83	0	0.83	0	2.5	15,022,000	1	243,463,000	7	258,485,000	127.41	70.44	8.6	352,426,196	166.02	14.81	
3.26.02.2.01.		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Daya Tarik	5	500,000,000	1	0	5	850,000,000	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	20.00	0.00	2	0	40.00	0.00	
3.26.02.2.01.05.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5	100,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.02.2.01.08.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	5	400,000,000	0	0	5	800,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.02.2.02.		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola	Kawasan	1	680,000,000	1	0	1	1,370,380,000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	100.00	0.00	2	0	200.00	0.00	
3.26.02.2.02.01.		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	480,000,000	0	0	1	870,380,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.02.2.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	1	100,000,000	0	0	1	400,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.02.2.02.08.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	5	100,000,000	0	0	5	100,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.02.2.03.		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Destinasi	5	600,000,000	1	352,426,196	5	540,000,000	5	366,977,000	0	0	0	0	2	15,022,000	2	243,463,000	2	258,485,000	40.00	70.44	3	352,426,196	60.00	58.74	
3.26.02.2.03.03.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	300,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.02.2.03.04.		Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	150,000,000	0	0	1	430,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.26.02.2.03.06.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	150,000,000	1	352,426,196	1	100,000,000	1	366,977,000	0	0	0	0	2	15,022,000	2	243,463,000	2	258,485,000	200.00	70.44	3	352,426,196	300.00	234.95	-
3.26.02.2.04.		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) yang ditetapkan	Jumlah Usaha	5	600,000,000	0	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
3.26.02.2.04.07.		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.02.2.04.10.		Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha	1	150,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.02.2.04.13.		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Unit Usaha	1	250,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.03.		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi	Persen	100	300,000,000	20	0	100	238,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	20	0	20.00	0.00	
3.26.03.2.01.		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Kali	3	300,000,000	0	0	3	238,000,000	3	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	133.33	0.00	4	0	133.33	0.00	
3.26.03.2.01.07.		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	5	300,000,000		0	5	238,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.03.		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Persen	70	800,000,000	20	350,424,000	70	1,036,000,000	70	239,329,000	15	27,100,000	15	8,400,000	20	76,975,000	30	73,725,000	80	186,200,000	114.29	77.80	100	350,424,000	142.86	43.80	
3.26.03.2.01.		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Event	1	800,000,000	0	350,424,000	1	1,036,000,000	1	239,329,000	0	27,100,000	1	8,400,000	1	76,975,000	2	73,725,000	4	186,200,000	400.00	77.80	4	350,424,000	400.00	43.80	
3.26.03.2.01.03.		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	200,000,000	10	350,424,000	2	264,000,000	2	239,329,000	11	27,100,000	0	8,400,000	5	76,975,000	2	73,725,000	18	186,200,000	900.00	77.80	28	350,424,000	1,400.00	175.21	-
3.26.03.2.01.04.		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	100,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.03.2.01.05.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.03.2.01.06.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	300,000,000		0	1	692,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kekayaan intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi	Persen	5	0		0	5	900,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi yang dikembangkan	Pelaku Usaha	12	0		0	12	900,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.12.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	0	0		0	0	900,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persen	60	1,200,000,000	200	0	60	1,500,000,000	60	0	0	0	35	0	175	0	0	0	210	0	350.00	0.00	410	0	683.33	0.00	
3.26.05.2.01.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina	Orang	94	700,000,000	200	0	94	760,877,000	94	0	0	0	40	0	200	0	0	0	240	0	255.32	0.00	440	0	468.09	0.00	
3.26.05.2.01.05.		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	2	250,000,000	1	0	2	200,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	0	50.00	0.00	
3.26.05.2.01.09.		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	30	450,000,000		0	30	200,877,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.01.10.		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	0		0	0	210,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.01.11.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0		0	0	150,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.02.		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Kembangkan	Orang	25	500,000,000		0	25	739,123,000	25	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.02.01.		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan	Orang	20	100,000,000		0	20	300,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I	II	III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
			Ekonomi Kreatif																										
3.26.05.2.02.02.		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	1	400,000,000		0	1	439,123,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.17.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																											
2.17.03.		PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Persen	15.63	75,000,000	42	0	15.63	150,000,000	15.63	0	0	0	41.42	0	41.42	0	41.42	0	41	0	265.00	0.00	83.42	0	533.72	0.00	
2.17.03.2.01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi berdasarkan kualitas RAT, volume usaha dan asset	Persen	10.84	75,000,000	13.69	0	10.84	150,000,000	10.84	0	0	0	10.65	0	10.65	0	10.65	0	11	0	98.25	0.00	24.34	0	224.54	0.00	
2.17.03.2.01.03.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	26	75,000,000		0	26	150,000,000	26	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.04.		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	29.51	250,000,000	33.33	56,069,822	29.51	250,000,000	29.51	50,000,000	0	833,334	25.71	1,250,001	25.71	44,722,134	25.71	2,566,668	26	49,372,137	87.12	98.74	59.04	56,069,822	200.07	22.43	terjadi penurunan jumlah koperasi aktif
2.17.04.2.01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	Koperasi	2	250,000,000	0	56,069,822	2	250,000,000	2	50,000,000	0	833,334	0	1,250,001	2	44,722,134	2	2,566,668	2	49,372,137	100.00	98.74	2	56,069,822	100.00	22.43	
2.17.04.2.01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	10	150,000,000	23	56,069,822	10	150,000,000	10	50,000,000	0	833,334	18	1,250,001	18	44,722,134	18	2,566,668	18	49,372,137	180.00	98.74	41	56,069,822	410.00	37.38	
2.17.04.2.01.03.		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	2	100,000,000		0	2	100,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.05.		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Persen	0	200,000,000		0	0	200,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.05.2.01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	Koperasi	20	200,000,000		0	20	200,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.05.2.01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	20	200,000,000		0	20	200,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.06.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	16.88	200,000,000		0	16.88	200,000,000	16.88	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.06.2.01.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelambagaan dan usaha	Koperasi	4	200,000,000		0	4	200,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.06.2.01.09.		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	4	200,000,000		0	4	200,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.07.		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirasaha	Persen	5.68	981,750,000	7.1	753,990,559	5.68	981,750,000	5.68	803,370,000	0	31,862,000	7.68	218,423,530	7.68	250,897,913	7.68	54,427,000	8	555,610,443	135.21	69.16	14.78	753,990,559	260.21	76.80	
2.17.07.2.01.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	UMKM	3094	981,750,000	3526	753,990,559	3094	981,750,000	3094	803,370,000	0	31,862,000	6947	218,423,530	6947	250,897,913	6947	54,427,000	6,947	555,610,443	224.53	69.16	10473	753,990,559	338.49	76.80	
2.17.07.2.01.02.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	2	581,750,000	103	411,618,980	2	581,750,000	2	369,370,000	0	16,265,500	8	203,923,530	8	73,579,050	8	36,427,000	8	330,195,080	400.00	89.39	111	411,618,980	5,550.00	70.76	
2.17.07.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2	200,000,000	26	342,371,579	2	200,000,000	2	434,000,000	0	15,596,500	0	14,500,000	20	177,318,863	0	18,000,000	20	225,415,363	1,000.00	51.94	46	342,371,579	2,300.00	171.19	
2.17.07.2.01.14.		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.08.		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Persen	48.76	230,000,000	37.5	0	48.76	410,000,000	48.76	0	0	0	31.63	0	31.63	0	31.63	0	32	0	64.87	0.00	69.13	0	141.78	0.00	jumlah umkm yang telah mendapat fasilitasi tidak sebanding dengan jumlah total keseluruhan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
																												umkm sebanyak 6964 unit	
2.17.08.2.01.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	UMKM	276	230,000,000	5	0	276	410,000,000	276	0	0	0	155	0	155	0	241	0	396	0	143.48	0.00	401	0	145.29	0.00	
2.17.08.2.01.06.		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	3	230,000,000		0	3	410,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											
3.30.02.		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Persen	2.30	200,000,000	33.33	14,629,400	2.30	340,000,000	2.30	4,770,000	0	569,250	0	569,250	27.11	569,250	27.11	1,949,600	27	3,657,350	1,178.70	76.67	60.44	14,629,400	2,627.83	7.31	
3.30.02.2.02.		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	Persen	81	100,000,000	100	14,629,400	81	190,000,000	81	4,770,000	0	569,250	0	569,250	66.66	569,250	66.66	1,949,600	67	3,657,350	82.30	76.67	166.66	14,629,400	205.75	14.63	
3.30.02.2.02.01.		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	100,000,000	3	14,629,400	1	190,000,000	1	4,770,000	0	569,250	0	569,250	1	569,250	0	1,949,600	1	3,657,350	100.00	76.67	4	14,629,400	400.00	14.63	
3.30.02.2.06.		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin	Pelaku Usaha	3	100,000,000		0	3	150,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.02.2.06.03.		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1	100,000,000		0	1	150,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.03.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	20.45	2,600,000,000	36.36	5,595,661,721	20.45	3,420,000,000	20.45	892,921,740	40.91	101,482,240	40.91	14,948,828	40.91	1,028,700	40.91	10,089,018	41	127,548,786	200.05	14.28	77.27	5,595,661,721	377.85	215.22	
3.30.03.2.01.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	Gedung	1	2,600,000,000	1	5,595,661,721	1	3,420,000,000	1	892,921,740	1	101,482,240	0	14,948,828	0	1,028,700	1	10,089,018	2	127,548,786	200.00	14.28	3	5,595,661,721	300.00	215.22	Realisasi di TW.IV
3.30.03.2.01.01.		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	2,500,000,000	1	5,595,661,721	1	3,060,000,000	1	892,921,740	1	101,482,240	0	14,948,828	0	1,028,700	0	10,089,018	1	127,548,786	100.00	14.28	2	5,595,661,721	200.00	223.83	Realisasi di TW.IV
3.30.03.2.01.02.		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	100,000,000		0	1	360,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.04.		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	2.06	850,000,000	3.17	346,041,021	2.06	850,000,000	2.06	228,493,746	0	28,510,255	0.19	42,825,023	0.19	49,820,940	0.19	59,958,149	0	181,114,367	9.22	79.96	3.36	346,041,021	163.11	40.71	
3.30.04.2.01.		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	Laporan	1	320,000,000	1	100,319,886	1	320,000,000	1	92,328,746	0	11,475,798	0	14,064,249	0	7,811,583	1	17,369,766	1	50,721,396	100.00	54.94	2	100,319,886	200.00	31.35	Realisasi di TW.IV
3.30.04.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	70,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.04.2.01.03.		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	250,000,000	1	100,319,886	1	250,000,000	1	92,328,746	0	11,475,798	0	14,064,249	0	7,811,583	1	17,369,766	1	50,721,396	100.00	54.94	2	100,319,886	200.00	40.13	Realisasi di TW.IV
3.30.04.2.02.		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting	Laporan	1	450,000,000	1	206,468,508	1	450,000,000	1	111,540,000	0	16,468,834	0	28,195,151	0	31,950,834	1	31,993,689	1	108,608,508	100.00	97.37	2	206,468,508	200.00	45.88	Realisasi di TW.IV
3.30.04.2.02.02.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	200,000,000	12	190,595,508	12	200,000,000	12	111,540,000	3	16,468,834	3	28,195,151	3	31,950,834	3	31,993,689	12	108,608,508	100.00	97.37	24	190,595,508	200.00	95.30	Realisasi di TW.IV
3.30.04.2.02.03.		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	250,000,000	1	15,873,000	1	250,000,000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100.00	0.00	2	15,873,000	200.00	6.35	
3.30.04.2.03.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	Persen	47	80,000,000	17.67	39,252,627	47	80,000,000	47	22,625,000	0	565,623	0	565,623	0	10,058,523	93.11	10,594,694	93	21,784,463	198.11	96.28	110.78	39,252,627	235.70	49.07	Realisasi di TW.IV
3.30.04.2.03.03.		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	80,000,000	1	39,252,627	1	80,000,000	1	22,625,000	0	565,623	0	565,623	1	10,058,523	1	10,594,694	1	21,784,463	100.00	96.28	2	39,252,627	200.00	49.07	Realisasi di TW.IV
3.30.05.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Persen	0.71	400,000,000	1.83	208,841,672	0.71	400,000,000	0.71	175,000,000	0	0	4.71	57,119,750	4.71	5,354,250	4.71	0	5	62,474,000	663.38	35.70	6.54	208,841,672	921.13	52.21	
3.30.05.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	Produk	2	400,000,000	2	208,841,672	2	400,000,000	2	175,000,000	0	0	3	57,119,750	3	5,354,250	3	0	3	62,474,000	150.00	35.70	5	208,841,672	250.00	52.21	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
3.30.05.2.01.02.		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	1	250,000,000	2	208,841,672	1	250,000,000	1	175,000,000	0	0	1	57,119,750	0	5,354,250	13	0	14	62,474,000	1,400.00	35.70	16	208,841,672	1,600.00	83.54	
3.30.05.2.01.05.		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	2	150,000,000	0	2	150,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.07.		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Persen	61	400,000,000	60	0	61	680,000,000	61	0	0	0	0	0	0	0	71.14	0	71	0	116.62	0.00	131.14	0	214.98	0.00	Realisasi di TW.IV
3.30.07.2.01.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	Produk	2	400,000,000	2	0	2	680,000,000	2	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	250.00	0.00	7	0	350.00	0.00	
3.30.07.2.01.04.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	15	150,000,000	0	15	110,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.07.2.01.05.		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1	100,000,000	0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.07.2.01.06.		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	1	150,000,000	0	1	370,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																											
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.50	20,000,000	77.45	6,309,000	77.50	20,000,000	77.50	3,440,000	0	0	77.45	0	62.45	2,812,000	0	0	62	2,812,000	80.58	81.74	139.9	6,309,000	180.52	31.55	
3.31.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75	20,000,000	77.45	6,309,000	75	20,000,000	75	3,440,000	0	0	77.45	0	0	2,812,000	0	0	77	2,812,000	103.27	81.74	154.9	6,309,000	206.53	31.55	
3.31.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	3	6,309,000	2	20,000,000	2	3,440,000	3	0	0	0	0	2,812,000	0	0	3	2,812,000	150.00	81.74	6	6,309,000	300.00	31.55	
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,860,490,000	85	10,395,665,143	85	7,306,490,000	85	6,145,327,901	100	1,232,941,518	100	1,550,715,868	100	933,437,017	0	1,606,245,746	100	5,323,340,149	117.65	86.62	185	10,395,665,143	217.65	151.53	
3.31.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,127,490,000	1	8,701,916,865	1	5,127,490,000	1	4,726,230,887	1	1,023,812,411	1	1,335,263,359	1	697,777,993	1	1,466,016,506	1	4,522,870,269	100.00	95.70	2	8,701,916,865	200.00	169.71	
3.31.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	5,127,490,000	31	8,701,916,865	31	5,127,490,000	31	4,726,230,887	31	1,023,812,411	31	1,335,263,359	31	697,777,993	31	1,466,016,506	31	4,522,870,269	100.00	95.70	62	8,701,916,865	200.00	169.71	
3.31.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	60,000,000	0	95	60,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	60,000,000	0	2	60,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	55,000,000	0	95	51,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	55	55,000,000	0	55	51,000,000	55	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	75	25,000,000	55.56	171,708,600	75	15,000,000	75	84,505,314	25	10,486,500	50	12,996,200	75	16,226,900	100	32,974,000	75	72,683,600	100.00	86.01	130.56	171,708,600	174.08	686.83	
3.31.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	1	171,708,600	1	15,000,000	1	84,505,314	1	10,486,500	1	12,996,200	1	16,226,900	1	32,974,000	1	72,683,600	100.00	86.01	2	171,708,600	200.00	686.83	
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	460,000,000	85	464,443,859	75	520,000,000	75	477,672,000	25	64,950,489	50	79,732,337	75	80,250,016	0	30,984,162	75	255,917,004	100.00	53.58	160	464,443,859	213.33	100.97	
3.31.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	1	12,722,000	1	10,000,000	1	5,196,000	1	1,489,000	1	0	1	2,226,000	0	0	1	3,715,000	100.00	71.50	2	12,722,000	200.00	127.22	
3.31.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	1	17,825,300	1	5,000,000	1	10,000,000	1	1,380,000	1	1,655,900	1	4,803,400	0	0	1	7,839,300	100.00	78.39	2	17,825,300	200.00	118.84	
3.31.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	1	41,597,950	1	25,000,000	1	41,204,000	1	6,994,000	1	5,387,800	1	11,777,000	0	2,939,150	1	27,097,950	100.00	65.77	2	41,597,950	200.00	166.39	
3.31.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	10,000,000	1	12,750,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	1,100,000	1	2,600,000	1	1,850,000	0	0	1	5,550,000	100.00	55.50	2	12,750,000	200.00	127.50	
3.31.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	20,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	25	370,000,000	62	379,548,609	25	420,000,000	25	411,272,000	25	53,987,489	17	70,088,637	16	59,593,616	0	28,045,012	58	211,714,754	232.00	51.48	120	379,548,609	480.00	102.58	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
		Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										
3.31.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	40	30,000,000	40	0		0		0		0		0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	85,000,000	80	14,675,500	65	120,000,000	65	64,200,000	0	2,096,500	0	6,289,500	50	4,193,000	0	2,096,500	50	14,675,500	76.92	22.86	130	14,675,500	200.00	17.27	
3.31.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	1	40,000,000	1	0		0		0		0		0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	45,000,000	0	14,675,500	2	80,000,000	2	64,200,000	0	2,096,500	0	6,289,500	0	4,193,000	0	2,096,500	0	14,675,500	0.00	22.86	0	14,675,500	0.00	32.61	
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Persen	75	265,000,000	75	50,275,000	75	550,000,000	75	219,700,000	25	0	50	0	75	10,575,000	0	39,700,000	75	50,275,000	100.00	22.88	150	50,275,000	200.00	18.97	
3.31.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	240,000,000	0	50,275,000	3	350,000,000	3	128,900,000	0	0	0	0	10,575,000	0	39,700,000	0	50,275,000	0.00	39.00	0	50,275,000	0.00	20.95		
3.31.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	0	0	1	200,000,000	1	90,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	563,000,000	80	830,330,319	80	563,000,000	80	413,621,500	25	99,075,718	50	108,838,372	75	98,897,008	0	30,617,878	75	337,428,976	93.75	81.58	155	830,330,319	193.75	147.48	
3.31.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7,000,000	12	30,054,500	1	7,000,000	1	30,821,500	3	6,185,000	3	8,281,500	3	9,987,500	0	2,096,500	9	26,550,500	900.00	86.14	21	30,054,500	2,100.00	429.35	
3.31.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	5,000,000	6	6,127,500	1	5,000,000	1	5,000,000	2	1,322,000	1	1,258,500	0	1,073,500	0	0	3	3,654,000	300.00	73.08	9	6,127,500	900.00	122.55	
3.31.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	551,000,000	12	794,148,319	12	551,000,000	12	377,800,000	3	91,568,718	3	99,298,372	3	87,836,008	0	28,521,378	9	307,224,476	75.00	81.32	21	794,148,319	175.00	144.13	
3.31.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	220,000,000	80	162,315,000	75	300,000,000	75	159,398,200	45.45	32,519,900	45.45	7,596,100	81.81	25,517,100	0	3,856,700	82	69,489,800	109.08	43.60	161.81	162,315,000	215.75	73.78	
3.31.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	70,000,000	16	98,741,200	4	70,000,000	4	59,000,000	2	22,600,000	2	3,976,000	4	17,000,000	0	700,000	8	44,276,000	200.00	75.04	24	98,741,200	600.00	141.06	
3.31.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	0	12,257,000	5	10,000,000	5	15,000,000	3	5,410,000	0	0	2	4,897,000	0	1,950,000	5	12,257,000	100.00	81.71	5	12,257,000	100.00	40.86	
3.31.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	51,316,800	1	50,000,000	1	85,398,200	0	4,509,900	0	3,620,100	0	3,620,100	0	1,206,700	0	12,956,800	0.00	15.17	1	51,316,800	100.00	102.63	
3.31.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70,000,000	0	0	1	170,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.02.		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Persen	1.61	2,170,000,000	2.38	12,248,239,821	1.61	3,010,000,000	1.61	14,698,958,280	0	12,700,809	0	765,938,084	2.38	2,948,252,419	4.76	8,521,348,509	5	12,248,239,821	295.65	83.33	7.14	12,248,239,821	443.48	564.44	prioritas sentra masih berada di kecamatan bunguran timur
3.31.02.2.01.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkan menjadi Perda	Persen	53.00	2,170,000,000	8	12,248,239,821	53.00	3,010,000,000	53.00	14,698,958,280	0	12,700,809	0	765,938,084	30	2,948,252,419	50	8,521,348,509	50	12,248,239,821	94.34	83.33	58	12,248,239,821	109.43	564.44	penyusunan ranperda sudah sampai pada evaluasi provinsi
3.31.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	100,000,000	0	1,778,498,741	1	100,000,000	1	4,114,000,000	0	12,700,809	0	765,938,084	0	173,799,657	1	826,060,191	1	1,778,498,741	100.00	43.23	1	1,778,498,741	100.00	1,778.50	
3.31.02.2.01.05.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	2,070,000,000	0	10,469,741,080	1	2,910,000,000	1	10,584,958,280	0	0	0	0	0	2,774,452,762	1	7,695,288,318	1	10,469,741,080	100.00	98.91	1	10,469,741,080	100.00	505.78	
3.31.03.		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Persen	57	100,000,000	26.98	0	57	100,000,000	57	0	0	0	0	0	43.25	0	43.25	0	43	0	75.88	0.00	70.23	0	123.21	0.00	
3.31.03.2.01.		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah izin yang dipantau dan dianalis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	15	100,000,000	68	0	15	100,000,000	15	0	0	0	0	0	109	0	109	0	109	0	726.67	0.00	177	0	1,180.00	0.00	
3.31.03.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
			Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat																										
3.31.04.		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	Persen	26.50	50,000,000	1.31	4,894,579	26.50	350,000,000	26.50	52,000,000	0	994,582	0	1,299,999	6.87	1,299,999	6.87	1,299,999	7	4,894,579	25.92	9.41	8.18	4,894,579	30.87	9.79	
3.31.04.2.01.		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	Database	1	50,000,000	1	4,894,579	1	350,000,000	1	52,000,000	0	994,582	0	1,299,999	0	1,299,999	1	1,299,999	1	4,894,579	100.00	9.41	2	4,894,579	200.00	9.79	Realisasi TW.IV
3.31.04.2.01.03.		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	50,000,000	0	4,894,579	1	350,000,000	1	52,000,000	0	994,582	0	1,299,999	0	1,299,999	1	1,299,999	1	4,894,579	100.00	9.41	1	4,894,579	100.00	9.79	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											
3.30.06.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	Persen	68.42	450,000,000	5.11	361,427,627	68.42	540,000,000	68.42	380,000,000	0	6,863,658	0	46,326,550	9.48	118,402,950	39.61	76,788,750	40	248,381,908	57.89	65.36	44.72	361,427,627	65.36	80.32	terjadi penurunan dikarenakan pelayanan metrologi hanya terpusah di pulau bunguran
3.30.06.2.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan	Persen	24	450,000,000	28.06	361,427,627	24	540,000,000	24	380,000,000	0	6,863,658	28.65	46,326,550	28.65	118,402,950	28.65	76,788,750	29	248,381,908	119.38	65.36	56.71	361,427,627	236.29	80.32	
3.30.06.2.01.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	255	250,000,000	337	361,427,627	255	340,000,000	255	380,000,000	0	6,863,658	40	46,326,550	12	118,402,950	47	76,788,750	99	248,381,908	38.82	65.36	436	361,427,627	170.98	144.57	Terjadi penurunan dikarenakan pelayanan metrologi hanya terpusat di pulau bunguran
3.30.06.2.01.02.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	20	100,000,000		0	20	100,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.30.06.2.01.03.		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	Angka	100	1,121,370,479	40	1,154,692,526	100	1,345,644,000	100	630,000,000	0	51,163,250	0	339,289,497	2.09	91,774,520	0	42,465,259	2	524,692,526	2.09	83.28	42.09	1,154,692,526	42.09	102.97	1. adanya perubahan metode mekanismen penilaian,. 2) Harus revisi target renstra menjadi titik awal 2.09
4.01.02.2.01.		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	90	1,121,370,479	40	1,154,692,526	90	1,345,644,000	90	630,000,000	0	51,163,250	0	339,289,497	33	91,774,520	0	42,465,259	33	524,692,526	36.67	83.28	73	1,154,692,526	81.11	102.97	
4.01.02.2.01.01.		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	499,616,717	0	398,507,903	1	395,644,000	1	237,106,500	0	14,810,250	0	98,343,914	0	19,269,500	1	32,871,239	1	165,294,903	100.00	69.71	1	398,507,903	100.00	79.76	Revisi target renstra menjadi 5 dokumen untuk 1 periode RPJM
4.01.02.2.01.02.		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	290,342,619	0	305,864,140	1	600,000,000	1	152,843,500	0	0	0	77,515,100	0	62,018,020	1	9,594,020	1	149,127,140	100.00	97.57	1	305,864,140	100.00	105.35	Revisi target renstra menjadi 5 dokumen untuk 1 periode RPJM
4.01.02.2.01.03.		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	331,411,143	0	450,320,483	1	350,000,000	1	240,050,000	0	36,353,000	0	163,430,483	1	10,487,000	1	0	2	210,270,483	200.00	87.59	2	450,320,483	200.00	135.88	Revisi target renstra menjadi 5 dokumen untuk 1 periode RPJM
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	81	682,458,434	0	621,242,714	81	682,450,000	81	750,000,000	38.54	54,344,913	0	208,758,533	0	190,850,243	0	167,289,025	39	621,242,714	47.58	82.83	38.54	621,242,714	47.58	91.03	Belum terpenuhi Bukti Dukung terkait indikator yang menjadi penilaian.
4.01.02.2.03.		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangan	Persen	72	682,458,434	0	621,242,714	72	682,450,000	72	750,000,000	0	54,344,913	0	208,758,533	71.4	190,850,243	228.57	167,289,025	300	621,242,714	416.63	82.83	299.97	621,242,714	416.63	91.03	Karena terdapat Peraturan Daerah tahun Sebelumnya yang diundangkan pada tahun bersangkutan
4.01.02.2.03.01.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	520	270,000,000	0	281,992,653	520	270,000,000	520	360,285,420	199	26,454,500	107	66,145,577	130	113,660,250	153	75,732,326	589	281,992,653	113.27	78.27	589	281,992,653	113.27	104.44	Tercapainya Target Produk Hukum yang Disusun
4.01.02.2.03.02.		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3	212,458,434	0	251,206,619	3	212,450,000	3	292,669,720	0	24,161,413	0	77,036,914	0	70,865,593	0	79,142,699	0	251,206,619	0.00	85.83	0	251,206,619	0.00	118.24	Tidak terdapat Kasus hukum yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
4.01.02.2.03.03.		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	425	200,000,000	0	88,043,442	425	200,000,000	425	97,044,860	167	3,729,000	99	65,576,042	123	6,324,400	36	12,414,000	425	88,043,442	100.00	90.72	425	88,043,442	100.00	44.02	Tercapainya Target Pendokumentasian PHD tahun 2023
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	Indeks	65	984,073,182	88.89	562,035,742	65	1,180,887,600	65	962,678,750	75.02	118,737,749	75.02	112,526,814	75.02	211,088,235	75.02	119,682,944	75	562,035,742	115.42	58.38	163.91	562,035,742	252.17	57.11	
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	Persen	100	586,773,182	83	315,935,720	100	775,311,600	100	558,663,620	50	86,877,992	75	49,505,200	80	94,229,328	100	85,323,200	100	315,935,720	100.00	56.55	183	315,935,720	183.00	53.84	
4.01.01.2.13.01.		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	384,073,182	1	146,465,792	2	447,431,600	2	255,984,381	0	53,292,492	1	26,389,000	1	51,780,300	0	15,004,000	2	146,465,792	100.00	57.22	3	146,465,792	150.00	38.13	
4.01.01.2.13.03.		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	150,000,000	1	74,479,014	1	209,204,000	1	168,937,909	0	2,250,000	0	11,550,500	0	22,447,014	1	38,231,500	1	74,479,014	100.00	44.09	2	74,479,014	200.00	49.65	realisasi di Tw.IV
4.01.01.2.13.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	52,700,000	1	94,990,914	1	118,676,000	1	133,741,330	1	31,335,500	0	11,565,700	0	20,002,014	0	32,087,700	1	94,990,914	100.00	71.03	2	94,990,914	200.00	180.25	
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	Persen	100	397,300,000	0	246,100,022	100	405,576,000	100	404,015,130	40	31,859,757	50	63,021,614	80	116,858,907	100	34,359,744	100	246,100,022	100.00	60.91	100	246,100,022	100.00	61.94	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	4A																										16			
4.01.01.2.13.02.		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	247,300,000	2	126,535,351	2	243,722,000	2	249,255,420	0	8,380,800	0	43,906,800	1	39,888,007	1	34,359,744	2	126,535,351	100.00	50.77	4	126,535,351	200.00	51.17					
4.01.01.2.13.04.		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	150,000,000	1	119,564,671	1	161,854,000	1	154,759,710	0	23,478,957	0	19,114,814	1	76,970,900	0	0	1	119,564,671	100.00	77.26	2	119,564,671	200.00	79.71					
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																															
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																															
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	Persen	3.13	523,559,924	0	277,201,172	3.13	523,556,000	3.13	570,000,000	0	39,418,862	0	144,135,524	0.29	60,891,887	0.29	32,754,899	0	277,201,172	9.27	48.63	0.29	277,201,172	9.27	52.95	Berdasarkan kewenangan yang ada, di kabupaten Natuna tidak terdapat pengukuran inflasi daerah				
4.01.03.2.01.		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	Persen	55	392,669,943	0	170,731,892	55	392,667,000	55	324,046,042	0	26,680,568	50	115,814,368	50	28,236,956	0	0	50	170,731,892	90.91	52.69	50	170,731,892	90.91	43.48					
4.01.03.2.01.01.		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	130,889,981	0	70,478,507	1	130,889,000	1	130,000,000	0	0	1	54,357,595	0	16,120,912	0	0	1	70,478,507	100.00	54.21	1	70,478,507	100.00	53.85					
4.01.03.2.01.02.		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	130,889,981	0	100,253,385	2	130,889,000	2	194,046,042	0	26,680,568	1	61,456,773	0	12,116,044	0	0	1	100,253,385	50.00	51.66	1	100,253,385	50.00	76.59					
4.01.03.2.01.03.		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	130,889,981		0	1	130,889,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
4.01.03.2.04.		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	Persen	55	130,889,981	0	106,469,280	55	130,889,000	55	245,953,958	11	12,738,294	23	28,321,156	52	32,654,931	100	32,754,899	52	106,469,280	94.55	43.29	52	106,469,280	94.55	81.34					
4.01.03.2.04.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	130,889,981	0	106,469,280	1	130,889,000	1	245,953,958	2	12,738,294	2	28,321,156	5	32,654,931	6	32,754,899	15	106,469,280	1,500.00	43.29	15	106,469,280	1,500.00	81.34					
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																															
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																															
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.52	377,000,000	0	333,945,285	78.52	452,400,000	78.52	490,400,000	0	57,810,107	0	71,382,907	58.1	144,299,409	0	60,452,862	58	333,945,285	73.99	68.10	58.1	333,945,285	73.99	88.58					
4.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	377,000,000	0	333,945,285	85	452,400,000	85	490,400,000	56	57,810,107	70	71,382,907	84	144,299,409	0	60,452,862	84	333,945,285	98.82	68.10	84	333,945,285	98.82	88.58					
4.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	300,000,000	0	186,932,364	1	250,000,000	1	230,400,000	0	57,810,107	1	50,786,207	0	37,303,907	1	41,032,143	2	186,932,364	200.00	81.13	2	186,932,364	200.00	62.31	Dokumen Renja dan Dokumen PK/RKT				
4.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	27,000,000	2	147,012,921	2	152,400,000	2	260,000,000	0	0	0	20,596,700	2	106,995,502	2	19,420,719	2	147,012,921	100.00	56.54	4	147,012,921	200.00	544.49	Dok RKA APBD dan RKA APBDP				
4.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	0	3	50,000,000	3	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	333.33	0.00	13	0	433.33	0.00						
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	0	570,376,474	90	1,068,000,000	90	731,100,000	16.86	13,517,650	36.84	149,537,959	63.36	195,787,200	90.89	211,533,665	63	570,376,474	70.40	78.02	63.36	570,376,474	70.40	52.18					
4.01.03.2.02.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	0	570,376,474	90	1,068,000,000	90	731,100,000	18	13,517,650	37	149,537,959	62	195,787,200	93.7	211,533,665	91	570,376,474	100.99	78.02	90.89	570,376,474	100.99	52.18					
4.01.03.2.02.02.		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	543,000,000	0	284,590,043	1	518,000,000	1	356,100,000	0	10,052,050	0	75,689,445	0	103,887,200	1	94,961,348	1	284,590,043	100.00	79.92	1	284,590,043	100.00	52.41	realisasi kinerja Tw.IV				
4.01.03.2.02.03.		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	550,000,000	0	285,786,431	12	550,000,000	12	375,000,000	3	3,465,600	3	73,848,514	3	91,900,000	3	116,572,317	6	285,786,431	46.15	76.21	6	285,786,431	10.00	51.96					
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																															
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																															
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	3	1,444,596,000	3	1,188,555,000	3	1,444,596,000	3	1,756,698,516	18	207,277,000	50	231,200,500	75	437,003,000	0	105,797,500	75	981,278,000	2,500.00	55.86	78	1,188,555,000	2,600.00	82.28					
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	1,444,596,000	30	1,188,555,000	100	1,444,596,000	100	1,756,698,516	22	207,277,000	55	231,200,500	100	437,003,000	0	105,797,500	100	981,278,000	100.00	55.86	130	1,188,555,000	130.00	82.28					
4.01.02.2.02.02.		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	Dokumen	1	1,444,596,000	1	1,188,555,000	1	1,444,596,000	1	1,756,698,516	3	207,277,000	3	231,200,500	3	437,003,000	0	105,797,500	9	981,278,000	900.00	55.86	10	1,188,555,000	1,000.00	82.28					

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
			Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																										
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Persen	3	4,355,811,435	3	4,977,975,493	3	5,226,973,200	3	5,817,341,484	18	385,784,348	62	2,485,659,741	88	799,612,699	0	921,134,357	88	4,592,191,145	2,933.33	78.94	91	4,977,975,493	3,033.33	114.28	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	156,449,706	30	0	100	156,450,000	100	0	22	0	55	0	100	0	0	0	100	0	100.00	0.00	130	0	130.00	0.00	
4.01.02.2.02.03.		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	156,449,706		0	1	156,450,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	4,199,361,729	30	4,977,975,493	100	5,070,523,200	100	5,817,341,484	0	385,784,348	33	2,485,659,741	100	799,612,699	0	921,134,357	100	4,592,191,145	100.00	78.94	130	4,977,975,493	130.00	118.54	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	4,199,361,729	5	4,977,975,493	5	5,070,523,200	5	5,817,341,484	0	385,784,348	2	2,485,659,741	1	799,612,699	2	921,134,357	5	4,592,191,145	100.00	78.94	10	4,977,975,493	200.00	118.54	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	35,503,714,410	88.89	42,620,971,391	85	34,186,530,781	85	50,009,668,282	20	9,110,919,318	50	12,281,447,491	80	9,964,383,166	85	11,264,221,416	80	42,620,971,391	94.12	85.23	168.89	42,620,971,391	198.69	120.05	
4.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	19,605,410,410	100	18,570,106,801	1	14,137,083,251	1	19,699,441,893	1	4,331,356,461	1	5,571,927,970	1	2,764,521,674	0	5,902,300,696	1	18,570,106,801	100.00	94.27	101	18,570,106,801	10,100.00	94.72	
4.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	19,605,410,410	90	18,570,106,801	150	14,137,083,251	150	19,699,441,893	138	4,331,356,461	139	5,571,927,970	139	2,764,521,674	138	5,902,300,696	554	18,570,106,801	369.33	94.27	644	18,570,106,801	429.33	94.72	
4.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	45	7,500,000	158.33	73,637,891	45	75,775,000	45	81,174,364	100	71,232,595	100	1,803,972	100	601,324	100	0	100	73,637,891	222.22	90.72	258.33	73,637,891	574.07	981.84	
4.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	7,500,000	83.33	73,637,891	6	75,775,000	6	81,174,364	30	71,232,595	0	1,803,972	0	601,324	0	0	30	73,637,891	500.00	90.72	113.33	73,637,891	1,888.83	981.84	
4.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	1,217,544,000	100	4,317,800,265	75	2,064,668,000	75	5,319,949,589	25	758,621,111	50	1,244,586,996	75	1,270,952,306	0	1,043,639,852	75	4,317,800,265	100.00	81.16	175	4,317,800,265	233.33	354.63	
4.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	8.33	267,127,500	12	220,000,000	12	345,000,000	3	29,252,000	5	133,471,500	3	59,627,000	4	44,777,000	15	267,127,500	125.00	77.43	23.33	267,127,500	194.42	534.26	
4.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,000,000	32	177,168,800	5	670,000,000	5	192,664,249	0	0	2	111,827,100	1	27,028,000	2	38,313,700	5	177,168,800	100.00	91.96	37	177,168,800	740.00	885.84	
4.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	40	872,688,120	12	30,000,000	12	880,000,000	1	98,661,500	4	208,741,836	4	286,962,336	3	278,322,448	12	872,688,120	100.00	99.17	52	872,688,120	433.33	2,908.96	
4.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	198,500,000	8	398,375,350	14	112,500,000	14	631,257,000	7	296,064,250	1	41,141,250	1	27,516,450	4	33,653,400	13	398,375,350	92.86	63.11	21	398,375,350	150.00	200.69	
4.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	66.67	0	12	20,000,000	12	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	66.67	0	555.58	0.00	
4.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	899,044,000	51.2	2,602,440,495	100	1,012,168,000	100	3,271,028,340	123	334,643,361	118	749,405,310	178	869,818,520	99	648,573,304	518	2,602,440,495	518.00	79.56	569.2	2,602,440,495	569.20	289.47	
4.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	1,725,000,000	81.25	1,582,243,904	80	1,519,930,000	80	1,988,813,000	20	125,133,378	70	1,169,437,806	80	81,300,875	0	206,371,845	80	1,582,243,904	100.00	79.56	161.25	1,582,243,904	201.56	91.72	
4.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1,500,000,000	10	39,024,000	4	468,830,000	4	45,000,000	0	0	2	39,024,000	0	0	0	0	2	39,024,000	50.00	86.72	12	39,024,000	300.00	2.60	
4.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	396,695,000	5	129,700,000	5	507,980,000	7	47,285,000	4	349,410,000	0	0	12	0	23	396,695,000	460.00	78.09	23	396,695,000	460.00	793.39	
4.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	653,376,000	5	226,700,000	5	692,500,000	4	62,430,000	15	590,946,000	0	0	1	0	20	653,376,000	400.00	94.35	20	653,376,000	400.00	1,306.75	
4.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	184,185,000	5	300,000,000	5	256,000,000	3	5,850,000	4	178,335,000	0	0	1	0	8	184,185,000	160.00	71.95	8	184,185,000	160.00	368.37	
4.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75,000,000	3	308,963,904	1	394,700,000	1	487,333,000	0	9,568,378	0	11,722,806	2	81,300,875	2	206,371,845	4	308,963,904	400.00	63.40	7	308,963,904	700.00	411.95	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																										
4.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	810,000,000	100	5,184,054,331	70	4,211,000,000	70	6,323,983,000	25	1,437,120,450	50	1,249,539,756	75	1,374,591,457	0	1,122,802,668	75	5,184,054,331	107.14	81.97	175	5,184,054,331	250.00	640.01	
4.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	510,000,000	161.9	3,633,762,807	39	3,371,000,000	39	4,593,649,000	12	1,069,129,750	12	969,178,732	12	923,336,457	12	672,117,868	48	3,633,762,807	123.08	79.10	209.9	3,633,762,807	538.21	712.50	
4.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	275,000,000	100	924,712,524	6	610,000,000	6	1,075,350,000	3	275,134,700	3	199,950,024	3	315,885,000	3	133,742,800	12	924,712,524	200.00	85.99	112	924,712,524	1,866.67	336.26	
4.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	25,000,000	75	625,579,000	4	230,000,000	4	654,984,000	3	92,856,000	3	80,411,000	3	135,370,000	3	316,942,000	12	625,579,000	300.00	95.51	87	625,579,000	2,175.00	2,502.32	
4.01.01.2.11.		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	Persen	100	6,451,120,000	100	7,394,208,605	100	6,595,107,000	100	10,407,206,696	25	1,160,583,707	50	1,620,248,740	75	3,098,732,033	0	1,514,644,125	75	7,394,208,605	75.00	71.05	175	7,394,208,605	175.00	114.62	
4.01.01.2.11.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	1,423,500,000	600	1,318,382,156	2	1,105,820,000	2	2,359,899,213	2	147,248,160	2	233,955,694	2	363,475,160	2	573,703,142	8	1,318,382,156	400.00	55.87	608	1,318,382,156	30,400.00	92.62	
4.01.01.2.11.03.		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	100,000,000	100	0	2	80,000,000	2	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	0	5,000.00	0.00	
4.01.01.2.11.04.		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	4,927,620,000	600	6,075,826,449	2	5,409,287,000	2	8,046,307,483	2	1,013,335,547	2	1,386,293,046	2	2,735,256,873	2	940,940,983	8	6,075,826,449	400.00	75.51	608	6,075,826,449	30,400.00	123.30	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	2,194,087,972	0	567,151,725	100	2,194,086,000	100	1,161,000,000	0	131,357,417	0	178,242,372	0	167,381,585	100	90,170,351	100	567,151,725	100.00	48.85	100	567,151,725	100.00	25.85	
4.01.01.2.14.		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokol Terencana yang terfasilitasi	Persen	85	2,194,087,972	0	567,151,725	85	2,194,086,000	85	1,161,000,000	20	131,357,417	40	178,242,372	80	167,381,585	0	90,170,351	80	567,151,725	94.12	48.85	80	567,151,725	94.12	25.85	
4.01.01.2.14.01.		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	1,029,508,911	0	315,502,488	12	1,029,508,000	12	555,614,060	3	82,759,917	3	102,878,357	3	76,950,614	3	52,913,600	12	315,502,488	100.00	56.78	12	315,502,488	100.00	30.65	
4.01.01.2.14.02.		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	307,910,366	0	117,583,047	12	307,910,000	12	241,552,430	3	21,474,800	3	47,498,115	3	38,827,631	3	9,782,501	12	117,583,047	100.00	48.68	12	117,583,047	100.00	38.19	
4.01.01.2.14.03.		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	856,668,695	0	134,066,190	12	856,668,000	12	363,833,510	3	27,122,700	3	27,865,900	3	51,603,340	3	27,474,250	12	134,066,190	100.00	36.85	12	134,066,190	100.00	15.65	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks	53	1,958,725,728	0	1,029,191,895	53	2,350,471,000	53	1,224,600,000	0	101,696,529	0	107,625,300	53.74	661,646,314	0	158,223,752	54	1,029,191,895	101.40	84.04	53.74	1,029,191,895	101.40	52.54	jumlah jafung belum terpenuhi dari target 29 orang, baru terpenuhi 14 orang
4.01.03.2.03.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	3.6	1,458,725,728	0	795,416,488	3.6	1,350,471,000	3.6	963,240,290	0.73	73,874,779	17.39	91,894,800	53.42	519,929,907	0	109,717,002	53	795,416,488	1,483.89	82.58	53.42	795,416,488	1,483.89	54.53	banyak OPD yang belum menyerahkan dokumen tender
4.01.03.2.03.02.		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	1,200,000,000	0	625,661,965	12	1,000,000,000	12	700,336,890	3	38,280,463	3	29,091,000	3	448,573,500	3	109,717,002	12	625,661,965	100.00	89.34	12	625,661,965	100.00	52.14	
4.01.03.2.03.03.		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	150	258,725,728	0	169,754,523	150	350,471,000	150	262,903,400	0	35,594,316	50	62,803,800	0	71,356,407	0	0	50	169,754,523	33.33	64.57	50	169,754,523	33.33	65.61	
4.01.03.2.03.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	14	500,000,000	0	233,775,407	14	1,000,000,000	14	261,359,710	1.04	27,821,750	33.11	15,730,500	58.98	141,716,407	0	48,506,750	59	233,775,407	421.29	89.45	58.98	233,775,407	421.29	46.76	banyak OPD yang belum menyerahkan dokumen tender. 2)terkait pelaksanaan tender menunggu kebijakan pimpinan
4.01.03.2.03.01.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	500,000,000	0	233,775,407	4	1,000,000,000	4	261,359,710	1	27,821,750	1	15,730,500	1	141,716,407	1	48,506,750	4	233,775,407	100.00	89.45	4	233,775,407	100.00	46.76	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	Persen	90	544,770,593	90	798,250,900	90	544,754,000	90	450,000,000	60	72,465,150	60	101,269,236	60	71,118,521	70	8,627,400	70	253,480,307	77.78	56.33	160	798,250,900	177.78	146.53	Tersisa 20% kerja sama yang belum ditindaklanjuti. Penyababnya adalah belum terjadinya kesepakatan antara Pemkab Natuna dengan mitra kerja sama
4.01.02.2.04.		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	Persen	90	544,770,593	90	798,250,900	90	544,754,000	90	450,000,000	60	72,465,150	100	101,269,236	100	71,118,521	100	8,627,400	100	253,480,307	111.11	56.33	190	798,250,900	211.11	146.53	
4.01.02.2.04.01.		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	354,100,890	19	523,641,065	10	354,100,000	10	283,467,250	6	34,729,682	10	84,972,586	3	41,210,507	1	8,627,400	20	169,540,175	200.00	59.81	39	523,641,065	390.00	147.88	
4.01.02.2.04.02.		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	81,715,574	0	81,715,574	1	81,700,000	1	32,250,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	81,715,574	0.00	100.00	realisasi di Tw.IV
4.01.02.2.04.03.		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	108,954,129	3	192,894,261	1	108,954,000	1	134,282,710	0	37,735,468	0	16,296,650	0	29,908,014	1	0	1	83,940,132	100.00	62.51	4	192,894,261	400.00	177.04	realisasi di Tw.Iv

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.02.		SEKRETARIAT DPRD																											
4.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.11	54,208,000	74.8	38,328,770	77.11	54,208,000	77.11	109,118,210	74.8	3,819,500	74.8	5,729,250	69.1	0	69.1	2,838,000	69	12,386,750	89.61	11.35	71.95	38,328,770	89.94	70.71	Target Renstra 5 Tahun 80 Nilai
4.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	84	54,208,000	97	38,328,770	84	54,208,000	84	109,118,210	97	3,819,500	97	5,729,250	89.61	0	89.61	2,838,000	100	12,386,750	100.00	11.35	93.31	38,328,770	100.00	70.71	Target Renstra 5 Tahun 90%
4.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	54,208,000	2	38,328,770	3	54,208,000	3	109,118,210	1	3,819,500	0	5,729,250	2	0	0	2,838,000	3	12,386,750	100.00	11.35	5	38,328,770	33.33	70.71	Target Renstra 5 Tahun 15 Laporan
4.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	17,922,790,292	85	41,887,494,361	85	18,177,071,004	85	23,421,500,778	100	4,304,749,114	100	4,943,301,617	100	5,394,129,199	100	5,660,819,538	100	20,302,999,468	100.00	86.69	100	41,887,494,361	100.00	233.71	Target Renstra 5 Tahun 90%
4.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	9,257,740,292	1	11,412,192,784	1	9,257,740,292	1	6,020,974,448	1	1,251,486,663	1	1,733,389,442	1	1,035,532,485	0	1,483,247,240	1	5,503,655,830	100.00	91.41	1	11,412,192,784	100.00	123.27	Target Renstra 5 Tahun 100%
4.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	9,253,340,292	58	11,327,966,659	58	9,253,340,292	58	5,906,605,878	58	1,241,175,413	58	1,720,967,567	47	1,023,110,610	0	1,466,102,865	47	5,451,356,455	81.03	92.29	47	11,327,966,659	81.03	122.42	Target Renstra 5 Tahun 58 Orang
4.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4,400,000	1	84,226,125	1	4,400,000	1	114,368,570	0	10,311,250	0	12,421,875	0	12,421,875	1	17,144,375	1	52,299,375	100.00	45.73	2	84,226,125	40.00	1,914.23	Target Renstra 5 Tahun 5 Laporan
4.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	92	300,000,000	90	57,335,214	92	300,000,000	92	191,070,400	90	4,613,500	90	16,920,250	91.49	0	91.49	15,360,214	91	36,893,964	99.45	19.31	90.75	57,335,214	95.53	19.11	Target Renstra 5 Tahun 95%
4.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	200,000,000	4	57,335,214	10	200,000,000	10	191,070,400	0	4,613,500	2	16,920,250	1	0	0	15,360,214	3	36,893,964	30.00	19.31	7	57,335,214	14.00	28.67	Target Renstra 5 Tahun 50 Orang
4.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	2,527,770,000	70	4,426,730,574	55	2,524,770,000	55	2,519,235,130	70	165,347,122	70	372,701,674	72	580,597,518	75	625,129,177	75	1,743,775,491	100.00	69.22	72.5	4,426,730,574	100.00	175.12	Target Renstra 5 Tahun 70%
4.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	110,000,000	12	927,907,569	12	180,000,000	12	272,428,000	3	12,617,250	3	52,593,140	3	53,551,700	3	130,226,527	12	248,988,617	100.00	91.40	24	927,907,569	40.00	843.55	Target Renstra 5 Tahun 60 Paket
4.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	12	212,429,430	12	30,000,000	12	130,000,000	3	6,265,090	3	23,136,710	3	11,656,070	3	32,027,160	12	73,085,030	100.00	56.22	24	212,429,430	40.00	708.10	Target Renstra 5 Tahun 60 Paket
4.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	12	367,239,284	12	120,000,000	12	263,822,150	3	7,906,000	3	0	3	11,988,000	3	15,984,000	12	35,878,000	100.00	13.60	24	367,239,284	40.00	306.03	Target Renstra 5 Tahun 60 Paket
4.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	100,000,000	12	190,953,000	12	100,000,000	12	50,000,000	0	0	0	0	0	0	12	49,680,000	12	49,680,000	100.00	99.36	24	190,953,000	40.00	190.95	Target Renstra 5 Tahun 60 Paket
4.02.01.2.06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	722,200,000	12	1,656,742,401	12	722,200,000	12	898,560,000	3	61,080,800	3	115,529,700	3	252,590,200	3	325,033,501	12	754,234,201	100.00	83.94	24	1,656,742,401	40.00	229.40	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
4.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	1,445,570,000	73	1,071,458,890	120	1,372,570,000	120	904,424,980	29	77,477,982	64	181,442,124	53	250,811,548	28	72,177,989	174	581,909,643	100.00	64.34	247	1,071,458,890	41.16	74.12	Target Renstra 5 Tahun 600 Laporan
4.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	107,000,000	70	1,639,616,399	65	414,280,712	65	1,293,025,000	60	106,340,000	60	25,530,000	63	450,726,000	68	200,540,000	68	783,136,000	97.14	60.57	69	1,639,616,399	86.25	1,532.35	Target Renstra 5 Tahun 80%

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	7,500,000	0	0	12	10,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	33,500,000	3	1,117,899,000	12	52,280,712	12	993,025,000	0	7,340,000	3	25,530,000	18	450,726,000	23	200,540,000	44	684,136,000	100.00	68.89	47	1,117,899,000	78.33	3,337.01	Target Renstra 5 Tahun 60 Unit
4.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	26,000,000	3	0	12	162,000,000	12	200,000,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8.33	0.00	4	0	8.33	0.00	Target Renstra 5 Tahun 48 Unit
4.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	3	372,146,534	2	170,000,000	2	100,000,000	4	99,000,000	4	0	4	0	4	0	4	99,000,000	100.00	99.00	7	372,146,534	100.00	1,860.73	Target Renstra 5 Tahun 5 Unit
4.02.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	149,570,865	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	149,570,865	100.00	747.85		
4.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	79	2,574,000,000	80	6,716,639,770	79	2,574,000,000	79	3,487,001,600	100	670,744,261	100	910,510,415	100	850,277,003	100	759,515,094	100	3,191,046,773	100.00	91.51	90	6,716,639,770	100.00	260.94	Target Renstra 5 Tahun 85%
4.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	12	80,333,000	12	10,000,000	12	74,569,000	3	15,641,750	3	16,163,750	3	20,863,750	3	12,663,750	12	65,333,000	100.00	87.61	24	80,333,000	40.00	803.33	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
4.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	472,500,000	12	785,456,929	12	472,500,000	12	390,400,000	3	72,445,572	3	76,274,026	3	89,822,712	3	119,001,344	12	357,543,654	100.00	91.58	24	785,456,929	40.00	166.23	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
4.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,091,500,000	12	5,850,849,841	12	2,091,500,000	12	3,022,032,600	3	582,656,939	3	818,072,639	3	739,590,541	3	627,850,000	12	2,768,170,119	100.00	91.60	24	5,850,849,841	40.00	279.74	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
4.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	900,280,000	75	2,530,842,650	65	786,280,000	65	1,546,438,000	60	125,644,136	60	72,810,749	65	514,680,098	70	594,553,207	70	1,307,688,190	100.00	84.56	75	2,530,842,650	83.33	281.12	Target Renstra 5 Tahun 90%
4.02.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	244,000,000	3	530,499,940	3	244,000,000	3	283,078,000	3	58,249,050	3	27,884,000	3	35,798,000	3	104,094,000	3	226,025,050	100.00	79.85	6	530,499,940	40.00	217.42	Target Renstra 5 Tahun 15 Unit
4.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	267,000,000	39	790,161,860	43	267,000,000	43	399,800,000	16	31,020,000	16	10,349,740	16	62,096,000	16	261,650,050	32	365,115,790	74.41	91.32	39	790,161,860	90.70	295.94	Target Renstra 5 Tahun 43 Unit
4.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	126,000,000	2	216,037,554	1	73,000,000	1	78,500,000	8	11,165,086	2	1,657,968	0	0	2	21,079,000	12	33,902,054	100.00	43.19	14	216,037,554	100.00	171.46	Target Renstra 5 Tahun 5 Unit
4.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100,000,000	0	161,610,000	1	100,000,000	1	182,000,000	5	25,210,000	2	14,600,000	3	18,450,000	22	103,350,000	32	161,610,000	100.00	88.80	32	161,610,000	100.00	161.61	Target Renstra 5 Tahun 5 Unit
4.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53,280,000	3	339,374,240	1	53,280,000	1	221,000,000	0	0	1	18,319,041	2	91,587,727	1	47,331,972	4	157,238,740	100.00	71.15	4	339,374,240	100.00	636.96	Target Renstra 5 Tahun 5 Unit
4.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	110,000,000	3	493,159,056	7	49,000,000	7	382,060,000	0	0	0	0	3	306,748,371	1	57,048,185	4	363,796,556	57.14	95.22	7	493,159,056	100.00	448.33	Target Renstra 5 Tahun 7 Unit
4.02.01.2.15.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,246,000,000	1	13,247,790,799	1	2,246,000,000	1	6,937,715,000	1	1,577,244,525	1	1,634,441,447	1	1,641,007,295	1	1,706,189,495	1	6,558,882,762	100.00	94.54	1	13,247,790,799	100.00	589.84	Target Renstra 5 Tahun 100%
4.02.01.2.15.01.		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	20	2,000,000,000	20	12,714,689,759	20	2,000,000,000	20	6,638,847,000	20	1,562,161,275	20	1,618,962,197	20	1,617,066,005	20	1,561,606,245	20	6,359,795,722	100.00	95.80	40	12,714,689,759	40.00	635.73	Target Renstra 5 Tahun 100 Orang
4.02.01.2.15.02.		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	46,000,000	4	414,519,000	4	46,000,000	4	188,337,000	1	15,083,250	1	15,479,250	1	15,479,250	1	135,879,250	4	181,921,000	100.00	96.59	8	414,519,000	40.00	901.13	Target Renstra 5 Tahun 20 Paket

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.02.01.2.15.03.		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	20	200,000,000	4	118,582,040	20	200,000,000	20	110,531,000	0	0	0	0	3	8,462,040	1	8,704,000	4	17,166,040	20.00	15.53	8	118,582,040	40.00	59.29	Target Renstra 5 Tahun 20 Orang
4.02.01.2.16.		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	Jenis	8	10,000,000	8	1,856,346,171	8	74,000,000	8	1,426,041,200	8	403,328,907	8	176,997,640	8	321,308,800	8	276,285,111	8	1,177,920,458	100.00	82.60	16	1,856,346,171	40.00	18,563.46	Target Renstra 5 Tahun 40 Jenis
4.02.01.2.16.04.		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	12	1,856,346,171	12	74,000,000	12	1,426,041,200	3	403,328,907	3	176,997,640	3	321,308,800	3	276,285,111	12	1,177,920,458	100.00	82.60	24	1,856,346,171	40.00	18,563.46	Target Renstra 5 Tahun 60 Paket
4.02.02.		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	Persen	75	11,096,647,000	71.72	24,354,987,168	75	11,096,647,000	75	16,292,006,902	71.72	1,960,152,528	71.72	2,257,532,487	71.72	3,491,855,180	73.44	1,839,689,346	73	9,549,229,541	97.92	58.61	145.16	24,354,987,168	193.55	219.48	Target Renstra 5 Tahun 75% Hasil Survey 20 Des
4.02.02.2.01.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan	20	2,186,217,000	7	2,974,375,104	20	2,186,217,000	20	1,462,755,420	0	8,442,500	5	600,747,626	7	355,014,401	7	196,542,949	19	1,160,747,476	95.00	79.35	26	2,974,375,104	21.66	136.05	Target 5 Tahun 120 Peraturan
4.02.02.2.01.02.		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	15	2,186,217,000	3	2,974,375,104	15	2,186,217,000	15	1,462,755,420	0	8,442,500	0	600,747,626	7	355,014,401	7	196,542,949	14	1,160,747,476	93.33	79.35	17	2,974,375,104	22.67	136.05	Target 5 Tahun 75 Dokumen
4.02.02.2.04.		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	3	3,945,670,000	3	2,881,068,161	3	3,945,670,000	3	1,617,114,960	3	132,584,286	3	321,033,482	3	360,118,704	3	324,404,781	3	1,138,141,253	100.00	70.38	6	2,881,068,161	40.00	73.02	Target Renstra 5 Tahun 15 Kali
4.02.02.2.04.02.		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	40	1,465,670,000	40	1,742,236,447	40	1,465,670,000	40	968,887,390	10	97,584,286	10	216,315,482	10	199,617,690	10	166,242,181	40	679,759,639	100.00	70.16	80	1,742,236,447	40.00	118.87	Target Renstra 5 Tahun 200 Dokumen
4.02.02.2.04.04.		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	30,000,000	0	0	3	30,000,000	3	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Target Renstra 5 Tahun 3 Orang
4.02.02.2.04.05.		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	210,000,000	5	404,000,000	5	210,000,000	5	210,000,000	5	35,000,000	5	54,000,000	5	52,500,000	5	52,500,000	5	194,000,000	100.00	92.38	10	404,000,000	40.00	192.38	Target Renstra 5 Tahun 25 Orang
4.02.02.2.04.06.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	240,000,000	12	734,831,714	12	240,000,000	12	434,227,570	0	0	6	50,718,000	3	108,001,014	3	105,662,600	12	264,381,614	100.00	60.89	24	734,831,714	40.00	306.18	Target Renstra 5 Tahun 60 Dokumen
4.02.02.2.04.08.		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	2,000,000,000		0	12	2,000,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.02.2.05.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD	Kali	30	2,285,200,000	40	6,695,263,364	30	2,285,200,000	30	4,828,809,000	26	1,146,709,750	6	141,348,850	26	1,174,534,550	26	98,420,314	84	2,561,013,464	100.00	53.04	124	6,695,263,364	82.67	292.98	Target Renstra 5 Tahun 150 Kali
4.02.02.2.05.01.		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	991,250,000	24	1,081,256,000	24	991,250,000	24	1,274,139,000	6	51,981,350	6	111,048,850	6	104,220,150	6	119,629,050	24	386,879,400	100.00	30.36	48	1,081,256,000	40.00	109.08	Target Renstra 5 Tahun 120 Laporan
4.02.02.2.05.02.		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	20	214,700,000	20	116,972,900	20	214,700,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	20	116,972,900	100.00	54.48	
4.02.02.2.05.03.		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	1,079,250,000	60	5,497,034,464	60	1,079,250,000	60	3,554,670,000	20	1,094,728,400	0	30,300,000	20	1,070,314,400	20	-21,208,736	60	2,174,134,064	100.00	61.16	120	5,497,034,464	40.00	509.34	Target Renstra 5 Tahun 300 Dokumen
4.02.02.2.08.		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	Kegiatan	12	2,679,560,000	12	11,804,280,539	12	2,679,560,000	12	8,383,327,522	3	672,415,992	3	1,194,402,529	3	1,602,187,525	3	1,220,321,302	12	4,689,327,348	100.00	55.94	24	11,804,280,539	40.00	440.53	Target Renstra 5 Tahun 60 Kali
4.02.02.2.08.01.		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	84	2,561,060,000	80	11,414,797,639	84	2,561,060,000	84	7,349,906,710	20	672,415,992	20	1,156,452,529	20	1,569,297,525	20	1,100,421,302	80	4,498,587,348	95.24	61.21	160	11,414,797,639	38.10	445.71	Target Renstra 5 Tahun 420 Dokumen
4.02.02.2.08.04.		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	36	118,500,000	36	389,482,900	36	118,500,000	36	1,033,420,812	0	0	9	37,950,000	9	32,890,000	18	119,900,000	36	190,740,000	100.00	18.46	72	389,482,900	40.00	328.68	Target Renstra 5 Tahun 180 Dokumen

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.01.		PERENCANAAN																											
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	88.35	178,132,000	82.82	892,936	88.35	180,000,000	88.35	14,738,620	82.82	0	82.82	0	73.45	0	73.45	0	73	0	83.14	0.00	156.27	892,936	176.88	0.50	
5.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	178,132,000	89	892,936	70	180,000,000	70	14,738,620	65.51	0	68.96	0	82.76	0	100	0	100	0	142.86	0.00	189	892,936	270.00	0.50	
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104,066,000	2	892,936	2	120,000,000	2	750,000	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100.00	0.00	4	892,936	200.00	0.86	target kinerja dilaksanakan pada TW IV	
5.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	74,066,000	3	0	3	60,000,000	3	13,988,620	3	0	0	0	0	0	0	3	0	100.00	0.00	6	0	200.00	0.00		
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,067,806,973	100	14,778,687,430	85	6,666,607,000	85	8,157,996,259	100	1,628,555,869	100	2,135,237,535	100	1,572,758,017	100	2,097,716,818	100	7,434,268,239	117.65	91.13	200	14,778,687,430	235.29	243.56	
5.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,652,230,973	1	12,174,253,656	1	4,552,231,000	1	6,400,555,879	1	1,418,958,069	1	1,805,770,330	1	1,263,597,297	1	1,565,792,351	1	6,054,118,047	100.00	94.59	2	12,174,253,656	200.00	261.69	
5.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	4,652,230,973	45	12,174,253,656	58	4,552,231,000	58	6,400,555,879	44	1,418,958,069	43	1,805,770,330	43	1,263,597,297	43	1,565,792,351	43	6,054,118,047	74.14	94.59	88	12,174,253,656	151.72	261.69	
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	142,800,000	0	0	95	180,000,000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	46,400,000	0	0	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50,000,000	0	0	5	60,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46,400,000	0	0	5	60,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	528,776,000	75	1,128,117,490	82	431,376,000	82	763,039,000	25	92,608,770	50	192,760,333	75	128,356,342	100	204,497,728	100	618,223,173	121.95	81.02	175	1,128,117,490	213.41	213.35	
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70,000,000	1	60,219,450	12	80,000,000	12	83,164,400	6	16,148,000	6	5,070,000	6	20,925,150	6	14,836,300	24	56,979,450	200.00	68.51	25	60,219,450	208.33	86.03	
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	40	21,584,000	12	8,000,000	12	18,000,000	3	4,000,000	3	2,785,000	3	1,730,000	3	969,000	12	9,484,000	100.00	52.69	52	21,584,000	433.33	269.80	
5.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	12	28,000,000	12	12,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	28,000,000	100.00	140.00		
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	12	91,129,590	12	30,000,000	12	59,675,330	3	9,800,000	3	9,655,750	3	13,821,000	3	19,670,840	12	52,947,590	100.00	88.73	24	91,129,590	200.00	227.82	
5.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14,400,000	12	8,800,000	12	5,000,000	12	20,000,000	3	0	3	3,500,000	3	3,200,000	0	0	9	6,700,000	75.00	33.50	21	8,800,000	175.00	61.11	
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	12	29,492,000	1	5,000,000	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	29,492,000	1,200.00	294.92		
5.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	93	359,176,000	82	888,892,450	93	284,176,000	93	567,199,270	10	62,660,770	16	171,749,583	16	88,680,192	18	169,021,588	60	492,112,133	64.52	86.76	142	888,892,450	152.69	247.48	
5.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	0	40	7,200,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	60,000,000	0	245,498,000	75	804,000,000	75	445,800,000	80	0	80	0	80	71,498,000	85	174,000,000	85	245,498,000	113.33	55.07	85	245,498,000	113.33	409.16	
5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	245,498,000	5	754,000,000	5	445,800,000	0	0	0	0	3	71,498,000	11	174,000,000	14	245,498,000	280.00	55.07	14	245,498,000	280.00	491.00	
5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	474,000,000	75	837,820,612	100	474,000,000	100	425,780,000	25	99,019,180	50	111,290,872	75	96,715,878	100	105,970,739	100	412,996,669	100.00	97.00	175	837,820,612	175.00	176.76	
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	21,912,000	12	6,000,000	12	14,000,000	3	5,712,000	3	6,288,000	3	0	3	1,992,000	12	13,992,000	100.00	99.94	24	21,912,000	200.00	365.20	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
5.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,000,000	12	19,887,500	12	18,000,000	12	18,000,000	3	882,000	3	1,004,500	3	1,217,500	3	4,199,000	12	7,303,000	100.00	40.57	24	19,887,500	200.00	110.49	
5.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000	16	796,021,112	12	450,000,000	12	393,780,000	3	92,425,180	3	103,998,372	3	95,498,378	3	99,779,739	12	391,701,669	100.00	99.47	28	796,021,112	233.33	176.89	
5.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	210,000,000	70	392,997,672	82	225,000,000	82	122,821,380	70	17,969,850	70	25,416,000	75	12,590,500	100	47,456,000	100	103,432,350	121.95	84.21	170	392,997,672	207.32	187.14	
5.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	60,000,000	4	144,584,250	4	60,000,000	4	88,021,380	8	17,969,850	8	6,975,000	8	8,290,500	8	35,430,000	8	68,665,350	200.00	78.01	12	144,584,250	300.00	240.97	
5.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	0	34,767,000	5	30,000,000	5	34,800,000	0	0	5	18,441,000	5	4,300,000	5	12,026,000	5	34,767,000	100.00	99.91	5	34,767,000	100.00	115.89	
5.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	5	213,646,422	1	80,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	213,646,422	500.00	712.15		
5.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40,000,000	0	0	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	84	1,130,000,000	89.47	1,324,639,043	84	1,020,000,000	84	1,278,711,160	99.64	172,221,057	99.64	207,069,220	85.4	155,027,132	85.4	0	85	534,317,409	101.67	41.79	174.87	1,324,639,043	208.18	117.22	
5.01.02.2.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	69	1,080,000,000	32.64	1,324,639,043	69	900,000,000	69	1,278,711,160	23.09	172,221,057	23.09	207,069,220	65.32	155,027,132	65.32	0	65	534,317,409	94.67	41.79	97.96	1,324,639,043	141.97	122.65	
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120,000,000	1	14,295,000	1	120,000,000	1	129,497,600	1	5,500,000	0	0	0	3,640,000	0	0	1	9,140,000	100.00	7.06	2	14,295,000	200.00	11.91	
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat D aerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	110,000,000	1	108,522,000	1	110,000,000	1	63,860,000	1	25,200,000	0	33,707,000	0	0	0	0	1	58,907,000	100.00	92.24	2	108,522,000	200.00	98.66	
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000	1	616,836,439	1	480,000,000	1	401,736,480	1	122,296,807	0	173,362,220	0	1,587,500	0	0	1	297,246,527	100.00	73.99	2	616,836,439	200.00	220.30	
5.01.02.2.01.06.		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	170	50,000,000	0	0	170	70,000,000	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	Dokumen	2	520,000,000	2	584,985,604	2	120,000,000	2	683,617,080	0	19,224,250	0	0	2	149,799,632	0	0	2	169,023,882	100.00	24.72	4	584,985,604	200.00	112.50	
5.01.02.2.04.		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sistem	1	50,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.02.2.04.02.		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	50,000,000	0	0	4	120,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	64	680,000,000	64.29	405,040,196	64	680,000,000	64	439,858,980	77.78	228,000	77.78	30,612,000	65.52	99,967,252	65.52	31,447,166	66	162,254,418	102.38	36.89	65.52	405,040,196	102.38	59.56	
5.01.02.2.02.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	Persen	90	400,000,000	97.86	0	90	400,000,000	90	39,568,390	0	0	0	0	97.86	0	97.86	0	98	0	108.73	0.00	97.86	0	108.73	0.00	
5.01.02.2.02.01.		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	300,000,000	3	0	3	300,000,000	3	39,568,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	0	100.00	0.00	Data dalam proses integrasi dalam Satu Data Indonesia
5.01.02.2.02.03.		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.02.2.03.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindakanlanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	60	280,000,000	64.29	405,040,196	60	280,000,000	60	400,290,590	66.67	228,000	66.67	30,612,000	66.67	99,967,252	80	31,447,166	80	162,254,418	133.33	40.53	80	405,040,196	133.33	144.66	
5.01.02.2.03.03.		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	280,000,000	5	405,040,196	4	280,000,000	4	400,290,590	1	228,000	1	30,612,000	1	99,967,252	1	31,447,166	4	162,254,418	100.00	40.53	9	405,040,196	225.00	144.66	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	90.91	501,671,245	93	800,000,000	93	899,175,450	90.91	12,893,495	90.91	57,014,096	90.91	37,978,600	84.42	242,714,390	84	350,600,581	90.77	38.99	175.33	501,671,245	188.53	62.71	
5.01.03.2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	90.91	501,671,245	93	800,000,000	93	899,175,450	100	12,893,495	100	57,014,096	100	37,978,600	100	242,714,390	100	350,600,581	107.53	38.99	190.91	501,671,245	205.28	62.71	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
5.01.03.2.01.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	100.00	0.00	8	0	100.00	0.00	
5.01.03.2.01.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	1	0	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	12.50	0.00		
5.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	1	23,242,194	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	23,242,194	12.50	23.24		
5.01.03.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100,000,000	32	31,117,800	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	32	31,117,800	3,200.00	31.12		
5.01.03.2.01.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	0	265,258,190	8	100,000,000	8	377,715,960	8	0	0	7,752,400	0	14,791,400	8	242,714,390	8	265,258,190	100.00	70.23	8	265,258,190	100.00	265.26	
5.01.03.2.01.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000	16	23,291,707	8	100,000,000	8	32,457,810	8	0	0	8,538,907	0	2,780,000	0	0	8	11,318,907	100.00	34.87	24	23,291,707	300.00	23.29	
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	100,000,000	16	158,761,354	1	100,000,000	1	489,001,680	1	12,893,495	0	40,722,789	0	20,407,200	0	0	1	74,023,484	100.00	15.14	17	158,761,354	1,700.00	158.76	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	1,245,000,000	90.91	391,612,855	93	1,245,000,000	93	644,823,720	93.48	10,594,700	93.48	50,150,857	93.48	45,829,244	93.48	121,469,637	93	228,044,438	100.52	35.37	184.39	391,612,855	198.27	31.45	
5.01.03.2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	600,000,000	94.83	151,600,457	93	600,000,000	93	326,071,410	100	0	100	28,455,357	100	10,825,960	100	17,394,000	100	56,675,317	107.53	17.38	194.83	151,600,457	209.49	25.27	
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	8	85,106,068	5	75,000,000	5	164,823,230	0	0	0	21,046,057	5	9,925,960	5	15,475,600	5	46,447,617	100.00	28.18	13	85,106,068	260.00	113.47	
5.01.03.2.02.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	12	66,494,389	5	75,000,000	5	161,248,180	0	0	0	7,409,300	5	900,000	5	1,918,400	5	10,227,700	100.00	6.34	17	66,494,389	340.00	88.66	
5.01.03.2.02.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	645,000,000	72.97	240,012,398	93	645,000,000	93	318,752,310	100	10,594,700	100	21,695,500	100	35,003,284	100	104,075,637	100	171,369,121	107.53	53.76	172.97	240,012,398	185.99	37.21	
5.01.03.2.03.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	75,000,000	0	0	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
5.01.03.2.03.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	0	0	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	4	15,267,600	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	15,267,600	133.33	20.36	
5.01.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	1	224,744,798	3	75,000,000	3	318,752,310	1	10,594,700	1	21,695,500	1	35,003,284	1	104,075,637	4	171,369,121	133.33	53.76	5	224,744,798	166.67	299.66	
5.01.03.2.03.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	120,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55.00	400,000,000	49.05	231,639,358	55.00	400,000,000	55.00	172,697,920	49.05	13,790,340	49.05	5,062,960	49.05	6,479,380	37.1	83,494,238	37	108,826,918	67.45	63.02	86.15	231,639,358	156.64	57.91	
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	400,000,000	100	231,639,358	100	400,000,000	100	172,697,920	0	13,790,340	10.64	5,062,960	30.61	6,479,380	87.23	83,494,238	87	108,826,918	87.23	63.02	187.23	231,639,358	187.23	57.91	
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	150,000,000	1	64,781,340	1	150,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	64,781,340	100.00	43.19	
5.05.02.2.04.03.		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	250,000,000	1	166,858,018	1	250,000,000	1	172,697,920	0	13,790,340	0	5,062,960	0	6,479,380	1	83,494,238	1	108,826,918	100.00	63.02	2	166,858,018	200.00	66.74	
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	25	450,000,000	0	37,281,668	25	525,000,000	25	162,468,360	0	378,317	0	281,268	0	3,928,974	25	30,053,109	25	34,641,668	100.00	21.32	25	37,281,668	100.00	8.28	
5.05.02.2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	50,000,000	0	37,281,668	100	75,000,000	100	162,468,360	0	378,317	0	281,268	0	3,928,974	100	30,053,109	100	34,641,668	100.00	21.32	100	37,281,668	100.00	74.56	
5.05.02.2.01.01.		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	25,000,000	0	34,641,668	1	25,000,000	1	162,468,360	0	378,317	0	281,268	1	3,928,974	1	30,053,109	1	34,641,668	100.00	21.32	1	34,641,668	100.00	138.57	
5.05.02.2.01.12.		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	25,000,000	1	2,640,000	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	2,640,000	100.00	10.56	
5.05.02.2.02.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100	150,000,000	100	0	100	150,000,000	100	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	100	0	100.00	0.00	
5.05.02.2.02.03.		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	50,000,000	1	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
5.05.02.2.02.09.		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	250,000,000	0	0	100	300,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.01.		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.02.		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	100,000,000	1	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
5.05.02.2.03.04.		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5.05.02.2.03.13.		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		4A																									
5.02.		KEUANGAN																											
5.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	81.50	300,000,000	84.96	215,929,320	81.50	358,419,000	81.50	157,900,000	85	4,281,566	85	28,595,599	69.2	34,993,149	70	60,981,789	69	128,852,103	84.91	81.60	154.16	215,929,320	189.15	71.98	
5.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65.50	300,000,000	84.96	215,929,320	65.50	358,419,000	65.50	157,900,000	65.21	4,281,566	76	28,595,599	78.26	34,993,149	80	60,981,789	78	128,852,103	119.48	81.60	163.22	215,929,320	249.19	71.98	
5.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100,000,000	3	134,771,614	2	110,129,000	2	102,300,000	3	4,281,566	3	22,064,799	3	29,907,749	3	40,129,500	3	96,383,614	150.00	94.22	6	134,771,614	300.00	134.77	
5.02.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	100,000,000	3	81,157,706	4	83,290,000	4	55,600,000	3	0	3	6,530,800	4	5,085,400	4	20,852,289	4	32,468,489	100.00	58.40	7	81,157,706	175.00	81.16	
5.02.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	20,000,000		0	1	25,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	15,059,082,887	12	29,095,301,783	85	16,798,959,614	85	15,930,614,045	100	2,907,615,186	100	3,937,557,480	100	2,386,608,425	100	4,807,136,698	100	14,038,917,789	117.65	88.13	112	29,095,301,783	131.76	193.21	
5.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	11,561,182,887	12	19,440,947,076	1	11,538,001,444	1	10,393,747,825	1	2,242,690,094	1	2,823,316,974	1	1,642,268,060	1	2,793,716,833	1	9,501,991,961	100.00	91.42	13	19,440,947,076	1,300.00	168.16	
5.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	77	11,521,541,443	12	19,440,947,076	77	11,300,010,000	77	10,393,747,825	75	2,242,690,094	75	2,823,316,974	75	1,642,268,060	75	2,793,716,833	75	9,501,991,961	97.40	91.42	87	19,440,947,076	112.99	168.74	
5.02.01.2.02.02.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	9,541,444		0	1	9,541,444	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5,000,000		0	12	26,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	5,000,000		0	3	70,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,000,000		0	1	22,450,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.06.		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	100,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.08.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Mililik Daerah	Persen	80	5,100,000		0	80	15,000,000	80	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.01.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.05.		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5,000,000		0	12	5,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Persen	80	68,200,000		0	80	60,100,000	80	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
5.02.01.2.04.01.		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100,000		0	1	100,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.02.		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	58,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.07.		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	145,000,000		0	95	175,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	165	100,000,000		0	165	100,000,000	165	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	45,000,000		0	5	75,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	980,000,000	75	2,507,273,621	55	1,038,258,170	55	891,226,220	25	137,929,760	50	212,636,586	75	113,188,769	75	242,780,793	75	706,535,908	136.36	79.28	150	2,507,273,621	272.73	255.84	
5.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	70,000,000	12	951,177,000	6	204,000,000	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	200.00	0.00	24	951,177,000	400.00	1,358.82	
5.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	19	107,261,750	12	30,000,000	12	85,000,000	3	13,243,250	3	22,841,750	6	15,607,750	9	27,643,000	9	79,335,750	75.00	93.34	28	107,261,750	233.33	178.77	
5.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	12	80,293,000	12	90,000,000	12	53,104,000	3	0	6	3,650,000	9	17,491,000	12	24,413,000	12	45,554,000	100.00	85.78	24	80,293,000	200.00	89.21	
5.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	80,000,000	12	219,538,000	12	80,000,000	12	100,000,000	12	16,795,000	12	36,775,000	10	23,530,000	10	22,580,000	10	99,680,000	83.33	99.68	22	219,538,000	183.33	274.42	
5.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	50,000,000	12	39,800,000	60	50,000,000	60	20,000,000	12	0	0	0	12	12,000,000	12	8,000,000	12	20,000,000	20.00	100.00	24	39,800,000	40.00	79.60	
5.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	12	204,938,900	12	90,000,000	12	88,000,000	12	9,965,700	12	22,886,600	10	16,191,700	10	36,132,900	12	85,176,900	100.00	96.79	24	204,938,900	200.00	227.71	
5.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	490,000,000	12	904,264,971	36	444,258,170	36	545,122,220	12	97,925,810	25	126,483,236	30	28,368,319	50	124,011,893	50	376,789,258	138.89	69.12	62	904,264,971	172.22	184.54	
5.02.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	50,000,000		0	3	50,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	60	180,000,000	69	672,400,750	60	1,138,000,000	60	1,075,132,500	69	36,688,500	69	300,402,000	69	0	69	85,310,250	69	422,400,750	115.00	39.29	138	672,400,750	230.00	373.56	
5.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000		0	1	830,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	100,000,000	0	48,400,000	25	100,000,000	25	340,000,000	0	0	0	0	0	0	9	48,400,000	9	48,400,000	36.00	14.24	9	48,400,000	36.00	48.40	realisasi di Tw.IV
5.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	12	624,000,750	4	188,000,000	4	735,132,500	12	36,688,500	12	300,402,000	12	0	12	36,910,250	12	374,000,750	300.00	50.88	24	624,000,750	600.00	3,120.00	
5.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000		0	2	10,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	10,000,000		0	2	10,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,559,600,000	69	4,341,527,983	80	1,659,600,000	80	2,300,750,000	25	459,665,932	50	560,412,170	75	545,789,146	75	602,370,872	75	2,168,238,120	93.75	94.24	144	4,341,527,983	180.00	278.37	
5.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,559,600,000	12	4,341,527,983	12	1,659,600,000	12	2,300,750,000	12	459,665,932	12	560,412,170	12	545,789,146	12	602,370,872	12	2,168,238,120	100.00	94.24	24	4,341,527,983	200.00	278.37	
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	270,000,000	100	1,369,889,200	80	735,000,000	80	692,500,000	25	10,133,500	50	19,211,000	75	14,690,000	75	626,017,500	75	670,052,000	93.75	96.76	175	1,369,889,200	218.75	507.37	
5.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	12	52,372,000	12	50,000,000	12	12,500,000	3	3,000,000	6	3,000,000	9	3,240,000	12	2,760,000	12	12,000,000	100.00	96.00	24	52,372,000	200.00	104.74	
5.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	220,000,000	12	1,317,517,200	12	685,000,000	12	680,000,000	3	7,133,500	6	16,211,000	9	11,450,000	12	623,257,500	12	658,052,000	100.00	96.77	24	1,317,517,200	200.00	598.87	
5.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	90	290,000,000	1	763,263,153	90	440,000,000	90	577,257,500	70.58	20,507,400	70.58	21,578,750	70.58	70,672,450	70.58	456,940,450	71	569,699,050	78.42	98.69	71.58	763,263,153	79.53	263.19	
5.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	40,000,000	10	111,158,850	17	70,000,000	17	87,857,500	10	12,170,900	10	13,988,750	10	15,419,250	10	39,579,950	10	81,158,850	58.82	92.38	20	111,158,850	117.65	277.90	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5.02.01.2.09.05.		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000		0	5	10,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10,000,000		0	10	30,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	10,000,000		0	3	20,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.08.		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	10,000,000		0	4	10,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	180,000,000	12	597,876,803	2	200,000,000	2	457,000,000	0	0	0	0	0	52,893,200	1	403,419,500	2	456,312,700	100.00	99.85	14	597,876,803	700.00	332.15	realisasi di Tw.IV
5.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30,000,000	12	54,227,500	2	100,000,000	2	32,400,000	12	8,336,500	12	7,590,000	12	2,360,000	12	13,941,000	12	32,227,500	600.00	99.47	24	54,227,500	1,200.00	180.76	
5.02.02.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	124,104,707,806	1	232,488,144,803	100	119,763,696,636	100	124,600,119,532	100	33,692,138,124	100	33,784,399,973	100	28,891,525,056	100	26,928,307,359	100	123,296,370,512	100.00	98.95	101	232,488,144,803	101.00	187.33	
5.02.02.2.02.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	Persen	100	1,099,000,000	4	1,935,319,366	100	1,689,000,000	100	1,224,566,245	100	169,449,948	100	214,839,000	100	253,278,165	100	269,824,159	100	907,391,272	100.00	74.10	104	1,935,319,366	104.00	176.10	
5.02.02.2.02.01.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	250,000,000	4	644,969,010	1	300,000,000	1	388,918,240	46	74,188,920	47	73,558,000	48	83,809,918	48	116,759,274	47	348,316,112	4,700.00	89.56	51	644,969,010	5,100.00	257.99	
5.02.02.2.02.02.		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1	20,000,000	2	0	1	50,000,000	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	200.00	0.00	4	0	400.00	0.00		
5.02.02.2.02.03.		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	20,000,000	2	0	1	50,000,000	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	200.00	0.00	4	0	400.00	0.00		
5.02.02.2.02.04.		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	20,000,000	60	0	1	100,000,000	1	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	6,000.00	0.00	120	0	12,000.00	0.00		
5.02.02.2.02.05.		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	300,000,000		964,626,241	12	600,000,000	12	612,108,375	3	83,361,728	6	124,713,000	9	101,167,373	12	119,056,319	12	428,298,420	100.00	69.97	24	964,626,241	200.00	321.54	
5.02.02.2.02.06.		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	200,000,000	65	325,724,115	12	300,000,000	12	223,539,630	3	11,899,300	6	16,568,000	9	68,300,874	12	34,008,566	12	130,776,740	100.00	58.50	77	325,724,115	641.67	162.86	
5.02.02.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.02.09.		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.02.10.		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	19,000,000	12	0	1	19,000,000	1	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	1,200.00	0.00	24	0	2,400.00	0.00		
5.02.02.2.02.11.		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota	Orang	47	50,000,000		0	47	50,000,000	47	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.03.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	Persen	92	871,200,000	100	1,643,480,093	92	1,820,000,000	92	944,384,887	91.4	220,793,000	95.7	198,792,660	97.8	198,063,676	97.8	199,610,163	98	817,259,499	106.30	86.54	197.8	1,643,480,093	215.00	188.65	
5.02.02.2.03.01.		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12	140,000,000	1	660,605,945	12	250,000,000	12	306,655,137	3	75,527,000	6	53,981,250	9	39,578,817	12	66,439,963	12	235,527,030	100.00	76.81	13	660,605,945	108.33	471.86	
5.02.02.2.03.02.		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	12	70,000,000	1	35,914,000	12	180,000,000	12	81,826,760	3	22,200,000	6	643,000	9	13,071,000	12	0	12	35,914,000	100.00	43.89	13	35,914,000	108.33	51.31	
5.02.02.2.03.03.		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan	Laporan	12	181,200,000	12	588,218,711	12	400,000,000	12	185,524,330	3	46,001,000	6	34,866,282	9	65,019,750	12	41,190,000	12	187,077,032	100.00	100.84	24	588,218,711	200.00	324.62	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	dan Semesteran																										
5.02.02.2.03.04.		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	50,000,000	15	105,862,107	12	90,000,000	12	111,557,570	3	77,065,000	6	12,616,000	9	7,257,607	12	8,923,500	6	105,862,107	50.00	94.89	21	105,862,107	175.00	211.72	
5.02.02.2.03.05.		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50,000,000	2	179,856,930	2	120,000,000	2	184,623,520	0	0	1	91,847,328	2	73,136,502	2	14,873,100	2	179,856,930	100.00	97.42	4	179,856,930	200.00	359.71	
5.02.02.2.03.06.		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	100,000,000	0	33,742,700	1	100,000,000	1	34,418,380	0	0	1	0	0	0	1	33,742,700	1	33,742,700	100.00	98.04	1	33,742,700	100.00	33.74	
5.02.02.2.03.07.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	50,000,000	0	11,522,600	1	220,000,000	1	11,750,000	0	0	1	4,838,800	0	0	1	6,683,800	1	11,522,600	100.00	98.06	1	11,522,600	100.00	23.05	
5.02.02.2.03.08.		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.09.		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	40,000,000	0	0	1	80,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.10.		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	20,000,000	0	27,757,100	1	150,000,000	1	28,029,190	0	0	0	0	0	0	1	27,757,100	1	27,757,100	100.00	99.03	1	27,757,100	100.00	138.79	
5.02.02.2.03.11.		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	40,000,000	0	0	50	100,000,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.12.		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.13.		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	10	122,134,507,806	40	228,909,345,344	10	116,254,696,636	10	122,431,168,400	40	33,301,895,176	10	33,370,768,313	10	28,440,183,215	100	26,458,873,037	10	121,571,719,741	100.00	99.30	50	228,909,345,344	500.00	187.42	
5.02.02.2.04.01.		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.02.		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.03.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.04.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.05.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.06.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.07.		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.08.		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	4	111,313,807,806	1	220,413,095,400	4	105,659,596,636	4	115,665,610,400	1	32,429,082,700	2	31,829,033,300	3	28,151,204,300	4	23,248,712,100	4	115,658,032,400	100.00	99.99	5	220,413,095,400	125.00	198.01	
5.02.02.2.04.09.		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	9,500,000,000	1	2,979,992,004	1	9,500,000,000	1	2,500,000,000	0	872,812,476	0	852,902,513	0	288,978,915	1	-366,564,563	1	1,648,129,341	100.00	65.93	2	2,979,992,004	200.00	31.37	realisasi dana darurat sesuai realisasi anggaran kebutuhan
5.02.02.2.04.10.		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4	1,250,700,000	1	5,516,257,940	4	1,025,100,000	4	4,265,558,000	1	0	2	688,832,500	3	0	4	3,576,725,500	4	4,265,558,000	100.00	100.00	5	5,516,257,940	125.00	441.05	
5.02.02.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses,dan tepat isi	Persen	94	2,560,000,000	10	4,132,300,309	94	2,607,674,000	94	2,410,757,170	6.5	157,855,825	26.3	636,527,028	75	340,687,688	100	857,504,858	100	1,992,575,399	106.38	82.65	110	4,132,300,309	117.02	161.42	
5.02.02.2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu	1	2,560,000,000	10	4,132,300,309	1	2,607,674,000	1	2,410,757,170	1	157,855,825	1	636,527,028	1	340,687,688	1	857,504,858	1	1,992,575,399	100.00	82.65	11	4,132,300,309	1,100.00	161.42	
5.02.02.2.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Renstra PD 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
			Disusun																										
5.02.02.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.03.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.04.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.05.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.06.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.07.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1,200,000,000	3	1,372,363,262	1	775,337,000	1	777,764,090	0	24,850,339	0	204,000,000	1	86,356,000	1	352,044,127	6	667,250,466	600.00	85.79	9	1,372,363,262	900.00	114.36	
5.02.02.2.01.08.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	700,000,000	1	1,403,466,800	1	742,602,000	1	798,650,000	0	9,894,500	0	224,109,500	1	130,669,188	1	308,691,628	1	673,364,816	100.00	84.31	2	1,403,466,800	200.00	200.50	
5.02.02.2.01.09.		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.10.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	4	100,000,000	0	0	4	100,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.02.02.2.01.11.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	10	300,000,000	12	1,356,470,247	10	589,735,000	10	834,343,080	3	123,110,986	6	208,417,528	9	123,662,500	12	196,769,103	12	651,960,117	120.00	78.14	24	1,356,470,247	240.00	452.16	
5.02.02.2.01.12.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.13.		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	100,000,000	0	0	47	100,000,000	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.02.03.		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Persen	83	2,379,590,000	20	2,483,617,582	83	2,379,500,000	83	1,404,301,570	20	139,548,900	40	102,953,250	60	257,807,905	79.4	198,958,478	20	699,268,533	24.10	49.79	40	2,483,617,582	48.19	104.37	
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	Persen	100	1,090,000,000	100	565,330,778	100	649,500,000	100	343,528,380	100	49,431,000	100	6,697,700	100	79,871,700	0	22,576,378	100	158,576,778	100.00	46.16	200	565,330,778	200.00	51.87	
5.02.03.2.01.01.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	300,000,000	1	263,882,700	1	150,000,000	1	186,118,380	0	24,500,000	1	1,310,000	0	19,005,700	0	0	1	44,815,700	100.00	24.08	2	263,882,700	200.00	87.96	
5.02.03.2.01.02.		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	340,000,000	0	0	1	170,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.02.03.2.01.03.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	200,000,000	1	90,036,078	2	180,000,000	2	94,310,000	0	11,016,000	0	5,387,700	2	18,450,000	2	17,111,378	2	51,965,078	100.00	55.10	3	90,036,078	150.00	45.02	
5.02.03.2.01.05.		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	250,000,000	1	211,412,000	1	149,500,000	1	63,100,000	3	13,915,000	3	0	3	42,416,000	3	5,465,000	9	61,796,000	900.00	97.93	10	211,412,000	1,000.00	84.56	
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	Persen	77	1,289,590,000	20	1,918,286,804	77	1,730,000,000	77	1,060,773,190	20	90,117,900	40	96,255,550	60	177,936,205	79.4	176,382,100	79	540,691,755	103.12	50.97	99.4	1,918,286,804	129.09	148.75	
5.02.03.2.01.04.		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.03.2.01.06.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	300,000,000	0	37,333,200	1	300,000,000	1	92,217,570	0	0	0	0	0	10,159,600	1	27,173,600	1	37,333,200	100.00	40.48	1	37,333,200	100.00	12.44	realisasi di Tw.IV
5.02.03.2.01.07.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	150,000,000	1	1,029,808,441	1	380,000,000	1	316,408,180	0	27,384,000	0	34,100,850	0	68,755,905	1	38,008,500	1	168,249,255	100.00	53.17	2	1,029,808,441	200.00	686.54	realisasi di Tw.IV
5.02.03.2.01.08.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	180,000,000	1	172,382,300	1	150,000,000	1	151,612,630	0	0	0	0	0	19,195,300	1	4,950,000	1	24,145,300	100.00	15.93	2	172,382,300	200.00	95.77	realisasi di Tw.IV
5.02.03.2.01.09.		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	49,590,000	0	199,970,700	1	100,000,000	1	227,170,000	0	8,566,000	0	62,154,700	0	45,800,000	1	83,450,000	1	199,970,700	100.00	88.03	1	199,970,700	100.00	403.25	realisasi di Tw.IV
5.02.03.2.01.10.		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	200,000,000	1	200,138,269	1	250,000,000	1	101,507,570	0	12,534,000	0	0	0	7,200,000	1	17,800,000	1	37,534,000	100.00	36.98	2	200,138,269	200.00	100.07	realisasi di Tw.IV
5.02.03.2.01.11.		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4	200,000,000	1	278,653,894	4	300,000,000	4	171,857,240	0	41,633,900	1	0	3	26,825,400	4	5,000,000	4	73,459,300	100.00	42.74	5	278,653,894	125.00	139.33	
5.02.03.2.01.12.		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	10,000,000	0	0	2	50,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.03.2.01.13.		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	100,000,000	0	0	47	100,000,000	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
5.02.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5	415,000,000	0	1,391,045,598	5	895,000,000	5	929,704,000	5.8	56,629,100	8.62	158,161,350	9.32	207,577,950	9.32	299,388,100	9	721,756,500	186.40	77.63	9.32	1,391,045,598	186.40	335.19	Terjadi pelampauan PAD sebesar 113% dari target yang telah ditetapkan.
5.02.04.2.01.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persen	6	415,000,000	0	1,391,045,598	6	895,000,000	6	929,704,000	40.31	56,629,100	81.68	158,161,350	117.2	207,577,950	117.2	299,388,100	86	721,756,500	1,433.33	77.63	86	1,391,045,598	1,433.33	335.19	
5.02.04.2.01.01.		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	20,000,000	0		1	20,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.02.		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	50,000,000	0		1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	40,000,000	0		1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.04.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	50,000,000	0		2	300,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.05.		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1365	20,000,000	12	393,370,050	1365	30,000,000	1365	412,784,000	340	20,101,100	368	30,770,650	556	129,844,850	1368	152,623,240	1,368	333,339,840	100.22	80.75	1380	393,370,050	101.10	1,966.85	
5.02.04.2.01.06.		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	20,000,000	0		2	20,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.07.		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	2	20,000,000	0		2	20,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.08.		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	44699	25,000,000	12	662,699,218	44699	40,000,000	44699	327,510,000	48163	30,000,000	48163	121,805,700	48163	23,883,200	48163	97,054,110	48,163	272,743,010	107.75	83.28	48175	662,699,218	107.78	2,650.80	
5.02.04.2.01.09.		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	10,000,000	0		1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.10.		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2	60,000,000	0		2	60,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.11.		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1365	20,000,000	12	334,976,330	1365	175,000,000	1365	189,410,000	340	6,528,000	358	5,585,000	350	53,849,900	1224	49,710,750	1,224	115,673,650	89.67	61.07	1236	334,976,330	90.55	1,674.88	
5.02.04.2.01.12.		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	10,000,000	0		1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.13.		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1365	50,000,000	0	1365	50,000,000	1365	0		0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.14.		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	10,000,000	0		1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.15.		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000	0		1	40,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I		II						III		IV														
					1	2	3	4	4A	5	6	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16							
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.03.		KEPEGAWAIAN																											
5.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80.75	20,000,000	80.18	23,336,210	80.75	24,000,000	80.75	28,319,836	30.5	4,878,300	30.5	1,190,410	80.2	1,382,500	80.2	6,185,000	80	13,636,210	99.32	48.15	160.38	23,336,210	198.61	116.68	
5.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75.00	20,000,000	80.18	23,336,210	75.00	24,000,000	75.00	28,319,836	73.91	4,878,300	82.6	1,190,410	91.3	1,382,500	91.3	6,185,000	70	13,636,210	93.33	48.15	150.18	23,336,210	200.24	116.68	
5.03.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20,000,000	60.5	23,336,210	3	24,000,000	3	28,319,836	0	4,878,300	1	1,190,410	2	1,382,500	3	6,185,000	3	13,636,210	100.00	48.15	63.5	23,336,210	2,116.67	116.68	
5.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,213,907,063	80	7,376,773,033	85	5,124,955,318	85	6,775,046,138	100	1,403,578,749	100	1,706,411,514	100	1,062,882,612	0	1,942,752,987	100	6,115,625,862	117.65	90.27	180	7,376,773,033	211.76	141.48	
5.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	12	3,872,314,063	3	5,233,106,584	12	3,923,511,318	12	5,571,076,336	1	1,249,010,403	1	1,555,049,574	1	893,844,788	1	1,529,851,751	1	5,227,756,516	8.33	93.84	4	5,233,106,584	33.33	135.14	
5.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	3,872,314,063	43	5,233,106,584	43	3,923,511,318	43	5,571,076,336	43	1,249,010,403	43	1,555,049,574	43	893,844,788	43	1,529,851,751	43	5,227,756,516	100.00	93.84	86	5,233,106,584	200.00	135.14	
5.03.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	30,000,000	17	7,000,000	100	30,000,000	100	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43.00	0.00	60	7,000,000	60.00	23.33		
5.03.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	30,000,000		7,000,000	3	30,000,000	3	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	7,000,000	0.00	23.33		
5.03.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	440,561,500	53	1,212,022,895	75	412,500,000	75	593,360,852	25	91,001,240	50	58,074,764	75	73,932,704	78.97	91,431,400	75	314,440,108	100.00	52.99	128	1,212,022,895	170.67	275.11	
5.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	140,561,500	6	247,739,250	9	152,500,000	9	87,452,562	2	10,332,700	5	12,584,000	5	24,888,000	9	39,627,000	9	87,431,700	100.00	99.98	15	247,739,250	166.67	176.25	
5.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	12	72,937,835	12	10,000,000	12	30,000,000	3	6,286,600	6	7,531,714	9	7,500,900	10	8,655,400	10	29,974,614	83.33	99.92	22	72,937,835	183.33	145.88	
5.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	26,000,000	12	14,235,000	12	26,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	14,235,000	100.00	54.75		
5.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	95,000,000	12	489,972,389	12	95,000,000	12	86,944,000	500	456,000	1000	11,873,500	1500	24,285,900	2000	31,364,800	2,000	67,980,200	16,666.67	78.19	2012	489,972,389	16,766.67	515.76	
5.03.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	9,000,000	12	5,250,000	12	9,000,000	12	3,600,000	12	0	24	450,000	36	750,000	48	600,000	48	1,800,000	400.00	50.00	60	5,250,000	500.00	58.33	
5.03.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	120,000,000	12	381,888,421	12	120,000,000	12	385,364,090	3	73,925,940	10	25,635,550	18	16,507,904	30	11,184,200	30	127,253,594	250.00	33.02	42	381,888,421	350.00	318.24	
5.03.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	126,000,000	70	213,219,330	75	162,000,000	75	217,715,150	35	0	35	5,099,799	45	5,099,799	60	203,019,732	60	213,219,330	80.00	97.93	130	213,219,330	173.33	169.22	
5.03.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	5,000,000		0	10	5,000,000	10	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.03.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	60,000,000	0	213,219,330	12	150,000,000	12	217,715,150	0	0	0	5,099,799	5	5,099,799	6	203,019,732	12	213,219,330	100.00	97.93	12	213,219,330	100.00	355.37	
5.03.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	61,000,000		0	2	7,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.03.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	265,707,000	98	504,204,721	80	261,944,000	80	277,377,000	25	57,759,256	50	68,568,690	75	64,051,168	89	69,330,788	89	259,709,902	111.25	93.63	187	504,204,721	233.75	189.76	
5.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	20,000,000	12	37,073,500	6	20,000,000	6	39,377,000	35	1,768,000	845	6,239,650	1450	6,539,650	2000	12,526,200	2,000	27,073,500	33,333.33	68.75	2012	37,073,500	33,533.33	185.37	
5.03.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23,763,000	12	25,975,777	12	20,000,000	12	3,100,000	0	0	0	0	0	506,910	1	1,131,476	1	1,638,386	8.33	52.85	13	25,975,777	108.33	109.31	
5.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	221,944,000	12	441,155,444	12	221,944,000	12	234,900,000	3	55,991,256	6	62,329,040	9	57,004,608	12	55,673,112	9	230,998,016	75.00	98.34	21	441,155,444	175.00	198.77	
5.03.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	479,324,500	93	207,219,503	70	335,000,000	70	115,517,000	25	5,807,850	50	19,618,687	77	25,954,153	89	49,119,316	89	100,500,006	127.14	87.00	182	207,219,503	260.00	43.23	
5.03.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	159,000,000	9	125,724,803	9	159,000,000	9	79,517,000	9	5,807,850	9	13,638,687	9	19,414,153	9	25,844,316	9	64,705,006	100.00	81.37	18	125,724,803	200.00	79.07	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																											
5.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	110,000,000	0	35,795,000	12	60,000,000	12	36,000,000	3	0	3	5,980,000	3	6,540,000	3	23,275,000	12	35,795,000	100.00	99.43	12	35,795,000	100.00	32.54	
5.03.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61,000,000		0	1	61,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.03.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	149,324,500	5	45,699,700	5	55,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	5	45,699,700	100.00	30.60	
5.03.02.		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	19	2,379,552,955	67	2,144,702,238	19	2,418,504,700	19	2,489,576,084	0	299,743,601	0	448,308,251	0	344,450,686	21.64	469,858,180	18	1,562,360,718	94.74	62.76	85	2,144,702,238	447.37	90.13	
5.03.02.2.01.		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	Persen	100	350,000,000	100	104,431,658	100	419,641,000	100	274,329,500	0	7,492,400	0	7,445,439	0	24,445,439	100	45,872,380	3	85,255,658	2.79	31.08	102.79	104,431,658	102.79	29.84	
5.03.02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	350,000,000	1	104,431,658	1	419,641,000	1	274,329,500	0	7,492,400	0	7,445,439	0	24,445,439	1	45,872,380	1	85,255,658	100.00	31.08	2	104,431,658	200.00	29.84	Indikator target renstra dan indikator target DPPA tidak sesuai satuannya.
5.03.02.2.02.		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	Persen	100	600,000,000	4	451,928,707	100	600,000,000	100	367,619,394	20	22,042,627	20	35,029,707	0	32,122,240	60	24,712,800	60	113,907,374	60.00	30.99	64	451,928,707	64.00	75.32	
5.03.02.2.02.01.		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	25	210,000,000	2527	213,995,861	25	210,000,000	25	174,390,000	0	22,042,627	0	35,029,707	0	32,122,240	1245	24,712,800	1,245	113,907,374	4,980.00	65.32	3772	213,995,861	15,088.00	101.90	
5.03.02.2.02.03.		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	390,000,000	4	237,932,846	1	390,000,000	1	193,229,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	237,932,846	400.00	61.01	Belum dilaksanakan karena belum mendapatkan persetujuan KASN
5.03.02.2.03.		Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	72	1,080,689,255	67	1,267,473,839	72	1,050,000,000	72	1,392,611,730	0	270,208,574	0	398,859,605	0	273,834,007	64	113,981,666	64	1,056,883,852	88.89	75.89	131	1,267,473,839	181.94	117.28	12% masih belum tercapai karena terbatasnya lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan di Natuna
5.03.02.2.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	85	150,000,000	0	39,408,000	85	150,000,000	85	144,420,000	0	0	0	0	0	3,800,000	59	33,608,000	59	37,408,000	69.41	25.90	59	39,408,000	69.41	26.27	Target di dalam sub Kegiatan DPA tidak sesuai dengan target pada rincian belanja di DPA. Rincian belanja di sub belanja hanya 60 org, sedangkan target di sub kegiatan 85 orang.
5.03.02.2.03.04.		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	85	230,689,255	0	424,779,987	85	230,000,000	85	267,002,000	0	135,000,000	46	62,974,900	37	6,901,000	37	11,314,100	37	216,190,000	43.53	80.97	37	424,779,987	43.53	184.14	43.52% yg belum mengikuti pendidikan lanjutan dan mengikuti ujian dinas. Penyebab: Masih terbatasnya lembaga perguruan tinggi di Natuna
5.03.02.2.03.05.		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	6	450,000,000	0	794,225,852	6	420,000,000	6	906,189,730	11	128,598,574	0	333,434,705	0	263,133,007	8	69,059,566	19	794,225,852	316.67	87.64	19	794,225,852	316.67	176.49	Pelaksanaan pengiriman diklat Kepemimpinan TK II berjumlah 5 orang, dan diklat kepemimpinan administrator 14 orang.
5.03.02.2.03.14.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	36	250,000,000	0	9,060,000	36	250,000,000	36	75,000,000	1	6,610,000	1	2,450,000	2	0	2	0	2	9,060,000	5.56	12.08	2	9,060,000	5.56	3.62	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I		II						III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5.03.02.2.04.		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	Persen	100	348,863,700	96	320,868,034	100	348,863,700	100	455,015,460	0	0	25	6,973,500	20	14,049,000	99.99	285,291,334	45	306,313,834	45.00	67.32	141	320,868,034	141.00	91.98	Ada 0.1% pegawai yang tidak disiplin
5.03.02.2.04.02.		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	320,000,000	12	278,050,634	1	320,000,000	1	340,922,360	0	0	1	0	0	0	1	263,496,434	100	263,496,434	10,000.00	77.29	112	278,050,634	11,200.00	86.89	
5.03.02.2.04.07.		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	3	28,863,700	0	42,817,400	3	28,863,700	3	114,093,100	0	0	2	6,973,500	0	14,049,000	1	21,794,900	1	42,817,400	33.33	37.53	1	42,817,400	33.33	148.34	
5.04.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																											
5.04.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	80	970,211,000	100	1,539,360,343	80	970,211,000	80	1,104,224,550	1.42	19,969,800	36	10,351,500	80	324,549,805	89.52	381,066,952	90	735,938,057	111.90	66.65	189.52	1,539,360,343	236.90	158.66	Jafung bersertifikat 316 orang, total jafung 353 orang. Yang belum sertifikat 37 orang))
5.04.02.2.02.		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen	100	970,211,000	100	1,539,360,343	100	970,211,000	100	1,104,224,550	1	19,969,800	40	10,351,500	80	324,549,805	100	381,066,952	100	735,938,057	100.00	66.65	200	1,539,360,343	200.00	158.66	
5.04.02.2.02.03.		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/kota	Orang	50	55,211,000	88	23,489,587	50	55,211,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	88	23,489,587	176.00	42.55		
5.04.02.2.02.07.		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1	915,000,000	1	1,515,870,756	1	915,000,000	1	1,104,224,550	0	19,969,800	0	10,351,500	1	324,549,805	1	381,066,952	1	735,938,057	100.00	66.65	2	1,515,870,756	200.00	165.67	Sarana dan prasarana kurang memadai untuk pelaksanaan kegiatan latsar (tidak memiliki gedung diklat dan sarana penunjang operasional diklat)

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelola Perbatasan Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.06.		PENGLOLAAN PERBATASAN																											
5.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	78.67	20,000,000	81.22	51,928,026	78.67	72,000,000	78.67	49,831,269	0	1,818,589	0	3,637,615	55.45	17,079,347	55.45	11,244,411	55	33,779,962	70.48	67.79	136.67	51,928,026	173.73	259.64	
5.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	20,000,000	81.22	51,928,026	70	72,000,000	70	49,831,269	63.15	1,818,589	63.15	3,637,615	63.15	17,079,347	63.15	11,244,411	63	33,779,962	90.21	67.79	144.37	51,928,026	206.24	259.64	
5.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20,000,000	3	51,928,026	3	72,000,000	3	49,831,269	3	1,818,589	3	3,637,615	3	17,079,347	3	11,244,411	3	33,779,962	100.00	67.79	6	51,928,026	200.00	259.64	
5.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,433,406,657	67.5	9,766,413,568	85	6,394,223,971	85	5,325,749,731	100	1,052,612,410	100	1,318,857,737	100	946,009,784	100	1,484,911,624	100	4,802,391,555	117.65	90.17	167.5	9,766,413,568	197.06	179.75	
5.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,469,910,657	1	7,867,113,603	1	4,469,910,657	1	4,006,997,697	1	895,527,864	1	1,116,757,849	1	711,641,820	1	1,069,362,276	1	3,793,289,809	100.00	94.67	2	7,867,113,603	200.00	176.00	
5.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	4,469,910,657	28	7,867,113,603	28	4,469,910,657	28	4,006,997,697	26	895,527,864	26	1,116,757,849	26	711,641,820	27	1,069,362,276	26	3,793,289,809	92.86	94.67	54	7,867,113,603	192.86	176.00	
5.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	45,000,000	0	0	90	83,813,314	90	14,130,000	100	0	100	0	100	0	0	0	100	0	111.11	0.00	100	0	111.11	0.00	
5.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	0	1	33,813,314	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	30,000,000	0	0	3	50,000,000	3	14,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	realisasi di Tw.IV	
5.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	267,496,000	65.82	611,607,823	75	398,500,000	75	405,073,970	25	45,787,314	50	68,059,990	75	50,759,615	100	36,904,492	75	201,511,411	100.00	49.75	140.82	611,607,823	187.76	228.64	
5.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	0	0	12	60,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	8,000,000	5	61,289,000	10	20,000,000	10	54,534,977	2	7,309,000	2	8,173,000	5	11,745,000	4	15,143,000	13	42,370,000	130.00	77.69	18	61,289,000	180.00	766.11	
5.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1129	39,254,000	12	60,000,000	12	35,400,000	3	1,728,000	6	7,891,000	4	5,107,000	10	5,004,000	23	19,730,000	191.67	55.73	1152	39,254,000	9,600.00	392.54	
5.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15,000,000	16	39,795,800	12	45,000,000	12	28,314,322	4	2,059,800	5	5,569,650	2	2,580,000	6	6,776,000	17	16,985,450	141.67	59.99	33	39,795,800	275.00	265.31	
5.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10,000,000	0	0	12	10,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	2,000,000	9	51,499,100	1	3,500,000	1	17,728,361	2	3,500,000	1	1,461,600	0	0	2	5,831,500	1	10,793,100	100.00	60.88	10	51,499,100	1,000.00	2,574.96	
5.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	71	172,496,000	119	419,769,923	71	200,000,000	71	269,096,310	21	31,190,514	16	44,964,740	24	31,327,615	18	4,149,992	79	111,632,861	111.27	41.48	198	419,769,923	278.87	243.35	
5.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Persen	10	80,000,000	0	232,244,250	10	362,000,000	10	248,511,830	0	0	0	0	10	52,489,500	10	179,754,750	10	232,244,250	100.00	93.45	10	232,244,250	100.00	290.31	
5.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	80,000,000	0	232,244,250	10	362,000,000	10	248,511,830	0	0	0	0	10	52,489,500	11	179,754,750	10	232,244,250	100.00	93.45	10	232,244,250	100.00	290.31	
5.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	35	40,000,000	0	35	350,000,000	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.06.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	350,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	70	6,000,000	65	36,107,000	70	10,000,000	70	31,500,000	25	5,433,000	50	8,109,000	75	7,953,000	100	9,652,000	75	31,147,000	107.14	98.88	140	36,107,000	200.00	601.78	
5.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	36,107,000	12	10,000,000	12	31,500,000	3	5,433,000	3	8,109,000	3	7,953,000	3	9,652,000	12	31,147,000	100.00	98.88	24	36,107,000	200.00	601.78	
5.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	340,000,000	65	842,283,271	70	360,000,000	70	451,610,434	25	96,841,386	50	112,576,354	75	104,795,535	100	122,051,054	75	436,264,329	107.14	96.60	140	842,283,271	200.00	247.73	
5.06.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	40,000,000	1	60,585,999	12	60,000,000	12	39,259,554	3	6,535,242	3	3,988,825	3	5,224,283	3	10,696,079	12	26,444,429	100.00	67.36	13	60,585,999	108.33	151.46	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
			yang Disediakan																										
5.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	300,000,000	20	781,697,272	17	300,000,000	17	412,350,880	20	90,306,144	20	108,587,529	20	99,571,252	21	111,354,975	20	409,819,900	117.65	99.39	40	781,697,272	235.29	260.57	
5.06.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	185,000,000	75	177,057,621	75	360,000,000	75	167,925,800	25	9,022,846	50	13,354,544	75	18,370,314	100	67,187,052	75	107,934,756	100.00	64.28	150	177,057,621	200.00	95.71	
5.06.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	60,000,000	4	87,510,621	4	60,000,000	4	66,007,800	3	6,222,846	3	8,734,544	3	16,370,314	4	15,110,052	3	46,437,756	75.00	70.35	7	87,510,621	175.00	145.85	
5.06.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	95,000,000	1	59,900,000	1	50,000,000	1	51,728,000	0	0	0	0	0	0	1	44,900,000	1	44,900,000	100.00	86.80	2	59,900,000	200.00	63.05	
5.06.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	0	1,947,000	1	200,000,000	1	25,620,000	0	0	0	0	0	0	1	1,947,000	1	1,947,000	100.00	7.60	1	1,947,000	100.00	9.74	
5.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	1	27,700,000	1	50,000,000	1	24,570,000	4	2,800,000	6	4,620,000	3	2,000,000	4	5,230,000	3	14,650,000	300.00	59.63	4	27,700,000	400.00	277.00	
5.06.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persen	20	760,000,000	11.87	302,431,083	20	725,000,000	20	490,000,000	5	12,118,531	10	67,523,571	15	88,135,692	40.85	26,863,139	41	194,640,933	204.25	39.72	52.72	302,431,083	263.60	39.79	
5.06.02.2.01.		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	Persen	15	180,000,000	0	91,340,812	15	240,000,000	15	250,000,000	5	7,989,331	10	60,111,371	15	5,647,371	40.85	17,592,739	41	91,340,812	272.33	36.54	40.85	91,340,812	272.33	50.74	
5.06.02.2.01.01.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	1	100,000,000	1	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
5.06.02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	1	80,000,000	0	91,340,812	1	200,000,000	1	250,000,000	0	7,989,331	0	60,111,371	0	5,647,371	1	17,592,739	1	91,340,812	100.00	36.54	1	91,340,812	100.00	114.18	
5.06.02.2.02.		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persen	75	440,000,000	59.36	164,976,263	75	235,000,000	75	120,000,000	25	2,064,600	50	3,743,600	75	46,672,713	90	4,705,200	75	57,186,113	100.00	47.66	134.36	164,976,263	179.15	37.49	
5.06.02.2.02.01.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	80,000,000	1	164,976,263	1	150,000,000	1	120,000,000	0	2,064,600	0	3,743,600	0	46,672,713	1	4,705,200	1	57,186,113	100.00	47.66	2	164,976,263	200.00	206.22	
5.06.02.2.02.02.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.02.03.		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.02.04.		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen	1	80,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.02.05.		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	80,000,000	0	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.03.		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi	Persen	45	140,000,000	0	46,114,008	45	250,000,000	45	120,000,000	0	2,064,600	5	3,668,600	15.58	35,815,608	45	4,565,200	45	46,114,008	100.00	38.43	45	46,114,008	100.00	32.94	
5.06.02.2.03.01.		Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	70,000,000	0	46,114,008	1	150,000,000	1	120,000,000	0	2,064,600	0	3,668,600	0	35,815,608	1	4,565,200	1	46,114,008	100.00	38.43	1	46,114,008	100.00	65.88	
5.06.02.2.03.02.		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	70,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
6.		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																											
6.01.		INSPEKTORAT DAERAH																											
6.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.80	50,000,000		3,600,000	79.80	50,000,000	79.80	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	3,600,000	0.00	7.20	
6.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,000,000	73.53	3,600,000	70	50,000,000	70	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	73.53	3,600,000	105.04	7.20	
6.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	3,600,000	3	50,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	3	3,600,000	100.00	7.20	
6.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	7,096,598,874	80	18,913,079,796	85	8,504,663,874	85	11,549,559,941	100	2,210,060,172	100	2,880,009,587	100	1,404,734,049	0	3,660,849,878	100	10,155,653,686	117.65	87.93	180	18,913,079,796	211.76	266.51	
6.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,739,598,874	1	16,665,474,291	1	6,975,663,874	1	9,562,367,211	25	2,018,397,191	25	2,615,410,838	25	1,019,835,370	25	3,269,677,055	25	8,923,320,454	2,500.00	93.32	26	16,665,474,291	2,600.00	290.36	
6.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	5,739,598,874	56	16,665,474,291	40	6,975,663,874	40	9,562,367,211	58	2,018,397,191	58	2,615,410,838	58	1,019,835,370	58	3,269,677,055	58	8,923,320,454	145.00	93.32	114	16,665,474,291	285.00	290.36	--
6.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	300,000,000	90	252,737,072	100	400,000,000	100	260,502,400	25	0	25	29,982,738	25	28,415,700	25	73,841,781	25	132,240,219	25.00	50.76	115	252,737,072	115.00	84.25	
6.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	300,000,000	30	252,737,072	30	400,000,000	30	260,502,400	25	0	25	29,982,738	25	28,415,700	25	73,841,781	25	132,240,219	83.33	50.76	55	252,737,072	183.33	84.25	--
6.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	350,000,000	68	1,068,220,415	75	400,000,000	75	729,432,772	25	65,901,344	50	87,850,019	75	159,362,818	25	178,757,392	75	491,871,573	100.00	67.43	143	1,068,220,415	190.67	305.21	
6.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	9	162,676,600	1	25,000,000	1	58,186,700	2	0	3	0	2	15,426,800	3	42,062,300	9	57,489,100	900.00	98.80	18	162,676,600	1,800.00	650.71	
6.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40000	20,000,000	4000	34,994,300	40000	20,000,000	40000	55,460,928	8484	4,003,750	3500	2,479,900	2500	8,608,500	0	0	14,484	15,092,150	36.21	27.21	18484	34,994,300	46.21	174.97	
6.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	0	12	5,000,000	12	2,000,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8.33	0.00	1	0	8.33	0.00	
6.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	76	300,000,000	164	870,549,515	76	350,000,000	76	613,785,144	15	61,897,594	15	85,370,119	17	135,327,518	15	136,695,092	62	419,290,323	81.58	68.31	226	870,549,515	297.37	290.18	
6.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	365,000,000	0	180,430,000	75	362,000,000	75	303,700,000	0	0	0	0	50	95,510,000	15	84,920,000	50	180,430,000	66.67	59.41	50	180,430,000	66.67	49.43	
6.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	100,000,000	0	24,920,000	30	100,000,000	30	35,700,000	0	0	0	0	0	0	15	24,920,000	15	24,920,000	50.00	69.80	15	24,920,000	50.00	24.92	
6.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	145,000,000	0	155,510,000	30	172,000,000	30	268,000,000	0	0	0	0	10	95,510,000	22	60,000,000	32	155,510,000	106.67	58.03	32	155,510,000	106.67	107.25	
6.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	40,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	297,000,000	100	599,799,368	70	317,000,000	70	586,428,470	25	120,511,637	50	133,915,992	75	70,104,161	5	3,526,000	75	328,057,790	107.14	55.94	175	599,799,368	250.00	201.95	
6.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,000,000	433	2,750,286	500	5,000,000	500	3,000,000	100	0	100	0	100	0	5	2,750,000	305	2,750,000	61.00	91.67	738	2,750,286	147.60	55.01	
6.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12,000,000	1	1,590,380	1	12,000,000	1	4,000,000	1	0	1	0	0	812,500	5	776,000	7	1,588,500	700.00	39.71	8	1,590,380	800.00	13.25	
6.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	280,000,000	11	595,458,702	13	300,000,000	13	579,428,470	11	120,511,637	11	133,915,992	11	69,291,661	0	0	33	323,719,290	253.85	55.87	44	595,458,702	338.46	212.66	
6.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	45,000,000	75	146,418,650	75	50,000,000	75	107,129,088	100	5,250,000	100	12,850,000	100	31,506,000	14	50,127,650	100	99,733,650	133.33	93.10	175	146,418,650	233.33	325.37	
6.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	45,000,000	15	146,418,650	14	50,000,000	14	107,129,088	14	5,250,000	14	12,850,000	14	31,506,000	14	50,127,650	56	99,733,650	400.00	93.10	71	146,418,650	507.14	325.37	
6.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang	Persen	100	2,316,065,000	100	802,916,275	100	1,970,000,000	100	1,043,460,000	100	16,200,000	100	75,840,000	100	269,584,000	100	202,200,000	100	563,824,000	100.00	54.03	200	802,916,275	200.00	34.67	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
		PENGAWASAN	Bebas dari Temuan Material																										
6.01.02.2.01.		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	1,680,822,000	90	478,231,634	100	1,650,000,000	100	672,150,000	100	16,200,000	85	49,100,000	89.59	191,364,000	92.5	142,350,000	90	399,014,000	89.56	59.36	179.56	478,231,634	179.56	28.45	Ada beberapa rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut
6.01.02.2.01.01.		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	235,000,000	3	66,650,552	3	300,000,000	3	68,980,000	0	0	0	0	0	33,600,000	2	33,000,000	2	66,600,000	66.67	96.55	5	66,650,552	166.67	28.36	
6.01.02.2.01.02.		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	10	100,000,000	1	86,400,000	10	100,000,000	10	163,230,000	0	0	3	0	7	29,250,000	8	57,150,000	18	86,400,000	180.00	52.93	19	86,400,000	190.00	86.40	
6.01.02.2.01.03.		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	45	200,000,000	46	14,250,032	45	280,000,000	45	39,660,000	1	0	46	5,850,000	1	8,400,000	2	0	50	14,250,000	111.11	35.93	96	14,250,032	213.33	7.13	
6.01.02.2.01.04.		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	45	150,000,000	1	62,099,800	45	200,000,000	45	39,000,000	46	16,200,000	0	18,900,000	0	2,250,000	2	0	48	37,350,000	106.67	95.77	49	62,099,800	108.89	41.40	
6.01.02.2.01.05.		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	15	450,000,000	5	127,127,800	15	450,000,000	15	259,280,000	0	0	19	19,350,000	2	52,464,000	8	24,600,000	29	96,414,000	193.33	37.19	34	127,127,800	226.67	28.25	
6.01.02.2.01.06.		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	9	345,822,000	0	0	9	120,000,000	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.02.2.01.07.		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	80	200,000,000	84	121,703,450	80	200,000,000	80	102,000,000	0	0	8	5,000,000	2	65,400,000	13	27,600,000	23	98,000,000	28.75	96.08	107	121,703,450	133.75	60.85	
6.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pesentase Penyelesaian Kerugian Daerah	Persen	100	635,243,000	100	324,684,641	100	320,000,000	100	371,310,000	60	0	63	26,740,000	65.91	78,220,000	0	59,850,000	66	164,810,000	65.91	44.39	165.91	324,684,641	165.91	51.11	
6.01.02.2.02.01.		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	65	200,000,000	2	3,470,600	65	120,000,000	65	15,000,000	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3.08	0.00	4	3,470,600	6.15	1.74	
6.01.02.2.02.02.		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	435,243,000	11	321,214,041	100	200,000,000	100	356,310,000	0	0	3	26,740,000	5	78,220,000	6	59,850,000	14	164,810,000	14.00	46.25	25	321,214,041	25.00	73.80	Tingginya beban kerja APIP untuk melakukan audit tertentu
6.01.03.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	Persen	60	600,000,000	100	584,055,014	60	528,000,000	60	531,050,760	7	61,650,000	0	84,750,000	20	144,969,200	0	215,597,877	20	506,967,077	33.33	95.46	120	584,055,014	200.00	97.34	
6.01.03.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peraturan	1	100,000,000	100	0	1	80,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	0	10,000.00	0.00	
6.01.03.2.01.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	100,000,000	0	0	1	80,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.03.2.02.		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	Persen	100	500,000,000	100	584,055,014	100	448,000,000	100	531,050,760	10.56	61,650,000	26.08	84,750,000	47.82	144,969,200	75.55	215,597,877	48	506,967,077	47.82	95.46	147.82	584,055,014	147.82	116.81	
6.01.03.2.02.02.		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	100	100,000,000	100	47,843,000	100	78,000,000	100	39,000,000	0	0	7	6,000,000	45	21,600,000	4	10,950,000	56	38,550,000	56.00	98.85	156	47,843,000	156.00	47.84	
6.01.03.2.02.03.		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	100	200,000,000	100	402,036,014	100	300,000,000	100	423,800,760	0	52,500,000	6	78,750,000	4	100,149,200	4	170,327,877	14	401,727,077	14.00	94.79	114	402,036,014	114.00	201.02	
6.01.03.2.02.04.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	100	200,000,000	160	134,176,000	100	70,000,000	100	68,250,000	45	9,150,000	4	0	3	23,220,000	5	34,320,000	57	66,690,000	57.00	97.71	217	134,176,000	217.00	67.09	
6.01.03.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	Persen	40	200,000,000	100	123,090,500	40	165,000,000	40	98,101,570	100	4,800,000	100	2,250,000	100	34,350,000	100	54,084,500	100	95,484,500	250.00	97.33	200	123,090,500	500.00	61.55	
6.01.03.2.02.		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	Persen	100	200,000,000	100	123,090,500	100	165,000,000	100	98,101,570	10.56	4,800,000	26.08	2,250,000	47.82	34,350,000	75.55	54,084,500	48	95,484,500	47.82	97.33	147.82	123,090,500	147.82	61.55	
6.01.03.2.02.01.		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	100	200,000,000	100	123,090,500	100	165,000,000	100	98,101,570	6	4,800,000	2	2,250,000	3	34,350,000	4	54,084,500	15	95,484,500	15.00	97.33	115	123,090,500	115.00	61.55	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I		II						III		IV														
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
8.		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																											
8.01.		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																											
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.41	24,000,000	79	21,868,270	77.41	28,800,000	77.41	22,272,240	0	180,188	0	780,188	0	10,479,800	59.9	10,428,094	60	21,868,270	77.38	98.19	138.9	21,868,270	179.43	91.12	
8.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.50	24,000,000	79	21,868,270	78.50	28,800,000	78.50	22,272,240	66.66	180,188	72.22	780,188	83.33	10,479,800	59.9	10,428,094	83	21,868,270	106.15	98.19	162.33	21,868,270	206.79	91.12	
8.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	24,000,000	3	21,868,270	3	28,800,000	3	22,272,240	3	180,188	3	780,188	3	10,479,800	3	10,428,094	3	21,868,270	100.00	98.19	6	21,868,270	200.00	91.12	
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jenis	10	144,000,000	10	0	10	99,000,000	10	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	1,000.00	0.00	110	0	1,100.00	0.00	
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	10	5,386,440,000	10	8,179,434,881	10	5,456,440,000	10	4,459,404,027	100	957,924,265	100	1,197,811,827	100	677,718,210	100	1,299,861,389	100	4,133,315,691	1,000.00	92.69	110	8,179,434,881	1,100.00	151.85	
8.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,342,890,000	1	6,540,797,955	1	4,342,890,000	1	3,511,738,607	1	735,283,070	1	986,122,706	1	474,101,114	1	1,100,870,789	1	3,296,377,679	100.00	93.87	2	6,540,797,955	200.00	150.61	
8.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	4,342,890,000	21	6,540,797,955	23	4,342,890,000	23	3,511,738,607	22	735,283,070	22	986,122,706	22	474,101,114	22	1,100,870,789	22	3,296,377,679	95.65	93.87	43	6,540,797,955	186.96	150.61	
8.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	92	50,000,000	0	92	50,000,000	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000	0	3	50,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	80	17,000,000	0	0	80	17,000,000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17,000,000	0	0	1	17,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Jenis	55	48,000,000	75	0	55	3,000,000	55	0	25	0	50	0	75	0	100	0	75	0	136.36	0.00	150	0	272.73	0.00	
8.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	281,000,000	75	692,835,094	55	306,000,000	55	364,604,040	25	123,031,983	50	86,992,077	75	63,077,096	100	19,525,468	75	292,626,624	136.36	80.26	150	692,835,094	272.73	246.56	
8.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9,000,000	3	121,403,876	1	34,000,000	1	46,300,000	1	23,528,876	1	0	1	12,532,600	1	7,327,400	1	43,388,876	100.00	93.71	4	121,403,876	400.00	1,348.93	
8.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12,000,000	4	87,592,000	10	12,000,000	10	15,000,000	3	3,510,000	2	3,991,000	2	4,000,000	3	3,499,000	3	15,000,000	30.00	100.00	7	87,592,000	70.00	729.93	
8.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	25,000,000	0	12	25,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25,000,000	969	12,489,068	2	25,000,000	2	12,500,000	0	2,490,000	1	4,000,000	0	3,000,000	1	2,999,068	2	12,489,068	100.00	99.91	971	12,489,068	48,550.00	49.96	
8.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	10,000,000	8	5,000,000	8	10,000,000	8	5,000,000	0	0	2	1,500,000	2	2,000,000	4	1,500,000	8	5,000,000	100.00	100.00	16	5,000,000	200.00	50.00	
8.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	48,000,000	0	10	3,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,000,000	82	466,350,150	12	200,000,000	12	285,804,040	3	93,503,107	3	77,501,077	3	41,544,496	0	4,200,000	3	216,748,680	25.00	75.84	85	466,350,150	708.33	233.18	
8.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Jenis	55	48,000,000	0	55	48,000,000	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	48,000,000	0	5	48,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	305,000,000	75	93,255,000	75	350,000,000	75	113,000,000	0	0	0	0	40	35,425,000	75	57,830,000	40	93,255,000	53.33	82.53	115	93,255,000	153.33	30.58	
8.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	200,000,000	6	0	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	0	600.00	0.00		
8.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	45,000,000	0	6	45,000,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	6	93,255,000	5	105,000,000	5	113,000,000	0	0	0	0	1	35,425,000	5	57,830,000	6	93,255,000	120.00	82.53	12	93,255,000	240.00	155.43	
8.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan sarana	Persen	55	335,550,000	80	717,005,106	55	335,550,000	55	399,761,380	25	90,257,168	50	97,550,000	75	89,550,000	75	104,228,044	75	381,585,212	136.36	95.45	155	717,005,106	281.82	213.68	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
		Pemerintahan Daerah	penunjang urusan perkantoran																										
8.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12,000,000	20	12,000,000	12	12,000,000	12	8,000,000	3	1,200,000	3	1,800,000	3	1,800,000	3	1,200,000	3	6,000,000	25.00	75.00	23	12,000,000	191.67	100.00	
8.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	323,550,000	14	705,005,106	16	323,550,000	16	391,761,380	16	89,057,168	16	95,750,000	16	87,750,000	16	103,028,044	5	375,585,212	31.25	95.87	19	705,005,106	118.75	217.90	
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara	Jenis	55	48,000,000		0	55	48,000,000	55	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	48,000,000		0	10	48,000,000	10	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	55,000,000	75	135,541,726	65	55,000,000	65	70,300,000	25	9,352,044	25	27,147,044	75	15,565,000	75	17,407,088	75	69,471,176	115.38	98.82	150	135,541,726	230.77	246.44	
8.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	45,000,000	6	102,641,726	6	45,000,000	6	54,300,000	3	8,352,044	6	23,147,044	6	9,200,000	6	12,772,088	3	53,471,176	50.00	98.47	9	102,641,726	150.00	228.09	
8.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	6	32,900,000	1	10,000,000	1	16,000,000	1	1,000,000	1	4,000,000	1	6,365,000	1	4,635,000	1	16,000,000	100.00	100.00	7	32,900,000	700.00	329.00	
8.01.02.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Niai–nilai Ideologi Pancasila	Persen	75	380,000,000	70	968,838,529	75	380,000,000	75	490,816,380	0	1,716,000	0	70,200,000	100	323,618,600	100	20,308,000	100	415,842,600	133.33	84.72	170	968,838,529	226.67	254.96	Pelaksanaan Sosialisasi di Wasbang yang pelaksanaannya sudah dilakukan di satu lokasi yaitu di kecamatan yang sudah ditentukan pelaksanaanya
8.01.02.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	3	380,000,000	3	968,838,529	3	380,000,000	3	490,816,380	0	1,716,000	0	70,200,000	3	323,618,600	3	20,308,000	3	415,842,600	100.00	84.72	6	968,838,529	200.00	254.96	Pelaksanaan Sosialisasi di Wasbang yang pelaksanaannya sudah dilakukan di satu lokasi yaitu di kecamatan yang sudah ditentukan pelaksanaanya jadi dianggap sudah mencapai 100 %
8.01.02.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	75	360,000,000	50	968,838,529	75	360,000,000	75	490,816,380	0	1,716,000	0	70,200,000	75	323,618,600	75	20,308,000	150	415,842,600	200.00	84.72	200	968,838,529	266.67	269.12	Pelaksanaan Sosialisasi di Wasbang yang pelaksanaannya sudah dilakukan di satu lokasi yaitu di kecamatan yang sudah ditentukan pelaksanaanya jadi dianggap sudah mencapai 100 % karena di sini kegaitannya sudah termasuk HUT dan Paskib
8.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.03.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	Persen	26	450,000,000	50	1,289,347,145	26	450,000,000	26	10,145,231,553	56.25	4,093,900	56.25	16,010,649	56.26	7,691,386	56.25	585,918,643	56	613,714,578	216.38	6.05	106.26	1,289,347,145	408.69	286.52	Peningkatan Peran Partai Politik keterwaliannya di ambil dari keterwakilan partai di Legislatif sehingga kegiatan tersebut tercapai
8.01.03.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	Persen	80	450,000,000	86	1,289,347,145	80	450,000,000	80	10,145,231,553	81.25	4,093,900	81.25	16,010,649	81.25	7,691,386	81.25	585,918,643	81	613,714,578	101.56	6.05	167.25	1,289,347,145	209.06	286.52	Pemantapan Pelaksanaan dibidang Politik sudah melakukan kegiatan Pembinaan Bantuan PARPOL, artinya sudah terakomodir di kegiatan Politik itu sendiri
8.01.03.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	9	450,000,000	9	1,289,347,145	9	450,000,000	9	10,145,231,553	0	4,093,900	0	16,010,649	0	7,691,386	9	585,918,643	9	613,714,578	100.00	6.05	18	1,289,347,145	200.00	286.52	Jumlah PARPOL yang terdaftar ada 16 PARPOL, yang aktif atau yang masuk di Parlemen ada 9 PARPOL, artinya Kegiatan Koordinasi sudah tercapai
8.01.04.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	Persen	100	91,000,000	100	49,837,879	100	91,000,000	100	53,746,607	0	150,912	0	150,912	0	0	56	33,657,853	56	33,959,677	56.00	63.18	156	49,837,879	156.00	54.77	Sudah melaksanakan pembinaan ORMAS melalui kegiatan Monitoring dan Pengawasan keberadaan Ormas, sehingga target tersebut sudah terlaksana

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
8.01.04.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	65	91,000,000	60	49,837,879	65	91,000,000	65	53,746,607	0	150,912	0	150,912	0	0	52	33,657,853	52	33,959,677	80.00	63.18	112	49,837,879	172.31	54.77	Sudah melaksanakan pembinaan ORMAS melalui kegiatan Monitoring dan Pengawasan keberadaan Ormas, sehingga target tersebut sudah terlaksana melalui kegiatan sosialisasi
8.01.04.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.04.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	65	61,000,000	4	49,837,879	65	61,000,000	65	53,746,607	0	150,912	0	150,912	0	0	55	33,657,853	55	33,959,677	84.62	63.18	59	49,837,879	90.77	81.70	Sudah melaksanakan pembinaan ORMAS melalui kegiatan Monitoring dan Pengawasan keberadaan Ormas, sehingga target tersebut sudah terlaksana melalui kegiatan sosialisasi
8.01.05.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Persen	70	290,000,000	100	208,492,131	70	290,000,000	70	150,781,380	0	425,580	0	197,580	0	600,000	79	68,965,607	79	70,188,767	112.86	46.55	179	208,492,131	255.71	71.89	Pada tahun 2023 ini sudah melaksanakan di dua Kecamatan sosialisasi narkoba yaitu dg system Prostes dan Frytes dar 120 orang peserta,
8.01.05.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	65	290,000,000	100	208,492,131	65	290,000,000	65	150,781,380	0	425,580	0	197,580	0	600,000	65	68,965,607	65	70,188,767	100.00	46.55	165	208,492,131	253.85	71.89	Pada tahun 2023 ini sudah melaksanakan di dua Kecamatan sosialisasi narkoba yaitu dg system Prostes dan Frytes dar 120 orang peserta, dan yang memahami ada 95%, jadi di anggap sosialisasi tersebut tercapai
8.01.05.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	70	270,000,000	120	208,492,131	70	270,000,000	70	150,781,380	0	425,580	0	197,580	0	600,000	70	68,965,607	70	70,188,767	100.00	46.55	190	208,492,131	271.43	77.22	Pada tahun 2023 ini sudah melaksanakan di dua Kecamatan sosialisasi narkoba yaitu dg system Prostes dan Frytes dar 120 orang peserta, dan yang memahami ada 95%, jadi di anggap sosialisasi tersebut tercapai karena sudah melaksanakan semua Koordinasi
8.01.05.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.06.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Persen	100	783,802,812	100	1,028,805,614	100	783,802,812	100	639,917,240	100	150,482,100	100	119,954,000	100	136,645,000	0	122,062,150	100	529,143,250	100.00	82.69	200	1,028,805,614	200.00	131.26	Peningkatan Monitoring dalam penyajian data DIPOLEKSOSBUDHAMKAM yang akurat kepada pimpinan
8.01.06.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	783,802,812	100	1,028,805,614	100	783,802,812	100	639,917,240	100	150,482,100	100	119,954,000	100	136,645,000	100	122,062,150	100	529,143,250	100.00	82.69	200	1,028,805,614	200.00	131.26	Peningkatan Monitoring
8.01.06.2.01.01.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.06.2.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	30,000,000		0	5	30,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		
8.01.06.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5	60,000,000		0	5	60,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.06.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	30	323,802,812	31	680,568,614	30	323,802,812	30	414,805,240	20	97,232,100	25	93,378,000	25	89,625,000	30	80,481,150	100	360,716,250	333.33	86.96	131	680,568,614	436.67	210.18	Peningkatan Kualitas SDM dari TIM Kewaspadaan Dini
8.01.06.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.06.2.01.06.		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	300,000,000	12	348,237,000	12	300,000,000	12	225,112,000	3	53,250,000	3	26,576,000	3	47,020,000	3	41,581,000	3	168,427,000	25.00	74.82	15	348,237,000	125.00	116.08	Peningkatan iPrekuensi rapat Koordinasi dan Pertemuan

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	15	142,552,824	20	120,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	15	142,552,824	75.00	118.79		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	142,552,824	100	120,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	142,552,824	100.00	118.79		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	142,552,824	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	142,552,824	100.00	118.79		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.95	50,082,000	72.34	15,674,000	79.95	60,000,000	79.95	21,600,000	0	1,500,000	0	5,825,000	65.65	0	0	4,650,000	66	11,975,000	82.11	55.44	137.99	15,674,000	172.60	31.30	Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,082,000	72.34	15,674,000	70	60,000,000	70	21,600,000	83.33	1,500,000	83.3	5,825,000	87.5	0	0	4,650,000	88	11,975,000	125.00	55.44	159.84	15,674,000	228.34	31.30	Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	0	2	30,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,082,000	2	15,674,000	2	30,000,000	2	21,600,000	1	1,500,000	1	5,825,000	0	0	4,650,000	2	11,975,000	100.00	55.44	4	15,674,000	200.00	52.10		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,091,519,012	72.34	15,027,669,306	85	8,632,684,012	85	8,173,588,548	100	1,668,123,118	100	2,168,790,684	100	1,420,222,102	100	2,048,281,143	100	7,305,417,047	117.65	89.38	172.34	15,027,669,306	202.75	185.72	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6,346,020,012	1	12,263,518,955	1	6,646,020,012	1	6,414,872,548	1	1,428,259,133	1	1,850,878,526	1	1,072,715,262	1	1,689,693,330	1	6,041,546,251	100.00	94.18	2	12,263,518,955	200.00	193.25	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	6,346,020,012	54	12,263,518,955	49	6,646,020,012	49	6,414,872,548	51	1,428,259,133	51	1,850,878,526	51	1,072,715,262	51	1,689,693,330	51	6,041,546,251	104.08	94.18	105	12,263,518,955	214.29	193.25	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	95,000,000	0	0	95	195,000,000	95	79,325,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	105.26	0.00	100	0	105.26	0.00	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	50,000,000	0	0	1	150,000,000	1	79,325,000		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	0	3	45,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	474,564,000	75	502,059,594	75	354,164,000	75	320,956,000	25	22,561,832	50	67,339,530	75	40,591,984	100	114,730,748	75	245,224,094	100.00	76.40	150	502,059,594	200.00	105.79	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	111,000,000	3	130,530,000	12	80,000,000	12	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	3	130,530,000	25.00	117.59	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	6	26,998,000	12	12,000,000	12	15,030,000	3	3,534,000	3	8,521,700	3	2,942,300	0	0	9	14,998,000	75.00	99.79	15	26,998,000	125.00	224.98	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	46,400,000	7	71,363,400	12	12,000,000	12	110,432,000	3	3,678,400	3	8,420,000	3	8,805,000	3	23,020,000	12	43,923,400	100.00	39.77	19	71,363,400	158.33	153.80	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	32490	31,732,271	12	60,000,000	12	20,000,000	3	3,010,071	3	1,922,500	3	3,596,850	3	5,379,650	12	13,909,071	100.00	69.55	32502	31,732,271	270,850.00	52.89	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8,000,000	0	0	12	8,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	8	65,810,733	1	5,000,000	1	40,494,000	1	7,018,361	1	17,681,430	1	8,799,820	1	5,343,822	4	38,843,433	400.00	95.92	12	65,810,733	1,200.00	109.68	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	169,964,000	87	175,625,190	40	169,964,000	40	135,000,000	17	5,321,000	32	30,793,900	35	16,448,014	34	80,987,276	118	133,550,190	295.00	98.93	205	175,625,190	512.50	103.33	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	17	7,200,000	0	0	17	7,200,000	17	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	190,000,000	0	101,985,000	75	530,000,000	75	316,125,000	0	0	0	0	50	101,985,000	0	0	50	101,985,000	66.67	32.26	50	101,985,000	66.67	53.68	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5	6	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100															
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	142,000,000	4	99,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	101,985,000	5	228,000,000	5	217,000,000	0	0	0	11	101,985,000	0	11	101,985,000	220.00	47.00	11	101,985,000	220.00	101.99					
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30,000,000	0	0	2	120,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	727,500,000	70	1,987,648,576	100	727,500,000	100	951,175,000	25	196,684,900	50	229,735,628	75	200,027,356	100	213,192,845	75	839,640,729	75.00	88.27	145	1,987,648,576	145.00	273.22			
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	480	9,734,900	12	8,000,000	12	5,000,000	3	1,976,000	3	3,002,900	3	0	0	0	9	4,978,900	75.00	99.58	489	9,734,900	4,075.00	121.69			
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,000,000	12	73,537,990	12	60,000,000	12	33,000,980	3	5,522,675	3	6,109,012	3	5,473,640	3	6,115,309	12	23,220,636	100.00	70.36	24	73,537,990	200.00	122.56			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	659,500,000	120	1,904,375,686	12	659,500,000	12	913,174,020	3	189,186,225	3	220,623,716	3	194,553,716	3	207,077,536	12	811,441,193	100.00	88.86	132	1,904,375,686	1,100.00	288.76			
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	258,435,000	60	172,457,181	75	180,000,000	75	91,135,000	46	20,617,253	55	20,837,000	55	4,902,500	100	30,664,220	55	77,020,973	73.33	84.51	115	172,457,181	153.33	66.73			
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	68,435,000	9	109,971,233	5	60,000,000	5	49,000,000	5	16,231,253	5	14,457,000	5	4,902,500	5	11,935,272	20	47,526,025	400.00	96.99	29	109,971,233	580.00	160.69			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0	13,251,000	5	20,000,000	5	15,875,000	2	4,386,000	2	6,380,000	0	0	2	2,485,000	6	13,251,000	120.00	83.47	6	13,251,000	120.00	26.50			
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	120,000,000	1	39,411,948	5	80,000,000	5	26,260,000	0	0	0	0	0	1	16,243,948	1	16,243,948	20.00	61.86	2	39,411,948	40.00	32.84				
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000	2	9,823,000	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	9,823,000	100.00	49.12					
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	363,558,000	3.64	107,742,500	100	294,775,000	100	58,975,000	25	10,625,000	50	7,808,000	75	13,812,500	100	229,000	75	32,474,500	75.00	55.06	78.64	107,742,500	78.64	29.64			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	363,558,000	0	107,742,500	55	294,775,000	55	58,975,000	7	10,625,000	14	7,808,000	21	13,812,500	10	229,000	21	32,474,500	38.18	55.06	21	107,742,500	38.18	29.64			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	363,558,000	4	107,742,500	12	294,775,000	12	58,975,000	3	10,625,000	3	7,808,000	3	13,812,500	2	229,000	11	32,474,500	91.67	55.06	15	107,742,500	125.00	29.64			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	41,100,000	100	64,238,225	100	80,000,000	100	66,084,000	25	12,659,200	50	1,444,025	75	32,720,000	100	12,075,000	75	58,898,225	75.00	89.13	175	64,238,225	175.00	156.30			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	41,100,000	100	64,238,225	100	80,000,000	100	66,084,000	100	12,659,200	100	1,444,025	100	32,720,000	100	12,075,000	100	58,898,225	100.00	89.13	200	64,238,225	200.00	156.30			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	41,100,000	5	64,238,225	8	80,000,000	8	66,084,000	8	12,659,200	8	1,444,025	8	32,720,000	8	12,075,000	32	58,898,225	400.00	89.13	37	64,238,225	462.50	156.30			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	10	21,207,755	25	20,000,000	25	20,200,000	25	0	50	6,807,755	75	1,800,000	100	5,700,000	75	14,307,755	300.00	70.83	85	21,207,755	340.00	106.04			
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	3	21,207,755	80	20,000,000	80	20,200,000	100	0	100	6,807,755	100	1,800,000	100	5,700,000	100	14,307,755	125.00	70.83	103	21,207,755	128.75	106.04			
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	9	21,207,755	12	20,000,000	12	20,200,000	3	0	3	6,807,755	3	1,800,000	3	5,700,000	12	14,307,755	100.00	70.83	21	21,207,755	175.00	106.04			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	102,000,000	0	35,555,245	100	110,000,000	100	38,700,000	25	7,500,000	50	2,530,245	75	21,325,000	100	4,200,000	75	35,555,245	75.00	91.87	75	35,555,245	75.00	34.86			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	102,000,000	0	35,555,245	100	110,000,000	100	38,700,000	100	7,500,000	100	2,530,245	100	21,325,000	10	4,200,000	100	35,555,245	100.00	91.87	100	35,555,245	100.00	34.86			
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	30,000,000	0	0	8	30,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	72,000,000	0	35,555,245	12	80,000,000	12	38,700,000	3	7,500,000	3	2,530,245	3	21,325,000	3	4,200,000	12	35,555,245	100.00	91.87	12	35,555,245	100.00	49.38			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																													

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	211,779,000	3.64	1,682,272,598	100	211,779,000	100	831,410,000	25	217,651,088	50	197,532,520	75	193,045,306	100	180,981,352	250	789,210,266	250.00	94.92	253.64	1,682,272,598	253.64	794.35	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	0	841,136,299	55	105,889,500	55	415,705,000	15	108,825,544	20	98,766,260	17	96,522,653	0	90,490,676	17	394,605,133	30.91	94.92	17	841,136,299	30.91	794.35	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	0	841,136,299	55	105,889,500	55	415,705,000	15	108,825,544	20	98,766,260	17	96,522,653	10	90,490,676	62	394,605,133	112.73	94.92	62	841,136,299	112.73	794.35	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	6	841,136,299	12	105,889,500	12	415,705,000	3	108,825,544	3	98,766,260	3	96,522,653	3	90,490,676	12	394,605,133	100.00	94.92	18	841,136,299	150.00	794.35	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	6	841,136,299	12	105,889,500	12	415,705,000	3	108,825,544	3	98,766,260	3	96,522,653	3	90,490,676	12	394,605,133	100.00	94.92	18	841,136,299	150.00	794.35	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	350,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	350,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	350,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	3.64	851,968,500	100	105,889,500	100	444,625,000	25	111,220,000	50	116,355,000	75	106,568,000	100	104,721,000	75	438,864,000	75.00	98.70	78.64	851,968,500	78.64	804.58	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	0	851,968,500	55	105,889,500	55	444,625,000	7	111,220,000	10	116,355,000	15	106,568,000	10	104,721,000	15	438,864,000	27.27	98.70	15	851,968,500	27.27	804.58	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	6	851,968,500	12	105,889,500	12	444,625,000	3	111,220,000	3	116,355,000	3	106,568,000	3	104,721,000	12	438,864,000	100.00	98.70	18	851,968,500	150.00	804.58	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	175,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	175,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	175,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	3.64	610,643,437	100	105,889,500	100	345,217,000	25	69,936,552	50	81,861,129	75	73,086,762	100	88,022,042	250	312,906,485	250.00	90.64	253.64	610,643,437	253.64	576.68	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	0	610,643,437	55	105,889,500	55	345,217,000	8	69,936,552	10	81,861,129	12	73,086,762	10	88,022,042	12	312,906,485	21.82	90.64	12	610,643,437	21.82	576.68	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	7	610,643,437	12	105,889,500	12	345,217,000	3	69,936,552	3	81,861,129	3	73,086,762	3	88,022,042	12	312,906,485	100.00	90.64	19	610,643,437	158.33	576.68	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	175,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	175,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	175,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan	Persen	100	211,779,000	3.64	1,764,263,400	100	211,779,000	100	908,088,000	25	186,370,000	50	194,640,400	75	250,587,000	100	238,867,000	75	868,464,400	75.00	95.64	78.64	1,764,263,400	78.64	833.07	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
			pelayanan publik																									16	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	0	882,131,700	55	105,889,500	55	454,044,000	10	93,185,000	15	97,320,200	17	125,293,500	0	118,433,500	17	434,232,200	30.91	95.64	17	882,131,700	30.91	833.07	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	0	882,131,700	55	105,889,500	55	454,044,000	10	93,185,000	15	97,320,200	17	125,293,500	10	118,433,500	17	434,232,200	30.91	95.64	17	882,131,700	30.91	833.07	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	6	882,131,700	12	105,889,500	12	454,044,000	3	93,185,000	3	97,320,200	3	125,293,500	3	118,433,500	12	434,232,200	100.00	95.64	18	882,131,700	150.00	833.07	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	6	882,131,700	12	105,889,500	12	454,044,000	3	93,185,000	3	97,320,200	3	125,293,500	3	118,433,500	12	434,232,200	100.00	95.64	18	882,131,700	150.00	833.07	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	175,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	175,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	175,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Barat																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	85,000,000	20	151,320,000	20	85,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	20	151,320,000	100.00	178.02		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	85,000,000	100	151,320,000	100	85,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	151,320,000	100.00	178.02		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	85,000,000	1	151,320,000	1	85,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	151,320,000	100.00	178.02		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.60	50,000,000	71.62	49,919,692	79.60	40,000,000	79.60	31,286,000	71.62	781,782	71.62	11,172,673	64	6,394,673	64	12,520,564	64	30,869,692	80.40	98.67	67.81	49,919,692	84.55	99.84	Target 5 Tahun 80.20 Nilai
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74	50,000,000	89.97	49,919,692	74	40,000,000	74	31,286,000	89.97	781,782	89.97	11,172,673	80.4	6,394,673	80.4	12,520,564	80	30,869,692	100.00	98.67	85.19	49,919,692	100.00	99.84	Target 5 Tahun 80 Persen
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	2	49,919,692	2	20,000,000	2	31,286,000	0	781,782	0	11,172,673	2	6,394,673	0	12,520,564	2	30,869,692	100.00	98.67	4	49,919,692	40.00	166.40	Target 5 Tahun 10 Laporan
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,055,369,496	70	9,647,137,170	85	5,798,369,496	85	5,406,192,876	100	1,082,462,867	100	1,476,302,333	100	1,036,883,124	100	1,428,282,474	100	5,023,930,798	100.00	92.93	85	9,647,137,170	94.44	190.83	Target 5 Tahun 90 Persen
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,909,870,496	1	6,945,718,500	1	3,909,870,496	1	3,758,597,896	1	816,272,320	1	1,078,543,110	1	631,079,316	1	1,032,708,403	1	3,558,603,149	100.00	94.68	2	6,945,718,500	40.00	177.65	Target 5 Tahun 5 Tepat Waktu
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	3,909,870,496	27	6,945,718,500	28	3,909,870,496	28	3,758,597,896	29	816,272,320	29	1,078,543,110	29	631,079,316	0	1,032,708,403	29	3,558,603,149	100.00	94.68	56	6,945,718,500	40.00	177.65	Target 5 Tahun 140 Orang
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	90	29,856,696	95	75,000,000	95	30,185,000	92	838,616	92	26,082,924	92	1,257,924	92	1,677,232	92	29,856,696	96.84	98.91	91	29,856,696	95.79	39.81	Target 5 Tahun 95 Persen
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30,000,000	0	29,856,696	1	30,000,000	1	30,185,000	0	838,616	1	26,082,924	0	1,257,924	0	1,677,232	1	29,856,696	100.00	98.91	1	29,856,696	20.00	99.52	Target 5 Tahun 5 Paket
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	12	0	3	45,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	0	400.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	240,200,000	56	800,574,124	55	230,200,000	55	499,128,560	25	79,804,850	50	133,192,954	75	73,676,800	0	109,002,800	75	395,677,404	100.00	79.27	65.5	800,574,124	93.57	333.29	Target 5 Tahun 70 Persen
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	12	101,700,000	12	60,000,000	12	9,800,000	3	9,800,000	0	0	0	0	0	0	3	9,800,000	25.00	100.00	15	101,700,000	25.00	169.50	Target 5 Tahun 60 Paket
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	81	78,781,000	12	6,000,000	12	55,145,000	3	11,028,000	3	21,353,000	3	6,289,500	3	14,784,500	12	53,455,000	100.00	96.94	24	78,781,000	40.00	656.51	Target 5 Tahun 60 Paket
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	63	14,250,000	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	63	14,250,000	525.00	142.50		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	85	44,797,100	12	36,000,000	12	25,000,000	3	669,500	3	6,731,500	3	5,329,300	3	12,217,300	12	24,947,600	100.00	99.79	24	44,797,100	40.00	124.44	Target 5 Tahun 60 Paket
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	92	78,071,000	1	5,000,000	1	41,235,760	3	13,058,000	3	15,927,000	3	7,157,000	3	4,819,000	12	40,961,000	100.00	99.33	24	78,071,000	40.00	1,561.42	Target 5 Tahun 60 Paket
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	110,000,000	88	482,975,024	8	110,000,000	8	367,947,800	38	45,249,350	48	89,181,454	42	54,901,000	44	77,182,000	172	266,513,804	100.00	72.43	260	482,975,024	100.00	439.07	Target 5 Tahun 40 Laporan
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen	10	7,200,000	0	0	10	7,200,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
			Dinamis pada SKPD																										
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	130,000,000	0	232,091,472	55	895,000,000	55	264,650,000	60	35,000,000	60	2,317,543	60	141,700,000	100	53,073,929	60	232,091,472	100.00	87.70	60	232,091,472	109.09	178.53	Target 5 Tahun 70 Persen
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	68,686,429	2	680,000,000	2	70,150,000	1	35,000,000	0	1,616,643	1	26,740,000	0	5,329,786	2	68,686,429	100.00	97.91	2	68,686,429	20.00	171.72	Target 5 Tahun 10 Unit
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	81,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	0	163,405,043	5	94,000,000	5	194,500,000	0	0	0	700,900	7	114,960,000	0	47,744,143	7	163,405,043	100.00	84.01	7	163,405,043	35.00	272.34	Target 5 Tahun 20 Unit
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	512,000,000	98	1,125,760,378	100	512,000,000	100	534,081,420	25	116,600,081	50	136,422,802	75	126,437,584	100	142,994,610	100	522,455,077	100.00	97.82	99	1,125,760,378	99.00	219.88	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	150	36,458,000	12	6,000,000	12	34,417,000	3	5,093,000	3	6,649,500	3	6,789,500	3	14,626,000	12	33,158,000	100.00	96.34	24	36,458,000	40.00	607.63	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	49	62,447,048	12	36,000,000	12	34,500,000	3	8,899,401	3	7,765,622	3	8,640,404	3	8,960,930	12	34,266,357	100.00	99.32	24	62,447,048	40.00	173.46	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	470,000,000	71	1,026,855,330	12	470,000,000	12	465,164,420	3	102,607,680	3	122,007,680	3	111,007,680	3	119,407,680	12	455,030,720	100.00	97.82	24	1,026,855,330	40.00	218.48	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	188,299,000	65	513,136,000	65	176,299,000	65	319,550,000	62.22	33,947,000	62.22	99,743,000	62.22	62,731,500	62.22	88,825,500	62	285,247,000	95.72	89.27	63.61	513,136,000	79.51	272.51	Target 5 Tahun 80 Persen
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	50,000,000	4	417,039,000	4	50,000,000	4	249,860,000	5	31,247,000	5	71,783,000	5	47,813,500	5	69,956,500	5	220,800,000	100.00	88.37	9	417,039,000	45.00	834.08	Target 5 Tahun 20 Unit
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	76,299,000	2	59,932,000	2	76,299,000	2	50,760,000	0	2,400,000	2	17,960,000	2	8,498,000	2	16,674,000	2	45,532,000	100.00	89.70	4	59,932,000	40.00	78.55	Target 5 Tahun 10 Unit
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30,000,000	0	18,915,000	2	20,000,000	2	18,930,000	0	300,000	2	10,000,000	2	6,420,000	2	2,195,000	2	18,915,000	100.00	99.92	2	18,915,000	20.00	63.05	Target 5 Tahun 10 Unit
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	12,000,000	5	17,250,000	5	10,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	5	17,250,000	100.00	143.75	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	452,684,000	100	676,788,964	100	385,084,000	100	267,792,000	25	45,694,632	50	19,716,948	75	120,481,948	100	58,197,436	100	244,090,964	100.00	91.15	100	676,788,964	100.00	149.51	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	226,342,000	0	338,394,482	55	192,542,000	55	133,896,000	35	22,847,316	35	9,858,474	35	60,240,974	0	29,098,718	105	122,045,482	190.91	91.15	105	338,394,482	190.91	149.51	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	226,342,000	6	338,394,482	55	192,542,000	55	133,896,000	6	22,847,316	6	9,858,474	8	60,240,974	6	29,098,718	26	122,045,482	47.27	91.15	32	338,394,482	45.71	149.51	Target 5 Tahun 70 Kali
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	226,342,000	34	338,394,482	12	192,542,000	12	133,896,000	3	22,847,316	3	9,858,474	3	60,240,974	3	29,098,718	12	122,045,482	100.00	91.15	24	338,394,482	40.00	149.51	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	226,342,000	34	338,394,482	12	192,542,000	12	133,896,000	3	22,847,316	3	9,858,474	3	60,240,974	3	29,098,718	12	122,045,482	100.00	91.15	24	338,394,482	40.00	149.51	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	50,000,000	50	95,808,174	100	60,000,000	100	93,214,000	25	10,583,968	50	21,987,952	75	29,986,952	100	19,035,302	100	81,594,174	100.00	87.53	75	95,808,174	75.00	191.62	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.03.2.01.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi	0	0	6	28,994,610	0	0	0	30,950,000	4	3,116,952	4	6,991,428	4	11,084,428	4	7,801,802	16	28,994,610	100.00	93.68	22	28,994,610	100.00	0.00	Target 5 Tahun 12 Kali
7.01.03.2.01.03.		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	28,994,610	0	0	0	30,950,000	3	3,116,952	3	6,991,428	3	11,084,428	3	7,801,802	12	28,994,610	100.00	93.68	24	28,994,610	40.00	0.00	Target 5 Tahun 60 Laporan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	50,000,000	100	66,813,564	100	60,000,000	100	62,264,000	100	7,467,016	100	14,996,524	100	18,902,524	100	11,233,500	100	52,599,564	100.00	84.48	100	66,813,564	100.00	133.63	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	50,000,000	8	66,813,564	6	60,000,000	6	62,264,000	8	7,467,016	8	14,996,524	8	18,902,524	0	11,233,500	8	52,599,564	100.00	84.48	16	66,813,564	53.33	133.63	Target 5 Tahun 30 LK
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	33,815,100	25	20,000,000	25	25,868,000	25	674,250	25	11,867,975	25	1,011,375	25	8,303,000	25	21,856,600	100.00	84.49	25	33,815,100	100.00	169.08	Target 5 Tahun 25 Persen
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	80	20,000,000	75	33,815,100	80	20,000,000	80	25,868,000	50	674,250	50	11,867,975	75	1,011,375	75	8,303,000	75	21,856,600	93.75	84.49	75	33,815,100	75.00	169.08	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	4	33,815,100	12	20,000,000	12	25,868,000	3	674,250	3	11,867,975	3	1,011,375	3	8,303,000	12	21,856,600	100.00	84.49	24	33,815,100	40.00	169.08	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0		100	60,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0		100	60,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	40,000,000	0		5	40,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20,000,000	0		12	20,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	760,000,000	50	924,074,000	100	760,000,000	100	941,666,000	25	148,800,000	50	267,600,000	75	256,200,000	100	233,214,000	100	905,814,000	100.00	96.19	100	924,074,000	100.00	121.59	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	380,000,000	0	462,037,000	55	380,000,000	55	470,833,000	4	74,400,000	4	133,800,000	4	128,100,000	0	116,607,000	12	452,907,000	21.82	96.19	12	462,037,000	21.82	121.59	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	380,000,000	0	462,037,000	55	380,000,000	55	470,833,000	8	74,400,000	8	133,800,000	8	128,100,000	8	116,607,000	32	452,907,000	58.18	96.19	32	462,037,000	58.18	121.59	Target 5 Tahun 70 Kali
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	380,000,000	12	462,037,000	12	380,000,000	12	470,833,000	3	74,400,000	3	133,800,000	3	128,100,000	3	116,607,000	12	452,907,000	100.00	96.19	24	462,037,000	40.00	121.59	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	380,000,000	12	462,037,000	12	380,000,000	12	470,833,000	3	74,400,000	3	133,800,000	3	128,100,000	3	116,607,000	12	452,907,000	100.00	96.19	24	462,037,000	40.00	121.59	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	600,000,000	0		100	600,000,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	600,000,000	0		4	600,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	600,000,000	0		6	600,000,000	6	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Utara																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	20	81,600,000	20	120,000,000	20	58,561,380	25	0	50	0	75	0	100	0	100	0	500.00	0.00	120	81,600,000	600.00	68.00	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	81,600,000	100	120,000,000	100	58,561,380	25	0	50	0	75	0	100	0	100	0	100.00	0.00	200	81,600,000	200.00	68.00	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	81,600,000	1	120,000,000	1	58,561,380	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	2	81,600,000	200.00	68.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	64.50	40,000,000	66.47	26,940,000	64.50	40,000,000	64.50	27,300,000	66.47	18,300,000	66.47	8,640,000	56.5	0	56.5	0	57	26,940,000	87.60	98.68	122.97	26,940,000	190.65	67.35	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	40,000,000	66.47	26,940,000	62.50	40,000,000	62.50	27,300,000	78	18,300,000	89	8,640,000	92	0	100	0	100	26,940,000	160.00	98.68	166.47	26,940,000	266.35	67.35	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	13,500,000	2	20,000,000	2	13,650,000	1	13,500,000	1	0	0	0	0	0	2	13,500,000	100.00	98.90	4	13,500,000	200.00	67.50	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	13,440,000	2	20,000,000	2	13,650,000	1	4,800,000	1	8,640,000	0	0	0	0	2	13,440,000	100.00	98.46	4	13,440,000	200.00	67.20	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,067,510,346	80	7,545,351,393	85	4,163,510,346	85	4,515,794,060	100	892,020,548	100	1,171,045,490	100	780,210,634	100	1,056,377,395	100	3,899,654,067	117.65	86.36	180	7,545,351,393	211.76	185.50	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,645,500,346	1	4,874,896,085	1	2,495,500,346	1	2,563,664,030	1	572,331,216	1	717,084,858	1	498,587,702	1	649,023,923	1	2,437,027,699	100.00	95.06	1	4,874,896,085	100.00	184.27	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	2,645,500,346	32	4,874,896,085	16	2,495,500,346	16	2,563,664,030	18	572,331,216	18	717,084,858	18	498,587,702	18	649,023,923	18	2,437,027,699	112.50	95.06	50	4,874,896,085	312.50	184.27	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	60,000,000	87	88,140,000	95	60,000,000	95	76,800,000	100	0	100	44,640,000	100	31,500,000	100	0	100	76,140,000	105.26	99.14	95	88,140,000	100.00	146.90	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000	0	31,500,000	1	15,000,000	1	31,500,000	0	0	0	0	1	31,500,000	0	0	1	31,500,000	100.00	100.00	1	31,500,000	100.00	210.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	12	56,640,000	3	45,000,000	3	45,300,000	0	0	3	44,640,000	6	0	0	0	9	44,640,000	300.00	98.54	21	56,640,000	700.00	125.87	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	60	394,510,000	75	753,575,600	60	394,510,000	60	424,361,380	25	110,828,200	50	92,391,000	75	76,303,500	100	33,765,000	100	313,287,700	166.67	73.83	175	753,575,600	291.67	191.02	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	17	60,290,600	12	90,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	17	60,290,600	141.67	66.99		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	17	84,286,200	12	12,000,000	12	45,000,000	3	11,708,000	3	11,325,000	3	17,965,000	3	3,990,000	12	44,988,000	100.00	99.97	29	84,286,200	241.67	702.39	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1102	105,315,000	12	10,000,000	12	58,150,000	3	14,920,000	3	11,200,000	3	16,220,000	3	11,985,000	12	54,325,000	100.00	93.42	1114	105,315,000	9,283.33	1,053.15	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	35002	71,944,000	12	30,000,000	12	43,000,000	3	7,180,500	3	18,310,000	3	11,504,000	3	5,950,000	12	42,944,500	100.00	99.87	35014	71,944,000	291,783.33	239.81	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	12	10,000,000	12	5,000,000	12	4,000,000	3	1,200,000	3	500,000	3	2,300,000	3	0	12	4,000,000	100.00	100.00	24	10,000,000	200.00	200.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	30	116,600,300	1	5,000,000	1	60,000,000	1	8,244,000	1	25,426,000	1	25,220,000	1	1,100,000	1	59,990,000	100.00	99.98	31	116,600,300	3,100.00	2,332.01	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	235,310,000	117	281,140,000	50	235,310,000	50	192,211,380	10	58,670,700	5	25,630,000	14	0	20	740,000	49	85,040,700	98.00	44.24	166	281,140,000	332.00	119.48	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	40	23,999,500	40	7,200,000	40	22,000,000	10	8,905,000	10	0	10	3,094,500	10	10,000,000	40	21,999,500	100.00	100.00	80	23,999,500	200.00	333.33	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	180,000,000	0	129,290,000	75	236,000,000	75	191,500,000	30.09	38,050,000	30.84	71,260,000	31.4	0	31.4	19,980,000	31	129,290,000	41.87	67.51	31.4	129,290,000	41.87	71.83	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	34,480,000	1	40,000,000	1	80,000,000	0	0	1	34,480,000	0	0	0	0	1	34,480,000	100.00	43.10	1	34,480,000	100.00	86.20	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
													5	6	7				8		9		10		11		13=12/7 x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	20,880,000	3	48,000,000	3	27,800,000	0	0	1	20,880,000	2	0	0	0	3	20,880,000	100.00	75.11	3	20,880,000	100.00	104.40	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	73,930,000	5	108,000,000	5	83,700,000	3	38,050,000	2	15,900,000	0	0	0	19,980,000	100	73,930,000	2,000.00	88.33	100	73,930,000	2,000.00	73.93	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	455,500,000	80	1,058,850,868	100	455,500,000	100	576,900,000	25	113,655,632	50	152,005,632	75	129,145,632	100	150,155,632	100	544,962,528	100.00	94.46	180	1,058,850,868	180.00	232.46	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	600	26,949,000	12	6,000,000	12	15,000,000	3	4,150,000	3	6,600,000	3	1,200,000	3	3,000,000	12	14,950,000	100.00	99.67	612	26,949,000	5,100.00	449.15	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30,000,000	2	93,001,000	12	30,000,000	12	52,000,000	3	8,800,000	3	12,000,000	3	8,040,000	3	9,250,000	12	38,090,000	100.00	73.25	14	93,001,000	116.67	310.00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	419,500,000	19	938,900,868	12	419,500,000	12	509,900,000	3	100,705,632	3	133,405,632	3	119,905,632	3	137,905,632	12	491,922,528	100.00	96.47	31	938,900,868	258.33	223.81	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	332,000,000	60	640,598,840	80	522,000,000	80	682,568,650	50	57,155,500	50	93,664,000	83	44,673,800	83	203,452,840	83	398,946,140	103.75	58.45	143	640,598,840	178.75	192.95	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	80,000,000	10	216,383,200	7	80,000,000	7	132,937,250	5	21,069,000	5	38,934,000	5	24,706,000	5	13,762,000	5	98,471,000	71.43	74.07	15	216,383,200	214.29	270.48	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	34,970,000	5	30,000,000	5	35,000,000	1	11,390,000	1	13,580,000	2	10,000,000	0	0	4	34,970,000	80.00	99.91	4	34,970,000	80.00	349.70	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	180,000,000	3	354,265,640	5	350,000,000	5	470,951,400	0	24,696,500	0	41,150,000	1	9,967,800	0	189,690,840	1	265,505,140	20.00	56.38	4	354,265,640	80.00	196.81	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	5	34,980,000	2	12,000,000	2	43,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	34,980,000	250.00	291.50			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	387,726,000	3.21	1,513,985,200	100	355,726,000	100	995,500,000	25	108,360,000	50	386,986,000	75	271,970,000	100	74,420,000	100	841,736,000	100.00	84.55	103.21	1,513,985,200	103.21	390.48	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	183,863,000	15	751,254,600	55	167,863,000	55	494,700,000	15	54,180,000	15	190,480,000	15	135,985,000	0	37,210,000	15	417,855,000	27.27	84.47	30	751,254,600	54.55	408.59	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	183,863,000	15	751,254,600	55	167,863,000	55	494,700,000	15	54,180,000	15	190,480,000	15	135,985,000	15	37,210,000	60	417,855,000	109.09	84.47	75	751,254,600	136.36	408.59	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	183,863,000	15	751,254,600	12	167,863,000	12	494,700,000	3	54,180,000	3	190,480,000	3	135,985,000	3	37,210,000	12	417,855,000	100.00	84.47	27	751,254,600	225.00	408.59	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	183,863,000	15	751,254,600	12	167,863,000	12	494,700,000	3	54,180,000	3	190,480,000	3	135,985,000	3	37,210,000	12	417,855,000	100.00	84.47	27	751,254,600	225.00	408.59	
7.01.02.2.04.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	Koordinasi	4	20,000,000	1	11,476,000	4	20,000,000	4	6,100,000	0	0	4	6,026,000	0	0	0	0	4	6,026,000	100.00	98.79	5	11,476,000	125.00	57.38	
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	20,000,000	1	11,476,000	12	20,000,000	12	6,100,000	3	0	3	6,026,000	3	0	3	0	12	6,026,000	100.00	98.79	13	11,476,000	108.33	57.38	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	50,000,000	50	170,226,500	100	50,000,000	100	131,370,000	25	37,103,000	50	26,094,000	75	20,910,000	100	8,000,000	100	92,107,000	100.00	70.11	150	170,226,500	150.00	340.45	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	50,000,000	100	170,226,500	100	50,000,000	100	131,370,000	100	37,103,000	100	26,094,000	100	20,910,000	100	8,000,000	100	92,107,000	100.00	70.11	200	170,226,500	200.00	340.45	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	50,000,000	7	170,226,500	7	50,000,000	7	131,370,000	7	37,103,000	7	26,094,000	7	20,910,000	7	8,000,000	7	92,107,000	100.00	70.11	14	170,226,500	200.00	340.45	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	25	98,264,500	25	40,000,000	25	65,250,700	25	21,995,000	50	20,945,000	75	15,920,000	100	4,785,000	100	63,645,000	400.00	97.54	125	98,264,500	500.00	245.66	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	40,000,000	3	98,264,500	80	40,000,000	80	65,250,700	25	21,995,000	50	20,945,000	75	15,920,000	100	4,785,000	100	63,645,000	125.00	97.54	103	98,264,500	128.75	245.66	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	40,000,000	8	98,264,500	12	40,000,000	12	65,250,700	3	21,995,000	3	20,945,000	3	15,920,000	3	4,785,000	12	63,645,000	100.00	97.54	20	98,264,500	166.67	245.66	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
			dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																										
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	130,000,000	0	104,485,000	100	130,000,000	100	120,600,000	100	43,130,000	100	29,160,000	100	18,430,000	100	13,765,000	100	104,485,000	100.00	86.64	100	104,485,000	100.00	80.37	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	130,000,000	0	104,485,000	100	130,000,000	100	120,600,000	100	43,130,000	100	29,160,000	100	18,430,000	100	13,765,000	100	104,485,000	100.00	86.64	100	104,485,000	100.00	80.37	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	60,000,000	0	22,060,000	7	60,000,000	7	22,300,000	6	22,060,000	6	0	0	0	0	0	12	22,060,000	171.43	98.92	12	22,060,000	171.43	36.77	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	70,000,000	0	82,425,000	12	70,000,000	12	98,300,000	3	21,070,000	3	29,160,000	3	18,430,000	3	13,765,000	12	82,425,000	100.00	83.85	12	82,425,000	100.00	117.75	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Laut																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	20	129,940,000	20	125,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	20	129,940,000	100.00	103.95		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	129,940,000	100	125,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	129,940,000	100.00	103.95		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	129,940,000	1	125,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	129,940,000	100.00	103.95		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	67.00	60,000,000	70.04	20,540,000	67.00	60,000,000	67.00	18,100,000	0	12,240,000	0	5,600,000	0	0	0	0	0	17,840,000	0.00	98.56	70.04	20,540,000	104.54	34.23	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67	60,000,000	70.04	20,540,000	67	60,000,000	67	18,100,000	73.91	12,240,000	78.26	5,600,000	86.95	0	0	0	87	17,840,000	129.78	98.56	156.99	20,540,000	234.31	34.23	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	40,000,000	2	7,280,000	2	20,000,000	2	7,300,000	2	7,280,000	0	0	0	0	0	0	2	7,280,000	100.00	99.73	4	7,280,000	200.00	18.20	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	13,260,000	2	40,000,000	2	10,800,000	2	4,960,000	2	5,600,000	0	0	0	4	10,560,000	200.00	97.78	6	13,260,000	300.00	66.30		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	3,085,431,899	80	6,227,337,868	80	3,205,431,899	80	4,079,093,631	100	766,581,879	100	1,090,769,172	100	780,210,502	0	924,403,585	100	3,561,965,138	125.00	87.32	180	6,227,337,868	225.00	201.83	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,400,208,763	1	4,195,043,351	1	1,400,208,763	1	2,235,525,631	1	491,970,835	1	635,401,428	1	482,408,799	1	494,635,659	1	2,104,416,721	100.00	94.14	2	4,195,043,351	200.00	299.60	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1,400,208,763	17	4,195,043,351	19	1,400,208,763	19	2,235,525,631	17	491,970,835	17	635,401,428	17	482,408,799	17	494,635,659	17	2,104,416,721	89.47	94.14	34	4,195,043,351	178.95	299.60	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	85,000,000	0	17,500,000	95	85,000,000	95	42,000,000	100	0	100	0	100	0	95	17,500,000	100	17,500,000	105.26	41.67	100	17,500,000	105.26	20.59	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25,000,000	0	17,500,000	1	25,000,000	1	42,000,000	0	0	0	0	0	0	1	17,500,000	1	17,500,000	100.00	41.67	1	17,500,000	100.00	70.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60,000,000	0	0	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	454,132,136	75	803,788,507	75	454,132,136	75	581,299,950	25	94,419,400	50	157,305,600	75	152,363,107	75	97,567,500	75	501,655,607	100.00	86.30	150	803,788,507	200.00	176.99	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	3	54,698,000	12	120,000,000	12	55,680,000	3	0	3	24,840,000	0	0	3	24,908,000	9	49,748,000	75.00	89.35	12	54,698,000	100.00	45.58	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	10	60,956,000	12	12,000,000	12	42,000,000	3	10,490,000	3	9,881,000	3	14,629,000	3	7,000,000	12	42,000,000	100.00	100.00	22	60,956,000	183.33	507.97	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1110	77,596,000	12	10,000,000	12	55,000,000	3	15,174,000	3	15,510,000	3	16,110,000	3	6,862,000	12	53,656,000	100.00	97.56	1122	77,596,000	9,350.00	775.96	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	48	71,677,500	12	36,000,000	12	79,000,000	3	7,805,500	3	11,865,500	3	8,279,000	3	26,049,500	12	53,999,500	100.00	68.35	60	71,677,500	500.00	199.10	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	6,000,000	0	5,000,000	12	6,000,000	12	5,000,000	3	900,000	3	2,100,000	3	500,000	3	1,500,000	12	5,000,000	100.00	100.00	12	5,000,000	100.00	83.33	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	10	101,898,000	1	5,000,000	1	62,080,000	1	13,555,000	1	23,560,000	1	17,910,000	1	7,048,000	4	62,073,000	400.00	99.99	14	101,898,000	1,400.00	2,037.96	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	245,132,136	59	431,963,007	52	245,132,136	52	282,539,950	0	46,494,900	0	69,549,100	0	94,935,107	52	24,200,000	52	235,179,107	100.00	83.24	111	431,963,007	213.46	176.22	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	20,000,000	0	0	40	20,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	410,000,000	0	98,230,000	75	318,000,000	75	131,000,000	0	0	0	14,690,000	50	15,800,000	0	67,740,000	50	98,230,000	66.67	74.98	50	98,230,000	66.67	23.96	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	80,000,000	0	0	2	80,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50,000,000	0	0	3	16,000,000	3	10,000,000		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	200,000,000	0	98,230,000	7	142,000,000	7	121,000,000	0	0	1	14,690,000	1	15,800,000	5	67,740,000	7	98,230,000	100.00	81.18	7	98,230,000	100.00	49.12	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80,000,000	0	0	3	80,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	352,000,000	80	549,832,760	100	352,000,000	100	558,357,000	25	113,136,844	50	139,446,144	75	101,118,596	100	174,166,676	75	527,868,060	75.00	94.54	155	549,832,760	155.00	156.20	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	450	20,490,000	12	6,000,000	12	32,757,000	3	7,320,000	3	5,640,000	3	0	3	2,040,000	12	15,000,000	100.00	45.79	462	20,490,000	3,850.00	341.50	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	2	29,349,200	12	36,000,000	12	21,000,000	3	1,910,500	3	0	3	2,014,500	3	8,949,500	12	12,874,500	100.00	61.31	14	29,349,200	116.67	81.53	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	310,000,000	15	499,993,560	12	310,000,000	12	504,600,000	3	103,906,144	3	133,806,144	3	99,104,096	3	163,177,176	12	499,993,560	100.00	99.09	27	499,993,560	225.00	161.29	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	384,091,000	55	562,943,250	80	596,091,000	80	530,911,050	25	67,055,000	25	143,926,000	100	28,520,000	80	72,793,750	100	312,294,750	125.00	58.82	155	562,943,250	193.75	146.57	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	184,091,000	5	330,163,250	5	296,091,000	5	387,716,510	1	29,045,000	1	89,226,000	1	23,250,000	2	42,793,750	1	184,314,750	20.00	47.54	6	330,163,250	120.00	179.35	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120,000,000	2	194,810,000	2	220,000,000	2	100,194,540	0	26,510,000	0	43,500,000	2	0	1	30,000,000	2	100,010,000	100.00	99.82	4	194,810,000	200.00	162.34	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	5	37,970,000	1	30,000,000	1	43,000,000	0	11,500,000	0	11,200,000	1	5,270,000	1	0	2	27,970,000	200.00	65.05	7	37,970,000	700.00	126.57	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	382,170,000	2.86	407,278,880	100	382,170,000	100	348,200,000	21	45,290,000	43	127,010,000	65	73,110,000	100	48,819,000	65	294,229,000	65.00	84.50	67.86	407,278,880	67.86	106.57	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	382,170,000	0	407,278,880	55	382,170,000	55	348,200,000	12	45,290,000	24	127,010,000	36	73,110,000	100	48,819,000	36	294,229,000	65.45	84.50	36	407,278,880	65.45	106.57	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	382,170,000	10	407,278,880	12	382,170,000	12	348,200,000	3	45,290,000	3	127,010,000	3	73,110,000	3	48,819,000	12	294,229,000	100.00	84.50	22	407,278,880	183.33	106.57	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	40,000,000	50	71,250,000	100	40,000,000	100	100,850,000	100	17,515,000	100	4,440,000	100	20,095,000	100	29,200,000	100	71,250,000	100.00	70.65	150	71,250,000	150.00	178.13	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	40,000,000	0	71,250,000	100	40,000,000	100	100,850,000	100	17,515,000	100	4,440,000	100	20,095,000	100	29,200,000	100	71,250,000	100.00	70.65	100	71,250,000	100.00	178.13	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	40,000,000	0	71,250,000	5	40,000,000	5	100,850,000	4	17,515,000	4	4,440,000	4	20,095,000	4	29,200,000	16	71,250,000	320.00	70.65	16	71,250,000	320.00	178.13	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	6	41,660,947	25	40,000,000	25	28,350,000	25	8,900,000	50	6,000,000	75	10,380,000	100	0	75	25,280,000	300.00	89.17	81	41,660,947	324.00	104.15	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	40,000,000	3	41,660,947	80	40,000,000	80	28,350,000	100	8,900,000	100	6,000,000	100	10,380,000	80	0	100	25,280,000	125.00	89.17	103	41,660,947	128.75	104.15	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40,000,000	4	41,660,947	12	40,000,000	12	28,350,000	3	8,900,000	3	6,000,000	3	10,380,000	3	0	12	25,280,000	100.00	89.17	16	41,660,947	133.33	104.15	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100,000,000	0	0	100	100,000,000	100	54,000,000	25	0	50	0	75	0	100	0	75	0	75.00	0.00	75	0	75.00	0.00	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	100,000,000	0	0	100	100,000,000	100	54,000,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	40,000,000	0	0	4	40,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	60,000,000	0	0	12	60,000,000	12	54,000,000	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100.00	0.00	12	0	100.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Midai																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		4A																								16	
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	20	242,260,000	20	125,000,000	20	128,680,000	25	11,100,000	50	65,410,000	75	0	100	49,300,000	100	125,810,000	500.00	97.77	120	242,260,000	600.00	193.81	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	242,260,000	100	125,000,000	100	128,680,000	25	11,100,000	50	65,410,000	75	0	100	49,300,000	75	125,810,000	75.00	97.77	175	242,260,000	175.00	193.81	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	242,260,000	1	125,000,000	1	128,680,000	1	11,100,000	1	65,410,000	0	0	1	49,300,000	1	125,810,000	100.00	97.77	2	242,260,000	200.00	193.81	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	74.70	40,000,000	76.7	59,601,500	74.70	40,000,000	74.70	33,000,000	76.7	19,718,000	76.7	13,040,000	76.7	0	76.7	0	77	32,758,000	102.68	99.27	153.4	59,601,500	205.35	149.00	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	40,000,000	76.7	59,601,500	62.50	40,000,000	62.50	33,000,000	75	19,718,000	92.85	13,040,000	96.42	0	0	0	96	32,758,000	154.27	99.27	173.12	59,601,500	276.99	149.00	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	31,016,000	2	20,000,000	2	19,750,000	2	19,718,000	0	0	0	0	0	0	2	19,718,000	100.00	99.84	4	31,016,000	200.00	155.08	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	28,585,500	2	20,000,000	2	13,250,000	0	0	2	13,040,000	0	0	0	0	2	13,040,000	100.00	98.42	4	28,585,500	200.00	142.93	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,997,970,496	80	8,749,856,012	85	4,232,265,496	85	5,042,726,000	100	909,846,139	100	1,331,096,839	100	993,402,754	100	1,457,208,486	92	4,691,554,218	108.74	93.04	172.43	8,749,856,012	202.86	218.86	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,661,770,496	1	5,327,833,658	1	2,661,770,496	1	2,726,387,000	1	621,904,471	1	745,620,862	1	609,872,688	1	643,349,382	1	2,620,747,403	100.00	96.13	2	5,327,833,658	200.00	200.16	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	2,661,770,496	24	5,327,833,658	11	2,661,770,496	11	2,726,387,000	17	621,904,471	17	745,620,862	17	609,872,688	17	643,349,382	17	2,620,747,403	154.55	96.13	41	5,327,833,658	372.73	200.16	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	80,000,000	0	58,845,600	95	80,000,000	95	59,928,180	100	0	100	33,045,600	100	25,800,000	98	0	100	58,845,600	105.26	98.19	100	58,845,600	105.26	73.56	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	35,000,000	0	25,800,000	1	35,000,000	1	25,800,000	0	0	0	0	1	25,800,000	0	0	1	25,800,000	100.00	100.00	1	25,800,000	100.00	73.71	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang–Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang–Undangan	Orang	3	45,000,000	0	33,045,600	3	45,000,000	3	34,128,180	0	0	3	33,045,600	0	0	0	3	33,045,600	100.00	96.83	3	33,045,600	100.00	73.43		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	259,200,000	100	767,332,736	55	259,200,000	55	587,484,930	25	104,482,500	50	183,325,600	75	85,365,500	100	46,533,000	99	419,706,600	179.76	71.44	198.87	767,332,736	361.58	296.04	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	4	4,495,636	12	60,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	4,495,636	33.33	7.49	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	4	88,388,000	12	12,000,000	12	49,400,000	3	11,760,000	3	11,471,000	3	18,760,000	3	7,400,000	9	49,391,000	75.00	99.98	13	88,388,000	108.33	736.57	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	3466	95,044,000	12	10,000,000	12	58,400,000	3	15,730,000	3	9,385,000	3	16,985,000	3	14,670,000	9	56,770,000	75.00	97.21	3475	95,044,000	28,958.33	950.44	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	63535	77,320,000	12	40,000,000	12	57,436,310	3	8,178,500	3	19,866,000	3	15,955,500	3	11,460,000	9	55,460,000	75.00	96.56	63544	77,320,000	529,533.33	193.30	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang– Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	48	11,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	6	1,500,000	0	0	0	0	6	3,500,000	12	5,000,000	100.00	100.00	60	11,000,000	500.00	220.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	40	117,087,500	1	5,000,000	1	62,400,000	1	9,300,000	1	13,823,000	1	32,060,000	1	7,215,000	1	62,398,000	100.00	100.00	41	117,087,500	4,100.00	2,341.75	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	120,000,000	38	357,501,600	52	120,000,000	52	342,848,620	7	52,009,000	9	124,394,600	0	0	36	2,288,000	52	178,691,600	100.00	52.12	90	357,501,600	173.08	297.92	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	16,496,000	40	7,200,000	40	12,000,000	10	6,005,000	10	4,386,000	0	1,605,000	0	0	20	11,996,000	50.00	99.97	20	16,496,000	50.00	229.11	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	200,000,000	0	124,420,000	55	363,000,000	55	128,000,000	0	0	11.38	38,740,000	50	0	0	85,680,000	50	124,420,000	90.91	97.20	50	124,420,000	90.91	62.21	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	80,420,000	1	220,000,000	1	81,000,000	0	0	1	26,740,000	0	0	1	53,680,000	2	80,420,000	200.00	99.28	2	80,420,000	200.00	201.05	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	20,000,000	4	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	44,000,000	5	83,000,000	5	47,000,000	0	0	1	12,000,000	0	0	4	32,000,000	5	44,000,000	100.00	93.62	5	44,000,000	100.00	44.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	40,000,000	0	0	3	40,000,000	3	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	543,000,000	79	1,157,027,310	100	531,000,000	100	657,200,000	25	129,547,168	50	177,647,777	75	157,191,566	100	178,337,396	98	642,723,907	97.80	97.80	176.8	1,157,027,310	176.80	213.08	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	196	29,661,000	12	8,000,000	12	18,000,000	3	5,040,000	3	4,200,000	3	5,760,000	3	3,000,000	9	18,000,000	75.00	100.00	205	29,661,000	1,708.33	370.76	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,000,000	8	72,795,918	12	48,000,000	12	34,000,000	0	0	3	12,040,609	3	6,393,454	3	3,507,000	9	21,941,063	75.00	64.53	17	72,795,918	141.67	121.33	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	475,000,000	28	1,054,570,392	12	475,000,000	12	605,200,000	3	124,507,168	3	161,407,168	3	145,038,112	3	171,830,396	9	602,782,844	75.00	99.60	37	1,054,570,392	308.33	222.01	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	254,000,000	90	1,314,396,708	65	337,295,000	65	883,725,890	85.71	53,912,000	85.71	152,717,000	85.71	115,173,000	85.71	503,308,708	86	825,110,708	131.86	93.37	175.71	1,314,396,708	270.32	517.48	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	122,000,000	4	734,845,000	5	203,295,000	5	369,465,890	5	28,862,000	5	117,897,000	5	95,235,000	5	111,960,000	20	353,954,000	400.00	95.80	24	734,845,000	480.00	602.33	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	34,850,000	5	12,000,000	5	35,000,000	5	6,350,000	5	6,900,000	5	11,280,000	5	10,320,000	20	34,850,000	400.00	99.57	20	34,850,000	400.00	174.25	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	90,000,000	2	524,741,708	2	100,000,000	2	448,200,000	2	18,700,000	2	27,920,000	2	8,658,000	2	381,028,708	8	436,306,708	400.00	97.35	10	524,741,708	500.00	583.05	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	1	0		0		0		0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	5	19,960,000	2	12,000,000	2	31,060,000	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	5	19,960,000	250.00	166.33	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	231,415,000	2	597,067,000	100	231,415,000	100	415,240,000	25	30,190,000	50	57,699,000	75	201,170,000	100	46,606,000	100	335,665,000	100.00	80.84	102	597,067,000	102.00	258.01	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	231,415,000	0	597,067,000	55	231,415,000	55	415,240,000	4	30,190,000	8	57,699,000	27	201,170,000	16	46,606,000	55	335,665,000	100.00	80.84	55	597,067,000	100.00	258.01	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	231,415,000	12	597,067,000	12	231,415,000	12	415,240,000	3	30,190,000	3	57,699,000	3	201,170,000	3	46,606,000	12	335,665,000	100.00	80.84	24	597,067,000	200.00	258.01	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	45,095,000	59	148,770,000	100	40,000,000	100	119,244,000	25	16,250,000	50	26,400,000	75	35,155,000	100	25,845,000	75	103,650,000	75.00	86.92	134	148,770,000	134.00	329.90	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	45,095,000	97	148,770,000	100	40,000,000	100	119,244,000	100	16,250,000	100	26,400,000	100	35,155,000	100	25,845,000	100	103,650,000	100.00	86.92	197	148,770,000	197.00	329.90	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	45,095,000	4	148,770,000	4	40,000,000	4	119,244,000	4	16,250,000	4	26,400,000	4	35,155,000	4	25,845,000	16	103,650,000	400.00	86.92	20	148,770,000	500.00	329.90	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	5	101,825,000	25	20,000,000	25	64,000,000	25	21,090,000	50	19,355,000	75	0	100	21,845,000	75	62,290,000	300.00	97.33	80	101,825,000	320.00	509.13	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	3	101,825,000	80	20,000,000	80	64,000,000	25	21,090,000	50	19,355,000	75	0	100	21,845,000	75	62,290,000	93.75	97.33	78	101,825,000	97.50	509.13	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	4	101,825,000	12	20,000,000	12	64,000,000	3	21,090,000	3	19,355,000	3	0	3	21,845,000	12	62,290,000	100.00	97.33	16	101,825,000	133.33	509.13	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	80,000,000	0	86,710,000	100	80,000,000	100	92,200,000	25	45,130,000	50	22,840,000	75	13,340,000	100	5,400,000	75	86,710,000	75.00	94.05	75	86,710,000	75.00	108.39	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	80,000,000	0	86,710,000	100	80,000,000	100	92,200,000	100	45,130,000	100	22,840,000	100	13,340,000	100	5,400,000	100	86,710,000	100.00	94.05	100	86,710,000	100.00	108.39	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	60,000,000	0	26,330,000	4	40,000,000	4	26,500,000	4	26,330,000	0	0	0	0	0	0	4	26,330,000	100.00	99.36	4	26,330,000	100.00	43.88	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Laporan	12	20,000,000	0	60,380,000	12	40,000,000	12	65,700,000	3	18,800,000	3	22,840,000	3	13,340,000	3	5,400,000	12	60,380,000	100.00	91.90	12	60,380,000	100.00	301.90	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Kecamatan	Perdesaan di Wilayah Kecamatan																										
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	300,311,000	3	654,216,000	100	290,311,000	100	325,972,000	25	49,000,000	50	85,500,000	75	77,500,000	100	112,995,000	75	324,995,000	75.00	99.70	78	654,216,000	78.00	217.85	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	300,311,000	0	654,216,000	55	290,311,000	55	325,972,000	8	49,000,000	14	85,500,000	13	77,500,000	20	112,995,000	55	324,995,000	100.00	99.70	55	654,216,000	100.00	217.85	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	300,311,000	6	654,216,000	12	290,311,000	12	325,972,000	3	49,000,000	3	85,500,000	3	77,500,000	3	112,995,000	12	324,995,000	100.00	99.70	18	654,216,000	150.00	217.85	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	695,000,000	0	0	100	695,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	695,000,000	0	0	4	695,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	695,000,000	0	0	5	695,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		4A																									
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	15	221,180,000	20	125,000,000	20	68,976,000	25	0	50	68,950,000	75	0	0	0	75	68,950,000	375.00	99.96	90	221,180,000	450.00	176.94	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	75	221,180,000	100	125,000,000	100	68,976,000	25	0	50	68,950,000	75	0	0	0	75	68,950,000	75.00	99.96	150	221,180,000	150.00	176.94	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	221,180,000	1	125,000,000	1	68,976,000	0	0	1	68,950,000	0	0	0	0	1	68,950,000	100.00	99.96	2	221,180,000	200.00	176.94	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	76.70	50,000,000	82.58	11,651,866	76.70	50,000,000	76.70	11,387,500	0	1,920,794	0	1,586,794	73.85	0	73.85	3,455,278	74	6,962,866	96.28	61.14	156.43	11,651,866	203.95	23.30	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	82.58	11,651,866	62.50	50,000,000	62.50	11,387,500	90.9	1,920,794	95.45	1,586,794	95.45	0	95.45	3,455,278	95	6,962,866	152.72	61.14	178.03	11,651,866	284.85	23.30	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	3,799,000	2	20,000,000	2	2,200,000	2	1,000,000	2	1,200,000	0	0	0	0	2	2,200,000	100.00	100.00	4	3,799,000	200.00	19.00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	2	7,852,866	2	30,000,000	2	9,187,500	2	920,794	2	386,794	0	0	2	3,455,278	2	4,762,866	100.00	51.84	4	7,852,866	200.00	26.18	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,700,980,714	95	8,852,821,003	85	5,182,480,714	85	4,684,505,382	100	980,396,320	100	1,321,091,606	100	917,609,117	100	1,146,630,283	100	4,365,727,326	117.65	93.20	195	8,852,821,003	229.41	188.32	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,233,420,714	1	6,512,678,611	1	3,233,420,714	1	3,358,589,382	1	755,409,309	1	976,646,875	1	670,138,180	1	749,117,897	1	3,151,312,261	100.00	93.83	2	6,512,678,611	200.00	201.42	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	3,233,420,714	28	6,512,678,611	27	3,233,420,714	27	3,358,589,382	26	755,409,309	26	976,646,875	26	670,138,180	26	749,117,897	26	3,151,312,261	96.30	93.83	54	6,512,678,611	200.00	201.42	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	0	4,958,340	95	75,000,000	95	5,000,000	100	91,668	100	4,591,668	100	0	100	275,004	100	4,958,340	105.26	99.17	100	4,958,340	105.26	6.61	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	4,958,340	3	45,000,000	3	5,000,000	0	91,668	1	4,591,668	1	0	1	275,004	1	4,958,340	33.33	99.17	1	4,958,340	33.33	11.02	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	77	314,560,000	75	598,034,855	77	357,560,000	77	363,196,000	25	62,949,960	50	105,507,160	75	53,573,500	75	90,949,480	75	312,980,100	97.40	86.17	150	598,034,855	194.81	190.12	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	3	91,618,900	12	80,000,000	12	71,020,000	3	11,759,000	3	8,694,000	3	4,745,900	3	45,820,000	9	71,018,900	75.00	100.00	12	91,618,900	100.00	152.70	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	28,883,400	12	12,000,000	12	15,000,000	3	0	3	7,781,000	3	7,210,000	3	0	9	14,991,000	75.00	99.94	21	28,883,400	175.00	240.70	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	12	19,800,000	12	10,000,000	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25.00	0.00	15	19,800,000	125.00	198.00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	12	49,489,500	12	40,000,000	12	32,000,000	3	2,755,000	3	3,330,500	3	5,860,000	3	20,054,000	9	31,999,500	75.00	100.00	21	49,489,500	175.00	123.72	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10,000,000	12	3,750,000	12	6,000,000	12	2,400,000	3	0	3	1,500,000	3	900,000	3	0	9	2,400,000	75.00	100.00	21	3,750,000	175.00	37.50	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	1	43,895,000	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	43,895,000	100.00	877.90	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	170,360,000	35	330,629,055	32	192,560,000	32	242,776,000	14	48,435,960	26	84,201,660	19	34,857,600	30	25,075,480	89	192,570,700	278.13	79.32	124	330,629,055	387.50	194.08	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	40	29,969,000	40	12,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	40	29,969,000	100.00	416.24	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	77	205,000,000	0	28,300,000	77	676,500,000	77	28,300,000	0	0	0	0	50	0	50	28,300,000	50	28,300,000	64.94	100.00	50	28,300,000	64.94	13.80	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	45,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	4A																									16				
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	121,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	28,300,000	5	357,000,000	5	28,300,000	0	0	0	0	0	0	2	28,300,000	2	28,300,000	40.00	100.00	2	28,300,000	40.00	28.30					
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	108,500,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	526,000,000	80	1,457,733,427	100	526,000,000	100	833,500,000	25	148,574,417	50	202,053,235	75	163,501,437	80	263,770,566	75	777,899,655	75.00	93.33	155	1,457,733,427	155.00	277.14					
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	12	23,900,000	12	10,000,000	12	31,500,000	3	4,800,000	3	2,400,000	3	0	3	9,600,000	9	16,800,000	75.00	53.33	21	23,900,000	175.00	239.00					
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	12	32,389,925	12	36,000,000	12	25,200,000	3	1,668,273	3	1,246,731	3	7,097,341	3	12,906,896	9	22,919,241	75.00	90.95	21	32,389,925	175.00	89.97					
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	480,000,000	12	1,401,443,502	12	480,000,000	12	776,800,000	3	142,106,144	3	198,406,504	3	156,404,096	3	241,263,670	9	738,180,414	75.00	95.03	21	1,401,443,502	175.00	291.97					
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	77	347,000,000	75	251,115,770	77	314,000,000	77	95,920,000	100	13,370,966	100	32,292,668	100	30,396,000	100	14,217,336	100	90,276,970	129.87	94.12	175	251,115,770	227.27	72.37					
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	145,000,000	4	178,736,800	4	120,000,000	4	63,200,000	4	1,088,000	4	25,594,000	4	24,396,000	4	7,120,000	16	58,198,000	400.00	92.09	20	178,736,800	500.00	123.27					
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120,000,000	2	46,400,000	2	120,000,000	2	12,000,000	2	9,000,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	0	8	12,000,000	400.00	100.00	10	46,400,000	500.00	38.67					
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	5	25,978,970	2	12,000,000	2	20,720,000	5	3,282,966	5	5,198,668	5	4,500,000	5	7,097,336	20	20,078,970	1,000.00	96.91	25	25,978,970	1,250.00	216.49					
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	383,150,000	2	307,790,000	100	383,150,000	100	438,240,000	25	56,640,000	50	12,200,000	75	54,900,000	80	3,000,000	75	126,740,000	75.00	28.92	77	307,790,000	77.00	80.33					
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	383,150,000	55	307,790,000	55	383,150,000	55	438,240,000	17	56,640,000	23	12,200,000	35	54,900,000	80	3,000,000	35	126,740,000	63.64	28.92	90	307,790,000	163.64	80.33					
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	383,150,000	12	307,790,000	12	383,150,000	12	438,240,000	3	56,640,000	3	12,200,000	3	54,900,000	3	3,000,000	9	126,740,000	75.00	28.92	21	307,790,000	175.00	80.33					
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	70,000,000	80	42,306,383	100	70,000,000	100	35,064,000	25	6,648,527	50	4,718,714	75	7,950,000	100	15,469,142	75	34,786,383	75.00	99.21	155	42,306,383	155.00	60.44					
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	70,000,000	80	42,306,383	100	70,000,000	100	35,064,000	100	6,648,527	100	4,718,714	100	7,950,000	100	15,469,142	100	34,786,383	100.00	99.21	180	42,306,383	180.00	60.44					
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	70,000,000	8	42,306,383	8	70,000,000	8	35,064,000	8	6,648,527	8	4,718,714	8	7,950,000	8	15,469,142	8	34,786,383	100.00	99.21	16	42,306,383	200.00	60.44					
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	200	5,191,083	25	20,000,000	25	38,540,000	25	1,466,241	50	669,842	75	0	80	0	75	2,136,083	300.00	5.54	275	5,191,083	1,100.00	25.96					
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	3	5,191,083	80	20,000,000	80	38,540,000	25	1,466,241	50	669,842	75	0	80	0	75	2,136,083	93.75	5.54	78	5,191,083	97.50	25.96					
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	4	5,191,083	12	20,000,000	12	38,540,000	3	1,466,241	3	669,842	3	0	0	0	9	2,136,083	75.00	5.54	13	5,191,083	108.33	25.96					
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	65,000,000	0	2,452,955	100	65,000,000	100	31,976,000	25	1,695,241	50	757,714	75	0	100	0	75	2,452,955	75.00	7.67	75	2,452,955	75.00	3.77					
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	65,000,000	0	2,452,955	100	65,000,000	100	31,976,000	100	1,695,241	100	757,714	100	0	100	0	75	2,452,955	75.00	7.67	75	2,452,955	75.00	3.77					
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	45,000,000	0	0	8	40,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Laporan	12	20,000,000	0	2,452,955	12	25,000,000	12	31,976,000	3	1,695,241	3	757,714	3	0	0	0	9	2,452,955	75.00	7.67	9	2,452,955	75.00	12.26					

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100									
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Kecamatan	Perdesaan di Wilayah Kecamatan																									16	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	290,000,000	2	758,145,250	100	290,000,000	100	445,679,500	25	52,750,000	50	100,937,000	75	89,263,000	80	189,396,250	75	432,346,250	75.00	97.01	77	758,145,250	77.00	261.43	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	290,000,000	55	758,145,250	55	290,000,000	55	445,679,500	20	52,750,000	27	100,937,000	40	89,263,000	80	189,396,250	87	432,346,250	158.18	97.01	142	758,145,250	258.18	261.43	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	290,000,000	12	758,145,250	12	290,000,000	12	445,679,500	3	52,750,000	3	100,937,000	3	89,263,000	3	189,396,250	9	432,346,250	75.00	97.01	21	758,145,250	175.00	261.43	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	440,213,000	0	0	100	440,213,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	440,213,000	0	0	4	440,213,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	440,213,000	0	0	5	440,213,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Subi																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	15	136,299,850	20	150,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	15	136,299,850	75.00	109.04	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	136,299,850	100	150,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	136,299,850	100.00	109.04	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	136,299,850	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	136,299,850	100.00	109.04	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	79.70	65,000,000	78.93	20,250,000	79.70	65,000,000	79.70	27,440,000	0	11,985,000	0	2,000,000	60.55	0	0	0	61	13,985,000	75.97	50.97	139.48	20,250,000	175.01	31.15	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	65,000,000	78.93	20,250,000	62.50	65,000,000	62.50	27,440,000	83	11,985,000	83	2,000,000	83	0	0	0	83	13,985,000	132.80	50.97	161.93	20,250,000	259.09	31.15	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	30,000,000	0	13,985,000	2	45,000,000	2	14,320,000	2	11,985,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2	13,985,000	100.00	97.66	2	13,985,000	100.00	46.62	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	35,000,000	2	6,265,000	2	20,000,000	2	13,120,000	2	0	0	0	0	0	0	2	0	100.00	0.00	4	6,265,000	200.00	17.90		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,868,186,947	80	6,913,851,824	85	4,002,386,947	85	4,793,401,567	100	793,980,936	100	1,125,495,185	100	750,699,649	0	626,256,626	100	3,296,432,396	117.65	68.77	180	6,913,851,824	211.76	178.74	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,815,387,314	1	4,180,543,550	1	2,395,600,947	1	2,632,073,764	1	557,106,588	1	731,169,960	1	262,168,607	0	526,835,305	1	2,077,280,460	100.00	78.92	2	4,180,543,550	200.00	230.28	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1,815,387,314	18	4,180,543,550	19	2,395,600,947	19	2,632,073,764	19	557,106,588	19	731,169,960	19	262,168,607	0	526,835,305	19	2,077,280,460	100.00	78.92	37	4,180,543,550	194.74	230.28	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	93,600,000	0	14,940,000	95	55,000,000	95	15,000,000	100	0	100	0	100	14,940,000	0	0	100	14,940,000	105.26	99.60	100	14,940,000	105.26	15.96	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	33,600,000	0	14,940,000	1	25,000,000	1	15,000,000	0	0	0	0	1	14,940,000	0	0	1	14,940,000	100.00	99.60	1	14,940,000	100.00	44.46	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60,000,000	0	0	4	30,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	572,413,633	0	521,387,114	55	287,000,000	55	559,077,803	25	53,844,600	50	74,578,000	75	54,321,000	0	10,121,000	75	192,864,600	136.36	34.50	75	521,387,114	136.36	91.09	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	115,000,000	0	53,448,100	12	80,000,000	12	64,037,803	3	15,117,100	3	22,983,000	3	13,412,000	0	1,936,000	9	53,448,100	75.00	83.46	9	53,448,100	75.00	46.48	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	30	67,022,000	12	6,000,000	12	45,000,000	3	8,864,000	3	18,678,000	3	11,559,000	0	1,944,000	9	41,045,000	75.00	91.21	39	67,022,000	325.00	558.52	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	1350	92,260,000	12	10,000,000	12	56,800,000	3	16,816,000	3	11,248,000	3	17,900,000	0	4,316,000	9	50,280,000	75.00	88.52	1359	92,260,000	11,325.00	768.83	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	30000	72,576,500	12	24,000,000	12	78,000,000	3	12,297,500	3	20,919,000	3	11,450,000	0	1,925,000	9	46,591,500	75.00	59.73	30009	72,576,500	250,075.00	201.60	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	1,500,000	12	5,000,000	12	2,000,000	3	750,000	3	750,000	3	0	0	0	9	1,500,000	75.00	75.00	9	1,500,000	75.00	30.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	10	55,239,000	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	55,239,000	1,000.00	1,104.78		
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	380,213,633	35	179,341,514	30	145,000,000	30	313,240,000	24	0	0	0	0	0	0	24	0	80.00	0.00	59	179,341,514	196.67	47.17		
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	0	40	12,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	320,000,000	0	191,220,000	55	178,000,000	55	229,080,000	83	43,600,000	90	91,780,000	92	55,840,000	0	0	92	191,220,000	167.27	83.47	92	191,220,000	167.27	59.76	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	36,900,000	1	40,000,000	1	41,080,000	0	0	1	36,900,000	0	0	0	1	36,900,000	100.00	89.82	1	36,900,000	100.00	92.25		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	50,000,000	0	54,880,000	4	30,000,000	4	80,000,000	0	0	4	54,880,000	0	0	0	0	4	54,880,000	100.00	68.60	4	54,880,000	100.00	109.76	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150,000,000	0	99,440,000	5	68,000,000	5	108,000,000	3	43,600,000	0	0	2	55,840,000	0	0	5	99,440,000	100.00	92.07	5	99,440,000	100.00	66.29	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80,000,000	0	0	3	40,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	481,000,000	60	1,230,725,325	100	481,000,000	100	750,120,000	25	131,739,748	50	211,411,225	75	160,946,707	0	82,373,921	75	586,471,601	75.00	78.18	135	1,230,725,325	135.00	255.87	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7,000,000	600	28,800,000	12	7,000,000	12	17,000,000	3	4,920,000	3	4,560,000	3	2,520,000	0	1,800,000	9	13,800,000	75.00	81.18	609	28,800,000	5,075.00	411.43	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24,000,000	2	24,053,401	12	24,000,000	12	32,000,000	3	5,815,140	3	8,646,617	3	5,823,635	0	3,767,009	9	24,052,401	75.00	75.16	11	24,053,401	91.67	100.22	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000	22	1,177,871,924	12	450,000,000	12	701,120,000	3	121,004,608	3	198,204,608	3	152,603,072	0	76,806,912	9	548,619,200	75.00	78.25	31	1,177,871,924	258.33	261.75	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	585,786,000	75	775,035,835	65	605,786,000	65	608,050,000	50	7,690,000	50	16,556,000	83.33	202,483,335	0	6,926,400	83	233,655,735	128.20	38.43	158.33	775,035,835	243.58	132.31	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	423,786,000	6	487,581,100	5	423,786,000	5	331,050,000	3	0	0	0	0	0	0	3	0	60.00	0.00	9	487,581,100	180.00	115.05		
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	52,000,000	5	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	80,000,000	2	270,454,735	2	80,000,000	2	259,000,000	0	7,690,000	0	16,556,000	2	202,483,335	0	6,926,400	2	233,655,735	100.00	90.21	4	270,454,735	200.00	338.07	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	6	17,000,000	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	17,000,000	600.00	141.67		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	186,525,000	100	611,446,100	100	186,325,000	100	427,181,000	25	41,100,000	50	75,030,000	75	181,874,000	0	9,749,000	75	307,753,000	75.00	72.04	175	611,446,100	175.00	327.81	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	186,525,000	0	611,446,100	55	186,325,000	55	427,181,000	9	41,100,000	18	75,030,000	27	181,874,000	0	9,749,000	27	307,753,000	49.09	72.04	27	611,446,100	49.09	327.81	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	186,525,000	17	611,446,100	12	186,325,000	12	427,181,000	3	41,100,000	3	75,030,000	3	181,874,000	0	9,749,000	9	307,753,000	75.00	72.04	26	611,446,100	216.67	327.81	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	80,000,000	50	126,329,750	100	70,000,000	100	90,847,344	25	12,560,000	50	22,095,000	75	38,996,000	0	0	75	73,651,000	75.00	81.07	125	126,329,750	125.00	157.91	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	80,000,000	100	126,329,750	100	70,000,000	100	90,847,344	100	12,560,000	100	22,095,000	100	38,996,000	0	0	100	73,651,000	100.00	81.07	200	126,329,750	200.00	157.91	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	9	80,000,000	9	126,329,750	9	70,000,000	9	90,847,344	7	12,560,000	7	22,095,000	7	38,996,000	0	0	7	73,651,000	77.78	81.07	16	126,329,750	177.78	157.91	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	200	84,513,000	25	40,000,000	25	77,186,000	25	15,600,000	50	15,896,000	75	21,914,000	0	0	75	53,410,000	300.00	69.20	275	84,513,000	1,100.00	211.28	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	40,000,000	3	84,513,000	80	40,000,000	80	77,186,000	25	15,600,000	50	15,896,000	75	21,914,000	0	0	75	53,410,000	93.75	69.20	78	84,513,000	97.50	211.28	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40,000,000	6	84,513,000	12	40,000,000	12	77,186,000	3	15,600,000	3	15,896,000	3	21,914,000	0	0	9	53,410,000	75.00	69.20	15	84,513,000	125.00	211.28	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	115,000,000	0	78,928,000	100	130,000,000	100	124,169,000	25	40,755,000	50	24,293,000	75	13,880,000	0	0	75	78,928,000	75.00	63.56	75	78,928,000	75.00	68.63	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	115,000,000	0	78,928,000	100	130,000,000	100	124,169,000	100	40,755,000	100	24,293,000	100	13,880,000	0	0	100	78,928,000	100.00	63.56	100	78,928,000	100.00	68.63	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	45,000,000	0	29,965,000	8	50,000,000	8	30,000,000	7	29,965,000	0	0	0	0	0	0	7	29,965,000	87.50	99.88	7	29,965,000	87.50	66.59	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Laporan	12	70,000,000	0	48,963,000	12	80,000,000	12	94,169,000	3	10,790,000	3	24,293,000	3	13,880,000	0	0	9	48,963,000	75.00	51.99	9	48,963,000	75.00	69.95	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Kecamatan	Perdesaan di Wilayah Kecamatan																										

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	15	136,299,850	20	125,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	15	136,299,850	75.00	109.04	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	136,299,850	100	125,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	136,299,850	100.00	109.04	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	136,299,850	1	125,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	136,299,850	100.00	109.04		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	65.10	40,000,000	63.92	11,635,000	65.10	40,000,000	65.10	11,930,000	58.9	500,000	58.9	3,730,000	58.9	1,965,000	58.9	4,090,000	59	10,285,000	90.48	86.21	61.41	11,635,000	93.47	29.09	Target 5 Tahun 65.70
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67	40,000,000	98.48	11,635,000	67	40,000,000	67	11,930,000	90.48	500,000	90.48	3,730,000	90.48	1,965,000	90.48	4,090,000	90	10,285,000	100.00	86.21	94.48	11,635,000	100.00	29.09	Target 5 Tahun 70 Persen
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	850,000	2	10,000,000	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	100.00	0.00	4	850,000	200.00	4.25		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	10,785,000	2	30,000,000	2	11,930,000	2	500,000	0	3,730,000	0	1,965,000	0	4,090,000	2	10,285,000	100.00	86.21	4	10,785,000	40.00	53.93	Target 5 Tahun 10 Laporan
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,034,370,466	100	5,109,961,521	85	3,486,516,466	85	3,061,366,280	100	489,976,255	100	847,307,505	100	550,713,739	100	909,276,229	100	2,797,273,728	100.00	91.37	100	5,109,961,521	100.00	168.40	Target 5 Tahun 90 Persen
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,142,140,899	1	3,288,590,577	1	2,142,140,899	1	1,832,253,280	1	389,095,231	1	513,117,981	1	289,234,631	1	511,189,205	1	1,702,637,048	100.00	92.93	2	3,288,590,577	20.00	153.52	Target 5 Tahun 5 Tepat Waktu
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	2,142,140,899	9	3,288,590,577	13	2,142,140,899	13	1,832,253,280	11	389,095,231	11	513,117,981	11	289,234,631	10	511,189,205	10	1,702,637,048	76.92	92.93	19	3,288,590,577	29.69	153.52	Target 5 Tahun 64 Orang
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	90	20,500,000	95	85,600,000	95	20,500,000	100	0	100	12,500,000	100	0	100	0	100	12,500,000	100.00	60.98	95	20,500,000	96.94	31.54	Target 5 Tahun 95 Persen
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20,000,000	0	0	1	55,600,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	1	20,500,000	3	30,000,000	3	20,500,000	0	0	2	12,500,000	0	0	0	4	12,500,000	100.00	60.98	5	20,500,000	33.33	45.56	Target 5 Tahun 15 Orang	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	64	186,229,567	75	516,240,584	64	219,775,567	64	406,022,620	25	18,815,000	42	98,369,500	57	69,788,084	61	117,095,000	61	304,067,584	95.31	74.89	68	516,240,584	97.14	277.21	Target 5 Tahun 70 Persen
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	7	44,517,000	12	10,000,000	12	40,200,000	3	2,000,000	3	4,445,000	3	8,555,000	3	25,200,000	12	40,200,000	100.00	100.00	19	44,517,000	158.33	556.46	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	600	85,223,000	12	10,000,000	12	62,200,000	3	900,000	3	13,500,000	3	13,650,000	3	28,510,000	12	56,560,000	100.00	90.93	612	85,223,000	5,100.00	710.19	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	4500	36,894,700	12	24,000,000	12	53,500,000	3	2,600,000	3	2,900,000	3	6,425,700	3	14,930,000	12	26,855,700	100.00	50.20	4512	36,894,700	37,600.00	153.73	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	1	2,550,000	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	2,550,000	8.33	51.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	8	93,976,000	1	5,000,000	1	57,723,000	3	5,980,000	3	17,998,000	3	6,729,000	3	26,975,000	12	57,682,000	100.00	99.93	20	93,976,000	2,000.00	1,879.52	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	125,029,567	27	253,079,884	30	155,775,567	30	192,399,620	4	7,335,000	9	59,526,500	6	34,428,384	4	21,480,000	23	122,769,884	76.67	63.81	50	253,079,884	33.33	202.42	Target 5 Tahun 150 Laporan
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7,200,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	71	140,000,000	42	39,800,000	71	565,000,000	71	40,000,000	0	0	35	39,800,000	0	0	0	0	35	39,800,000	49.30	99.50	38.5	39,800,000	52.02	28.43	Target 5 Tahun 74 Persen

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	80,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	81,000,000	4	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	39,800,000	5	109,000,000	5	40,000,000	0	0	4	39,800,000	0	0	0	0	4	39,800,000	80.00	99.50	4	39,800,000	20.00	79.60	Target 5 Tahun 20 Unit
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	0	0	2	285,000,000	2	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	332,000,000	80	668,878,360	100	242,000,000	100	372,200,000	25	57,366,024	50	98,299,024	75	88,161,024	100	114,387,024	100	358,213,096	100.00	96.24	90	668,878,360	90.00	201.47	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	19,989,000	12	6,000,000	12	15,000,000	3	0	3	988,000	3	4,010,000	3	9,996,000	12	14,994,000	100.00	99.96	24	19,989,000	20.00	333.15	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	12	81,185,000	12	36,000,000	12	36,800,000	3	4,065,000	3	13,510,000	3	9,850,000	3	9,090,000	12	36,515,000	100.00	99.23	24	81,185,000	20.00	225.51	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290,000,000	12	567,704,360	12	200,000,000	12	320,400,000	3	53,301,024	3	83,801,024	3	74,301,024	3	95,301,024	12	306,704,096	100.00	95.73	24	567,704,360	20.00	195.76	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	64	169,000,000	75	575,952,000	64	232,000,000	64	390,390,380	50	24,700,000	50	85,221,000	50	103,530,000	50	166,605,000	50	380,056,000	78.12	97.35	62.5	575,952,000	89.29	340.80	Target 5 Tahun 70 Persen
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	87,000,000	4	391,922,000	5	80,000,000	5	263,490,380	4	24,700,000	4	73,841,000	4	44,330,000	4	110,405,000	4	253,276,000	80.00	96.12	8	391,922,000	32.00	450.49	Target 5 Tahun 25 Unit
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	8	53,450,000	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	8	53,450,000	160.00	267.25	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	40,000,000	4	98,880,000	4	120,000,000	4	98,900,000	0	0	0	5,980,000	2	54,000,000	2	38,900,000	4	98,880,000	100.00	99.98	8	98,880,000	20.00	247.20	Target 5 Tahun 20 Unit
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	2	3,800,000	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	3,800,000	200.00	38.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	2	27,900,000	2	10,000,000	2	28,000,000	0	0	0	5,400,000	2	5,200,000	2	17,300,000	2	27,900,000	100.00	99.64	4	27,900,000	20.00	232.50	Target 5 Tahun 24 Unit
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	172,292,000	100	605,980,000	100	172,292,000	100	536,800,000	0	0	60	32,880,000	65	257,510,000	80	156,800,000	80	447,190,000	80.00	83.31	90	605,980,000	90.00	351.72	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	86,146,000	40	302,990,000	55	86,146,000	55	268,400,000	0	0	8	16,440,000	24	128,755,000	13	78,400,000	45	223,595,000	81.82	83.31	95	302,990,000	100.00	351.72	Target 5 Tahun 70 Kali
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	86,146,000	40	302,990,000	55	86,146,000	55	268,400,000	5	0	14	16,440,000	32	128,755,000	0	78,400,000	32	223,595,000	58.18	83.31	72	302,990,000	130.91	351.72	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	86,146,000	8	302,990,000	12	86,146,000	12	268,400,000	3	0	3	16,440,000	3	128,755,000	3	78,400,000	12	223,595,000	100.00	83.31	20	302,990,000	33.33	351.72	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	86,146,000	8	302,990,000	12	86,146,000	12	268,400,000	3	0	3	16,440,000	3	128,755,000	3	78,400,000	12	223,595,000	100.00	83.31	20	302,990,000	33.33	351.72	Target 5 Tahun 60 Laporan
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	35,000,000	100	91,325,000	100	35,000,000	100	83,084,000	25	13,900,000	50	0	75	11,760,000	80	49,705,000	80	75,365,000	80.00	90.71	90	91,325,000	90.00	260.93	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	35,000,000	100	91,325,000	100	35,000,000	100	83,084,000	100	13,900,000	100	0	100	11,760,000	100	49,705,000	100	75,365,000	100.00	90.71	100	91,325,000	100.00	260.93	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	35,000,000	6	91,325,000	7	35,000,000	7	83,084,000	7	13,900,000	7	0	7	11,760,000	7	49,705,000	7	75,365,000	100.00	90.71	14	91,325,000	20.00	260.93	Target 5 Tahun 35 LK
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	14,085,000	25	20,000,000	25	26,820,000	20	0	20	150,000	20	0	20	13,935,000	20	14,085,000	80.00	52.52	20	14,085,000	20.00	70.43	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan	Persen	80	20,000,000	0	14,085,000	80	20,000,000	80	26,820,000	100	0	100	150,000	100	0	100	13,935,000	100	14,085,000	100.00	52.52	100	14,085,000	100.00	70.43	5 Tahun 100 Persen

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
													I		II		III		IV											
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100					
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	
		Daerah	perkada																											
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	0	14,085,000	12	20,000,000	12	26,820,000	3	0	3	150,000	3	0	3	13,935,000	12	14,085,000	100.00	52.52	12	14,085,000	10.00	70.43	5 Tahun 60 Laporan	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	65,000,000	0	0	100	65,000,000	100	48,500,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	65,000,000	0	0	100	65,000,000	100	48,500,000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00	Target 5 Tahun 100 Persen
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	35,000,000	0	0	7	35,000,000	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	30,000,000	0	0	12	30,000,000	12	48,500,000	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	50.00	0.00	6	0	12.50	0.00	5 Tahun 48 Laporan	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Tengah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	50,000,000	15	111,567,000	20	50,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	15	111,567,000	75.00	223.13		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	50,000,000	100	111,567,000	100	50,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	111,567,000	100.00	223.13		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	50,000,000	1	111,567,000	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	111,567,000	100.00	223.13		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	72.10	15,000,000	71.39	4,725,000	72.10	15,000,000	72.10	16,750,000	61	950,000	61	0	61	2,538,000	72.1	0	61	3,488,000	84.60	20.82	132.39	4,725,000	183.62	31.50	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	15,000,000	71.39	4,725,000	62.50	15,000,000	62.50	16,750,000	76.19	950,000	85.71	0	90.47	2,538,000	62.5	0	90	3,488,000	144.75	20.82	161.86	4,725,000	258.98	31.50	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,000,000	2	3,225,000	2	5,000,000	2	9,500,000	1	950,000	0	0	1	1,038,000	2	0	2	1,988,000	100.00	20.93	4	3,225,000	200.00	64.50	
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	5,000,000	0	0	2	5,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	5,000,000	2	1,500,000	2	5,000,000	2	7,250,000	2	0	0	0	0	1,500,000	2	0	4	1,500,000	200.00	20.69	6	1,500,000	300.00	30.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,713,160,852	71.39	4,230,200,686	85	3,174,855,852	85	2,684,511,985	100	477,435,193	100	550,939,759	100	462,048,478	85	741,576,019	100	2,231,999,449	117.65	83.14	171.39	4,230,200,686	201.64	155.91	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,195,600,947	1	3,303,964,932	1	2,495,600,947	1	1,829,849,620	1	390,078,585	1	435,690,251	1	274,745,770	1	604,980,661	1	1,705,495,267	100.00	93.20	2	3,303,964,932	200.00	150.48	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2,195,600,947	20	3,303,964,932	20	2,495,600,947	20	1,829,849,620	20	390,078,585	20	435,690,251	20	274,745,770	20	604,980,661	20	1,705,495,267	100.00	93.20	40	3,303,964,932	200.00	150.48	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	38,000,000	0	51,419,900	95	45,000,000	95	92,665,848	100	0	100	9,399,900	100	42,020,000	95	0	100	51,419,900	105.26	55.49	100	51,419,900	105.26	135.32	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	8,000,000	0	42,020,000	1	15,000,000	1	47,688,608	0	0	0	0	1	42,020,000	1	0	1	42,020,000	100.00	88.11	1	42,020,000	100.00	525.25	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	0	9,399,900	2	30,000,000	2	44,977,240	0	0	1	9,399,900	0	0	2	0	1	9,399,900	50.00	20.90	1	9,399,900	50.00	31.33	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	90,305,905	100	247,947,592	55	148,000,905	55	281,495,871	25	20,040,000	50	22,570,000	75	45,672,100	55	58,668,750	75	146,950,850	136.36	52.20	175	247,947,592	318.18	274.56	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	0	0	12	40,000,000	12	30,000,000	3	0	3	0	3	0	12	0	9	0	75.00	0.00	9	0	75.00	0.00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	24,505,000	12	6,000,000	12	12,000,011	3	3,990,000	3	0	3	5,590,000	12	0	9	9,580,000	75.00	79.83	21	24,505,000	175.00	408.42	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	12	18,996,000	12	5,000,000	12	60,030,000	3	3,700,000	3	0	3	1,980,000	12	10,436,000	9	16,116,000	75.00	26.85	21	18,996,000	175.00	379.92	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	9,609,600	12	12,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	9,609,600	100.00	160.16		
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	0	12	4,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	12	110,248,850	1	5,000,000	1	67,000,000	1	6,750,000	1	16,120,000	1	33,302,100	1	10,732,750	1	66,904,850	100.00	99.86	13	110,248,850	1,300.00	2,204.98	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	38,305,905	35	84,588,142	32	70,000,905	32	112,465,860	37	5,600,000	43	6,450,000	15	4,800,000	32	37,500,000	95	54,350,000	296.88	48.33	130	84,588,142	406.25	220.82	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	6,000,000	0	0	40	6,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	105,000,000	0	0	55	130,000,000	55	43,732,000	0	0	0	0	50	0	55	0	50	0	90.91	0.00	50	0	90.91	0.00	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	20,000,000	4	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	25,000,000	0	0	5	50,000,000	5	43,732,000	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100.00	0.00	5	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	245,254,000	64	504,784,262	100	270,254,000	100	286,748,646	25	58,804,608	50	68,607,608	100	63,216,608	100	66,611,608	75	257,240,432	75.00	89.71	139	504,784,262	139.00	205.82	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,000,000	12	9,950,000	12	12,000,000	12	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	12	9,950,000	100.00	331.67		
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8,000,000	12	4,992,000	12	24,000,000	12	11,000,000	3	0	3	203,000	12	812,000	12	607,000	9	1,622,000	75.00	14.75	21	4,992,000	175.00	62.40	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	234,254,000	12	489,842,262	12	234,254,000	12	275,748,646	3	58,804,608	3	68,404,608	3	62,404,608	12	66,004,608	9	255,618,432	75.00	92.70	21	489,842,262	175.00	209.11	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	39,000,000	25.32	122,084,000	65	86,000,000	65	150,020,000	40	8,512,000	50	14,672,000	70	36,394,000	65	11,315,000	70	70,893,000	107.69	47.26	95.32	122,084,000	146.65	313.04	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	15,000,000	4	115,332,500	4	20,000,000	4	90,000,000	4	8,512,000	4	13,972,000	4	34,944,000	4	11,315,000	4	68,743,000	100.00	76.38	8	115,332,500	200.00	768.88	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	0	0	1	20,000,000	1	50,020,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4,000,000	3	6,751,500	1	6,000,000	1	10,000,000	0	0	1	700,000	2	1,450,000	1	0	4	2,150,000	400.00	21.50	7	6,751,500	700.00	168.79	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	40,000,000	100	83,907,500	100	40,000,000	100	71,300,000	25	6,050,000	50	3,800,000	75	42,288,000	100	0	75	52,138,000	75.00	73.12	175	83,907,500	175.00	209.77	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	40,000,000	0	83,907,500	55	40,000,000	55	71,300,000	3	6,050,000	3	3,800,000	3	42,288,000	55	0	9	52,138,000	16.36	73.12	9	83,907,500	16.36	209.77	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	40,000,000	12	83,907,500	12	40,000,000	12	71,300,000	3	6,050,000	3	3,800,000	3	42,288,000	12	0	21	52,138,000	175.00	73.12	33	83,907,500	275.00	209.77	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	12,000,000	100	45,625,000	100	12,000,000	100	72,785,020	25	3,200,000	50	0	75	21,319,000	100	13,082,000	75	37,601,000	75.00	51.66	175	45,625,000	175.00	380.21	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	12,000,000	75	45,625,000	100	12,000,000	100	72,785,020	100	3,200,000	100	0	100	21,319,000	100	13,082,000	100	37,601,000	100.00	51.66	175	45,625,000	175.00	380.21	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	12,000,000	4	45,625,000	4	12,000,000	4	72,785,020	4	3,200,000	4	0	4	21,319,000	4	13,082,000	4	37,601,000	100.00	51.66	8	45,625,000	200.00	380.21	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	5,000,000	0	0	25	5,000,000	25	14,950,000	25	0	50	0	25	0	25	0	75	0	300.00	0.00	75	0	300.00	0.00	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	80	5,000,000	0	0	80	5,000,000	80	14,950,000	25	0	50	0	80	0	80	0	75	0	93.75	0.00	75	0	93.75	0.00	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	5,000,000	0	0	12	5,000,000	12	14,950,000	3	0	3	0	12	0	12	0	9	0	75.00	0.00	9	0	75.00	0.00	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	30,000,000	100	19,541,000	100	35,000,000	100	22,820,000	25	15,116,000	50	0	100	2,810,000	100	1,615,000	75	19,541,000	75.00	85.63	175	19,541,000	175.00	65.14	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	30,000,000	100	19,541,000	100	35,000,000	100	22,820,000	100	15,116,000	100	0	100	2,810,000	100	1,615,000	100	19,541,000	100.00	85.63	200	19,541,000	200.00	65.14	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	15,000,000	0	15,116,000	4	15,000,000	4	15,220,000	4	15,116,000	0	0	4	0	4	0	4	15,116,000	100.00	99.32	4	15,116,000	100.00	100.77	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	15,000,000	0	4,425,000	12	20,000,000	12	7,600,000	3	0	3	0	12	2,810,000	12	1,615,000	9	4,425,000	75.00	58.22	9	4,425,000	75.00	29.50	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																																
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																																
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur Laut																																
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan			
													I		II		III		IV													
					1	2	3	4	4A	5	Rp	6	Rp	7	k	Rp Renja	k	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=8+9+10+11	k		Rp	13=12/7 x100	k
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																														
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																														
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	15	191,962,814	20	120,000,000	20	59,450,000	25	941,264	50	6,674,234	75	26,389,450	100	3,869,866	75	37,874,814	375.00	63.71	90	191,962,814	450.00	159.97				
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	191,962,814	100	120,000,000	100	59,450,000	25	941,264	50	6,674,234	75	26,389,450	100	3,869,866	75	37,874,814	75.00	63.71	175	191,962,814	175.00	159.97				
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	191,962,814	1	120,000,000	1	59,450,000	1	941,264	1	6,674,234	1	26,389,450	100	3,869,866	103	37,874,814	10,300.00	63.71	104	191,962,814	10,400.00	159.97				
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																														
7.01.		KECAMATAN																														
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.51	40,000,000	73.4	6,680,060	79.51	40,000,000	79.51	5,395,000	82	423,362	82	1,005,876	86	656,432	0	2,441,390	86	4,527,060	108.16	83.91	159.4	6,680,060	200.48	16.70				
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	40,000,000	92.31	6,680,060	65	40,000,000	65	5,395,000	82.6	423,362	82.6	1,005,876	86.95	656,432	86.95	2,441,390	87	4,527,060	133.77	83.91	179.26	6,680,060	275.78	16.70				
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	0	2	25,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	6,680,060	2	15,000,000	2	5,395,000	1	423,362	0	1,005,876	0	656,432	1	2,441,390	2	4,527,060	100.00	83.91	4	6,680,060	200.00	33.40				
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,519,140,932	71.39	6,771,659,072	85	4,097,140,932	85	4,125,971,331	100	769,492,018	100	1,024,417,819	100	650,959,992	100	1,087,352,699	100	3,532,222,528	117.65	85.61	171.39	6,771,659,072	201.64	192.42				
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,263,260,932	1	4,704,243,162	1	2,368,260,932	1	2,568,316,531	1	556,052,636	1	721,971,428	1	418,902,931	1	681,837,629	1	2,378,764,624	100.00	92.62	2	4,704,243,162	200.00	207.85				
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2,263,260,932	19	4,704,243,162	19	2,368,260,932	19	2,568,316,531	19	556,052,636	19	721,971,428	19	418,902,931	19	681,837,629	76	2,378,764,624	400.00	92.62	95	4,704,243,162	500.00	207.85				
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	70,000,000	100	29,845,000	95	70,000,000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	29,845,000	105.26	42.64					
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25,000,000	1	29,845,000	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	29,845,000	100.00	119.38					
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikutl Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	0	3	45,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	272,985,000	80	358,013,663	55	281,985,000	55	243,814,800	25	52,622,673	50	69,871,899	75	51,472,549	75	34,646,592	75	208,613,713	136.36	85.56	155	358,013,663	281.82	131.15				
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	80,000,000	12	59,144,256	12	60,000,000	12	26,721,000	3	3,875,666	3	5,237,499	3	6,005,499	3	7,760,592	12	22,879,256	100.00	85.62	24	59,144,256	200.00	73.93				
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	3	34,890,000	12	10,000,000	12	25,000,000	3	6,000,000	3	5,945,000	3	5,978,500	3	6,966,500	12	24,890,000	100.00	99.56	15	34,890,000	125.00	348.90				
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	12	78,272,000	12	12,000,000	12	38,280,000	3	7,892,000	3	10,780,000	3	6,844,000	3	12,756,000	12	38,272,000	100.00	99.98	24	78,272,000	200.00	1,565.44				
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	25,000,000	12	54,385,400	12	24,000,000	12	62,553,060	0	9,173,000	0	11,909,400	0	10,714,550	35	5,588,500	35	37,385,450	291.67	59.77	47	54,385,400	391.67	217.54				
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	0	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	4	110,930,000	1	5,000,000	1	76,147,120	1	18,000,000	1	36,000,000	1	21,930,000	1	0	4	75,930,000	400.00	99.71	8	110,930,000	800.00	2,218.60				
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	135,785,000	12	20,392,007	30	155,785,000	30	15,113,620	65	7,682,007	56	0	32	0	63	1,575,000	216	9,257,007	720.00	61.25	228	20,392,007	760.00	15.02				
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7,200,000	0	0	1	10,200,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	60	215,000,000	0	157,707,040	60	672,000,000	60	311,120,000	2.45	2,274,208	3.31	3,066,624	50	3,526,208	50	148,840,000	50	157,707,040	83.33	50.69	50	157,707,040	83.33	73.35				
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	65,000,000	0	0	2	230,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	39,900,000	3	84,000,000	3	184,340,000	0	0	0	0	0	0	71	39,900,000	71	39,900,000	2,366.67	21.64	71	39,900,000	2,366.67	199.50	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	110,000,000	0	117,807,040	5	148,000,000	5	126,780,000	0	2,274,208	0	3,066,624	0	3,526,208	7	108,940,000	7	117,807,040	140.00	92.92	7	117,807,040	140.00	107.10	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	0	1	210,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	486,298,000	100	1,287,764,440	100	486,298,000	100	646,196,000	25	131,694,179	50	167,386,317	75	150,053,177	100	174,883,351	75	624,017,024	75.00	96.57	175	1,287,764,440	175.00	264.81	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	53,097,000	12	6,000,000	12	47,336,000	3	7,737,500	3	13,154,250	3	9,530,250	3	16,675,000	12	47,097,000	100.00	99.50	24	53,097,000	200.00	884.95	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26,100,000	12	29,895,649	12	26,100,000	12	18,000,000	3	3,648,999	3	3,824,387	3	4,615,247	3	5,500,671	12	17,589,304	100.00	97.72	24	29,895,649	200.00	114.54	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	454,198,000	12	1,204,771,791	12	454,198,000	12	580,860,000	29	120,307,680	29	150,407,680	29	135,907,680	29	152,707,680	116	559,330,720	966.67	96.29	128	1,204,771,791	1,066.67	265.25	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	211,597,000	80	234,085,767	65	218,597,000	65	356,524,000	75	26,848,322	75	62,121,551	75	27,005,127	75	47,145,127	75	163,120,127	115.38	45.75	155	234,085,767	238.46	110.63	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	56,597,000	6	156,811,767	6	56,597,000	6	106,000,000	6	19,348,322	6	30,218,551	6	13,934,127	6	40,095,127	24	103,596,127	400.00	97.73	30	156,811,767	500.00	277.07	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	0	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100,000,000	1	29,524,000	1	80,000,000	1	220,524,000	0	0	0	22,903,000	0	6,621,000	1	0	1	29,524,000	100.00	13.39	2	29,524,000	200.00	29.52	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25,000,000	11	30,000,000	1	50,000,000	1	30,000,000	11	7,500,000	11	9,000,000	11	6,450,000	8	7,050,000	41	30,000,000	4,100.00	100.00	52	30,000,000	5,200.00	120.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	5	17,750,000	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	17,750,000	500.00	88.75	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	598,440,000	2	838,809,646	100	70,000,000	100	645,010,000	25	21,075,750	50	190,570,337	75	234,977,971	100	96,547,888	75	543,171,946	75.00	84.21	77	838,809,646	77.00	140.17	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	294,220,000	0	413,861,659	55	30,000,000	55	316,090,000	25	10,267,238	50	91,695,357	75	116,279,357	0	47,800,857	75	266,042,809	136.36	84.17	75	413,861,659	136.36	140.66	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	294,220,000	55	413,861,659	55	30,000,000	55	316,090,000	25	10,267,238	50	91,695,357	75	116,279,357	100	47,800,857	75	266,042,809	136.36	84.17	130	413,861,659	236.36	140.66	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	294,220,000	6	413,861,659	12	30,000,000	12	316,090,000	3	10,267,238	3	91,695,357	3	116,279,357	3	47,800,857	12	266,042,809	100.00	84.17	18	413,861,659	150.00	140.66	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	294,220,000	6	413,861,659	12	30,000,000	12	316,090,000	3	10,267,238	3	91,695,357	3	116,279,357	3	47,800,857	12	266,042,809	100.00	84.17	18	413,861,659	150.00	140.66	
7.01.02.2.04.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	Koordinasi	4	10,000,000	4	11,086,328	4	10,000,000	4	12,830,000	1	541,274	1	7,179,623	1	2,419,257	1	946,174	3	11,086,328	75.00	86.41	7	11,086,328	175.00	110.86	
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	10,000,000	12	11,086,328	12	10,000,000	12	12,830,000	3	541,274	3	7,179,623	3	2,419,257	3	946,174	12	11,086,328	100.00	86.41	24	11,086,328	200.00	110.86	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	80,000,000	50	147,428,729	100	80,000,000	100	145,334,000	25	34,461,074	50	21,052,329	75	26,233,405	75	15,544,521	75	97,291,329	75.00	66.94	125	147,428,729	125.00	184.29	
7.01.03.2.01.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi	0	0	3	77,038,685	0	60,000,000	0	43,750,000	2	16,428,480	2	12,410,803	2	11,979,959	2	2,044,543	6	42,863,785	0.00	97.97	9	77,038,685	0.00	0.00	
7.01.03.2.01.01.		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	7	33,412,885	0	30,000,000	0	22,895,000	7	16,428,480	0	1,461,003	0	2,079,959	0	2,044,543	7	22,013,985	0.00	96.15	14	33,412,885	0.00	0.00	
7.01.03.2.01.03.		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	7	43,625,800	0	30,000,000	0	20,855,000	0	0	0	10,949,800	7	9,900,000	7	0	14	20,849,800	0.00	99.98	21	43,625,800	0.00	0.00	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	80,000,000	100	70,390,044	100	20,000,000	100	101,584,000	25	18,032,594	50	8,641,526	75	14,253,446	75	13,499,978	75	54,427,544	75.00	53.58	175	70,390,044	175.00	87.99	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	80,000,000	8	70,390,044	8	20,000,000	8	101,584,000	0	18,032,594	0	8,641,526	0	14,253,446	8	13,499,978	8	54,427,544	100.00	53.58	16	70,390,044	200.00	87.99	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100									
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	0	25	20,000,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	80	20,000,000	0	0	80	20,000,000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	0	0	12	20,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	180,000,000	0	28,256,545	100	180,000,000	100	34,090,000	100	806,584	100	1,087,626	100	1,250,626	100	25,111,709	100	28,256,545	100.00	82.89	100	28,256,545	100.00	15.70	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	180,000,000	0	28,256,545	100	180,000,000	100	34,090,000	100	806,584	100	1,087,626	100	1,250,626	100	25,111,709	100	28,256,545	100.00	82.89	100	28,256,545	100.00	15.70	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	70,000,000	0	0	7	40,000,000	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.06.2.01.11.		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	30,000,000	0	28,256,545	12	70,000,000	12	34,090,000	0	806,584	0	1,087,626	0	1,250,626	1	25,111,709	1	28,256,545	8.33	82.89	1	28,256,545	8.33	94.19	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80,000,000	0	0	12	70,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Selatan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6						7		8		9		10										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	100	50,000,000	58	72,019,650	100	70,000,000	100	7,200,000	25	0	50	0	75	0	85	0	85	0	85.00	0.00	143	72,019,650	143.00	144.04	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	50,000,000	100	72,019,650	100	70,000,000	100	7,200,000	25	0	50	0	75	0	85	0	85	0	85.00	0.00	185	72,019,650	185.00	144.04	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	50,000,000	1	72,019,650	1	70,000,000	1	7,200,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	2	72,019,650	200.00	144.04	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	76.60	30,000,000	77.08	1,864,750	76.60	30,000,000	76.60	2,600,000	78	0	77.08	0	78.5	450,000	78.5	375,000	79	825,000	102.48	31.73	155.58	1,864,750	203.11	6.22	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	77.08	1,864,750	65	30,000,000	65	2,600,000	72.72	0	72.72	0	81.81	450,000	81.81	375,000	82	825,000	125.86	31.73	158.89	1,864,750	244.45	6.22	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	2	0	2	5,000,000	2	0	1	0	1	0	2	0	0	4	0	200.00	0.00	6	0	300.00	0.00		
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10,000,000	1	750,000	2	15,000,000	2	1,100,000	1	0	0	0	2	375,000	2	375,000	2	750,000	100.00	68.18	3	750,000	150.00	7.50	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	2	1,114,750	2	10,000,000	2	1,500,000	1	0	1	0	0	75,000	2	0	2	75,000	100.00	5.00	4	1,114,750	200.00	11.15	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,781,616,314	80	4,798,043,330	85	2,770,616,314	85	2,966,365,390	100	543,535,475	100	612,362,824	100	557,456,705	100	744,614,957	100	2,457,969,961	117.65	82.86	180	4,798,043,330	211.76	172.49	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	3.3	1,932,170,124	1	3,211,357,481	3.3	1,815,387,314	3.3	1,739,500,390	1	377,839,222	1	456,245,363	1	300,246,044	1	455,162,867	1	1,589,493,496	30.30	91.38	2	3,211,357,481	60.61	166.20	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,932,170,124	12	3,211,357,481	10	1,815,387,314	10	1,739,500,390	10	377,839,222	10	456,245,363	10	300,246,044	11	455,162,867	10	1,589,493,496	100.00	91.38	22	3,211,357,481	220.00	166.20	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	30,000,000	90	12,650,000	95	49,000,000	95	10,000,000	100	0	100	0	100	0	100	10,000,000	100	10,000,000	105.26	100.00	190	12,650,000	200.00	42.17	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	2	12,650,000	2	49,000,000	2	10,000,000	0	0	0	0	0	0	2	10,000,000	2	10,000,000	100.00	100.00	4	12,650,000	200.00	42.17	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	188,446,190	35	326,388,036	55	248,200,000	55	402,005,000	25	42,893,000	50	18,580,700	75	40,585,400	75	75,717,944	75	177,777,044	136.36	44.22	110	326,388,036	200.00	173.20	
7.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	0	11,152,500	1	20,000,000	1	23,200,000	1	2,520,000	0	0	1	5,875,500	1	2,757,000	1	11,152,500	100.00	48.07	1	11,152,500	100.00	111.53	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	0	29,610,000	12	20,000,000	12	32,500,000	3	9,390,000	3	0	3	0	3	20,220,000	12	29,610,000	100.00	91.11	12	29,610,000	100.00	49.35	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	10	20,818,000	12	6,000,000	12	11,649,378	3	2,089,000	3	0	3	2,880,000	3	6,679,000	12	11,648,000	100.00	99.99	22	20,818,000	183.33	346.97	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	2055	30,711,000	12	10,000,000	12	32,600,000	3	4,900,000	3	1,190,000	3	2,691,000	3	6,090,000	12	14,871,000	100.00	45.62	2067	30,711,000	17,225.00	307.11	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	1169	15,341,050	12	12,000,000	12	56,192,940	3	400,000	3	0	3	3,599,000	3	1,393,000	12	5,392,000	100.00	9.60	1181	15,341,050	9,841.67	127.84	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	0	12	4,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	10	49,420,000	1	5,000,000	1	26,911,462	1	5,997,000	0	0	1	11,976,000	1	8,934,000	1	26,907,000	100.00	99.98	11	49,420,000	1,100.00	988.40	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	74,246,190	36	169,335,486	20	164,000,000	20	206,951,220	110	17,597,000	91	17,390,700	30	13,563,900	121	29,644,944	352	78,196,544	1,760.00	37.79	388	169,335,486	1,940.00	228.07	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0	0	12	7,200,000	12	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																	12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	180,000,000	0	86,498,000	65	150,000,000	65	203,900,000	0	0	0	0	50	86,498,000	0	0	50	86,498,000	76.92	42.42	50	86,498,000	76.92	48.05	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	20,000,000	0	7,498,000	10	20,000,000	10	103,900,000	0	0	0	0	2	7,498,000	0	0	2	7,498,000	20.00	7.22	2	7,498,000	20.00	37.49	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80,000,000	0	79,000,000	5	50,000,000	5	100,000,000	0	0	0	0	7	79,000,000	2	0	9	79,000,000	180.00	79.00	9	79,000,000	180.00	98.75	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	291,000,000	84	974,908,237	100	291,000,000	100	499,960,000	25	101,279,253	50	128,534,261	75	117,132,261	100	140,011,570	100	486,957,345	100.00	97.40	184	974,908,237	184.00	335.02	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	536	4,994,000	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	536	4,994,000	4,466.67	83.23	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40,000,000	2	9,975,000	12	40,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	9,975,000	16.67	24.94	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	245,000,000	15	959,939,237	12	245,000,000	12	499,960,000	17	101,279,253	17	128,534,261	17	117,132,261	17	140,011,570	17	486,957,345	141.67	97.40	32	959,939,237	266.67	391.81	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	160,000,000	55	186,241,576	65	217,029,000	65	111,000,000	75	21,524,000	75	9,002,500	75	12,995,000	75	63,722,576	75	107,244,076	115.38	96.62	130	186,241,576	200.00	116.40	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	50,000,000	3	142,269,250	3	85,029,000	3	76,000,000	3	21,524,000	3	9,002,500	3	12,995,000	3	28,750,250	3	72,271,750	100.00	95.09	6	142,269,250	200.00	284.54	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	34,972,326	1	50,000,000	1	35,000,000	0	0	0	0	0	0	1	34,972,326	1	34,972,326	100.00	99.92	1	34,972,326	100.00	69.94	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	20,000,000	5	9,000,000	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	9,000,000	100.00	45.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	200,000,000	3	499,426,000	100	200,000,000	100	311,050,000	9	20,256,000	27	89,310,000	81.82	150,058,000	97.27	42,938,000	97	302,562,000	97.27	97.27	100.27	499,426,000	100.27	249.71	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	100,000,000	0	249,713,000	55	100,000,000	55	155,525,000	5	10,128,000	10	44,655,000	30	75,029,000	0	21,469,000	45	151,281,000	81.82	97.27	45	249,713,000	81.82	249.71	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	100,000,000	0	249,713,000	55	100,000,000	55	155,525,000	5	10,128,000	10	44,655,000	30	75,029,000	10	21,469,000	55	151,281,000	100.00	97.27	55	249,713,000	100.00	249.71	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	100,000,000	10	249,713,000	12	100,000,000	12	155,525,000	3	10,128,000	3	44,655,000	3	75,029,000	3	21,469,000	12	151,281,000	100.00	97.27	22	249,713,000	183.33	249.71	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	100,000,000	10	249,713,000	12	100,000,000	12	155,525,000	3	10,128,000	3	44,655,000	3	75,029,000	3	21,469,000	12	151,281,000	100.00	97.27	22	249,713,000	183.33	249.71	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25,000,000	24	35,645,000	100	25,000,000	100	36,934,000	100	10,175,000	100	375,000	100	16,650,000	100	6,420,000	100	33,620,000	100.00	91.03	124	35,645,000	124.00	142.58	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25,000,000	100	35,645,000	100	25,000,000	100	36,934,000	100	10,175,000	100	375,000	100	16,650,000	100	6,420,000	100	33,620,000	100.00	91.03	200	35,645,000	200.00	142.58	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	5	35,645,000	5	25,000,000	5	36,934,000	5	10,175,000	5	375,000	5	16,650,000	5	6,420,000	5	33,620,000	100.00	91.03	10	35,645,000	200.00	142.58	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	10,000,000	0	200,000	25	10,000,000	25	1,400,000	25	200,000	50	0	25	0	25	0	25	200,000	100.00	14.29	25	200,000	100.00	2.00	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	80	10,000,000	0	200,000	80	10,000,000	80	1,400,000	25	200,000	50	0	75	0	75	0	75	200,000	93.75	14.29	75	200,000	93.75	2.00	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	10,000,000	0	200,000	12	10,000,000	12	1,400,000	3	200,000	3	0	3	0	3	0	12	200,000	100.00	14.29	12	200,000	100.00	2.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	59,000,000	0	1,500,000	100	59,000,000	100	2,400,000	100	0	100	1,500,000	100	0	100	0	100	1,500,000	100.00	62.50	100	1,500,000	100.00	2.54	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindakanJuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	59,000,000	0	1,500,000	100	59,000,000	100	2,400,000	100	0	100	1,500,000	100	0	100	0	100	1,500,000	100.00	62.50	100	1,500,000	100.00	2.54	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	43,000,000	0	1,500,000	5	30,000,000	5	2,400,000	5	0	0	1,500,000	0	0	0	0	5	1,500,000	100.00	62.50	5	1,500,000	100.00	3.49	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	16,000,000	0	0	12	29,000,000	12	0	4	0	3	0	3	0	0	0	10	0	83.33	0.00	10	0	83.33	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan Timur																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	155,000,000	15	264,390,000	20	150,000,000	20	148,450,000	25	0	50	72,820,000	75	0	100	25,100,000	100	97,920,000	500.00	65.96	115	264,390,000	575.00	170.57	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	155,000,000	100	264,390,000	100	150,000,000	100	148,450,000	0	0	100	72,820,000	100	0	100	25,100,000	100	97,920,000	100.00	65.96	200	264,390,000	200.00	170.57	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	155,000,000	1	264,390,000	1	150,000,000	1	148,450,000	0	0	1	72,820,000	0	0	1	25,100,000	1	97,920,000	100.00	65.96	2	264,390,000	200.00	170.57	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	78.00	50,000,000	82.78	66,805,000	78.00	60,000,000	78.00	49,610,000	82.78	24,190,000	82.78	18,105,000	66.3	6,735,000	66.3	0	66	49,030,000	85.00	98.83	149.08	66,805,000	191.13	133.61	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.50	50,000,000	82.78	66,805,000	78.50	60,000,000	78.50	49,610,000	75	24,190,000	85	18,105,000	96	6,735,000	100	0	100	49,030,000	127.39	98.83	182.78	66,805,000	232.84	133.61	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	28,185,000	2	20,000,000	2	28,610,000	2	24,190,000	2	3,995,000	2	0	2	0	2	28,185,000	100.00	98.51	2	28,185,000	100.00	140.93	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	2	38,620,000	2	40,000,000	2	21,000,000	0	0	2	14,110,000	2	6,735,000	2	0	2	20,845,000	100.00	99.26	4	38,620,000	200.00	128.73	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,523,330,688	100	6,777,569,618	85	3,629,330,688	85	4,349,898,085	100	789,505,416	100	1,070,809,543	100	834,076,593	100	941,566,725	100	3,635,958,277	117.65	83.59	200	6,777,569,618	235.29	192.36	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,227,530,688	1	3,939,912,704	1	2,227,530,688	1	2,185,994,155	1	474,959,494	1	616,945,551	1	392,357,115	1	531,207,841	1	2,015,470,001	100.00	92.20	2	3,939,912,704	200.00	176.87	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	2,227,530,688	15	3,939,912,704	14	2,227,530,688	14	2,185,994,155	14	474,959,494	14	616,945,551	14	392,357,115	12	531,207,841	12	2,015,470,001	85.71	92.20	27	3,939,912,704	192.86	176.87	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	95	87,148,000	95	90,000,000	95	41,628,180	100	0	100	27,348,000	100	12,600,000	100	0	100	39,948,000	105.26	95.96	195	87,148,000	205.26	116.20	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30,000,000	1	43,800,000	1	30,000,000	1	13,500,000	0	0	0	0	1	12,600,000	1	0	1	12,600,000	100.00	93.33	2	43,800,000	200.00	146.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	4	43,348,000	3	60,000,000	3	28,128,180	0	0	3	27,348,000	0	0	3	0	3	27,348,000	100.00	97.23	7	43,348,000	233.33	96.33	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	78	356,200,000	75	862,149,000	78	248,000,000	78	613,762,750	25	154,682,500	50	138,800,500	75	81,022,000	100	62,559,500	100	437,064,500	128.21	71.21	175	862,149,000	224.36	242.04	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	4	40,989,000	12	60,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	40,989,000	33.33	68.32	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,000,000	14	71,483,000	12	8,000,000	12	48,000,000	3	10,856,000	3	13,062,000	3	17,692,000	3	6,375,000	12	47,985,000	100.00	99.97	26	71,483,000	216.67	794.26	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	153	116,089,000	12	5,000,000	12	63,800,000	3	9,725,000	3	14,000,000	3	16,760,000	3	20,844,000	12	61,329,000	100.00	96.13	165	116,089,000	1,375.00	290.22	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	1	78,156,500	12	24,000,000	12	57,148,660	3	6,255,500	3	21,599,000	3	11,538,000	3	17,700,500	12	57,093,000	100.00	99.90	13	78,156,500	108.33	325.65	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	1	7,995,000	12	5,000,000	12	5,000,000	3	1,000,000	3	1,500,000	3	2,000,000	3	500,000	12	5,000,000	100.00	100.00	13	7,995,000	108.33	159.90	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	1	112,219,000	1	4,000,000	1	63,800,000	1	8,856,000	1	21,338,000	1	29,599,000	1	4,000,000	1	63,793,000	100.00	99.99	2	112,219,000	200.00	280.55	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	171,000,000	73	410,078,000	36	130,000,000	36	350,810,000	19	116,050,000	13	60,675,000	22	0	0	0	54	176,725,000	150.00	50.38	127	410,078,000	352.78	239.81	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13	7,200,000	0	25,139,500	13	12,000,000	13	25,204,090	3	1,940,000	3	6,626,500	3	3,433,000	4	13,140,000	13	25,139,500	100.00	99.74	13	25,139,500	100.00	349.16	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	120,000,000	75	266,202,000	78	241,500,000	78	290,600,000	70	35,600,000	176	97,120,000	194	44,810,000	464	53,972,000	75	231,502,000	96.15	79.66	150	266,202,000	192.31	221.84	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	1	71,260,000	2	40,000,000	2	38,000,000	0	0	0	0	1	36,560,000	0	0	1	36,560,000	50.00	96.21	2	71,260,000	100.00	178.15	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan		
													I		II		III		IV										
					5		6		k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp
1	2	3	4	4A		Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	90,120,000	3	121,000,000	3	117,000,000	0	0	16	51,860,000	0	0	41	38,260,000	57	90,120,000	1,900.00	77.03	57	90,120,000	1,900.00	450.60	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	50,000,000	0	96,572,000	10	70,500,000	10	127,100,000	3	35,600,000	2	45,260,000	0	0	5	15,712,000	10	96,572,000	100.00	75.98	10	96,572,000	100.00	193.14	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	0	8,250,000	2	10,000,000	2	8,500,000	0	0	0	0	2	8,250,000	0	0	2	8,250,000	100.00	97.06	2	8,250,000	100.00	82.50	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	553,600,000	80	810,540,968	100	542,300,000	100	557,500,000	25	103,884,440	50	92,487,492	75	62,981,914	100	62,853,784	100	322,207,630	100.00	57.80	180	810,540,968	180.00	146.41	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	4	26,999,000	12	5,000,000	12	15,000,000	3	2,460,000	3	6,600,000	3	2,940,000	3	3,000,000	12	15,000,000	100.00	100.00	16	26,999,000	133.33	539.98	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	2	45,544,388	12	36,000,000	12	34,500,000	3	2,069,832	3	6,546,236	3	8,287,306	3	6,741,316	12	23,644,690	100.00	68.54	14	45,544,388	116.67	126.51	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	512,600,000	74	737,997,580	12	501,300,000	12	508,000,000	3	99,354,608	3	79,341,256	3	51,754,608	3	53,112,468	12	283,562,940	100.00	55.82	86	737,997,580	716.67	143.97	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	78	191,000,000	75	811,616,946	78	280,000,000	78	660,413,000	90	20,378,982	90	98,108,000	90	240,305,564	100	230,973,600	100	589,766,146	128.21	89.30	175	811,616,946	224.36	424.93	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	49,000,000	14	237,617,800	5	80,000,000	5	137,439,000	6	11,921,000	6	39,838,000	6	38,148,000	7	16,490,000	7	106,397,000	140.00	77.41	21	237,617,800	420.00	484.93	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	60,000,000	2	520,619,146	4	80,000,000	4	448,900,000	2	6,477,982	2	42,370,000	2	192,857,564	2	206,683,600	2	448,389,146	50.00	99.89	4	520,619,146	100.00	867.70	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	5	53,380,000	1	50,000,000	1	74,074,000	1	1,980,000	1	15,900,000	1	9,300,000	1	7,800,000	1	34,980,000	100.00	47.22	6	53,380,000	600.00	444.83	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	80,805,000	3	659,519,700	100	80,805,000	100	433,967,000	25	69,775,000	50	77,731,500	75	179,765,000	100	50,185,000	100	377,456,500	100.00	86.98	103	659,519,700	103.00	816.19	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	80,805,000	0	659,519,700	55	80,805,000	55	433,967,000	6	69,775,000	12	77,731,500	18	179,765,000	24	50,185,000	24	377,456,500	43.64	86.98	24	659,519,700	43.64	816.19	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80,805,000	1	659,519,700	12	80,805,000	12	433,967,000	3	69,775,000	3	77,731,500	3	179,765,000	3	50,185,000	12	377,456,500	100.00	86.98	13	659,519,700	108.33	816.19	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25,000,000	50	124,157,000	100	25,000,000	100	129,844,000	25	28,300,000	50	18,232,000	75	28,330,000	100	3,625,000	100	78,487,000	100.00	60.45	150	124,157,000	150.00	496.63	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25,000,000	100	124,157,000	100	25,000,000	100	129,844,000	100	28,300,000	100	18,232,000	100	28,330,000	100	3,625,000	100	78,487,000	100.00	60.45	200	124,157,000	200.00	496.63	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	5	124,157,000	5	25,000,000	5	129,844,000	5	28,300,000	5	18,232,000	5	28,330,000	5	3,625,000	5	78,487,000	100.00	60.45	10	124,157,000	200.00	496.63	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	90,094,000	25	20,000,000	25	69,800,000	25	30,715,000	50	8,400,000	75	13,830,000	100	13,410,000	100	66,355,000	400.00	95.06	100	90,094,000	400.00	450.47	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	3	90,094,000	80	20,000,000	80	69,800,000	100	30,715,000	100	8,400,000	100	13,830,000	100	13,410,000	100	66,355,000	125.00	95.06	103	90,094,000	128.75	450.47	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	4	90,094,000	12	20,000,000	12	69,800,000	3	30,715,000	3	8,400,000	3	13,830,000	3	13,410,000	12	66,355,000	100.00	95.06	16	90,094,000	133.33	450.47	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0	81,720,000	100	60,000,000	100	87,750,000	25	41,965,000	50	15,620,000	75	16,160,000	100	7,975,000	100	81,720,000	100.00	93.13	100	81,720,000	100.00	136.20	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0	81,720,000	100	60,000,000	100	87,750,000	25	41,965,000	50	15,620,000	75	16,160,000	100	7,975,000	100	81,720,000	100.00	93.13	100	81,720,000	100.00	136.20	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	40,000,000	0	29,365,000	5	25,000,000	5	29,500,000	5	29,365,000	0	0	0	0	0	0	5	29,365,000	100.00	99.54	5	29,365,000	100.00	73.41	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Laporan	12	20,000,000	0	52,355,000	12	35,000,000	12	58,250,000	3	12,600,000	3	15,620,000	3	16,160,000	3	7,975,000	12	52,355,000	100.00	89.88	12	52,355,000	100.00	261.78	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Kecamatan	Perdesaan di Wilayah Kecamatan																										

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Suak Midai																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	0	119,843,107	20	100,000,000	20	131,093,300	25	15,360,000	50	57,788,000	75	38,695,000	100	8,000,000	100	119,843,000	500.00	91.42	100	119,843,107	500.00	95.87	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	119,843,107	100	100,000,000	100	131,093,300	25	15,360,000	50	57,788,000	75	38,695,000	100	8,000,000	100	119,843,000	100.00	91.42	200	119,843,107	200.00	95.87	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	119,843,107	1	100,000,000	1	131,093,300	1	15,360,000	1	57,788,000	1	38,695,000	1	8,000,000	3	119,843,000	300.00	91.42	4	119,843,107	400.00	95.87	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	7060	20,000,000	78.43	67,521,000	7060	40,000,000	7060	64,540,000	78.43	22,539,000	78.43	32,983,000	55.4	8,315,000	55.4	0	55	63,837,000	0.78	98.91	133.83	67,521,000	1.90	337.61	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	20,000,000	78.43	67,521,000	62.50	40,000,000	62.50	64,540,000	0	22,539,000	0	32,983,000	66.7	8,315,000	100	0	100	63,837,000	160.00	98.91	178.43	67,521,000	285.49	337.61	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	32,247,000	2	10,000,000	2	32,520,000	2	22,539,000	0	9,708,000	0	0	0	0	2	32,247,000	100.00	99.16	2	32,247,000	100.00	322.47	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	2	35,274,000	2	30,000,000	2	32,020,000	2	0	0	23,275,000	0	8,315,000	0	0	2	31,590,000	100.00	98.66	4	35,274,000	200.00	352.74	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,594,400,576	80	4,270,522,814	85	2,757,400,576	85	2,749,469,690	80	593,538,308	80	729,725,173	80	558,800,828	100	638,144,146	100	2,520,208,455	117.65	91.66	180	4,270,522,814	211.76	164.61	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,539,200,576	1	2,749,101,969	1	1,539,200,576	1	1,564,668,000	1	323,280,714	1	365,470,079	1	309,087,734	1	496,981,742	1	1,494,820,269	100.00	95.54	2	2,749,101,969	200.00	178.61	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	1,539,200,576	12	2,749,101,969	15	1,539,200,576	15	1,564,668,000	9	323,280,714	7	365,470,079	9	309,087,734	9	496,981,742	9	1,494,820,269	60.00	95.54	21	2,749,101,969	140.00	178.61	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	0	9,371,000	95	80,000,000	95	9,600,000	100	0	100	9,371,000	100	0	100	0	100	9,371,000	105.26	97.61	100	9,371,000	105.26	14.42	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	9,371,000	3	60,000,000	3	9,600,000	0	0	1	9,371,000	0	0	0	0	1	9,371,000	33.33	97.61	1	9,371,000	33.33	20.82	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	307,200,000	70	890,941,829	55	298,200,000	55	578,684,120	25	156,467,500	50	196,836,000	75	109,501,000	100	14,926,000	100	477,730,500	181.82	82.55	170	890,941,829	309.09	290.02	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2,000,000	6	140,196,000	12	60,000,000	12	91,454,120	3	23,677,000	3	25,627,000	3	40,420,000	3	1,712,000	12	91,436,000	100.00	99.98	18	140,196,000	150.00	7,009.80	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	12	13,081,000	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	13,081,000	100.00	163.51	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	12	34,763,000	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	34,763,000	100.00	96.56	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	12	45,668,529	12	24,000,000	12	51,000,000	3	8,788,500	3	19,606,000	3	12,524,000	3	4,750,000	12	45,668,500	100.00	89.55	24	45,668,529	200.00	190.29	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	0	12	5,000,000	12	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	12	64,085,300	1	5,000,000	1	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	64,085,300	1,200.00	160.21	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	185,000,000	21	593,148,000	35	185,000,000	35	427,230,000	23	124,002,000	37	151,603,000	30	56,557,000	22	8,464,000	112	340,626,000	320.00	79.73	133	593,148,000	380.00	320.62	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	0	40	7,200,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	50	130,000,000	0	103,350,000	50	285,000,000	50	108,580,000	62	30,000,000	76	43,100,000	76	30,250,000	76	0	76	103,350,000	152.00	95.18	76	103,350,000	152.00	79.50	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	0	3	52,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I		II						III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
					5	6	7	8	9	10	11	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	56,600,000	5	163,000,000	5	57,500,000	2	13,500,000	4	43,100,000	0	0	0	0	6	56,600,000	120.00	98.43	6	56,600,000	120.00	56.60	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	10,000,000	0	46,750,000	3	70,000,000	3	51,080,000	1	16,500,000	0	0	0	30,250,000	0	0	1	46,750,000	33.33	91.52	1	46,750,000	33.33	467.50	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	421,000,000	75	340,904,016	100	425,000,000	100	331,700,000	25	63,872,094	50	86,892,094	75	79,472,094	100	98,148,404	100	328,384,686	100.00	99.00	175	340,904,016	175.00	80.97	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	27,519,000	12	6,000,000	12	15,000,000	3	8,400,000	3	1,800,000	3	1,800,000	3	3,000,000	12	15,000,000	100.00	100.00	24	27,519,000	200.00	458.65	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26,000,000	12	14,880,607	12	30,000,000	12	17,400,000	3	3,371,070	3	4,091,070	3	5,171,070	3	2,247,380	12	14,880,590	100.00	85.52	24	14,880,607	200.00	57.23	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	389,000,000	12	298,504,409	12	389,000,000	12	299,300,000	3	52,101,024	3	81,001,024	3	72,501,024	3	92,901,024	12	298,504,096	100.00	99.73	24	298,504,409	200.00	76.74	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	132,000,000	60	176,854,000	65	130,000,000	65	156,237,570	19.35	19,918,000	35.48	28,056,000	100	30,490,000	100	28,088,000	100	106,552,000	153.85	68.20	160	176,854,000	246.15	133.98	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	30,000,000	4	118,924,000	4	60,000,000	4	80,600,000	3	13,918,000	3	20,216,000	3	21,290,000	3	23,148,000	3	78,572,000	75.00	97.48	7	118,924,000	175.00	396.41	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	27,980,000	5	20,000,000	5	28,000,000	3	6,000,000	2	7,840,000	3	9,200,000	3	4,940,000	8	27,980,000	160.00	99.93	8	27,980,000	160.00	139.90	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	33,737,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	10,000,000	100.00	50.00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	5	19,950,000	1	10,000,000	1	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	19,950,000	500.00	166.25	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	670,509,000	67	1,024,713,828	100	610,509,000	100	1,148,339,700	25	171,378,000	58.4	384,510,000	83.3	375,045,000	100	93,780,000	100	1,024,713,000	100.00	89.23	167	1,024,713,828	167.00	152.83	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	223,503,000	0	341,571,276	55	203,503,000	55	382,779,900	0	57,126,000	0	128,170,000	0	125,015,000	0	31,260,000	0	341,571,000	0.00	89.23	0	341,571,276	0.00	152.83	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	223,503,000	2	341,571,276	55	203,503,000	55	382,779,900	3	57,126,000	0	128,170,000	0	125,015,000	0	31,260,000	3	341,571,000	5.45	89.23	5	341,571,276	9.09	152.83	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	223,503,000	2	341,571,276	55	203,503,000	55	382,779,900	6	57,126,000	8	128,170,000	14	125,015,000	14	31,260,000	14	341,571,000	25.45	89.23	16	341,571,276	29.09	152.83	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	223,503,000	10	341,571,276	12	203,503,000	12	382,779,900	3	57,126,000	3	128,170,000	3	125,015,000	3	31,260,000	12	341,571,000	100.00	89.23	22	341,571,276	183.33	152.83	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	223,503,000	10	341,571,276	12	203,503,000	12	382,779,900	3	57,126,000	3	128,170,000	3	125,015,000	3	31,260,000	12	341,571,000	100.00	89.23	22	341,571,276	183.33	152.83	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	223,503,000	10	341,571,276	12	203,503,000	12	382,779,900	3	57,126,000	3	128,170,000	3	125,015,000	3	31,260,000	12	341,571,000	100.00	89.23	22	341,571,276	183.33	152.83	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	20,000,000	50	88,345,041	100	20,000,000	100	133,104,000	25	16,625,000	50	35,855,000	75	24,385,000	100	11,480,000	100	88,345,000	100.00	66.37	150	88,345,041	150.00	441.73	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	20,000,000	100	88,345,041	100	20,000,000	100	133,104,000	100	16,625,000	100	35,855,000	100	24,385,000	100	11,480,000	100	88,345,000	100.00	66.37	200	88,345,041	200.00	441.73	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	20,000,000	4	88,345,041	5	20,000,000	5	133,104,000	4	16,625,000	4	35,855,000	4	24,385,000	4	11,480,000	4	88,345,000	80.00	66.37	8	88,345,041	160.00	441.73	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	5	41,280,029	25	20,000,000	25	56,670,000	25	13,040,000	50	14,720,000	75	7,520,000	100	6,000,000	100	41,280,000	400.00	72.84	105	41,280,029	420.00	206.40	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	3	41,280,029	80	20,000,000	80	56,670,000	25	13,040,000	50	14,720,000	75	7,520,000	100	6,000,000	100	41,280,000	125.00	72.84	103	41,280,029	128.75	206.40	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	20,000,000	4	41,280,029	12	20,000,000	12	56,670,000	3	13,040,000	3	14,720,000	3	7,520,000	3	6,000,000	12	41,280,000	100.00	72.84	16	41,280,029	133.33	206.40	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
			dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																										
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	50,000,000	0	102,123,300	100	60,000,000	100	102,450,000	25	42,608,500	50	29,058,800	75	23,521,000	100	6,935,000	100	102,123,300	100.00	99.68	100	102,123,300	100.00	204.25	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	50,000,000	0	102,123,300	100	60,000,000	100	102,450,000	100	42,608,500	100	29,058,800	100	23,521,000	100	6,935,000	100	102,123,300	100.00	99.68	100	102,123,300	100.00	204.25	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	30,000,000	0	36,213,500	4	40,000,000	4	36,500,000	4	36,213,500	0	0	0	0	0	4	36,213,500	100.00	99.22	4	36,213,500	100.00	120.71		
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20,000,000	0	65,909,800	12	20,000,000	12	65,950,000	3	6,395,000	3	29,058,800	3	23,521,000	3	6,935,000	12	65,909,800	100.00	99.94	12	65,909,800	100.00	329.55	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Batubi																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	15	181,730,598	20	120,000,000	20	85,836,340	25	11,470,000	50	16,774,110	75	14,626,000	80	40,268,488	75	83,138,598	375.00	96.86	90	181,730,598	450.00	151.44	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	181,730,598	100	120,000,000	100	85,836,340	25	11,470,000	50	16,774,110	75	14,626,000	100	40,268,488	75	83,138,598	75.00	96.86	175	181,730,598	175.00	151.44	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	181,730,598	1	120,000,000	1	85,836,340	1	11,470,000	1	16,774,110	1	14,626,000	1	40,268,488	1	83,138,598	100.00	96.86	2	181,730,598	200.00	151.44	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	71.10	40,000,000	76.3	8,473,985	71.10	40,000,000	71.10	18,900,000	70.74	5,500,000	70.74	719,985	69.1	0	69.1	0	69	6,219,985	97.19	32.91	145.4	8,473,985	204.50	21.18	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74.50	40,000,000	76.3	8,473,985	74.50	40,000,000	74.50	18,900,000	90.9	5,500,000	95.45	719,985	95.45	0	95.45	0	95	6,219,985	128.12	32.91	171.75	8,473,985	230.54	21.18	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	0	2	20,000,000	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3.00	0.00	2	0	3.00	0.00		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	8,473,985	2	20,000,000	2	18,900,000	1	5,500,000	1	719,985	0	0	0	1	6,219,985	50.00	32.91	3	8,473,985	150.00	42.37		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,688,579,124	76.3	4,950,285,260	85	3,061,694,124	85	3,200,764,010	100	510,564,584	100	788,509,646	100	452,461,553	100	780,081,942	100	2,531,617,725	117.65	79.09	176.3	4,950,285,260	207.41	184.12	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	95	1,760,155,852	1	3,622,349,633	95	1,760,155,852	95	2,014,097,570	1	402,079,256	15	509,382,460	50	277,564,364	95	531,411,895	95	1,720,437,975	100.00	85.42	96	3,622,349,633	101.05	205.80	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	1,760,155,852	13	3,622,349,633	13	1,760,155,852	13	2,014,097,570	13	402,079,256	13	509,382,460	13	277,564,364	13	531,411,895	13	1,720,437,975	100.00	85.42	26	3,622,349,633	200.00	205.80	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	95	0	95	60,000,000	95	13,000,000	100	0	100	0	100	0	0	0	100	0	105.26	0.00	195	0	205.26	0.00	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000	0	0	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000	0	0	3	45,000,000	3	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	294,923,272	75	393,874,116	75	322,038,272	75	336,111,000	25	40,446,250	50	72,310,000	75	56,020,000	0	104,100,050	75	272,876,300	100.00	81.19	150	393,874,116	200.00	133.55	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	93,685,000	12	27,400,000	12	80,000,000	12	10,000,000	3	800,000	3	400,000	3	900,000	3	7,900,000	12	10,000,000	100.00	100.00	24	27,400,000	200.00	29.25	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	42,607,250	12	12,000,000	12	36,786,000	3	5,569,250	3	9,207,000	3	10,642,000	1	11,244,000	10	36,662,250	83.33	99.66	22	42,607,250	183.33	710.12	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	12	11,980,000	12	10,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	11,980,000	100.00	119.80		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	12	40,390,850	12	36,000,000	12	56,500,000	3	4,132,000	3	5,025,000	3	15,193,000	9	7,085,550	9	31,435,550	75.00	55.64	21	40,390,850	175.00	112.20	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	12	7,950,000	12	5,000,000	12	6,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	2,500,000	3	1,500,000	12	6,000,000	100.00	100.00	24	7,950,000	200.00	159.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	1	66,183,700	1	5,000,000	1	64,175,000	1	7,226,000	1	15,743,000	1	9,117,000	0	8,156,000	1	40,242,000	100.00	62.71	2	66,183,700	200.00	1,323.67	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	132,038,272	483	197,362,316	30	162,038,272	30	162,650,000	5	21,719,000	10	40,935,000	0	17,668,000	35	68,214,500	15	148,536,500	50.00	91.32	498	197,362,316	1,660.00	149.47	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	0	40	12,000,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	180,000,000	30	53,400,006	75	509,000,000	75	112,400,000	0	0	0	53,400,000	50	0	75	0	75	53,400,000	100.00	47.51	105	53,400,006	140.00	29.67	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	80,000,000	0	0	2	280,000,000	2	35,000,000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	100.00	0.00	2	0	100.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	10,000,000		0	3	94,000,000	3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	53,400,006	5	95,000,000	5	77,400,000	0	0	6	53,400,000	0	0	0	0	6	53,400,000	120.00	68.99	6	53,400,006	120.00	106.80	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	266,500,000	80	673,179,432	100	266,500,000	100	352,340,440	25	58,783,522	50	94,543,121	75	83,372,189	80	111,027,545	80	347,726,377	80.00	98.69	160	673,179,432	160.00	252.60	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	17,992,000	12	6,000,000	12	14,000,000	3	1,500,000	3	3,100,000	3	3,600,000	3	5,800,000	12	14,000,000	100.00	100.00	24	17,992,000	200.00	299.87	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20,500,000	12	22,189,474	12	20,500,000	12	9,204,440	3	2,320,760	3	2,502,609	3	1,971,677	3	2,059,033	12	8,854,079	100.00	96.19	24	22,189,474	200.00	108.24	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	240,000,000	12	632,997,958	12	240,000,000	12	329,136,000	3	54,962,762	3	88,940,512	3	77,800,512	3	103,168,512	12	324,872,298	100.00	98.70	24	632,997,958	200.00	263.75	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	122,000,000	50	207,482,073	75	144,000,000	75	372,815,000	100	9,255,556	100	58,874,065	100	35,505,000	100	33,542,452	100	137,177,073	133.33	36.79	150	207,482,073	200.00	170.07	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	60,000,000	2	138,869,000	2	60,000,000	2	94,562,000	2	5,496,000	2	38,241,000	2	10,655,000	2	32,322,000	2	86,714,000	100.00	91.70	4	138,869,000	200.00	231.45	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	0	5	12,000,000	5	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	5	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	1	45,493,073	1	60,000,000	1	233,253,000	1	2,559,556	1	13,353,065	1	13,910,000	1	670,452	1	30,493,073	100.00	13.07	2	45,493,073	200.00	151.64	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	2	23,120,000	2	12,000,000	2	45,000,000	2	1,200,000	2	7,280,000	2	10,940,000	2	550,000	2	19,970,000	100.00	44.38	4	23,120,000	200.00	192.67	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	280,000,000	3.28	767,551,088	100	280,000,000	100	735,774,000	25	111,305,288	50	92,560,000	75	278,790,000	100	80,308,000	100	562,963,288	100.00	76.51	103.28	767,551,088	103.28	274.13	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	140,000,000	0	383,775,544	55	140,000,000	55	367,887,000	10	55,652,644	15	46,280,000	30	139,395,000	0	40,154,000	55	281,481,644	100.00	76.51	55	383,775,544	100.00	274.13	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	140,000,000	0	383,775,544	55	140,000,000	55	367,887,000	10	55,652,644	15	46,280,000	30	139,395,000	55	40,154,000	55	281,481,644	100.00	76.51	55	383,775,544	100.00	274.13	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	140,000,000	12	383,775,544	12	140,000,000	12	367,887,000	3	55,652,644	3	46,280,000	3	139,395,000	3	40,154,000	12	281,481,644	100.00	76.51	24	383,775,544	200.00	274.13	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	140,000,000	12	383,775,544	12	140,000,000	12	367,887,000	3	55,652,644	3	46,280,000	3	139,395,000	3	40,154,000	12	281,481,644	100.00	76.51	24	383,775,544	200.00	274.13	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	60,000,000	40	112,163,212	100	60,000,000	100	109,874,000	25	13,309,412	50	15,502,000	75	45,970,000	100	18,032,000	75	92,813,412	75.00	84.47	115	112,163,212	115.00	186.94	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	60,000,000	100	112,163,212	100	60,000,000	100	109,874,000	100	13,309,412	100	15,502,000	100	45,970,000	100	18,032,000	100	92,813,412	100.00	84.47	200	112,163,212	200.00	186.94	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	60,000,000	5	112,163,212	6	60,000,000	6	109,874,000	6	13,309,412	6	15,502,000	6	45,970,000	6	18,032,000	6	92,813,412	100.00	84.47	11	112,163,212	183.33	186.94	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	15,915,362	25	20,000,000	25	11,650,000	1	250,587	1	257,195	1	2,385,000	1	6,357,580	75	9,250,362	300.00	79.40	75	15,915,362	300.00	79.58	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	3	15,915,362	80	20,000,000	80	11,650,000	25	250,587	50	257,195	75	2,385,000	80	6,357,580	80	9,250,362	100.00	79.40	83	15,915,362	103.75	79.58	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	4	15,915,362	12	20,000,000	12	11,650,000	3	250,587	3	257,195	3	2,385,000	12	6,357,580	12	9,250,362	100.00	79.40	16	15,915,362	133.33	79.58	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	120,000,000	100	38,754,062	100	150,000,000	100	40,380,000	25	28,145,000	50	5,007,675	75	2,684,000	100	2,917,386	75	38,754,061	75.00	95.97	175	38,754,062	175.00	32.30	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	120,000,000	100	38,754,062	100	150,000,000	100	40,380,000	100	28,145,000	100	5,007,675	100	2,684,000	100	2,917,386	10	38,754,061	10.00	95.97	110	38,754,062	110.00	32.30	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	60,000,000	6	38,754,062	6	100,000,000	6	40,380,000	2	28,145,000	4	5,007,675	5	2,684,000	6	2,917,386	6	38,754,061	100.00	95.97	12	38,754,062	200.00	64.59	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	60,000,000	0	0	12	50,000,000	12	0	3	0	3	0		0		0	6	0	6.00	0.00	6	0	18.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga Barat																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan	Persen	20	30,000,000	15	116,987,697	20	60,000,000	20	96,158,187	25	7,440,262	50	7,150,223	75	1,433,482	50	14,778,730	75	30,802,697	375.00	32.03	90	116,987,697	450.00	389.96	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	30,000,000	100	116,987,697	100	60,000,000	100	96,158,187	100	7,440,262	100	7,150,223	100	1,433,482	100	14,778,730	100	30,802,697	100.00	32.03	200	116,987,697	200.00	389.96	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	30,000,000	1	116,987,697	1	60,000,000	1	96,158,187	1	7,440,262	1	7,150,223	1	1,433,482	1	14,778,730	4	30,802,697	400.00	32.03	5	116,987,697	500.00	389.96	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	70.10	30,000,000	79.94	74,184,950	70.10	90,000,000	70.10	103,418,382	85	21,474,300	85	10,433,050	85	11,827,200	85	21,595,400	85	65,329,950	121.26	63.17	164.94	74,184,950	235.29	247.28	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	79.94	74,184,950	65	90,000,000	65	103,418,382	94	21,474,300	94	10,433,050	94	11,827,200	94	21,595,400	94	65,329,950	144.62	63.17	173.94	74,184,950	267.60	247.28	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10,000,000	0	0	2	35,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	2	74,184,950	2	35,000,000	2	103,418,382	2	21,474,300	2	10,433,050	2	11,827,200	2	21,595,400	8	65,329,950	400.00	63.17	10	74,184,950	500.00	741.85	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,396,408,763	80	4,895,443,591	85	2,657,408,466	85	3,298,675,829	100	542,583,813	100	703,308,936	100	466,096,593	100	796,361,588	100	2,508,350,930	117.65	76.04	180	4,895,443,591	211.76	204.28	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,938,570,466	1	3,389,669,791	1	1,938,570,466	1	1,883,261,520	1	422,075,123	1	530,466,760	1	227,924,931	1	612,260,370	1	1,792,727,184	100.00	95.19	2	3,389,669,791	200.00	174.85	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1,938,570,466	13	3,389,669,791	12	1,938,570,466	12	1,883,261,520	12	422,075,123	12	530,466,760	12	227,924,931	12	612,260,370	12	1,792,727,184	100.00	95.19	25	3,389,669,791	208.33	174.85	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	30,000,000	90	19,720,000	95	35,000,000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	90	19,720,000	94.74	65.73		
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000	1	19,720,000	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	19,720,000	100.00	131.47		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	15,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75.40	116,838,297	60	546,395,533	75.40	268,200,000	75.40	268,725,695	25	37,583,100	50	39,250,500	75	46,081,700	25	67,758,229	75	190,673,529	99.47	70.95	135	546,395,533	179.05	467.65	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2,000,000	2	104,340,000	12	2,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	104,340,000	16.67	5,217.00		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	62,314,500	12	8,000,000	12	83,719,582	3	3,250,000	3	10,104,500	3	10,056,000	3	26,908,000	12	50,318,500	100.00	60.10	24	62,314,500	200.00	1,038.58	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	1200	39,720,000	12	20,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1200	39,720,000	10,000.00	794.40		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	16,000,000	40000	47,620,000	12	16,000,000	12	38,000,000	3	4,900,000	3	2,450,000	3	7,425,000	3	13,140,000	12	27,915,000	100.00	73.46	40012	47,620,000	333,433.33	297.63	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	0	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	20	61,314,400	1	40,000,000	1	33,036,113	1	6,090,000	1	8,098,400	1	6,503,000	1	9,010,000	4	29,701,400	400.00	89.91	24	61,314,400	2,400.00	1,226.29	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	70,638,297	20	231,086,633	30	170,000,000	30	113,970,000	20	23,343,100	20	18,597,600	20	22,097,700	20	18,700,229	20	82,738,629	66.67	72.60	40	231,086,633	133.33	327.14	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0	0	12	7,200,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan barang milik	Persen	65	110,000,000	0	123,284,750	65	211,000,000	65	671,662,541	25	1,784,750	50	23,000,000	75	98,500,000	75	0	75	123,284,750	115.38	18.36	75	123,284,750	115.38	112.08	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	perangkat daerah																										
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	1,784,750	3	41,000,000	3	30,232,441	3	1,784,750	0	0	0	0	0	3	1,784,750	100.00	5.90	3	1,784,750	100.00	8.92		
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	121,500,000	5	90,000,000	5	471,430,100	5	0	2	23,000,000	9	98,500,000	2	0	9	121,500,000	180.00	25.77	9	121,500,000	180.00	405.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	0	1	40,000,000	1	170,000,000	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	118,000,000	80	768,893,854	100	118,000,000	100	386,326,320	25	73,638,870	50	101,320,620	75	85,756,108	50	110,285,206	75	371,000,804	75.00	96.03	155	768,893,854	155.00	651.60	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	400	14,325,000	12	6,000,000	12	10,000,000	3	1,980,000	3	3,000,000	3	2,340,000	3	2,010,000	12	9,330,000	100.00	93.30	412	14,325,000	3,433.33	238.75	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,000,000	2	54,601,370	12	12,000,000	12	38,400,000	3	7,539,834	3	7,539,834	3	7,539,834	3	5,925,908	12	28,545,410	100.00	74.34	14	54,601,370	116.67	455.01	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100,000,000	12	699,967,484	12	100,000,000	12	337,926,320	3	64,119,036	3	90,780,786	3	75,876,274	3	102,349,298	12	333,125,394	100.00	98.58	24	699,967,484	200.00	699.97	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	83,000,000	65	47,479,663	70	86,638,000	70	88,699,753	58.33	7,501,970	100	9,271,056	100	7,833,854	100	6,057,783	100	30,664,663	142.86	34.57	165	47,479,663	235.71	57.20	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25,000,000	4	41,789,663	2	25,000,000	2	48,498,293	1	6,101,970	1	7,731,056	1	6,283,854	1	4,857,783	4	24,974,663	200.00	51.50	8	41,789,663	400.00	167.16	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	0	5	12,000,000	5	2,967,670	5	0	5	0	5	0	5	0	20	0	400.00	0.00	20	0	400.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	0	5,690,000	1	7,638,000	1	37,233,790	1	1,400,000	1	1,540,000	0	1,550,000	1	1,200,000	3	5,690,000	300.00	15.28	3	5,690,000	300.00	56.90	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8,000,000	2	0	1	12,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	2	0	200.00	0.00		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	10,000,000	0	174,851,244	100	85,024,000	100	293,461,805	25	13,139,784	50	79,795,244	75	37,763,028	50	44,153,188	75	174,851,244	75.00	59.58	75	174,851,244	75.00	1,748.51	
7.01.02.2.04.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	Koordinasi	4	10,000,000	0	174,851,244	4	85,024,000	4	293,461,805	4	13,139,784	4	79,795,244	4	37,763,028	4	44,153,188	4	174,851,244	100.00	59.58	4	174,851,244	100.00	1,748.51	
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	10,000,000	0	174,851,244	12	85,024,000	12	293,461,805	3	13,139,784	3	79,795,244	3	37,763,028	3	44,153,188	12	174,851,244	100.00	59.58	12	174,851,244	100.00	1,748.51	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	15,000,000	25	107,369,710	100	15,000,000	100	172,869,133	25	19,569,662	50	10,993,364	75	26,006,822	75	33,924,862	75	90,494,710	75.00	52.35	100	107,369,710	100.00	715.80	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	15,000,000	100	107,369,710	100	15,000,000	100	172,869,133	100	19,569,662	100	10,993,364	100	26,006,822	100	33,924,862	100	90,494,710	100.00	52.35	200	107,369,710	200.00	715.80	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	15,000,000	8	107,369,710	8	15,000,000	8	172,869,133	8	19,569,662	8	10,993,364	8	26,006,822	8	33,924,862	8	90,494,710	100.00	52.35	16	107,369,710	200.00	715.80	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	25	93,166,980	25	20,000,000	25	114,601,133	25	12,098,296	50	11,448,669	75	36,894,119	75	23,550,696	75	83,991,780	300.00	73.29	100	93,166,980	400.00	465.83	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	80	93,166,980	80	20,000,000	80	114,601,133	100	12,098,296	100	11,448,669	100	36,894,119	100	23,550,696	100	83,991,780	125.00	73.29	180	93,166,980	225.00	465.83	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	4	93,166,980	12	20,000,000	12	114,601,133	3	12,098,296	3	11,448,669	3	36,894,119	3	23,550,696	12	83,991,780	100.00	73.29	16	93,166,980	133.33	465.83	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	40,000,000	0	0	100	40,000,000	100	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	40,000,000	0	0	100	40,000,000	100	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	20,000,000	0	0	8	20,000,000	8	0	0	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20,000,000	0	0	12	20,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Panjang																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	46,450,000	0	20	46,450,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	46,450,000	0	100	46,450,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	46,450,000	0	1	46,450,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	69.70	30,000,000	0	69.70	30,000,000	69.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	0	65	30,000,000	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	2	10,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,146,550,000	0	85	2,264,350,000	85	1,888,221,075	100	59,707,060	100	579,276,028	100	182,725,529	100	554,481,358	100	1,376,189,975	117.65	72.88	100	1,376,189,975	117.65	64.11		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,379,350,000	0	1	1,379,350,000	1	1,291,001,075	1	40,530,060	1	393,363,191	1	131,078,229	1	522,472,358	1	1,087,443,838	100.00	84.23	1	1,087,443,838	100.00	78.84		
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,379,350,000	0	10	1,379,350,000	10	1,291,001,075	9	40,530,060	9	393,363,191	10	131,078,229	10	522,472,358	10	1,087,443,838	100.00	84.23	10	1,087,443,838	100.00	78.84		
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	0	95	45,000,000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	0	2	30,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	194,200,000	0	55	194,200,000	55	218,760,000	100	19,177,000	100	36,860,837	100	49,307,300	100	32,009,000	100	137,354,137	181.82	62.79	100	137,354,137	181.82	70.73		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	0	12	35,000,000	12	28,000,000	3	0	3	9,249,737	3	5,700,000	3	11,135,000	3	26,084,737	25.00	93.16	3	26,084,737	25.00	74.53		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	0	12	6,000,000	12	6,000,000	3	0	3	5,582,000	3	418,000	3	0	3	6,000,000	25.00	100.00	3	6,000,000	25.00	100.00		
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	0	12	10,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	0	12	24,000,000	12	21,920,000	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25.00	0.00	3	0	25.00	0.00		
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	12	4,000,000	12	2,000,000	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	25.00	0.00	3	0	25.00	0.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	103,000,000	0	18	103,000,000	18	160,840,000	4	19,177,000	4	22,029,100	4	43,189,300	16	20,874,000	16	105,269,400	88.89	65.45	16	105,269,400	88.89	102.20		
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	40	7,200,000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	200,000,000	0	55	349,800,000	55	360,260,000	0	0	0	146,400,000	50	0	75	0	75	146,400,000	136.36	40.64	75	146,400,000	136.36	73.20		
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	30,000,000	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
		atau Lapangan	atau Lapangan yang Disediakan																										
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	40,000,000	0	51,550,000	4	105,000,000	4	155,000,000	0	0	1	51,550,000	0	0	0	0	100	51,550,000	2,500.00	33.26	100	51,550,000	2,500.00	128.88	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	0	94,850,000	5	109,800,000	5	198,260,000	0	0	1	94,850,000	0	0	0	0	100	94,850,000	2,000.00	47.84	100	94,850,000	2,000.00	158.08	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	65,000,000	2	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	5,000.00	0.00	100	0	5,000.00	0.00	
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	234,000,000	0	4,992,000	100	234,000,000	100	18,200,000	25	0	50	2,652,000	75	2,340,000	75	0	75	4,992,000	75.00	27.43	75	4,992,000	75.00	2.13	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	0	4,992,000	12	6,000,000	12	5,000,000	3	0	3	2,652,000	3	2,340,000	3	0	9	4,992,000	75.00	99.84	9	4,992,000	75.00	83.20	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24,000,000	0	0	12	24,000,000	12	13,200,000	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	25.00	0.00	3	0	25.00	0.00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	204,000,000	0	0	12	204,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	94,000,000	0	0	70	62,000,000	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	10,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	94,024,000	0	0	100	94,024,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	94,024,000	0	0	55	94,024,000	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	94,024,000	0	0	12	94,024,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	30,000,000	0	42,520,000	100	30,000,000	100	45,500,000	25	0	50	7,960,000	75	13,940,000	100	20,620,000	100	42,520,000	100.00	93.45	100	42,520,000	100.00	141.73	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	30,000,000	0	42,520,000	100	30,000,000	100	45,500,000	100	0	100	7,960,000	100	13,940,000	100	20,620,000	100	42,520,000	100.00	93.45	100	42,520,000	100.00	141.73	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30,000,000	0	42,520,000	3	30,000,000	3	45,500,000	3	0	3	7,960,000	3	13,940,000	3	20,620,000	3	42,520,000	100.00	93.45	3	42,520,000	100.00	141.73	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	10,000,000	0	54,488,000	25	10,000,000	25	61,150,000	25	0	50	4,800,000	75	21,519,000	100	28,169,000	100	54,488,000	400.00	89.11	100	54,488,000	400.00	544.88	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	10,000,000	0	54,488,000	80	10,000,000	80	61,150,000	100	0	100	4,800,000	100	21,519,000	100	28,169,000	100	54,488,000	125.00	89.11	100	54,488,000	125.00	544.88	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	10,000,000	0	54,488,000	12	10,000,000	12	61,150,000	3	0	3	4,800,000	3	21,519,000	3	28,169,000	9	54,488,000	75.00	89.11	9	54,488,000	75.00	544.88	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	50,000,000	0	102,728,300	100	50,000,000	100	107,475,000	25	0	50	20,556,100	75	41,662,200	100	40,510,000	100	102,728,300	100.00	95.58	100	102,728,300	100.00	205.46	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	50,000,000	0	102,728,300	100	50,000,000	100	107,475,000	100	0	100	20,556,100	100	41,662,200	100	40,510,000	100	102,728,300	100.00	95.58	100	102,728,300	100.00	205.46	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	30,000,000	0	58,118,300	3	30,000,000	3	61,940,000	3	0	0	9,576,100	0	22,432,200	3	26,110,000	3	58,118,300	100.00	93.83	3	58,118,300	100.00	193.73	16
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	20,000,000	0	44,610,000	8	20,000,000	8	45,535,000	2	0	2	10,980,000	2	19,230,000	4	14,400,000	4	44,610,000	50.00	97.97	4	44,610,000	50.00	223.05	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Seluan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	105,000,000	0	20	105,000,000	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	100.00	0.00	20	0	100.00	0.00		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	105,000,000	0	100	105,000,000	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00			
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	105,000,000	0	1	105,000,000	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	69.70	30,000,000	0	1,900,002	69.70	30,000,000	69.70	6,650,000	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0.00	28.57	0	1,900,002	0.00	6.33	KECAMATAN PULAU SELUAN BARU DIRESMIKAN DESEMBER 2022 DAN BARU BERJALAN 1 TAHUN PADA TAHUN 2023 SEHINGGA TIDAK ADA NILAI LKJIP TAHUN 2022	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	30,000,000	0	1,900,002	62.50	30,000,000	62.50	6,650,000	75	0	75	1,900,000	75	0	100	0	100	1,900,000	160.00	28.57	100	1,900,002	160.00	6.33	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	2	1,900,002	2	10,000,000	2	6,650,000	2	0	0	1,900,000	0	0	2	0	4	1,900,000	200.00	28.57	6	1,900,002	300.00	19.00	-
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	0	2	20,000,000	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,017,231,503	0	1,729,265,267	85	2,239,231,503	85	1,883,764,330	100	440,798,586	100	428,902,281	100	322,342,792	100	537,221,608	100	1,729,265,267	117.65	91.80	100	1,729,265,267	117.65	85.72	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,231,031,503	0	1,205,941,067	1	1,231,031,503	1	1,267,203,500	1	220,916,886	1	355,307,781	1	227,493,592	1	402,222,808	1	1,205,941,067	100.00	95.17	1	1,205,941,067	100.00	97.96	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,231,031,503	0	1,205,941,067	10	1,231,031,503	10	1,267,203,500	10	220,916,886	10	355,307,781	10	227,493,592	10	402,222,808	10	1,205,941,067	100.00	95.17	10	1,205,941,067	100.00	97.96	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	0	95	45,000,000	95	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	1	15,000,000	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	0	2	30,000,000	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	191,200,000	0	279,361,200	55	306,400,000	55	311,760,830	25	59,736,700	50	50,394,500	75	71,849,200	100	97,380,800	100	279,361,200	181.82	89.61	100	279,361,200	181.82	146.11	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	0	9,775,000	12	60,000,000	12	9,775,530	3	9,775,000	3	0	3	0	3	0	12	9,775,000	100.00	99.99	12	9,775,000	100.00	19.55	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	0	12	8,000,000	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	0	12	10,000,000	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	0	9,971,500	12	24,000,000	12	35,090,000	3	5,321,000	3	4,650,500	3	0	3	0	12	9,971,500	100.00	28.42	12	9,971,500	100.00	41.55	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	1,000,000	12	4,000,000	12	1,000,000	3	500,000	3	500,000	3	0	3	0	12	1,000,000	100.00	100.00	12	1,000,000	100.00	25.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Paket	1	5,000,000	0	38,575,000	1	5,000,000	1	38,583,970	1	2,705,000	1	17,495,000	0	0	0	18,375,000	1	38,575,000	100.00	99.98	1	38,575,000	100.00	771.50	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					7				I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100														
			Disediakan																									16	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	83,000,000	0	220,039,700	20	183,000,000	20	227,311,330	3	41,435,700	2	27,749,000	4	71,849,200	6	79,005,800	20	220,039,700	100.00	96.80	20	220,039,700	100.00	265.11	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0		12	12,400,000	12	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	230,000,000	0	158,365,000	55	384,800,000	55	179,500,000	78	153,365,000	78	0	82	5,000,000	82	0	82	158,365,000	149.09	88.23	82	158,365,000	149.09	68.85	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0		1	40,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	40,000,000	0	72,365,000	4	117,000,000	4	93,500,000	4	72,365,000	0	0	0	0	0	4	72,365,000	100.00	77.40	4	72,365,000	100.00	180.91		
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80,000,000	0	81,000,000	5	132,800,000	5	81,000,000	5	81,000,000	0	0	0	0	0	5	81,000,000	100.00	100.00	5	81,000,000	100.00	101.25		
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	5,000,000	2	70,000,000	2	5,000,000	0	0	0	0	2	5,000,000	0	2	5,000,000	100.00	100.00	2	5,000,000	100.00	12.50		
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30,000,000	0		2	25,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	140,000,000	0	85,598,000	100	140,000,000	100	125,300,000	25	6,780,000	50	23,200,000	75	18,000,000	100	37,618,000	100	85,598,000	100.00	68.31	100	85,598,000	100.00	61.14	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	0	11,998,000	12	8,000,000	12	12,000,000	3	1,980,000	3	0	3	0	3	10,018,000	12	11,998,000	100.00	99.98	12	11,998,000	100.00	149.98	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24,000,000	0	1,600,000	12	24,000,000	12	1,700,000	3	0	3	1,600,000	3	0	3	0	12	1,600,000	100.00	94.12	12	1,600,000	100.00	6.67	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	108,000,000	0	72,000,000	12	108,000,000	12	111,600,000	3	4,800,000	3	21,600,000	3	18,000,000	3	27,600,000	12	72,000,000	100.00	64.52	12	72,000,000	100.00	66.67	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	180,000,000	0		65	132,000,000	65	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	36,000,000	0		2	40,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0		5	12,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0		1	20,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000	0		1	20,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0		1	40,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	203,524,000	0	66,141,000	100	116,524,000	100	93,917,020	25	9,425,000	50	3,051,000	75	44,315,000	100	9,350,000	100	66,141,000	100.00	70.42	100	66,141,000	100.00	32.50	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	203,524,000	0	66,141,000	55	116,524,000	55	93,917,020	25	9,425,000	50	3,051,000	75	44,315,000	100	9,350,000	100	66,141,000	181.82	70.42	100	66,141,000	181.82	32.50	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	203,524,000	0	66,141,000	12	116,524,000	12	93,917,020	3	9,425,000	3	3,051,000	3	44,315,000	3	9,350,000	12	66,141,000	100.00	70.42	12	66,141,000	100.00	32.50	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	30,000,000	0	45,390,000	100	30,000,000	100	45,450,000	100	9,700,000	100	20,185,000	100	15,505,000	100	0	100	45,390,000	100.00	99.87	100	45,390,000	100.00	151.30	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	30,000,000	0	45,390,000	100	30,000,000	100	45,450,000	100	9,700,000	100	20,185,000	100	15,505,000	100	0	100	45,390,000	100.00	99.87	100	45,390,000	100.00	151.30	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30,000,000	0	45,390,000	3	30,000,000	3	45,450,000	3	9,700,000	3	20,185,000	3	15,505,000	3	0	3	45,390,000	100.00	99.87	3	45,390,000	100.00	151.30	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	30,000,000	0	13,834,000	25	30,000,000	25	14,000,000	100	5,544,000	100	8,290,000	100	0	100	0	100	13,834,000	400.00	98.81	100	13,834,000	400.00	46.11	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	30,000,000	0	13,834,000	80	30,000,000	80	14,000,000	100	5,544,000	100	8,290,000	100	0	100	0	100	13,834,000	125.00	98.81	100	13,834,000	125.00	46.11	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Laporan	12	30,000,000	0	13,834,000	12	30,000,000	12	14,000,000	3	5,544,000	3	8,290,000	3	0	3	0	12	13,834,000	100.00	98.81	12	13,834,000	100.00	46.11	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																										
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0	100	60,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0	100	60,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	30,000,000	0	3	30,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	30,000,000	0	12	30,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			



Tabel.T-II.97
Laporan Realisasi Keuangan per Sasaran 2023

	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif	Persen	59	95,42	161,73	52.446.007.602,00	50.403.423.877,00	96,11
2.	Meningkatnya Ketahanan Budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	Persen	14,44	14,44	100	561.278.180,00	226.715.886,00	40,39
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76	82,45	108,49	5.550.602.809,00	5.314.912.216,00	95,75
		Indeks Pendidikan	Persen	18,32	18,40	100,44	238.559.979.246,64	186.663.726.524,84	78,25
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0.694	0,711	102,45	218.969.977.206,00	205.653.404.953,15	93,92
5.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,81	91,86	100,05	10.347.822.376,00	9.582.166.891,00	92,60
6.	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB	Persen	3,71	3,98	107,28	22.292.729.645,36	19.993.195.451,00	89,68
7.	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB	Persen	2	3,67	183,50	7.949.930.057,00	7.049.728.631,00	88,68
8.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Miliar Rupiah	315,00	452,155	143,54	6.630.922.912,00	6.109.359.442,00	92,13
9.	Meningkatnya Perekonomian di	LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	2,16	0,02	0,93	19.429.959.167,00	18.607.701.462,00	95,75



	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Sektor Perindustrian dan Perdagangan								
		LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persen	3,52	3,82	108,52	11.519.158.111,00	11.092.619.676,61	96,30
10.	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,99	4,05	64,55	21.453.461.496,00	20.413.735.630,00	95,15
11.	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Juta	15,401	15,409	100,05	4.790.605.517,00	4.458.451.026,00	93,07
12.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persen	40	40,85	102,13	5.178.444.887,00	4.952.169.554,00	95,63
13.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas	Persen	4,87	8,99	15,45	33.836.439.689,00	33.094.755.260,00	97,81
14.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	13,32	14,28	107,21	2.887.147.808,00	2.403.551.688,00	83,25
15.	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks	73,65	77,13	104,73	130.269.753.297,00	115.073.553.860,00	88,33
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	Persen	73,76	78,36	106,24	70.472.267.886,00	67.225.208.101,00	95,39
16.	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis	Persen	78,00	87,10	111,67	18.810.602.493,00	17.287.206.808,00	91,90



	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Kabupaten	Kabupaten							
17.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	68,93	70,94	102,92	9.525.722.108,00	9.178.429.338,00	96,35
		Indeks Kualitas Air	Persen	56,80	69,00	105,63	6.109.348.517,00	5.935.030.481,00	97,15
		Indeks Kualitas Udara	Persen	86,06	89,32	103,79	7.174.908.212,00	6.727.289.213,00	93,76
18.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,00	72,55	115,16	151.828.046.067,00	142.147.603.601,00	93,62
19.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan	Nilai	68	71,42	105,03	12.475.802.895,00	12.117.187.212,00	97,13



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan Kabupaten Natuna yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan prioritas pembangunan pada tahun RKPD yang direncanakan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan program dan kegiatan dalam RKPD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan serta evaluasi RKPD pada tahun sebelumnya, berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, maka permasalahan pembangunan dapat ditentukan.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu Strategis)

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah suatu permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Permasalahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Pembangunan kualitas sumber daya manusia di Natuna masih belum maksimal yang terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah provinsi Kepulauan Riau. IPM Natuna yang mencapai 78,23, berada pada urutan ketiga dari tujuh kabupaten/kota dan berada di bawah angka provinsi yang mencapai 79,08. Hal ini harus menjadi perhatian bagi



pemerintah daerah agar segera merumuskan berbagai program prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan strategis yang mendukung tercapainya daya saing masyarakat Natuna.

2. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya, oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang memberi andil dalam belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna antara lain :

- a. Angka kemiskinan Natuna jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kepulauan Riau termasuk yang rendah capaiannya.
- b. Rendahnya kompetensi angkatan kerja merupakan permasalahan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia siap kerja.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari masih rendahnya kapasitas masyarakat miskin dalam pergerakan roda ekonomi Kabupaten Natuna.

3. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pembangunannya masih belum optimal. Keterbatasan ASN yang berkualitas serta manajemen pemerintahan yang belum maksimal menjadikan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk menjadi lebih baik. Permasalahan belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi tersebut dapat terlihat dari



Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang memiliki status “cukup”. Meskipun begitu, opini BPK pada tahun 2023 mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dimana ini merupakan tahun ketujuh Kabupaten Natuna mendapatkan predikat tersebut. Dari sisi keuangan daerah, maka persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim pencapaiannya yang terlihat dari derajat otonomi fiskal daerah yang masih berada pada posisi 7,34 persen pada tahun 2023.

4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Natuna sebagian besar disebabkan adanya gejolak perekonomian internasional yang merambah pada perubahan harga barang pertambangan dan penggalian seperti minyak bumi, gas, maupun batubara. Sebagai wilayah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, Natuna terkena dampak dari menurunnya performa perekonomian global. Tentu saja pemerintah berupaya untuk menahan laju perlambatan tersebut, dan sebelum mencapai pertumbuhan negatif, perekonomian Natuna sudah mulai pulih seperti sedia kala.

Jika diperbandingkan dengan wilayah lain di Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi Natuna tergolong rendah dimana pada tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi berada di peringkat ke 7 di wilayah Kepulauan Riau. Dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Natuna berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.

5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Natuna mengingat masih



belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala pembangunan Natuna yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Natuna maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Natuna menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah baik transportasi udara maupun laut masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut :

Tabel.T-II.98
Keterkaitan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
1	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya saing dan berkarakter budaya melayu	Pendidikan	Persentase Warganegara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	55,45	Anak usia PAUD 5-6 tahun ada yang belum bersekolah dan ada yang sudah berada di jenjang SD
			Persentase Warganegara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	55,45	Terdapat anak usia PAUD berada pada RA yang belum masuk pendataan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
			Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	61,38	Hasil penilaian dari Badan Akreditasi Nasional terhadap SMP/ MTs di Kabupaten Natuna, belum memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan untuk mendapatkan akreditasi B, sehingga sebagian besar SMP/ MTs masih terakreditasi C



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
		Kesehatan	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	72,84	Pelayanan usia produktif dan usia lanjut tidak terintegrasi sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan
			Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	73,43	
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	73,33	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48,24	Belum adanya pojok hipertensi di setiap kecamatan sehingga masih rendahnya kepatuhan berobat pada penderita hipertensi
			Persentase orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	64,13	Kurangnya edukasi oleh petugas kesehatan kepada keluarga penderita dan kontak erat penderita tuberculosis
			Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64,13	Logistik sarana pendukung berupa mikroskop pemeriksaan sampel penderita tuberkolosis masih kurang
					Ketersediaan obat untuk tuberkulosis pada anak masih kurang
					Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat dalam upaya screening tuberculosis
					Kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya pemberian terapi pencegahan tuberkulosis kepada kelompok berisiko (balita)
			Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	71,86	Waktu pelayanan di pos pembinaan terpadu (Posbindu) masih terbatas
					Ketersediaan bahan habis pakai (BHP) masih terbatas



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih	11	Sumber daya manusia perempuan (kader perempuan) di desa/kelurahan masih kurang dari sisi jumlah dan kualitas Sumber daya perempuan yang ada di Desa/kelurahan masih enggan untuk ikut aktif dalam pembangunan di segala bidang di masyarakat
			Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG	70	Komitmen perangkat daerah yang masih kurang dalam ikut serta dalam pelatihan PUG
			Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	85,72	Belum melakukan rapat koordinasi dengan awak media untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak
	Pengendalian Penduduk dan KB		Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	8,73	Kurangnya SDM/Petugas medis dan tenaga lini lapangan di wilayah kepulauan. Jauhnya akses fasilitas kesehatan yang melayani KB, Terbatasnya Alkon di fasilitas kesehatan Kurangnya tenaga bidan yang terlatih dalam pemasangan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	0	kurangnya kolaborasi petugas lini lapangan (PLKB,PKB dan kader PPKBD) dengan petugas medis bidan desa untuk berkoodinasi terkait ibu pascasalin yang menggunakan alkon di wilayah setempat sehingga terjaring data KBPP nya
			Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,66	kurangnya edukasi dan konseling oleh Petugas bidan desa dan Petugas lini lapangan kepada ibu pasca salin di saat kunjungan nifas sekaligus membawa alkon yang di maksud. kecuali alkon MKJP di arahkan ke faskes terdekat Perlunya peningkatan peran dari Forum Generasi Berencana untuk pembinaan PIK-R



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
		Pemuda dan Olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	25,89	Program Wira usaha muda pemula belum tersosialisasi dengan baik Kurangnya modal usaha bagi wirausaha muda dalam merintis usahanya Kurangnya keterampilan dan keahlian wirausaha muda dalam melakukan inovasi produk Kurangnya informasi terhadap jangkauan pemasaran dengan kata lain pemasaran yang terbatas
		Kebudayaan	Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota	0	Belum terpenuhinya SDM cagar budaya dan pemuseuman
			Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	0	Belum terbentuknya Tim Ahli cagar budaya dan Tim Pendaftaran cagar budaya
			Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	0	
		Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Belum ada penetapan zonasi survei oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Belum ada penyusunan roadmap Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
					Dinas Perpustakaan tidak memiliki tenaga / sumber daya manusia yang profesional dan terampil untuk mencapai hal tersebut
					Belum maksimalnya memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan survei TGM bagi wilayah Kepulauan Natuna yang terdiri dari laut dan pulau-pulau.
		Kearsipan	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	68,44	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan yang berkompeten di OPD
					Kurangnya Sarana dan prasarana pendukung untuk pengolahan arsip



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
2	Kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata	Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	20	Banyaknya sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di beberapa pulau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dapat tertangani secara maksimal
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	50	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter	0	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	20	
			Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	0	Belum tersedianya shelter atau rumah singgah untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS
					Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam respon kasus penanganan bencana untuk urusan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana
		Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI yang memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan sehingga belum dapat dilaksanakan pelatihan calon tenaga kerja CPMI dan CTKI



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
			Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI sehingga belum ada pendaftar yang dapat dilatih
			Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	0	Belum terbentuknya BKK disekolah kejuruan
			Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	0	Kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan lembaga penempatan tenaga kerja karena minimnya pasar kerja di kabupaten natuna
			Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Kebutuhan tenaga kerja yang ada di SISNAKER tidak sesuai dengan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi di kabupaten natuna
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	71,64	Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah kabupaten natuna
		Pangan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	88,97	Belum optimalnya produksi pangan lokal
			Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	0	Pengelolaan lumbung pangan yang belum optimal
			Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan Tertanganinya Kerawanan Pangan	40 59,88	Penanganan Kerawanan Pangan masih terfokus pada daerah bencana



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	57,09	Minimnya modal usaha UMKM menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan jumlah pemasukan.
			Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	42,69	
			Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	19,53	Kurangnya pengetahuan mengenai pengembangan usaha sehingga dapat mengakibatkan tidak adanya inovasi produk.
			Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	39,93	Rendahnya pemahaman dan kompetensi para pengurus koperasi terutama di bidang akuntansi
			Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	79,2	Minimnya pengawasan pengurus atau pengecekan terhadap kondisi dan aktivitas koperasi.
		Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	0	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM secara priodik
			PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	Usaha di Kabupaten Natuna masih skala mikro, sehingga kontribusi terhadap nilai investasi masih kecil
			Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	0	Masih belum optimalnya pembangunan antar sektor yang terintegrasi guna mendukung iklim investasi.
		Pariwisata	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi	0	Kendala transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna(biaya transportasi yang tinggi)
			Tingkat Hunian Akomodasi	83,3	Status kepemilikan lahan objek wisata masih milik masyarakat sehingga pengelolaan belum optimal
					Masih lemahnya SDM pengelolaan objek wisata
					Masih kurangnya sarana prasarana dan infrastruktur pendukung di objek wisata(amenitas)



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
		Pertanian	Produksi Sektor Pertanian	5,56	Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas
					Masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian
					Masih tingginya biaya operasional pertanian
		Perdagangan	Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital	66,66	Belum bisa memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar akibat keterbatasan SDA maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki.
		Perindustrian	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	57,98	Masih belum validnya data perusahaan industri kecil terutama industri rumah tangga
					Masih rendahnya jumlah IKM yang bisa mengisi data perusahaan ke dalam aplikasi SIINAS
					Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur dalam melakukan pendampingan pengisian SIINAS
					Belum adanya perda RPIK
3	Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional	Ketenteraman dan Keterbitan Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	88,88	Masih kurangnya sumber daya aparatur pemadam kebakaran yang berkualitas
			Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	0	Belum dibentuknya relawan pemadam kebakaran



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
			Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	15,15	Belum tersedianya pos damkar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dikecamatan dan kelurahan / desa
			Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana / Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Kelurahan / Desa	0	
			Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	0	Jumlah sarana prasarana masih terbatas (bangunan gedung kantor dan alat penunjang lainnya serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana)
			Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS	40	Masih kurangnya sumber daya aparatur satpol PP yang berkualitas
4	Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	11	Masih adanya kawasan perumahan yang belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).
			Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang	2,95	Masih terdapat kekurangan dan kerusakan gedung pemerintah
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20	Sarana dan prasarana PSU perumahan masih ada yang rusak dan belum memadai.
			Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	20	
		Pertanahan	Dokumen Izin Membuka Tanah	0	Masih adanya tanah masyarakat dan pemerintah daerah yang belum bersertifikat
			Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten	0	
			SK Bupati / Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum / Absentee	0	
			SK Izin Lokasi yang Diterbitkan Oleh Bupati / Wali Kota	0	



No	Isu Strategis	Urusan	Indikator	Capaian	Permasalahan pembangunan
		Lingkungan Hidup	Peningkatan Baku Mutu Air	60	waktu pengiriman pengujian sampel air mengalami keterlambatan
		Perhubungan	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota	24,27	Belum memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang uji KIR serta tidak memiliki peralatan yang memadai
6	Implementasi Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	92	Pemanfaatan Data yang diolah oleh Disdukcapil belum dianggap terlalu penting bagi Sebagian OPD
			Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	98	Jaringan Internet di kecamatan belum memadai, kurangnya sosialisasi di perangkat desa terkait pentingnya dokumen kependudukan
		Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	95,2	Tingkat pemahaman Perangkat Daerah dalam interpretasi data dan konsistensi data LPPD masih rendah sehingga sering terjadi kesalahan pemenuhan data
		Kuangan	Rasio PAD	51	Rasio PAD sebesar 7,87 persen menunjukan masih kecilnya perbandingan PAD terhadap total pendapatan dalam APBD
		Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)	96,24	masih rendahnya rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar

Untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan konsistensi kinerja Perangkat Daerah, beberapa permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- Masih adanya jalan yang tingkat kerusakannya cukup berat, terutama status jalan kabupaten dan non status
- Akses air minum dan sanitasi layak masih rendah
- Kepemanfaatan IPLT masih sangat minim oleh warga



- d. Di perkotaan dan sebagian wilayah pesisir masih terdapat genangan air (banjir) yang cukup lama disebabkan aliran air yang dibuang ke laut atau sungai belum memadai

2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Masih terdapat rumah ibadah yang rusak berat dan belum maksimal pembangunannya
- b. Belum maksimalnya pengurangan RTLH dikarenakan keterbatasan kerjasama dengan pihak lain

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Masih kurangnya sumber daya aparatur tanggap bencana daerah yang berkualitas
- b. Jumlah sarana prasarana pendukung kinerja satpol PP masih terbatas.

4. Bidang Sosial

- a. Masih kurangnya SDM yang tersedia dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. masih terdapat kelemahan aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengisian Kusioner IDM sehingga perlu dilakukan bimbingan tenaga pendamping desa (PLD, PD kecamatan dan TAPM di Kabupaten).
- b. Tidak adanya komitmen Desa terkait Pelaksanaan Anggaran merealisasikan Rekomendasi dari hasil Pendataan IDM Tahun sebelumnya



6. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Keterbatasan Akses: keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet menghambat pelayanan umum yang optimal dalam bidang komunikasi dan informatika Penyediaan informasi masih terbatas
- b. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur seperti Infrastruktur teknologi informasi yang kurang memadai atau tidak terawat dapat menghambat pelayanan yang optimal. Ini mencakup jaringan internet yang lambat, perangkat keras yang usang, dan perangkat lunak yang tidak terbaru

7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal
- b. Kurangnya kejuaraan atau event yang dilaksanakan pada tingkat pelajar
- c. Terbatasnya sumber daya manusia dibidang olahraga terutama pelatih/wasit/ juri sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi atlet yang ada di Kecamatan
- d. Kurangnya pengiriman atlet dalam mengikuti kejuaraan ditingkat Provinsi maupun tingkat nasional.

8. Bidang Statistik

- a. belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral serta pencatatan data statistik daerah yang terintegrasi
- b. dukungan ketersediaan SDM statistisi yang belum tersedia
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung statistic sektoral.

9. Bidang Persandian

- a. belum optimalnya sarana dan prasarana persandian



- b. belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, keamanan informasi dan keterbatasan infrastruktur dan SDM pemerintah yang dapat memanfaatkan persandian.

10. Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai (armada tangkap, API, ABPI)
- b. Kemampuan SDM perikanan tangkap masih rendah dalam pemanfaatan alat bantu dan alat tangkap modern
- c. Kemampuan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan belum optimal.

11. Bidang Perdagangan

- a. Belum bisa memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar akibat keterbatasan SDA maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

12. Bidang Transmigrasi

- a. Kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas, serta permasalahan sertifikasi lahan transmigrasi.

13. Perencanaan

- a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan
- b. Masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan.



14. Pengelolaan Perbatasan

- a. belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan.

15. Inspektorat

- a. Belum optimalnya kualitas SDM dalam penerapan SPIP di perangkat daerah
- b. Belum optimalnya penerapan regulasi terkait SPIP
- c. Masih rendahnya kompetensi kapabilitas APIP
- d. Cakupan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang belum optimal.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Bab ini memuat penjelasan tentang ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi Global dan nasional, perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, dan perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Natuna. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.



3.1.1 Kondisi Perekonomian Global, Nasional,

Pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat di tengah perlambatan ekonomi global, berbagai tantangan ekonomi global mulai dari peningkatan tensi geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim sehingga perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2023. Adapun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 secara keseluruhan melambat dari tahun sebelumnya, Seperti terlihat pada Gambar G-III.1 dibawah ini:

Gambar. G-III.1
Pertumbuhan Ekonomi Global 2022-2024



Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada tahun 2023 namun menguat terbatas pada tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola pertumbuhan negara maju, ditengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami akselerasi pada tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 seiring membaiknya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Faktor-faktor pendorong dan penahan pertumbuhan ekonomi global 2023 dan 2024 sebagai berikut. Faktor Pendorong meliputi: Mobilitas yang membaik; Penghapusan zero covid policy di Tiongkok; Meningkatnya aktivitas berwisata. Faktor Penahan meliputi: Kebijakan moneter ketat di negara maju; Permintaan global melemah terutama pada penjualan eceran; dan Harga komoditas menurun.



Adapun pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tercatat 5,05%, melambat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,31% (yoy). Seperti terlihat pada Gambar G-III.2 dibawah ini:

Gambar G-III.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2017-2023



Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen. aktivitas produksi yang masih kuat, pulihnya sektor pariwisata, dan peningkatan realisasi investasi, seperti terlihat pada Gambar dibawah ini:

Gambar G-III.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran (% ,yoy)
Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik RI



Seluruh komponen pengeluaran tubuh positif kecuali Impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65%, Komponen LNPRt tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pemilu baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu seperti sosialisasi Rakernas, Rakerda, Rapimnas dan Konsolidasi Nasional, Konsumsi Rumah Tangga dan PMTP masih merupakan penyumbang utama PDB pada tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51%.

Sedangkan Pertumbuhan ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha pada tahun 2023 tumbuh positif seperti pada tabel berikut :

Gambar G-III.4
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha (% yoy) Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Pada tahun 2023 Seluruh lapangan usaha tumbuh positif, dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan dan konstruksi, Adapun Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum dan Jasa Lainnya hal ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, penyelenggaraan even internasional seperti piala dunia U-17, pertemuan KTT Asean Motor GP Mandalika dan Persiapan Pemilihan Umum.

Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global tetap tumbuh tinggi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju yang cukup kuat pada paruh kedua tahun



2023 dan juga di beberapa negara emerging markets seperti Tiongkok, India dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India didorong oleh faktor belanja pemerintah dan permintaan domestik yang lebih tinggi di tahun 2024. Selain itu, kebijakan suku bunga bank sentral di berbagai negara diperkirakan cenderung lebih dovish sejalan dengan tren disinflasi yang terus berlanjut di berbagai negara akibat penurunan harga energi. Penurunan suku bunga bank sentral diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua tahun 2024 atau lebih cepat jika penurunan inflasi lebih cepat dan stabil. Suku bunga yang rendah diperkirakan akan mendorong permintaan domestik yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) masih tetap kuat sebesar 4,7% (yoy).

Tekanan inflasi diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan kebijakan suku bunga yang masih tinggi dan juga faktor harga energi yang lebih rendah. Dampak kenaikan lebih lanjut kebijakan moneter di negara maju dan berkembang telah mengakibatkan penurunan tekanan inflasi. Selain itu, harga minyak mentah dunia secara rata-rata lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sejalan dengan kebijakan peningkatan produksi minyak mentah Amerika Serikat (AS) seiring dengan kemungkinan ancaman keamanan terhadap AS yang mengurangi permintaan minyak AS dari negara lainnya. Berdasarkan rilis IMF, inflasi global tahun 2023 diestimasikan sebesar 6,9% (yoy) dan turun menjadi 5,8% pada tahun 2024. Sementara itu, inflasi negara ASEAN-5 diestimasikan sebesar 3,6% (yoy) pada tahun 2023 dan turun menjadi 2,5% pada tahun 2024.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 4,7% s/d 5,5%. Prospek ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspor sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia serta tetap baiknya permintaan domestik didukung oleh positifnya keyakinan pelaku ekonomi. Konsumsi Rumah



Tangga dan investasi khususnya non bangunan perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Selain itu, pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan, khususnya melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, serta bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik.

Sepanjang tahun 2023 secara spasial ekonomi di beberapa wilayah masih tumbuh kuat diatas Angka nasional yaitu Wilayah Kalimantan (5,43%), Sulawesi (6,37%) dan Maluku dan Papua (6,94%) seperti pada tabel berikut ini:

Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara spasial menunjukan tren positif di semua provinsi, seperti pada tabel berikut ini:

Gambar G-III.5
Pertumbuhan Ekonomi Spasial Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih terus tumbuh , dan tiga kelompok provinsi yang mempunyai pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan



Papua, Sulawesi dan Kalimantan Namun demikian struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2024 Bank Indonesia, Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2023 tumbuh positif sebesar 4,45% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,88% (yoy). Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara kumulatif sebesar 5,20% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,69% (ctc), maupun nasional sebesar 5,05% (ctc).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2023 ditopang oleh peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Pemerintah ditengah normalisasi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan ditengah normalisasi kinerja Pertambangan & Penggalian, Perdagangan dan Konstruksi. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan LU Industri Pengolahan. Sementara, pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh Pertambangan & Penggalian, Perdagangan dan Konstruksi yang melambat. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan mengalami perbaikan sejalan dengan permintaan global terhadap produk elektronik yang tercermin dari peningkatan output forecast dari Singapura untuk industri manufaktur. Sementara, LU Konstruksi melambat sejalan dengan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang telah memasuki tahap penyelesaian di akhir tahun Pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran yang melambat terkonfirmasi dari Survei Penjualan Eceran yang turut melambat. LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh melambat tertahan oleh sisi harga minyak yang mengalami penurunan sehingga akan mendorong penurunan produksi jumlah produksi minyak bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).



Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2023 tercatat sebesar 95,99%, sementara realisasi belanja mencapai 90,92% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut tidak setinggi periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar 100,07%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), serta pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya untuk Lain-Lain PAD yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja juga mengalami penurunan dari sebesar 93,27% menjadi sebesar 90,92% yang terjadi pada belanja operasi khususnya pada komponen belanja hibah dan belanja barang dan jasa, serta belanja modal dan belanja transfer.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada tahun 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,76% (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Transportasi, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga beras, cabai merah, bawang putih, dan aneka jenis rokok. Selain itu, penurunan harga kelompok transportasi sejalan dengan peningkatan tarif angkutan udara seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru dan liburan akhir tahun.

Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2023 tetap terjaga, meskipun melambat. Perlambatan tersebut tercermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%). Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan IV 2023 mengalami penurunan menjadi 60,48%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 61,46%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat sebesar 3,88%.



Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepri mengalami peningkatan pada triwulan IV 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2023 mencatatkan net outflow sebesar Rp3,12 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 yang inflow tercatat sebesar Rp1,12 triliun. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2024 juga diperkirakan menguat. Pertumbuhan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari peningkatan penjualan ekspor yang ditunjukkan oleh Likert Scale (LS) Prakiraan Penjualan Ekspor sejalan meningkatnya permintaan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga didorong oleh peningkatan jumlah investasi yang sebelumnya cukup tinggi. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan masyarakat dan juga tahun pemilihan umum. Selain itu, kebijakan moneter yang melonggar diperkirakan akan turut mendorong pemulihan permintaan domestik.

Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,96% - 5,76% (yoy). Kinerja perekonomian pada tahun ini diperkirakan bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan pada lapangan usaha industri



pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan iklim investasi pasca pandemi. Sementara itu, pertumbuhan pada lapangan usaha konstruksi sejalan dengan masifnya pembangunan di Provinsi Kepri, terutama pembangunan jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), pelaksanaan sport events dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan multiplier effect pada sektor lainnya.

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, menurut perkiraan Bank Indonesia inflasi Provinsi Kepri tahun 2024 diperkirakan berada di dalam sasaran inflasi $2,5 \pm \%$ (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas secara global maupun harga energi yang turut berdampak pada penurunan harga komoditas pangan maupun harga energi seperti bensin dan produk turunannya. Terkendalinya inflasi juga didukung oleh langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang rentan terhadap tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan menahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam koordinasi TPID.

Inflasi diperkirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga mampu meredam laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:



1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
2. Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas masyarakat.
3. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 dapat mendorong daya beli masyarakat.
4. Peningkatan cukai rokok sebesar 10%.
5. Dampak lanjutan peningkatan tarif parkir di Kota Batam terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. T-III.1
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Makro	Satuan	2022	2023	Target 2024	Target 2025
1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,46	77,11	77,04	77,39
2. Angka Kemiskinan	%	6,03	5,69	5,69	5,63
3. Angka Pengangguran	%	8,23	6,80	7,54	7,21
4. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,20	5,0 – 5,9	5,1 – 6,1
5. PDRB Perkapita	Juta rupiah	87,24	154,18	143,34	144,17
6. Indeks Gini	Indeks	0,325	0,340	0,323	0,321
7. Inflasi	%	4,85	2,76	2,5±	2,5±

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kabupaten Natuna

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau dan perekonomian Indonesia salah satunya telah membaiknya mobilitas penduduk dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemic covid-19. Laju pertumbuhan PDRB



Kabupaten Natuna tanpa migas tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen, dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,80 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2022 masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,20 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Natuna tahun 2023, Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi terutama didorong oleh Pengadaan listrik dan gas sebesar 6,16 persen meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 3,17 persen, diikuti Konstruksi sebesar 5,46 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,21 persen; dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen.

Adapun laju perlambatan tertinggi terdapat pada 3 (tiga) kategori lapangan usaha diantaranya Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,22 persen; diikuti industri pengolahan sebesar 0,02; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,08 persen, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. T-III.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas)

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,24	(2,38)	1,63	3,28	3,98
B	Pertambangan dan Penggalian	0,36	(2,10)	3,95	(0,96)	(0,22)
C	Industri Pengolahan	1,05	1,68	1,14	1,20	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(0,16)	1,49	0,39	3,17	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(3,57)	3,75	8,43	3,32	3,43
F	Konstruksi	7,87	(5,06)	(4,02)	0,51	5,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	(4,75)	1,83	4,71	3,82
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	(22,09)	1,12	11,74	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	(5,05)	4,31	3,75	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	6,51	8,34	7,42	4,23	0,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	3,31	0,48	1,67	2,82
L	Real Estate	6,32	3,50	4,50	3,52	3,22
M,N	Jasa Perusahaan	3,33	(8,13)	1,19	8,23	1,99



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,27	2,49	(1,58)	2,45	0,73
P	Jasa Pendidikan	4,52	(0,36)	4,46	3,11	0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	(0,95)	6,01	3,61	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,84	(0,40)	0,31	3,60	4,91
PDRB Dengan Migas		1,75	(4,29)	0,02	0,11	0,96
PDRB Tanpa Migas		5,95	(2,93)	0,12	2,80	3,81

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024

b. Laju Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,14, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.



Tabel.T-III.3
Nilai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Year on Year (YoY) Tahun 2023

Bulan	IHK	Inflasi YoY
(1)	(2)	(4)
Januari	102,03	4,45
Februari	102,23	4,69
Maret	102,24	4,28
April	102,48	3,63
Mei	102,22	2,30
Juni	102,49	1,78
Juli	102,82	1,47
Agustus	102,81	2,04
September	103,33	1,53
Oktober	103,40	1,95
November	103,99	2,84
Desember	104,14	2,14

Sumber : Inflasi Kota Tanjungpinang 2024

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,96 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,35 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,52 persen. Sedangkan untuk 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,23 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada bulan Desember 2023 antara lain: beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM),



bayam, kangkung, bawang merah, angkutan laut, emas perhiasan, sawi hijau, akademi/ perguruan tinggi, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, ikan selar/ikan tude, udang basah, cabai rawit, ikan mata besar, sabun cair/ cuci piring, ikan bulat, bahan bakar rumah tangga, dan sabun mandi cair.

Inflasi m-on-m sebesar 0,37 persen disebabkan naiknya indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,70 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,55 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,99 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok transpor justru mengalami, masing-masing sebesar 0,79 persen dan 1,45 persen. Sementara indeks harga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan.

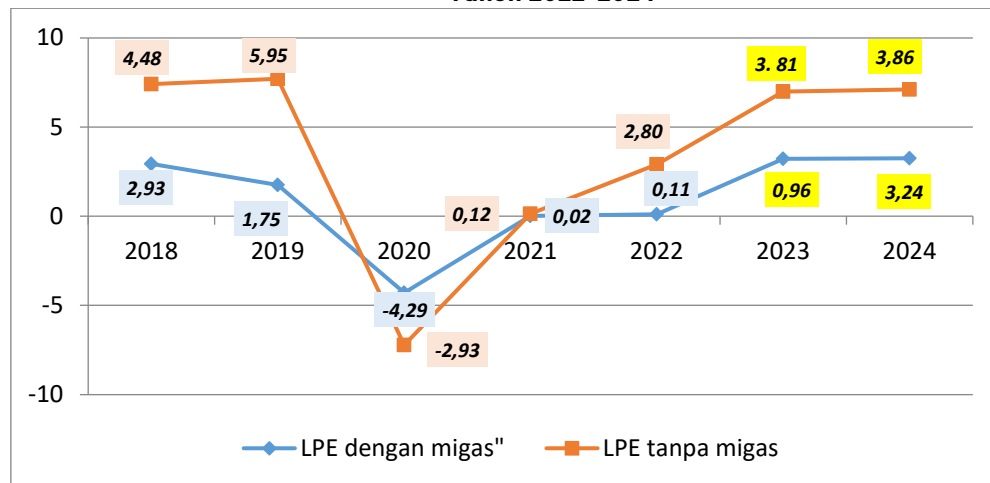
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada tahun 2023, antara lain: kangkung, bayam, ikan selar/ikan tude, tarif rumah sakit, tarif dokter umum, ketimun, bawang merah, tomat, beras, dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, cabai merah, bensin, daging ayam ras, cabai rawit, baju muslim wanita, sepatu wanita, buku tulis bergaris, pengharum cucian/pelembut, dan sabun mandi cair.

Sedangkan Perekonomian Kabupaten Natuna tumbuh membaik di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Namun, perekonomian Kabupaten Natuna 2023 diperkirakan tumbuh lebih



lambat sejalan dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian global dan domestik yang diperkirakan sedikit melambat.

Gambar. G-III.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2024



Sumber : Badan Statistik Daerah , diolah

Proyeksi makro ekonomi dan sosial Kabupaten Natuna tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel T-III.4
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Natuna

Indikator Makro	Satuan	Tahun 2023	Target 2024	Proyeksi 2025*	Proyeksi 2025**	Proyeksi 2025***
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,23/ 74,21	75,80	76,40	74,40	79,53
Angka Kemiskinan	%	5,25	4,37	4,35	3,80	4,79
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,05	2,89	2,79	2,79	4,03
Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas)	%	3,81	3,86	3,96	3,96	3,96
Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas)	%	0,96	3,24	3,27	1,90	1,50



Pendapatan Perkapita	%	85,56	84,50	86,90	298,410	298.702
Indeks Gini	Indeks	0,340	0,325	0,321	0,281	0,288
Inflasi	%	2,76	2,5+/-1	2,5+/-1	2,5+/-1	2,5+/-1

Sumber: *RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026

**RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025

***Ranhir RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045

3.1.4 Kerangka Ekonomi dan Arah Kebijakan Kabupaten Natuna

Tantangan yang dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Menjaga pertumbuhan konsumsi tetap tinggi

Pertumbuhan konsumsi tetap tinggi dilakukan dengan Menjaga daya beli masyarakat; dan menjaga inflasi rendah dan stabil. Pertumbuhan konsumsi RT terus meningkat mendekati kondisi sebelum Covid-19, dengan share PDRB sebesar 18,06%. Di sisi lain, Tekanan inflasi yang meningkat sejalan penyesuaian subsidi BBM dan perubahan harga di berbagai daerah sebagai pemasok barang.

2. Menjaga dan meningkatkan daya saing investasi

Daya saing investasi Kabupaten Natuna masih memiliki cukup ruang untuk ditingkatkan. Penguatan daya saing investasi dapat difokuskan pada peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai dan sarana umum, kapasitas ASN, dan koordinasi dengan Kota/Kabupaten.

3. Sistem keuangan digital yang masih perlu dioptimalkan.

Pangsa realisasi pajak dan retribusi melalui kanal digital khususnya QRIS meningkat, namun masih sangat terbatas.



Rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kepri yaitu: Menjaga Momentum Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Inflasi dengan cara:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dan pemulihan sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, konstruksi dan pariwisata (perdagangan dan penyediaan akumamin).
2. Penguatan program pengendalian inflasi melalui sinergi implementasi program GNPIP dengan prioritas program dengan dukungan dana yang kuat melalui: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur TIK, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui HLM TPID.
3. Meningkatkan daya saing investasi dengan memberikan insentif, kemudahan perizinan berusaha bagi investor serta penguatan akses dan infrastruktur pendukung yang lebih optimal (mis. Jembatan Batam Bintan).
4. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan pembiayaan UMKM melalui penguatan business matching and showcasing produk UMKM (mis. pembangunan Export Hub produk UMKM).
5. Memperkuat link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (BLK, Politeknik, dan LPK) melalui penguatan riset dan kerjasama, program Kampus Merdeka, magang, sertifikasi profesi, serta program beasiswa.
6. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran untuk memperbesar multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya.



7. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku & Promosi) dengan tujuan meningkat length of stay dan amount of spending.
8. Mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) & digitalisasi pembayaran di fasilitas umum
9. Mendorong hilirisasi komoditas berbasis SDA terutama di bidang maritim sebagai produk unggulan.

Upaya yang perlu dilakukan dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Pertumbuhan Konsumsi Tetap Tinggi dengan mendorong realisasi Belanja Wajib Pemerintah dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi melalui:
 - a. Penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja.
 - b. Menyukseskan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang difokuskan pada 7 implementasi program yaitu: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui high level meeting TPID.
- 2) Meningkatkan kemudahan layanan perizinan seperti pemantapan penggunaan sistem perizinan OSS-RBA serta peningkatan kapasitas manajemen dan SDM pelaku usaha
- 3) Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi di Kabupaten Natuna melalui Percepatan Digitalisasi Daerah



- 4) Mendorong Peningkatan Konektivitas Untuk Efisiensi Biaya Logistik dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah melalui Optimalisasi jalur pelayaran (tol laut) untuk konektivitas antar pulau, dan rute pelayaran.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 disusun berdasarkan pembahasan bersama perangkat daerah penghasil Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah dari pada tahun pada tahun 2025 sesuai RPJMD Kabupaten Natuna diperkirakan sebesar Rp.1.201.816.670.000,00. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 diprediksikan mencapai Rp.88.755.140.000,00. Jumlah ini terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer Kabupaten Natuna pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 1.098.245.970.000,00 yang terdiri dari dana perimbangan dan Dana Insentif Daerah (D.I.D). sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan dari dana Hibah dengan jumlah pada tahun 2024 sebesar Rp.14.815.550.000,00.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 selengkapanya terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-III.5
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025

PENDAPATAN DAERAH		
URAIAN	2024	2025
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	102.649.699.000,00	88.755.140.000,00
a. Pajak Daerah	57.077.600.000,00	23.744.070.000,00
a. Retribusi Daerah	823.099.000,00	770.240.000,00
b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	7.113.170,00
c. Lain-lain PAD yang Sah	36.749.000.000,00	57.127.670.000,00
2. Pendapatan Transfer	1.057.771.604.000,00	1.098.245.970.000,00
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.286.757.000,00	1.021.172.090.000,00
a. Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.484.847.000,00	77.073.880.000,00
1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	636.000.000,00	14.815.550.000,00
a. Pendapatan Hibah	636.000.000,00	14.815.550.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	1.161.057.303.000,00	1.201.816.670.000,00

2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.241.250.670.000,00. Belanja Operasi pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 805.757.710.000,00. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Natuna yang dianggarkan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Natuna yang dianggarkan terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 327.686.000.000,00. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 235.020.000,00. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Kabupaten Natuna diperkirakan pada tahun 2025 sebesar Rp.



107.571.910.000,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar dan Belanja Bantuan Keuangan.

Berikut disajikan ringkasan proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2025.

Tabel T-III.6
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025

BELANJA DAERAH		
URAIAN	2024	2025
1. Belanja Operasi	894.787.858.974,00	805.757.710.000,00
a. Belanja Pegawai	492.287.147.411,00	492.287.147.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	353.898.400.984,00	277.832.323.000,00
c. Belanja Hibah	40.052.059.579,00	30.064.990.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	8.550.251.000,00	5.573.250.000,00
2. Belanja Modal	250.696.505.126,00	327.686.000.000,00
a. Belanja Modal Tanah	3.253.300.000,00	2.500.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.734.008.236,00	48.700.000.000,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.980.229.574,00	65.900.000.000,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.180.285.066,00	210.100.000.000,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	486.902.250,00	486.000.000,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya	61.780.000,00	-
3. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	235.020.000,00
a. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	235.020.000,00
4. Belanja Transfer	120.718.035.900,00	107.571.910.000,00
a. Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	2.451.400.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	115.285.138.900,00	105.120.510.000,00
JUMLAH BELANJA	1.268.202.400.000,00	1.241.250.670.000,00

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pada sisi Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 menganggarkan Penerimaan Pembiayaan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.39.433.970.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Pada tahun 2025, diperkirakan Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 34.433.970.000,00.



Perincian Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-III.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025

PEMBIAYAAN DAERAH		
Uraian	2024	2025
A. Penerimaan Pembiayaan	107.145.097.000,00	39.433.970.000,00
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.145.097.000,00	39.433.970.000,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
B. Pengeluaran Pembiayaan	0	5.000.000.000,00
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Daerah	0,00	5.000.000.000,00
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	107.145.097.000,00	34.433.970.000,00

3.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Landasan hukum dalam perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan, antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kondisi setelah pandemi ini sudah menggembirakan khususnya di sektor pajak daerah
- b. Melakukan estimasi dengan cermat agar target dan realisasi lebih rasional dan diperlukan koordinasi secara optimal tentang informasi alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat baik dari sektor Bagi Hasil Pajak, Bagi Bukan Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan memperhatikan kondisi Perubahan APBN secara keseluruhan, termasuk bagi hasil dari provinsi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan memiliki kepastian dari sisi pembiayaan sehingga penyerapan anggaran lebih optimal.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan era otonomi daerah permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Natuna dari berbagai aspek sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang cukup kompleks, untuk itu strategi dan prioritas dari pendapatan daerah pada rancangan perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah melaksanakan secara optimal pencapaian target pendapatan daerah dengan menggali



potensi sumber keuangan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif, antara lain dengan:

- Ditingkatkannya produktifitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak daerah;
- Ditingkatkannya pengawasan secara langsung kelapangan terhadap pungutan pajak daerah;
- Optimalisasi penggalan potensi sumber-sumber baru terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mengoptimalkan pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pungutan Pajak Daerah;
- Meningkatkan intensitas kegiatan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media masa
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui persiapan pembenahan dengan menyempurnakan sistem pelayanan;
- Meningkatkan kerja sama dengan unit-unit terkait langsung dengan objek pajak.

Disamping itu juga diupayakan optimalisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan maupun dari dana penerimaan lain-lain yang sah dari propinsi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Natuna dengan instansi terkait, pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penerimaan lain-lain yang sah dari provinsi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian diharapkan pendapatan daerah Kabupaten Natuna dapat dicapai secara optimal dan dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.



2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan-kebijakan yang menyangkut Belanja Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target yang terukur pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program.
- c. Belanja disertai dengan tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator kinerjanya.
- d. Belanja dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
- e. Belanja diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang publik.
- f. Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulan pada masyarakat/swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan.
- g. Belanja Daerah diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan timbal balik dalam bentuk pendapatan bagi Pemerintah Daerah (cost recovery).
- h. Belanja Daerah diarahkan pada kegiatan strategis yang memiliki dampak dan keterkaitan yang luas pada kehidupan masyarakat.
- i. Belanja Daerah memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan serta distribusi yang memujudkan good governance dan clean government.



Kebijakan Belanja Daerah sesuai dengan RPJMD, perhitungan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel. T-III.8
Belanja Daerah tahun 2024 dan
Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Natuna Tahun 2025

Uraian	Belanja	Proyeksi
	2024	2025
A. Belanja Operasi	894.787.858.974,00	805.757.710.000,00
1. Belanja Pegawai	492.287.147.411,00	492.287.147.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	353.898.400.984,00	277.832.323.000,00
3. Belanja Hibah	40.052.059.579,00	30.064.990.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial	8.550.251.000,00	5.573.250.000,00
B. Belanja Modal	250.696.505.126,00	327.686.000.000,00
1. Belanja Modal Tanah	3.253.300.000,00	2.500.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.734.008.236,00	48.700.000.000,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.980.229.574,00	65.900.000.000,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.180.285.066,00	210.100.000.000,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	486.902.250,00	486.000.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	61.780.000,00	0,00
C. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	235.020.000,00
6. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	235.020.000,00
D. Belanja Transfer	120.718.035.900,00	107.571.910.000,00
2. Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	2.451.400.000,00
3. Belanja Bantuan Keuangan	115.285.138.900,00	105.120.510.000,00
JUMLAH BELANJA	1.268.202.400.000,00	1.241.250.640.000,00

Sumber : BPKPD Kab. Natuna, 2024

Dari perkiraan belanja tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Natuna, kapasitas riil adalah dimana dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan yang penghitungannya adalah total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna.



Tabel. T-III.9
Perkiraan Kapasitas Riil
Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Uraian	Target 2025
1.	Jumlah Pendapatan	1.201.816.670.000,00
	<i>Dikurangi :</i>	
2.	Jumlah Belanja	1.241.250.640.000,00
	Belanja Mengikat :	
	Gaji PNS + TPP	433.176.556.411,00
	Gaji Kepala Daerah dan BOP	7.759.289.470,00
	Gaji DPRD	7.021.294.500,00
	Belanja Mandatory Spending :	
	ADD	90.228.000.000,00
	Bagi Hasil Pajak	4.707.760.000,00
	Bagi Hasil Retribusi	725.137.000,00
	Belanja Infrastruktur /PEN	186.623.956.626,00
	Belanja Fungsi Pendidikan	236.369.420.628,00
	Belanja Fungsi Kesehatan	160.309.218.335,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	114.330.007.030,00

Sumber : Data olahan BP3D, 2025

Dari dana yang tersedia tersebut, Sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2025, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- 1) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk



belanja infrastruktur daerah minimal 25% sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;

- 4) Belanja Pengawasan, bahwa anggaran pengawasan minimal 0,9% sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- 5) Belanja SPM, bahwa anggaran penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai;
- 2) Belanja JKN,
- 3) Belanja DAK BOS;
- 4) Belanja Operasional Kantor; dan

Belanja prioritas pertama juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja bagi Hasil Pajak, Belanja Batuna Kepada Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

b. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 – 2026.



c. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Natuna pada tahun 2025 menganggarkan Penerimaan Pembiayaan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan Anggaran pengeluaran pembiayaan hanya berasal dari Penyertaan Modal Daerah.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 didahului dengan pengkajian terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, prioritas nasional tahun 2025, dan isu strategis daerah tahun 2025.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

4.1.1 VISI

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”.

Kata kunci dari visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Eksotis

Dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata



b. Aman

Diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

c. Kemandirian Ekonomi

Diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

d. Religius

Peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

e. Kultural

Kondisi masyarakat kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinnekaan dengan terus menghargai keragaman budaya di Kabupaten Natuna secara proporsional.

4.1.2 MISI

Untuk Mewujudkan visi besar terhadap pengembangan Kabupaten Natuna, berikut adalah Misi yang akan ditempuh sebanyak 7 (tujuh) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;



2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART) dan;
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (money follow program), maka RKPD tahun 2025 menekankan pada target kinerja baik kebermanfaatan hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Misi ke 1: Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM

Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya pengamalan agama didalam masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/ Madrasah Yang Aktif (Persen)	65
Meningkatnya ketahanan budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	20,44



Tujuan 2: Peningkatan SDM untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan literasi (Indeks)	78
	Indeks Pendidikan (Persen)	18,38
Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan (Indeks)	0,705
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	91,95

Misi ke 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Tujuan 3: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,79
Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Indeks Pengeluaran (Juta/ Rupiah)	15.884
Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dalam PDRB (Persen)	3,91
Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	LPE Sektor Pariwisata Dalam PDRB (Persen)	3
Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	398
Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB (Persen)	3,56
	LPE Sektor Industri Perdagangan Dalam PDRB (Persen)	3.72

Misi ke 3: Menciptakan Kawasan Perbatasan Yang Aman, Strategis dan Eksotis

Tujuan 4: Pengelolaan Kawasan Perbatasan Yang Aman

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminal (Persen)	3,57
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	26,64
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan (Persen)	55



Misi ke 4: Menciptakan Kawasan Perbatasan Yang Aman, Strategis dan Eksotis

Tujuan 5: Pengelolaan Kawasan Perbatasan Yang Aman

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur (Persen)	75,80
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	79,64
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten (Persen)	82,80

Misi ke 5: Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Tujuan 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air (Persen)	57,00
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen)	76,40
	Indeks Kualitas Udara (Persen)	86,40

Misi ke 6: Reformasi Birokrasi Yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)

Tujuan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	63,00

Misi ke 7: Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 8: Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi semua sektor

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan (Nilai)	70



4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Pada tahun 2025 pemerintah mempunyai delapan agenda pembangunan nasional yang menjadi Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi, syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Didalam Negeri.
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.



8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 8 Prioritas Nasional mengacu pada 6 agenda pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar. G-IV.1

Tema RKP Tahun 2025



Rencana Kerja Pemerintah 2025 memiliki tema pembangunan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

4.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Pada tahun 2025 prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

Dengan arah kebijakan, yaitu: Peningkatan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan sektor perikanan, Pengembangan infrastruktur



pendukung pembangunan kelautan dan perikanan, Peningkatan nilai tambah produksi pertanian berbasis industri dan pemasarannya melalui Teknologi Tepat guna, Peningkatan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan tourism linkage networking maupun diversifikasi objek wisata, Pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, Meningkatkan kondusivitas iklim investasi daerah, Peningkatan kualitas petani dan sarana prasarana pertanian di Kepulauan Riau, Optimalisasi potensi perekonomian daerah, Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan melakukan strategi, yaitu: Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian pertanian, kelautan serta perikanan, peningkatan pendapatan asli daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini yaitu peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapatan Free Trade Zone secara menyeluruh, pengembangan tourism linkage networking antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap



perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan one day service, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,



memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a.** Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
- b.** Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- c.** Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

4.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Pada tahun 2025 ini fokus pembangunan Kabupaten Natuna berdasarkan isu strategis daerah, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter budaya melayu



2. Kemandirian masyarakat ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata
3. Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional
4. Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
6. Penurunan kualitas lingkungan hidup
7. Implementasi Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Ada beberapa strategi yang difokuskan pada tahun 2025 ini, yaitu: peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat, Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya literasi, Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan, Percepatan reformasi birokrasi, Memperkuat dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumberdaya petani dan nelayan, Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, Memperkuat sistem informasi penanaman modal, Memperkuat nilai ekspor barang industri serta memperkuat sarana distribusi perdagangan, Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan pencari kerja, Peningkatan penempatan pencari kerja, peningkatan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang, Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA, Peningkatan pembangunan kawasan pariwisata, Peningkatan pembangunan kawasan nasional strategis tertentu, Peningkatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah, Peningkatan infrastruktur gedung pemerintahan, Peningkatan kualitas dan pengelolaan



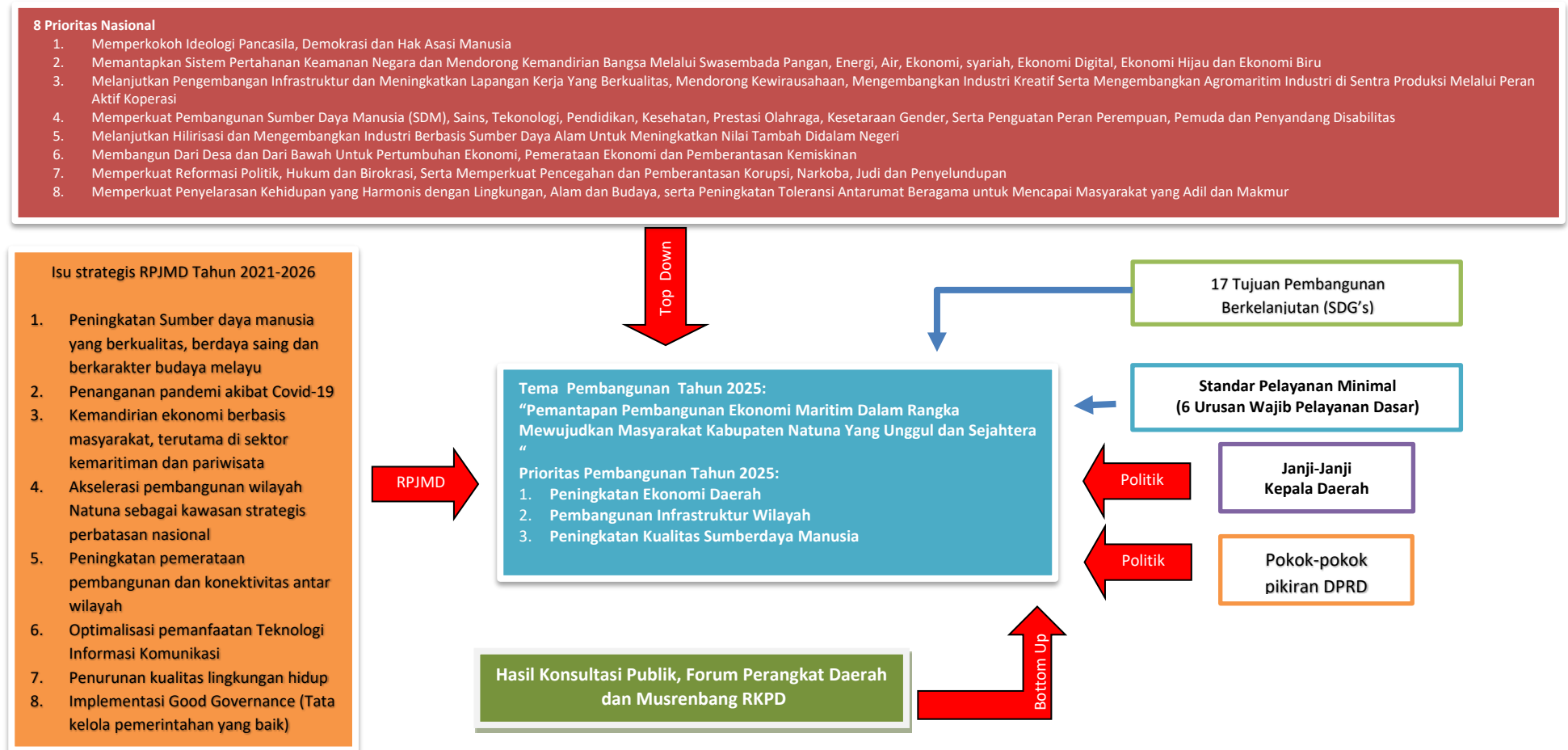
lingkungan hidup, Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2025, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal, Janji-janji Kepala Daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



Gambar. G-IV.2

Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 berdasarkan Isu Strategis RPJMD Tahun 2021-2026, Prioritas RKP tahun 2025, SDG's, SPM, Isu Strategis Daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.





Mendasarkan hasil perumusan isu strategis diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 yaitu: “Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Unggul dan Sejahtera”.

Didalam mencapai tema pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025 yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Natuna telah merumuskan arah kebijakan, yaitu: Menjadikan Natuna Gerbang Utaraku Sebagai Islamic Center, Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA dan Pemenuhan Koordinasi di Bidang Keagamaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah, Pengelolaan/ Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Peningkatan Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP, Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan, Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan, Menjamin Layanan Kesehatan Masyarakat Dalam Penanganan dan Pemulihan Kesehatan, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Penguatan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan, Penguatan Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Secara Aktif Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Prevalensi Stunting, Peningkatan Peran, Partisipasi dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan, Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Responsif Anak, Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Anak, Peningkatan Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi Terhadap Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Layanan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Kekerasan dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Petani dan Nelayan, Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Sektor Pariwisata, Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Unggulan Berbasis Potensi Lokal, Menggiatkan Ekonomi Kreatif, Penyederhanaan Mekanisme Perizinan Dalam Investasi dan Penanaman Modal,



Pemberian Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, Peningkatan Promosi Potensi dan Nilai Ekonomi Daerah, Pemberian Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Membuka UMKM Untuk Meningkatkan Geliat Entrepreneur, Memasarkan Hasil Produk Lokal ke Pasar Internasional, Melakukan Penataan Pasar Tradisional, Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar, Penyediaan Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja, Peningkatan Program Pemberdayaan Sosial, Peningkatan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat Khususnya Pada Kawasan Perbatasan, Percepatan Tumbuhnya Destinasi - Destinasi Wisata Eksotis, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan Ekonomi Berbasis Kepulauan, Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Baku, Peningkatan Rumah Layak Huni, Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Melalui Sistem Transportasi Yang Efisien dan Efektif, Peningkatan Penataan Bangunan Gedung Pemerintahan, Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Konservasi Hutan dan Sumber Air, Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Penggunaan Teknologi Dalam Proses Pelayanan Publik, Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan Dengan Seluruh Stakeholder, Peningkatan Data Statistik Sektoral Yang Memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas dan Referensi Data, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Statistik Sektoral, Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau Dengan Menggunakan Data Digital, Meningkatkan Penggunaan Aplikasi di Semua Sektor.

Keterkaitan antara Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 Tahap RPJMD Ke-4 dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut:



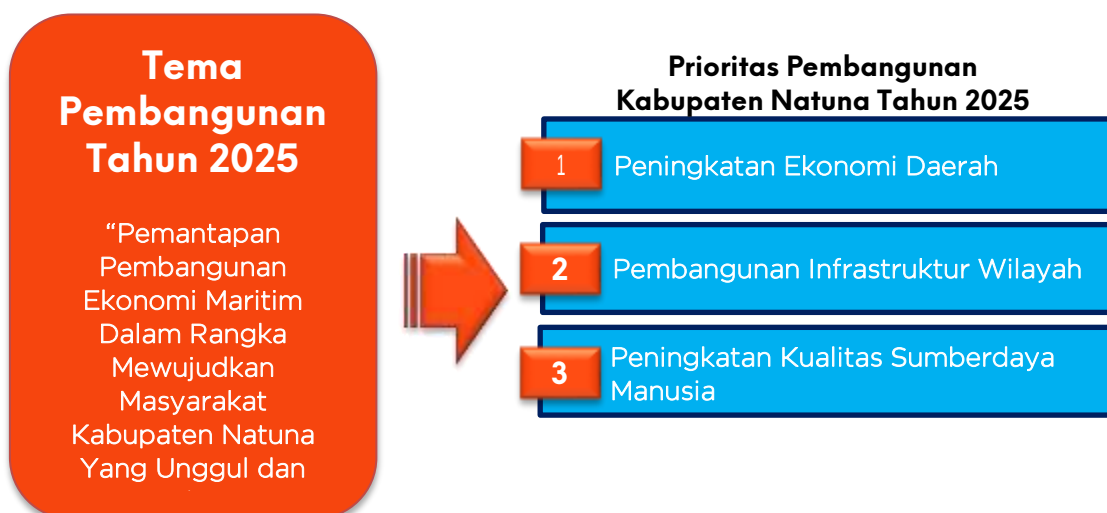
Gambar. G-IV.3
Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 Tahap RPJMD Ke-4 dengan Tema Pembangunan Tahun 2025



Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan ekonomi daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Gambar. G-IV.4
Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

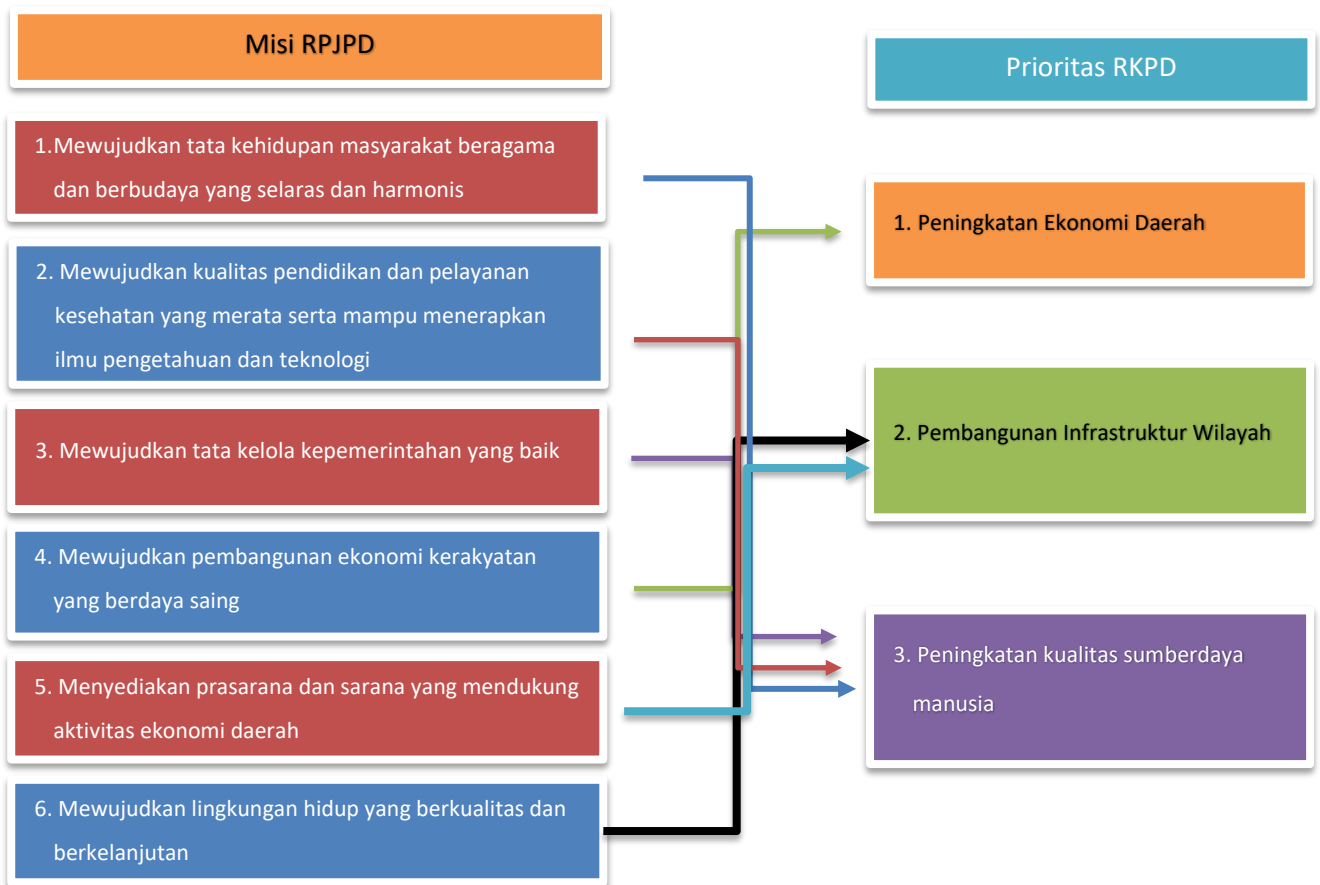




4.4.1. Keterkaitan Misi RPJPD Dengan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

Keterkaitan Misi RPJPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar. G-IV.5
Keterkaitan Misi RPJPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2025

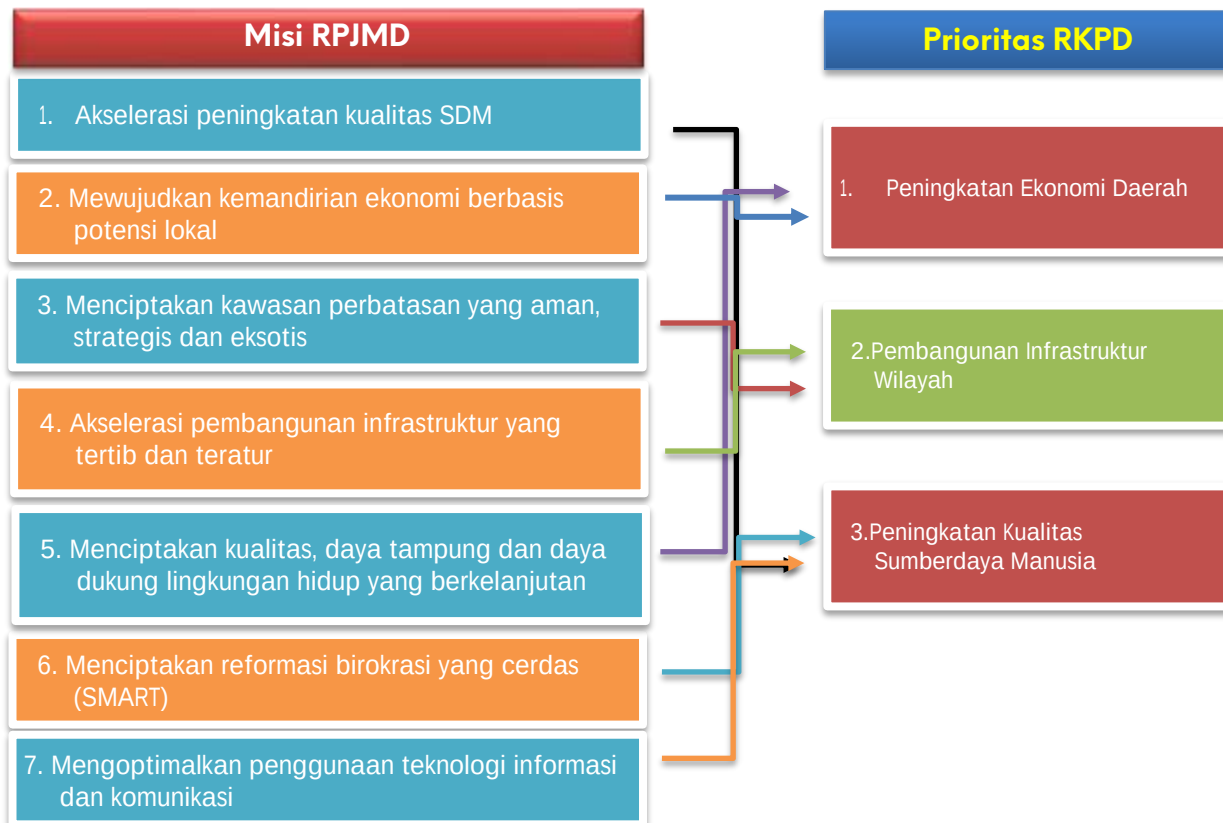


4.4.2. Keterkaitan Misi RPJMD Dengan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar. G-IV.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan
Misi RPJMD Tahun 2021-2026

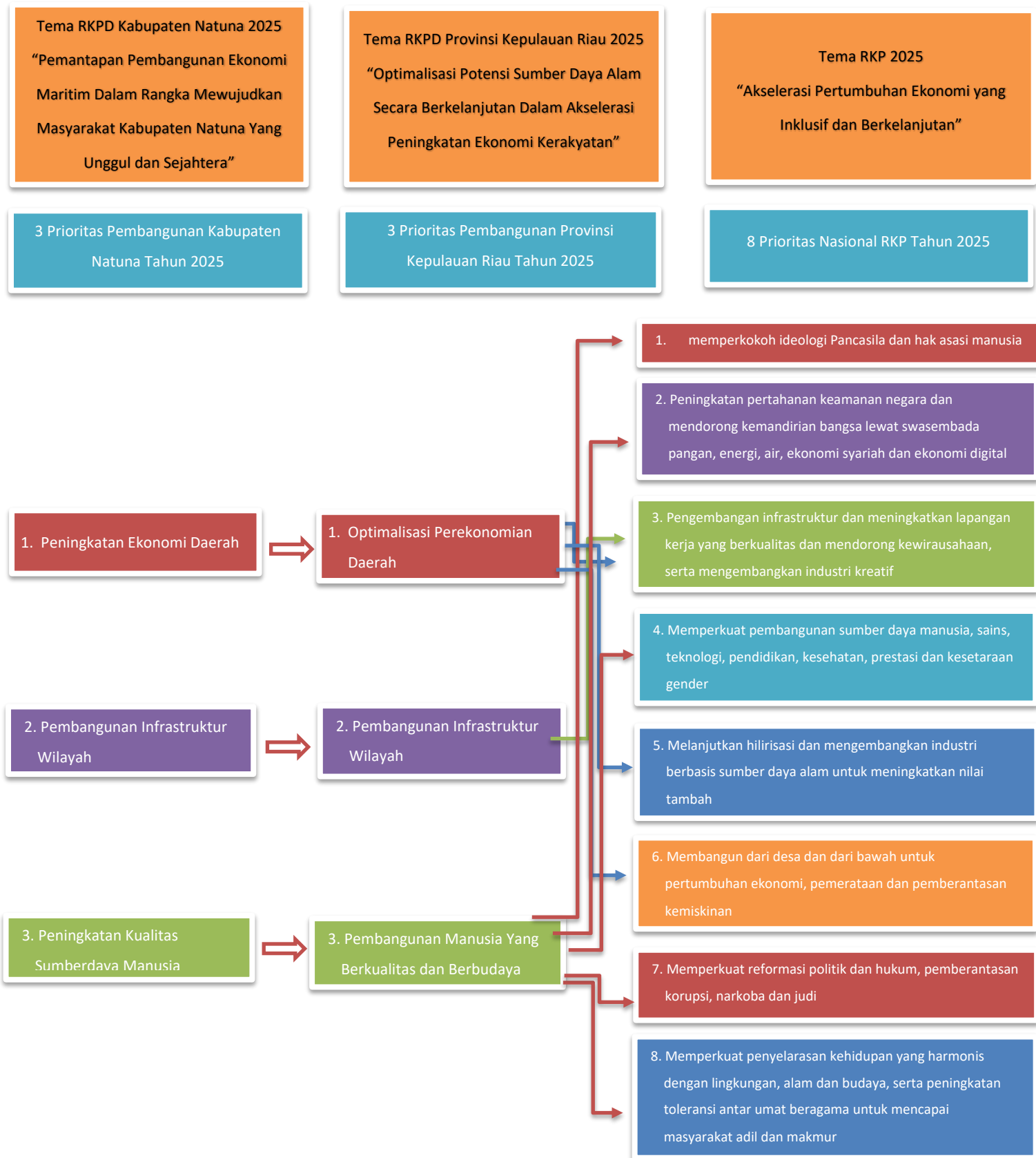


4.4.3. Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan 6 Agenda Pembangunan RPJMN tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar. G-IV.7
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan 8 Prioritas Nasional RKP Tahun 2025





4.4.4. Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2025, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2025, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. T-IV.1
Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2025, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Prioritas RKP Nasional Tahun 2025	Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	Memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	63,00
2	Peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik Yang Disebarluaskan	70,00
3	Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif	Peningkatan Ekonomi Daerah Pembangunan infrastruktur Wilayah	Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	LPE Sektor Pariwisata Dalam PDRB (Persen)	3
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan (Persen)	55
			Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur (Persen)	75,80
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur	79,64



No	Prioritas RKP Nasional Tahun 2025	Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
				Perhubungan (Indeks)	
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten (Persen)	82,80
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air (Persen)	57,00
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen)	76,40
				Indeks Kualitas Udara (Persen)	86,40
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	26,64
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan kesetaraan gender	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan literasi (Indeks)	78
				Indeks Pendidikan (Persen)	18,38
			Meningkatnya Ketahanan Budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	20,44
			Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan (Indeks)	0,705
			Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	91,95
			Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,79
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dalam PDRB (Persen)	3,91



No	Prioritas RKP Nasional Tahun 2025	Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah		Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB (Persen)	3,56
			Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Perdagangan Dalam PDRB (Persen)	3,72
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Indeks Pengeluaran (Juta/Rupiah)	15.884
			Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	398
7	Memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas (Persen)	3,57
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengamalan agama didalam masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah Yang Aktif (Persen)	65

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

4.4.5. Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025



Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-IV.2

Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan / isu strategis pada RKPD 2025

No	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	Isu Strategis
1	Peningkatan Ekonomi Daerah	Kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional
		Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
		Penurunan kualitas lingkungan hidup
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudaya saing dan berkarakter budaya melayu
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
		Impelementasi Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik)

4.4.6. Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2025 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025

Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2025 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-IV.3

Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2025 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna pada tahun 2025

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2025
Akselerasi peningkatan	Peningkatan kualitas	Menjadikan Natuna Gerbang Utaraku sebagai Islamic Centre	Peningkatan Kualitas Sumber



Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2025
kualitas Sumber Daya Manusia	kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat	Peningkatan Pembinaan TPQ/ TPA/MDA dan Pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan	Daya Manusia
		Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah	
		Pengembangan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	
		Pengelolaan/pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	
	Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya literasi	Peningkatan partisipasi sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP	
		Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan	
		Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan	
		Pengembangan budaya gemar membaca melalui pengembangan perbukuan dan konten literasi	
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan perpustakaan	
	Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan	Menjamin layanan Kesehatan masyarakat dalam penanganan dan pemulihan kesehatan	
		Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
		Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan	
		Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	



Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2025
	Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan	Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting	
		Peningkatan peran, partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan	
		Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
		Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	
		Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak	
		Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus	
Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal	Menguatkan dukungan sarana dan prasarana produksi Pertanian, Perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan	Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan Ekonomi Daerah
		Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan	
		Peningkatan kualitas sumber daya petani dan nelayan	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan	



Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2025
	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan	
		Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata	
		Peningkatan sumber daya manusia sektor pariwisata	
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	
		Pengembangan pariwisata unggulan berbasis potensi lokal	
		Menggiatkan ekonomi kreatif	
	Memperkuat sistem informasi penanaman modal	Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal	
		Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi	
		Peningkatan promosi potensi dan nilai ekonomi daerah	
	Menguatkan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan sarana distribusi perdagangan	Pemberian kemudahan bagi Masyarakat yang ingin membuka UMKM untuk meningkatkan geliat entrepreneur	
		Memasarkan Hasil Produk Lokal ke pasar internasional	
		Melakukan Penataan Pasar Tradisional	
	Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan tenaga kerja	Pemberian pelatihan bagi para tenaga kerja	
		Meningkatkan skill tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	
		Penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja	
		Menjalin kerjasama dengan dunia usaha	



Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2025
	Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang	Peningkatan program pemberdayaan masyarakat	
		Peningkatan program pemberdayaan sosial	
Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA	Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kawasan perbatasan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
	Peningkatan Pembangunan Kawasan Pariwisata	Percepatan tumbuhnya destinasi-destinasi wisata eksotis	
	Peningkatan Pembangunan Kawasan Nasional Strategis Tertentu	Optimalisasi pembangunan lokasi prioritas kawasan perbatasan	
Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah	Peningkatan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan ekonomi berbasis kepulauan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air baku	
		Peningkatan rumah layak huni	
		Memperkuat konektivitas antar wilayah melalui system transportasi yang efisien dan efektif	
	Peningkatan Infrastruktur gedung pemerintahan	Peningkatan penataan bangunan gedung pemerintahan	
Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
		Peningkatan konservasi hutan dan sumber air	
		Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	



Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2025
Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas	Percepatan reformasi birokrasi	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur	
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	
		Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik	
		Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder	
Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan data statistik sektoral yang memenuhi standar data, meta data, interoperabilitas dan referensi data	Kualitas Sumberdaya Manusia
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola statistik sektoral	
		Meningkatkan konektivitas antar pulau dengan menggunakan data digital	
		Meningkatkan penggunaan aplikasi di semua sektor	

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

4.4.7. Program Kabupaten Natuna dengan prioritas daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 dan prioritas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Program Kabupaten Natuna dengan prioritas daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 dan prioritas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. T-IV.4
Program Kabupaten Natuna dengan prioritas daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 dan prioritas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
1.	Peningkatan Ekonomi Daerah	Optimalisasi Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.120.000.000
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	841.100.000
			Program Penataan Desa	410.000.000
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	560.000.000
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.879.385.000
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.181.500.223
			Program Pemberdayaan Sosial	403.183.900
			Program Rehabilitas Sosial	750.000.000
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	370.000.000
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	56.918.000
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	470.268.000
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.605.422.500
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.430.383.610
			Program Penyuluhan Pertanian	263.792.000
			Program Pengendalian dan	362.711.590



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.500.000.000
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.805.000.000
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.373.790.711
			Program Pemasaran Pariwisata	1.250.000.000
			Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.350.000.000
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	1.200.000.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	550.133.000
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	630.000.000
			Program Promosi Penanaman Modal	319.107.081
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.969.718.547
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	468.750.000
			Program Pengendalian izin usaha industri	100.000.000
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	150.000.000



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	350.000.000
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	930.000.000
			Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	250.000.000
			Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	200.000.000
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	250.000.000
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.770.750.000
			Program Pengembangan UKM	375.000.000
			Program Pengembangan Ekspor	600.000.000
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.956.250.000
2.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.029.000.000
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	687.500.000
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	113.750.000
			Program Pembinaan dan	354.000.000



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.239.733.000
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.347.550.000
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.062.500.000
			Program Pengelolaan Perbatasan	510.000.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.426.499.000
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.270.000.000
			Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)	51.608.248.742
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.841.700.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	28.192.000.000
			Program Penyelenggaraan Jalan	171.929.260.000
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.898.000.000
			Program Pengembangan Perumahan	920.000.000
			Program Kawasan Permukiman	6.275.000.000
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.300.000.000



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Program Pengembangan Permukiman	1.540.000.000
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.114.000.000
			Program Pengelolaan Pelayaran	9.590.000.000
			Program Penataan Bangunan Gedung	27.180.000.000
			Program Pengelolaan Persampahan	9.740.000.000
			Program Penanggulangan Bencana	2.597.624.000
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.156.250.000
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	620.000.000
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.985.000.000
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100.000.000
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	375.000.000
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	225.000.000



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	300.000.000
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.000.000
3.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.070.001.736
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.580.481.600
			Program Perekonomian dan Pembangunan	3.251.750.000
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.280.000.000
			Program Pengembangan Kebudayaan	1.680.000.000
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	800.000.000
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	350.000.000
			Program Pengelolaan Permuseuman	3.020.000.000
			Program Pengelolaan Pendidikan	87.963.635.835
			Program Pengembangan Kurikulum	278.000.000
			Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1.313.999.200
			Program Pembinaan Perpustakaan	1.195.000.000
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	120.000.000
			Program Pemenuhan Upaya	45.147.538.400



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	200.000.000
			Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	260.000.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100.000.100
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	525.000.000
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.000.000
			Program Pemenuhan HaK Anak (PHA)	260.000.000
			Program Pengendalian Penduduk	3.235.000.000
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	250.000.000
			Program Perlindungan Perempuan	874.000.000
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.645.000.000
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.300.000.000
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.180.000.000
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	151.009.700.000
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.400.000.000
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.430.000.000



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	11.933.480.000
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.155.983.000
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.016.065.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.000.000.000
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.562.500.000
			Program Kepegawaian Daerah	2.718.924.482
			Program Pendaftaran Penduduk	462.500.000
			Program Pencatatan Sipil	156.250.000
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	953.920.000
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	62.500.000
			Program Pelayanan Penanaman Modal	450.000.000
			Program Pengelolaan Arsip	455.000.000
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	120.000.000
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.789.600.000
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	400.000.000
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.813.400.000



No	Prioritas Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025	Pagu Anggaran
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	360.000.000
			Program Pemasaran Pariwisata	225.000.000
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	200.000.000

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

4.4.8. Program Daerah pada RKPD 2025 mendukung 8 Prioritas Nasional

Program Daerah pada RKPD 2025 mendukung 8 Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-IV.5
Program Daerah pada RKPD 2025 mendukung 8 Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi, syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Pemasaran Pariwisata Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penyuluhan Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perbatasan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengendalian izin usaha industri Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Penataan Bangunan Gedung
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Rehabilitas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Permuseuman
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Didalam Negeri	Program Pengembangan Ekspor
		Program Pengembangan UMKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Sosial
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
	Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

(Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

4.5. Pendekatan Tematik - Holistik, Integratif dan Spasial

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan tematik-holistik,



integratif, dan spasial. Pendekatan tematik-holistik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

1. Pendekatan tematik – holistic

Pendekatan tematik – holistic pada RKPD Kabupaten Natuna 2025 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Pembangunan tahun 2025 juga diselaraskan dengan janji-janji Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Janji-janji Kepala Daerah telah tertuang didalam RPJMD dengan jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam dokumen operasional Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan selanjutnya dituangkan pada RKPD tahun 2025 dengan target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah ditentukan pada Renstra Perangkat Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD memiliki peran strategis dan juga merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD dan hasil kunjungan kerja Dewan yang akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan yang tertuang



pada RKPD tahun 2025. Adapun Tematik - Holistik pembangunan dalam RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan dan Tindak Lanjut Dalam RKPD 2025

Permasalahan dalam pembangunan Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Natuna yang harus menjadi perhatian tahun 2025, diantaranya: 1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial, dan keamanan; 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; 5) Kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 6) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada sub bab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 serta tindak lanjut pada tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel. T-IV.6
Permasalahan dan Tindaklanjutan pada RKPD 2025

NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjutan
1	Pendidikan	Anak usia PAUD 5-6 tahun ada yang belum bersekolah dan ada yang sudah berada di jenjang SD	menyiapkan database pendidikan secara komprehensif sesuai kewenangan yang ada di kabupaten
		Terdapat anak usia PAUD berada pada RA yang belum masuk pendataan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	melakukan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan penduduk usia sekolah



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Kabupaten Natuna	
		Hasil penilaian dari Badan Akreditasi Nasional terhadap SMP/ MTs di Kabupaten Natuna, belum memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan untuk mendapatkan akreditasi B, sehingga sebagian besar SMP/ MTs masih terakreditasi C	menyusun program pendampingan terhadap sekolah yang terakreditasi C untuk mencapai akreditasi minimal B memenuhi delapan SNP di antaranya adalah: standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan
	Kesehatan	Pelayanan usia produktif dan usia lanjut tidak terintegrasi sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan	Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan di posyandu holistic
		Belum adanya pojok hipertensi di setiap kecamatan sehingga masih rendahnya kepatuhan berobat pada penderita hipertensi	Pembentukan pojok hipertensi di setiap kecamatan
		Kurangnya edukasi oleh petugas kesehatan kepada keluarga penderita dan kontak erat penderita tuberculosis	Meningkatkan edukasi oleh petugas kesehatan kepada keluarga penderita dan kontak erat penderita tuberculosis
		Logistik sarana pendukung berupa mikroskop pemeriksaan sampel penderita tuberkolosis masih kurang	Pengadaan logistik sarana pendukung berupa mikroskop pemeriksaan sampel tuberkolosis sesuai kebutuhan
		Ketersediaan obat untuk tuberkulosis pada anak masih kurang	Pengadaan ketersediaan obat untuk tuberkulosis pada anak sesuai kebutuhan
		Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat dalam upaya screening tuberculosis	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat dalam upaya screening tuberculosis dengan cara sosialisasi, penyuluhan, konseling dan edukasi terkait tuberculosis



NO	Urusan	Permasalahan	Tindakan lanjut
		Kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya pemberian terapi pencegahan tuberkulosis kepada kelompok berisiko (balita)	Meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya pemberian terapi pencegahan tuberkulosis kepada kelompok berisiko (balita) dengan cara sosialisasi, penyuluhan, konseling dan edukasi terkait tuberkulosis
		Ketersediaan bahan habis pakai (BHP) masih terbatas	Pengadaan BMHP sesuai jumlah sasaran
		Waktu pelayanan di pos pembinaan terpadu (Posbindu) masih terbatas	Penambahan jadwal pelayanan posbindu sesuai kebutuhan
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih adanya jalan yang tingkat kerusakannya cukup berat, terutama status jalan kabupaten dan non status	Pembangunan dan pemeliharaan jalan
		Akses air minum dan sanitasi layak masih rendah	Pembangunan SPAM dan IPAL
		Kepemanfaatan IPLT masih sangat minim oleh warga	Sosialisasi keberadaan IPLT untuk melaksanakan sedot tinja pada rumah warga
		Di perkotaan dan sebagian wilayah pesisir masih terdapat genangan air (banjir) yang cukup lama disebabkan aliran air yang dibuang ke laut atau sungai belum memadai	Penyusunan DED pengendalian banjir dan pembangunan dan pemeliharaan drainase
		Masih terdapat kekurangan dan kerusakan gedung pemerintah	Pembangunan gedung baru dan pemeliharaan gedung
3.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masih terdapat rumah ibadah yang rusak berat dan belum maksimal pembangunannya	Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
		Belum maksimalnya pengurangan RTLH dikarenakan keterbatasan kerjasama dengan pihak lain	Pelaksanaan kerjasama dengan CSR dalam rangka pembangunan RTLH
		Sarana dan prasarana PSU perumahan masih ada yang rusak dan belum	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana PSU



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjuti
		memadai	
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Masih kurangnya sumber daya aparatur pemadam kebakaran yang berkualitas	Pelaksanaan pelatihan SDM pemadam kebakaran sebanyak 27 orang
		Belum dibentuknya relawan pemadam kebakaran	Pembentukan relawan setiap kecamatan
		Belum tersedianya pos damkar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dikecamatan dan kelurahan/desa	Pengadaan sarana dan prasarana 3 pos damkar di tiga kecamatan (Batubi, Bunguran Selatan dan Bunguran Barat)
		Masih kurangnya sumber daya aparatur tanggap bencana daerah yang berkualitas	Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC bencana) dan pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana
		Jumlah sarana prasarana masih terbatas (bangunan gedung kantor dan alat penunjang lainnya serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana)	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Masih kurangnya sumber daya aparatur satpol PP yang berkualitas	Pelatihan aparatur satpol PP
		Jumlah sarana prasarana pendukung kinerja satpol PP masih terbatas	Penyediaan peralatan sarana prasarana satpol PP
5.	Sosial	Banyaknya sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di beberapa pulau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dapat tertangani secara maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan Kemensos Ri, Dinas Sosial Provinsi, instansi terkait, lintas sektor serta lintas daerah dalam penanganan PPKS
		Belum tersedianya shalter atau rumah singgah untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	pembangunan shelter atau rumah singgah untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS
		Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam respon kasus penanganan bencana untuk urusan perlindungan dan jaminan sosial korban	Pengadaan fasilitas Bangunan /Gedung Logistik, mobilitas darat dan laut serta peralatan lainnya) dalam rangka penanganan korban bencana



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
6.	Tenaga Kerja	bencana	
		Masih kurangnya SDM yang tersedia dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana	Penambahan SDM baik dalam jabatan pengelolaan, administrasi maupun analisis dan tenaga pendamping dimasing-masing Kecamatan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial maupun penanganan bencana
		Belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI yang memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan sehingga belum dapat dilaksanakan pelatihan calon tenaga kerja CPMI dan CTKI	Mencari pasar tenaga kerja CTKI dan CPMI serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait di suatu wilayah lain atau dengan biro/lembaga yang menangani CTKI/CPMI
		Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI sehingga belum ada pendaftar yang dapat dilatih	
		Belum terbentuknya BKK disekolah kejuruan	Pembentukan BKK di sekolah kejuruan
		Kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan lembaga penempatan tenaga kerja karena minimnya pasar kerja di kabupaten natuna	Mencari peluang pasar kerja dan memberikan dorongan kepada pihak swasta untuk membentuk lembaga penempatan tenaga kerja
		Kebutuhan tenaga kerja yang ada di SISNAKER tidak sesuai dengan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi di kabupaten natuna	Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung
		Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah kabupaten natuna	
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sumber daya manusia perempuan (kader perempuan) di desa/kelurahan masih kurang dari sisi jumlah dan kualitas	Meningkatkan kapasitas khusus perempuan untuk dilibatkan sebagai kader perempuan tingkat kabupaten/kota



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		Sumber daya perempuan yang ada di Desa/kelurahan masih enggan untuk ikut aktif dalam pembangunan di segala bidang di masyarakat	Menyediakan insentif dalam bentuk bantuan transportasi agar partisipasi kader perempuan dapat ditingkatkan
		Komitmen perangkat daerah yang masih kurang dalam ikut serta dalam pelatihan PUG	Penguatan komitmen perangkat daerah yang masih kurang dalam ikut serta dalam pelatihan PUG melalui MoU kepala daerah dengan OPD
		Belum melakukan rapat koordinasi dengan awak media untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	Melakukan rapat koordinasi dengan awak media untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap anak secara regular
8.	Pangan	Belum optimalnya produksi pangan lokal	Peningkatan produksi Pangan lokal melalui kegiatan pengadaan sarana pertanian
		Pengelolaan lumbung pangan yang belum optimal	Pembinaan kepada kelompok lumbung pangan
		Penanganan kerawanan pangan masih terfokus daerah bencana	Pada tahun 2025 bisa difokuskan pada penanganan stunting maupun daerah rawan pangan
9.	Pertanahan	Masih adanya tanah masyarakat dan pemerintah daerah yang belum bersertifikat	Koordinasi dengan BPN terkait tindak lanjut program nasional Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
10.	Lingkungan Hidup	waktu pengiriman pengujian sampel air juga mengalami keterlambatan	menambah volume dalam pengambilan dan pengujian sampel air yang semula 2 kali dalam 1 tahun, menjadi 4 kali dalam 1 tahun
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data yang diolah oleh Disdukcapil belum dianggap terlalu penting bagi Sebagian OPD	Melakukan Sosialisasi ke semua OPD dan melakukan Kerja sama dengan OPD terkait pemanfaatan data
		Jaringan Internet di kecamatan belum memadai, kurangnya sosialisasi di	Melakukan Sosialisasi di Tingkat Desa, serta melaksanakan FKP di Kecamatan,



NO	Urusan	Permasalahan	Tindakan lanjut
		perangkat desa terkait pentingnya dokumen kependudukan	Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kondisi jaringan Internet
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masih terdapat kelemahan aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengisian Kusioner IDM sehingga perlu dilakukan bimbingan tenaga pendamping desa (PLD, PD kecamatan dan TAPM di Kabupaten)	Melakukan Rakor pemerintahan desa tingkat Kabupaten
		Tidak adanya komitmen Desa terkait Pelaksanaan Anggaran merealisasikan Rekomendasi dari hasil Pendataan IDM Tahun sebelumnya	Melakukan intervensi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Pendataan IDM Tahun sebelumnya dalam bentuk, yaitu: Melakukan sosialisasi pada saat pemerintahan desa menyusun musyawarah penetapan RKP desa dan melakukan pendampingan APBDes
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya SDM/Petugas medis dan tenaga lini lapangan di wilayah kepulauan. Jauhnya akses fasilitas kesehatan yang melayani KB, Terbatasnya Alkon di fasilitas kesehatan Kurangnya tenaga bidan yang terlatih dalam pemasangan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Penggunaan Aplikasi newsiga yang terupdate sesuai pendataan keluarga untuk mengetahui jumlah PUS, mengusulkan pelatihan CTU bagi tenaga Bidan desa, Menyediakan materi dan konseling berupa (APBK, leaflet) tentang kontrasepsi modern, Melakukan sosialisasi tentang Kontrasepsi Modern dan Metode Kontrasepsi jangka panjang melalui media RRI, Melayani Kontrasepsi melalui faskes terdekat, Mendistribusikan ALKON disemua faskes
		kurangnya kolaborasi petugas lini lapangan (PLKB,PKB dan kader PPKBD) dengan petugas medis bidan desa	Mengkolaborasikan petugas lini lapangan (PLKB,PKB dan kader PPKBD) dengan petugas medis bidan desa



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjuti
		untuk berkoodinasi terkait ibu pascasalin yang menggunakan alkon di wilayah setempat sehingga terjaring data KBPP nya	untuk berkoodinasi terkait ibu pascasalin yang menggunakan alkon di wilayah setempat sehingga terjaring data KBPP nya
		kurangnya edukasi dan konseling oleh Petugas bidan desa dan Petugas lini lapangan kepada ibu pasca salin di saat kunjungan nifas sekaligus membawa alkon yang di maksud. kecuali alkon MKJP di arahkan ke faskes terdekat	Meningkatkan edukasi dan konseling oleh Petugas bidan desa dan Petugas lini lapangan kepada ibu pascasalin di saat kunjungan nifas sekaligus membawa alkon yang di maksud.kecuali alkon MKJP di arahkan ke faskes terdekat
		Perlunya peningkatan peran dari Forum Generasi Berencana untuk pembinaan PIK-R	Reklame/spot materi stunting pada RRI, Baliho dan penyuluhan langsung pada remaja (GenRe go to school)/KIE melalui vidio, penyuluhan 1000 HPK di kelompok BKB setiap bulannya, melakukan KIE oleh TPK selama pendampingan pada kelompok sasaran
			Memaksimalkan INIGENTING (Implementasi GenRe mencegah Stunting)
14.	Perhubungan	Belum memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang uji KIR serta tidak memiliki peralatan yang memadai	Pengadaan tenaga ahli di bidang uji KIR dan pengadaan sarana prasana uji KIR
15.	Komunikasi dan Informatika	Keterbatasan Akses: keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet menghambat pelayanan umum yang optimal dalam bidang komunikasi dan informatika Penyediaan informasi masih terbatas	Koordinasi dalam rangka peningkatan system jaringan informasi
		Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur seperti Infrastruktur teknologi informasi yang kurang memadai atau tidak	Penyediaan sarana penunjang system jaringan internet



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		terawat dapat menghambat pelayanan yang optimal. Ini mencakup jaringan internet yang lambat, perangkat keras yang usang, dan perangkat lunak yang tidak terbaru	
16.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Minimnya modal usaha UMKM menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan jumlah pemasukan	Rutin melaksanakan rapat tahunan agar terjalin omunikasi dan koordinasi antar sesama anggota
		Kurangnya pengetahuan mengenai pengembangan usaha sehingga dapat mengakibatkan tidak adanya inovasi produk	Peningkatan pengawasan dan pemahaman pengurus koperasi
		Rendahnya pemahaman dan kompetensi para pengurus koperasi terutama di bidang akuntansi	Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha secara regular
		Minimnya pengawasan pengurus atau pengecekan terhadap kondisi dan aktivitas koperasi	Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha
17.	Penanaman Modal	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM secara periodik	pembinaan/ pendampingan dan pemberian informasi tentang LKPM
		Usaha di Kabupaten Natuna masih skala mikro, sehingga kontribusi terhadap nilai investasi masih kecil	Melakukan promosi secara intens untuk menarik minat calon investor dengan skala besar
		Masih belum optimalnya pembangunan antar sektor yang terintegrasi guna mendukung iklim investasi	Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan terintegrasi antar sektor terkait
18.	Kepemudaan dan Olahraga	Program wira usaha muda pemula belum tersosialisasi dengan baik	Melaksanakan sosialisasi dan pendataan program wirausaha muda pemula dari kecamatan sampai ke kelurahan dan desa
		Kurangnya modal usaha bagi wirausaha	Melakukan kerjasama dan koordinasi



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		muda dalam merintis usahanya	dengan layanan perbankan terhadap pinjaman lunak bunga rendah dan juga pinjaman tanpa bunga
		Kurangnya keterampilan dan keahlian wirausaha muda dalam melakukan inovasi produk	Melakukan pelatihan dengan membawa narasumber yang berkompeten ke daerah sasaran wirausaha muda pemula yang perlu mendapatkan bimbingan pelatihan dan keterampilan, dengan bekerjasama dengan BLK Disnakertrans
		Kurangnya informasi terhadap jangkauan pemasaran dengan kata lain pemasaran yang terbatas	Melaksanakan sosialisasi diverifikasi inovasi produk melalui layanan YouTube dan informasi lainnya
		Kurangnya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal	Melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang diperlukan dalam penyelenggaraan event atau kejuaraan
		Kurangnya kejuaraan atau event yang dilaksanakan pada tingkat pelajar	Menyelenggarakan event-event kejuaraan terutama ditingkat pelajar atau kelompok umur
		Terbatasnya sumber daya manusia dibidang olahraga terutama pelatih/wasit/juri sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi atlet yang ada di Kecamatan	Melakukan pengiriman pelatih /wasit/juri untuk mengikuti atau mengambil sertifikasi di cabang olahraga diluar daerah
		Kurangnya pengiriman atlet dalam mengikuti kejuaraan ditingkat Provinsi maupun tingkat nasional	Mengirimkan atlet yang berprestasi atau berpotensi untuk mengikuti kejuaraan ditingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional
19.	Statistik	belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral serta pencatatan data statistik daerah yang terintegrasi	Pembangunan metadata statistic sektoral
		dukungan SDM statistisi yang belum	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		tersedia	daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi
		Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung statistic sektoral	Pembangunan infrastruktur statistic sektoral pemerintah daerah
20.	Persandian	belum optimalnya sarana dan prasarana persandian	Penyediaan sarana prasarana persandian
		belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, keamanan informasi dan keterbatasan infrastruktur dan SDM pemerintah yang dapat memanfaatkan persandian	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah
21.	Kebudayaan	Belum terpenuhinya SDM cagar budaya dan permuseuman	melakukan bimbingan teknis dan sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya
		Belum terbentuknya Tim Ahli cagar budaya dan Tim Pendaftaran cagar budaya	Membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya
22.	Perpustakaan	Belum ada penetapan zonasi survei oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan penetapan zonasi survei secara berkala dan berkesinambungan
		Belum ada penyusunan roadmap Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat	Menyusun roadmap Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Natuna
		Dinas Perpustakaan tidak memiliki tenaga /sumber daya manusia yang profesional dan terampil untuk mencapai hal tersebut	Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas melakukan survey TGM
		Belum maksimalnya memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan survei TGM bagi wilayah Kepulauan Natuna yang terdiri dari laut dan pulau-pulau	Memanfaatkan teknologi Informasi dalam melakukan survey TGM
23.	Kearsipan	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan yang berkompeten di OPD	Bimtek pengembangan kompetensi kearsipan untuk seluruh OPD
		Kurangnya Sarana dan prasarana	Pengadaan prasarana pendukung



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		pendukung untuk pengolahan arsip	kearsipan seperti: Pembangunan depo kearsipan, pengadaan rak arsip sesuai standar, box arsip, filing cabinet, scaner, dan lain-lain sesuai standar kearsipan
24.	Kelautan dan Perikanan	Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai (armada tangkap ,API, ABPI)	Pengadaan alat bantu tangkap bagi nelayan (radio, cool box/fiber box, fish finder, GPS, radar)
		Kemampuan SDM perikanan tangkap masih rendah dalam pemanfaatan alat bantu dan alat tangkap modern	Pendampingan kepada nelayan-nelayan
		Kemampuan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan belum optimal	Penyuluhan kepada kelompok pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kelompok pengolah hasil perikanan
25.	Pariwisata	Kendala transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna(biaya transportasi yang tinggi)	Koordinasi dengan kementerian terkait tentang biaya transportasi Natuna
		Status kepemilikan lahan objek wisata masih milik masyarakat sehingga pengelolaan belum optimal	Pengadaan lahan objek wisata
		Masih lemahnya SDM pengelolaan objek wisata	Pelatihan sumber daya manusia pariwisata
		Masih kurangnya sarana prasarana dan infrastruktur pendukung di objek wisata(amenitas)	Pengadaan sarana prasarana di objek wisata
26.	Pertanian	Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas	Pengadaan sarana jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani, jalan produksi
		Masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian	Pengadaan Tenaga Penyuluh Pertanian
		Masih tingginya biaya operasional pertanian	Pemberian pupuk subsidi, Pengadaan bibit obat-obatan pertanian



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjuti
27.	Perdagangan	Kualitas dari produk masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas kemasan, daya tahan produk, harga produk dan sertifikasi produk sehingga dapat bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain	Melakukan fasilitasi produk serta pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas dan mutu produk dengan cara pemberian fasilitasi mulai dari pengemasan produk, bagaimana produk dapat bertahan lebih lama tanpa mengurangi rasa maupun warna produk itu sendiri, pemberian fasilitasi sertifikasi halal
		Pemahaman UMKM terhadap penggunaan teknologi yang masih rendah, sehingga produk yang dihasilkan masih bersifat lokal	Melakukan pendampingan secara rutin oleh aparatur dan mengadakan sosialisasi terkait pemahaman teknologi informasi kepada pelaku usaha dalam meningkatkan pemasaran produk
		Belum bisa memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar akibat keterbatasan SDA maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki	Mengadakan acara temu bisnis dengan melibatkan para stakeholder, e-commerce dan Bank Imbara untuk memperluas akses penguatan modal usaha serta pemasaran produk UMKM
28.	Perindustrian	Masih belum validnya data perusahaan industri kecil terutama industri rumah tangga	Melakukan monev dan validasi data IKM secara menyeluruh dan berkelanjutan
		Masih rendahnya jumlah IKM yang bisa mengisi data perusahaan ke dalam aplikasi SIINAS	Memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan IKM supaya dapat mengakses aplikasi SIINAS dengan mudah
		Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur dalam melakukan pendampingan pengisian SIINAS	Penambahan jumlah aparatur yang terampil dalam melakukan pendampingan pengisian data IKM ke dalam SIINAS
		Belum adanya perda RPIK	Melaksanakan percepatan Ranperda RPIK menjadi Perda serta melakukan



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
			evaluasi secara berkala terhadap sentra IKM yang telah didirikan agar menjadi evaluasi untuk prospek pembangunan sentra lainnya dalam meningkatkan pembangunan industri kabupaten
29.	Transmigrasi	Belum terselesaikannya pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang
		Belum terselesaikannya sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 karena berada dalam kawasan hutan HPK seluas 1.461 Hektar yang masih dalam proses pelepasan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan 114 APL	Penyelesaian sertifikasi lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang lokasi SKP.B kecamatan bunguran batubi SP.1, SP.2, SP.3 dan 114 APL
		Belum terselesaikannya sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi Natuna	Penyelesaian sertifikasi aset transmigrasi di 6 desa/SP ekstranmigrasi di kawasan transmigrasi Natuna
		Belum terukur dan tertatanya batas HPL murni transmigrasi yang belum dimanfaatkan untuk pemukiman transmigrasi secara keseluruhan	Melakukan monitoring dan pemeliharaan tanda batas HPL transmigrasi
30.	Sekretariat Daerah	Tingkat pemahaman Perangkat Daerah dalam interpretasi data dan konsistensi data LPPD masih rendah sehingga sering terjadi kesalahan pemenuhan	Rapat koordinasi (rakor) LPPD dengan Perangkat Daerah pengampu indikator LPPD, serta melakukan pendampingan dan kunjungan langsung untuk



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
		data. Perangkat Daerah juga belum menjadikan data indikator LPPD ini sebagai data kinerja yang harus dipenuhi setiap tahun	menjemput data agar kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif
31.	Perencanaan	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan Masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan	Pelatihan aparatur yang membidangi perencanaan
32.	Keuangan	Rasio PAD sebesar 7,87 persen menunjukan masih kecilnya perbandingan PAD terhadap total pendapatan dalam APBD. Hal ini dikarenakan belum optimalnya PAD yang dikarenakan masih kecilnya potensi PAD diluar Pajak MBLB dan belum optimalnya penerimaan dari sumber-sumber PAD seperti Pajak Parkir, Sarang Burung Walet dan Pajak Restoran	Peningkatan PAD melalui pengelolaan sumber-sumber PAD seperti Pajak Parkir, Sarang Burung Walet dan Pajak Restoran
33.	Kepegawaian	Terbatasnya fasilitas pendidikan tinggi di Kabupaten Natuna selain Universitas Terbuka dan STAI Natuna	Mendorong pegawai untuk menempuh pendidikan tinggi lewat Universitas Terbuka dan STAI Natuna sesuai dengan kebutuhan daerah
		Belum optimalnya rencana peningkatan jenjang pendidikan PNS	Menyusun rencana peningkatan mendorong pegawai untuk pendidikan PNS dalam satu jenjang waktu panjang, menengah dan tahunan
		Belum ada alternatif pembiayaan peningkatan pendidikan bagi PNS	Mencari terobosan pembiayaan pendidikan tinggi bagi para pegawai dibiayai oleh pihak sponsorship atau



NO	Urusan	Permasalahan	Tindaklanjut
			pihak ketiga
34.	Pengelolaan Perbatasan	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan sarana dan prasarana kawasan perbatasan
35.	Inspektorat	Belum optimalnya kualitas SDM dalam penerapan SPIP di perangkat daerah	Melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan SPIP di perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah
		Belum optimalnya penerapan regulasi terkait SPIP	Mendorong penerapan SPIP sesuai dengan regulasi dan ketentuan berlaku
		Masih rendahnya kompetensi kapabilitas APIP	Pemenuhan kualitas dan kuantitas APIP dengan cara meningkatkan kompetensi APIP dan pemenuhan jumlah APIP sesuai peta jabatan
		Cakupan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang belum optimal	Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

B. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Pokok-pokok pikiran



DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pada tahun 2025 arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Dukung Dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia”. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan program pembangunan yakni penataan Drainase untuk penanganan genangan dan pencegahan banjir, optimalisasi peningkatan jalan, peningkatan sanitasi, peningkatan air bersih, penyediaan perlengkapan jalan untuk keselamatan lalu lintas, pengadaan keselamatan pelayaran, peningkatan rumah ibadah dan penataan kawasan kumuh, penyediaan sarana pendukung pelayanan kesehatan di puskesmas, penyediaan sarana prasarana sekolah, penyediaan sarana prasarana keolahragaan, Pembangunan pasar rakyat, sarana dan prasarana pertanian (pembangunan/pemeliharaan jalan usaha pertanian dan jalan produksi, pengembangan peternakan, peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian, peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Natuna disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. T-IV.7
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna Yang Menampung Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024
1	Peningkatan Ekonomi Daerah	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pertanian
		Urusan Perdagangan
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna Yang Menampung Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024
		Urusan Perhubungan
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Urusan Pendidikan
		Urusan Kesehatan
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga

2. Pendekatan Integratif

Pendekatan Integratif pada RKPD Kabupaten Natuna 2025 dilaksanakan dalam rangka memprioritaskan penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting dan pencapaian SPM. Adapun pendekatan integratif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a. Pengentasan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Natuna pada 2023 sebesar 5,25 persen atau turun 0,07 persen dibandingkan pada tahun 2022. Garis Kemiskinan di Kabupaten Natuna pada 2023 lebih besar dibandingkan 2022. Garis kemiskinan 2023 berada pada Rp480.103,-/kapita/bulan, sementara tahun sebelumnya yaitu 2022, Garis Kemiskinan berada pada Rp449.302,-/kapita/bulan. Pada 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Natuna mencapai 4,30 ribu orang (5,25 persen). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Natuna pada tahun 2023 berada pada nilai 0,70 poin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Natuna pada tahun 2023 berada pada nilai 0,14 poin.

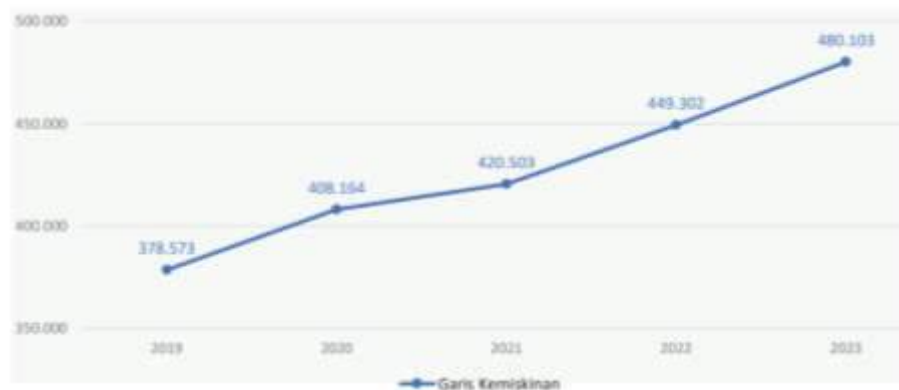
Perkembangan Garis Kemiskinan 2019-2023

Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai



ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan. Besaran nilai kebutuhan hidup minimum ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yang menjadi batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan (Garis Kemiskinan Makanan) dan non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan) untuk menggolongkan seseorang termasuk miskin atau tidak. Gambar G-IV.8 menunjukkan bahwa pada periode 2019-2023 terjadi peningkatan GK. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, besaran Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna adalah Rp480.103,-/ kapita/bulan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terdapat penduduk Kabupaten Natuna dengan pengeluaran di bawah Rp480.103 perbulan maka penduduk tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 dimana Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp449,302,- terlihat adanya peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 6,86 persen dalam setahun terakhir.

Gambar. G-IV.8
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023



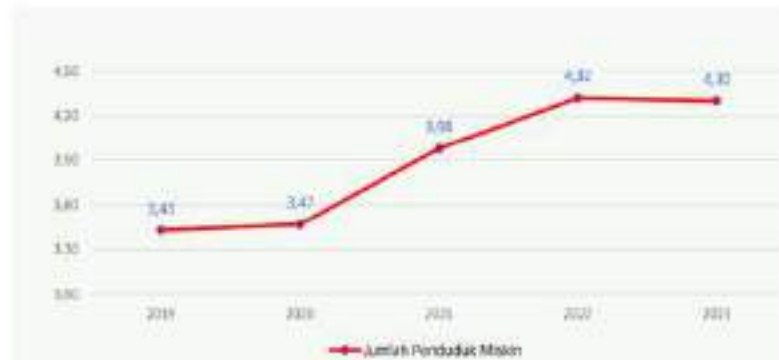
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna 2019-2023

Pada periode 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi mencapai 0,51 ribu orang, namun pada periode 2022-2023 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kabupaten



Natuna pada tahun 2023 sebesar 4,3 ribu orang dari yang sebelumnya 4,32 ribu orang pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,02 ribu orang

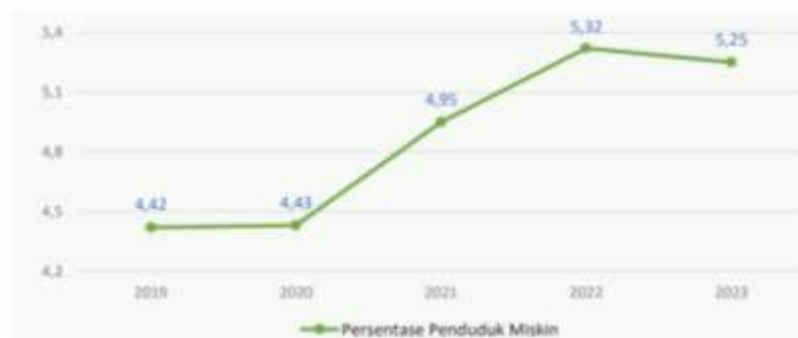
Gambar. G-IV.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Ribuan Orang) Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023



Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Natuna 2019-2023

Peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2020-2021 dimana terjadi peningkatan dari 4,43 persen menjadi 4,95 persen atau sekitar 0,52 persen. Pada periode 2022-2023 terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna sebesar 0,07 persen dari tahun 2022. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 5,25 persen.

Gambar. G-IV.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan



Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ditetapkan 3 jenis program yang terbagi dalam

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, antara lain:
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun Program Prioritas yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna antara lain:

Tabel. T-IV.8
Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025

NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian alat bantu dan alat bantu peraga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	750.000.000
2.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pelaksanaan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi bagi KPM Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	150.000.000
		Pembinaan dan Pemberian Bantuan modal bagi pelaku Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	200.000.000



NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.000.000
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	390.000.000
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	187.500.000
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.770.750.000
		Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200.000.000
7.	Program Pengembangan UMKM	Pelaksanaan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	80.000.000
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90	80.000.000
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	400.000.000



NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
10.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula	50.000.000
11.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan IMD di semua PKM dan RSUD, Pengadaan Susu Ibu hamil KEK, gibur dan gikur	1.100.000.000
		Pembayaran premi peserta PBI daerah dan mandiri	15.000.000.000
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MTBS dan MTBN di semua Puskesmas, Pelaksanaan Operasi timbang, Pelatihan SDIDTK, Pendataan sasaran, pertemuan pengentian data e-PPGM	564.000.000
		Melakukan kunjungan rumah, pendataan sasaran, Workshop peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan Bayi baru lahir dan Komplikasi	397.000.000
12.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan sarana prasarana dikawasan permukiman kumuh (jalan permukiman, keteraturan bangunan, sarana air bersih, sarana persampahan, pengelolaan limbah, pendeteksi kebakaran)	6.275.000.000
13.	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan rumah tidak layak huni	750.000.000
		9 unit rumah korban bencana	390.000.000
14.	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	32.800.290.000
		Pengelolaan Manajemen BOS Sekolah Dasar, Bimtek/ Pendampingan	



NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (Mendukung Pencapaian SPM)	8.553.750.000
		Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Dana BOS SMP	
		Pembinaan Penggunaan Dana BOSP dan BOSPD	150.000.000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	4.306.981.419
15.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan sambungan Air Limbah dan tanki septik individual	4.032.700.000
16.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyediaan sambungan rumah air minum/air bersih	670.000.000
17.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi 16 Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	841.100.000
18.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Bandara Perintis	300.000.000
19.	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan Pelabuhan	4.950.000.000
20.	Program PengarusUtamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pembinaan dan bantuan peralatan untuk industri rumahan	100.000.000.
21.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.585.000.000
22.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengadaan Induk Ikan, Penyediaan Obat-obatan dan Vitamin, Penyediaan Pakan Ikan, Penyediaan Sarana Budidaya Pakan Alami,	1.100.000.000



NO	PROGRAM	DETAIL KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
		Penyediaan Sarana Peralatan Laboratorium, Sarana Budidaya Ikan Air Laut, Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	
23.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan Kompor, Penyediaan Mesin Pentol, Penyediaan Mixer, Penyediaan Oven Pengering, Penyediaan Para-para/tempat penjemuran ikan, Penyediaan Pengisar Ikan, Penyediaan Peralatan Pengolahan Ikan, Penyediaan Sealer	3.373.790.711
24.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	462.500.000
25.	Program Pengelolaan Sumber DayaEkonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Masyarakat	56.918.000
26.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Kemasan Pangan	485.418.000

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Berdasarkan target penurunan angka kemiskinan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 dan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Natuna. Ditargetkan pada tahun 2025 angka kemiskinan di Kabupaten Natuna turun menjadi sebesar 3,8%.



b. Penurunan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (sumber: Perpres 72 Tahun 2021)

Stunting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Permasalahan stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses terhadap pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita.

Permasalahan stunting saat ini menjadi masalah nasional yang harus dicegah secara bersama-sama mulai dari Kementerian Lembaga sampai dengan tingkat pemerintahan desa. Permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari Reformasi Birokrasi Tematik yang menjadi atensi untuk di cegah, dimana dampak stunting tidak hanya pada tumbuh kembang anak saja, namun secara ekonomi juga berdampak. Untuk itu komitmen menjadi sangat penting untuk dapat menurunkan prevalensi Stunting menjadi sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Natuna juga sedang menghadapi permasalahan stunting, dimana angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 18% dan kondisi ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,8%, jika dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024, tentu perlu kerja keras secara bersama-sama untuk menekan angka stunting ini.



Gambar. G-IV.11
Prevalensi Stunting Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023



demikian halnya dengan hasil pengukuran ePPGBM juga mengalami kenaikan dari 11,77% (2021) naik menjadi 11,93% (2022) dan naik kembali menjadi 12,66% (2023).

Pelaksanaan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Natuna belum berjalan dengan baik dan berakibat pada masih tingginya prevalensi stunting Kabupaten Natuna, hal ini disebabkan oleh :

1. Lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah pengampu stunting dengan kecamatan dan desa dalam kegiatan penurunan stunting.
2. Aksi penurunan stunting belum terlaksana secara terpadu dan terintegrasi dimana masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan dan desa berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dan belum terfokus pada kelompok sasaran.
3. Asupan air susu ibu (ASI) eksklusif rendah
4. Masih tingginya Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
5. Masih rendahnya Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan 10 indikator yang digunakan sebagai variabel pengukur.



6. Rendahnya pelayanan KB Pasca salin, akan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan terjadinya kehamilan yang terlalu rapat.
7. Masih adanya ketidaktepatan sasaran pemberian makanan tambahan
8. Lemahnya pendampingan keluarga berisiko stunting dan rendahnya literasi masyarakat tentang stunting
9. Rendahnya akses sanitasi layak dan akses air minum layak

Berdasarkan analisa permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu peningkatan kinerja yang berdasarkan pada indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 antara lain:

Tabel. T-IV.9
Program Penurunan Stunting Tahun 2025

No	Program	Target	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
1	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Remaja putri	58%	30.000.000
2	Pemeriksaan status anemia (hemoglobin) bagi Remaja putri	90%	400.000.000
3	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Calon pengantin / calon ibu	90%	60.000.000
4	Pemeriksaan kesehatan bagi Calon pasangan usia subur (PUS) sebagai bagian dari pelayanan pra nikah	90%	60.000.000
5	Pemberian tambahan asupan gizi bagi Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	90%	350.000.000
6	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Ibu hamil minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80%	150.000.000
7	Peningkatan edukasi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif Bayi usia kurang dari 6 bulan	80%	60.000.000
8	Peningkatan edukasi dalam pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Anak usia 6-23 bulan	80%	50.000.000
9	Pelayanan tata laksana gizi buruk bagi Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk	90%	180.000.000



No	Program	Target	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
10	Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada Anak berusia di bawah lima tahun (balita)	90%	56.000.000
11	Pemberian tambahan asupan gizi pada Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang	90%	80.000.000
12	Pemberian imunisasi dasar lengkap pada Balita	90%	100.000.000
13	Peningkatan edukasi dan pemahaman bagi Keluarga dalam hal Stop BABS	90%	250.000.000
14	Peningkatan edukasi bagi Keluarga dalam melaksanakan PHBS	70%	65.000.000
15	Peningkatan edukasi bagi desa/kelurahan dalam melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	180.000.000
16	Mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100%	273.000.000
17	Peningkatan edukasi bagi Desa/Kelurahan dalam perilaku buang air besar sembarangan (ODF)	90%	300.000.000
18	Peningkatan edukasi target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	70%	150.000.000
19	Pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu sesuai standar	90%	150.000.000
20	Pelaksanaan audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) Stunting	50%	80.000.000
21	Penyediaan bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	100%	500.000.000
22	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	1 Publikasi /tahun	20.000.000
23	Pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah bagi calon Pasangan Usia Subur (PUS)	90%	200.000.000



No	Program	Target	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
24	Fasilitasi pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	90%	44.467.142
25	Fasilitasi pemberian bantuan pangan nontunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	90%	44.467.142
26	Fasilitasi pemberian Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu	90%	44.467.142
27	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi bagi Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	90%	44.467.142
28	Fasilitasi pemberian variasi bantuan pangan selain beras dan telur Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta	90%	44.467.142
29	Fasilitasi Pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Keluarga Miskin dan rentan	90%	44.467.142
30	Fasilitasi pemberian bantuan sosial pangan Jumlah keluarga miskin dan rentan	15.600.039 Jiwa	44.467.142
31	Jpendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Semua PKH	44.467.142
32	Peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting bagi pemerintah desa	Seluruh Desa	174.385.000
33	Pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi kader pembangunan manusia di Desa	90%	218.000.000



No	Program	Target	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
34	Integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	100%	218.000.000
35	Peningkatan alokasi dana desa/kelurahan dalam upaya melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	90%	290.000.000
36	Konvergensi percepatan penurunan stunting desa/kelurahan	80%	290.000.000
37	Pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	Min. 2x dalam 1 Tahun	174.385.000
38	Desa/kelurahan Bebas Stunting	100%	30.000.000
39	Peningkatan peran pemerintah desa agar berkinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	90%	30.000.000
40	Pelatihan berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 Orang	12.350.000
41	Pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota bagi guru PAUD	90%	12.350.000
42	Pengembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	70%	12.350.000
43	Unmet Need pelayanan keluarga berencana	7,4%	12.350.000
44	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	70%	9.450.000
45	Pendampingan Keluarga berisiko stunting	90%	300.300.000
46	Menurunkan angka Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5%	352.360.000



No	Program	Target	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
47	Penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	100%	9.061.290.000
48	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90%	100.000.000
49	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	90%	200.000.000
50	Meningkatkan akses air minum layak bagi rumah tangga	100%	240.000.000
51	Meningkatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak bagi rumah tangga	90%	1.945.000.000
52	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50%	316.768.000
53	Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri bagi berisiko stunting	90%	300.000.000
54	Melaksanakan Kampanye nasional pencegahan Stunting	3 kanal/ metode setiap bulan	150.000.000
55	Melaksanakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota	Min. 1x dalam 1 Tahun	5.000.000
56	Melaksanakan rembuk stunting tingkat kecamatan	Min. 2x dalam 1 Tahun	7.200.000
57	Rangkaian pemilihan duta GENRE dan sosialisai TRIAD KRR pada remaja	1 Kegiatan	92.427.000
58	Menyelenggarakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Min. 1x dalam 1 Tahun	250.000.000



No	Program	Target	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
59	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Min. 2x dalam 1 Tahun	250.000.000
60	Melaksanakan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	Min. 2x dalam 1 Tahun	5.000.000
61	Melaksanakan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting bagi Pasangan calon pengantin	90%	100.000.000

(Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Berdasarkan hasil rembug stunting dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Natuna. Ditargetkan pada tahun 2025 stunting di Kabupaten Natuna turun menjadi sebesar 10,2%. Adapun dalam rangka pencapaian target penurunan stunting 2025 tersebut dilakukan inovasi seperti:

1. Membangun Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah Stunting Atau Yang Disingkat SIPENTING yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menjadi instrumen bagi Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penanganan stunting yang dilaksanakan secara holistic, integratif, tematik dan spasial.
2. Memberikan edukasi serta penyampaian informasi pentingnya asi eksklusif dengan pendekatan ke calon bapak melalui pertemuan kelas ibu hamil. Basa Basi (Bapak Sayang Anak Istri Bapak Asi) yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK.
3. Membuka layanan konseling gizi dan pos gizi yang kegiatannya meliputi: pemberian PMT bagi balita gizi kurang dan ibu hamil KEK, membuat kelas pertemuan yang bertujuan untuk merubah pola pikir, pola asuh, pola makan bagi balita dan ibu hamil yang dilakukan oleh Puskesmas.



4. Membuat Vlog yang bertujuan untuk meng Edukasi Remaja Tentang Pernikahan Dini yang digagas oleh TP PKK Kabupaten Natuna.
5. Memberikan bingkisan kepada balita yang datang ke Posyandu, bertujuan untuk meningkatkan kunjungan balita ke Posyandu.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Indikator pendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Natuna pada RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu:

1. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada bidang pendidikan, sudah mencantumkan muatan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Teknis Minimal Pendidikan. Target indikator SPM bidang pendidikan pada Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:



Tabel. T-IV.10
Target Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target 2025	Pagu Anggaran
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar	100	11.174.334.416
		Jumlah Warga Negara usia 13-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	7.838.750.000
2.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	4.306.981.419
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	15.488.090.000

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yaitu:

Tabel. T-IV.11
Target Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2.440.930.400
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	500.000.000



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	100	397.000.000
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	564.000.000
5.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	100	431.970.000
6.	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Produktif	100	532.000.000
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	350.000.000
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100	485.000.000
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100	468.000.000
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	583.000.000
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	580.000.000
12.	Pelayanan Kesehatan orang resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	655.000.000

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum ditinjau dari sejumlah indikator yang mencerminkan hasil dalam pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur ke-PU-an seperti: jalan/jembatan, irigasi dan infrastruktur keciptakarya.

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. T-IV.12
Target Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
01.00	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100	670.000.000
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	200.000.000
	3. Jaringan perpipaan	100	1.764.499.000
	4. Jaringan bukan perpipaan	100	1.542.000.000



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		
	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestic	100	4.032.700.000
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestic	100	659.000.000
	3. Sub-sistem pengolahan setempat	100	4.032.700.000
	4. Sub-sistem pengangkutan	100	150.000.000
	5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	100	659.000.000
	6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	100	659.000.000

4. Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Nenteri Pekerjaan Umum dab Perumakahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Umum disebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). Selanjutnya dalam Pasal 3 ditegaskan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Tabel. T-IV.13

Target Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	390.000.000
2.	Rehabilitasi rumah korban bencana	100	150.000.000
3.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	100	380.000.000



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
4.	Dampak relokasi program pemerintah Kabupaten /Kota	100	3.000.000.000
5.	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah dan atau Bangunan	100	245.000.000

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja)

Ada 4 Perangkat Daerah yang mengampu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keadaan masyarakat yang tentram, damai, kondusif merupakan harapan dari pemerintah dan masyarakat, sehingga segala kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan tentram, tertib, dan teratur.

Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. T-IV.14
Target Indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
01.00	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		
	1. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100	1.120.550.000
	2. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100	
	3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP	100	
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	100	
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100	
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100	



Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. T-IV.15
Target Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		700.000.000
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100	
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara di kawasan rawan bencana	100	
	3. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	100	
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100	
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100	
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100	
02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		2.352.124.000
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	100	
	2. Peningkatan kapasitas personil / Sumber Daya Manusia (SDM)	100	
03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		620.000.000
	1. Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	100	
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	100	
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	100	
	4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	100	
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100	



Beberapa indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. T-IV.16
Target Indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		
	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi	100	200.000.000
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100	376.450.000
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100	2.218.700.000
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia	100	465.000.000

6. Sosial

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan di setiap daerah pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga berlaku untuk garis kemiskinan di Kabupaten Natuna, yang terus meningkat sampai dengan tahun 2023:

Tabel. T-IV.17
Target Indikator SPM Dinas Sosial Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	150.000.000
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	100	300.000.000



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan	Target 2025	Pagu Anggaran
	panti		
3	Jumlah lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	
4	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	
5	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100	50.000.000

3. Pendekatan Spasial

Pendekatan Spasial dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Pendekatan spasial juga berkaitan dengan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan) dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan) yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 terdiri beberapa kawasan yaitu:

1. Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

a. kawasan tanaman pangan;



- b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- a. Kawasan tanaman pangan seluas lebih kurang 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar yang berada di: Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan Timur.
- b. Kawasan hortikultura seluas lebih kurang 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Tengah.
- c. Kawasan perkebunan seluas lebih kurang 44.954 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.
- d. Kawasan peternakan seluas lebih kurang 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar yang berada di Kecamatan Bunguran Selatan.
2. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya.



- a. Kawasan perikanan tangkap seluas lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan.
- b. Kawasan perikanan budidaya seluas lebih kurang 529 (lima ratus dua puluh sembilan) hektar yang berada di: Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Barat.

Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan.

3. Kawasan Pariwisata sebagaimana seluas lebih kurang 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang berada di: Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.

Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa OPD untuk diintegrasikan dan diselaraskan dalam RKPD Kabupaten



Natuna tahun 2025. Pendekatan Spasial tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. T-IV.18
Pendekatan spasial dalam RKPD 2025

No	Sektor	Fokus Pembangunan Berdasarkan Pendekatan Spasial	Lokasi
1.	Perikanan	Perikanan Tangkap: Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (ABPI), seperti GPS, fish finder, cool box, radio, fiber box dll	Kabupaten Natuna
		Perikanan Budidaya: Pelatihan/Magang/Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pendampingan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil, Kajian Potensi dan Pengembangan Perikanan Budidaya, Penyediaan Prasarana Ikan Air Laut(kolam), Revitalisasi/Pembangunan KJT, Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar, Pengadaan Induk Ikan, Penyediaan Obat-obatan dan Vitamin, Penyediaan Pakan Ikan, Penyediaan Sarana Budidaya Pakan Alami	Kabupaten Natuna
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan: Penyediaan Mesin penggiling daging, Penyediaan Oven Pengering, Penyediaan Para-para/tempat penjemuran ikan, Penyediaan Pengisar Ikan	Kabupaten Natuna
		Pembangunan Infrastruktur Jalan: Pembangunan jalan menuju balai benih ikan (BBI) dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga
		Pembangunan jalan lingkar menuju tempat pelabuhan/ pelelangan ikan	Kecamatan Pulau Tiga
2.	Sektor Pertanian	Tanaman Pangan: Bantuan Kelompok Tani Tahab penumbuhan P2L (bantuan bibit, pemberdayaan kelompok dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk menghasilkan tanaman pangan dan hortikultura adapun bantuan yang diberikan adalah pemberian dana dan bantuan berupa bibit (padi, jagung, cabe), pupuk, cadangan pemerintah	Kabupaten Natuna



No	Sektor	Fokus Pembangunan Berdasarkan Pendekatan Spasial	Lokasi
		yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah/bencana	
		Tanaman Hortikultura: Pemberian bantuan pupuk dan obat-obatan tanaman hortikultura seperti bibit (durian, lengkeng rambutan)	Kabupaten Natuna
		Perkebunan: Kawasan Perkebunan: pemberian bantuan pupuk dan obat-obatan tanaman perkebunan, bibit (kelapa, cengkeh)	Kabupaten Natuna
		Infrastruktur Jalan: Pembangunan jalan menuju pusat perkebunan dan pertanian	Kecamatan Bunguran Batubi dan Kecamatan Bunguran Selatan
		Peternakan: Pengadaan bibit sapi dan bantuan obat-obatan hewan dan obat inseminasi buatan, penyuluh	Kecamatan Bunguran Selatan
3.	Sektor Pariwisata	Pembangunan sarana prasarana pariwisata dan pelatihan kelompok sadar wisata	Kecamatan Bunguran Timur
		Pembangunan pelabuhan tanjung pala untuk mendukung objek wisata pulau semiun dan sekatung	Kecamatan Pulau Laut
		Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata, pembebasan lahan objek wisata lokasi Tanjung Datuk Kecamatan Bunguran Utara	Kecamatan Bunguran Utara
		Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata	Kecamatan Bunguran Timur Laut
		Pemeliharaan landmark geopark natuna di pantai piwang, Pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di laman GIC / TIC Natuna, Pemeliharaan sarana dan prasarana wisata mangroove pering, Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata, Pembebasan lahan objek wisata mangrove pering Kecamatan Bunguran Timur, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata di Batu Kapal,	Kecamatan Bunguran Timur



No	Sektor	Fokus Pembangunan Berdasarkan Pendekatan Spasial	Lokasi
		pembangunan jalan menuju objek wisata gunung ranai	
		Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata, pembebasan lahan lokasi objek wisata Batu Kasah Kecamatan Bunguran Selatan (objek wisata batu kasah), Pekan expo pulau akar desa cemaga	Kecamatan Bunguran Selatan
		Promosi pariwisata Festival kota apung sedanau, pembangunan jalan objek wisata pasir maros	Kecamatan Bunguran Barat
		Festival jelajah pulau setanau, pelabuhan di desa sabang mawang dan sabang mawang barat untuk mendukung objek wisata setanau	Kecamatan Pulau Tiga
		Festival kenduri melayu pulau tiga barat	Kecamatan Pulau Tiga Barat
		Peningkatan jalan menuju objek wisata pulau midai	Kecamatan Midai
		Pembangunan jalan menuju objek wisata pantai sisi	Kecamatan Serasan

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

4.6. Sustainable Development Goals (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;



4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Program Berkelanjutan Kabupaten Natuna pada RKPD tahun 2025 direncanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sesuai dengan tujuan SDG's yaitu:

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan penghasilan bagi petani serta meningkatkan sistem produksi pangan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan untuk masyarakat di pedesaan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan.
5. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan perempuan.
6. Meningkatkan Ketersediaan air bersih di wilayah pedesaan.
7. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.



8. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
9. Meningkatkan standar hidup layak dan perlakuan yang adil terhadap akses layanan publik.
10. Menyediakan rumah layak huni.
11. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
12. Peningkatan sumber daya manusia tentang tanggap bencana pada masyarakat untuk mengantisipasi berbagai bencana seperti banjir, longsor, gempa dll.
13. Mengoptimalkan penangkapan ikan dan hasil laut serta penggunaan metode penangkapan yang ramah lingkungan.
14. Mengurangi terjadinya pembalakan hutan dan melakukan perlindungan hewan dan tanaman.
15. Meningkatkan sistem tata kelola yang efektif, akuntabel dan transparan, serta bersifat inklusif dan melibatkan berbagai tingkatan pengambilan keputusan.

Tabel. T-IV.19
Program Pencapaian Target **SDG's** dalam **RKPD 2025**

No	Program Pencapaian Target SDG's	Pagu Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	520.000.000
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000
3.	Program Pemberdayaan UMKM	2.170.750.000
4.	Program Pengembangan UMKM	2.170.750.000
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.189.719.000
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.051.520.000
7.	Program Pengelolaan Pendidikan	80.432.530.000
8.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.850.000.000
9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	900.000.000
10.	Program Pengelolaan Pelayaran	9.123.720.000



No	Program Pencapaian Target SDG's	Pagu Anggaran
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.167.481.000
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.195.000.000
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	720.000.000
14.	Program Pengembangan Perumahan	4.300.000.000
15.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.750.287.000
16.	Program Penanggulangan Bencana	1.601.000.000
17.	Program Penanggulangan Bencana	250.000.000
18.	Program Pendaftaran Penduduk	370.000.000
19.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	125.000.000
20.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	875.920.000
21.	Program Hubungan Industrial	150.000.000

4.7. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah direncanakan sebagai salah satu penanda tingkat sasaran pada kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan. Selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana tabel di bawah, perkembangan pencapaiannya dengan tren cenderung menurun, hal ini disebabkan karena jumlah inovasi yang diusulkan, indikator rancang bangun, sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi, kualitas inovasi, kecepatan inovasi dan kemanfaatan belum terpenuhi secara optimal.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna selama 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel. T-IV.20
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna

No	Penilaian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Skor	0	2.333	49,05	39,16	37,10
2	Kategori	Tidak Mengisi data	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

(Sumber : Kementerian Dalam Negeri)



Daftar inovasi tahun 2022 dan 2023 yang telah diperlombakan dalam Lomba Inovasi daerah serta diusulkan dalam Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel. T-IV.21
Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan 2023

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Inovasi
1	Gajah Mina	Pelayanan Publik	Penanaman Modal
2	Sidatok	Pelayanan Publik	Perpustakaan
3	Kuat Siap	Pelayanan Publik	Kesehatan
4	Pelanduk Bersemedi	Pelayanan Publik	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Kadoku "Ketapel Getah"	Pelayanan Publik	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Sibakso	Pelayanan Publik	Sosial
7	Labor Cerdas	Pelayanan Publik	Pendidikan
8	Berisik	Pelayanan Publik	Pendidikan
9	Muslah	Pelayanan Publik	Pendidikan
10	Pembelajaran Kreatif Bahasa Indonesia Melalui VR Millealab	Lainnya	Pendidikan

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Dalam upaya meningkatkan Indeks Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan monitoring terhadap inovasi yang telah diusulkan serta melakukan fasilitasi kepada semua rencana inovasi yang akan diusulkan oleh perangkat daerah dan masyarakat. Diseminasi dan rapat koordinasi dilakukan untuk penyebaran informasi inovasi yang lebih luas serta memantau perkembangan inovasi. Inovasi yang belum matang difasilitasi untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang optimal, melalui pendampingan terhadap pihak-pihak yang mengusulkan inovasi. Inovasi tahun 2023 yang difasilitasi untuk dimatangkan dan akan diusulkan pada IGA 2024 sebagai berikut:



Tabel. T-IV.22
Inovasi Daerah Tahun 2023 yang Diusulkan pada IGA 2024

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Inovasi
1	Tasty Peanut Oil	Pelayanan Publik	Pendidikan
2	Iron Man Math	Pelayanan Publik	Pendidikan
3	Sulam	Pelayanan Publik	Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Undang-undang
4	Pasti Kurasakan	Pelayanan Publik	Kelautan dan Perikanan
5	Si Piwang	Pelayanan Publik	Lingkungan Hidup
6	Bermarga	Pelayanan Publik	Pendidikan
7	Si Eva	Lainnya	Pendidikan
8	Sismonkab	Tata Kelola Pemerintahan	Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Undang-undang
9	Natuna Lawa	Lainnya	Pariwisata

(Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Daftar inovasi 2023 yang akan diusulkan pada Innovative Government Award 2024 sebagaimana tabel di atas masih sebatas usulan inovasi yang telah diinput dalam Sistem Aplikasi berbasis web “Si Indah”. Si Indah merupakan akronim dari Sistem Informasi Inovasi Daerah merupakan terobosan/inovasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang bertujuan untuk mempermudah bagi pengusul inovasi dalam menyampaikan proposal inovasi.

4.8. Pembangunan Spesifik Daerah

Wilayah atau region merupakan suatu bagian yang ada di permukaan bumi dengan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Pembangunan berdasarkan spesifik daerah merupakan pendekatan pembangunan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di daerah berdasarkan karakteristik wilayah. Kabupaten Natuna mempunyai karakteristik wilayah yang mempunyai unsur-unsur geologi yaitu geopark.



Geopark Nasional Natuna

Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (outstanding) termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat setempat geopark merupakan media untuk berperan serta melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam yang berkelanjutan

Geopark menjadi konsep wisata baru yang saat ini tengah dikembangkan Kementerian Pariwisata. Konsep geopark sendiri mengacu pada pengembangan kawasan yang memberikan pengaruh terhadap konservasi, edukasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Geopark terdiri dari sejumlah lokasi keragaman geologi yang memiliki kepentingan ilmiah khusus, kelangkaan dan keindahan, yang dikenal dengan warisan geologi, serta juga lokasi yang mempunyai nilai-nilai arkeologi, ekologi, nilai sejarah atau budaya.

Pada tanggal 29 November 2018 Geopark Natuna ditetapkan menjadi Geopark Nasional oleh Kementerian Pariwisata dengan 8 (delapan) titik geosite yang ditetapkan, yakni Pulau Senua, Pulau Setanau, Pulau Akar, Gunung Ranai, Tanjung Senubing, Tanjung Datuk, Pantai dan Goa Batu Kamak dan terakhir Pantai Batu Kasah.

Kementerian Luar Negeri sangat optimis bahwa Geopark Nasional Natuna akan dapat ditingkatkan dan meraih status menjadi UNESCO Global Geopark (UUGp). Untuk itu Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kabupaten Natuna selalu intens menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut pengusulan Geopark Natuna sebagai UNESCO Global Geopark.



Gambar. G-IV.18
Geopark Natuna



Geosite adalah wilayah yang memiliki potensi warisan geologi. Kabupaten Natuna memiliki potensi yang sangat besar dalam hal warisan geologi ini. Dari hasil kajian Tim Geologi Universitas Padjadjaran Bandung bahwa di seluruh wilayah Kabupaten Natuna sedikitnya terdapat sekitar 26 (dua puluh enam) titik geoheritage atau warisan geologi. Peta warisan geologi Geopark Nasional Natuna beserta letak koordinatnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. G-IV.19
Peta Geopark Natuna





Dalam pengembangan geopark, selain tiga pilar utama keragaman geologi, biologi dan budaya, juga diperlukan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan melalui konsep Pentahelix yang meliputi: Pemerintah (daerah, pusat), Akademisi/Institusi Riset, Komunitas (masyarakat yang tinggal di dalam area geopark), Badan Usaha/ BUMN, dan media massa, dimana pemanfaatan kawasan geopark tersebut diutamakan untuk kegiatan Edukasi, Konservasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Gambar. G-IV.20
Konsep Pentahelix Pengembangan Geopark (Rosana, 2016)





Di kawasan Geopark Nasional Natuna, beberapa lokasi geowisata di antaranya sudah terkenal sebagai lokasi pariwisata umum, seperti pantai, lembah, bukit dan lain-lain. Lokasi-lokasi ini berbasis geologi, artinya lokasi ini merupakan bentukan proses geologi alamiah. Untuk itu informasi mengenai proses-proses pembentukan/kejadiannya menurut ilmu pengetahuan kebumih (geologi) dari tempat-tempat tersebut sangat dibutuhkan. Tidak kalah penting, keterkaitannya dengan aspek hayati dan budaya setempat akan sangat berarti bagi nilai konservasi dan keberlanjutan.

Berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang perencanaan pengembangan Taman Bumi (Geopark) bahwa Perencanaan Geopark dilakukan melalui penyusunan rencana induk Geopark oleh Pemerintah Daerah. Dimana rencana induk Geopark paling sedikit memuat:

- a. Inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- b. Analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pembangunan perekonomian masyarakat;
- c. Penetapan tema Geopark;
- d. Penentuan batas atau deliniasi kawasan;
- e. Informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Program konservasi Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- g. Program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;



- h. Program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
- i. Program pelestarian sosial budaya;
- j. Pengembangan destinasi pariwisata;
- k. Inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur
- l. Penyediaan informasi keberadaan Geopark (visibility Geopark), antara lain: pusat informasi, sistem informasi terpadu dan museum Geopark;
- m. Pengembangan kelembagaan Geopark meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
- n. Program promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- o. Program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark nasional, regional dan global;
- p. Pentahapan pembangunan;
- q. Rencana pembiayaan; dan
- r. Laporan secara berkala.

TABEL T-IV.23

Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pengembangan Kabupaten Natuna Tahun 2025

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB		
1. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM	1.1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Moral dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Ketahanan Budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	Persen	20,44	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.22.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	20.44	Jumlah Objek Kebudayaan yang dikembangkan / Jumlah Objek Kebudayaan x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
								2.22.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	37.74	Jumlah Kesenian Tradisional / Jumlah Kesenian Tradisional yang Dikembangkan x 100%			
								2.22.04. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Sejarah yang Dilestarikan	Persen	20	Jumlah Data Sejarah / Jumlah Sejarah yang Dilestarikan x 100			
								2.22.05. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan	Persen	99.21	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya / Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan x 100%			
								2.22.06. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Peningkatan Koleksi Museum	Persen	20	Jumlah Museum dibagi pengelolaan museum dikali 100 %			
									Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	Persen	20	-Jumlah Museum/Pengelolaan Museumx100%			
			Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif	Persen	65	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Persen	58	Jumlah rumah ibadah dalam kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah kali 100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
							4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Bunguran Barat		
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Bunguran Batubi		
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	100	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi	Kecamatan Bunguran Selatan		

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Bunguran Tengah
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Bunguran Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Bunguran Timur Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Bunguran Utara
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Pulau Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Pulau Panjang
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Pulau Seluan
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Pulau Tiga

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Pulau Tiga Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Serasan
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Serasan Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Suak Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	Jumlah koordinasi dibidang keagamaan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi dibidang keagamaan dikali seratus	Kecamatan Subi
									Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	3	-	Sekretariat Daerah
									Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Persen	3	-	
	1.2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	78	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50	Jumlah atlet pelajar yang dibina dibagi Jumlah seluruh atlet pelajar dikali 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
									Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	96	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (86/2017 - 13.7)	
									Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	39,62	Jumlah prasarana olahraga dalam kondisi baik dibagi Jumlah seluruh prasarana olahraga dikali 100%	
								2.19.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	80	Jumlah organisasi pramuka dikali jumlah yang dibina dibagi seratus persen	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				Indeks Pendidikan	Persen	18.38		2.19.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50	Jumlah atlet pelajar yang dibina dibagi Jumlah seluruh atlet pelajar dikali 100%	
									Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	96	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (86/2017 - 13.7)	
									Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	39,62	Jumlah prasarana olahraga dalam kondisi baik dibagi Jumlah seluruh prasarana olahraga dikali 100%	
								2.19.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	80	Jumlah organisasi pramuka dikali jumlah yang dibina dibagi seratus persen	
			Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.95		2.08.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	70	Jumlah indikator KLA yang terpenuhi = jumlah indikator KLA x 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								2.14.03. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	Persen	79,89	jumlah peserta kb aktif modern : jumlah pasangan usia subur (PUS) umur 15 - 49 tahun x100	
									UnMeet need	Persen	10,95	Jumlah PUS ingin anak tunda + jumlah PUS tidak ingin anak lagi/PUS x100	
								2.14.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	Skala Nilai 0-100	55,50	Penjumlahan dari 3 dimensi yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman dan dimensi kebahagiaan keluarga	
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0.705	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	Persen	23.8	Jumlah Kasus DBD/ Jumlah Penduduk x 100.000	Dinas Kesehatan
									Persentase BBLR	Persen	3.8	Jumlah bayi dengan berat badan dibawah atau sama dengan 2,5 Kg /jumlah bayi x 100%	
									Persentase desa/kelurahan ODF	Persen	90	jumlah desa/kelurahan ODF	
									Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	Persen	100	-	
									Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Persen	86.6	Jumlah kecamatan yang mencapai 80% IDL nya/jumlah kecamatan x 100%	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	Persen	100	Jumlah Puskesmas Terakreditasi dibagi jumlah Puskesmas dikali 100%	
									Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	Jumlah penduduk yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional / jumlah penduduk x 100%	
									persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	Persen	55	-	
									persentase KK yang sudah diverifikasi	Persen	100	jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi/jumlah kecamatan x 100%	
									Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	Persen	69.65	jumlah neonatus dengan komplikasi ditangani sesuai standar/jumlah neonatus x 100%	
									Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	Persen	100	Jumlah pasien covid.19 dibagi pasien covid.19 yang dilakukan treatment (perawatan) sesuai standar dikali 100%	
									Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	jumlah persalinan difasilitas pelayanan kesehatan/jumlah kelahiran x 100%	
									Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	Persen	100	jumlah rumah tangga yang ber PHBS dibagi dengan jumlah rumah tangga yang dilakukan pemantauan PHBS dikali 100%	
									Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Persen	71.42	jumlah rumah tangga yang ber PHBS dibagi dengan jumlah rumah tangga yang dilakukan pemantauan PHBS dikali 100%	
									persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	Persen	100	jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan pelayanan balita sakit/jumlah puskesmas x 100%	
									Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100	jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional/jumlah puskesmas x 100%	
									Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Persen	97.5	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih/jumlah rumah tangga x 100%	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Prevalensi HIV	Persen	0.2	Jumlah kasus HIV/AIDS dibagi jumlah penduduk dikali 100.000 pddk	
								1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	Persen	100	Jumlah Puskesmas yang memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan dibagi Jumlah Puskesmas dikali 100%	
								1.02.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	34	jumlah rumah tangga ber PHBS/jumlah rumah tangga yang dipantau x 100%	
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	78		1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	1:100	Jumlah Sekolah SD/Mi dibagi Jumlah penduduk usia 7 sd 12 Thn dikali 10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	1:103	Jumlah Sekolah SMP/MTs dibagi Jumlah penduduk usia 13 sd 15 Tahun dikali 10.000	
									Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	90.93	Jumlah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun dikali 100%	
									Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	61.34	Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun dikali 100%	
									Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	97.43	Jumlah anak usia 7 sampai dengan 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7 sampai dengan 12 tahun dikali 100%	
									Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	92.56	Jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dikali 100%	
								1.01.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	61.00	Jumlah siswa mendapat nilai sampai dengan 60 dibagi jumlah siswa dikali 100%	
								1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Persen	32.75	Jumlah tenaga kependidikan profesional dibagi Jumlah	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								TENAGA KEPENDIDIKAN				tenaga kependidikan dikali 100%	
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Nilai	78	Total dari nilai persepsi per unsur IKM = x Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Indeks Pendidikan	Persen	18.38	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	1:100	Jumlah Sekolah SD/Mi dibagi Jumlah penduduk usia 7 sd 12 Thn dikali 10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	1:103	Jumlah Sekolah SMP/MTs dibagi Jumlah penduduk usia 13 sd 15 Tahun dikali 10.000	
									Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	90.93	Jumlah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun dikali 100%	
									Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	61.34	Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun dikali 100%	
									Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	97.43	Jumlah anak usia 7 sampai dengan 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7 sampai dengan 12 tahun dikali 100%	
									Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	92.56	Jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dikali 100%	
								1.01.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	61.00	Jumlah siswa mendapat nilai sampai dengan 60 dibagi jumlah siswa dikali 100%	
								1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Persen	32.75	Jumlah tenaga kependidikan profesional dibagi Jumlah	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								TENAGA KEPENDIDIKAN				tenaga kependidikan dikali 100%	
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Nilai	78	Total dari nilai persepsi per unsur IKM = x Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.95		2.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga	1	jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak : jumlah lembaga x 100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
									Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	90	jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan seratus	
									Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	0,5	jumlah legislatif perempuan di bagi seluruh anggota legislatif x 100%	
								2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti : jumlah pengaduan yang masuk yang tercatat di UPTD PPA x 100%	
								2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Persen	100	Jumlah keluarga yang mendapat layanan puspaga : jumlah keuarga yang membutuhkan pelayanan puspaga x100%	
								2.08.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	Persen	15.22	jumlah data gender yang disusun OPD yang ada di Kabupaten Natuna	
								2.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Persen	2.35	Rata rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49)	
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	2.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.79	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.32.02. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Persen	100	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan/Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ada*100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								3.32.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan / Jumlah kawasan transmigrasi x 100%	
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	3.56		3.30.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	Persen	73.68	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota x 100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persen	3.72			Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	Persen	73.68	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota x 100%	
			Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Juta	15.884	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.07. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	Persen	100	Jumlah makam yang dikelola dalam 1 Tahun/Jumlah Seluruh Makam Pahlawan*100	Dinas Sosial
		Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Miliar Rupiah	398	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persen	12,43	Jumlah realisasi PMDN/PMA tahun evaluasi dikurang PMDN/PMA Tahun sebelum evaluasi dibagi PMDN/PMA tahun sebelum evaluasi dikali seratus	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Persen	17.74	Jumlah sektor unggulan daerah yang dipromosikan dibagi jumlah sektor unggulan daerah dikali seratus	
								2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Persen	100	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengendalian / jumlah pelaku usaha x 100	
								2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	Sistem	100	Jumlah Sektor Perizinan yang dikelola / Jumlah Sektor Perizinan Berusaha x 100	
			Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.79		2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,20	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	Persen	98	Jumlah informasi tenagar kerja yang tersedia/ Jumlah total informasi tenaga kerja dikali 100%	
									Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	96	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	
								2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	
								2.19.02. PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	70	rencana kegiatan dibagi aksi dikali seratus persen	Dinas Pemuda dan Olahraga

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB	Persen	3	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Persen	80	Jumlah Wisatawan Tahun N - Jumlah wisatawan Tahun N-1 / Jumlah Wisatawan Tahun N-1 x 100%	Dinas Pariwisata
								3.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kekayaan intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi	Persen	10	Jumlah Kekayaan Intelektual yang di Lindungi / Jumlah Kekayaan Intelektual yang di Identifikasi x 100%	
								3.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persen	80	Jumlah SDM yang Dilatih/Kembangkan /Jumlah SDM yang tersedia x 100%	
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	3.56	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Persen	16.88	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah total koperasi x 100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
								2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	30.51	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100%	
								2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Persen	0	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian / jumlah anggota koperasi yang ada x 100%	
								2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	18,13	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha / jumlah koperasi yang ada x 100	
								2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Persen	5.85	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha /jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	
								2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Persen	52.30	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi / jumlah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk x 100%	
							3. URUSAN PEMERINTAHAN	3.30.02. PROGRAM PERIZINAN DAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Persen	2.37	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							PILIHAN	PENDAFTARAN PERUSAHAAN				ketentuan / jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota x 100	
								3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	25.00	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dikelola/dipelihara dibagi jumlah potensi sarana distribusi perdagangan x 100%	
								3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	2.09	Jumlah rata-rata harga bulanan komoditas bahan pokok x 100%	
								3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Persen	0.73	Jumlah komoditi perdagangan yang diekspor dibagi jumlah potensi komoditi perdagangan x 100%	
								3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Persen	1.65	Jumlah target rencana pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK dibagi jumlah pembangunan industri dalam RIPIN x 100%	
								3.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Persen	64	Jumlah ralisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	
								3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINAS	Persen	39.75	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di dalam SIINAS / Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota x 100%	
				LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persen	3.72	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Persen	16.88	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah total koperasi x 100%	
								2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	30.51	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100%	
								2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Persen	0	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian / jumlah anggota koperasi yang ada x 100%	
								2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	Persen	18,13	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								PERLINDUNGAN KOPERASI	kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			dan usaha / jumlah koperasi yang ada x 100	
								2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Persen	5.85	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	
								2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Persen	52.30	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi / jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk x 100%	
							3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30.02. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Persen	2.37	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota x 100	
								3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	25.00	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dikelola/dipelihara dibagi jumlah potensi sarana distribusi perdagangan x 100%	
								3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	2.09	Jumlah rata-rata harga bulanan komoditas bahan pokok x 100%	
								3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Persen	0.73	Jumlah komoditi perdagangan yang diekspor dibagi jumlah potensi komoditi perdagangan x 100%	
								3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Persen	1.65	Jumlah target rencana pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK dibagi jumlah pembangunan industri dalam RIPIN x 100%	
								3.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Persen	64	Jumlah ralisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	
								3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	Persen	39.75	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di dalam SIINAS / Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota x 100%	
			Meningkatnya Perekonomian di	LPE Sektor Pertanian,	Persen	3.91	2. URUSAN PEMERINTAHAN	2.09.02. PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Intervensi CPM	Persen	5	Jumlah desa yang sudah terbangun LPM dibagi jumlah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Sektor Pertanian dan Perikanan	Kehutanan, Perikanan dalam PDRB			WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				desa se Kabupaten Natuna dikali 100 persen	
								2.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2400	Tingkat Ketersediaan Energi sama dengan Jumlah Total Energi 9 bahan pokok pangan	
									Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hr	2100	.Tingkat Konsumsi Energi sama dengan jumlah total Energi 9 kelompok bahan pangan	
								2.09.04. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	3.03	PoU = ? x < MDER f (x) d x	
								2.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dikali 100 persen	
							3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.03. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0.82	$Y = Y_t - Y(t-1) / Y(t-1) \times 100$	Dinas Perikanan
								3.25.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1,44	$= (T(n+1) - T(n)) / T(n) \times 100$	
								3.25.06. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	2,00	Realisasi atau Target Tahun Berjalan (T1) - Realisasi atau Target Tahun Sebelumnya (T0) / Realisasi atau Target Tahun Sebelumnya (T0) x 100	
								3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Persen	1,5	Produksi tanaman pangan dan hortikultura / Produksi Sektor Pertanian x 100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Persentase kenaikan produksi ternak	Persen	0,75	Produksi sektor peternakan / Jumlah populasi ternak x 100	
									Persentase sarana pertanian yang digunakan	Persen	70,34	Jumlah sarana pertanian yang digunakan/Jumlah sarana pertanian X 100 %	
								3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	43	Jumlah Prasarana Pertanian yang digunakan	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								PRASARANA PERTANIAN					
								3.27.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,43	jumlah kejadian penyakit atau kasus tahun berjalan(t) - jumlah kejadian penyakit atau kasus tahun berjalan(t) - jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sbelumnya (t-1) / Jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	
								3.27.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Persen	7.5	Luas Lahan yang di Kendalikan / Luas lahan keseluruhan x 100 %	
								3.27.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2.0	(Jumlah Poktan yang naik kelas / Jumlah Poktan yang terdata di simluhan x 100%) + {(jumlah petani yang dibina / jumlah petani yang terdaftar di simluh) x 100%} / 2	
			Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Juta	15.884	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	Jumlah PSKS yang aktif/Jumlah Jenis PSKS*100	Dinas Sosial
								1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	Persen	100	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 tahun dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng didaerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti sosial dikali 100	
								1.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	59,73	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS Keseluruhan (DTKS) dalam 1 Tahun dikali 100	
								1.06.06. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota dikali 100	
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13.02. PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	85	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang baik / Jumlah seluruh Pemerintahan Desa x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								2.13.03. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	Persen	50,00	Jumlah Desa yang telah melakukan kerjasama antar Desa / Total Jumlah Desa x 100%	
								2.13.04. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	Bumdes	40	Jumlah Bumdes yang aktif	
									Persentase Desa yang tertib Administrasi	Persen	55	Jumlah Desa yang tertib Administrasi / Total Desa x 100%	
								2.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	Kelompok	30	Jumlah kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	
									Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	15	Jumlah kelompok Binaan LPM / Total Jumlah LPM	
3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis	3.1. Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas	Persen	3,57	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peda/Perkada / Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani x 100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
									Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Persen	95	Jumlah Pelanggaran yang dapat diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan dan Laporan dikali 100	
							7. UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Bunguran Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan	Kecamatan Bunguran Batubi

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Bunguran Selatan
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Bunguran Tengah
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Bunguran Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Bunguran Timur Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Bunguran Utara
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Pulau Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Pulau Panjang
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Pulau Seluan

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Pulau Tiga
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Pulau Tiga Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Serasan
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Serasan Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Suak Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	15	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikali 100	Kecamatan Subi
							8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Persen	85	Jumlah penguatan dan pemantapan ditingkat Kecamatan yang dilaksanakan : jumlah kecamatan yang ada x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								8.01.03. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	Persen	26	Jumlah parpol yg aktif dibagi jumlah seluruh parpol yang terdaftar	
								8.01.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	Persen	100	-jumlah ormas, OKP, dan LSM yang mendapat pembinaan dibagi jumlah seluruh ormas, OKP dan LSM	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								8.01.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Persen	80	jumlah peserta yang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dibagi dengan jumlah seluruh peserta	
								8.01.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Persen	100	Jumlah konflik yang ditangani : jumlah konflik x 100%	
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	26,64	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	10,36	Jumlah destinasi yang Dikembangkan pada tahun berjalan / Jumlah total destinasi pariwisata x 100%	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persen	55	5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.06.02. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persen	30	Jumlah Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan yang diakomodir	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur	4.1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah		Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks	75.80	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Dokumen	1,00	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	Persen	2	jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah dibagi dengan jumlah pengajuan dikali 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.04. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	30	jumlah penyelesaian kasus tanah negara dibagi dengan jumlah kasus dikali 100%	
									Persentase penyelesaian sengketa tanah	Persen	95	Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah	
								2.10.05. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	40	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi dengan Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	
									Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persen	85	Jumlah tanah bersertifikat dibagi jumlah tanah	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								2.10.06. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	30	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha dibagi Jumlah penerima tanah obyek landreform dikali 100%	
								2.10.08. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Persen	19.91	jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dibagi jumlah tanah kosong dikali 100%	
								2.10.09. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	Persen	30	jumlah pengelolaan izin membuka tanah dibagi jumlah membuka tanah dikali 100%	
								2.10.10. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	Persen	40	jumlah tanah yang diterbitkan sertifikat dibagi jumlah tanah dikali 100%	
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	Persen	79.64	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Dokumen	1,00	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	Persen	2	jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah dibagi dengan jumlah pengajuan dikali 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.04. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	30	jumlah penyelesaian kasus tanah negara dibagi dengan jumlah kasus dikali 100%	
									Persentase penyelesaian sengketa tanah	Persen	95	Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah	
								2.10.05. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	40	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi dengan Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	
									Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persen	85	Jumlah tanah bersertifikat dibagi jumlah tanah	
								2.10.06. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan	Persen	30	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha dibagi Jumlah penerima	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	maksimum dan tanah absentee			tanah obyek landreform dikali 100%	
								2.10.08. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Persen	19,91	jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dibagi jumlah tanah kosong dikali 100%	
								2.10.09. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	Persen	30	jumlah pengelolaan izin membuka tanah dibagi jumlah membuka tanah dikali 100%	
								2.10.10. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	Persen	40	jumlah tanah yang diterbitkan sertifikat dibagi jumlah tanah dikali 100%	
		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		Indeks Infrastruktur	Indeks	75,80	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	Liter/Detik	195,22	Ketersediaan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Persen	2,2	= (Jumlah Rumah Tangga yang terakses Air Bersih / Total Rumah Tangga) x 100	
								1.03.04. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Persen	36,70	jumlah ketersediaan sarpras persampahan yang diadakan/ dibangun di bagi dengan total sarpras yang ada dikali 100%	
								1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	Persen	80,79	= (Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi / Jumlah Total Rumah Tangga) x 100	
								1.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	55,76	(Panjang Drainase yang berfungsi dengan baik / Panjang seluruh Drainase di daerah Kabupaten/Kota) x 100	
								1.03.07. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	Persen	100	jumlah penanganan permukiman di kawasan strategis dibagi dengan jumlah kawasan strategis dikali 100%	
								1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Persen	85,42	= (Jumlah PSU yang dibangun / Jumlah PSU) x 100	
								1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Persen	46,21	= (Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Panjang Jalan Kabupaten) x 100 %	
								1.03.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	Persen	90,00	= (TKK Terampil/TKK teridentifikasi) x 100 %	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	87	jumlah rumah yang dibangun / diperbaiki dibagi jumlah rumah tidak layak huni dikali 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
								1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persen	25,38	luas kawasan permukiman kumuh ditangani dibagi luas kawasan kumuh dikali 100%	
								1.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase areal kawasan kumuh	Persen	60	luas penurunan kawasan kumuh	
									Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:7	perbandingan rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	
								1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	Persen	40	jumlah penanganan PSU kawasan kumuh di bangun dibagi jumlah penanganan PSU kumuh dikali 100%	
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Persen	81	Realisasi ketersediaan perlengkapan jalan/ target ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan x 100%	Dinas Perhubungan
								2.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Rasio	0.4	jumlah pelabuhan yang di layani angkutan laut/ jumlah pelabuhan yang di bangun	
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	Persen	79,64	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	Liter/Detik	195,22	Ketersediaan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Persen	2,2	= (Jumlah Rumah Tangga yang terakses Air Bersih / Total Rumah Tangga) x 100	
								1.03.04. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Persen	36,70	jumlah ketersediaan sarpras persampahan yang diadakan/ dibangun di bagi dengan total sarpras yang ada dikali 100%	
								1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	Persen	80,79	= (Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi / Jumlah Total Rumah Tangga) x 100	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								1.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	55,76	(Panjang Drainase yang berfungsi dengan baik / Panjang seluruh Drainase di daerah Kabupaten/Kota) x 100	
								1.03.07. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	Persen	100	jumlah penanganan permukiman di kawasan strategis dibagi dengan jumlah kawasan strategis dikali 100%	
								1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Persen	85,42	= (Jumlah PSU yang dibangun / Jumlah PSU) x 100	
								1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Persen	46,21	= (Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Panjang Jalan Kabupaten) x 100 %	
								1.03.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	Persen	90,00	= (TKK Terampil/TKK teridentifikasi) x 100 %	
								1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	87	jumlah rumah yang dibangun / diperbaiki dibagi jumlah rumah tidak layak huni dikali 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
								1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persen	25.38	luas kawasan permukiman kumuh ditangani dibagi luas kawasan kumuh dikali 100%	
								1.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase areal kawasan kumuh	Persen	60	luas penurunan kawasan kumuh	
									Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:7	perbandingan rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	
								1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	Persen	40	jumlah penanganan PSU kawasan kumuh di bangun dibagi jumlah penanganan PSU kumuh dikali 100%	
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Persen	81	Realisasi ketersediaan perlengkapan jalan/ target ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan x 100%	Dinas Perhubungan
								2.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Rasio	0.4	jumlah pelabuhan yang di layani angkutan laut/ jumlah pelabuhan yang di bangun	
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk	Persen	82.80	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	Persen	92,74	= (Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun / Jumlah Bangunan Gedung) x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Strategis Kabupaten	kepentingan Strategis Kabupaten			DENGAN PELAYANAN DASAR						
5. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5.1. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air	Persen	57.00		1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	9.1	jumlah desa tangguh bencana/jumlah desa se- kab. natuna	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								1.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Persen	100	jumlah kasus yang ditangani / jumlah kasus x 100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Ha	3.1	Luas Area yang Dikonsumsi dibagi Luas Kerusakan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
									Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Persen	23,72	Luas Area yang di konservasi dibagi Luas Lahan Konservasi dikali 100	
								2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Persen	50	Luas Lahan Kabupaten dikali 30 dibagi 100	
								2.11.05. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	Persen	20	Jumlah Penanganan dibagi Timbulan Limbah	
								2.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Persen	74.76	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan dibagi Jumlah Pelaku Usaha dikali 100	
								2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Persen	15	-	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								2.11.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Nominasi	1	Jumlah Penghargaan	
								2.11.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	Persen	73.79	Jumlah Kasus Lingkungan yang ditangani dibagi total kasus Lingkungan dikali 100	
								2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	36,70	Jumlah Pengelolaan sampah dibagi Jumlah Timbulan dikali 100	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	76.40	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	9.1	jumlah desa tangguh bencana/jumlah desa se- kab. natuna	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								1.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Persen	100	jumlah kasus yang ditangani / jumlah kasus x 100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Ha	3.1	Luas Area yang Dikonservasi dibagi Luas Kerusakan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
									Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Persen	23,72	Luas Area yang di konservasi dibagi Luas Lahan Konservasi dikali 100	
								2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Persen	50	Luas Lahan Kabupaten dikali 30 dibagi 100	
								2.11.05. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	Persen	20	Jumlah Penanganan dibagi Timbulan Limbah	
								2.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Persen	74.76	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan dibagi Jumlah Pelaku Usaha dikali 100	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Persen	15	-	
								2.11.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Nominasi	1	Jumlah Penghargaan	
								2.11.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	Persen	73.79	Jumlah Kasus Lingkungan yang ditangani dibagi total kasus Lingkungan dikali 100	
								2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	36,70	Jumlah Pengelolaan sampah dibagi Jumlah Timbulan dikali 100	
				Indeks Kualitas Udara	Persen	86.40	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	9.1	jumlah desa tangguh bencana/jumlah desa se-kab. natuna	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								1.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Persen	100	jumlah kasus yang ditangani / jumlah kasus x 100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Ha	3.1	Luas Area yang Dikonservasi dibagi Luas Kerusakan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
									Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Persen	23,72	Luas Area yang di konservasi dibagi Luas Lahan Konservasi dikali 100	
								2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Persen	50	Luas Lahan Kabupaten dikali 30 dibagi 100	
								2.11.05. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	Persen	20	Jumlah Penanganan dibagi Timbulan Limbah	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								2.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Persen	74.76	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan dibagi Jumlah Pelaku Usaha dikali 100	
								2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Persen	15	-	
								2.11.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Nominasi	1	Jumlah Penghargaan	
								2.11.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	Persen	73.79	Jumlah Kasus Lingkungan yang ditangani dibagi total kasus Lingkungan dikali 100	
								2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	36,70	Jumlah Pengelolaan sampah dibagi Jumlah Timbulan dikali 100	
6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)	6.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63.00		2.13.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							7. UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Bunguran Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Bunguran Batubi
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Bunguran Tengah
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi	Kecamatan Bunguran Timur

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Bunguran Timur Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	-	Kecamatan Bunguran Utara
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Pulau Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Pulau Panjang
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Pulau Seluan
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Pulau Tiga
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Pulau Tiga Barat

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Serasan
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Serasan Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Suak Midai
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	68,30	Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								1.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.80	Nilai Laporan LKJIP	Dinas Kesehatan
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	86	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	80.30	Jumlah Puskesmas Terakreditasi dibagi jumlah Puskesmas dikali 100%	
									Nilai Laporan LKJIP	Persen	88.80	Nilai Laporan Kinerja Dinas Kesehatan	
									Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0.15	Jumlah daya tampung rumah sakit dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang memiliki sertifikat	Persen	83	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki sertifikat dibagi jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan dikali 100%	
								1.02.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	Persen	89.18	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi standar dibagi dengan jumlah seluruh Tempat Pengolahan Makanan yang ada dikali 100%	
								1.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77.60	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	= (Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP / Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan) x 100	
								1.04.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	76.00	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	67,10	Nilai Laporan LKjIP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.70	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77.50	Nilai Laporan LKjIP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												administrasi kesekretariatan dikali 100	
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
								1.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.00	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Sosial
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
							2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	81.91	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan kesekretariatan di kali 100	
								2.08.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.64	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP : jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan X 100 %	
								2.11.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	63.50	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Lingkungan Hidup
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								2.12.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	76.80	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								DAERAH KABUPATEN/KOTA					
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								2.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase Kepemilikan Dokomen Kependudukan	Persen	93	Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100	
								2.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	91	Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk dikali 100	
								2.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	Persen	82	Jumlah Pemeunuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder dibagi jumlah OPD dikali 100	
								2.12.05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	Persen	100	-	
								2.13.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.50	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								2.15.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perhubungan
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								2.16.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	81,40	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	26	Jumlah perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika dibagi jumlah perangkat daerah	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.00	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.49	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikali dengan nilai penimbang	
								2.19.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	68.50	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemuda dan Olahraga
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								2.21.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	75	Jumlah nilai per area keamanan informasi / jumlah area penilaian x 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
								2.23.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	83.90	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								2.24.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Persen	80	Persentase PD yang mengelola Arsip : Jumlah Keseluruhan PD dibagi dengan Jumlah PD yang mengelola Arsip sesuai NSPK dikali 100 persen	
								2.24.03. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	Persen	40	Dihitung dari jumlah arsip yang diselamat di setiap OPD dibagi dengan jumlah OPD keseluruhan dikali 100 persen	
							3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perikanan

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								DAERAH KABUPATEN/KOTA					
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali seratus	
								3.26.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	80.10	Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pariwisata
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								3.27.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	80.50	Nilai Laporan LKJIP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								3.31.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.50	Nilai Laporan LKJIP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan kesekretariatan dikali 100	
							4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	Indeks	70	Nilai Indeks	Sekretariat Daerah
									Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.65	Nilai Laporan LKJIP	
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
									Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	-	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	86	Nilai Indeks	
									Peningkatan Nilai LPPD	Angka	100	-	
									Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	Persen	90	Jumlah kerja sama yg disepakati dibagi jumlah kerja sama ditindak lanjuti dikali 100%	
								4.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks	59	Nilai Indeks	
									Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	90	Jumlah realisasi anggaran pembangunan dibagi jumlah realisasi anggaran dikali 100%	
									Tingkat Inflasi Daerah	Persen	2,94	-	
								4.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.04	Nilai Laporan LKJIP	Sekretariat DPRD
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								4.02.02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	Persen	75	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	
							5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.45	Nilai Laporan LKJIP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	86	Jumlah program RKPD tahun berjalan dibagi jumlah program RPJMD yang dilaksanakan tahun berjalan dikali seratus	
									Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	66	Jumlah rekomendasi yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan dibagi jumlah rekomendasi dikali 100	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
								5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	94	Jumlah program dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	
									Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	94	Jumlah program dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RPJMD dikali 100. (Bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan)	
								5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	81.85	Nilai Laporan LKjIP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	-	
									Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	Persen	98	-	
								5.02.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Persen	88	-	
								5.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5	Persentase Penerimaan PDRD	
								5.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	81.30	Nilai Laporan LKjIP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	29	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) / Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak Termasuk Guru	

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												dan Tenaga Kesehatan) x 100	
								5.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	87	Jumlah Pegawai Fungsional yang Memiliki Sertifikat Kompetensi / Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) x 100	
								5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	63,00	Hasil Penghitungan Skor Nilai Indeks Inovasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
									Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	35	Jumlah kelitbangan dalam RKPD / Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD x 100	
								5.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80.22	Nilai Laporan LKjIP	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
							6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80.50	Nilai Laporan LKjIP	Inspektorat Daerah
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
								6.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	Persen	100	Jumlah OPD yang di Audit Kinerja / Jumlah Obrik dalam PKPT x 100	
								6.01.03. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	Persen	80	Tingkat Kualitas APIP	
									Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	Persen	80	Jumlah Perumusan Kebijakan / Jumlah Keseluruhan Rencana Perumusan Kebijakan x 100	
							7. UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80.00	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Barat

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	71.50	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Batubi
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77.00	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Selatan
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	72.50	Nilai laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Tengah
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80.00	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Timur
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.53	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Timur Laut
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	68.50	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Utara
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	75.10	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Midai
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	70.00	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Laut
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	70.10	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Panjang
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	70.10	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Seluan
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	65.50	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Tiga
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	70.50	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Tiga Barat
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77.10	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Serasan
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.40	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Serasan Timur
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	71.00	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Suak Midai
									Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80.10	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Subi
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Persentase Layanan Kesekretariatan Terhadap SOP	Kecamatan Bunguran Barat
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Bunguran Batubi
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	-	Kecamatan Bunguran Selatan
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Bunguran Tengah

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Bunguran Timur
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Bunguran Timur Laut
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Bunguran Utara
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Midai
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Pulau Laut
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Pulau Panjang
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Pulau Seluan
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Pulau Tiga
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Pulau Tiga Barat
									Persentase layanan dukungan administrasi	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi	Kecamatan Serasan

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									kesekretariatan yang sesuai SOP			jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Serasan Timur
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Suak Midai
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	Kecamatan Subi
								7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Bunguran Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Bunguran Batubi
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Bunguran Selatan
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Bunguran Tengah
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Bunguran Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Bunguran Timur Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Bunguran Utara

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Pulau Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Pulau Panjang
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Pulau Seluan
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Pulau Tiga
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Pulau Tiga Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Serasan
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Serasan Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Suak Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Jumlah koordinasi pelayanan publik yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi pelayanan publik x 100	Kecamatan Subi
								7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi	Kecamatan Bunguran Timur

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												pemberdayaan kemasyarakatan x 100	
									Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	Jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan x 100	Kecamatan Subi
								7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan desa x 100	Kecamatan Bunguran Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Bunguran Batubi
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Bunguran Selatan
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Bunguran Tengah
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Bunguran Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Bunguran Timur Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Bunguran Utara

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan desa x 100	Kecamatan Midai
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan desa x 100	Kecamatan Pulau Laut
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Pulau Panjang
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Pulau Seluan
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Pulau Tiga
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Pulau Tiga Barat
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Serasan
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Serasan Timur
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi	Kecamatan Suak Midai

MISI	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
												di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	
									Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menghasilkan rekomendasi di bagi jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa x 100	Kecamatan Subi
							8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.81	Nilai Laporan LKJIP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	10	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100	
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.1. Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Semua Sektor	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan	Nilai	70	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.02. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	82.44	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota / jumlah penduduk x 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
								2.20.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persen	83	Jumlah OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral / jumlah OPD dikali 100%	
							3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi	Persen	100	-	Dinas Pariwisata
								3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Persen	63	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan dibagi jumlah produk unggulan x 100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

TABEL T-IV.24

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PROGRAM MENGURANGI ANGKA STUNTING
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN NATUNA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								50,000,000	50,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								50,000,000	50,000,000		
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								50,000,000	50,000,000		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD	61.34			50,000,000	50,000,000		
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	1.20	50,000,000	50,000,000		
1.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	116	50,000,000	50,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.	Dinas Kesehatan								6,363,400,000	7,914,327,000		
01.01.	<u>DINAS KESEHATAN</u>								6,363,400,000	7,914,327,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6,363,400,000	7,914,327,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								6,363,400,000	7,914,327,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE BBLR	3.8			1,100,000,000	1,100,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	100	1,100,000,000	1,100,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1,100,000,000	1,100,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE DESA/KELURAHAN ODF	90			150,000,000	150,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	90	150,000,000	150,000,000		
1.02.02.2.02.29.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	150,000,000	150,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN TB SEMUA TIPE (SUCCES RATE)	100			500,000,000	500,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500,000,000	500,000,000		
1.02.02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578	500,000,000	500,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80%	86.6			477,400,000	477,400,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	90.2	477,400,000	477,400,000		
1.02.02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	477,400,000	477,400,000		Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI SESUAI STANDAR	69.65			397,000,000	397,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	397,000,000	397,000,000		
1.02.02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1433	397,000,000	397,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100			1,300,000,000	2,350,927,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500,000,000	1,006,000,000		
1.02.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1780	500,000,000	1,006,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	800,000,000	1,344,927,000		
1.02.02.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1777	800,000,000	1,344,927,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN BALITA SEHAT DAN BALITA SAKIT	100			564,000,000	564,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						Persentase Balita yang mendapatkan	100	564,000,000	564,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kabupaten/Kota						pelayanan kesehatan sesuai standar					
1.02.02.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5657	564,000,000	564,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES AIR BERSIH	97.5			1,625,000,000	2,125,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	24567	1,625,000,000	2,125,000,000		
1.02.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1,625,000,000	2,125,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PHBS	34			250,000,000	250,000,000		
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Posyandu Aktif	90	250,000,000	250,000,000		
1.02.05.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	250,000,000	250,000,000		Dinas Kesehatan
01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								6,174,700,000	6,130,958,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6,174,700,000	6,130,958,000		
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG								6,174,700,000	6,130,958,000		
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE PENAMBAHAN RUMAH TANGGA BERAKSES AIR BERSIH	2.2			1,942,000,000	1,666,080,000		
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota						Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	480	1,942,000,000	1,666,080,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.03.2.01.22.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	250	1,942,000,000	1,666,080,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE RUMAH TANGGA TERLAYANI AKSES SANITASI LAYAK	80.79			4,232,700,000	4,464,878,000		
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	400	4,232,700,000	4,464,878,000		
1.03.05.2.01.39.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	400	4,232,700,000	4,464,878,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.	Dinas Sosial								150,000,000	150,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								150,000,000	150,000,000		
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								150,000,000	150,000,000		
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PPKS	59.73			150,000,000	150,000,000		
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	77.92	150,000,000	150,000,000		
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2675	150,000,000	150,000,000		Dinas Sosial
01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								665,000,000	665,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								665,000,000	665,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PELAYANAN DASAR											
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								100,000,000	100,000,000		
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PPRG	90			100,000,000	100,000,000		
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	30	100,000,000	100,000,000		
2.08.02.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	100,000,000	100,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								733,104,000	4,410,000,000		
01.01.	<u>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</u>								733,104,000	4,410,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								733,104,000	4,410,000,000		
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								733,104,000	4,410,000,000		
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE INTERVENSI CPM	5			56,918,000	225,000,000		
2.09.02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	93.33	56,918,000	225,000,000		
2.09.02.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	14	56,918,000	225,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KONSUMSI	2100			190,768,000	1,185,000,000		
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						Angka Kecukupan Protein (AKP)	57	190,768,000	1,185,000,000		
2.09.03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	190,768,000	1,185,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	3.03			485,418,000	3,000,000,000		
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	10	485,418,000	3,000,000,000		
2.09.04.2.02.02.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	485,418,000	3,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
01.	Dinas Lingkungan Hidup								2,900,000,000	5,900,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2,900,000,000	5,900,000,000		
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								2,900,000,000	5,900,000,000		
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH	36.70			2,900,000,000	5,900,000,000		
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah						Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	42	2,900,000,000	5,900,000,000		
2.11.11.2.01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,	5670	2,900,000,000	5,900,000,000		Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					
01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								657,385,000	657,385,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								657,385,000	657,385,000		
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								657,385,000	657,385,000		
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE DESA YANG TERTIB ADMINISTRASI	55			304,385,000	304,385,000		
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Jumlah Penyelenggaraan Pembinaaan Administrasi Pemerintahan Desa	70	304,385,000	304,385,000		
2.13.04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	70	130,000,000	130,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	70	174,385,000	174,385,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		RATA-RATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)	15			353,000,000	353,000,000		
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	135	353,000,000	353,000,000		
2.13.05.2.01.02.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	1	135,000,000	135,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
2.13.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	218,000,000	218,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								565,000,000	565,000,000		
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				PERSENTASE MCPR (KONTRASEPSI MODEREN PADA PASANGAN USIA SUBUR)	79,89			157,000,000	157,000,000		
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Unmeet need	10,95	157,000,000	157,000,000		
2.14.03.2.04.01.	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4	157,000,000	157,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				UNMEET NEED	10,95			200,000,000	200,000,000		
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya jumlah KB MKJP	2	200,000,000	200,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.14.03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2	200,000,000	200,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				INDEK PEMBANGUNAN KELUARGA	58.50			208,000,000	208,000,000		
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	80	102,000,000	102,000,000		
2.14.04.2.01.24.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	680	102,000,000	102,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPPKS) Aktif	83	106,000,000	106,000,000		
2.14.04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9	106,000,000	106,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01.	Dinas Komunikasi dan Informatika								100,000,000	130,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								100,000,000	130,000,000		
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								100,000,000	130,000,000		
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	82,44			100,000,000	130,000,000		
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	47125	100,000,000	130,000,000		
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60	100,000,000	130,000,000		Dinas Komunikasi dan Informatika
01.	Dinas Perikanan								5,848,790,711	5,314,790,711		
01.01.	DINAS PERIKANAN								5,848,790,711	5,314,790,711		
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								5,848,790,711	5,314,790,711		
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN								5,848,790,711	5,314,790,711		
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	0.82			2,615,000,000	1,765,000,000		
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	137818.24	1,585,000,000	935,000,000		
3.25.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	1,585,000,000	935,000,000		Dinas Perikanan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	20,94	1,030,000,000	830,000,000		
3.25.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	35	530,000,000	330,000,000		Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	25	150,000,000	150,000,000		Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10	350,000,000	350,000,000		Dinas Perikanan
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	2,00			3,233,790,711	3,549,790,711		
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	6	3,233,790,711	3,549,790,711		
3.25.06.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5819.50	303,790,711	303,790,711		Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2	2,930,000,000	3,246,000,000		Dinas Perikanan
JUMLAH									0	0		

TABEL T-IV.25

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (TASKIN)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN NATUNA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								6,040,880,000	7,590,880,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6,040,880,000	7,590,880,000		
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								6,040,880,000	7,590,880,000		
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90			100,000,000	100,000,000		
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	100,000,000	100,000,000		
1.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	100,000,000	100,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 13-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	90.93			2,660,440,000	3,810,440,000		
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	70	350,000,000	350,000,000		
1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.43.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	27	200,000,000	200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sekolah Menengah Pertama					
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71.34	2,310,440,000	3,460,440,000		
1.01.02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3250	2,310,440,000	3,460,440,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD	61.34			350,000,000	350,000,000		
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15	200,000,000	200,000,000		
1.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3500	200,000,000	200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	1.20	150,000,000	150,000,000		
1.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	116	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR	97.43			2,830,440,000	3,230,440,000		
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Rata-rata Kelulusan SD/MI	100	570,000,000	570,000,000		
1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	84	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.30.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84	420,000,000	420,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi	49.52	2,260,440,000	2,660,440,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bangunan Baik					
1.01.02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8806	2,260,440,000	2,660,440,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN	92.56			100,000,000	100,000,000		
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	55	100,000,000	100,000,000		
1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	100,000,000	100,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.	Dinas Kesehatan								24,671,518,800	25,677,518,800		
01.01.	DINAS KESEHATAN								18,225,000,000	19,231,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								18,225,000,000	19,231,000,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								18,225,000,000	19,231,000,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE BBLR	3.8			1,100,000,000	1,100,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	100	1,100,000,000	1,100,000,000		
1.02.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1,100,000,000	1,100,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KEPESERTAAN JAMINAN	100			15,000,000,000	15,000,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					KESEHATAN NASIONAL							
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	47070	15,000,000,000	15,000,000,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	15,000,000,000	15,000,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100			500,000,000	1,006,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500,000,000	1,006,000,000		
1.02.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1780	500,000,000	1,006,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES AIR BERSIH	97.5			1,625,000,000	2,125,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	24567	1,625,000,000	2,125,000,000		
1.02.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1,625,000,000	2,125,000,000		Dinas Kesehatan
01.03.	PUSKESMAS RANA I								1,640,930,400	1,640,930,400		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1,640,930,400	1,640,930,400		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,640,930,400	1,640,930,400		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			1,640,930,400	1,640,930,400		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	1,640,930,400	1,640,930,400		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	1	1,640,930,400	1,640,930,400		Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kesehatan Masyarakat					
01.04.	<u>PUSKESMAS TANJUNG</u>								322,650,450	322,650,450		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								322,650,450	322,650,450		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								322,650,450	322,650,450		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			322,650,450	322,650,450		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	322,650,450	322,650,450		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	322,650,450	322,650,450		Dinas Kesehatan
01.05.	<u>PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH</u>								317,832,000	317,832,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								317,832,000	317,832,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								317,832,000	317,832,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			317,832,000	317,832,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	317,832,000	317,832,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	317,832,000	317,832,000		Dinas Kesehatan
01.06.	<u>PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN</u>								250,404,000	250,404,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								250,404,000	250,404,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								250,404,000	250,404,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			250,404,000	250,404,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas ~!	1.2	250,404,000	250,404,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	250,404,000	250,404,000		Dinas Kesehatan
01.07.	PUSKESMAS KELARIK								125,000,000	125,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								125,000,000	125,000,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								125,000,000	125,000,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			125,000,000	125,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	125,000,000	125,000,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	125,000,000	125,000,000		Dinas Kesehatan
01.08.	PUSKESMAS SEDANAU								775,970,000	775,970,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								775,970,000	775,970,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								775,970,000	775,970,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			775,970,000	775,970,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	775,970,000	775,970,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	775,970,000	775,970,000		Dinas Kesehatan
01.09.	PUSKESMAS PULAU TIGA								665,760,000	665,760,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								665,760,000	665,760,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								665,760,000	665,760,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			665,760,000	665,760,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan	1.2	665,760,000	665,760,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kabupaten/Kota						Kesehatan terhadap Puskesmas					
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	665,760,000	665,760,000		Dinas Kesehatan
01.10.	PUSKESMAS PULAU LAUT								284,920,000	284,920,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								284,920,000	284,920,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								284,920,000	284,920,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			284,920,000	284,920,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	284,920,000	284,920,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	284,920,000	284,920,000		Dinas Kesehatan
01.11.	PUSKESMAS MIDA								541,464,000	541,464,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								541,464,000	541,464,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								541,464,000	541,464,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			541,464,000	541,464,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	541,464,000	541,464,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	541,464,000	541,464,000		Dinas Kesehatan
01.12.	PUSKESMAS SERASAN								322,650,450	322,650,450		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								322,650,450	322,650,450		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								322,650,450	322,650,450		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			322,650,450	322,650,450		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	322,650,450	322,650,450		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	322,650,450	322,650,450		Dinas Kesehatan
0113.	PUSKESMAS SERASAN TIMUR								373,460,000	373,460,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								373,460,000	373,460,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								373,460,000	373,460,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			373,460,000	373,460,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	373,460,000	373,460,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	373,460,000	373,460,000		Dinas Kesehatan
0114.	PUSKESMAS SUBI								362,630,000	362,630,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								362,630,000	362,630,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								362,630,000	362,630,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			362,630,000	362,630,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	362,630,000	362,630,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	362,630,000	362,630,000		Dinas Kesehatan
0115.	PUSKESMAS BATUBI JAYA								216,967,500	216,967,500		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								216,967,500	216,967,500		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								216,967,500	216,967,500		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			216,967,500	216,967,500		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	216,967,500	216,967,500		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	216,967,500	216,967,500		Dinas Kesehatan
01.16.	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT								245,880,000	245,880,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								245,880,000	245,880,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								245,880,000	245,880,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			245,880,000	245,880,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	245,880,000	245,880,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	245,880,000	245,880,000		Dinas Kesehatan
01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								128,044,199,000	85,332,942,992		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								128,044,199,000	85,332,942,992		
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG								128,044,199,000	85,332,942,992		
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		KETERSEDIAAN AIR BAKU	195.22			200,000,000	228,000,000		
1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	60.06	200,000,000	228,000,000		
1.03.02.2.02.08.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.250	200,000,000	228,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE PENAMBAHAN RUMAH TANGGA BERAKSES AIR BERSIH	2.2			6,411,499,000	6,565,308,860		
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota						Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	480	6,411,499,000	6,565,308,860		
1.03.03.2.01.22.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	250	1,942,000,000	1,666,080,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.24.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	250,000,000	257,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.25.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	250,000,000	285,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.26.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2	2,964,499,000	3,211,528,860		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.32.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	230	1,005,000,000	1,145,700,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	36.70			700,000,000	1,573,569,686		
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						Cakupan Wilayah Penangan Sampah	7	700,000,000	1,573,569,686		
1.03.04.2.01.10.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun	660	700,000,000	1,573,569,686		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE RUMAH TANGGA	80.79			4,232,700,000	4,464,878,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					TERLAYANI AKSES SANITASI LAYAK							
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	400	4,232,700,000	4,464,878,000		
1.03.05.2.01.39.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	400	4,232,700,000	4,464,878,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE SALURAN DRAINASE YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK	55.76			2,020,000,000	2,075,800,000		
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						Panjang Saluran Drainase yang Befungsi dengan Baik	66.94	2,020,000,000	2,075,800,000		
1.03.06.2.01.28.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	500	2,020,000,000	2,075,800,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		TINGKAT PERTUMBUHAN KUALITAS JALAN	46.21			114,480,000,000	70,425,386,446		
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	214.44	9,550,000,000	6,559,082,695		
1.03.10.2.01.32.	Pembangunan Jalan						Panjang Jalan yang Dibangun	25.000	8,850,000,000	5,831,082,695		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.46.	Pemeliharaan Rutin Jalan						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.2	700,000,000	728,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	214.44	104,930,000,000	63,866,303,751		
1.03.10.2.01.32.	Pembangunan Jalan						Panjang Jalan yang Dibangun	2.50	101,910,000,000	61,538,303,751		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.44.	Rehabilitasi Jalan						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	3,020,000,000	2,328,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan								7,275,000,000	7,383,279,630		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7,275,000,000	7,383,279,630		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								7,275,000,000	7,383,279,630		
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI	25.38			6,075,000,000	5,433,437,000		
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						Luas lingkungan permukiman kumuh	30	6,075,000,000	5,433,437,000		
1.04.03.2.03.02.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30	750,000,000	750,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.13.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1	5,325,000,000	4,683,437,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		RASIO RUMAH LAYAK HUNI	0.142857			1,200,000,000	1,949,842,630		
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Rumah Layak Huni	60	1,200,000,000	1,949,842,630		
1.04.04.2.01.01.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20	1,200,000,000	1,949,842,630		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
01.	Dinas Sosial								883,183,900	933,183,900		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								883,183,900	933,183,900		
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								883,183,900	933,183,900		
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	50			403,183,900	453,183,900		
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah PSKS yang dikembangkan	6	403,183,900	453,183,900		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45	150,000,000	150,000,000		Dinas Sosial
1.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	153,183,900	203,183,900		Dinas Sosial
1.06.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG DILUAR PANTI SOSIAL	100			80,000,000	80,000,000		
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	80,000,000	80,000,000		
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	90	80,000,000	80,000,000		Dinas Sosial

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PPKS	59,73			350,000,000	350,000,000		
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	77,92	350,000,000	350,000,000		
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2675	150,000,000	150,000,000		Dinas Sosial
1.06.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	200,000,000	200,000,000		Dinas Sosial
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	100			50,000,000	50,000,000		
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100	50,000,000	50,000,000		
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial
01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								651,100,000	776,100,000		
01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								651,100,000	776,100,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								651,100,000	776,100,000		
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								651,100,000	776,100,000		
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja		PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	0,20			581,100,000	706,100,000		
2.07.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						Lulusan Bersertifikat Kompetensi	80	581,100,000	706,100,000		
2.07.03.2.01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16	581,100,000	706,100,000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja		PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	96			70,000,000	70,000,000		
2.07.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota						Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	8	70,000,000	70,000,000		
2.07.04.2.01.01.	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2	50,000,000	50,000,000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.2.01.04.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	1	20,000,000	20,000,000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								216,000,000	216,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								216,000,000	216,000,000		
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								100,000,000	100,000,000		
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PPRG	90			100,000,000	100,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	0,5	100,000,000	100,000,000		
2.08.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	100,000,000	100,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								15,565,741,500	31,490,000,000		
01.01.	<u>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</u>								15,565,741,500	31,490,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								733,104,000	4,410,000,000		
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								733,104,000	4,410,000,000		
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE INTERVENSI CPM	5			56,918,000	225,000,000		
2.09.02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	93.33	56,918,000	225,000,000		
2.09.02.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	14	56,918,000	225,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KONSUMSI	2100			190,768,000	1,185,000,000		
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						Angka Kecukupan Protein (AKP)	57	190,768,000	1,185,000,000		
2.09.03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	190,768,000	1,185,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor		PREVALENCE PENDUDUK DENGAN	3.03			485,418,000	3,000,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pertanian dan Perikanan		KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT							
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	10	485,418,000	3,000,000,000		
2.09.04.2.02.02.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	485,418,000	3,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								1,012,500,223	785,000,223		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1,012,500,223	785,000,223		
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								1,012,500,223	785,000,223		
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA	50,00			200,000,000	200,000,000		
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	35	200,000,000	200,000,000		
2.13.03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	35	200,000,000	200,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		JUMLAH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) YANG AKTIF	40			390,000,000	200,000,000		
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Jumlah Bumdes yang di Bina	54	390,000,000	200,000,000		
2.13.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	54	390,000,000	200,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		JUMLAH KELOMPOK USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF	30			187,500,000	150,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	60	187,500,000	150,000,000		
2.13.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10	187,500,000	150,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		RATA-RATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)	15			235,000,223	235,000,223		
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	135	235,000,223	235,000,223		
2.13.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10	235,000,223	235,000,223		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								116,000,000	116,000,000		
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				UNMEET NEED	10.95			10,000,000	10,000,000		
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	78,50	10,000,000	10,000,000		
2.14.03.2.03.16.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan						Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	80	10,000,000	10,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												Keluarga Berencana
214.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				INDEK PEMBANGUNAN KELUARGA	58.50			106,000,000	106,000,000		
214.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPKKS) Aktif	83	106,000,000	106,000,000		
214.04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9	106,000,000	106,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro								2,720,750,000	2,620,750,000		
01.01.	<u>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</u>								2,720,750,000	2,620,750,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2,720,750,000	2,620,750,000		
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								2,720,750,000	2,620,750,000		
217.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan		PERSENTASE KOPERASI SEHAT	30.51			150,000,000	150,000,000		
217.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	2	150,000,000	150,000,000		
217.04.2.01.01.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	11	150,000,000	150,000,000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
217.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor		PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA	0			200,000,000	200,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perindustrian dan perdagangan		KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN							
2.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	22	200,000,000	200,000,000		
2.17.05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	22	200,000,000	200,000,000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan		PERSENTASE USAHA MIKRO MENJADI WIRUSAHA	5.85			2,370,750,000	2,270,750,000		
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	3194	2,370,750,000	2,270,750,000		
2.17.07.2.01.02.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2	2,020,750,000	1,970,750,000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.04.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2	350,000,000	300,000,000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
02.	Dinas Pemuda dan Olahraga								300,000,000	700,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								300,000,000	700,000,000		
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								300,000,000	700,000,000		
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja		PERSENTASE PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	70			300,000,000	700,000,000		
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1	300,000,000	700,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.02.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10	50,000,000	50,000,000		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10	250,000,000	650,000,000		Dinas Pemuda dan Olahraga
01.	Dinas Perikanan								10,710,000,000	8,676,000,000		
01.01.	<u>DINAS PERIKANAN</u>								10,710,000,000	8,676,000,000		
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								10,710,000,000	8,676,000,000		
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN								10,710,000,000	8,676,000,000		
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	0.82			3,290,000,000	2,440,000,000		
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	137818.24	1,585,000,000	935,000,000		
3.25.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	1,585,000,000	935,000,000		Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	20,94	1,030,000,000	830,000,000		
3.25.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	35	530,000,000	330,000,000		Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	25	150,000,000	150,000,000		Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan	10	350,000,000	350,000,000		Dinas Perikanan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pembiayaan, Kemitraan Usaha					
3.25.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1	675,000,000	675,000,000		
3.25.03.2.03.02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	675,000,000	675,000,000		Dinas Perikanan
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	1,44			4,150,000,000	2,650,000,000		
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						Jumlah kelompok budidaya yang terbina	23	1,100,000,000	1,100,000,000		
3.25.04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8	850,000,000	850,000,000		Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8	250,000,000	250,000,000		Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						Jumlah produksi benih ikan	35000	1,650,000,000	150,000,000		
3.25.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	1,650,000,000	150,000,000		Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4282.04	1,400,000,000	1,400,000,000		
3.25.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	1,400,000,000	1,400,000,000		Dinas Perikanan
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	2,00			3,270,000,000	3,586,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	4	160,000,000	160,000,000		
3.25.06.2.01.01.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	160,000,000	160,000,000		Dinas Perikanan
3.25.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	4,98	180,000,000	180,000,000		
3.25.06.2.02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	180,000,000	180,000,000		Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	6	2,930,000,000	3,246,000,000		
3.25.06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2	2,930,000,000	3,246,000,000		Dinas Perikanan
01.	Dinas Pariwisata								150,000,000	150,000,000		
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								150,000,000	150,000,000		
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								150,000,000	150,000,000		
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata		PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG DIKEMBANGKAN	80			150,000,000	150,000,000		
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Jumlah SDM yang Dibina	114	150,000,000	150,000,000		
3.26.05.2.01.05.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,	2	150,000,000	150,000,000		Dinas Pariwisata

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif					
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								14,832,637,500	27,080,000,000		
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								14,832,637,500	27,080,000,000		
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	1,5			1,497,967,500	3,330,000,000		
3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	1.53	1,497,967,500	3,330,000,000		
3.27.02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5	1,497,967,500	3,330,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TERNAK	0,75			12,242,455,000	14,010,000,000		
3.27.02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						Persentase kenaikan populasi ternak	1.48	12,242,455,000	14,010,000,000		
3.27.02.2.06.03.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	30	12,242,455,000	14,010,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE SARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	70,34			180,000,000	0		
3.27.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	5	180,000,000	0		
3.27.02.2.01.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	180,000,000	0		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	43			503,117,500	4,040,000,000		
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian						Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	2562,4	503,117,500	4,040,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.03.2.0115.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	503,117,500	4,040,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan		PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	0,43			409,097,500	5,700,000,000		
3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	15	409,097,500	5,700,000,000		
3.27.04.2.01.05.	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1	409,097,500	5,700,000,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
JUMLAH									0	0		

TABEL T-IV.26

Program Unggulan Pencapaian Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
PERTUMBUHAN EKONOMI	2.09.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	72,918,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	470,268,000	
	2.09.04. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	485,418,000	
	2.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	370,000,000	
	2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	250,000,000	
	2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	200,000,000	
	2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	250,000,000	
	2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,770,750,000	
	2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	375,000,000	
	2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	630,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	319,107,081	
	2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	550,133,000	
	2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100,000,000	
	3.25.03. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3,290,000,000	Dinas Perikanan
	3.25.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6,805,000,000	
	3.25.06. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3,573,790,711	
	3.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,250,000,000	Dinas Pariwisata
	3.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1,200,000,000	
	3.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,350,000,000	
	3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15,605,422,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,630,383,610	
	3.27.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	409,097,500	
	3.27.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	362,711,590	
	3.27.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	263,792,000	
	3.30.02. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	468,750,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
	3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,856,250,000	
	3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	930,000,000	
	3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	600,000,000	
	3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5,969,718,547	

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
	3.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100,000,000	
	3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	350,000,000	
TINGKAT PENGANGGURAN	2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	841,100,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	500,000,000	
	2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	400,000,000	
	2.19.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	970,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
PEMBANGUNAN MANUSIA	1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73,369,346,678	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	78,000,000	
	1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,313,999,200	
	1.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,790,000,000	Dinas Kesehatan
	1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	98,283,696,956	
	1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	200,000,000	
	1.02.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	250,000,000	
	1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	52,290,748,742	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	2.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	525,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	874,000,000	
	2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	200,000,000	
	2.08.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250,000,000	
	2.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160,000,000	
	2.22.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,680,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	650,000,000	
	2.22.04. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	300,000,000	
	2.22.05. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250,000,000	
	2.22.06. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,520,000,000	
	2.23.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,135,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	125,000,000	Kecamatan Bunguran Barat
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	120,000,000	Kecamatan Bunguran Batubi
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	70,000,000	Kecamatan Bunguran Selatan
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50,000,000	Kecamatan Bunguran Tengah
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	123,000,000	Kecamatan Bunguran Timur
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	120,000,000	Kecamatan Bunguran Timur Laut
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	120,000,000	Kecamatan Bunguran Utara
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	125,000,000	Kecamatan Midai
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	125,000,000	Kecamatan Pulau Laut
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	108,000,000	Kecamatan Pulau Panjang

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	105,000,000	Kecamatan Pulau Seluan
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100,000,000	Kecamatan Pulau Tiga
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	70,000,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	175,000,000	Kecamatan Serasan
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	150,000,000	Kecamatan Serasan Timur
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	125,000,000	Kecamatan Suak Midai
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	175,000,000	Kecamatan Subi
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,407,675,885	Sekretariat Daerah
KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN WILAYAH	1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6,411,499,000	
	1.03.04. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1,270,000,000	
	1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5,041,700,000	
	1.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	28,192,000,000	
	1.03.07. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1,240,000,000	
	1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	14,735,000,000	
	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	188,849,260,000	
	1.03.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	700,000,000	
	1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	920,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6,075,000,000	
	1.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1,300,000,000	
	1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1,950,000,000	
	1.06.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	403,183,900	Dinas Sosial
	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	750,000,000	
	1.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	608,284,000	
	1.06.06. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	375,000,000	
	2.13.02. PROGRAM PENATAAN DESA	360,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	560,000,000	
	2.13.04. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,829,385,000	
	2.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,181,500,223	
	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10,214,000,000	Dinas Perhubungan
	2.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	9,140,000,000	
PELAYANAN PUBLIK	1.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	206,769,433,114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107,178,548,083	Dinas Kesehatan
	1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20,440,872,500	
	1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	580,000,000	

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
	1.02.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	60,000,000	
	1.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,345,020,611	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	26,237,670,000	
	1.04.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,944,036,900	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,012,876,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,360,217,709	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,309,235,031	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2,477,624,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1,656,450,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,476,161,400	Dinas Sosial
	2.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,031,786,020	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.08.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,892,054,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.11.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,489,902,891	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	620,000,000	
	2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2,985,000,000	
	2.11.05. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100,000,000	
	2.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	375,000,000	
	2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	225,000,000	
	2.11.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	300,000,000	
	2.11.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50,000,000	
	2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9,740,000,000	
	2.12.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,825,242,427	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	357,500,000	
	2.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	116,250,000	
	2.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	908,920,000	
	2.12.05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	62,500,000	
	2.13.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.15.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,565,550,000	Dinas Perhubungan
	2.16.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,719,964,140	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,813,400,000	
	2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,789,600,000	
	2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,954,988,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	450,000,000	

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
	2.19.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,326,858,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.20.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	360,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	400,000,000	
	2.23.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,942,775,813	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	455,000,000	
	2.24.03. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	120,000,000	
	3.25.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,026,289,617	Dinas Perikanan
	3.26.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,228,983,416	Dinas Pariwisata
	3.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	225,000,000	
	3.27.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,556,747,834	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
	3.31.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,210,490,000	
	4.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52,991,141,062	Sekretariat Daerah
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,512,325,851	
	4.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3,251,750,000	
	4.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,840,965,292	Sekretariat DPRD
	4.02.02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11,933,480,000	
	5.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,158,872,973	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,180,000,000	
	5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,300,000,000	
	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,455,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	150,809,700,200	
	5.02.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,400,000,000	
	5.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,430,000,000	
	5.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,927,246,518	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,718,924,482	
	5.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,562,500,000	
	5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,420,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,954,406,657	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	6.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,547,045,987	Inspektorat Daerah
	6.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,716,065,000	
	6.01.03. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,000,000,000	
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,438,070,496	Kecamatan Bunguran Barat

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,984,579,124	Kecamatan Bunguran Batubi
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,367,399,314	Kecamatan Bunguran Selatan
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,319,160,852	Kecamatan Bunguran Tengah
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,441,701,012	Kecamatan Bunguran Timur
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,008,495,932	Kecamatan Bunguran Timur Laut
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,842,010,346	Kecamatan Bunguran Utara
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,347,970,496	Kecamatan Midai
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,485,431,899	Kecamatan Pulau Laut
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,348,550,000	Kecamatan Pulau Panjang
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,228,231,503	Kecamatan Pulau Seluan
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,182,516,466	Kecamatan Pulau Tiga
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,103,410,763	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,731,980,714	Kecamatan Serasan
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,976,230,688	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,167,400,576	Kecamatan Suak Midai
	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,217,786,947	Kecamatan Subi
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	717,641,000	Kecamatan Bunguran Barat
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	344,000,000	Kecamatan Bunguran Batubi
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	204,217,000	Kecamatan Bunguran Selatan
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,000,000	Kecamatan Bunguran Tengah
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,427,116,000	Kecamatan Bunguran Timur
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	424,865,000	Kecamatan Bunguran Timur Laut
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	311,770,000	Kecamatan Bunguran Utara
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	897,452,000	Kecamatan Midai
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	382,170,000	Kecamatan Pulau Laut
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	200,474,000	Kecamatan Pulau Panjang
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	120,524,000	Kecamatan Pulau Seluan
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170,000,000	Kecamatan Pulau Tiga
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	175,022,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	673,150,000	Kecamatan Serasan
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	287,905,000	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	352,752,000	Kecamatan Suak Midai
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	306,925,000	Kecamatan Subi
	7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	680,000,000	Kecamatan Bunguran Timur
	7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80,000,000	Kecamatan Subi
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80,000,000	Kecamatan Bunguran Barat

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	145,000,000	Kecamatan Bunguran Batubi
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79,000,000	Kecamatan Bunguran Selatan
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45,000,000	Kecamatan Bunguran Tengah
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90,000,000	Kecamatan Bunguran Timur
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	190,000,000	Kecamatan Bunguran Timur Laut
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	149,000,000	Kecamatan Bunguran Utara
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80,000,000	Kecamatan Midai
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	140,000,000	Kecamatan Pulau Laut
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50,000,000	Kecamatan Pulau Panjang
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60,000,000	Kecamatan Pulau Seluan
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84,000,000	Kecamatan Pulau Tiga
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80,000,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,000,000	Kecamatan Serasan
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120,000,000	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,000,000	Kecamatan Suak Midai
	7.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120,000,000	Kecamatan Subi
	8.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,685,509,812	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1.05.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	822,550,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000	Kecamatan Bunguran Barat
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000	Kecamatan Bunguran Batubi
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000	Kecamatan Bunguran Selatan
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000	Kecamatan Bunguran Tengah
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40,000,000	Kecamatan Bunguran Timur
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40,000,000	Kecamatan Bunguran Timur Laut
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60,000,000	Kecamatan Bunguran Utara
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000	Kecamatan Midai
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000	Kecamatan Pulau Laut
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000	Kecamatan Pulau Panjang
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000	Kecamatan Pulau Seluan
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,000,000	Kecamatan Pulau Tiga
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24,000,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000	Kecamatan Serasan
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000	Kecamatan Suak Midai
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40,000,000	Kecamatan Subi

ASPEK	NAMA PROGRAM UNGGULAN TERKAIT ASPEK	ALOKASI DALAM RKPD 2023 (Rp)	DINAS PELAKSANA
	8.01.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	470,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	307,500,000	
	8.01.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	74,250,000	
	8.01.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	330,000,000	
	8.01.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	939,733,000	
CAPAIAN PEMBANGUNAN SPESIFIK DAERAH	3.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4,062,500,000	Dinas Pariwisata
	5.06.02. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	510,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
JUMLAH		1,516,228,714,591	

TABEL T-IV.27

PROGRAM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN NATUNA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								60,939,495,035	66,512,165,877		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								60,939,495,035	66,512,165,877		
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								60,939,495,035	66,512,165,877		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR	0.01			16,325,890,000	16,076,090,000		
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	49.52	16,325,890,000	16,076,090,000		
1.01.02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	3,050,000,000	2,950,200,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6	476,140,000	476,140,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	784,000,000	784,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	6,905,750,000	6,905,750,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Penjaga Sekolah						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	650,000,000	650,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	300,000,000	300,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	350,000,000	350,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	730,000,000	730,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga	1	250,000,000	200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					
1.01.02.2.01.31.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3	2,830,000,000	2,730,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH	0.0097			15,270,190,000	16,180,950,000		
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71.34	15,270,190,000	16,180,950,000		
1.01.02.2.02.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	2,723,310,000	3,723,310,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	450,000,000	1,100,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	959,200,000	959,200,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4	2,971,800,000	2,288,800,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	7	260,000,000	338,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.09.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	1,323,280,000	1,523,280,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	4,605,000,000	4,225,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	880,000,000	800,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	270,000,000	350,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	100,000,000	100,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	727,600,000	773,360,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 13-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	90.93			7,638,750,000	8,837,960,842		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	70	4,953,310,000	5,002,520,842		
1.01.02.2.02.34.	Perlengkapan Belajar Peserta Didik						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1350	325,000,000	350,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1350	325,789,157	350,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	22	400,000,000	400,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27	2,902,520,843	2,902,520,842		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40	400,000,000	400,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27	250,000,000	250,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.43.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27	200,000,000	200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71.34	2,685,440,000	3,835,440,000		
1.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	250,000,000	250,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	125,000,000	125,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3250	2,310,440,000	3,460,440,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD	61.34			5,989,350,000	6,489,350,000		
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15	5,539,350,000	6,039,350,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	3,733,350,000	4,183,350,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1,436,000,000	1,486,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.04.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	170,000,000	170,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3500	200,000,000	200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	1.20	450,000,000	450,000,000		
1.01.02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17	200,000,000	200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	116	50,000,000	50,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	116	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.19.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	116	50,000,000	50,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR	97.43			11,174,334,416	12,686,834,416		
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Rata-rata Kelulusan SD/MI	100	7,192,894,416	8,236,894,416		
1.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16	400,000,000	400,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	83	5,472,894,416	6,516,894,416		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	10	250,000,000	250,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	84	500,000,000	500,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	84	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.30.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84	420,000,000	420,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	49.52	3,981,440,000	4,449,940,000		
1.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3	645,000,000	637,500,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	926,000,000	1,002,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8806	2,260,440,000	2,660,440,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.22.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN	92.56			3,226,981,419	4,526,981,419		
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	55	3,226,981,419	4,526,981,419		
1.01.02.2.04.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	2,613,160,000	3,913,160,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.14.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11	233,821,419	233,821,419		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	11	150,000,000	150,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					
1.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	130,000,000	130,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	100,000,000	100,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN PROFESIONAL	32.75			1,313,999,200	1,713,999,200		
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	100	1,313,999,200	1,713,999,200		
1.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	768,362,100	968,362,100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	545,637,100	745,637,100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.	Dinas Kesehatan								7,699,674,400	10,161,897,001		
01.01.	DINAS KESEHATAN								7,699,674,400	10,161,897,001		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7,699,674,400	10,161,897,001		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								7,699,674,400	10,161,897,001		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN TB SEMUA TIPE (SUCCES RATE)	100			500,000,000	500,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500,000,000	500,000,000		
1.02.02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	578	500,000,000	500,000,000		Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU FASILITAS KESEHATAN YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI	100			2,088,704,400	3,500,000,001		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92	2,088,704,400	3,500,000,001		
1.02.02.2.01.03.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4	2,088,704,400	3,500,000,001		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI SESUAI STANDAR	69.65			397,000,000	397,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	397,000,000	397,000,000		
1.02.02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1433	397,000,000	397,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100			1,300,000,000	2,350,927,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500,000,000	1,006,000,000		
1.02.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1780	500,000,000	1,006,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	800,000,000	1,344,927,000		
1.02.02.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1777	800,000,000	1,344,927,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKUKAN SKRINING KESEHATAN	100			1,313,970,000	1,313,970,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan						Persentase anak usia pendidikan dasar yang	100	431,970,000	431,970,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
1.02.02.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15765	431,970,000	431,970,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	532,000,000	532,000,000		
1.02.02.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64960	532,000,000	532,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	350,000,000	350,000,000		
1.02.02.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6491	350,000,000	350,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PANDU PTM	71.42			1,536,000,000	1,536,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	100	583,000,000	583,000,000		
1.02.02.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150	583,000,000	583,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	100	468,000,000	468,000,000		
1.02.02.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1292	468,000,000	468,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	100	485,000,000	485,000,000		
1.02.02.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18376	485,000,000	485,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN BALITA	100			564,000,000	564,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					SEHAT DAN BALITA SAKIT							
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	564,000,000	564,000,000		
1.02.02.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5657	564,000,000	564,000,000		Dinas Kesehatan
01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								27,034,700,000	26,938,227,686		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								27,034,700,000	26,938,227,686		
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG								27,034,700,000	26,938,227,686		
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		KETERSEDIAAN AIR BAKU	195.22			850,000,000	4,706,000,000		
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penambahan Tampungan Air Baku	99.995	850,000,000	4,706,000,000		
1.03.02.2.01121.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1.00	850,000,000	4,706,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE PENAMBAHAN RUMAH TANGGA BERAKSES AIR BERSIH	2.2			5,947,000,000	6,049,780,000		
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota						Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	480	5,947,000,000	6,049,780,000		
1.03.03.2.0122.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	250	1,942,000,000	1,666,080,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.0124.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	250,000,000	257,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.0125.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	250,000,000	285,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.0126.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1	2,500,000,000	2,696,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.03.2.01.32.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	230	1,005,000,000	1,145,700,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	36.70			1,270,000,000	2,087,569,686		
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						Cakupan Wilayah Penangan Sampah	7	1,270,000,000	2,087,569,686		
1.03.04.2.01.10.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	660	700,000,000	1,573,569,686		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04.2.01.17.	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	2	570,000,000	514,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE RUMAH TANGGA TERLAYANI AKSES SANITASI LAYAK	80.79			4,232,700,000	4,464,878,000		
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	400	4,232,700,000	4,464,878,000		
1.03.05.2.01.39.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	400	4,232,700,000	4,464,878,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE PENATAAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM	85.42			14,735,000,000	9,630,000,000		
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun	71.28	14,735,000,000	9,630,000,000		
1.03.09.2.01.08.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3	14,735,000,000	9,630,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan								60,585,748,742	43,115,543,246		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								60,585,748,742	43,115,543,246		
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								60,585,748,742	43,115,543,246		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	87			920,000,000	920,000,000		
1.04.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						jumlah laporan	1	150,000,000	150,000,000		
1.04.02.2.01.08.	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	150,000,000	150,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	6	770,000,000	770,000,000		
1.04.02.2.03.04.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	390,000,000	390,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.12.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2	380,000,000	380,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI	25.38			6,075,000,000	5,433,437,000		
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						Luas lingkungan permukiman kumuh	30	6,075,000,000	5,433,437,000		
1.04.03.2.03.02.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30	750,000,000	750,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.13.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1	5,325,000,000	4,683,437,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE AREAL KAWASAN KUMUH	60			100,000,000	100,000,000		
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						jumlah perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh	5	100,000,000	100,000,000		
1.04.04.2.01.04.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya						Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5	100,000,000	100,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru											
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		RASIO RUMAH LAYAK HUNI	0.142857			1,200,000,000	1,949,842,630		
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Rumah Layak Huni	60	1,200,000,000	1,949,842,630		
1.04.04.2.01.01.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20	1,200,000,000	1,949,842,630		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat		PERSENTASE RUMAH IBADAH DALAM KONDISI BAIK	58			52,290,748,742	34,712,263,616		
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						Rumah ibadah dalam kondisi baik	237	52,290,748,742	34,712,263,616		
1.04.05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2	52,290,748,742	34,712,263,616		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat								402,550,000	403,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								402,550,000	403,000,000		
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								402,550,000	403,000,000		
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80			402,550,000	403,000,000		
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	80	402,550,000	403,000,000		
1.05.02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	22,000,000	22,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21	100,550,000	101,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.10.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10	65,000,000	65,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.11.	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP						Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1	50,000,000	50,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.12.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan						Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	8	65,000,000	65,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.13.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	150	50,000,000	50,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.14.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	10	50,000,000	50,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								1,857,050,000	2,682,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1,857,050,000	2,682,000,000		
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								1,857,050,000	2,682,000,000		
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		PERSENTASE KASUS KEBAKARAN YANG TERTANGANI	100			1,857,050,000	2,682,000,000		
1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	1,627,050,000	2,452,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.04.2.01.01.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	980,000,000	1,340,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.02.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	100,000,000	150,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.03.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	100,000,000	200,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.04.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	176,450,000	350,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2	270,600,000	412,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	70	150,000,000	150,000,000		
1.05.04.2.02.01.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	100,000,000	100,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02.02.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	50,000,000	50,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.03.	Investigasi Kejadian Kebakaran						Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100	50,000,000	50,000,000		
1.05.04.2.03.01.	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1	50,000,000	50,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	96	30,000,000	30,000,000		
1.05.04.2.04.03.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana						Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1	30,000,000	30,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								1,977,624,000	2,012,124,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1,977,624,000	2,012,124,000		
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								1,977,624,000	2,012,124,000		
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		PERSENTASE DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA	9.1			1,977,624,000	2,012,124,000		
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	50	300,000,000	300,000,000		
1.05.03.2.01.04.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	40	300,000,000	300,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/ kota	1	400,000,000	400,000,000		
1.05.03.2.01.03.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	400,000,000	400,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90	657,624,000	692,124,000		
1.05.03.2.02.06.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	100,000,000	80,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas	40	157,624,000	242,124,000		Badan Penanggulangan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kabupaten/Kota						Teknis dan Manajerialnya					Bencana Daerah
1.05.03.2.02.16.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	250	200,000,000	200,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.17.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	200,000,000	170,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	620,000,000	620,000,000		
1.05.03.2.03.02.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	370,000,000	370,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.09.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10	250,000,000	250,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.	Dinas Sosial								950,000,000	950,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								950,000,000	950,000,000		
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								950,000,000	950,000,000		
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG DILUAR PANTI SOSIAL	100			750,000,000	750,000,000		
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	750,000,000	750,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30,000,000	30,000,000		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	150,000,000	150,000,000		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	120,000,000	120,000,000		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	80,000,000	80,000,000		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	100,000,000	100,000,000		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.12.	Pemberian Layanan Rujukan						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	220,000,000	220,000,000		Dinas Sosial
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	100			200,000,000	200,000,000		
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100	200,000,000	200,000,000		
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap	10	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial
01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								230,000,000	230,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								230,000,000	230,000,000		
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								230,000,000	230,000,000		
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		TOTAL FERTILITY RATE	2.35			20,000,000	20,000,000		
2.14.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						Jumlah institusi pendididkan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	1	10,000,000	10,000,000		
2.14.02.2.01.07.	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2	10,000,000	10,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai Acuan Perencanaan	1	10,000,000	10,000,000		
2.14.02.2.01.02.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	10,000,000	10,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				UNMEET NEED	10,95			210,000,000	210,000,000		
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	78,50	10,000,000	10,000,000		
2.14.03.2.03.16.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan						Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	80	10,000,000	10,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya jumlah KB MKJP	2	200,000,000	200,000,000		
2.14.03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2	200,000,000	200,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01.	Dinas Perhubungan								2,252,000,000	11,953,720,234		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2,252,000,000	11,953,720,234		
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								2,252,000,000	11,953,720,234		
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90			72,000,000	72,000,000		
2.15.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	50,000,000	50,000,000		
2.15.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	50,000,000	50,000,000		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	22,000,000	22,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	22,000,000	22,000,000		Dinas Perhubungan
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		PERSENTASE DESA YANG TERLAYANI SARANA ANGKUTAN UMUM	81			1,980,000,000	11,360,000,000		
2.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	70	880,000,000	6,810,000,000		
2.15.02.2.02.01.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	880,000,000	6,810,000,000		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						Jumlah Lokasi Pakir yang beroperasi	1	150,000,000	200,000,000		
2.15.02.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	150,000,000	200,000,000		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	1	50,000,000	350,000,000		
2.15.02.2.06.15.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	50,000,000	350,000,000		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						jumlah angkutan umum perdesaan	1	900,000,000	4,000,000,000		
2.15.02.2.09.02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	200,000,000	1,500,000,000		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.03.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	700,000,000	2,500,000,000		Dinas Perhubungan
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		RASIO LAYANAN ANGKUTAN LAUT	0.4			200,000,000	521,720,234		
2.15.03.2.13.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						Persentase pelabuhan danau yang di bangun	100	200,000,000	521,720,234		
2.15.03.2.13.02.	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1	200,000,000	521,720,234		Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								1,066,300,000	845,900,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1,066,300,000	845,900,000		
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								1,066,300,000	845,900,000		
2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90			631,300,000	560,900,000		
2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80	423,000,000	395,000,000		
2.23.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6,000,000	6,000,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	357,000,000	329,000,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	60,000,000	60,000,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	80	110,800,000	68,400,000		
2.23.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	110,800,000	68,400,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	97,500,000	97,500,000		
2.23.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	97,500,000	97,500,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA	78			435,000,000	285,000,000		
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengunjung Perpustakaan	25.000	435,000,000	285,000,000		
2.23.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	65	435,000,000	285,000,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					
01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								70,000,000	70,000,000		
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								70,000,000	70,000,000		
5.01.	PERENCANAAN								70,000,000	70,000,000		
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		NILAI LAPORAN LKJIP	88.45			70,000,000	70,000,000		
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	80	70,000,000	70,000,000		
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	70,000,000	70,000,000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH									0	0		

TABEL T-IV.28

SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAMS (SDG's)
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN NATUNA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Dinas Kesehatan								31,620,918,800	33,171,845,800		
01.01.	DINAS KESEHATAN								24,674,400,000	26,225,327,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								24,674,400,000	26,225,327,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								24,674,400,000	26,225,327,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		INSIDEN RATE DBD	23.8			370,000,000	370,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	100	370,000,000	370,000,000		
1.02.02.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	370,000,000	370,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE BBLR	3.8			1,100,000,000	1,100,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	100	1,100,000,000	1,100,000,000		
1.02.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1,100,000,000	1,100,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN TB SEMUA TIPE (SUCCES RATE)	100			500,000,000	500,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500,000,000	500,000,000		
1.02.02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578	500,000,000	500,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80%	86.6			477,400,000	477,400,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	90.2	477,400,000	477,400,000		
1.02.02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	477,400,000	477,400,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	100			15,000,000,000	15,000,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	47070	15,000,000,000	15,000,000,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	15,000,000,000	15,000,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI SESUAI STANDAR	69.65			397,000,000	397,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	397,000,000	397,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1433	397,000,000	397,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100			1,300,000,000	2,350,927,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	500,000,000	1,006,000,000		
1.02.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1780	500,000,000	1,006,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	800,000,000	1,344,927,000		
1.02.02.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1777	800,000,000	1,344,927,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKUKAN SKRINING KESEHATAN	100			700,000,000	700,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	9.86	350,000,000	350,000,000		
1.02.02.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	350,000,000	350,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan	100	350,000,000	350,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan sesuai standar					
1.02.02.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6491	350,000,000	350,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PANDU PTM	71.42			1,536,000,000	1,536,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	100	583,000,000	583,000,000		
1.02.02.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150	583,000,000	583,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	100	468,000,000	468,000,000		
1.02.02.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1292	468,000,000	468,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	100	485,000,000	485,000,000		
1.02.02.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18376	485,000,000	485,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN BALITA SEHAT DAN BALITA SAKIT	100			564,000,000	564,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	564,000,000	564,000,000		
1.02.02.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5657	564,000,000	564,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	100			200,000,000	200,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	14	200,000,000	200,000,000		
1.02.02.2.02.19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	200,000,000	200,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES AIR BERSIH	97.5			1,625,000,000	2,125,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	24567	1,625,000,000	2,125,000,000		
1.02.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1,625,000,000	2,125,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PREVALENSI HIV	0.2			655,000,000	655,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	100	655,000,000	655,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
1.02.02.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1987	655,000,000	655,000,000		Dinas Kesehatan
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan		PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PHBS	34			250,000,000	250,000,000		
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Posyandu Aktif	90	250,000,000	250,000,000		
1.02.05.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	250,000,000	250,000,000		Dinas Kesehatan
01.03.	<u>PUSKESMAS RANAI</u>								2,140,930,400	2,140,930,400		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2,140,930,400	2,140,930,400		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,140,930,400	2,140,930,400		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			2,140,930,400	2,140,930,400		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	1,640,930,400	1,640,930,400		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1,640,930,400	1,640,930,400		Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	85.0	500,000,000	500,000,000		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	500,000,000	500,000,000		Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.04.	<u>PUSKESMAS TANJUNG</u>								322,650,450	322,650,450		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								322,650,450	322,650,450		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								322,650,450	322,650,450		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			322,650,450	322,650,450		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	322,650,450	322,650,450		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	322,650,450	322,650,450		Dinas Kesehatan
01.05.	<u>PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH</u>								317,832,000	317,832,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								317,832,000	317,832,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								317,832,000	317,832,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			317,832,000	317,832,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	317,832,000	317,832,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	317,832,000	317,832,000		Dinas Kesehatan
01.06.	<u>PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN</u>								250,404,000	250,404,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								250,404,000	250,404,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								250,404,000	250,404,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	80.30			250,404,000	250,404,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Akuntabel		PUSKESMAS							
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas ~!	1.2	250,404,000	250,404,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	250,404,000	250,404,000		Dinas Kesehatan
01.07.	<u>PUSKESMAS KELARIK</u>								125,000,000	125,000,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								125,000,000	125,000,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								125,000,000	125,000,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			125,000,000	125,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	125,000,000	125,000,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	125,000,000	125,000,000		Dinas Kesehatan
01.08.	<u>PUSKESMAS SEDANAU</u>								775,970,000	775,970,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								775,970,000	775,970,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								775,970,000	775,970,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			775,970,000	775,970,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	775,970,000	775,970,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	1	775,970,000	775,970,000		Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kesehatan Masyarakat					
01.09.	<u>PUSKESMAS PULAU TIGA</u>								665,760,000	665,760,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								665,760,000	665,760,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								665,760,000	665,760,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			665,760,000	665,760,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	665,760,000	665,760,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	665,760,000	665,760,000		Dinas Kesehatan
01.10.	<u>PUSKESMAS PULAU LAUT</u>								284,920,000	284,920,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								284,920,000	284,920,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								284,920,000	284,920,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			284,920,000	284,920,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	284,920,000	284,920,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	284,920,000	284,920,000		Dinas Kesehatan
01.11.	<u>PUSKESMAS MIDA</u>								541,464,000	541,464,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								541,464,000	541,464,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								541,464,000	541,464,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			541,464,000	541,464,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	541,464,000	541,464,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	541,464,000	541,464,000		Dinas Kesehatan
01.12.	PUSKESMAS SERASAN								322,650,450	322,650,450		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								322,650,450	322,650,450		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								322,650,450	322,650,450		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			322,650,450	322,650,450		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	322,650,450	322,650,450		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	322,650,450	322,650,450		Dinas Kesehatan
01.13.	PUSKESMAS SERASAN TIMUR								373,460,000	373,460,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								373,460,000	373,460,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								373,460,000	373,460,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			373,460,000	373,460,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	373,460,000	373,460,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	373,460,000	373,460,000		Dinas Kesehatan
0114.	<u>PUSKESMAS SUBI</u>								362,630,000	362,630,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								362,630,000	362,630,000		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								362,630,000	362,630,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			362,630,000	362,630,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	362,630,000	362,630,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	362,630,000	362,630,000		Dinas Kesehatan
0115.	<u>PUSKESMAS BATUBI JAYA</u>								216,967,500	216,967,500		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								216,967,500	216,967,500		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								216,967,500	216,967,500		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			216,967,500	216,967,500		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	216,967,500	216,967,500		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	216,967,500	216,967,500		Dinas Kesehatan
0116.	<u>PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT</u>								245,880,000	245,880,000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								245,880,000	245,880,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								245,880,000	245,880,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	80.30			245,880,000	245,880,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	1.2	245,880,000	245,880,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	245,880,000	245,880,000		Dinas Kesehatan
01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								646,000,000	646,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								646,000,000	646,000,000		
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								540,000,000	540,000,000		
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PPRG	90			100,000,000	100,000,000		
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	30	100,000,000	100,000,000		
2.08.02.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	100,000,000	100,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		PERSENTASE KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENDAPATKAN	100			310,000,000	310,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					LAYANAN KOMPREHENSIF							
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						Pesrsentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	100	130,000,000	130,000,000		
2.08.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	130,000,000	130,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga layanan	100	180,000,000	180,000,000		
2.08.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	4	180,000,000	180,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				PERSENTASE CAPAIAN INDIKANTOR KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)	70			130,000,000	130,000,000		
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota						jumlah lembaga PHA	4	130,000,000	130,000,000		
2.08.06.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	1	130,000,000	130,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					
01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								156,250,000	165,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								156,250,000	165,000,000		
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								156,250,000	165,000,000		
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	91			156,250,000	165,000,000		
2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil						Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100	156,250,000	165,000,000		
2.12.03.2.01.01.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6	116,250,000	125,000,000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.02.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	20,000,000	20,000,000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.05.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1	20,000,000	20,000,000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								106,000,000	106,000,000		
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				INDEK PEMBANGUNAN KELUARGA	58.50			106,000,000	106,000,000		
2.14.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK- R/M UPKKS) Aktif	83	106,000,000	106,000,000		
2.14.04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan	9	106,000,000	106,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan,

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								435,000,000	285,000,000		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								435,000,000	285,000,000		
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								435,000,000	285,000,000		
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA	78			435,000,000	285,000,000		
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengunjung Perpustakaan	25.000	435,000,000	285,000,000		
2.23.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	65	435,000,000	285,000,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
JUMLAH									0	0		



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 didukung oleh berbagai program perangkat daerah yang dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025 berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian dilakukan antara lain disebabkan: 1) perubahan perangkat daerah dan/atau SOTK setelah penetapan RPJMD dan Renstra PD; dan 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan dokumen RPJMD pada tahun berkenaan dan perkiraan maju satu tahun berikutnya. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Natuna tahun 2025 beserta dengan indikator dan target kinerja terdapat pada tabel di bawah ini:

TABEL T-V.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAB. NATUNA

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						304.395.068.149,00							393.022.122.991,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						298.175.068.149,00							387.527.122.991,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						298.175.068.149,00							387.527.122.991,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	209.361.433.114,00						-	216.478.623.113,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	189.606.478.850,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	192.814.478.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1081 Orang/bulan	188.906.478.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		191.714.478.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.805.824.400,00			-	-	-	-	2.925.824.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	129.037.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		129.037.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	311.392.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		311.392.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	141.592.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		141.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	358.392.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		358.392.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	1.335.411.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.335.411.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	275.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.664.996.000,00			-	-	-	-	9.267.016.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	185.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	680.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	387.392.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		487.392.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	491.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		473.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	805.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		805.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.886.604.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.386.604.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	730.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		730.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.084.133.864,00			-	-	-	-	5.084.403.863,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	237.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		237.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	756.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		756.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1080 Laporan	4.090.333.864,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.090.603.863,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.125.000.000,00			-	-	-	-	3.036.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.819.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.730.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	506.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		506.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	87.221.635.835,00						-	169.056.500.678,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	43.162.624.416,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	89.706.980.416,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	3.330.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	476.140.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.327.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	784.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		949.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	7.238.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.607.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.439.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		635.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	630.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.138.056.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	750.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	645.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		928.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	821.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.252.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				16 Peserta Didik	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				83 Orang	5.472.894.416,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.516.894.416,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				84 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				84 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				84 Orang	420.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				3 Ruang	2.980.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				84 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	4.900.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.076.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	280.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				86 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	9.224.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.995.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8806 Peserta Didik	2.260.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.960.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	23.613.940.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	41.154.288.843,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				7 Unit	2.723.310.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.123.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	959.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	2.971.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.124.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	260.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		938.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	1.323.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				52 Unit	4.595.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	880.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.083.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	270.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		471.618.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	727.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.720.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	125.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3250 Peserta Didik	2.310.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.260.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				22 Peserta Didik	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				546 Orang	2.902.520.843,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.902.520.843,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				27 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				27 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				27 Orang	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				27 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				4436 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1350 Buku	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	115.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1350 Paket	325.789.157,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1350 Paket	325.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	16.138.090.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	27.855.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				39 Unit	3.733.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.188.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				6 Paket	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3500 Peserta Didik	1.710.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.410.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				250 Orang	1.554.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.554.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				17 Orang	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				116 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				116 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				116 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				18 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	4.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				7 Ruang	1.206.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.136.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				2 Paket	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				3 Unit	578.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				6 Unit	170.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia</i>				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				3500 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				9 Ruang	1.436.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.336.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	4.306.981.419,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	10.340.141.419,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				195 Orang	233.821.419,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		233.821.419,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				11 Orang	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				116 Satuan Pendidikan	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				116 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				12 Ruang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.533.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	2.613.160.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.913.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	530.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	278.000.000,00						-	278.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	278.000.000,00			-	-	-	-	278.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				2 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia</i>				200 Buku	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				2 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	1.313.999.200,00						-	1.713.999.200,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.313.999.200,00			-	-	-	-	1.713.999.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				3 Dokumen	768.362.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		968.362.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	545.637.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		745.637.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.220.000.000,00							5.495.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						6.220.000.000,00							5.495.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.680.000.000,00						-	1.705.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				4 Orang	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	980.000.000,00			-	-	-	-	980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	580.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				2 Sertifikat	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				25 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	650.000.000,00						-	500.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	650.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	520.000.000,00						-	520.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	520.000.000,00			-	-	-	-	520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				2 Unit	220.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	350.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				15 Objek	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>				504 Objek	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-			-	3.020.000.000,00						-	2.320.000.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	3.020.000.000,00			-	-	-	-	2.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														
			<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				4 Orang	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum														
			<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum</i>				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara</i>				1 Unit	2.300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						140.061.907.283,00							135.965.407.183,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						140.061.907.283,00							135.965.407.183,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						140.061.907.283,00							135.965.407.183,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			88.80 Nilai	93.446.677.683,00						-	96.457.868.783,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			80 Persen	600.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 tepat waktu	66.704.470.573,00			-	-	-	-	67.300.368.782,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				527 Orang/bulan	66.704.470.573,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.300.368.782,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Barang Millik Daerah</i>	-			75 Persen	223.980.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	73.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan</i>	-			1 Dokumen	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Kehadiran Pegawai</i>	-			95 Persen	622.851.610,00			-	-	-	-	625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				450 Paket	149.449.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	74.290.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	74.709.410,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	99.769.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				32 Orang	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	149.634.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			80 Persen	1.537.513.500,00			-	-	-	-	1.545.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	498.235.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				32 Paket	308.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	119.566.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	99.975.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	19.968.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				24 Paket	39.325.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128 Laporan	416.951.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	29.665.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			73 Persen	378.862.000,00			-	-	-	-	2.783.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.790.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		613.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				46 Unit	299.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	78.867.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	23.049.000.000,00			-	-	-	-	23.049.000.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	144.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		144.000.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	22.890.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.890.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			70 Persen	230.000.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	-			100 Persen	45.205.759.600,00						-	39.247.538.400,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-			92 Persen	16.475.613.700,00			-	-	-	-	10.476.204.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	2.050.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				4 Unit	2.088.520.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.088.704.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	219.804.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	3.049.995.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	199.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7200 Unit	1.367.481.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.367.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				22 Unit	379.978.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				17991 Unit	219.997.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	6.900.000.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	-			100 Persen	27.766.921.900,00			-	-	-	-	27.806.334.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1777 Orang	799.583.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1780 Orang	499.791.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1433 Orang	396.498.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		397.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				5657 Orang	563.809.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		564.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				15765 Orang	431.194.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		431.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				64960 Orang	531.996.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		532.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				6491 Orang	349.835.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				18376 Orang	484.345.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		485.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1292 Orang	467.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		468.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				150 Orang	582.545.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		583.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				578 Orang	499.938.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1987 Orang	654.851.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		655.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1.099.708.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	349.959.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1.618.692.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	199.390.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	477.225.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		477.400.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	369.560.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	15.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	148.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	523.688.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	92.943.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.964.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1.624.851.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	-			1 Dokumen	365.000.000,00			-	-	-	-	365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	365.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-			1 Dokumen	598.224.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	598.224.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA SESUAI STANDAR	-			100 Persen	700.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	-			100 Faskes	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				54 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			-				-	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	109.470.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat	-			540 IRTP	59.470.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				540 Unit	59.470.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	600.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA						101.812.832.556,00							14.288.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						101.812.832.556,00							14.288.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						101.812.832.556,00							14.288.500.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			88,80 Nilai	32.894.877.196,00						-	14.288.500.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RBA defenitif	-			2 Jumlah	99.475.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	99.475.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	-			17 Persen	1.259.100.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				430 Paket	547.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	711.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			80 Persen	1.533.535.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	193.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	561.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	286.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	491.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			73 Persen	6.773.757.000,00			-	-	-	-	5.088.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				18 Unit	2.376.244.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	524.163.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		488.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	3.631.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	241.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	568.425.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	42.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	16.725.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	508.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantora	-			75 Persen	2.143.090.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	807.690.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	141.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	1.194.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase capaian SPM	-			70 Persen	20.517.495.196,00			-	-	-	-	9.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	20.517.495.196,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		9.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RASIO DAYA TAMPUNG RS TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	-			0,15 Persen	68.541.555.360,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-			60 Persen	58.712.755.360,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	5.600.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				25 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	49.606.755.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2.706.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.465.300.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5 Dokumen	9.465.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	-			84 Persen	363.500.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	74.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	289.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE SDM K YANG MEMILIKI SERTIFIKAT	-			83 Persen	376.400.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM K yang mengikuti diklat/kursus	-			55 Persen	376.400.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				15 Orang	376.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
		PUSKESMAS RANAI						2.140.930.400,00							2.140.930.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.140.930.400,00							2.140.930.400,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.140.930.400,00							2.140.930.400,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Nilai	2.140.930.400,00						-	2.140.930.400,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	2.140.930.400,00			-	-	-	-	2.140.930.400,00	PUSKESMAS RANAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1.640.930.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.640.930.400,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	PUSKESMAS RANAI
		PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH						733.378.000,00							733.378.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						733.378.000,00							733.378.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						733.378.000,00							733.378.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	733.378.000,00						-	733.378.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	733.378.000,00			-	-	-	-	733.378.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	317.832.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		317.832.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	415.546.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		415.546.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
		PUSKESMAS TANJUNG						1.212.134.450,00							1.212.134.450,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.212.134.450,00							1.212.134.450,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.212.134.450,00							1.212.134.450,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	1.212.134.450,00						-	1.212.134.450,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	434.230.500,00						-	434.230.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	434.230.500,00			-	-	-	-	434.230.500,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	216.967.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		216.967.500,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	217.263.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		217.263.000,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
		PUSKESMAS PULAU LAUT						635.096.000,00							635.096.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						635.096.000,00							635.096.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						635.096.000,00							635.096.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	635.096.000,00						-	635.096.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	635.096.000,00			-	-	-	-	635.096.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	284.920.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		284.920.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	350.176.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.176.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
		PUSKESMAS PULAU TIGA						1.015.760.000,00							1.015.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.015.760.000,00							1.015.760.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.015.760.000,00							1.015.760.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	1.015.760.000,00						-	1.015.760.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	1.015.760.000,00			-	-	-	-	1.015.760.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	665.760.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		665.760.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
		PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT						445.880.000,00							445.880.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						445.880.000,00							445.880.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						445.880.000,00							445.880.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	445.880.000,00						-	445.880.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	445.880.000,00			-	-	-	-	445.880.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	245.845.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		245.880.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	200.034.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
		PUSKESMAS SERASAN						573.273.450,00							573.273.450,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						573.273.450,00							573.273.450,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						573.273.450,00							573.273.450,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	573.273.450,00						-	573.273.450,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	573.273.450,00			-	-	-	-	573.273.450,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	322.650.450,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		322.650.450,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	250.623.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.623.000,00	PUSKESMAS SERASAN
		PUSKESMAS SERASAN TIMUR						828.797.000,00							828.797.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						828.797.000,00							828.797.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						828.797.000,00							828.797.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	828.797.000,00						-	828.797.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	828.797.000,00			-	-	-	-	828.797.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	373.460.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		373.460.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	455.337.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		455.337.000,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
		PUSKESMAS SUBI						662.630.000,00							662.630.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						662.630.000,00							662.630.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						662.630.000,00							662.630.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	662.630.000,00						-	662.630.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan kesehatan terhadap Puskesmas	-			1.2 Persen	662.630.000,00			-	-	-	-	662.630.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	362.630.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		362.630.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	PUSKESMAS SUBI
		PUSKESMAS MIDAI						856.464.000,00							856.464.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						856.464.000,00							856.464.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						856.464.000,00							856.464.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	-			80.30 Persen	856.464.000,00						-	856.464.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NILAI KINERJA PUSKESMAS	-			- Nilai	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NILAI KINERJA PUSKESMAS	-			- Nilai	150.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	PUSKESMAS SUAK MIDAI
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						269.744.531.076,00							242.227.219.249,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						269.744.531.076,00							242.227.219.249,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						269.744.531.076,00							242.227.219.249,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	-			77,60 Nilai	8.818.898.046,00						-	25.159.920.613,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	449.962.800,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	119.992.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	179.977.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	149.993.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.949.755.646,00			-	-	-	-	4.272.020.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	3.949.755.646,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.272.020.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	260.646.000,00			-	-	-	-	390.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	119.646.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.651.386.900,00			-	-	-	-	6.055.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	826.540.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	240.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.997.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	74.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	19.948.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	99.999.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	299.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60 Dokumen	29.998.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	784.328.000,00			-	-	-	-	10.150.000.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	129.996.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	206.903.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	47.429.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Tanjung Kumbik Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		7.300.000.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	968.766.700,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	2.137.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.996.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	124.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	199.470.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	638.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah	-		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	754.052.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	1.705.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	199.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	49.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	149.816.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah	-		700.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	354.776.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		555.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	3.170.000.000,00						-	12.143.680.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.998.000.000,00			-	2. Pembangunan Infra struktur Wilayah	-	-	11.902.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan Infra struktur Wilayah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,05 KM	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah	-		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	898.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		3.876.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		5.556.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	172.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-	-	241.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				0,25 KM	172.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		241.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				0,5 KM	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	4.377.029.000,00						-	7.572.308.860,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.377.029.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	7.572.308.860,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i>				250 Unit	1.542.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		2.616.080.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				1 Orang	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		257.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	200.530.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		342.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2 Liter/Detik	1.764.499.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		3.211.528.860,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				230 SR	670.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.145.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	1.170.000.000,00						-	1.687.569.686,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.170.000.000,00			-	-	-	-	1.687.569.686,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				660 Ton/hari	700.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.573.569.686,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				2 Unit	470.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		114.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	4.453.724.000,00						-	5.632.738.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>				500 Sistem Drainase Perkotaan	2.224.012.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		1.875.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				650 Sistem Drainase Perkotaan	9.780.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		5.310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	1.240.000.000,00						-	1.900.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.240.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-	-	1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun</i>				5 M³/Hari	1.240.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	27.479.979.680,00						-	31.457.018.002,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	27.479.979.680,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah	-	-	31.457.018.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	27.180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah	-		30.557.018.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	99.991.410,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				4 Dokumen	199.988.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	14.555.000.000,00						-	8.480.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.555.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	8.480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	14.555.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		8.480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	172.831.260.000,00						-	130.821.485.417,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	172.831.260.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	130.821.485.417,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	4.550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		3.590.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Diganti				5 Jembatan	10.529.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		6.490.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	98.610.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		75.184.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2,0 KM	47.838.660.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah	-		33.798.485.417,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	5.580.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		3.530.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				100 Jembatan	400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangu nan Infra struktur Wilayah	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				1 KM	950.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		1.368.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				1 KM	2.020.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		4.020.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				5,2 KM	2.353.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		2.591.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	700.000.000,00						-	788.900.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	370.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	412.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>				300 Orang	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		164.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan</i>				4 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		111.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				120 Orang	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		136.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	285.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	324.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan</i>				2 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		57.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>				1 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		250.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				3 Orang	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		17.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	45.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	51.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				30 Lembaga	45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		51.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	3.102.627.550,00						-	3.542.038.671,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	669.504.620,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	768.038.668,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	244.866.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		279.153.847,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	232.330.920,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		269.654.051,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	192.307.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		219.230.770,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	973.662.300,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	1.110.038.462,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	108.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		123.719.231,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	82.142.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		93.728.463,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				5 Kasus	262.803.330,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		299.615.384,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	102.838.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		117.244.614,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN						75.759.153.642,00							52.985.481.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						70.677.301.322,00							49.288.613.900,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						70.677.301.322,00							49.288.613.900,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			76 NILAI	8.022.034.580,00						-	8.504.036.900,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			77 Persen	90.600.000,00			-	-	-	-	90.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	90.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	4.651.572.140,00			-	-	-	-	4.537.586.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.651.572.140,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.537.586.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			96 Persen	329.532.000,00			-	-	-	-	333.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	98.532.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	99.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	132.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 Persen	891.258.180,00			-	-	-	-	1.462.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	179.977.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	19.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	47.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	14.968.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	88.725.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	439.998.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	19.997.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			70 Persen	439.150.000,00			-	-	-	-	370.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	49.758.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	184.392.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	175.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			85 Persen	1.345.581.260,00			-	-	-	-	1.420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	24.996.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	599.984.860,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	720.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		795.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			80 Persen	274.341.000,00			-	-	-	-	290.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	64.993.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.348.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	-			87 Persen	953.008.000,00						-	1.120.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah laporan	-			1 Dokumen	149.634.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	149.634.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	-			6 Unit	766.654.000,00			-	-	-	-	770.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	388.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		390.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	378.654.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		380.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	jumlah sertifikat	-			2 Lembar	36.720.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				2 Laporan	36.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI	-			25,38 Persen	6.068.375.000,00						-	4.763.437.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	-			30 Ha	6.068.375.000,00			-	-	-	-	4.763.437.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-			30 Unit Rumah	750.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	-			1 Ha	5.318.375.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.013.437.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE RUMAH IBADAH DALAM KONDISI BAIK	-			58 Persen	55.633.883.742,00						-	34.901.140.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	-			237 unit	55.633.883.742,00			-	-	-	-	34.901.140.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-			1 Dokumen	3.344.656.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-			2 Lokasi	52.289.227.742,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.401.140.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.081.852.320,00							3.696.868.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						5.081.852.320,00							3.696.868.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	-			95 Persen	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	-			1 Kasus	300.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PERSENTASE PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	-			40 Persen	245.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	luas tanah yang dibebaskan	-			2 Ha	245.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				5 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PERSENTASE TERSEDIANYA TANAH OBYEK LANDREFORM (TOL) YANG SIAP DIREDISTRIBUSIYANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-			30 Persen	550.000.000,00						-	550.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	-			100 M2	400.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah														
			<i>Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah penetapan gantikerugian tanah absentee</i>	-			1 Dokumen	150.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.02.0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PERSENTASE INVENTARISASI TANAH KOSONG DI KABUPATEN	-			19,91 Persen	400.000.000,00						-	500.000.000,00	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	<i>jumlah laporan</i>	-			1 Dokumen	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	<i>jumlah laporan</i>	-			1 Dokumen	200.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-			30 Persen	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	<i>Jumlah Rekomendasi</i>	-			1 Rekomend asi	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE LUAS TANAH BERSERTIFIKAT	-			40 Persen	3.486.852.320,00						-	1.946.868.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sertifikat Tanah</i>	-			10 Sertifikat	3.486.852.320,00			-	-	-	-	1.946.868.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		520.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya</i>				1 Dokumen	626.852.320,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		626.868.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	2.760.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17.676.785.031,00							28.542.495.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.676.785.031,00							28.542.495.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17.676.785.031,00							28.542.495.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			77.50 NILAI	16.309.235.031,00						-	27.147.485.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			80 Persen	143.000.000,00			-	-	-	-	143.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	138.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	7.182.300.031,00			-	-	-	-	12.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	7.182.300.031,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	-			10 Persen	197.000.000,00			-	-	-	-	197.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	172.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		172.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 Persen	382.500.000,00			-	-	-	-	382.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	92.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	39.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	104.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	2.215.450.000,00			-	-	-	-	8.236.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				17 Unit	2.004.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.670.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				43 Unit	171.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		466.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			80 Persen	5.828.985.000,00			-	-	-	-	5.828.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	88.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.737.985.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.737.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			85 Persen	360.000.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			80 Persen	1.367.550.000,00						-	1.395.010.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	-			80 Persen	853.550.000,00			-	-	-	-	881.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				21 Orang	100.550.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		101.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				21 Orang	65.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														
			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.</i>				8 Orang	65.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			<i>Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				150 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			<i>Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas</i>				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				7 laporan	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>				5 Unit	66.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		93.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	-			80 Persen	242.000.000,00			-	-	-	-	242.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				5 unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	152.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.455.232.109,00						-	7.566.517.709,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	51.000.000,00			-	-	-	-	51.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	51.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.433.324.300,00			-	-	-	-	3.432.180.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.433.324.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.432.180.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	169.945.800,00			-	-	-	-	195.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	24.945.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	480.000.000,00			-	-	-	-	745.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				8 Paket	24.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.068.842.800,00			-	-	-	-	1.891.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	596.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		820.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	28.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	338.953.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		515.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	2.156.235.600,00						-	3.089.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.717.035.600,00			-	-	-	-	2.542.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			0				1 0	980.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.340.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Laporan	99.985.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	176.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				1 laporan	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran														
			Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran														
			jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	270.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		412.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	130.000.000,00			-	-	-	-	155.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				540 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	109.200.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	192.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	9.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						9.610.500.000,00							11.756.383.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.610.500.000,00							11.756.383.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.610.500.000,00							11.756.383.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			67.10 Nilai	7.017.352.000,00						-	7.764.259.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			63.50 Persen	153.695.000,00			-	-	-	-	86.438.180,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	93.635.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	60.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.438.180,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	3.000.032.414,00			-	-	-	-	3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.000.032.414,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	539.301.000,00			-	-	-	-	340.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	219.351.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	319.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 Persen	616.430.500,00			-	-	-	-	530.820.820,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	168.796.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	31.036.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.049.820,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				80000 Paket	39.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	376.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		377.771.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	1.515.518.986,00			-	-	-	-	3.150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1.182.872.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				80 Unit	237.647.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				80 Unit	19.999.986,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	1.038.213.700,00			-	-	-	-	485.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				500 Laporan	39.453.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	15.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				15 Laporan	982.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		360.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasana Penunjang Urusan Perkantoran</i>	-			80 Persen	154.160.400,00			-	-	-	-	172.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	99.992.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				80 Unit	24.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	29.768.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA	-			9.1 Persen	2.593.148.000,00						-	3.992.124.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana</i>	-			50 Persen	699.840.000,00			-	-	-	-	700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				40 Orang	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	399.840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			90 Persen	953.524.000,00			-	-	-	-	2.352.124.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	198.968.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.560.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				40 Orang	99.840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	98.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				40 Orang	156.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		242.124.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	199.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				250 Kawasan	199.680.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			100 Persen	620.124.000,00			-	-	-	-	620.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	369.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10 Orang	250.524.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	-			1 Dokumen	319.660.000,00			-	-	-	-	320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	99.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				15 Orang	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	99.840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						7.132.629.300,00							7.078.129.300,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.132.629.300,00							7.078.129.300,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.132.629.300,00							7.078.129.300,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	-			79.85 Nilai	4.646.595.810,00						-	4.541.661.400,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	58.140.090,00			-	-	-	-	58.210.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	58.140.090,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.210.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	3.204.381.906,00			-	-	-	-	3.039.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3.204.381.906,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.039.820.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi Persentase Kehadiran Pegawai	-			22 Persen 95 Persen	87.526.400,00			-	-	-	-	81.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	27.526.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 Persen	445.122.200,00			-	-	-	-	469.231.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.971.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.505.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	32.383.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.966.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11.220.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.932.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	297.771.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		307.265.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	28.039.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	512.711.500,00			-	-	-	-	523.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	71.736.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	181.617.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		174.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	216.658.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		199.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	42.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	224.596.614,00			-	-	-	-	239.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.996.614,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	216.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		231.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	114.117.100,00			-	-	-	-	130.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	23.883.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5.810.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	34.404.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	50.020.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	-			50 Persen	402.953.100,00						-	453.183.900,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	-			6 PSKS	402.953.100,00			-	-	-	-	453.183.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	150.000.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	152.946.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		203.183.900,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	50.007.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti	-			100 Persen	749.138.300,00						-	750.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPEG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	-			100 Persen	749.138.300,00			-	-	-	-	750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	29.999.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	149.801.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	119.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	79.987.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	99.375.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	219.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	-			59.73 Persen	609.291.180,00						-	608.284.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	609.291.180,00			-	-	-	-	608.284.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				30854 Orang	158.284.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		158.284.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				4152 Keluarga	99.999.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4152 Keluarga	150.311.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	200.696.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	-			100 Persen	374.799.910,00						-	375.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	-			100 Persen	199.780.160,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	49.998.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	49.999.980,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	49.781.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	-			1 Desa	175.019.750,00			-	-	-	-	175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	74.994.280,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	100.025.470,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	-			100 Persen	349.851.000,00						-	350.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	-			100 Persen	349.851.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	249.856.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				11 Makam	99.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						8.145.886.020,00							8.290.886.020,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.845.886.020,00							7.865.886.020,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7.845.886.020,00							7.865.886.020,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			81.91 Nilai	5.979.786.020,00						-	5.999.786.020,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	40.000.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tepat Waktu	4.700.030.000,00			-	-	-	-	4.700.030.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				33 Orang/bulan	4.700.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.700.030.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			95 Persen	15.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			60 Persen	257.756.020,00			-	-	-	-	257.756.020,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	131.756.020,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		131.756.020,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	368.000.000,00			-	-	-	-	368.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	272.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		272.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	85.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	296.000.000,00			-	-	-	-	296.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	91.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			59.50 Persen	303.000.000,00			-	-	-	-	303.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	33.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	-			0.20 Persen	966.100.000,00						-	966.100.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	-			80 Persen	916.100.000,00			-	-	-	-	916.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	706.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		706.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit	160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	-			50 Persen	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				1 Perizinan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	-			96 Persen	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	-			8 Lowongan Kerja	280.000.000,00			-	-	-	-	280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				10 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				20 Orang	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				1 Orang	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	-			10 Orang	190.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	-			10 Persen	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)	-			5 PERSEN	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	-			4 Persen	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	-			65 Persen	300.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3250 Orang	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						300.000.000,00							425.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						300.000.000,00							425.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN	-			100 PERSEN	100.000.000,00						-	225.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	-			1 Kawasan	100.000.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIKEMBANGKAN	-			100 PERSEN	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	-			2 SKP	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				50 Kepala Keluarga	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				6 Satuan Permukiman	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA						52.000.000,00							52.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						52.000.000,00							52.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						52.000.000,00							52.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	-			90 PERSEN	52.000.000,00						-	52.000.000,00	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.000.000,00			-	-	-	-	18.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	-	-	-	24.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10.239.554.000,00						10.744.554.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.239.554.000,00							10.744.554.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						7.004.554.000,00							7.364.554.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			79,64 Nilai	4.895.554.000,00						-	5.045.554.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			80 Persen	120.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tepat Waktu	3.532.630.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.532.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	3.532.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.532.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	-			97 Persen	50.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			76 Persen	275.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	317.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	79.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		89.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				38 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	36.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	116.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			70 Persen	521.600.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	562.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	65.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	182.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		192.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	16.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	248.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		258.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			77 Persen	303.324.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	315.324.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	296.824.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		306.824.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			77 Persen	93.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	128.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	16.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERGERAK DIPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-			35 Persen	525.000.000,00						-	575.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	-			3 Lembaga	230.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				25 Orang	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	-			0.5 Persen	195.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				9 Organisasi	95.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</i>	-			30 Persen	100.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>				1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>PERSENTASE KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF</i>	-			100 Persen	874.000.000,00						-	934.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	-			2 Kegiatan	130.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	-			100 Persen	314.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	334.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				6 Orang	184.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		194.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				6 Layanan	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Konfhrensif</i>	-			100 Persen	430.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				4 Orang	180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGOLAH DATA KE DALAM STATISTIK GENDER DAN ANAK	-			15.22 Persen	250.000.000,00						-	270.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak	-			85 Persen	250.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE CAPAIAN INDIKANTOR	-			70 Persen	260.000.000,00						-	280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga PHA	-			4 Lembaga	130.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	-			100 Persen	130.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				72 Orang	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	0,00						-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				30 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				25 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</i>				6 Layanan	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			<i>Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK</i>				31 Orang	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.235.000.000,00							3.380.000.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TOTAL FERTILITY RATE	-			2.35 NILAI/SKOR	160.000.000,00						-	182.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah institusi pendididkan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan</i>	-			1 Sekolah	20.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	31.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pemampaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan	-			40 Persen	140.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	151.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	UNMEET NEED	-			10.95 Persen	2.779.000.000,00						-	2.880.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya angka KB aktif /MCPR	-			1080 Peserta	2.060.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.111.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				13 Laporan	2.050.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				17 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>pembinaan IMP oleh PKB /PLKB di Desa /Kelurahan</i>	-			35 Orang	302.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	322.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>				77 Organisasi	222.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		232.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>				17 Laporan	80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern</i>	-			78.50 Persen	260.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				14 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
			<i>Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</i>				2 Orang	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
			<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>				80 Orang	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Unmeet need</i>	-			10.95 Persen	157.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	167.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4 Organisasi	157.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		167.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	INDEK PEMBANGUNAN KELUARGA	-			58.50 Persen	296.000.000,00						-	318.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	-			80 Persen	190.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	202.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				16 Laporan	78.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		79.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				60 Orang	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	63.840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.388.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tapa Waktut	10.970.490.346,00			-	-	-	-	10.947.293.434,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	10.970.490.346,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.947.293.434,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	59.230.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	34.230.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 Persen	886.599.800,00			-	-	-	-	3.279.549.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	221.709.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.060.749.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	44.862.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49.758.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.824.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	79.996.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	449.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	-			5 Unit	116.240.300,00			-	-	-	-	720.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	116.240.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		720.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			85 Persen	791.582.128,00			-	-	-	-	9.862.914.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	25.969.128,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	740.613.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.774.914.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	-			70 Persen	695.215.000,00			-	-	-	-	2.280.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	266.908.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	33.505.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	299.939.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	94.863.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INTERVENSI CPM	-			5 Persen	56.790.830,00						-	250.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	-			93,33 Persen	56.790.830,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				14 Laporan	56.790.830,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KETERSEDIAAN	-			2400 KKAL/ KAP/HR	469.510.840,00						-	1.815.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	-			10 CV Ratio	279.484.840,00			-	-	-	-	385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	279.484.840,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	-			57 Gram/Kap ita/Hari	190.026.000,00			-	-	-	-	1.430.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				8 Laporan	190.026.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.430.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	-			3,03 NILAI	485.410.400,00						-	3.000.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	-			10 Persen	485.410.400,00			-	-	-	-	3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Dokumen	485.410.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG AMAN	-			90 Persen	369.732.580,00						-	660.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	-			60 Sampel	369.732.580,00			-	-	-	-	660.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	369.732.580,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		660.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI	-			2,0 Persen	97.750.000,00						-	1.325.394.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	-			1,3 Persen	97.750.000,00			-	-	-	-	1.325.394.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	97.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.325.394.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						21.948.319.810,00							37.590.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						21.948.319.810,00							37.590.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE SARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	-			70,34 Persen	15.584.255.000,00						-	18.835.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	-			5 Unit	1.851.287.000,00			-	-	-	-	920.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	178.047.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1.673.240.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		920.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	-			1,53 Persen	1.497.808.000,00			-	-	-	-	3.505.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				5 Dokumen	1.497.808.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.505.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	-			1,48 Persen	12.235.160.000,00			-	-	-	-	14.410.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				10 Ton	359.856.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				30 Ekor	11.875.304.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		14.160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	-			43 Unit	5.428.564.000,00						-	7.240.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	-			1 Paket	3.228.564.000,00			-	-	-	-	5.840.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	2.725.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	503.064.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.040.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	2.200.000.000,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1.650.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	-			0,43 Persen	408.510.000,00						-	5.800.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	-			15 Persen	408.510.000,00			-	-	-	-	5.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	408.510.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIKENDALIKAN/DIT ANGGULANGI	-			7,5 Persen	361.675.810,00						-	3.790.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-			40 Ha	361.675.810,00			-	1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	3.790.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	361.675.810,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		3.790.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI	-			2,0 Persen	165.315.000,00						-	1.925.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	-			1,3 Persen	165.315.000,00			-	-	-	-	1.925.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	165.315.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.925.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							18.884.902.891,00						19.089.805.782,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.884.902.891,00							19.089.805.782,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						18.884.902.891,00							19.089.805.782,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			63,50 Nilai	4.497.080.891,00						-	4.479.902.891,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			93 Persen	50.750.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	50.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	2.805.443.291,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-	-	3.124.902.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.805.443.291,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.124.902.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			90 Persen	183.474.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-	-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	122.316.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	61.158.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	494.585.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	300.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	15.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.348.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	30.520.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	34.787.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	101.930.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			67 Persen	302.595.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	295.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	99.996.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	19.915.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	164.135.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	18.549.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			82 Persen	532.715.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	530.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.870.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20.388.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	499.457.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		498.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			80 Persen	127.518.600,00			-	-	-	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	67.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.002.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	40.016.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	LUAS LAHAN KONSERVASI	-			3,1 Ha	611.580.000,00						-	620.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	-			2 Sapras	122.316.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	122.316.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	-			1 Laporan	193.667.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	193.667.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan	-			5 Lokasi	295.597.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				3 Dokumen	295.597.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS AREA RTH	-			50 Persen	2.978.269.000,00						-	2.824.902.891,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan	-			80 Persen	2.978.269.000,00			-	-	-	-	2.824.902.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	91.737.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Ha	2.886.532.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.724.902.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	VOLUME LIMBAH DOMESTIK YANG DIBUANG KE MEDIA LINGKUNGAN (M3/HARI)	-			20 Persen	91.737.000,00						-	100.000.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	-			25 Meter Kubik	91.737.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya				1 Dokumen	91.737.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>PERSENTASE PELAKU USAHA/KEGIATAN YANG TAAT HUKUM</i>	-			74,76 Persen	366.948.000,00						-	800.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti</i>	-			5 Rekomend asi	366.948.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>				5 Dokumen	265.018.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				7 Orang	101.930.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>PERSENTASE APARATUR/KELOMPOK BERBUDAYA DAN PEDULI LINGKUNGAN</i>	-			15 Persen	224.246.000,00						-	225.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kelompok</i>	-			1 Kelomok	224.246.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>				50 Orang	224.246.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>JUMLAH NOMINASI/PENG HARGAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>	-			1 Nominasi	305.790.000,00						-	300.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan Hidup</i>	-			75 Persen	305.790.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	305.790.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KASUS LINGKUNGAN YANG TERTANGANI	-			73.79 Persen	50.965.000,00						-	50.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi	-			5 Rekomend asi	50.965.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	50.965.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH	-			36.70 Persen	9.758.287.000,00						-	9.690.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	-			42 Meter Kubik	9.758.287.000,00			-	-	-	-	9.690.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	101.930.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				6 Unit	9.146.707.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sungai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.090.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	509.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.460.412.427,00							7.474.162.427,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.460.412.427,00							7.474.162.427,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.460.412.427,00							7.474.162.427,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJiP	-			76.80 Nilai	5.825.719.887,00						-	5.805.242.427,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja perangkat Daerah	-			95 %	134.931.360,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	105.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	29.931.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.360.862.127,00			-	-	-	-	4.357.042.427,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	4.360.862.127,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.357.042.427,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	108.626.000,00			-	-	-	-	108.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	33.626.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 %	528.630.300,00			-	-	-	-	529.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.623.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	14.678.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	14.911.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	39.937.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			80 %	70.183.600,00			-	-	-	-	70.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	35.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	34.983.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			100 %	458.612.000,00			-	-	-	-	460.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.867.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	98.345.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	350.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	163.874.500,00			-	-	-	-	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	24.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.068.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.986.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase kepemilikan dokumen kependudukan	-			93 %	462.271.600,00						-	475.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	-			5 Dokumen	402.409.600,00			-	-	-	-	415.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				50 Dokumen	14.973.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	14.960.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	14.975.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				5 Laporan	357.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		370.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk</i>	-			94 %	29.943.500,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun</i>				5 Dokumen	14.943.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>				6 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<i>persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk</i>	-			94 %	29.918.500,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk</i>				5 Dokumen	14.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia</i>				1 Dokumen	14.943.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</i>	-			91 %	156.155.440,00						-	165.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Kepemilikan akta pencatatan Sipil</i>	-			100 %	156.155.440,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				6 Dokumen	116.227.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	19.928.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	-			82 %	953.765.500,00						-	953.920.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	-			36 OPD	94.845.500,00			-	-	-	-	95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	29.960.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				46 Dokumen	49.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				1 Laporan	14.945.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	-			36 OPD	858.920.000,00			-	-	-	-	858.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				11 Dokumen	858.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		858.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	-			82 %	62.500.000,00						-	75.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Data Profil Kependudukan	-			100 %	62.500.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	62.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.064.380.223,00							9.836.380.223,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.064.380.223,00							9.836.380.223,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.064.380.223,00							9.836.380.223,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			79.50 NILAI	6.033.495.223,00						-	6.032.995.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			97,50 Persen	67.500.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	67.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	24.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		24.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	43.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		43.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tepat Waktu	4.408.513.923,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	4.406.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	4.408.513.923,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		4.406.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Kehadiran Pegawai</i>	-			94 Persen	44.716.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	29.716.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				1 Orang	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			70 Persen	326.559.400,00			-	-	-	-	326.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	7.360.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		7.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	5.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	25.799.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		25.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				12 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</i>	-			50 Persen	785.289.000,00			-	-	-	-	785.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	364.789.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				6 Unit	215.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	135.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			65 Persen	337.800.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	338.415.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	331.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		332.415.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	63.116.900,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	63.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	30.688.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		30.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	9.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.760.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.760.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.928.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	CAKUPAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	-			85 PERSEN	410.000.000,00						-	410.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	-			70 Desa	410.000.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya				70 Desa	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1 Desa	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				70 Unit	140.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA	-			50 PERSEN	560.000.000,00						-	560.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	-			35 Desa	560.000.000,00			-	-	-	-	560.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				35 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	290.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		290.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) YANG AKTIF PERSENTASE DESA YANG TERTIB ADMINISTRASI	-			40 BUMDES 55 PERSEN	1.879.385.000,00						-	1.689.385.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang di Bina Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	-			54 Bumdes 70 Desa	1.879.385.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	1.689.385.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				70 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				70 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				70 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				70 Orang	174.385.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		174.385.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				54 Dokumen	390.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				5 Laporan	170.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				70 Dokumen	165.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				70 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				70 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				70 Orang	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				1 Desa	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				77 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	RATA-RATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) JUMLAH KELOMPOK USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF	-			15 KELOMPOK 30 KELOMPOK	1.181.500.000,00						-	1.144.000.223,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-			135 Lembaga 60 Desa	1.181.500.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	1.144.000.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	218.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		218.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				10 Dokumen	187.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10 Laporan	235.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		235.000.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.303.690.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.068.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			95 Persen	207.605.000,00			-	-	-	-	560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	132.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	29.875.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN	-			60 Persen	744.439.400,00			-	-	-	-	812.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.867.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.565.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	29.958.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	9.997.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	38.784.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	574.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		575.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	19.275.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase peningkatan barang barang milik perangkat daerah	-			60 persen	808.891.000,00			-	-	-	-	2.430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	499.878.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	66.389.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	135.243.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		720.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	64.681.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	42.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			70 Persen	683.644.400,00			-	-	-	-	760.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	9.995.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				10 Laporan	23.698.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	649.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			75 Persen	614.315.000,00			-	-	-	-	820.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				18 Unit	599.405.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	14.910.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE DESA YANG TERLAYANI	-			81 Persen	10.307.985.090,00						-	133.940.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN	-			70 Persen	9.013.264.000,00			-	-	-	-	128.890.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				1 Unit	879.264.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				90 Unit	7.434.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		118.560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				40 Unit	700.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah Lokasi Parkir Yang beroperasi</i>	-			1 Lokasi	149.001.340,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	149.001.340,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Pelayanan Uji KIR</i>	-			40 Peserta	49.968.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				1 Laporan	49.968.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>jumlah dokumen rekomendasi rekayasa lalu lintas</i>	-			1 Dokumen	199.968.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	149.968.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah angkutan umum perdesaan</i>	-			1 Lokasi	895.783.750,00			-	-	-	-	4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	197.781.070,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Unit	698.002.680,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	RASIO LAYANAN ANGKUTAN LAUT	-			0.4 RASIO	9.338.993.360,00						-	49.624.720.234,00	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pengawasan penerbitan izin usaha angkutan laut</i>	-			1 jumlah	489.884.460,00			-	-	-	-	793.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	389.975.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		593.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	99.908.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Terlaksananya pengawasan penerbitan izin usaha angkutan laut</i>	-			1 jumlah	199.140.900,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9.450.482.840,00							11.304.864.140,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	-			2 Laporan	5.431.367.920,00						-	5.878.964.140,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			63,50 Persen	127.170.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	27.170.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	3.368.576.429,00			-	-	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi perangkat Daerah	-	2.679.964.140,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.368.576.429,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi perangkat Daerah		2.679.964.140,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang bersertifikat	-			97 Persen	19.757.000,00			-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	19.757.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			79 Persen	409.468.220,00			-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah	-	485.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9.966.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	49.959.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				58000 Paket	19.948.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	329.594.120,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang milik perangkat daerah	-			60 Persen	832.605.000,00			-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah	-	1.835.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	300.914.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	337.023.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	164.668.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				9 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			84 Persen	639.591.271,00			-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah	-	621.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 Laporan	9.991.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				10 Permohonan	110.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktural Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				3 Rekomendasi	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				70 Media	306.746.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.028.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				16 Konten	482.759.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Aplikasi Informasi	-			26 Persen	2.909.609.920,00						-	3.547.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web	-			65 Persen	100.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	-			69 Persen	2.809.609.920,00			-	-	-	-	3.447.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	114.977.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				2 Dokumen	243.988.840,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				1 Dokumen	150.119.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				5 Perangkat Daerah	1.930.524.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.682.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						259.992.100,00							260.000.000,00	
1.	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	-			2 Laporan	129.994.100,00						-	130.000.000,00	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			63,50 Persen	129.994.100,00			-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah	-	130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	129.994.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya Kinerja Daerah		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan Data dan Metadata Statistik Sektoral	-			83 Persen	129.998.000,00						-	130.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	-			295 Data	129.998.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				80 Persentase	129.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						372.489.200,00							224.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	-			75 Persen	372.489.200,00						-	224.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			36 OPD	372.489.200,00			-	-	-	-	224.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6 Laporan	23.995.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				36 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	248.494.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO						24.980.958.547,00							25.533.958.547,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.983.528.600,00							4.520.750.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						3.983.528.600,00							4.520.750.000,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASEPemeriksa an danPENGAWASAN UNTUKKOPERASI	-			16.88 Persen	149.823.500,00						-	150.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasiberdasarkan kualitasRAT, volume usaha danasset	-			12.84 Persen	149.823.500,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				28 Unit Usaha	74.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				15 Unit Usaha	74.923.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASEKOPERASI SEHAT	-			30.51 Persen	249.893.000,00						-	250.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yangdiberi Penghargaan	-			2 Koperasi	249.893.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				11 Unit Usaha	149.893.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				2 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE JUMLAHANGGOTA KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN	-			0 Persen	199.991.500,00						-	200.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	-			22 Koperasi	199.991.500,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				22 Orang	199.991.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTA SEKOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DANUSAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAMD AERAH KABUPATEN/KOTA	-			18.13 Persen	249.745.500,00						-	400.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	-			6 Koperasi	249.745.500,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit Usaha	249.745.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO MENJADI WIRUSAHA	-			5.85 Persen	2.759.108.100,00						-	2.670.750.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online(ODS)	-			3194 umkm	2.759.108.100,00			-	-	-	-	2.670.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				2 Unit Usaha	2.018.358.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.970.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				2 Unit Usaha	345.856.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				2 Orang	149.410.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	245.482.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI STANDARISASI	-			52.30 Persen	374.967.000,00						-	850.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	-			296 umkm	374.967.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				4 Unit Usaha	374.967.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						20.997.429.947,00							21.013.208.547,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						6.944.269.050,00							6.070.000.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN</i>	-			2.37 Persen	468.168.700,00						-	425.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	<i>Persentase Perizinan yang diterbitkan untuk Izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</i>	-			13.45 Persen	99.838.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				4 Dokumen	99.838.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	<i>Persentase Penerbitan TDG</i>	-			83 Persen	99.816.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			<i>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</i>				1 Dokumen	99.816.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	<i>Jumlah pelaku usahayang memiliki surat izinper dagangan minuman beralkohol golongan Bdan C</i>	-			4 Pelaku Usaha	69.980.700,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	69.980.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usahayang memperoleh Izin	-			4 Pelaku Usaha	148.534.000,00			-	-	-	-	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				2 Laporan	54.814.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	93.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA tepat waktu	-			84 Persen	50.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-			25.00 Persen	4.746.855.000,00						-	3.965.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	-			1 Gedung	4.530.610.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	3.540.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	4.182.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		2.660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	348.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		880.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan</i>	-			1 Kegiatan	216.245.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	116.249.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	99.995.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU	-			2.09 Persen	929.600.970,00						-	930.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting</i>	-			1 Laporan	319.762.270,00			-	-	-	-	320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	69.912.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	249.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hargadan Stok Barang Pokokdan Barang Penting	-			1 Laporan	449.852.700,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	199.896.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	249.955.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase JumlahPupuk dan Pestisidayang disalurkan	-			53 Persen	159.986.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	79.986.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	-			0.73 Persen	599.664.200,00						-	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	-			2 Produk	599.664.200,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1 Pelaku Usaha	249.887.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				3 Pelaku Usaha	149.823.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	199.953.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI	-			63 Persen	199.980.180,00						-	200.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	-			2 Produk	199.980.180,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				15 Orang	49.991.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	99.990.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				1 UMKM	49.999.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						14.053.160.897,00							14.943.208.547,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			78.50 Nilai	7.637.873.997,00						-	7.803.490.000,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	5.374.244.809,00			-	-	-	-	5.127.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	5.374.244.809,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.127.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	-			95 Persen	114.919.888,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	54.919.888,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	-			95 Persen	484.949.500,00			-	-	-	-	458.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.996.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.966.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	369.993.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	858.849.900,00			-	-	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	369.014.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	39.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	229.999.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			80 Persen	561.440.700,00			-	-	-	-	563.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.992.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	549.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		551.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusanper kantoran	-			75 Persen	223.469.200,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	69.973.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	33.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.796.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-			1.65 Persen	5.968.171.370,00						-	6.689.718.547,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkannya menjadi Perda	-			55 Persen	5.968.171.370,00			-	-	-	-	6.689.718.547,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	198.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	99.998.670,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	269.964.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		570.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	5.399.578.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.819.718.547,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN	-			64 Persen	99.944.450,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah izin yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan	-			25 izin	99.944.450,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	99.944.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN/KOTA YANG MASUK DALAM SIINAS	-			39.75 Persen	347.171.080,00						-	350.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	-			1 Data Base	347.171.080,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	229.992.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	67.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	-			79 Nilai	8.146.971.831,00						-	6.299.556.780,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	19.724.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	19.724.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	5.047.456.731,00			-	-	-	-	5.348.780,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	5.047.456.731,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.348.780,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Bersertifikasi	-			94 Persen	219.110.000,00			-	-	-	-	285.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	174.386.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	44.724.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	-			73 Persen	392.527.300,00			-	-	-	-	394.008.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.833.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.981.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.477.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.008.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	44.973.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	11.940.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	59.473.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	199.873.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	29.975.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	-			70 Persen	1.677.969.000,00			-	-	-	-	4.795.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	499.841.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	400.110.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		502.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	540.518.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.733.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	47.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			80 Persen	667.340.800,00			-	-	-	-	668.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.990.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	69.900.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	592.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		593.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			73 Persen	122.844.000,00			-	-	-	-	132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	79.928.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	11.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.956.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	19.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	-			12,43 Persen	629.928.000,00						-	855.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Daerah Kecamatan Yang Sudah Dipetakan	-			80 Persen	149.939.500,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	149.939.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Daerah Kecamatan Yang Sudah Dipetakan	-			80 Persen	479.988.500,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	705.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	175.490.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	304.498.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		605.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	-			17,74 Persen	318.974.000,00						-	419.107.081,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Masuk	-			73 Investor	318.974.000,00			-	-	-	-	419.107.081,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	318.974.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		419.107.081,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			3,49 Indeks	449.845.250,00						-	550.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	-			1,6 Hari	449.845.250,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	99.999.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	199.977.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	99.981.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						23.346.874.000,00							14.795.664.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.346.874.000,00							14.795.664.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						23.346.874.000,00							14.795.664.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.294.584.300,00						-	7.473.664.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	158.719.300,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	160.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	48.642.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		85.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	110.076.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.388.298.120,00			-	-	-	-	4.673.390.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.388.298.120,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.673.390.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	54.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	488.441.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	533.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.589.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	35.692.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	51.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		305.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	340.985.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	7.172.880,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	168.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	734.440.000,00			-	-	-	-	747.274.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	101.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	622.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		642.024.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	232.800.000,00			-	-	-	-	260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	103.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	65.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	64.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	1.099.876.000,00						-	1.770.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	988.876.000,00			-	-	-	-	1.670.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				10 Orang	288.076.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				2 Orang Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	212.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				30 Orang	150.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	48.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				10 Unit	240.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	111.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	55.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				5 Orang	55.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	14.303.105.700,00						-	4.727.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.695.173.500,00			-	-	-	-	1.787.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				20 unit Unit	12.582.693.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.537.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				15 Dokumen	112.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	613.997.000,00			-	-	-	-	1.180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	399.194.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		930.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota														
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				1 Kegiatan	34.860.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				10 Orang	179.942.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	554.055.200,00			-	-	-	-	760.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				8 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penerima Penghargaan olahraga</i>				10 Orang	255.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			<i>Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)</i>				5 Pelatda	199.055.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	49.948.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	49.948.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	389.932.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			<i>Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan</i>				1 Laporan	49.680.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen Dokumen	21.860.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	318.392.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	649.308.000,00						-	825.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	649.308.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	825.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi Organisasi	149.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		175.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				10 Orang Orang	198.815.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 laporan Laporan	49.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	194.693.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 1. Peningkatan Ekonomi Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				10 Organisasi	57.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 1. Peningkatan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						7.652.775.813,00							6.753.586.813,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.652.775.813,00							6.753.586.813,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						7.077.775.813,00							6.425.586.813,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			83.90 Nilai	5.942.775.813,00						-	5.230.586.813,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 Persen	56.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	56.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	3.444.787.273,00			-	-	-	-	3.444.787.273,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.444.787.273,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.444.787.273,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Kehadiran Pegawai</i>	-			95 Persen	260.000.000,00			-	-	-	-	260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			80 Persen	701.689.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	357.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				15 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	164.689.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	-			80 Persen	608.300.000,00			-	-	-	-	513.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				34 Unit	110.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	97.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		97.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			80 Persen	718.999.540,00			-	-	-	-	718.999.540,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	603.999.540,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		603.999.540,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	-			7 Unit	153.000.000,00			-	-	-	-	153.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	48.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA	-			78 Nilai	1.135.000.000,00						-	1.195.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-			25000 Orang	810.000.000,00			-	-	-	-	870.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustaka an	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				12 Perpustak aan	435.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		435.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				5000 Eksemplar	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i>				5 Perpustaka an	45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat</i>	-			11 Kegiatan	325.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	325.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>				8 Perpustaka an	300.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i>				1 Lokus	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						575.000.000,00							328.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Dinamis</i>	-			80 Persen	455.000.000,00						-	278.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Daerah	-			46 Perangkat Daerah	240.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				46 Berkas	70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				138 Berkas	70.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Statis	-			23 Perangkat Daerah	100.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	63.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				123 Arsip	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		63.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah OPD yang menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan</i>	-			48 OPD 46 Perangkat Daerah	115.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				10 Pengguna	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>				250 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE ARSIP YANG TERSELAMATKAN	-			40 persen	120.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Jumlah OPD yang melakukan Pemusnahan Arsip</i>	-			20 OPD	25.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				20 Arsip	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	<i>Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana</i>	-			40 OPD	60.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				48 Arsip	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				48 Arsip	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang ditemukan	-			10 Berkas	35.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				1 Arsip	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						23.327.580.328,00							22.550.580.328,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						23.327.580.328,00							22.550.580.328,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						23.327.580.328,00							22.550.580.328,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			79 Nilai	8.556.603.728,00						-	8.756.789.617,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	-			79 Persen	73.750.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	54.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	19.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pembangun an Infra struktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	5.606.730.728,00			-	-	-	-	5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5.606.730.728,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	-			92 Persen	308.006.000,00			-	-	-	-	310.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	104.006.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	102.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	102.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	-			87 Persen	716.547.000,00			-	-	-	-	630.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	172.092.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		172.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	44.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	479.986.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		393.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30 Dokumen	14.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	-			83 Persen	931.457.000,00			-	-	-	-	1.138.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	309.385.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	282.284.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		269.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	319.788.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		499.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			79 Persen	705.899.000,00			-	-	-	-	738.065.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14.999.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 Laporan	663.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		696.065.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			79 Persen	214.214.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pемban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	244.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	179.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pемban gunan Infra struktur Wilayah	-		181.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	14.570.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	19.764.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-			0.82 Persen	5.872.427.000,00						-	3.915.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	-			20.94 Persen	5.197.427.000,00			-	-	-	-	3.240.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				35 Orang	530.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		530.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				25 Kelompok	149.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				10 Unit Usaha	349.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				200 Unit	4.167.577.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-			1 Unit	675.000.000,00			-	-	-	-	675.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	675.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		675.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-			1,44 Persen	5.524.812.000,00						-	6.505.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Budidaya yang terbina	-			23 Kelompok	1.099.850.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				8 Kelompok	849.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		1.350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	249.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			4.282,04 Ton	4.424.962.000,00			-	-	-	-	4.905.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	380.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		380.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	2.570.002.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		3.050.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	1.474.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.475.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	-			2,00 Persen	3.373.737.600,00						-	3.373.790.711,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	-			4 unit	159.998.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	159.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	-			4,98 Persen	179.950.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				15 Unit Usaha	179.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Bahan baku Industri pengolahan Ikan	-			6 Jenis	3.033.789.600,00			-	-	-	-	3.033.790.711,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5819.50 Ton	303.790.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		303.790.711,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	2.729.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.730.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		UPTD BALAI BENIH IKAN						800.000.000,00							815.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						800.000.000,00							815.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						800.000.000,00							815.000.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-			1,44 Persen	800.000.000,00						-	815.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	-			35000 Ekor	800.000.000,00			-	-	-	-	815.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	149.816.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	650.184.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
		DINAS PARIWISATA						15.316.483.416,00							17.723.983.416,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						15.316.483.416,00							17.723.983.416,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						15.316.483.416,00							17.723.983.416,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	-			90 PERSEN	7.135.926.928,00						-	7.228.983.416,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			81 Persen	57.123.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	57.123.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tepat Waktu	4.593.397.228,00			-	-	-	-	4.593.360.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	4.593.397.228,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.593.360.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			95 Persen	238.510.000,00			-	-	-	-	240.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	89.930.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	148.580.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran</i>	-			75 Persen	884.979.300,00			-	-	-	-	889.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	29.969.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	64.259.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	52.212.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	79.940.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	20.140.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	609.088.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		609.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	29.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	-			75 Persen	739.976.000,00			-	-	-	-	744.523.416,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	138.950.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	254.111.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		257.523.416,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	346.915.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		347.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			80 Persen	491.161.400,00			-	-	-	-	521.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	14.986.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	49.975.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	426.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		456.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			75 Persen	130.780.000,00			-	-	-	-	181.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	57.990.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		106.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	39.060.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	33.730.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE DESTINASI PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN	-			10,36 PERSEN	4.141.065.740,00						-	6.050.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	-			5 Daya Tarik	1.774.449.080,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	410.526.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				5 Orang	1.363.923.080,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola	-			1 Kawasan	1.309.435.560,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	2.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	590.247.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	719.188.560,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.350.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	-			5 Destinasi	957.909.700,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	1.700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	175.565.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	364.726.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	417.618.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) yang ditetapkan	-			5 Jumlah Usaha	99.271.400,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota														
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				1 Usaha	99.271.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEgara PERKEBANGSAAN	-			80 PERSEN	1.467.695.770,00						-	1.895.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata	-			1 Event	1.467.695.770,00			-	-	-	-	1.895.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	29.796.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	59.987.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	49.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1.109.961.970,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah	-		1.530.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	218.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE KEKAYAAN INTELEKTUAL EKONOMI KREATIF YANG DILINDUNGI	-			10 PERSEN	1.270.575.678,00						-	1.200.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Kreatif	-			1 Pelaku Usaha	299.908.900,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	299.908.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi yang Dikembangkan	-			17 Pelaku Usaha	970.666.778,00			-	-	-	-	900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				5 Laporan	263.748.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur														
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				1 Unit	106.590.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	102.232.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	199.019.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)														
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				2 Pelaku Usaha	99.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual														
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				2 Kegiatan	99.857.769,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				3 Produk	99.233.509,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG DIKEMBANGKAN	-			80 PERSEN	1.301.219.300,00						-	1.350.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina	-			114 Orang	1.086.360.600,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.189.320.350,00							1.189.324.851,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENINGKATAN NILAI LPPD	-			3.34 Nilai	1.189.320.350,00						-	1.189.324.851,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	-			90 Persen	1.189.320.350,00			-	-	-	-	1.189.324.851,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	735.798.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		736.850.945,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	393.298.350,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		392.473.906,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	60.224.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						6.557.675.510,00							5.825.208.836,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.557.675.510,00							5.825.208.836,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.557.675.510,00							5.825.208.836,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PENINGKATAN PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAA	-			3 Persen	6.557.675.510,00						-	5.825.208.836,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-			100 persen	6.557.675.510,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-	-	5.825.208.836,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	4.570.170.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.987.703.201,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1.787.503.510,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.787.505.635,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	200.002.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Kelanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						750.974.600,00							724.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						750.974.600,00							724.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						750.974.600,00							724.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	-			86 Nilai	750.974.600,00						-	724.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangka	-			74 Persen	750.974.600,00			-	-	-	-	724.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	356.991.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	249.984.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				400 Dokumen	143.999.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.000.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN KERJA SAMA						571.997.080,00							572.000.635,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						571.997.080,00							572.000.635,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						571.997.080,00							572.000.635,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE KERJASAMA YANG DITINDAKLANJUTI	-			90 Persen	571.997.080,00						-	572.000.635,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	-			90 Persen	571.997.080,00			-	-	-	-	572.000.635,00	BAGIAN KERJA SAMA
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	375.093.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		457.600.581,00	BAGIAN KERJA SAMA
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	196.903.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		114.400.054,00	BAGIAN KERJA SAMA
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						839.965.080,00							840.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						839.965.080,00							840.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						839.965.080,00							840.000.000,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	TINGKAT INFLASI DAERAH	-			2.94 Nilai	839.965.080,00						-	840.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	-			65 Persen	564.994.400,00			-	-	-	-	565.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	244.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		245.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	319.999.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		320.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	-			65 Persen	274.970.680,00			-	-	-	-	275.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	274.970.680,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						982.960.000,00							983.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						982.960.000,00							983.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						982.960.000,00							983.000.000,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	INDEKS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA	-			59 Nilai	982.960.000,00						-	983.000.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	-			3.7 Persen	982.960.000,00			-	-	-	-	983.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	473.454.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		462.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	122.469.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		121.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	387.037.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN ORGANISASI						1.167.480.750,00							1.223.924.888,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.167.480.750,00							1.223.924.888,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.167.480.750,00							1.223.924.888,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NDEKS KELEMBAGAAN	-			70 Nilai	1.167.480.750,00						-	1.223.924.888,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	-			100 Persen	1.167.480.750,00			-	-	-	-	1.223.924.888,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	384.073.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		409.434.004,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	247.299.480,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		272.660.822,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	234.999.940,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		215.360.822,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	149.999.590,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.360.822,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	151.108.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		151.108.418,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM						49.665.783.438,00							46.911.398.187,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						49.665.783.438,00							46.911.398.187,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						49.665.783.438,00							46.911.398.187,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	-			90 Persen	49.665.783.438,00						-	46.911.398.187,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	20.485.898.288,00			-	-	-	-	20.637.263.288,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/bulan	20.485.898.288,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.637.263.288,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			persen 55	143.865.150,00			-	-	-	-	147.009.364,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				6 Paket	143.865.150,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		147.009.364,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP</i>	-			75 Persen	6.388.393.000,00			-	-	-	-	5.396.465.249,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	530.695.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		525.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	456.773.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		292.664.249,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	871.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		880.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				14 Paket	477.043.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		479.757.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	4.052.582.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.219.044.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daera</i>	-			80 Persen	4.863.683.000,00			-	-	-	-	2.425.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				3 Unit	984.385.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	735.198.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		745.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	926.713.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.136.679.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		405.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	730.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	350.708.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		525.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.176.974.000,00			-	-	-	-	6.244.550.286,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.923.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.925.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.133.224.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.209.550.286,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.982.720.000,00			-	-	-	-	6.389.660.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	4.682.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.094.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	629.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		602.100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	671.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		693.560.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	5.624.250.000,00			-	-	-	-	5.671.450.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.704.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.717.466.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	3.920.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.953.984.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						1.744.988.100,00							1.127.100.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.744.988.100,00							1.127.100.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.744.988.100,00							1.127.100.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.744.988.100,00						-	1.127.100.000,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1.744.988.100,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	1.127.100.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	1.180.149.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		654.600.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	220.176.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		127.500.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	344.663.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		345.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DPRD						33.093.645.292,00							36.793.645.292,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						33.093.645.292,00							36.793.645.292,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						33.093.645.292,00							36.793.645.292,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	-			79.04 Nilai	21.220.095.292,00						-	20.726.549.292,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			88 Persen	126.295.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	107.795.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		145.792.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	18.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		54.208.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	5.822.317.442,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	5.867.265.092,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	5.765.707.442,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.757.265.092,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	56.610.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			94 Persen	197.891.600,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	49.891.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	148.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	2.234.428.600,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.308.284.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	260.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	119.878.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	256.971.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	49.994.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	849.985.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				120 Laporan	497.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		808.284.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	199.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</i>	-			75 Persen	888.414.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	481.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	222.117.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	85.777.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	177.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		158.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	63.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		73.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	340.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	-			83 Persen	3.388.489.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.390.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	358.489.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.970.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.970.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	1.149.113.100,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.060.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	239.990.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	309.999.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	99.943.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	99.996.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	199.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	199.348.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	6.429.323.240,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	6.420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	6.200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	129.327.040,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	99.996.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	-			8 Jenis Layanan	983.823.310,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	983.823.310,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD	-			75 Persen	11.873.550.000,00						-	16.067.096.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			20 Peraturan	1.222.150.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.877.170.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	1.222.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.877.170.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	-			3 Kali	3.702.650.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.910.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				40 Dokumen	989.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	21.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				5 Orang	210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				12 Dokumen	321.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				20 Dokumen	2.160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Jumlah Kunjungan DPRD</i>	-			84 Kali	3.663.150.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	5.889.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				36 Laporan	1.363.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.363.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				20 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				60 Dokumen	2.299.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.326.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD</i>	-			12 Kali	3.285.600.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	5.390.076.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				72 Dokumen	2.360.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.865.305.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				72 Dokumen	925.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.524.771.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						13.696.411.033,00							13.985.372.973,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.696.411.033,00							13.985.372.973,00	
	5.01	PERENCANAAN						12.051.748.753,00							12.035.372.973,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	-			88.45 NILAI 90 PERSEN	7.572.428.503,00						-	7.415.372.973,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	119.798.090,00			-	-	-	-	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	69.981.090,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sepempang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	49.817.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran</i>	-			1 Tepat Waktu	5.035.672.973,00			-	-	-	-	5.135.672.973,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				42 Orang/bulan	5.035.672.973,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.135.672.973,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			95 Persen	156.031.720,00			-	-	-	-	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	53.567.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	45.136.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	57.328.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			84 Persen	712.331.320,00			-	-	-	-	734.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	39.695.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	24.974.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	49.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24.696.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	19.285.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	498.561.720,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	30.120.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			80 Persen	487.850.000,00			-	-	-	-	350.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	87.689.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	334.119.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		215.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	46.002.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.772.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD	-			66 PERSEN 86 PERSEN	2.180.000.000,00						-	2.320.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	-			72 Persen	1.330.000.000,00			-	-	-	-	1.430.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	110.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	280.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	820.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	-			92 Persen	400.000.000,00			-	-	-	-	420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindakanj ^{ut} hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	-			70 Persen	350.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	-			94 PERSEN	2.299.320.250,00						-	2.300.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			95 Persen	999.547.450,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	249.999.820,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	249.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	249.958.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	249.595.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			93 Persen	699.824.800,00			-	-	-	-	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	149.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	149.996.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	149.896.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	149.938.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	99.999.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			93 Persen	599.948.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	149.955.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	149.993.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.644.662.280,00							1.950.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN INDEKS INOVASI DAERAH	-			35 PERSEN 63 NILAI	1.644.662.280,00						-	1.950.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	-			100 Persen	199.979.720,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	199.979.720,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-			100 Persen	299.699.440,00			-	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	199.699.440,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			100 Persen	624.983.520,00			-	-	-	-	950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	99.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	224.999.520,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	-			100 Persen	519.999.600,00			-	-	-	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	519.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						174.644.700.000,00							172.859.700.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						174.644.700.000,00							172.859.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						174.644.700.000,00							172.859.700.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	19.066.081.740,00						-	18.250.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	318.526.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.745.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19.981.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	136.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	101.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	11.665.230.240,00			-	-	-	-	11.565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	11.597.182.640,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.951.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	4.817.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	8.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	4.929.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Millik Daerah	-			82 Persen	61.933.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	8.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	53.733.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	-			82 Persen	89.657.600,00			-	-	-	-	90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	4.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	59.958.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	4.929.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	613.700.000,00			-	-	-	-	530.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	273.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	340.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	1.181.994.700,00			-	-	-	-	1.180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	101.436.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	99.314.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	151.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	99.993.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	29.959.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	100.262.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	49.930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	1.936.962.000,00			-	-	-	-	1.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	119.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	19.997.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	9.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	9.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	390.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/P YANG TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES, DAN TEPAT ISI	-			98 Persen	151.156.157.060,00						-	150.359.700.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	-			1 Tepat Waktu	2.500.383.700,00			-	-	-	-	2.460.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	19.965.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	19.965.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	19.919.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	15.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	844.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	709.227.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	317.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		318.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	19.527.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	50.007.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	-			98 Persen	2.027.961.000,00			-	-	-	-	1.771.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	250.091.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	121.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	178.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		181.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				12 Laporan	352.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	119.590.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	-			100 Persen	145.158.784.000,00			-	-	-	-	144.660.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	9.954.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	9.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	9.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	135.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	7.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	-			88 Persen	2.154.092.200,00						-	2.400.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD</i>	-			100 Persen	2.154.092.200,00			-	-	-	-	2.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	298.962.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	149.879.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	268.330.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	200.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	191.625.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		320.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	149.996.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	-			5 Persen	2.268.369.000,00						-	1.850.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	-			6 Persen	2.268.369.000,00			-	-	-	-	1.850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	49.905.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	101.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	147.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1365 Laporan	591.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	450.416.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				44699 Dokumen	398.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	9.716.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	59.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1365 Dokumen	198.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1365 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	149.162.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						11.208.671.000,00							11.242.592.982,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.208.671.000,00							11.242.592.982,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						9.656.364.010,00							9.642.592.982,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			81.30 NILAI	6.997.110.510,00						-	6.923.668.500,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	37.370.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	37.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 tepat waktu	5.758.886.710,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5.758.886.710,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 Persen	503.364.300,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	394.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	139.924.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	19.406.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.867.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	79.937.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.999.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	251.230.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	224.190.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	183.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	110.151.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		183.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	114.039.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			85 Persen	203.786.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	261.944.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.286.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	174.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		221.944.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	239.513.500,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	479.324.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	79.942.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		159.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	39.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		61.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	89.991.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		149.324.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)	-			29 Persen	2.659.253.500,00						-	2.718.924.482,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	-			100 Persen	238.897.260,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	238.897.260,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	-			100 Persen	658.500.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	670.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				25 Dokumen	346.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				35 Orang	315.956.290,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	-			100 Persen	405.089.530,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	290.089.530,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 Orang	115.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.552.306.990,00							1.600.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)	-			87 Persen	1.552.306.990,00						-	1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			100 Persen	1.552.306.990,00			-	-	-	-	1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				50 Orang	1.552.306.990,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						6.808.406.657,00							7.697.406.657,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.808.406.657,00							7.697.406.657,00	
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						6.808.406.657,00							7.697.406.657,00	
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.298.406.657,00						-	7.207.406.657,00	
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.005.604,00			-	-	-	-	4.469.910.657,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	4.000.005.604,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.469.910.657,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	34.448.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	14.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				3 Orang	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	336.211.730,00			-	-	-	-	287.496.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	7.989.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	14.999.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	8.939.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				71 Laporan	304.283.430,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		262.496.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	845.445.200,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	1.344.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	270.934.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	43.762.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		44.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	332.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	198.019.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	385.098.623,00			-	-	-	-	346.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.998.623,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	339.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	642.197.500,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	660.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	59.979.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	46.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	486.292.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.008.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			80,50 NILAI	9.833.703.087,00						-	9.527.949.987,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	101.940.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	101.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.640.455.187,00			-	-	-	-	6.639.598.874,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	6.640.455.187,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.639.598.874,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	649.987.800,00			-	-	-	-	650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	49.969.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	600.018.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	562.454.400,00			-	-	-	-	415.366.113,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	124.954.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	25.509.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				740 Paket	19.938.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40000 Paket	37.000.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.866.113,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76 Laporan	330.054.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.518.057.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.430.985.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	930.904.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		930.904.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	87.590.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		89.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	353.419.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		317.081.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	46.144.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	295.800.000,00			-	-	-	-	297.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				500 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	11.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	278.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		280.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.008.700,00			-	-	-	-	65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	45.000.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	20.008.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BEBAS DARI TEMUAN MATERIAL	-			100 PERSEN	2.032.257.900,00						-	2.331.022.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	1.468.760.500,00			-	-	-	-	1.767.322.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				60 Laporan	323.577.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		323.579.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Laporan	298.634.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				45 Laporan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				10 Laporan	336.499.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		336.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				9 Kesepakatan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		357.243.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				80 Dokumen	200.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	563.497.400,00			-	-	-	-	563.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				65 Laporan	199.997.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 PERSEN	122.999.400,00						-	123.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 PERSEN	122.999.400,00			-	-	-	-	123.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	122.999.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						9.175.259.612,00							9.125.259.012,00	
	7.01	KECAMATAN						9.175.259.612,00							9.125.259.012,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.442.173.312,00						-	8.391.701.012,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	70.082.000,00			-	-	-	-	70.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.082.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 TEPAT WAKTU	6.346.033.012,00			-	-	-	-	6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	6.346.033.012,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daer	-			95 PERSEN	109.998.900,00			-	-	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	49.998.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 PERSEN	629.656.200,00			-	-	-	-	629.664.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	107.728.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		107.728.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.999.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	59.995.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	369.733.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		369.736.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				17 Dokumen	12.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 PERSEN	250.884.200,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	44.996.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	84.999.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	80.888.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 PERSEN	747.500.000,00			-	-	-	-	747.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	679.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		679.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 PERSEN	288.019.000,00			-	-	-	-	288.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	68.203.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	149.816.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 PERSEN	523.097.800,00						-	523.558.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	523.097.800,00			-	-	-	-	523.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59.999.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	463.098.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		463.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 PERSEN	79.996.100,00						-	80.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 PERSEN	79.996.100,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>	-			100 PERSEN	240.889.500,00						-	240.889.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan</i>	-			65 Koodiniasi	240.889.500,00			-	-	-	-	240.889.500,00	KELURAHAN RANAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	240.889.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.889.500,00	KELURAHAN RANAI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</i>	-			100 PERSEN	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan</i>	-			4 Koordinasi	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN RANAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KELURAHAN RANAI
		KELURAHAN BANDARSYAH						440.889.500,00							440.889.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						440.889.500,00							440.889.500,00	
	7.01	KECAMATAN						440.889.500,00							440.889.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>	-			100 PERSEN	240.889.500,00						-	240.889.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan</i>	-			65 Koordinasi	240.889.500,00			-	-	-	-	240.889.500,00	KELURAHAN BANDARSYAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	240.889.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Bandarsyah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.889.500,00	KELURAHAN BANDARSYAH

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Nilai	5.434.078.496,00						-	5.314.070.496,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase RealisasiKinerja Perangkat	-			78 Persen	25.423.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.423.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan WaktuPembayara nAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah	-			1 Tepat waktu	3.947.660.496,00			-	-	-	-	3.909.870.496,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.947.660.496,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.909.870.496,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	87.716.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	29.716.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	58.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	216.482.600,00			-	-	-	-	186.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	59.994.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.992.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.999.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.997.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	102.998.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	380.955.000,00			-	-	-	-	389.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	38.633.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	26.053.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	91.656.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.700.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	224.613.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		231.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	511.998.000,00			-	-	-	-	512.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.998.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	470.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		470.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	263.843.400,00			-	-	-	-	266.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	99.995.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	13.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	89.792.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	48.700.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.956.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	267.640.600,00						-	267.641.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi urusan pemerintahan yang di laksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	267.640.600,00			-	-	-	-	267.641.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	267.640.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		267.641.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	-			100 Persen	49.999.900,00						-	50.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	49.999.900,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga K emasyarakat an	49.999.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			15 Persen	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 Persen	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 Persen	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan dan pengawasan	-			100 Persen	80.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
		KELURAHAN SEDANAU						1.150.000.000,00							1.150.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.150.000.000,00							1.150.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.150.000.000,00							1.150.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			100 Persen	1.150.000.000,00						-	1.150.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi urusan pemerintahan yang di laksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	450.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	KELURAHAN SEDANAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	450.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	KELURAHAN SEDANAU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	-			4 Koordinasi	700.000.000,00			-	-	-	-	700.000.000,00	KELURAHAN SEDANAU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	700.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	KELURAHAN SEDANAU
		KECAMATAN BUNGURAN UTARA						5.885.873.346,00							5.135.873.346,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						120.000.000,00							120.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						120.000.000,00							120.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 Persen	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan undefined	-			100 Persen undefined undefined	120.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.765.873.346,00							5.015.873.346,00	
	7.01	KECAMATAN						5.765.873.346,00							5.015.873.346,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			68.50 Nilai	5.142.810.346,00						-	4.392.010.346,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			63.50 Persen	85.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	2.775.803.646,00			-	-	-	-	2.645.500.346,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.775.803.646,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.645.500.346,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	59.858.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	14.858.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	45.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			70 Persen	303.279.200,00			-	-	-	-	424.510.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.964.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.968.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	29.866.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.926.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.981.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	232.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		235.310.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	7.072.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	1.061.187.000,00			-	-	-	-	375.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	274.188.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				271 Unit	144.920.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	265.074.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				258 Unit	77.005.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	300.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	462.426.500,00			-	-	-	-	440.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.926.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	416.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			85 Persen	395.256.000,00			-	-	-	-	377.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	89.610.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.490.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	264.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		265.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11.956.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>	-			100 Persen	311.770.000,00						-	311.770.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan</i>	-			65 Koordinasi	291.770.000,00			-	-	-	-	291.770.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	291.770.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		291.770.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan</i>	-			65 Koordinasi	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</i>	-			100 Persen	103.093.000,00						-	103.093.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</i>	-			100 Persen	103.093.000,00			-	-	-	-	103.093.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				7 Lembaga K emasyarakatat an	103.093.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.093.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>	-			15 Persen	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara</i>	-			90 Persen	60.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 Persen	148.200.000,00						-	149.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 Persen	148.200.000,00			-	-	-	-	149.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	79.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	69.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
		KECAMATAN PULAU LAUT						4.252.601.899,00							4.252.601.899,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						125.000.000,00							125.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						125.000.000,00							125.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 Persen	125.000.000,00						-	125.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 Persen	125.000.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.127.601.899,00							4.127.601.899,00	
	7.01	KECAMATAN						4.127.601.899,00							4.127.601.899,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			70 Nilai	3.485.431.899,00						-	3.485.431.899,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			70 Persen	40.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	2.142.140.899,00			-	-	-	-	2.142.140.899,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.142.140.899,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.142.140.899,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	70.000.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	45.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			75 Persen	299.291.000,00			-	-	-	-	299.291.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	120.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	24.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	121.291.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		121.291.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	150.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	80.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	382.170.000,00						-	382.170.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Persen	382.170.000,00			-	-	-	-	382.170.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	382.170.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		382.170.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga K emasyarakatan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 Persen	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 Persen	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			75,10 Nilai	4.347.970.396,00						-	4.372.970.496,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat	-			63,50 Persen	44.998.200,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24.998.200,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	2.661.874.996,00			-	-	-	-	2.661.770.496,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	2.661.874.996,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.661.770.496,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	120.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	289.199.200,00			-	-	-	-	289.200.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.999.200,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 PERSEN	345.000.000,00			-	-	-	-	355.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	140.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	165.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	543.000.000,00			-	-	-	-	543.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	475.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		475.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	343.898.000,00			-	-	-	-	344.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	122.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	179.998.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.900.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	12.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 PERSEN	591.452.000,00						-	591.452.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	591.452.000,00			-	-	-	-	591.452.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	591.452.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		591.452.000,00	KECAMATAN MIDAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	45.095.200,00						-	45.095.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	45.095.200,00			-	-	-	-	45.095.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga K emasyarakat an	45.095.200,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.095.000,00	KECAMATAN MIDAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 Persen	20.000.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	-			90 Persen	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 Persen	79.999.900,00						-	80.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 Persen	79.999.900,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	59.999.900,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
		KELURAHAN SABANG BARAT						986.000.000,00							1.186.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						986.000.000,00							1.186.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						986.000.000,00							1.186.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	306.000.000,00						-	506.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	306.000.000,00			-	-	-	-	506.000.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	306.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Sabang Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		506.000.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI	-			100 Persen	680.000.000,00						-	680.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	-			4 Koordinasi	680.000.000,00			-	-	-	-	680.000.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	680.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Sabang Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		680.000.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
		KECAMATAN SERASAN						5.445.130.714,00							5.445.130.714,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						174.940.000,00							175.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						174.940.000,00							175.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	174.940.000,00						-	175.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	174.940.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	174.940.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.270.190.714,00							5.270.130.714,00	
	7.01	KECAMATAN						5.270.190.714,00							5.270.130.714,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.730.357.714,00						-	4.731.980.714,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.008.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.012.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	29.996.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.227.424.803,00			-	-	-	-	3.233.420.714,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.227.424.803,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.233.420.714,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	73.216.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	29.716.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	43.500.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	348.378.700,00			-	-	-	-	348.560.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	59.928.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.890.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.013.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.100,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.998.800,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	204.356.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		204.360.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	7.192.800,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	206.783.000,00			-	-	-	-	202.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	26.298.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.485.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	526.995.811,00			-	-	-	-	526.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	9.995.700,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	36.000.111,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	481.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		480.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	297.551.400,00			-	-	-	-	297.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	145.003.400,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		145.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	20.300.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	120.048.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	12.200.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	384.240.000,00						-	383.150.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	384.240.000,00			-	-	-	-	383.150.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	384.240.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		383.150.000,00	KECAMATAN SERASAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				8 Lembaga K emasyarakat an	70.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	20.012.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	20.012.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	20.012.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	65.581.000,00						-	65.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	65.581.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				8 Dokumen	44.974.800,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	20.606.200,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
		KELURAHAN SERASAN						1.196.213.000,00							1.246.213.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.196.213.000,00							1.246.213.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.196.213.000,00							1.246.213.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	290.000.000,00						-	290.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	290.000.000,00			-	-	-	-	290.000.000,00	KELURAHAN SERASAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	290.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		290.000.000,00	KELURAHAN SERASAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	906.213.000,00						-	956.213.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	906.213.000,00			-	-	-	-	956.213.000,00	KELURAHAN SERASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				5 Pokmas / Ormas	906.213.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		956.213.000,00	KELURAHAN SERASAN
		KECAMATAN SUBI						4.939.711.947,00							4.939.711.947,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						175.000.000,00							175.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						175.000.000,00							175.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN</i>	-			20 Persen	175.000.000,00						-	175.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan</i>	-			100 Persen	175.000.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.764.711.947,00							4.764.711.947,00	
	7.01	KECAMATAN						4.764.711.947,00							4.764.711.947,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			80.10 Nilai	4.218.861.947,00						-	4.217.786.947,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			63.50 Persen	69.680.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	29.900.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	39.780.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	1.838.706.947,00			-	-	-	-	1.815.387.314,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.838.706.947,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.815.387.314,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	94.408.000,00			-	-	-	-	95.200.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	34.408.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.200.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	569.959.000,00			-	-	-	-	572.413.633,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	112.710.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	18.632.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.993.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.700.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.796.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	374.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		380.213.633,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	7.128.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	400.092.000,00			-	-	-	-	410.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	59.230.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				110 Unit	66.850.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				25 Unit	199.012.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	75.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			100 Persen	499.786.000,00			-	-	-	-	501.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	23.786.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	469.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		470.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			75 Persen	746.230.000,00			-	-	-	-	753.786.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	470.710.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		473.786.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	19.320.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	178.120.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	48.800.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.280.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUBI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	306.200.000,00						-	306.925.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	306.200.000,00			-	-	-	-	306.925.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	306.200.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		306.925.000,00	KECAMATAN SUBI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	79.800.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	79.800.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga K emasyarakat an	79.800.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>	-			15 Persen	39.850.000,00						-	40.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada</i>	-			90 Persen	39.850.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	39.850.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUBI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</i>	-			100 Persen	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	-			100 Persen	120.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				8 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUBI
		KECAMATAN PULAU TIGA						3.626.516.466,00							3.742.516.466,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0,00							100.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						0,00							100.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN</i>	-			20 Persen	0,00						-	100.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan</i>	-			100 Persen	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.626.516.466,00							3.642.516.466,00	
	7.01	KECAMATAN						3.626.516.466,00							3.642.516.466,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			65.50 Nilai	3.282.608.466,00						-	3.192.516.466,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			69 Persen	49.920.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.950.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	29.970.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	1.828.857.154,00			-	-	-	-	1.760.516.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.828.857.154,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.760.516.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	83.400.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	23.460.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	59.940.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			68 Persen	333.729.900,00			-	-	-	-	344.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	39.989.200,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	7.997.100,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	35.993.600,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	249.750.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				8 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</i>	-			73 Persen	284.784.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	98.894.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				46 Unit	40.736.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	99.796.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.956.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	169.992.000,00						-	170.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	169.992.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	169.992.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	64.980.000,00						-	70.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	64.980.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga K emasyarakatat an	64.980.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 Persen	24.984.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	-			90 Persen	24.984.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	24.984.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 Persen	83.952.000,00						-	140.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 Persen	83.952.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	41.976.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	41.976.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH						3.564.160.852,00							3.637.160.852,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						53.732.500,00							54.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						53.732.500,00							54.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.932.500,00						-	4.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	3.932.500,00			-	-	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.932.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 Persen	49.800.000,00						-	50.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 Persen	49.800.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	49.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.510.428.352,00							3.583.160.852,00	
	7.01	KECAMATAN						3.510.428.352,00							3.583.160.852,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			72,50 Nilai	3.315.697.952,00						-	3.348.160.852,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			63,50 Persen	29.949.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	9.980.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	9.979.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tepat Waktu	2.204.277.852,00			-	-	-	-	2.195.600.947,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	2.204.277.852,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.195.600.947,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			95 Persen	43.088.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	14.858.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	28.230.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			65 Persen	258.944.700,00			-	-	-	-	283.305.905,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	39.196.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.980.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.990.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11.998.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.563.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	186.255.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		186.305.905,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	5.962.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	405.749.000,00			-	-	-	-	380.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	37.677.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	79.147.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	248.925.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	41.968.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.880.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.880.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	99.945.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	99.945.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	99.945.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	39.992.000,00						-	40.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	39.992.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				4 Lembaga K emasyarakat an	39.992.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 Persen	9.900.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada</i>	-			90 Persen	9.900.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	9.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 Persen	44.893.400,00						-	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	-			100 Persen	44.893.400,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				4 Dokumen	14.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Harapan Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.352.115.932,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.704.231.864,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	85.600.000,00			-	-	-	-	85.600.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.600.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	302.985.000,00			-	-	-	-	325.185.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	80.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	165.785.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.785.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.400.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	420.000.000,00			-	-	-	-	390.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	80.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	220.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	496.198.000,00			-	-	-	-	496.198.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	454.198.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		454.198.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	291.597.000,00			-	-	-	-	291.597.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	86.597.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		86.597.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	424.865.000,00						-	829.730.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	404.865.000,00			-	-	-	-	809.730.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	404.865.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		809.730.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				8 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	190.000.000,00						-	230.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	190.000.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			77.00 Nilai	3.375.542.914,00						-	3.412.399.314,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			75 Persen	28.965.800,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.973.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9.993.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	8.999.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran</i>	-			3.5 Tepat Waktu	1.964.328.234,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.932.170.124,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				10 Orang/bulan	1.964.328.234,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.932.170.124,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			95 Persen	14.798.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				3 Orang	14.798.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			65 Persen	323.900.880,00			-	-	-	-	324.200.190,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	59.844.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.985.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11.999.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.999.800,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.998.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	199.888.180,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.190,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	7.191.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			75 Persen	415.383.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	465.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	98.894.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	49.374.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	228.675.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		274.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	38.440.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		41.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			100 Persen	279.944.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	291.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	39.044.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	234.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		245.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			75 Persen	348.223.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	355.029.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	154.935.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		155.029.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	19.560.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	74.420.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	79.544.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		85.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	19.764.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 PERSEN	204.211.000,00						-	204.217.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	204.211.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	204.217.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	204.211.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		204.217.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 PERSEN	20.710.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	20.710.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	20.710.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 PERSEN	9.997.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 Persen	9.997.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	9.997.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 PERSEN	75.159.900,00						-	16.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 Persen	75.159.900,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	62.999.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12.160.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
		KECAMATAN SERASAN TIMUR							4.614.135.688,00						4.566.135.688,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						149.976.000,00							150.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						149.976.000,00							150.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 Persen	149.976.000,00						-	150.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 Persen	149.976.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	149.976.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.464.159.688,00							4.416.135.688,00	
	7.01	KECAMATAN						4.464.159.688,00							4.416.135.688,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			78.40 Nilai	3.976.323.688,00						-	3.928.230.688,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			79.50 Persen	69.960.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	39.960.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	2.414.976.328,00			-	-	-	-	2.327.530.688,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.414.976.328,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.327.530.688,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	89.656.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	29.716.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	59.940.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			82 Persen	372.966.100,00			-	-	-	-	390.200.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	79.978.400,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.999.100,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.993.600,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.995.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	240.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				13 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</i>	-			82 Persen	252.024.000,00			-	-	-	-	273.500.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	49.447.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				61 Unit	81.888.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				13 Unit	120.689.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		108.500.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			100 Persen	524.994.460,00			-	-	-	-	525.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.994.460,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	480.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		480.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			82 Persen	251.746.800,00			-	-	-	-	252.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	59.997.500,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.969.300,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	169.824.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.956.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	287.892.000,00						-	287.905.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	287.892.000,00			-	-	-	-	287.905.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	287.892.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		287.905.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	49.968.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	49.968.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga K emasyarakat an	49.968.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 Persen	29.988.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 Persen	29.988.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	29.988.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 Persen	119.988.000,00						-	120.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 Persen	119.988.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	79.992.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	39.996.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
		KECAMATAN SUAK MIDAI						3.770.152.576,00							3.780.152.576,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						124.995.500,00							125.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						124.995.500,00							125.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAA	-			20 Persen	124.995.500,00						-	125.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 Persen	124.995.500,00			-	-	-	-	125.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	124.995.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.645.157.076,00							3.655.152.576,00	
	7.01	KECAMATAN						3.645.157.076,00							3.655.152.576,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			71.00 Nilai	3.167.418.876,00						-	3.177.400.576,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			63,50 Persen	39.947.600,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.948.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	29.999.600,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tepat waktu	1.539.665.176,00			-	-	-	-	1.539.200.576,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				15 Orang/bulan	1.539.665.176,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.539.200.576,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			95 Persen	79.917.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	19.999.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	59.917.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			65 Persen	639.912.500,00			-	-	-	-	650.200.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	111.999.700,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		112.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	9.988.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	71.986.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	23.999.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.999.400,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	59.756.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	349.984.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	7.199.400,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			60 Persen	254.999.500,00			-	-	-	-	255.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	59.999.700,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	184.999.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		185.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	9.999.900,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	420.994.600,00			-	-	-	-	421.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.994.700,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	388.999.900,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		389.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			75 Persen	191.982.500,00			-	-	-	-	192.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	29.983.600,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	19.999.600,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	59.999.800,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	31.999.500,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	352.752.000,00						-	352.752.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	352.752.000,00			-	-	-	-	352.752.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	352.752.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		352.752.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	29.999.800,00						-	30.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	29.999.800,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga K emasyarakat an	29.999.800,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 Persen	29.987.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 Persen	29.987.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	29.987.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 Persen	64.999.400,00						-	65.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 Persen	64.999.400,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	29.999.700,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	34.999.700,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI						3.673.579.124,00							3.709.079.124,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						120.000.000,00							120.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						120.000.000,00							120.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	120.000.000,00			-	3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.553.579.124,00							3.589.079.124,00	
	7.01	KECAMATAN						3.553.579.124,00							3.589.079.124,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.984.579.124,00						-	2.985.079.124,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	49.996.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	29.996.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.798.000.224,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	1.801.420.852,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	1.798.000.224,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		1.801.420.852,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	94.408.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	95.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	34.408.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		35.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	327.581.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	325.158.272,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	102.739.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		103.685.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.984.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.975.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		36.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.933.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	156.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		156.773.272,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	7.199.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	287.680.000,00			-	-	-	-	285.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	86.710.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	95.083.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	82.621.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23.266.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	273.599.900,00			-	-	-	-	276.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	30.499.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	237.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	153.314.000,00			-	-	-	-	172.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	59.946.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	1.380.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	80.032.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	11.956.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	344.000.000,00						-	344.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	344.000.000,00			-	-	-	-	344.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	344.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		344.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				6 Lembaga K emasyarakatan	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	145.000.000,00						-	180.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	145.000.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				12 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT						3.492.432.763,00							3.502.432.763,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						69.983.000,00							70.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						69.983.000,00							70.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	69.983.000,00						-	70.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	69.983.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	69.983.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.422.449.763,00							3.432.432.763,00	
	7.01	KECAMATAN						3.422.449.763,00							3.432.432.763,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.103.489.763,00						-	3.087.410.763,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	57.963.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	23.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	23.985.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	9.993.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.960.769.363,00			-	-	-	-	1.938.570.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.960.769.363,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.938.570.466,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	89.432.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	59.432.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	360.528.000,00			-	-	-	-	315.840.297,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.256.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.640.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.640.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.975.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.952.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	47.190.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	13.914.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	179.400.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.297,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.200.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	209.561.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	74.561.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	115.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	248.720.400,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.970.400,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	218.750.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.516.000,00			-	-	-	-	178.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	59.740.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.660.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	69.540.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.760.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27.816.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	175.000.000,00						-	175.022.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	155.005.000,00			-	-	-	-	155.022.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	155.005.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		155.022.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	19.995.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	19.995.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	39.990.000,00						-	40.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	39.990.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga K emasyarakat an	39.990.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	23.994.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	23.994.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	23.994.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	79.976.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	79.976.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				8 Dokumen	29.993.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	49.983.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
		KECAMATAN PULAU SELUAN						2.563.755.503,00							2.646.755.503,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						104.940.000,00							105.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						104.940.000,00							105.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN</i>	-			20 PERSEN	104.940.000,00						-	105.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan</i>	-			100 PERSEN	104.940.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				1 Dokumen	104.940.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.458.815.503,00							2.541.755.503,00	
	7.01	KECAMATAN						2.458.815.503,00							2.541.755.503,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			63,50 PERSEN	2.218.347.503,00						-	2.218.231.503,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat</i>	-			2 Dokumen	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			10 Orang/bulan	1.569.569.503,00			-	-	-	-	1.427.031.503,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.569.569.503,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.427.031.503,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			2 Orang 1 pAKET	44.778.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	14.858.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	29.920.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket PeralataRumah Tangga yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			12 Dokumen 12 Dokumen 20 Laporan 12 Paket 12 Paket 4 Unit 12 Paket 12 Paket 2 Unit 1 Unit 5 Unit	112.563.000,00			-	-	-	-	166.200.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	39.984.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.512.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	43.355.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	35.847.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	70.239.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	175.996.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	120.492.000,00						-	203.524.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			12 Laporan	120.492.000,00			-	-	-	-	203.524.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	120.492.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		203.524.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 PERSEN	29.988.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			3 Lembaga K emasyarakatat	29.988.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga K emasyarakatat an	29.988.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 PERSEN	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			12 Laporan	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 PERSEN	59.988.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-			3 Dokumen 12 Laporan	59.988.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	29.988.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
		KECAMATAN PULAU PANJANG						2.747.024.000,00							2.757.024.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						107.724.000,00							108.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						107.724.000,00							108.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	-			20 Persen	107.724.000,00						-	108.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	-			100 Persen	107.724.000,00			-	-	-	-	108.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	107.724.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		108.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.639.300.000,00							2.649.024.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.639.300.000,00							2.649.024.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			70.10 NILAI	2.349.082.000,00						-	2.358.550.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			75 Persen	39.910.300,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.938.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	19.972.300,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	1.519.522.400,00			-	-	-	-	1.479.350.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.519.522.400,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.479.350.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	43.858.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	14.858.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	29.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			65 Persen	215.783.300,00			-	-	-	-	216.200.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	64.830.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.968.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.982.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.964.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.997.300,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.979.200,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	94.870.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	7.192.800,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	224.007.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	66.626.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Unit	27.880.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	59.776.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	40.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	29.725.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			100 Persen	216.095.000,00			-	-	-	-	234.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.495.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	201.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		204.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			undefined undefined	89.906.000,00			-	-	-	-	114.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	18.500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.956.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.450.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 Persen	200.442.000,00						-	200.474.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	-			65 Koordinasi	200.442.000,00			-	-	-	-	200.474.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	200.442.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.474.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	-			100 Persen	29.820.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-			100 Persen	29.820.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga K emasyarakat an	29.820.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			15 Persen	9.974.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	-			90 Persen	9.974.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	9.974.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			100 Persen	49.982.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan</i>	-			100 Persen	49.982.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				3 Dokumen	29.991.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>				8 Laporan	19.991.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9.109.492.812,00							15.995.419.812,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						9.109.492.812,00							15.995.419.812,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9.109.492.812,00							15.995.419.812,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Laporan LKJIP</i>	-			77.81 NILAI	5.681.883.712,00						-	11.513.419.812,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			79.50 Persen	77.998.100,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	77.998.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran</i>	-			100 Persen	4.343.184.812,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	9.885.780.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	4.343.184.812,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.885.780.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Aparatur yang Bersertifikasi</i>	-			75 Persen	117.660.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				7 Orang	117.660.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	-			100 Persen	328.728.800,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.927.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	11.979.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.983.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	24.995.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	9.936.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	47.912.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	199.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran</i>	-			75 Persen	452.006.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	556.619.812,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				16 Laporan	440.006.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		544.619.812,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			75 Persen	187.746.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	228.020.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	129.870.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		170.020.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	47.912.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.964.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Idio;ogi Pancasila	-			85 Persen	1.038.779.800,00						-	1.978.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			4 Kegiatan	1.038.779.800,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.978.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				80 Orang	51.993.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				90 Orang	450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	19.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	69.890.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	78.287.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				33 Orang	171.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	49.997.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				33 Orang	45.540.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi PARPOL	-			80 Persen	927.612.300,00						-	732.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	-			80 Persen	927.612.300,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-	-	732.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100.040.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	120.005.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	22.513.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				75 Orang	51.792.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	37.491.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA	-			undefined undefined	344.489.800,00						-	354.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	-			75 Persen	344.489.800,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	354.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.913.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Orang	24.996.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				80 Orang	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		310.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE MENURUNNYA KONFLIK SOSIAL	-			100 Persen	1.002.930.000,00						-	1.335.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	-			100 Persen	1.002.930.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.335.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	504.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	28.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	299.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H							1.590.905.226.173,00							1.755.219.295.717,00		



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah disusun berdasarkan pada asas spesifik, objektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat di pertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Pelayanan Umum;
3. Aspek Daya Saing Daerah;

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai



indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dapat diuraikan dalam berikut:

Tabel. T-VI.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Natuna Tahun 2025

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	Angka Kemiskinan	Persen	5,32	5,25	3,92	3,8
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	73,47	78,23	75,8	76,4
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan Migas	Persen	0,11	0,96	3,24	3,27
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tanpa Migas	Persen	0,02	3,81	3,86	3,96
5.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	Juta Rp	75,45	85,14	84,5	86,9
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,15	4,05	2,89	2,79
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.	Angka Kelulusan SD / Mi	Persen	100	99,79	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP / MTs	Persen	100	99,00	100	100
3.	Angka Melek Huruf	Persen	99,14	n.a	99,89	99,92
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	100,61	75,94	83,49	83,50
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	70,36	55,45	60,00	60,02
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / Sederajat	Persen	105,52	78,02	105,65	105,78
7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs / Sederajat	Persen	100,06	94,36	96,38	96,54



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
8.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	81,67	71,24	97,38	97,39
9.	Persentase Guru yang bersertifikat Pendidik (TK,SD, SMP)	Persen	31,44	45,00	28,79	30,37
10.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	72,28	71,76	79,12	79,43
11.	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	25	62,90	60,50	61,00
12.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	62,96	34,15	56,26	57,38
13.	Persentase Warganegara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	70,36	55,45	100	100
14.	Persentase Warganegara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persen	102,79	99,37	100	100
15.	Persentase Warganegara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	88,18	91,36	100	100
16.	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	Nilai	n.a	62,90	1	2
17.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	99,37	83,38	96	96
18.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini	Persen	55,45	59,01	64	67
19.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,37	99,87	97	97
20.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	7,22	91,36	97	97
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Angka	17,46	13,19	11,02	11,02
2.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	91,91	175,9	220,43	220,43
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Persen	76,97	73,43	100	100
4.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	51,04	72,84	100	100
5.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	72,84	100	100
6.	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,40	0,64	0,70	0,65
7.	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	73,43	100	100
8.	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	53	97,87	100	100
9.	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	85,66	97,87	100	100
10.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	84,68	93,13	100	100
11.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	80,00	93,13	100	100
12.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	80,00	96,75	100	100



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
13.	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	84,41	96,75	100	100
14.	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	99,48	100	100
15.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Jiwa Sesuai Standar	Persen	88,75	97,14	100	100
16.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	Persen	84,31	97,87	100	100
17.	Persentase orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	Persen	46,42	64,13	100	100
18.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	59,89	71,86	100	100
19.	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	89,76	100	100
20.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	84,13	89,76	100	100
21.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	31,97	48,24	100	100
22.	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	97,14	100	100
23.	Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,20	64,13	100	100
24.	Persentase Prevalensi Stunting	Persen	11,93	12,66	10,30	10,20
25.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100
26.	Persentase Warga Negara Ildengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	65,00	97,87	100	100
27.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	62,72	73,33	100	100
28.	Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	73,33	100	100
29.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,14	0,14	0,137	0,135
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman	Persen	14,22	75	78	81
2.	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	Persen	0	10,12	90,35	90,89
3.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan /Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk	Jaringan	0	0	1	1
6.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1	1	1	1



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
7.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lai	Kerjasama	0	0	1	1
8.	Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah	Jiwa	44	40762	1200	1250
9.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persen	16.710	22671	80	81
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jiwa	66.840	71100	1600	1600
11.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jiwa	2500	61320	1000	1200
12.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jiwa	16	0	20	24
13.	Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persen	40,10	0,53	48,57	50,25
14.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	Persen	14,22	0,2	60,39	61,63
15.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	Persen	58,50	85,24	82,03	82,98
16.	Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja	Persen	51	0,58	70	73
17.	Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persen	52	0,53	93	95
18.	Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Persen	26,81	14,57	88	90
19.	Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
20.	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	87479	10,607	257,2	259,2
21.	Panjang Jembatan yang Dibangun	Unit	6	0	1	1
22.	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
23.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
24.	Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang	Persen	70	2,63	90	91
25.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	65	73	69,87	70,48
26.	Persentase Kemantapan Jalan	Persen	70	53,66	56,235	57,31
27.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	Persen	60	0	100	100
28.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	Persen	70	0	100	100
29.	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Persen	64,70	85,2	86,1	86,3
30.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	65	72,10	70,4	73,2
31.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	55	79,27	70	72
32.	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan	Jiwa	16720	18.404	13.785	14,185



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
	Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan					
33.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Rumah Tangga	75	51	287	362
34.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	75	68	7500	8000
35.	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi	Rasio	1:1	1:1,5	1:8	1:9
36.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	1:1	1:38	1:23	1:22
37.	Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang Disetujui	Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	ada	Ada
38.	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	Tidak	ada	Ada
39.	Tersusun dan Ditetapkannya JAKSTRAda Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Tidak	ada	Ada
40.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	883	53,66	56,23	57,31
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.	Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	87	98	2000	1900
2.	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kawasan	41	1	5	5
3.	Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Kawasan	1	1	5	5
4.	Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas	Unit	1	98	50	50
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Unit	41	100	4	4
6.	kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	1	1
7.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	1	13,52	38	40
8.	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persen	80	89	14,2	14,9
9.	Rasio Rumah dan KK	Rasio	1:15	1:9	1:4	1:4
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen	100	1	1	1
2.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	16	5	4
3.	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Persen	9	1	25	30
4.	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas	kasus	106	165	95	75



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota					
5.	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Jenis	0	71	10	12
6.	Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari	Kali	3	3	3	3
7.	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	91	92	93	94
8.	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda	6	3	9	9
9.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	0	16	18	18
10.	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Perda	7	3	9	10
11.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS	Orang	0	2	5	8
12.	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Orang	267	0	400	440
13.	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	Jenis	0	5	33	33
14.	Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP	Unit	4	5	6	7
15.	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Orang	50	484	454	454
16.	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran	Persen	10	37,2	90	95
17.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	91	92	93	94
18.	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	90	2	1,50	1,75
19.	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Persen	53	1,88	80	90
20.	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persen	20	100	100	100
21.	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	Persen	100	100	70	73
22.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencan	Persen	124	100	100	100
23.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB	Persen	10	100	100	100
24.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	85	100	100	100
25.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	Persen	70	75	75	80
26.	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	Persen	163	100	100	100
27.	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	n.a	100	100	100
28.	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal	Persen	n.a	100	100	100
29.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Persen	91	33,33	93	94
30.	Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Persen	10	143	0,03	0,03



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
31.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	0	0	100	100
32.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	20	100	100	100
33.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	20	26775	54500	55000
34.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	13	64,29	100	100
35.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	13	89	100	100
36.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	85	100	100	100
37.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen	124	98	100	100
38.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan	Persen	100	100	100	100
39.	Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Kelurahan/Desa	Unit	3	0	3	3
40.	Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan	Orang	0	0	54	54
41.	Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan	Unit	240	1	3	3
42.	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	Jenis	3	n.a	2	2
43.	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum	SOP	4	13,58	6	7
44.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit/ Kejadian	13	13,58	13	13
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	Keluarga	137	0	90	90
2.	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Jiwa	90	7640	1851	1850
3.	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Unit	1	0	1	0
4.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan	Orang	3116	2018	20	20
5.	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	Paket	274	1849	20	20
6.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	Layanan	1	1	1	1
7.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia	Orang	47	52	35	35



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
8.	Jumlah Pekerja Sosial Professional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	Orang	47	52	14	14
9.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Orang	0	1	5	5
10.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau	Orang	3476	3128	84	84
11.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	Orang	1	1	2	2
12.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	Orang	0	5	5	5
13.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	Orang	36	75	30	30
14.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2083	1940	90	90
15.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter	Orang	0	0	50	50
16.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Orang	1	1	5	5
17.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan sesuai Standar Gizi	Paket	1215	124	100	100
18.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti	Paket	0	124	10	10
19.	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	Panti/ Rumah Singgah	0	0	0	0
20.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah	Orang	0	0	0	0
21.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk	Tim	0	0	0	0
22.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100
23.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100
24.	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	40	50	50	50
25.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Persen	77,21	75.44	51,13	52,22
26.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Persen	100	100	100	100



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
27.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Persen	89,25	87,80	59,84	59,73
28.	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	0	100	100	100
29.	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100
30.	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100
31.	Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100
II. URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	95,10	54,79	0,8	0,8
2.	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	1
3.	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang	0	0	15	20
4.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	BKK	0	0	6	6
5.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Orang	0	0	15	20
6.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	Orang	0	0	15	20
7.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata	Orang	0	0	15	20
8.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	1	1
9.	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	3	6	5	5
10.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	1	0	1	1
11.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	Orang	561	610	699	749
12.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	0	0	10	10
13.	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Layanan	427	609	379	379
14.	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Perjanjian	0	1	3	3
15.	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/ SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	Kasus	0	0	0	0
16.	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Kasus	0	0	0	0
17.	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	80,87	74,10	80,41	80,43



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
18.	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100	100
19.	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	Persen	0	0	1	1
20.	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Persen	0	100	100	100
21.	Persentase LPK yang Terakreditasi	Persen	0	0	100	100
22.	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	Persen	100	100	33,33	33,33
23.	Persentase Penyerapan Lulusan	Persen	15,05	19,28	39,19	41,89
24.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	0	0	0	0
25.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	5	26,92	4	4
26.	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	Persen	0	57,14	4	5
27.	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Persen	0	3,85	4	4
28.	Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	34,00	92	43	45
29.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,26	1,02	0,01	0,01
30.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi	Persen	28	0,15	40	50
31.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	46,88	67,35	96	98
32.	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	Persen	3,31	1,81	0,01	0,01
33.	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	94,85	95,95	96	98
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih	Kader	10	8	72	72
2.	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi	Kebijakan	1	10	1	2
3.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan	Lembaga	42	2	1	1
4.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota)	Lembaga	6	2	1	1
5.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal	Lembaga	6	2	1	1
6.	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan	Lembaga	1	2	1	1
7.	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG	Lembaga	10	21	30	30
8.	Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Media	6	6	8	9



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
9.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	Ormas/ LSM	1	7	20	25
10.	Jumlah Program PUG Ada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	Program	31	41	45	50
11.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	100	100
12.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100
13.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	24,95	8,65	2,50	2,75
14.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen	0	0	0,05	0,05
15.	Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	6,06	2	9,12	9,13
16.	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	Persen	100	100	100	100
17.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100	100	100	100
18.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100
19.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	Nilai	0	0	0,05	0,05
20.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	Nilai	0,024	0,00	0,17	0,16
21.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Nilai	0,046	0,00	34,55	34,50
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)	Persen	36,95	87,68	34,05	34,13
2.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kkal/kap/h r	2031	1.868	2100	2100
3.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Sample	66	65	68	68
4.	Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	9,4	6,4	16	16
5.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	CV Rasio	CV≤10%	CV≤5,3%	CV=10%	CV=10%
6.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	LPM	0	0	1	1
7.	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	1	1	1
8.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Regulasi	1	1	1	1
9.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Jiwa	550	500	835	835



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
1.	Dokumen Izin Membuka Tanah	Ada/Tidak	Ada/70	Tidak	Ada	Ada
2.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada/4	Ada/3	Ada	Ada
3.	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten	Persen	25	0	14,93	19,91
4.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	100	100	88	90
5.	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	80	85
6.	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak	Ada	Ada
7.	SK Izin Lokasi yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali Kota	Ada/Tidak	Ada/13	Tidak	Ada	Ada
8.	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Ada	Ada/13	Ada/12	Ada	Ada
9.	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Ada/Tidak	Ada/145 ha	Tidak	Ada	Ada
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1.	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rekomenda si	10	9	10	10
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	79,30	74,29	71,64	71,87
3.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	10	8	109	109
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Pengaduan	5	5	5	5
5.	Peningkatan Baku Mutu Air	Persen	64	60	100	100
6.	Peningkatan Baku Mutu Udara	Persen	87,49	89,37	100	100
7.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Persen	32,29	35,49	55	60
8.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	42	32,09	36,23	36,70
9.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Meter Kubik	5626	41,87	45,98	45,98
10.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	2	1	1	1
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	OPD	18	23	30	36
2.	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	100
3.	Penerbitan Akta Kematian	Persen	100	100	95	95
4.	Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100	100	85	85
5.	Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100	100	90	90



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
6.	Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	85	85	90
7.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,79	96,38	83	84
8.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	72,43	87,73	90	93
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Desa	2	5	6	8
2.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Persen	18,52	22,22	27,78	31,48
3.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	3	3	4
4.	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	Desa	21	26	30	35
5.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	Lembaga	92	109	120	135
6.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat	Lembaga	8	17	15	18
7.	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	Desa	30	54	50	60
8.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	70,45	97,44	50	54,28
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	Angka	23,30	35	18,05	16,82
2.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Angka	20,37	2089	24,07	24,22
3.	Jumlah Stakeholders /Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	Angka	3	3	1	1
4.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	Angka	23,5	4,461	21	22
5.	Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Angka	1	1	1	1
6.	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern	Persen	85	75	100	100
7.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	Persen	100	100	100	100
8.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	18,89	0	13,50	13,00
9.	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah	Persen	72,48	0	67,82	68,69
10.	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persen	74,01	100	99,53	99,75
11.	Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persen	85	70	100	100
12.	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	Persen	86,02	52,09	48,00	48,80
13.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Persen	72,48	74,32	79,89	81,31



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
14.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	72,48	22,06	60,96	61,62
15.	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	1	0	1	1
16.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,76	2,43	2,35	2,30
17.	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Rasio	18,46	0	100	100
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	80	83	75	80
2.	Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Persen	1	38.23	75	100
3.	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota	Persen	4	14.56	75	93
4.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	33,75	90	65	70
5.	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	Persen	0	0	40	60
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	17,40	25	30	35
2.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Persen	80	60	65	70
3.	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	50	82,65	84,69	87,76
4.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	22	13	14	15
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90	72,22	83,33	92,59
6.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	1	65,21	70,36	74,40
7.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	Persen	86,67	100	60	65
8.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo	Persen	90	72,22	83,33	92,59
9.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Persen	90	93	93,5	94
10.	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90	72,22	83,33	92,59
11.	Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	1	6	6,5	7
12.	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
13.	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Persen	1,20	0,78	1	1
2.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	29	11,70	16,88	17,50
3.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirasausaha	Persen	6,67	10,61	5,85	5,95
4.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	7	76,00	12,77	14,89
5.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	n.a	0	78,00	79,00
6.	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	20,71	11,70	26,30	27,42
7.	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1,34	5,73	0,97	1,22
8.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Persen	120	2,87	1,17	1,34
9.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran	Persen	4,85	1,14	2,74	2,81
10.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	Persen	1	2,59	13,63	13,89
11.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	Persen	2,20	3,22	5,68	5,74
12.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	Persen	100	69,46	85,00	86,00
13.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1,18	1,25	3,75	4,38
14.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan	Persen	20,12	21,25	23,75	24,38
15.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	20,12	21,25	23,75	24,38
16.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	10,65	32,75	18,13	18,75
17.	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	75,71	25,73	13,75	14,38



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
18.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	13,69	12,87	16,88	17,50
19.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	49,54	38,91	46,92	53,01
20.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	32,86	25,71	55,10	57,14
21.	Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	1	2,00	5,63	6,25
22.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	15,09	3,1	2,84	3,17
23.	Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	7,23	2,92	7,92	8,58
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Promosi	1	2	1	1
2.	Kenaikan Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	13,93	38,11	12,44	12,57
3.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Koordinasi	131	270	264	317
4.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	0	0	1	1
5.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan	4	4	4	4
6.	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	4	2	2
7.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	Perusahaan	58	316	55	60
8.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin	2334	2616	890	910
9.	PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda	1	0	0	0
10.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	13,93	41,7	12,38	12,43
11.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	SOP	1	0	1	0
12.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	12
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1.	Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah	Event	70	3	2	3
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	50	18	5	3
3.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	70	13,72	50	50
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
1.	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Buku Profil Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
1.	Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	0	0	3	3
2.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang	OPK	6	20	1	1



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
	Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)					
3.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)	Persen	20	8	5	5
4.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	OPK	25	16	12	12
5.	Jumlah SDM, Lembaga dan Ppranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)	Orang	0	20	20	20
6.	Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Tim	1	0	1	1
7.	Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman	SDM	2	4	3	3
8.	Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Item	10	10	10	10
9.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota	Jenis	0	1	1	1
10.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	Pertunjukan	4	16	2	2
11.	Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseum Kabupaten/Kota	SDM	0	-	2	2
12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman	Jenis	1	1	1	1
13.	Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Event	0	6	1	1
14.	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemingkatan dan Penghapusan)	Item	50	10	10	10
15.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Item	10	10	10	10
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	71,89	82,45	77	78
2.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0	0	77	78
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
1.	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	123	47,91	75	80
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	1	50	13,17	17,84
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	1	75	22,5	28,75
III.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1.	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi	Ekor	135.000	60.000	50.000	50.000



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
2.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Kelompok	7	23	5	5
3.	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/ Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha/ Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan)	Orang	160	229	145	155
4.	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	RTP	24	38	10	10
5.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber Data: One Data KKP)	Ton	139.138,65	139.468,64	141000,23	142218,24
6.	Produksi Sektor Perikanan	Ton	139.138,65	139.468,64	141000,23	142218,24
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
1.	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Destinasi	2	3	2	2
2.	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi	Event	0	0	1	1
3.	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	Event	1	3	1	1
4.	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	DTW	2	3	2	2
5.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	28.037	31291	27.000	28.000
6.	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat	Pokdarwis	2	3	2	2
7.	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	Event	1	3	2	2
8.	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota	TDUP	2	5	2	2
9.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	57	227	200	220
10.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Rupiah	3,6	3,5	2,5	2,6
11.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	0,46	117,97	3	3
12.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Persen	35	31.064	13	16
13.	Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan	Persen	26	112	5	5
14.	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan	Persen	200	100	80	80
15.	Rata-rata Lama Tinggal Wisata	Hari	3	3	6	7
16.	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	12	10	15	16
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
1.	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	Persen	55	60	70	80
2.	Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ ditanggulangi	Ha	6,0	20	6,5	8,0
3.	Persentase penurunan angka penyakit ternak	Persen	-0,17	0,49	2,2	2,1
4.	Persentase Prasarana yang Digunakan	Persen	72	102,5	73	74



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
5.	Prasarana Pertanian yang Digunakan	Unit	46	41	41	42
6.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	6.526	7.904	149641	157123
7.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Persen	2,66	5,56	5,92	6,21
8.	Sarana Pertanian yang Diberikan	Unit	5	5	5	5
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1.	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Persen	45	93,11	87	88
2.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Persen	22	8,38	1,15	1,32
3.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persen	250	2,6	1,67	1,79
4.	Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	Persen	3,57	9,43	8,70	4,36
5.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	n.a	0	1,69	3,39
6.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	75	93,11	87	88
7.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	20	4,92	2,09	3,00
8.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	55	3,19	2,37	2,40
9.	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	15,38	15,38
10.	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	Persen	100	100	84	85
11.	Persentase Penerbitan TDG	Persen	91,30	100	84	85
12.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	75	40,91	20,83	20,83
13.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Persen	36,36	60,00	16	17
14.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan	Persen	100	0	80,60	82,09
15.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan	Persen	13,19	0	13,45	13,52
16.	Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital	Persen	2	2	3	4
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
1.	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yg Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Persen	1,31	25,92	44,88	45,05
2.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	0	100	84	85
3.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan	Persen	100	100	84	85



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
	Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait					
4.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	100	79	80
5.	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	Persen	0	100	84	85
6.	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan	Persen	100	100	84	85
7.	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	100	79	80
8.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Persen	1	15,86	54	55
9.	Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan	Persen	60,78	55,94	42,28	48,48
10.	Persentase terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA	Persen	30	50	54	55
11.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota	Persen	26,98	58,82	30,73	30,96
12.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Laporan	4	2	2	2
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
1.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	1	1	1
2.	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Satuan Permukiman	2	3	2	2
3.	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Satuan Permukiman	6	6	2	2
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,41	3,71	3,48	3,49
2.	Indeks Pengadaan Barang / Jasa	Persen	39,20	62,63	56	59
3.	Nilai LAKIP	Nilai	80,27	73,98	76,90	77,00
4.	Nilai LPPD	Nilai	3,3178	3,17	3,3400	3,3400
5.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	3,6	69	3,6	3,7
6.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	12	13,6	14	15
7.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	35,89	23	15	15
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
5.01.	PERENCANAAN					
1.	Indek Kualitas Perencanaan	Nilai	7,4	7,6	7,9	8,0
2.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persen	49,55	51,88	54,75	55,29
5.02.	KEUANGAN					
1.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	98,21	61,77	25	25
2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	5	68,59	55	57
3.	Indeks Pengelolaan Aset	Persen	90	94,59	65	65
4.	Indeks Pengelolaan Keuangan	Persen	100	70,48	79,325	79,455
5.	Manajemen Aset	Persen	80	100	85	88
6.	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	0,41	14,71	73	75
8.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	26,78	16,56	30	33
9.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	57,84	58,57	73	75
10.	Rasio PAD	Persen	67,02	7,68	20	20
11.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Rasio	0,19	1,52	0,02	0,02
5.03.	KEPEGAWAIAN					
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	53,21	65	56	58
2.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	45,02	89	85	87
3.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	20,59	22,91	24	29
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)	Persen	64,56	69,29	77	83
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN					
1.	Persentase Rekomendasi yang Diakomodir	Persen	25	40,85	20	25
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH					
1.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	16	29	36	46
2.	Jumlah peserta sosialisai wasbang	Jumlah	50	0	371	371
3.	Jumlah Sosialisasi /Rapat /Monitoring	Jumlah	50	50	50	50
4.	Pembinaan Partai Politik	Parpol	9	9	9	10
5.	Tercapainya Sinegitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial	Dinas/Instansi	15	15	15	15



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023	2024	2025
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,63	2,72	2,9155	3,0155
2.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	39,16	37,10	60,0	63,0

Indikator Utama Pemerintah (IUP) pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 :



Tabel. T-VI.1
Indikator Utama Pemerintah (IUP) Kabupaten Natuna
Tahun 2025 - 2045

No	URUSAN	INDIKATOR (45 INDIKATOR)	SATUAN	TARGE- T PROVIN SI 2045	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TARGET																
															Periode I		Periode II					Periode III					Periode IV				
															2025- 2029	2030	2031	2032	2033	2030-2034	2035	2036	2037	2038	2035-2039	2040	2041	2042	2043	2044	2040-2045
1	KESEHATAN	Uraa Harapan Hidup	tahun	80,54	64,81	73,57	73,65	73,50	74,15	74,32	74,51	74,71	74,91	75,11	75,31	75,51	75,71	75,91	76,11	76,31	76,50	76,70	76,90	77,10	77,30	77,50	77,70	77,90	78,10	78,30	78,49
	KESEHATAN	Kesehatan Ibu dan anak																													
2	KESEHATAN	a) Angka Kematian Ibu (per kasus kelahiran hidup)	per 100.000 penduduk	12	1	2	10,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	KESEHATAN	b) Persentase Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	5,8	17,36	17,36	17,8	18,00	16,10	15,98	15,39	15,04	14,68	14,33	13,97	13,62	13,27	12,91	12,56	12,20	11,85	11,49	11,14	10,79	10,43	10,08	9,72	9,37	9,02	8,66	8,31
3	KESEHATAN	Cakupan prevensi dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	100	95,47	62,75	42,42	51,75	64,19	67,13	70,2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	KESEHATAN	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	100	93,6	93,1	55,2	56,8	63,7	65,4	65,9	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4	KESEHATAN	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,5	100	100	100	100	102,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	PENDIDIKAN	- Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk																													
	PENDIDIKAN	a. Literasi Membaca	%	79,23 81,23																											
	PENDIDIKAN	SD			n.a	n.a	n.a	59,14	62,79	64,79	66,79	68,79	70,79	72,79	66,79 - 74,79	75,79	76,79	77,79	78,79	75,79 - 79,79	80,79	81,79	82,79	83,79	80,79 - 84,79	85,79	86,79	87,79	88,79	89,79	85,79 - 90,79
	PENDIDIKAN	SMP			n.a	n.a	n.a	66,56	73,59	75,59	77,59	79,59	81,59	83,59	77,59 - 85,59	86,49	87,89	88,29	89,19	86,49 - 90,09	90,84	91,59	92,34	93,09	90,84 - 93,84	94,49	95,14	95,79	96,44	97,09	94,49 - 97,14
	PENDIDIKAN	b. Numerasi	%	72,71 74,71																											
	PENDIDIKAN	SD			n.a	n.a	n.a	43,52	51,27	53,27	55,27	56,52	57,77	59,02	55,27 - 60,27	61,32	62,37	63,42	64,47	61,32 - 65,57	66,47	67,42	68,37	69,32	66,47 - 70,27	71,14	72,01	72,88	73,75	74,62	71,14 - 75,49
	PENDIDIKAN	SMP			n.a	n.a	n.a	44,13	66,57	68,57	70,57	71,89	72,81	73,93	70,57 - 75,05	76,1	77,15	78,2	79,25	76,10 - 80,30	81,25	82,2	83,15	84,1	81,25 - 85,05	85,92	86,79	87,66	88,53	89,4	85,92 - 90,27
	PENDIDIKAN	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	13,82 13,92	8,72	8,73	8,92	8,96	9,08	9,39	9,54	9,68	9,82	9,96	10,11	10,25	10,39	10,53	10,68	10,82	10,96	11,10	11,25	11,39	11,53	11,67	11,82	11,96	12,10	12,24	12,38
	PENDIDIKAN	c) Harapan Lama Sekolah	tahun	14,68 - 14,73	13,89	13,9	13,91	13,92	13,93	13,94	13,95	13,99	14,03	14,06	14,10	14,14	14,18	14,22	14,25	14,29	14,33	14,37	14,41	14,44	14,48	14,52	14,56	14,60	14,63	14,67	14,73



No	URUSAN	INDIKATOR PENDUKUNG (45 INDIKATOR)	SATUAN	TARGE T PROVIN SI 2045	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Baseline 2025	2026	2027	2028	TARGET																
															Period																
															Period I 2025-2029					2030	2031	2032	2033	Period II 2030-2034			2035	2036	2037	2038	Period III 2035-2039
		d) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun (%)	tahun		n.a	59,05	67,01	69,46	55,45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	BPJID	Tingkat Kemiskinan (%)	%	0,09 0,34	4,42	4,43	4,95	5,32	5,25	4,99	4,74	4,50	4,28	4,06	3,86	3,67	3,48	3,31	3,14	2,99	2,84	2,70	2,56	2,43	2,31	2,20	2,09	1,98	1,88	1,79	1,70
7	TENAGA KERJA	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Kermagakerjaan (%)	%	96,94	99,87	99,86	47,71	53,47	54,95	lum	54,96	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,98	54,99	55,00	55,00	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	55,60	55,70
8	TENAGA KERJA	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	85																											
9	INDUSTRI	Rasio PDRB Industri Pengolahan		48,13 51,06	0,74	0,91	0,82	0,74	0,78	0,82	0,86	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,21	1,27	1,33	1,40	1,47	1,54	1,62	1,70	1,79	1,88	1,97	2,07	2,17	2,28
10		Pengembangan Pariwisata																													
	PARAWISATA	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		4,06	0,49	0,55	0,51	0,46	0,5	0,53	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,74	0,78	0,81	0,86	0,90	0,94	0,99	1,04	1,09	1,15	1,20	1,26	1,33	1,39	1,46
	PARAWISATA	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	6.994	166	30	51	57	227	237	247	257	267	277	287	297	307	317	327	337	347	357	367	377	387	397	407	417	427	437	447
12	PERDAGANGAN	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD																													
	PERDAGANGAN	a) Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota (%)	%	17,71	40,32	51,82	54,32	56,82	59,32	60,34	61,36	62,38	63,40	64,42	65,44	66,46	67,48	68,50	69,52	70,54	71,56	72,58	73,60	74,62	75,64	76,66	77,68	78,70	79,72	80,74	80,74
	INDUSTRI	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota (%)	% Pembagi	8	19,95	23,05	26,01	7,73	25,33	25,58	25,84	26,10	26,36	26,62	26,88	27,16	27,43	27,70	27,98	28,26	28,54	28,83	29,12	29,41	29,70	30,00	30,30	30,60	30,91	31,22	31,53
	PERDAGANGAN	c) Rasio kewirausahaan Daerah		9,17	4,00	3,60	4,06	4,28	2,23	2,34	2,46	2,58	2,71	2,85	2,99	3,14	3,30	3,46	3,64	3,82	4,01	4,21	4,42	4,64	4,87	5,11	5,37	5,64	5,92	6,22	6,22
	PERDAGANGAN	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB		6,5	0,88	0,91	0,93	0,95	0,85	0,89	0,94	0,98	1,03	1,08	1,14	1,20	1,26	1,32	1,38	1,45	1,53	1,60	1,68	1,77	1,86	1,95	2,05	2,15	2,26	2,37	2,37
	SETDA	e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	%	5,20	-7,8	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
13	TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,5 - 6,5	3,33	4,10	5,15	4,15	4,05	4,04	4,03	4,02	4,01	4,00	3,99	3,98	3,97	3,96	3,95	3,94	3,93	3,92	3,91	3,9	3,89	3,88	3,87	3,86	3,85	3,84	3,83



No	URUSAN	INDIKATOR PENDUKUNG (45 INDIKATOR)	SATUAN	TARGE T PROVIN SI 2045	2019	2020	2021	2022	2023	Baseline		2024	2025	2026	2027	2028	TARGET																												
																										Periode I		Periode II					Periode III					Periode IV							
										2025- 2029	2030						2031	2032	2033	2030-2034	2035	2036	2037	2038	2035-2039	2040	2041	2042	2043	2044	2040-2045														
14	TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	65,50	35,70	36,23	39,05	37,40	40,05	40,65	41,63	42,62	43,61	44,59	45,58	46,57	47,55	48,54	49,53	50,51	51,50	52,49	53,47	54,46	55,45	56,43	57,42	58,41	59,39	60,38	61,37														
15	BPJID	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah			n.a	n.a	n.a	0,68	0,57	0,65	0,70	0,72	0,75	0,80	0,85					0,95					1,00							1,10													
16	KOMINFO	Persentase penduduk berumur 5 Tahun keatas yang mengakses Internet			51,9	64,1	55,2	57,3	78,14	62,5	65,5	67,5	69,6	72,7	73,3	75,2	76,2	77,3	78,4	79,1	79,8	80,1	80,7	81	82,2	83,3	84,2	85,6	87,6	88,6	90,01														
17	BPJID	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	32,3	16,39	19,15	16,39	15,34	17,16	17,59	18,03	18,48	18,94	19,41	19,90	20,40	20,91	21,43	21,97	22,52	21,95	21,40	20,87	20,35	19,84	19,34	18,86	18,39	17,93	17,48	17,04														
18	BPJID	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (% PDRB)	%	131,1	55,11	48,27	54,52	57,47	53,09	54,19	55,29	56,39	57,49	58,59	59,69	60,79	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	68,49	69,59	70,69	71,79	72,89	73,99	75,09	76,19	77,29														
19		Kota dan Desa Maju Inklusif dan Berkelanjutan																																											
	PERKUM	a) Rumah tangga dengan akses hantam layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	100	n.a	n.a	88,68	87	90,2	92,72	93,14	93,39	93,76	94,12	94,65	95,01	95,36	95,67	96,00	96,23	96,86	97,17	96,73	97,80	98,18	98,48	98,79	99,09	99,39	99,69	100,00														
										92,72	93,14	93,39	93,76	94,12	94,65	95,01	95,36	95,67	96,00	96,23	96,86	97,17	96,73	97,80	98,18	98,48	98,79	99,09	99,39	99,69	99,98														
									90,00	95,00	95,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00														
	PEMBERDAYAAN DESA	b) Persentase Desa Mandiri	%		0	0	0	1,43	4,29	7,14	8,57	14,29	17,14	20,00	22,86	22,86	25,71	28,57	31,43	31,43	32,86	34,29	35,71	37,14	37,14	38,57	40,00	42,86	45,71	48,57	50,00														
		Rasio Konektivitas																																											
20	SETDA	Indeks Reformasi Hukum	indeks	84,62					87,90	88,22	88,55	88,87	89,19	89,51	89,84	90,16	90,48	90,80	91,13	91,45	91,77	92,10	92,42	92,74	93,06	93,39	93,71	94,03	94,35	94,68	95,00														
21	KOMINFO	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	5	29,71	29,71	2,24	2,50	3,19	3,27	3,35	3,44	3,52	3,60	3,68	3,77	3,85	3,93	4,01	4,10	4,18	4,26	4,34	4,42	4,51	4,59	4,67	4,75	4,84	4,92	5,00														
22	SETDA	Indeks Pelayanan Publik	indeks	5	3,43	3,35	3,87	4,16	2,84	2,94	3,04	3,13	3,23	3,33	3,43	3,53	3,63	3,72	3,82	3,92	4,02	4,12	4,21	4,31	4,41	4,51	4,61	4,71	4,80	4,90	5,00														
23	INSPEKTORAT	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	nilai	89,42					76,80	77,40	78,00	78,60	79,20	79,80	80,40	81,00	81,60	82,20	82,80	83,40	84,00	84,60	85,20	85,80	86,40	87,00	87,60	88,20	88,80	89,40	90,00														
24	SATPOL	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	90,87	132	64,00	64,00	65,00	65,00	99,80	99,70	99,70	99,70	99,65	99,65	99,65	99,50	99,50	99,50	99,40	99,40	99,40	99,30	99,30	99,30	99,15	99,15	99,15	99,00	99,00	99,00														



No	URUSAN	INDIKATOR PENDUKUNG (45 INDIKATOR)	SATUAN	TARGE T PROVIN SI 2045	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Baseline 2025	2026	2027	2028	TARGET																	
															Periode I 2025-2029					2030	2031	2032	2033	Periode II 2030-2034			2035	2036	2037	2038	Periode III 2035-2039	
	SATPOL	Pemerataan Rumah tangga yang memera khawatir saa bejalan sendirian di malam hari			70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	90,80	99,70	99,70	99,70	99,65	99,65	99,65	99,50	99,50	99,50	99,40	99,40	99,40	99,30	99,30	99,30	99,15	99,15	99,15	99,00	99,00	99,00	
25	KESBANGPOL	Pemerataan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%		80,19	80,19	83,96	83,96	83,96	86,01	86,01	86,01	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	85,43	
	KESBANGPOL	a) Pilpres	%		84,49	84,49	84,49	84,49	84,49	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
	KESBANGPOL	b) Pilg	%		81,08	81,08	81,08	81,08	81,08	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
	KESBANGPOL	c) Pemilihada	%		75,00	75,00	86,30	86,30	86,30	88,03	88,03	88,03	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	
26	KEUANGAN	d) Rasio pajak daerah terhadap PDRB		1,4	0,07	0,06	0,06	0,05	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40	0,44	0,48	0,53	0,58	0,64	0,71	0,78	0,86	0,94	1,03	1,14	
27	DISPERINDAG	Tingkat Inflasi (%)	%	1,0- 3,1	1,51	0,83	0,42	4,96																								
28	KEUANGAN	Indeks Keuangan		99,03																												
		kontribusi sektor jasa keuangan PDRB																														
29	KEUANGAN	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	n.a	1,8445	2726	2,630	2,720	2,7782	2,8364	2,8945	2,9527	3,0109	3,0691	3,1273	3,1855	3,2436	3,3018	3,3600	3,4182	3,4764	3,5345	3,5927	3,6509	3,7091	3,7673	3,8255	3,8836	3,9418	4,0000		
30	SATPOL	Pemerataan potensi konflik terselesaikan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Pemerataan penegakan perda																														
		Pemerataan pencapaian RANHAM																														
		Angka Kriminalitas					84	82	71																							
31	KEBUDAYAAN	Indeks pembangunan kebudayaan	%	60,58 - 70,76	60,91	59,24	52,12	56,5	53,12																							
		Pemerataan benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendafaran)		21,52	0	0	0	0	0	0,00	1,1	2,7	5,3	8,0		10,7	13,4	16,0	18,7		21,4	24,1	26,7	29,4		32,1	34,8	37,4	40,1	42,8		



No	URUSAN	INDIKATOR PENDUKUNG (45 INDIKATOR)	SATUAN	TARGE PROVISI 2045	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Baseline 2025	2026	2027	2028	TARGET																		
															Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV			
															2025-2029	2030	2031	2032	2033	2030-2034	2035	2036	2037	2038	2035-2039	2040	2041	2042	2043	2044	2040-2045		
		Penerapan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan		37,20	9,09	9,09	12,12	12,12	12,12	12,12	14,05	15,00	15,50	16,00			17,50	18,50	19,00	20,50		21,50	22,00	23,00	24,50		25,50	26,00	27,50	28,50	30,00		
32	KESBANGPOL/ Kemnag	Indeks Kemudahan Umot Beragama	%	91,65 - 93,18	72,80		76,20	85,78	83,58																								
33	KELUARGA BERENCANA	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		77,37 - 77,38																													
		IBANGGA						64,95																									
	KELUARGA BERENCANA	Indeks Pembangunan Keluarga			n.a	n.a	n.a	57,43	61,36	63,46																							
34	KELUARGA BERENCANA	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,19 - 0,17	0,048	0,037	0,025	0,035	0,028	0,002	0,477	0,453	0,430	0,409	0,388	0,369	0,350	0,333	0,316	0,300	0,285	0,271	0,257	0,245	0,232	0,221	0,210	0,199	0,189	0,180	0,171		
35	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks pengetahuan kesehatan lingkungan Hayati	0,104	0,023	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0,091	0,093	0,096	0,098	0,101	0,103	0,105	0,108	0,110	0,113	0,115	0,118	0,120	0,122	0,125	0,127	0,130	0,132	0,135	0,137	0,140		
36		Kualitas Lingkungan Hidup																															
	LINGKUNGAN HIDUP	a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,73	70,54	67,78	49,19	73,9	71,31	71,64	71,71	71,78	71,84	71,91	71,98	72,05	72,11	72,18	72,25	72,32	72,39	72,45	72,52	72,59	72,66	72,73	72,79	72,86	72,93	73,00	73,06		
	PEKERJAAN UMUM	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	60	NA	NA	NA	NA	9,05	9,04	10,63	11,42	12,21	13,00	13,79	14,58	15,37	16,16	16,95	17,74	18,53	19,32	20,11	20,90	21,69	22,48	23,27	24,06	24,85	25,64	26,43		
	PEKERJAAN UMUM	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	%	60	63,14	63,77	64,41	65,05	65,70	66,36	67,02	67,69	68,37	69,06	69,75	70,44	71,15	71,86	72,58	73,30	74,04	74,78	75,52	76,28	77,04	77,81	78,59	79,38	80,17	80,97	81,78		
	LINGKUNGAN HIDUP	c). Pengolahan sampah (Terdapat Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah) (%)	%	90	80	75	74	73	72	71	71,07	71,14	71,20	71,27	71,34	71,41	71,47	71,54	71,61	71,68	71,75	71,81	71,88	71,95	72,02	72,09	72,15	72,22	72,29	72,36	72,42		
	LINGKUNGAN HIDUP	d). Progres rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)		100	60	62	65	66	68	70	70,07	70,14	70,20	70,27	70,34	70,41	70,47	70,54	70,61	70,68	70,75	70,81	70,88	70,95	71,02	71,09	71,15	71,22	71,29	71,36	71,42		
37		Ketersediaan Energi, Air dan Pangan																															
		a). Ketersediaan Energi							673,912																								
	SETDA	- Konsumsi listrik per kapita	kwh	6000	644,67	465,97	468,74	674,27	680,39	680,39	730,00	680,39	680,39	707,40	707,40	707,40	707,40	707,40	707,40	736,17	736,17	736,17	736,17	754,80	754,80	754,80	754,80	754,80	774,52		1400		



No	URUSAN	INDIKATOR PENDUKUNG (45 INDIKATOR)	SATUAN	TARGE T PROVIN SI 2045	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Baseline 2025	2026	2027	2028	TARGET																	
															Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV		
					2025- 2029	2030	2031	2032	2033	2030-2034	2035	2036	2037	2038	2035-2039	2040	2041	2042	2043	2044	2040-2045											
	PANGAN	b). Prevalensi ketidalcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	2,32	8,55	11,39	11,67	15,53	15,94	15,57	15,21	14,86	14,51	14,17	15,57 - 13,85	13,52	13,21	12,9	12,61	12,31	12,03	11,75	11,48	11,21	10,95	10,7	10,45	10,2	9,97	9,74	9,51	
		c) Ketahanan Air																														
	PEKERJAAN UMUM	- Kapasitas air baku (m3/detik)	m3/detik	3	0,0545	0,0545	0,0545	0,1445	0,1445	0,18	0,18	0,3246	0,3246	0,3246	0,3246	0,4778	0,4778	0,4778	0,4778	0,4778	0,63858	0,63858	0,63858	0,63858	0,80863	0,80863	0,80863	0,80863	0,80863	0,98725		
	PEKERJAAN UMUM	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	100	72,34	73,40	74,47	75,53	76,60	77,66	78,72	79,79	80,85	81,91	82,98	84,04	85,11	86,17	87,23	88,30	89,36	90,43	91,49	92,55	93,62	94,68	95,74	96,81	97,87	98,94	100,00	
38	BENCANA	- Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	90,40 - 72,88	112,40	112,40	112,40	112,40	112,40	111,38	110,36	109,35	108,33	107,31	106,29	105,27	104,25	103,24	102,22	101,20	100,18	99,16	98,15	97,13	96,11	95,09	94,07	93,05	92,04	91,02	90,00	
39	LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemukiman Emisi GRK (%)																														
	LINGKUNGAN HIDUP	a) Kumulatif	ton CO2	29,07	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,57	6,64	6,70	6,77	6,84	6,91	6,97	7,04	7,11	7,18	7,25	7,31	7,38	7,45	7,52	7,59	7,65	7,72	7,79	7,86	7,92	
	LINGKUNGAN HIDUP	b) Tahunan	%	72,29	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	10,35	10,42	10,48	10,55	10,62	10,69	10,75	10,82	10,89	10,96	11,03	11,09	11,16	11,23	11,30	11,37	11,43	11,50	11,57	11,64	11,70	



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna. Dalam hal ini prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati Natuna dan arah kebijakan tahun 2025 dalam RPJMD Tahun 2021-2026, serta prioritas dan program strategis nasional tahun 2025.

RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. RKPD menjadi pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap penganggaran RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pada tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilengkapi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi APBD dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. DPA akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dilakukan pengendalian



dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi masing-masing program dan kegiatan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 yang harus ditaati dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada RKPD, dan berkewajiban menjamin konsistensi antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2025 ke dalam Renja Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.
4. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Natuna tahun 2025 agar berpedoman pada RKPD Tahun 2025.
5. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.



6. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
7. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2024.

Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Natuna tahun 2025 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya berperan dalam pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**.

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI